



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG

RPJMD

RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2025-2029





BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

5. Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7048);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Nomor 282);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

dan

BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang berpedoman kepada rencana pembangunan jangka panjang nasional.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJPD dan rencana pembangunan jangka menengah nasional.
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
9. Tujuan adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya Visi selama 5 (lima) tahun.
10. Sasaran adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan Daerah menuju tercapainya Tujuan RPJMD.

11. Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran Misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target Tujuan dan Sasaran RPJMD.
12. Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai Tujuan/ Sasaran RPJMD.
13. Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RJMD yang diperoleh dengan teknik *cascading* (penurunan) kinerja.

Pasal 2

- (1) RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun yang menjabarkan:
 - a. Visi dan Misi, program Bupati dan Wakil Bupati terpilih; dan
 - b. Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah, rencana strategis Perangkat Daerah, dan rencana kerja Perangkat Daerah.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Gambaran Umum Daerah
 - c. BAB III : Visi, Misi, dan Program Prioritas pembangunan Daerah;
 - d. BAB IV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - e. BAB V : Penutup.
- (2) Uraian RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah bidang perencanaan pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi RPJMD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERUBAHAN RPJMD

Pasal 5

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Peraturan pelaksana dan/atau Dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 26 November 2025

BUPATI TASIKMALAYA,



CECEP NURUL YAKIN

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 26 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



MOHAMMAD ZEN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2025 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA,
PROVINSI JAWA BARAT: 6/236/2025



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 ini disusun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, bahwa setiap pemerintah daerah harus menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun ke depan.

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, serta program prioritas pembangunan daerah jangka menengah untuk 5 (lima) tahun yang disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), RPJMD Provinsi Jawa Barat, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya setiap 1 (satu) tahun sekali. Pembangunan jangka menengah akan dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaannya, sehingga dapat terwujud visi Kabupaten Tasikmalaya 2025-2029: "Tasikmalaya yang Religius/Islami, Maju, Adil, dan Makmur".

Dalam proses penyusunan Dokumen RPJMD, seluruh Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan telah memberikan kontribusi yang besar sejak tahapan penyusunan Rancangan Awal sampai Penetapan RPJMD. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen RPJMD. Semoga Allah SWT selalu meridhoi dan melindungi kita dalam membangun Kabupaten Tasikmalaya.

BUPATI TASIKMALAYA,

CECEP NURUL YAKIN



DAFTAR ISI

Kata Pengantar..... i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel v

Daftar Gambar xi

Daftar Istilah xv

BAB I PENDAHULUAN..... I-1

 1.1. Latar Belakang I-1

 1.2. Dasar Hukum Penyusunan I-2

 1.3. Hubungan Antar Dokumen..... I-6

 1.4. Maksud dan Tujuan I-10

 1.5 Sistematika Penulisan I-10

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-1

 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah II-1

 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi II-1

 2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah II-1

 2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam..... II-18

 2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup II-23

 2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan .. II-28

 2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas II-33

 2.1.1.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim II-37

 2.1.1.7 Demografi..... II-55

 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-66

 2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi II-66

 2.1.2.2 Kesehatan Untuk Semua II-82

 2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata..... II-84

 2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif II-88

 2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju II-90

 2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif II-93

 2.1.3 Aspek Daya Saing..... II-100

 2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia..... II-100

 2.1.3.2 IPTEK, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi II-102

 2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru..... II-108

 2.1.3.4 Transformasi Digital II-110

 2.1.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global II-111

 2.1.3.6 Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan



Ekonomi	II-112
2.1.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro.....	II-116
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum	II-118
2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	II-118
2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial	II-120
2.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan.....	II-121
2.1.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah.....	II-122
2.1.5 Standar Pelayanan Minimal.....	II-198
2.2 Gambaran Keuangan Daerah	II-209
2.2.1 Kinerja Keuangan Daerah.....	II-212
2.2.2 Neraca Daerah.....	II-218
2.2.3 Kerangka Pendanaan.....	II-220
2.3 Permasalahan dan Isu Strategis	II-232
2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah	II-232
2.3.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-233
2.3.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-234
2.3.1.3 Aspek Daya Saing.....	II-238
2.3.1.4 Aspek Pelayanan Umum	II-243
2.3.2 Isu Strategis Daerah	II-245
2.3.2.1 Isu Menurut KLHS.....	II-245
2.3.2.2 Isu Global.....	II-251
2.3.2.3 Isu Strategis Nasional.....	II-257
2.3.2.4 Isu Strategis Provinsi Jawa Barat	II-262
2.3.2.5 Isu Strategis Kabupaten Tasikmalaya	II-266
BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	III-1
3.1 Visi dan Misi	III-1
3.1.1 Dasar Perumusan Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029	III-1
3.1.2 Visi Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029.....	III-9
3.1.3 Misi Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029	III-17
3.2 Tujuan dan Sasaran	III-20
3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan.....	III-28
3.4 Program Prioritas Pembangunan Daerah	III-45
3.4.1 Dukungan Program Daerah Terhadap Program Prioritas Nasional	III-77



3.5 Arah Kebijakan Kewilayahan	III-80
3.5.1 Kebijakan Pengembangan Kewilayahan dalam Perspektif Kabupaten	III-80
3.5.1.1 Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang	III-80
3.5.1.2 Pusat Kegiatan Kabupaten.....	III-84
3.5.1.3 Kawasan Strategis Kabupaten	III-85
3.5.2 Kebijakan Pengembangan Kewilayahan dalam Perspektif Provinsi	III-99
3.5.2.1 Pusat-pusat Permukiman	III-99
3.5.2.2 Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang	III-99
3.5.2.3 Kawasan Strategis	III-100
3.5.3 Kebijakan Pengembangan Kewilayahan dalam Perspektif Nasional	III-101
BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	IV-1
4.1 Program Perangkat Daerah.....	IV-1
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	IV-76
4.2.1 Indikator Kinerja Utama	IV-76
4.2.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	IV-79
BAB V PENUTUP	V-1
5.1 Pedoman Transisi	V-2
5.2 Kaidah Pelaksanaan	V-3



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Wilayah Administrasi Kabupaten Tasikmalaya II-3

Tabel 2.2 Ketinggian di Kabupaten Tasikmalaya II-4

Tabel 2.3 Kelerengan di Kabupaten Tasikmalaya II-6

Tabel 2.4 Sumber Mata Air di Kabupaten Tasikmalaya II-9

Tabel 2.5 Nama Situ, Lokasi dan Luas Situ di Kabupaten Tasikmalaya... II-10

Tabel 2.6 Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya di Kabupaten
Tasikmalaya II-13

Tabel 2.7 Upacara Adat di Kabupaten Tasikmalaya II-20

Tabel 2.8 Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Tingkat Nasional II-22

Tabel 2.9 Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Tingkat Provinsi II-22

Tabel 2.10 Perhitungan Daya Dukung Air Tahun 2023..... II-24

Tabel 2.11 Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2020-2024 (ton)..... II-25

Tabel 2.12 Perhitungan Daya Dukung Pangan Tahun 2023 II-26

Tabel 2.13 Timbunan Sampah Tahun 2020-2024 II-36

Tabel 2.14 Potensi Bencana di Kabupaten Tasikmalaya II-39

Tabel 2.15 Resiko Bencana Banjir per Kecamatan di Kabupaten
Tasikmalaya II-39

Tabel 2.16 Luas Bahaya dan Kelas Bahaya Banjir Bandang per Kecamatan
di Kabupaten Tasikmalaya II-41

Tabel 2.17 Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim Per Kecamatan di Kabupaten
Tasikmalaya II-42

Tabel 2.18 Potensi Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi Per Kecamatan
di Kabupaten Tasikmalaya II-43

Tabel 2.19 Potensi Bahaya Gempa Bumi Per Kecamatan di Kabupaten
Tasikmalaya II-44

Tabel 2.20 Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan Per Kecamatan
di Kabupaten Tasikmalaya II-45

Tabel 2.21 Potensi Bahaya Kekeringan Per Kecamatan di
Kabupaten Tasikmalaya II-46

Tabel 2.22 Potensi Bahaya Letusan Gunungapi Galunggung per Kecamatan
di Kabupaten Tasikmalaya II-48

Tabel 2.23 Potensi Bahaya Tanah Longsor Per Kecamatan di Kabupaten
Tasikmalaya II-49

Tabel 2.24 Potensi Bahaya Tsunami Per Kecamatan di Kabupaten
Tasikmalaya II-51



Tabel 2.25	Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024	II-57
Tabel 2.26	Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024	II-59
Tabel 2.27	Proyeksi Jumlah dan Kepadatan Penduduk Tahun 2025-2029	II-63
Tabel 2.28	Proyeksi Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025-2029	II-64
Tabel 2.29	Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2025-2029.....	II-65
Tabel 2.30	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2022-2024	II-68
Tabel 2.31	Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2022-2024	II-71
Tabel 2.32	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2022-2024	II-76
Tabel 2.33	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten/Kota Sekitar, Tahun 2022-2024	II-80
Tabel 2.34	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022-2024	II-87
Tabel 2.35	Angka Literasi dan Numerasi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022-2024	II-88
Tabel 2.36	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Tahun 2020-2024	II-89
Tabel 2.37	Perkembangan Urusan Seni Budaya Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024	II-91
Tabel 2.38	Capaian Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024	II-93
Tabel 2.39	Capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024	II-96
Tabel 2.40	Rasio Ketergantungan Kabupaten Tasikmalaya	II-101
Tabel 2.41	Perbandingan Skor Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 dengan Kabupaten/Kota Lain di Provinsi Jawa Barat.....	II-103
Tabel 2.42	Rasio Kewirausahaan Kabupaten Tasikmalaya Tahun	



2020-2024	II-105
Tabel 2.43 Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Tasikmalaya Tahun	
2020-2024	II-109
Tabel 2.44 Pembentukan Modal Tetap Bruto di Kabupaten Tasikmalaya	
Tahun 2020-2024	II-111
Tabel 2.45 Hasil Kinerja Penanaman Modal (Investasi) di Kabupaten	
Tasikmalaya Tahun 2020-2024	II-112
Tabel 2.46 Capaian Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
Tahun 2021-2023	II-121
Tabel 2.47 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten	
Tasikmalaya Tahun 2020 – 2024	II-122
Tabel 2.48 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten	
Tasikmalaya Tahun 2020-2024	II-124
Tabel 2.49 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan	
Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 –	
2024	II-130
Tabel 2.50 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan Rakyat	
dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya Tahun	
2020-2024	II-132
Tabel 2.51 Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban	
Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya	
Tahun 2020-2024	II-133
Tabel 2.52 Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial Kabupaten	
Tasikmalaya Tahun 2020-2024	II-135
Tabel 2.53 Capaian Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kabupaten	
Tasikmalaya Tahun 2020-2024	II-137
Tabel 2.54 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan	
dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya Tahun	
2020-2024	II-139
Tabel 2.55 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pangan Kabupaten	
Tasikmalaya Tahun 2020-2024	II-141
Tabel 2.56 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanahan Kabupaten	
Tasikmalaya Tahun 2020-2024	II-142
Tabel 2.57 Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup	
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024	II-144
Tabel 2.58 Capaian Indikator Kinerja Urusan Administrasi	
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya	
Tahun 2020-2024	II-146



Tabel 2.59	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024	II-147
Tabel 2.60	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024	II-150
Tabel 2.61	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024	II-152
Tabel 2.62	Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024	II-154
Tabel 2.63	Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024	II-156
Tabel 2.64	Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024	II-158
Tabel 2.65	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024	II-160
Tabel 2.66	Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024	II-163
Tabel 2.67	Capaian Indikator Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024	II-164
Tabel 2.68	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024	II-165
Tabel 2.69	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024	II-167
Tabel 2.70	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024	II-170
Tabel 2.71	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024	II-172
Tabel 2.72	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024	II-175
Tabel 2.73	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024	II-177
Tabel 2.74	Capaian Indikator Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024	II-180
Tabel 2.75	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024	II-181
Tabel 2.76	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024	II-184
Tabel 2.77	Capaian Indikator Kinerja Urusan Transmigrasi Kabupaten	



Tasikmalaya Tahun 2020-2024	II-186
Tabel 2.78 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesekretariatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024	II-186
Tabel 2.79 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesekretariatan DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024	II-188
Tabel 2.80 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perencanaan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024	II-189
Tabel 2.81 Capaian Indikator Kinerja Urusan Keuangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024	II-191
Tabel 2.82 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024	II-194
Tabel 2.83 Capaian Indikator Kinerja Urusan Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024	II-195
Tabel 2.84 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengawasan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024	II-196
Tabel 2.85 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024	II-199
Tabel 2.86 Realisasi APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 - 2024 ...	II-212
Tabel 2.87 Neraca Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024.....	II-219
Tabel 2.88 Proyeksi Kerangka Pendanaan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026-2030	II-225
Tabel 2.89 Teknik Penyimpulan Isu Strategis Daerah	II-275
Tabel 3.1 Sasaran Visi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029	III-16
Tabel 3.2 Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029.	III-23
Tabel 3.3 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029	III-28
Tabel 3.4 Program Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029	III-51
Tabel 3.5 Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	III-82
Tabel 3.6 Lokasi yang Ditetapkan menjadi PKL, PPK, dan PPL sesuai RTRW	III-88
Tabel 3.7 Sistem Jaringan Jalan.....	III-89
Tabel 3.8 Sistem Jaringan Energi	III-91
Tabel 3.9 Sistem Jaringan Prasarana Lainnya	III-92
Tabel 3.10 Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	III-93



Tabel 3.11	Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Tasikmalaya.....	III-96
Tabel 3.12	Lokasi yang Ditetapkan Menjadi PKL Sesuai RTRW	III-99
Tabel 3.13	Kawasan Strategis Provinsi	III-100
Tabel 3.14	Arah Kebijakan Kewilayahan dalam RPJMN Tahun 2025-2029	III-102
Tabel 4.1	Program dan Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	IV-2
Tabel 4.2	Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024-2030	IV-79
Tabel 4.3	Indikator Makro Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024-2030....	IV-82
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024-2030	IV-83





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tahap Penyusunan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029..... I-3

Gambar 1.2 Keterkaitan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya I-9

Gambar 1.2 Keterkaitan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya I-9

Gambar 2.1 Peta Kabupaten Tasikmalaya..... II-2

Gambar 2.2 Peta Ketinggian Kabupaten Tasikmalaya II-5

Gambar 2.3 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Tasikmalaya..... II-6

Gambar 2.4 Peta Klimatologi Kabupaten Tasikmalaya II-12

Gambar 2.5 Peta Rencana Struktur Ruang II-15

Gambar 2.6 Peta Rencana Pola Ruang II-16

Gambar 2.7 Peta Sebaran Kawasan Industri..... II-16

Gambar 2.8 Peta Sebaran Kawasan Perkebunan..... II-17

Gambar 2.9 Peta Sebaran Kawasan Prasarana Transportasi II-17

Gambar 2.10 Peta Sebaran Kawasan Permukiman II-18

Gambar 2.11 Peta Daya Dukung Air Kabupaten Tasikmalaya II-27

Gambar 2.12 Peta Daya Dukung Pangan Kabupaten Tasikmalaya II-28

Gambar 2.13 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024 II-29

Gambar 2.14 Prevalensi Ketidakcukupan Pangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024 II-31

Gambar 2.15 Persentase Penduduk Berakses Air Minum Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024 II-32

Gambar 2.16 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024 II-33

Gambar 2.17 Persentase Sampah yang Terkelola Tahun 2020-2024 II-35

Gambar 2.18 Persentase Rumah Tinggal Berakses Sanitasi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024 II-36

Gambar 2.19 Peta Sebaran Bencana Banjir Kabupaten Tasikmalaya II-41

Gambar 2.20 Peta Sebaran Bencana Letusan Gunung Api Galunggung II-48

Gambar 2.21 Peta Sebaran Bencana Longsor Kabupaten Tasikmalaya II-50

Gambar 2.22 Peta Sebaran Bencana Tsunami Kabupaten Tasikmalaya II-51

Gambar 2.23 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024 II-52

Gambar 2.24 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun



2020-2024	II-55
Gambar 2.25 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024	II-56
Gambar 2.26 Piramida Penduduk Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024	II-57
Gambar 2.27 Rata-Rata Kepadatan Penduduk Per Km2 Menurut Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024.....	II-60
Gambar 2.28 Sex Ratio Menurut Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024	II-62
Gambar 2.29 Proyeksi Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029	II-64
Gambar 2.30 Proyeksi Struktur Penduduk Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 dan 2029	II-65
Gambar 2.31 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024	II-67
Gambar 2.32 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024.....	II-68
Gambar 2.33 Garis Kemiskinan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024	II-70
Gambar 2.34 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024	II-70
Gambar 2.35 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024.....	II-71
Gambar 2.36 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024	II-73
Gambar 2.37 PDRB Per Kapita Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024	II-74
Gambar 2.38 Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024.....	II-75
Gambar 2.39 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024	II-76
Gambar 2.40 Indeks Gini Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024.....	II-78
Gambar 2.41 Perbandingan Gini Ratio Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024	II-78
Gambar 2.42 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024	II-79
Gambar 2.43 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024	II-80



Gambar 2.44	Usia Harapan Hidup Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024	II-82
Gambar 2.45	Prevalensi Stunting Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024.....	II-84
Gambar 2.46	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024	II-85
Gambar 2.47	Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024	II-86
Gambar 2.48	Grafik Perkembangan Seni Budaya Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 - 2024	II-91
Gambar 2.49	Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 - 2024	II-97
Gambar 2.50	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 - 2024	II-99
Gambar 2.51	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 - 2024	II-100
Gambar 2.52	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 - 2024	II-101
Gambar 2.53	Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 - 2024	II-104
Gambar 2.54	Rasio PDRB Industri Pengolahan Tahun 2020 - 2024	II-106
Gambar 2.55	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Tahun 2020 - 2024	II-107
Gambar 2.56	Indeks SPBE Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024	II-110
Gambar 2.57	Kondisi Jalan Mantap Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024	II-113
Gambar 2.58	Persentase Tingkat Keselamatan Jalan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 - 2024	II-114
Gambar 2.59	Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik Tahun 2020 - 2024	II-115
Gambar 2.60	Inflasi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024	II-118
Gambar 2.61	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 - 2024	II-119
Gambar 2.62	Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 - 2024	II-120
Gambar 2.63	Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Tasikmalaya	II-122
Gambar 3.1	Visi RPJMN Tahun 2025-2029	III-2
Gambar 3.2	Misi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029	III-8
Gambar 3.3	Penahapan RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2045...	III-8



Gambar 3.4 Visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 III-10

Gambar 3.5 Misi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029..... III-17

Gambar 3.6 Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029
 dengan Asta Cita RPJMN Tahun 2025-2029 III-19

Gambar 3.7 Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029
 dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 III-20

Gambar 3.8 Penahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya
 Tahun 2025-2029..... III-42





DAFTAR ISTILAH

Angkatan kerja	: Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan.
Asta Cita	: Istilah yang merujuk pada delapan cita-cita atau tujuan utama yang ingin dicapai oleh pemerintah saat ini, khususnya oleh Presiden dan Wakil Presiden, untuk mewujudkan kemajuan bangsa dan negara. Asta Cita merupakan fondasi bagi visi dan misi kepemimpinan Kepala Negara.
Bauran Energi	: Kombinasi dari berbagai sumber energi yang digunakan dalam suatu wilayah atau sistem; dapat mencakup berbagai jenis energi primer seperti minyak bumi, gas alam, batubara, energi baru dan terbarukan (EBT), dan energi nuklir; bauran energi mencakup semua penggunaan energi secara langsung, termasuk di sektor transportasi, perumahan, dan industri, bukan hanya pembangkitan listrik.
Bonus demografi (demographic dividend)	: Kondisi dimana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun) dalam suatu wilayah. Kondisi ini menawarkan potensi pertumbuhan ekonomi yang besar karena adanya banyak tenaga kerja, konsumen, dan pelaku usaha potensial.
Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH)	Daya Dukung Lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lain; Daya Tampung Lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Daya Dukung fokus pada kemampuan lingkungan untuk menghasilkan atau menyediakan sumber daya, sementara Daya Tampung fokus pada kemampuan lingkungan untuk menampung atau menetralkan limbah atau zat lain.
Disparitas pembangunan daerah	: Ketimpangan pembangunan di daerah; fenomena di mana terjadi ketimpangan yang besar dalam indikator pembangunan seperti tingkat pendapatan, akses pendidikan dan kesehatan, kualitas infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi antar wilayah atau kelompok masyarakat.



<i>Ekonomi hijau</i>	: Konsep ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan yang melibatkan investasi pada teknologi bersih, energi terbarukan, dan pengelolaan sumber daya alam yang efisien pada lingkungan ekologi daratan.
<i>Ekonomi biru</i>	: Konsep ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut, kelautan, dan pesisir secara berkelanjutan. Hal tersebut mencakup berbagai sektor seperti perikanan, akuakultur, transportasi laut, energi terbarukan dari laut, pariwisata pesisir, dan bioteknologi laut.
<i>Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)</i>	: Emisi GRK adalah pelepasan gas-gas tertentu ke atmosfer yang memiliki potensi untuk meningkatkan efek rumah kaca, sehingga menyebabkan pemanasan global; peningkatan emisi GRK dapat disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil, penggunaan kendaraan bermotor, produksi ternak, penggunaan pupuk kimia, penggundulan hutan, dan berbagai aktivitas industri.
<i>Energi Baru dan Terbarukan (EBT)</i>	: Energi yang bersumber dari alam dan dapat diperbarui secara alami, seperti matahari, angin, air, biomassa, dan panas bumi.
<i>Gini Ratio/Rasio Gini/Indeks Gini</i>	: Ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan atau ketidakmerataan distribusi pendapatan dalam suatu wilayah atau populasi. Nilainya berkisar antara 0 hingga 1, di mana 0 menunjukkan pemerataan sempurna (semua orang memiliki pendapatan yang sama) dan 1 menunjukkan ketimpangan sempurna (semua pendapatan terkonsentrasi pada satu atau beberapa orang). Artinya, semakin besar dan mendekati angka 1, maka ketimpangan ekonomi di suatu wilayah semakin besar.
<i>Harapan Lama Sekolah (HLS)</i>	: Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuklamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.
<i>Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)</i>	: Instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang bertujuan untuk mengukur kondisi dan kemampuan suatu daerah





	dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya. IDSD mencakup aspek-aspek seperti kemampuan ekonomi daerah, infrastruktur, iklim investasi, dan sumber daya manusia.
<i>Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)</i>	: Alat ukur yang digunakan untuk menilai kondisi demokrasi politik di Indonesia, khususnya di tingkat kabupaten. IDI dihitung berdasarkan indikator-indikator yang mencerminkan aspek kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi. IDI memberikan gambaran objektif dan empiris tentang perkembangan demokrasi di Indonesia.
<i>Indeks Inovasi Daerah (IID)</i>	: Sistem pengukuran dan penilaian terhadap inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. IID mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu, menggunakan seperangkat variabel dan indikator.
<i>Indeks Ketahanan Daerah (IKD)</i>	: Komponen penilaian untuk melihat ketahanan (kapasitas) sebuah daerah dalam hal kebencanaan. Semakin tinggi nilai IKD, maka menunjukkan kapasitas daerah yang lebih tinggi dalam menangani risiko bencana.
<i>Indeks Ketahanan Pangan (IKP)</i>	: Ukuran yang digunakan untuk menilai untuk menilai kemampuan suatu wilayah dalam memenuhi kebutuhan pangan; IKP disusun dari beberapa indikator yang mencakup ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan.
<i>Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	: Pengukuran terhadap tingkat pencapaian ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
<i>Indeks Kualitas Infrastruktur (IKI)</i>	: Ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas dan ketersediaan infrastruktur dalam suatu wilayah. Hal ini dapat berupa infrastruktur fisik seperti jalan, irigasi, persampahan, air minum, sanitasi, rumah layak huni, dan sarana prasarana perhubungan.
<i>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</i>	: Komposit dari beberapa indikator, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL). Perhitungan IKLH menggunakan rumus pembobotan, di mana masing-masing indeks diberi bobot tertentu. Bobot ini mencerminkan seberapa besar pengaruh masing-masing faktor terhadap kualitas lingkungan hidup secara keseluruhan.
<i>Indeks Modal Manusia (IMM)</i>	: Pengukuran yang dilakukan untuk menilai potensi produktivitas SDM (Sumber Daya Manusia) di suatu





	wilayah. IMM mengukur seberapa besar potensi ekonomi dan profesional warga suatu wilayah dipengaruhi oleh kesehatan dan pendidikan.
<i>Indeks Pelayanan Publik (IPP)</i>	: Tolok ukur yang digunakan untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah. IPP mencakup berbagai aspek pelayanan, seperti kualitas layanan, kepuasan masyarakat, dan dampak layanan terhadap masyarakat.
<i>Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)</i>	: Pengukuran terhadap upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai sarana belajar sepanjang hayat. Indeks ini mengukur usaha pemerintah dalam mencapai budaya literasi masyarakat.
<i>Indeks Pembangunan Gender (IPG)</i>	: Indikator yang menunjukkan tingkat pencapaian pembangunan manusia yang memperhitungkan kesetaraan gender. IPG menunjukkan sejauh mana perempuan dan laki-laki menikmati manfaat pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, dan Ekonomi. IPG dikembangkan sebagai turunan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan tujuan untuk mengukur kesenjangan gender dalam pembangunan.
<i>Indeks Pembangunan Keluarga</i>	: Mengukur kualitas keluarga berdasarkan 3 (tiga) dimensi, yaitu kesejahteraan, ketahanan, dan partisipasi. Ketiga dimensi tersebut merupakan elemen vital yang menunjukkan fungsi keluarga serta perannya sebagai modal sosial dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia.
<i>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</i>	: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian pembangunan manusia berdasarkan tiga dimensi dasar: Kesehatan: diukur dengan angka harapan hidup saat lahir (AHH). Pendidikan: diukur dengan rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS). Standar hidup layak: diukur melalui pengeluaran per kapita disesuaikan (PPP). IPM menggambarkan bagaimana masyarakat dapat menikmati hidup yang panjang dan sehat,



	mendapatkan pengetahuan, serta memiliki standar hidup yang layak.
<i>Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)</i>	: Jumlah individu berusia muda 16 - 30 tahun yang memiliki jiwa kewirausahaan dan merintis usaha sendiri.
<i>Indeks Perlindungan Anak (IPA)</i>	: Ukuran kuantitatif yang mencerminkan capaian pembangunan perlindungan anak di suatu wilayah, yang terdiri dari Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA). IPA disusun berdasarkan 5 klaster hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak (KHA), yaitu hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, serta perlindungan khusus.
<i>Indeks Reformasi Birokrasi</i>	: Alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu instansi pemerintah telah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan. Indeks ini bertujuan untuk menilai efektivitas, efisiensi, serta kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh instansi tersebut.
<i>Indeks Risiko Bencana (IRB)</i>	: Indeks Risiko Bencana (IRB) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat risiko suatu daerah terhadap bencana. Perhitungan IRB biasanya melibatkan analisis tiga komponen utama: bahaya (<i>hazard</i>), kerentanan (<i>vulnerability</i>), dan kapasitas (<i>capacity</i>).
<i>Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</i>	: Hasil pelaksanaan dari sistem pemerintahan berbasis elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.
<i>Indikator Kinerja Daerah (IKD)</i>	: Sekumpulan indikator kinerja yang menggambarkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
<i>Indikator Kinerja Kunci (IKK)</i>	: Mencerminkan capaian kinerja dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
<i>Indikator Kinerja Program (IKP)</i>	: Alat ukur yang digunakan untuk menaksir keberhasilan pencapaian hasil dari suatu program. IKP berfungsi untuk menunjukkan sejauh mana



	tujuan program tercapai, baik dari segi <i>output</i> , <i>outcome</i> , maupun dampak.
<i>Indikator Kinerja Utama (IKU)</i>	: Merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu organisasi, tim, atau individu telah mencapai tujuan atau target tertentu. IKU digunakan untuk mengukur kinerja, mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, memantau kemajuan terhadap target strategis, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
<i>Indikator makro</i>	: Indikator (alat ukur) gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial, seperti indikator laju pertumbuhan ekonomi, rasio gini, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan sebagainya.
<i>Indikator Utama Pembangunan (IUP)</i>	: Tolak ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu pembangunan di suatu wilayah. IUP membantu mengukur kemajuan dalam berbagai aspek pembangunan, seperti ekonomi, sosial, lingkungan, dan pembangunan manusia.
<i>Inklusif</i>	: Mencakup semua orang tanpa pembedaan; merupakan pendekatan yang melibatkan semua pihak, termasuk mereka yang mungkin sebelumnya terpinggirkan.
<i>Intermediate outcome</i>	: Pencapaian Indikator Kinerja Utama didukung oleh kinerja <i>outcome</i> atau <i>intermediate outcome</i> yang pada umumnya merupakan hasil <i>crosscutting</i> beberapa urusan atau program.
<i>Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)</i>	: Rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS adalah kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi.
<i>Kebijakan Umum APBD (KUA)</i>	: Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
<i>Ketahanan pangan</i>	: Kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi seluruh masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, sehingga mereka memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau untuk hidup sehat dan



	aktif. Konsep ini meliputi ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas pangan.
<i>Laju Peningkatan Desa Mandiri (LPDM)</i>	: Indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan/pembangunan desa di Indonesia. Basis data pengukuran Indeks Desa berasal dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Desa yang dikelola oleh Kementerian Desa PDTT.
<i>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)</i>	: Ukuran persentase kenaikan atau penurunan PDB (Produk Domestik Bruto) suatu wilayah dalam periode waktu tertentu (biasanya satu tahun); menunjukkan seberapa cepat perekonomian suatu wilayah tumbuh atau justru menyusut; merupakan indikator ekonomi makro yang dapat menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu.
<i>Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)</i>	: Angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar.
<i>Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)</i>	: Merupakan bagian dari Lembaga kemasyarakatan Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa, dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong royong.
<i>Literasi digital</i>	: Pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital, seperti alat komunikasi, jaringan internet dan lain sebagainya.
<i>Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)</i>	: Forum pertemuan antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi/kabupaten/kota sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah dalam rangka membahas rancangan dokumen rencana pembangunan daerah menjadi rancangan akhir dokumen rencana pembangunan daerah.
<i>Neraca daerah</i>	: Kondisi keuangan serta kemampuan asset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah.
<i>Output dan Outcome</i>	: <i>Output</i> adalah hasil langsung atau produk dari sebuah kegiatan atau proses, sementara <i>outcome</i> adalah dampak atau pengaruh jangka panjang dari



	hasil tersebut. <i>Output</i> seringkali mudah diukur secara kuantitatif, sedangkan <i>outcome</i> lebih luas dan dapat berupa manfaat atau perubahan yang lebih besar.
<i>Pagu Indikatif</i>	: Jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.
<i>Pembentukan Modal Tetap Bruto</i>	: Komponen penting dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menggambarkan investasi fisik berupa penambahan aset tetap, seperti pembangunan gedung, infrastruktur, mesin, dan peralatan, yang digunakan dalam proses produksi.
<i>Perangkat Daerah</i>	: Unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
<i>Perdesaan</i>	: Wilayah yang kegiatan utamanya adalah pertanian (daerah agraris), termasuk pengelolaan sumber daya alam, dan berfungsi sebagai tempat permukiman, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, serta kegiatan ekonomi.
<i>Perkotaan</i>	: Wilayah dengan kegiatan utama bukan pertanian, yang berfungsi sebagai tempat permukiman, pusat pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Wilayah perkotaan juga bisa mencakup kota induk dan daerah pinggirannya.
<i>Persentase capaian reformasi birokrasi general</i>	: Indikator untuk menghitung Nilai RB General dibanding dengan Nilai Bobot tertinggi RB dalam skala persen.
<i>Persentase pemajuan kebudayaan</i>	: Indikator untuk menilai kemajuan pembangunan kebudayaan di berbagai dimensi seperti ekonomi, pendidikan, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi, gender, partisipasi sosial, dan komunikasi.
<i>Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan / Prevalence of Undernourishment (PoU)</i>	: Indikator yang digunakan untuk mengukur kondisi kerawanan pangan dan gizi suatu wilayah. Indikator ini mencerminkan proporsi penduduk yang secara reguler mengonsumsi pangan dalam jumlah yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan energi minimum harian guna hidup sehat, aktif, dan produktif.
<i>Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)</i>	: Program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam



	penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
<i>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</i>	Indikator ekonomi yang mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam satu tahun.
<i>PDRB sektor akomodasi makan dan minum</i>	Total nilai barang dan jasa sektor akomodasi makan dan minum.
<i>PDRB sektor industri pengolahan</i>	Total nilai barang dan jasa sektor industri pengolahan.
<i>PDRB sektor perdagangan</i>	Total nilai barang dan jasa sektor perdagangan.
<i>PDRB sektor pertanian dan perikanan</i>	Total nilai barang dan jasa sektor pertanian dan perikanan.
<i>RPJMD Kabupaten Tasikmalaya</i>	Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk jangka waktu lima tahun yang memuat penjabaran visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah terpilih. Dokumen ini mencakup tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan keuangan daerah, serta kerangka pendanaan indikatif yang disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
<i>Rasio PDRB akomodasi makan dan minum</i>	Indikator yang menggambarkan kontribusi sektor penyediaan akomodasi serta makanan dan minuman terhadap perekonomian daerah. Indikator ini mencerminkan peran sektor pariwisata, kuliner, dan jasa perhotelan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
<i>Rasio industri pengolahan</i>	Indikator yang menggambarkan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian daerah, khususnya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
<i>Rasio jenis kelamin (sex ratio)</i>	Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan per 100 penduduk perempuan.
<i>Rasio ketergantungan (dependency ratio)</i>	Perbandingan antara jumlah penduduk usia tidak produktif (usia di bawah 15 tahun dan usia 65 tahun ke atas) dengan jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun); rasio ini mengukur beban tanggungan ekonomi berupa penduduk usia tidak produktif yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif.





<i>Rasio kewirausahaan</i>	: Perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar.
<i>Rasio Rumah Layak Huni</i>	: Indikator untuk mengetahui perbandingan jumlah rumah yang memenuhi kriteria kelayakan dengan jumlah total rumah yang ada dalam suatu wilayah.
<i>Rata-rata Lama Sekolah (RLS)</i>	: Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun.
<i>Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)</i>	: Penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
<i>Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat</i>	: Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjabarkan dari visi, misi, dan program kepala daerah Provinsi Jawa Barat yang memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
<i>Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)</i>	: Dokumen perencanaan pembangunan nasional yang disusun untuk jangka waktu lima tahun dan merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden terpilih dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
<i>Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)</i>	: Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjabarkan dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah.
<i>Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)</i>	: Hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan



	kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
<i>Standar Pelayanan Minimal (SPM)</i>	: Ketentuan yang menetapkan jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib diperoleh setiap warga negara secara minimal; merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib yang dijalankan oleh pemerintah daerah.
<i>Stunting</i>	: Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak (khususnya balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang mengakibatkan keterlambatan pertumbuhan anak yang tidak sesuai dengan standarnya baik dari aspek tinggi badan dan berat badannya.
<i>Tata kelola pemerintahan</i>	: Proses dan struktur yang digunakan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan, dengan fokus pada praktik dan prinsip-prinsip yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.
<i>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)</i>	: Mengukur jumlah penduduk angkatan kerja dibanding dengan jumlah penduduk usia kerja (15-64), yang ditampilkan dalam bentuk persentase.
<i>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)</i>	: Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja dalam suatu wilayah; TPT mengukur seberapa besar bagian dari angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tetapi masih mencari pekerjaan atau bersedia menerima pekerjaan.
<i>Total Fertility Rate (TFR)</i>	: Rata-rata jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita selama masa reproduksinya; digunakan untuk memperkirakan jumlah rata-rata anak yang akan dimiliki seorang wanita jika ia melahirkan sesuai dengan tingkat kesuburan saat ini; TFR mengacu pada rata-rata, bukan pada jumlah anak yang sebenarnya akan dimiliki oleh setiap individu wanita; Masa reproduksi wanita sendiri biasanya dihitung dari usia 15 hingga 49 tahun (World Bank).
<i>Tingkat kemiskinan</i>	: Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, yaitu tingkat minimum pendapatan atau pengeluaran yang dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan
<i>Transformasi digital</i>	: Proses mengadopsi teknologi digital untuk mengubah cara beroperasi, berinteraksi, dan menciptakan nilai baru dalam setiap kegiatan. Proses ini mencakup





	penggunaan teknologi komputer dan/atau kecerdasan buatan (AI) untuk mengoptimalkan operasi dan memberikan nilai lebih.
<i>Ultimate outcome</i>	: Kinerja pemerintah daerah pada posisi paling tinggi dan merupakan kinerja dampak (<i>outcome</i>)
<i>Usia Harapan Hidup (UHH)</i>	: Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.



BAB I

PENDAHULUAN





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam mendorong pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih terencana dan tepat sasaran. Dengan adanya rencana pembangunan daerah yang komprehensif akan memberikan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan pembangunan daerah yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan di daerah. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dapat terselenggara secara terarah, efektif dan efisien serta mampu mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan. Dengan demikian perencanaan pembangunan daerah menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah bagi perangkat daerah, dukungan dunia usaha dan partisipasi masyarakat di daerah.

Landasan hukum perencanaan pembangunan daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua Undang-Undang tersebut menegaskan kewajiban pemerintah daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen perencanaan tersebut terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek (tahunan) yang disusun dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, partisipasi, dan berkeadilan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Secara eksplisit, RPJMD merupakan dokumen yang disusun melalui tahapan perencanaan yang diawali dengan penyusunan rancangan teknokratik, termasuk penyusunan Visi dan Misi sebagai pedoman bagi calon Kepala Daerah dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah. Dokumen ini mencakup tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, serta kerangka pendanaan indikatif





yang disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Penyusunan RPJMD ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2045 tahap pertama dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 yang berisi kebijakan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2025-2029 yang meliputi Asta Cita, program prioritas dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).

Berdasarkan hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dilaksanakan pada bulan April 2025, telah dilantik Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya terpilih H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP. sebagai Bupati dan H. Asep Sopari Al-Ayubi, S.P., M.IP. sebagai Wakil Bupati pada tanggal 4 Juni 2025 untuk masa jabatan Tahun 2025–2030. Dengan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya terpilih sesuai pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka penyusunan RPJMD wajib diselesaikan dan ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017, RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas, holistik-tematik, pendekatan integratif, dan pendekatan spasial. Pendekatan teknokratik adalah pendekatan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui proses Forum Konsultasi Publik, *Focus Group Discussion* (FGD), maupun Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Pendekatan politik dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan secara berjenjang di daerah hingga Nasional, serta dengan penyelarasan kebijakan dan program Nasional dan Provinsi Jawa Barat. Pendekatan tematik-holistik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan,





hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan atau mengolaborasikan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Serta pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Dalam proses penyusunan RPJMD ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya menerapkan pendekatan strategis *dynamic governance* sebagai konsep tata kelola pemerintahan yang adaptif, inovatif, dan responsif terhadap perubahan. Pendekatan ini diwujudkan melalui tiga pilar utama, yaitu:

- a. *Thinking Ahead*, yaitu perencanaan berbasis proyeksi tren dan *scenario planning* untuk mengantisipasi perubahan dan tantangan pembangunan di masa depan;
- b. *Thinking Again*, yaitu peninjauan kembali dan penyempurnaan kebijakan berdasarkan hasil evaluasi RPJMD periode sebelumnya sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran; dan
- c. *Thinking Across*, yaitu kolaborasi lintas perangkat daerah, lintas sektor, dan lintas wilayah guna menciptakan integrasi kebijakan dan efektivitas pencapaian sasaran pembangunan.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 dalam tahapannya dilakukan secara berkesinambungan, diawali dengan tahap persiapan hingga berakhir di tahap penetapan melalui Perda tentang RPJMD. Secara rinci tahapannya sebagai berikut.

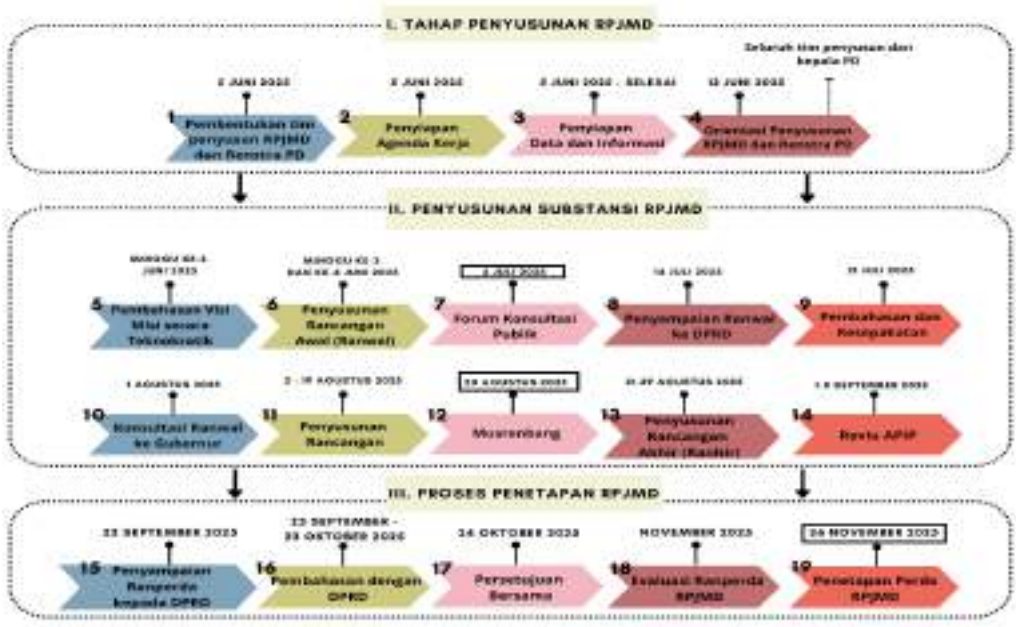
1. Tahap persiapan RPJMD, diawali dengan pembentukan tim penyusun RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah, dilanjutkan dengan penyiapan agenda kerja, serta pengumpulan data dan informasi pendukung. Pada tahap ini juga dilakukan kegiatan orientasi untuk menyamakan pemahaman seluruh pihak terkait mengenai proses dan metodologi penyusunan RPJMD.
2. Tahap penyusunan substansi RPJMD, mencakup pembahasan visi dan misi secara teknokratik sebagai dasar penyusunan dokumen. Selanjutnya disusun Ranwal, yang kemudian dibahas dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dari pemangku kepentingan. Ranwal tersebut disampaikan kepada DPRD untuk dibahas hingga tercapai kesepakatan awal bersama,





lalu dikonsultasikan kepada Gubernur sebagai bahan penyempurnaan Ranwal RPJMD. Setelah itu disusun Rancangan RPJMD dan dilaksanakan Musrenbang RPJMD untuk menghimpun aspirasi seluruh stakeholder terkait. Tahapan ini kemudian dilanjutkan dengan penyusunan Rancangan Akhir (Ranhir) dan dilakukan reviu oleh APIP guna memastikan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Proses Penetapan RPJMD, dimulai dengan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (ra tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama hingga memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Selanjutnya dilakukan proses evaluasi Raoleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Setelah memperoleh hasil evaluasi dan dilakukan penyempurnaan, RPJMD akhirnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah.



Gambar 1.1
Tahap Penyusunan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2025-2029

Sumber: Bappelitbangda Kab. Tasikmalaya, 2025

Dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 merupakan dokumen strategis mengingat peran dan kedudukannya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

1. Media untuk menjabarkan rencana pengimplementasian janji politik Bupati dan Wakil Bupati terpilih sesuai dengan yang disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat;



2. Penjabaran pelaksanaan RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2045 tahap pertama (2025-2029) yang merupakan tahap fondasi;
3. Pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya;
4. Pedoman penyempurnaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
5. Perwujudan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024-2044;
6. Instrumen pengukuran tingkat ketercapaian kinerja Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun; dan
7. Instrumen pengendalian bagi pengampu urusan pengawasan dan perencanaan.

Dengan demikian, tercipta keselarasan antara perencanaan tingkat Pemerintah Daerah dengan Perangkat Daerah, dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, sekaligus sebagai perwujudan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Tasikmalaya.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 berlandaskan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran





- Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 7. Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7048);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah





- Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2);
 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
 14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur





- Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1-2850 Tahun 2025;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi;
 22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045;





26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pendataan, Perencanaan, dan Pengelolaan Tanah Di Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 8)
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 4);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 tahun 2021 tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 9);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 Nomor 6);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya





2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 4); dan

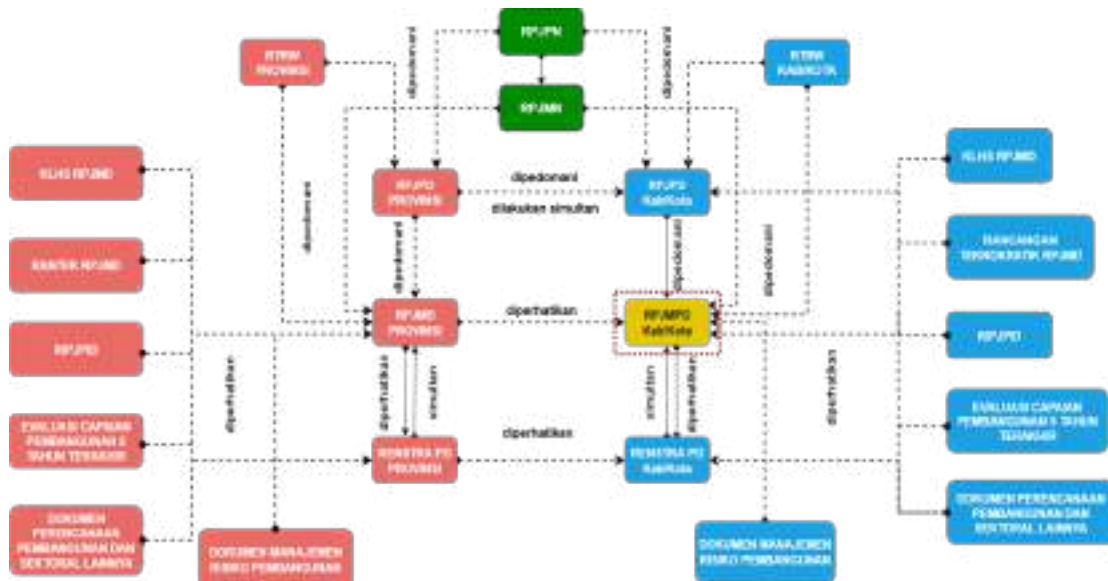
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 12).

1.3 Hubungan Antara Dokumen

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, maka penyusunan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 memiliki hubungan keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya yang secara relevan dan kontekstual sangat mendukung dalam upaya mewujudkan sinkronisasi, integrasi, keselarasan, konsistensi, dan sinergi kebijakan dalam lingkup daerah maupun dengan lingkup nasional dan provinsi.

Dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 harus diselaraskan dengan RPJMN Tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2045, RTRW Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024-2044, serta dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya. Bentuk hubungan keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya disajikan sebagaimana pada gambar sebagai berikut.





Keterkaitan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

1.3.1 Hubungan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Barat

1.3.2 Hubungan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya dengan RPJPD, RKPD, Renstra PD, dan Renja PD

I - 11





Tasikmalaya Tahun 2025-2045, terdapat sasaran visi, arah kebijakan dan sasaran pokok yang perlu dipedomani dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029.

Selanjutnya RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Renstra PD merupakan rencana kerja 5 (lima) tahunan yang menggambarkan perencanaan kerja dan kinerja tahunan perangkat daerah untuk menunjang pencapaian visi, misi, dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana termuat dalam RPJMD ini serta penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten.

Selain itu, RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai perencanaan pembangunan tahunan daerah. RKPD menjadi acuan setiap perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Penjabaran rencana tahunan perangkat daerah termuat dalam Renja PD setiap tahun selama 5 (lima) tahun berdasarkan pada Renstra PD.

1.3.3 Hubungan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya dengan RTRW Kabupaten Tasikmalaya

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024-2044 diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2024 mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Dokumen ini juga berisi indikasi-indikasi program kewilayahan yang akan dilaksanakan hingga Tahun 2044.

RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 berperan penting dalam pelaksanaan program-program kewilayahan tersebut. Dokumen RPJMD ini harus disinkronkan dengan indikasi program yang dimuat dalam dokumen RPJMD dengan indikasi program yang termuat pada RTRW Kabupaten Tasikmalaya. Sinkronisasi ini bertujuan untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan pola ruang yang telah ditetapkan.

Indikasi program utama dalam RTRW Kabupaten Tasikmalaya dibagi menjadi lima tahap yaitu: (i) Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan tahap I (satu) tahun 2023-2024; (ii) **Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan tahap**





II (dua) tahun 2025-2029; (iii) Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan tahap III (tiga) tahun 2030-2034; (iv) Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan tahap IV (empat) tahun 2035-2039; dan (v) Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan tahap V (lima) tahun 2040-2044.

1.3.4 Hubungan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Tasikmalaya

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 mempertimbangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS adalah alat analisis yang memastikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah terintegrasi dalam rencana pembangunan. Berdasarkan hasil KLHS RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 ada beberapa isu yang direkomendasikan harus ditindaklanjuti sebagai bentuk penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029. Rekomendasi ini bertujuan memastikan pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya memperhatikan potensi dampak dan keberlanjutan lingkungan.

1.4 Maksud dan Tujuan

Dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud memberikan arah pembangunan jangka menengah Kabupaten Tasikmalaya 5 (lima) tahun ke depan serta menjadi pedoman bagi seluruh *stakeholder* baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam membangun kesepakatan, kesepakatan, dan komitmen bersama guna terwujudnya visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029.

Sedangkan tujuan dari penyusunan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 diantaranya yaitu:

1. Menyusun gambaran umum kondisi daerah;
2. Menyusun gambaran keuangan daerah;
3. Merumuskan permasalahan pembangunan daerah;
4. Merumuskan isu strategis daerah;





5. Menjabarkan Visi dan Misi Kepala Daerah dari mulai tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, sampai ke program prioritas pembangunan daerah; dan
6. Menghimpun program Perangkat Daerah yang merupakan kumpulan program pada Renstra Perangkat Daerah, serta penentuan target penyelenggaraan pemerintah daerah melalui Indikator Kinerja Daerah (IKD).

1.5 Sistematika Penulisan

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 terdapat perubahan jumlah bab pada dokumen RPJMD Tahun 2025-2029, oleh karena itu sistematika dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 menjadi seperti yang dijelaskan berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat hasil perumusan latar belakang penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika RPJMD.

Bab ini terdiri dari subbab:

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH

Bab ini memuat gambaran umum kondisi daerah beberapa tahun terakhir yang disajikan dalam beberapa aspek penyelenggaraan pembangunan, disertai informasi gambaran keuangan daerah, serta uraian permasalahan dan isu strategis daerah yang





mendasari perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Tahun 2025-2029.

Bab ini terdiri dari subbab:

- 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah
- 2.2 Gambaran Keuangan Daerah
- 2.3 Permasalahan dan Isu Strategis

BAB III : VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan Visi dan Misi Pembangunan Daerah pada Tahun 2025-2029 beserta arah kebijakan dan strateginya yang dikembangkan ke dalam program prioritas pembangunan daerah.

Bab ini terdiri dari subbab:

- 3.1 Visi dan Misi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran
- 3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan
- 3.4 Program Prioritas Pembangunan Daerah
- 3.5 Arah Kebijakan Kewilayahan

BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini menjabarkan program Perangkat Daerah yang merupakan kumpulan program yang terdapat pada Renstra Perangkat Daerah, serta penentuan target penyelenggaraan pemerintah daerah melalui Indikator Kinerja Daerah (IKD).

Bab ini terdiri dari subbab:

- 4.1 Program Perangkat Daerah
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir yang memuat kesimpulan, pedoman transisi, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap





perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

Bab ini terdiri dari subbab:

5.1 Pedoman Transisi

5.2 Kaidah Pelaksanaan





BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH





BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Berdasarkan aspek administratif dan fungsional, Kabupaten Tasikmalaya memiliki wilayah daratan seluas 270.682 (dua ratus tujuh puluh ribu enam ratus delapan puluh dua) hektare dengan batas koordinat Kabupaten adalah 107° 54' 16.17" Bujur Timur sampai dengan 108° 26' 33.25" Bujur Timur dan 7° 2' 13.92" Lintang Selatan sampai dengan 7° 49' 13.18" Lintang Selatan.

Batas-batas Wilayah Kabupaten Tasikmalaya meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Majalengka;
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Garut;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran;
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Tasikmalaya merupakan wilayah daratan yang tergolong sebagai “pulau kecil”, yakni bagian integral dari kesatuan geografis yang lebih luas namun memiliki karakter ruangnya sendiri dalam tatanan regional. Kabupaten ini juga masuk dalam Wilayah Pengembangan (WP) Priangan Timur–Pangandaran, sebuah kawasan andalan yang sejajar dengan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Pacangsanak (Pangandaran–Kalipucang–Segara Anakan) dan diprogramkan secara antisipatif untuk memacu pembangunan wilayah perbatasan. Selain itu, dalam sistem hierarki pusat permukiman di tingkat provinsi, Kabupaten Tasikmalaya dikategorikan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL), yakni sebuah pusat yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.

Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, Kabupaten Tasikmalaya memiliki potensi khusus sebagai wilayah dengan basis kegiatan sektor

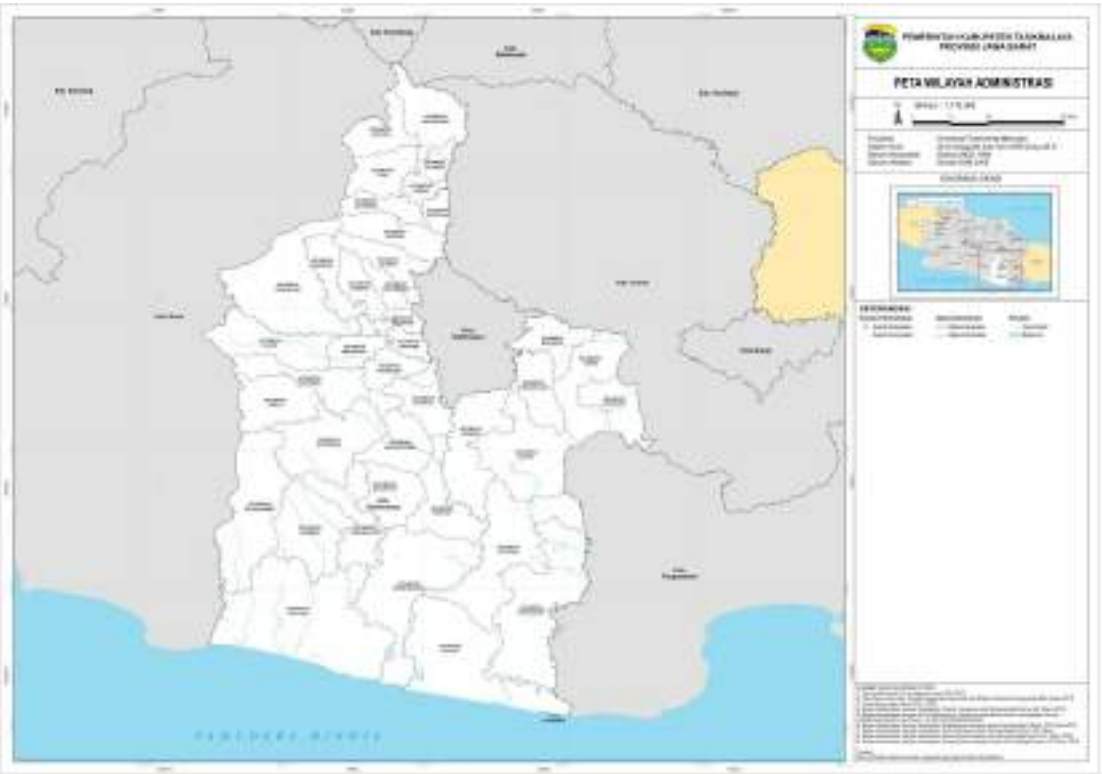


perikanan budidaya, yang sejalan dengan strategi pengembangan ekonomi lokal daerah selatan Jawa Barat.

Kabupaten Tasikmalaya memiliki sejarah panjang dalam pembentukan wilayah pemerintahan yang dapat ditelusuri hingga tanggal 21 Agustus 1111 Masehi saat menjadi bagian dari Kerajaan Galunggung (Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya, 2021). Seiring berjalannya waktu, wilayah ini mengalami berbagai perubahan status, termasuk menjadi bagian dari Kerajaan Pajajaran dan kemudian Kerajaan Mataram, sebelum akhirnya jatuh ke tangan pemerintahan kolonial Belanda.

Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kabupaten Tasikmalaya secara resmi diakui sebagai Daerah Tingkat II melalui Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat. Secara administratif, wilayah Kabupaten Tasikmalaya saat ini terbagi menjadi 39 Kecamatan dan 351 Desa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peta Wilayah Administrasi Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat dalam Gambar 2.1



Gambar 2.1
Peta Kabupaten Tasikmalaya
Sumber: Materi Teknis RTRW Kab. Tasikmalaya Tahun 2023-2043



Gambar 2.1 memberikan informasi mengenai gambaran wilayah administratif 39 kecamatan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari 39 kecamatan yang masing-masing memiliki luas wilayah administratif dan jumlah desa sebagaimana dijelaskan pada tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Wilayah Administrasi Kabupaten Tasikmalaya

No	Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah Desa
		Hektar	Presentase	
1	Kecamatan Bantarkalong	6.415	2,37	8
2	Kecamatan Bojongasih	5.186	1,92	6
3	Kecamatan Bojonggambir	12.682	4,69	10
4	Kecamatan Ciawi	4.458	1,65	11
5	Kecamatan Cibalong	6.174	2,28	6
6	Kecamatan Cigalontang	14.567	5,38	16
7	Kecamatan Cikalong	16.088	5,94	13
8	Kecamatan Cikatomas	14.221	5,25	9
9	Kecamatan Cineam	7.413	2,74	10
10	Kecamatan Cipatujah	24.199	8,94	15
11	Kecamatan Cisayong	5.032	1,86	13
12	Kecamatan Culamega	8.629	3,19	5
13	Kecamatan Gunungtanjung	4.778	1,77	7
14	Kecamatan Jamanis	1.598	0,59	8
15	Kecamatan Jatiwaras	8.906	3,29	11
16	Kecamatan Kadipaten	4.305	1,59	6
17	Kecamatan Karangjaya	4.598	1,70	4
18	Kecamatan Karangnunggal	15.326	5,66	14
19	Kecamatan Leuwisari	3.117	1,15	7
20	Kecamatan Mangunreja	2.672	0,99	6
21	Kecamatan Manonjaya	4.344	1,60	12
22	Kecamatan Padakembang	1.955	0,72	5
23	Kecamatan Pagerageung	6.430	2,38	10
24	Kecamatan Pancatengah	16.211	5,99	11
25	Kecamatan Parungponteng	5.050	1,87	8
26	Kecamatan Puspahiang	5.765	2,13	8
27	Kecamatan Rajapolah	1.640	0,61	8
28	Kecamatan Salawu	7.027	2,60	12
29	Kecamatan Salopa	10.501	3,88	9
30	Kecamatan Sariwangi	3.855	1,42	8
31	Kecamatan Singaparna	2.011	0,74	10
32	Kecamatan Sodonghilir	10.153	3,75	12
33	Kecamatan Sukahening	2.891	1,07	7
34	Kecamatan Sukaraja	4.648	1,72	8
35	Kecamatan Sukarame	1.617	0,60	6
36	Kecamatan Sukaratu	4.272	1,58	8
37	Kecamatan Sukaresik	1.737	0,64	8
38	Kecamatan Tanjungjaya	3.911	1,44	7



No	Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah Desa
		Hektar	Presentase	
39	Kecamatan Taraju	6.299	2,33	9
Luas Total Wilayah		270.682	100,00	351

Sumber: RTRW Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024-2044

Kecamatan dengan wilayah terluas di Kabupaten Tasikmalaya adalah Kecamatan Cipatujah, yang memiliki luas wilayah mencapai 24.199 hektar. Di sisi lain, Kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Jamanis, yang wilayahnya mencakup 1.598 hektar. Perbedaan dalam luas wilayah antar kecamatan mencerminkan variasi geografis yang ada di Kabupaten Tasikmalaya yang memengaruhi berbagai aspek dalam administrasi dan pengembangan daerah.

Kondisi geografis Kabupaten Tasikmalaya dapat dijelaskan melalui beberapa faktor utama, yaitu:

a. **Topografi dan Kemiringan Lereng**

Ketinggian di wilayah Kabupaten Tasikmalaya bervariasi antara 0 hingga 2.500 meter di atas permukaan laut (dpl). Secara umum, wilayah ini dapat dibedakan berdasarkan perbedaan ketinggian, yakni bagian Utara yang merupakan wilayah dataran tinggi dengan ketinggian berkisar antara 1.000 hingga 2.500 meter dpl dan bagian Selatan yang merupakan wilayah dataran rendah dengan ketinggian berkisar antara 0 hingga 100 meter dpl. Luas tiap kelas ketinggian di Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat pada Tabel 2.2 dan Gambar 2.2.

Tabel 2.2
Ketinggian di Kabupaten Tasikmalaya

Ketinggian (mdpl)	Luas Wilayah (Ha)	Persentase terhadap Luas Kabupaten
0 – 500	181.625,82	67,04%
500 –1.000	73.419,80	27,10%
1.000 – 1.500	13.148,10	4,85%
1.500 – 2.000	2.519,27	0,93%
2.000 - 2.500	223,66	0,08%

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029





Gambar 2.2
Peta Ketinggian Kabupaten Tasikmalaya
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029

Kemiringan tanah di Kabupaten Tasikmalaya didominasi oleh kelas kelerengan landai antara 2 hingga 15 persen pada sekitar 96.772,73 hektar wilayahnya. Kondisi kelerengan dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan Gambar 2.3.

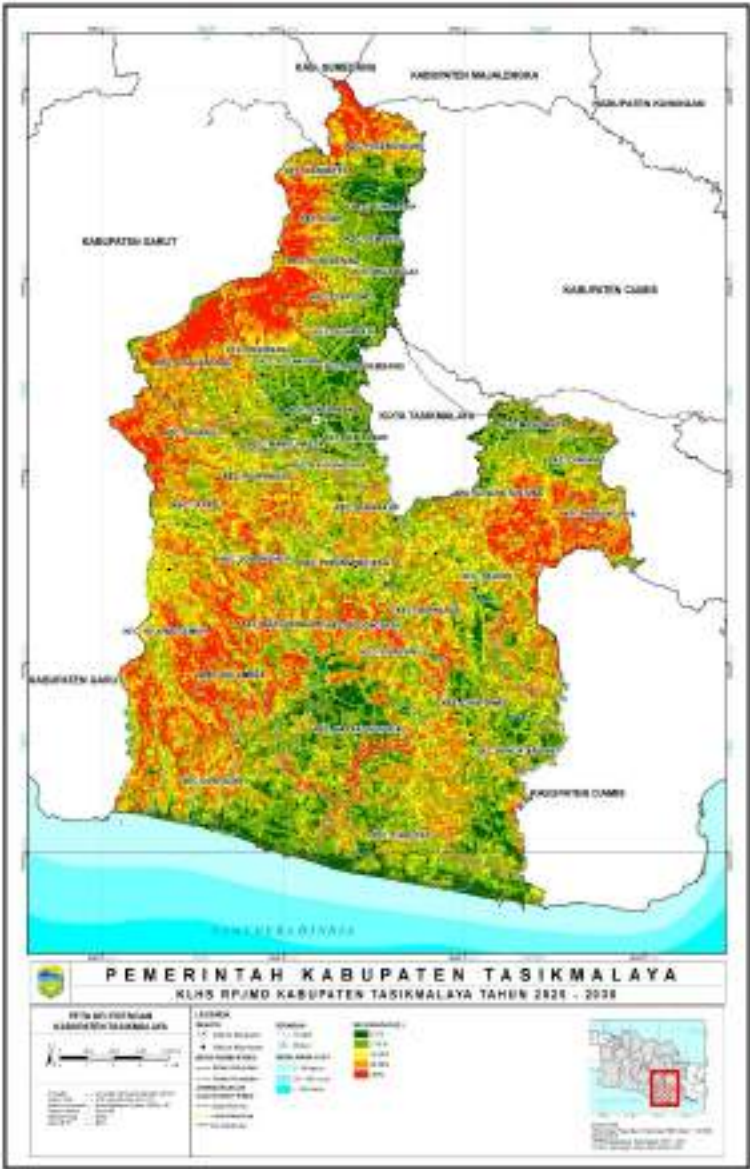




Tabel 2.3
Kelerengan di Kabupaten Tasikmalaya

Kelerengan (%)	Luas Wilayah (Ha)	Persentase terhadap Luas Kabupaten
0 – 2	28.819,41	10,63%
2 – 15	96.772,73	35,70%
15 – 25	47.697,80	17,60%
25 – 40	58.259,05	21,49%
>40	39.505,99	14,57%

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029



Gambar 2.3
Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Tasikmalaya
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029

b. Geologi

Kondisi geologi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:



1) Geologi Landscape Depresi

Daerah ini terisi oleh material-material vulkanis akibat munculnya vulkanis Gunung Galunggung, Gunung Sawal dan Galunggung Cakrabuana.

2) Geologi Landscape Pegunungan Lipatan dan Patahan

Batuan di daerah ini berbeda-beda, baik dari jenis maupun sifatnya dan dapat di bedakan ke dalam dua golongan, yaitu:

a) Golongan Pertama : Batuan Kapur

b) Golongan Kedua : Batuan Pasir Laut

3) Geologi Landscape dataran Pantai Selatan:

Material ini terdiri dari batuan pasir liat, batuan kapur, dan sedimen pasir pantai yang kadang-kadang dalam bentuk rawa pantai.

Berdasarkan karakteristik geomorfologinya, wilayah Kabupaten Tasikmalaya dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) satuan, yaitu:

1) Satuan Vulkanik Berelief Tinggi

Sebagian besar batuannya terbentuk dari hasil erupsi vulkanik dan berpola aliran radier. Hampir seluruh anak sungai dari satuan ini ditampung oleh aliran Sungai Ciwulan. Satuan ini membentang seperti tapak kuda yang melingkar dan terbuka ke arah Selatan.

2) Satuan Perbukitan Sedimen

Satuan ini tersebar berelief tinggi dan sedang dengan batuan yang berupa sedimen klastika, berpola aliran dentritik dan hampir paralel. Daerah satuan ini dialiri oleh sungai yang agak besar sebanyak lima buah dan hampir paralel ke arah Selatan menempati bagian tengah dari tapak kuda satuan perbukitan vulkanik.

3) Satuan Karst Berelief Sedang

Satuan ini terdiri dari batu gamping, secara keseluruhan berpola aliran dentritik dan beberapa sungai ada yang mengalir di bawah permukaan tanah. Satuan ini menyebar di bagian bawah permukaan tanah dalam lingkaran dari satuan perbukitan sedimen terlipat.



4) Satuan Peneplain

Satuan ini terdiri dari batuan vulkanik dan sedimen klastika yang berumur paling tua yang terdapat di Tasikmalaya, mempunyai relief rendah, berpola aliran hampir paralel menuju sungai yang menampungnya.

Berdasarkan formasi batuan, Kabupaten Tasikmalaya dibagi menjadi 4 (empat) formasi, yaitu:

1) Formasi Jampang

Batuannya terdiri atas erupsi vulkanik dan bersisipan dengan batuan pasir, batu gamping batu lanau, dan batu lempung serta beberapa batuan diatasnya yang terereksikan. Formasi ini berumur miosen bawah, mempunyai anggota bentang dengan batuan berkomposisi Tuf Asam bersisipan Batuan Gamping.

2) Formasi Pamutuan

Formasi ini yang terdapat hanya anggotanya, yaitu Kalkarenit yang berbentuk batu gamping klasik berselingan dengan napal dan berumur Miosen Tengah.

3) Formasi Halang

Formasi ini terdiri dari batu pasir, batu lempung dengan sisipan batu pasir gampingan, batu gamping pasiran, breksi, konglomerat, bagian bawah dominan batu pasir litik ke arah atas dominan napalan.

4) Formasi Bentang

Formasi ini terdiri atas batu pasir tufan, batu pasir gampingan dengan sisipan breksi tif, konglomerat, batu pasir, batu lempung, tufan berlapis baik. Sukaraja termasuk dalam formasi ini, batuannya berupa batu gamping terumbu berselingan dengan batu gamping pasiran.

c. Hidrologi

Aspek hidrologi mencakup pola aliran sungai, danau, dan sumber air lainnya yang sangat berperan dalam memenuhi kebutuhan akan pasokan air untuk keperluan pertanian, industri, dan pemukiman. Kondisi hidrologi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya dapat dijelaskan melalui beberapa aspek, yaitu sungai, mata air, dan situ.





1) Sungai

Kabupaten Tasikmalaya dilewati enam daerah aliran sungai utama, yaitu Sungai Cilangla, Cimedang, Cisanggiri, Cipatujah, Citanduy, dan Sungai Ciwulan. Aliran sungai dan anak sungai tersebar di seluruh wilayah yang mengalir menuju hilir di bagian selatan. Aliran sungai umumnya memiliki pola radial di daerah aliran sungai, hal ini disebabkan oleh pengaruh dominan dari aktivitas vulkanik. Namun, pada wilayah yang mengalami aktivitas tektonik yang signifikan, pola aliran sungai dapat menjadi tidak teratur atau tidak beraturan, bergantung pada bentuk dan arah pergerakan tektonik yang terjadi.

2) Mata Air

Kabupaten Tasikmalaya memiliki mata air yang terdapat di beberapa Kecamatan, termasuk Leuwisari, Sariwangi, Parungponteng, Puspahiang, Sodonghilir, Pancatengah, Cikalong, Cipatujah, Bantarkalong, Cisayong, Sukahening, Sukaresik, dan Pagerageung. Mata air ini berfungsi sebagai sumber air dalam tanah yang digunakan sebagai air baku atau air minum oleh masyarakat. Berikut merupakan tabel sumber mata air.

Tabel 2.4
Sumber Mata Air di Kabupaten Tasikmalaya

No	Nama Mata Air	Lokasi		
		Kampung	Desa	Kecamatan
1	Bulakan	Cikarang	Cimanggu	Puspahiang
2	Cireuma	Tenjolaya	Puspahiang	Puspahiang
3	Cikupa	Mekarsari	Pusparahayu	Puspahiang
4	Kiangronyok	Citundum	Puspahiang	Puspahiang
5	Cikaluntar	Cijaha	Cukangkawung	Sodonghilir
6	Gunung Cikalong	Cikalong Pogor	Cikalong	Sodonghilir
7	Ciliang Pojok	Baros	Cikalong	Sodonghilir
8	Nutug	Cikalong Hilir	Cikalong	Sodonghilir
9	Cihaniwung	Nini Sukatanni	Cikalong	Sodonghilir
10	Cibunar	Cihonje	Parungponteng	Parungponteng
11	Jamburarang	Jamburarang	Parungponteng	Parungponteng
12	Cibuntu	Legok Mendol	Karyabakti	Parungponteng
13	Cilamu/ Babakan	Cilame	Burujul Jaya	Parungponteng
14	Bibijilan	Cikareo	Parung	Cibalong
15	Cisaladah	Cilangen	Kiara Jangkung	Sukahening
16	Cidahu	Balandongan	Sundakerta	Sukahening
17	Jatihurip	Sindang Raya	Jatihurip	Cisayong
18	Cigalonggong	Sukaharja	Sukaresik	Sukaresik
19	Cilangkap	Ambarayah	Sukadana	Pagerageung
20	Cahoya	Ambarayah	Sukadana	Pagerageung
21	Sarongge	Nanjung Sari	Urug	Kawalu



No	Nama Mata Air	Lokasi		
		Kampung	Desa	Kecamatan
22	Mata Air Jolang	Jolang	Gunung Tandala	Kawalu
23	Cirangkong	Cangkuang	Cikukulu	Karangnunggal
24	Cikata Gunung Payung	Cangkuang	Cikukulu	Karangnunggal
25	Sumur Pasir Dagul (Legok Sapta)	Pasir Dagul	Karang Mekar	Karangnunggal
26	Hualah	Cigarendong	Karangnunggal	Karangnunggal
27	Cisereh	Cicadas	Darawat	Cipatujah
28	Cibunigeulis	Rancamaya	Gunungsari	Sukaratu
29	Cipondok	Cikoneng	Sukaharja	Sukaratu
30	Cipondok2	Cikoneng	Sukaharja	Sariwangi
31	Cai Sadim	Cihandiwung	Parakanhonje	Sariwangi
32	Bojong Pencut Kondang	Pencut Kondang	Sukamaju	Bantarkalong
33	Citiis	Sukajaya	Pengliaran	Pancatengah
34	Leuwigede	Sukajaya	Pangliaran	Pancatengah
35	Cipadung	Cisireum	Pangliaran	Pancatengah
36	Cibuniasih	Cibuntu	Cibuniasih	Pancatengah
37	Cisoka	Sukasari	Cibuniasih	Pancatengah
38	Sodong Gunting	Sirnagalih	Kalapagenep	Cikalong
39	Cigede	Sodong	Cikadu	Cikalong
40	Cileutik	Sodong	Cikadu	Cikalong
41	Cinunjang / Bujal Laut	Nanggerang	Cikadu	Cikalong
42	Citatah	Cimade	Cikancra	Cikalong
43	Kiarabodas	Cidadap	Cidadap	Karangnunggal
44	Manggung	Rawa Girang	Linggamulya	Leuwisari
45	Citerewes	Pinggir Sari	Linggamulya	Leuwisari

Sumber: Laporan Akhir Penyusunan RISPAM (Rencana Induk Pengelolaan Air Minum)

3) Situ

Situ (danau kecil) di Kabupaten Tasikmalaya dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, termasuk sektor pertanian dan pariwisata. Informasi mengenai lokasi situ, luasnya, serta pemanfaatannya dapat ditemukan dalam Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Nama Situ, Lokasi dan Luas Situ
di Kabupaten Tasikmalaya

No	Nama Situ	Lokasi		Luas (Ha)
		Desa	Kecamatan	
1	Sanghyang	Cibalanarik	Sukaraja	10,25
2	Cigaleuh	Kalapagenep	Cikalong	2,00
3	Cilangla	Taraju	Taraju	10,00
4	Galuh Taruna	Cibuniasih	Pancatengah	2,00
5	Gede Pancatengah	Mekarsari	Pancatengah	1,00
6	Denuh	Cikuya	Bantarkalong	1,20
7	Citilu	Pasirhaur	Ciawi	0,76



No	Nama Situ	Lokasi		Luas (Ha)
		Desa	Kecamatan	
8	Karkil	Tobangjaya	Cipatujah	1,75
9	Oblok	Mandalajaya	Cikalong	4,50
10	Batu Hawu	Cikupa	Karangnunggal	3,00
11	Labuan Bulan	Girikencana	Karangnunggal	2,50
12	Asta	Girikencana	Parungponteng	0,50
13	Cigagak	Sukapada	Pagerageung	0,25
14	Sarbeni	Ciwarak	Jatiwaras	1,00
15	Ciburial	Sukapada	Pagerageung	2,00
16	Garunggang	Rajadatu	Cineam	2,00
17	Cilameta	Ciampanan	Cineam	2,00

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029

d. **Klimatologi**

Kabupaten Tasikmalaya memiliki iklim tropis yang dapat dibagi menjadi dua zona berdasarkan ketinggian tempat. Pada dataran rendah, suhu rata-ratanya mencapai 34°C dengan tingkat kelembaban sekitar 50%. Sementara itu, di dataran tinggi, suhu berkisar antara 18° hingga 22° C, dan tingkat kelembaban berkisar antara 61% hingga 73%.

Pola curah hujan yang dominan terjadi di Kabupaten Tasikmalaya adalah dengan curah hujan tertinggi tercatat pada bulan November. Musim hujan umumnya dimulai pada bulan Oktober dan berlanjut hingga beberapa bulan ke depan. Di sisi lain, musim kemarau biasanya berlangsung antara bulan Juni hingga September.

Berdasarkan peta klimatologi Kabupaten Tasikmalaya (Gambar 2.6), kondisi curah hujan di Kabupaten Tasikmalaya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Wilayah dengan Curah Hujan 2500-3000 mm/tahun: Meliputi Kecamatan Sukaraja, Cibalong, Salopa, Pagerageung, Ciawi, dan Jamanis.
- 2) Wilayah dengan Curah Hujan 3000-3500 mm/tahun: Termasuk Kecamatan Cipatujah, Bantarkalong, Karangnunggal, Salopa, Sodonghilir, Cineam, dan Manonjaya.
- 3) Wilayah dengan Curah Hujan 3500-4000 mm/tahun: Melibatkan Kecamatan Bojonggambir, Sodonghilir, Singaparna, Cisayong, Rajapolah, Cikalong, Pancatengah, Cikatomas, dan sebagian dari Pagerageung.



- 4) Wilayah dengan Curah Hujan di Atas 4000 mm/tahun: Kecamatan Taraju, Salawu, Cigalontang, Leuwisari, dan Cisayong adalah wilayah-wilayah yang mengalami curah hujan yang tinggi, melebihi 4000 mm/tahun.



Gambar 2.4

Peta Klimatologi Kabupaten Tasikmalaya

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029

e. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan eksisting di wilayah Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari Kawasan lindung dan Kawasan budidaya. Penggunaan lahan yang terbesar berupa kawasan perkebunan seluas 83.549,50 Ha, sedangkan penggunaan lahan paling kecil berupa taman wisata alam yaitu dengan luas 0,42 Ha. Tabel 2.6 akan memberikan rincian



lebih lanjut tentang kawasan lindung dan kawasan budi daya di Kabupaten Tasikmalaya.

Tabel 2.6
Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya
di Kabupaten Tasikmalaya

POLA RUANG		LUAS
Kawasan Lindung	Badan Air	2.163,17
	Cagar Alam	9,32
	Kawasan Hutan Lindung	16.573,84
	Kawasan Perlindungan Setempat	348,83
	Suaka Margasatwa	17,33
	Taman Wisata Alam	0,42
Kawasan Lindung		19.112,91
Kawasan Budidaya	Kawasan Hortikultura	61.528,47
	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	25.917,94
	Kawasan Hutan Produksi Tetap	4.889,58
	Kawasan Perikanan Budi Daya	384,86
	Kawasan Perkebunan	83.549,50
	Kawasan Permukiman Perdesaan	10.174,99
	Kawasan Permukiman Perkotaan	10.777,86
	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	16,22
	Kawasan Peruntukan Industri	453,97
	Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan	143,89
	Kawasan Peternakan	22,44
	Kawasan Tanaman Pangan	53.709,51
Kawasan Budi Daya		251.569,23
Total		270.682,14

Sumber: RTRW Kab. Tasikmalaya Tahun 2024-2044





Dalam ketentuan penataan ruang, ruang wilayah biasanya dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu:

1) Kawasan Budi Daya

Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Di Kabupaten Tasikmalaya, Kawasan Budidaya mencakup berbagai jenis area, seperti berikut:

- Kawasan Hutan Produksi, yang dapat dirinci meliputi: kawasan hutan produksi terbatas, dan hutan produksi tetap;
- Kawasan Pertanian, kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian yang meliputi kawasan pertanian tanaman pangan, kawasan pertanian hortikultura, kawasan perkebunan, dan kawasan peternakan.
- Kawasan Perikanan, yang dapat dirinci meliputi: kawasan perikanan tangkap dan kawasan perikanan budidaya;
- Kawasan Pertambangan dan Energi, yang dapat dirinci meliputi: mineral, batubara, minyak dan gas bumi, kawasan panas bumi, dan kawasan pembangkitan tenaga listrik.
- Kawasan Peruntukan Industri;
- Kawasan Pariwisata, kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
- Kawasan Permukiman, yang dapat dirinci meliputi: kawasan perkotaan dan perdesaan;
- Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

2) Kawasan Lindung

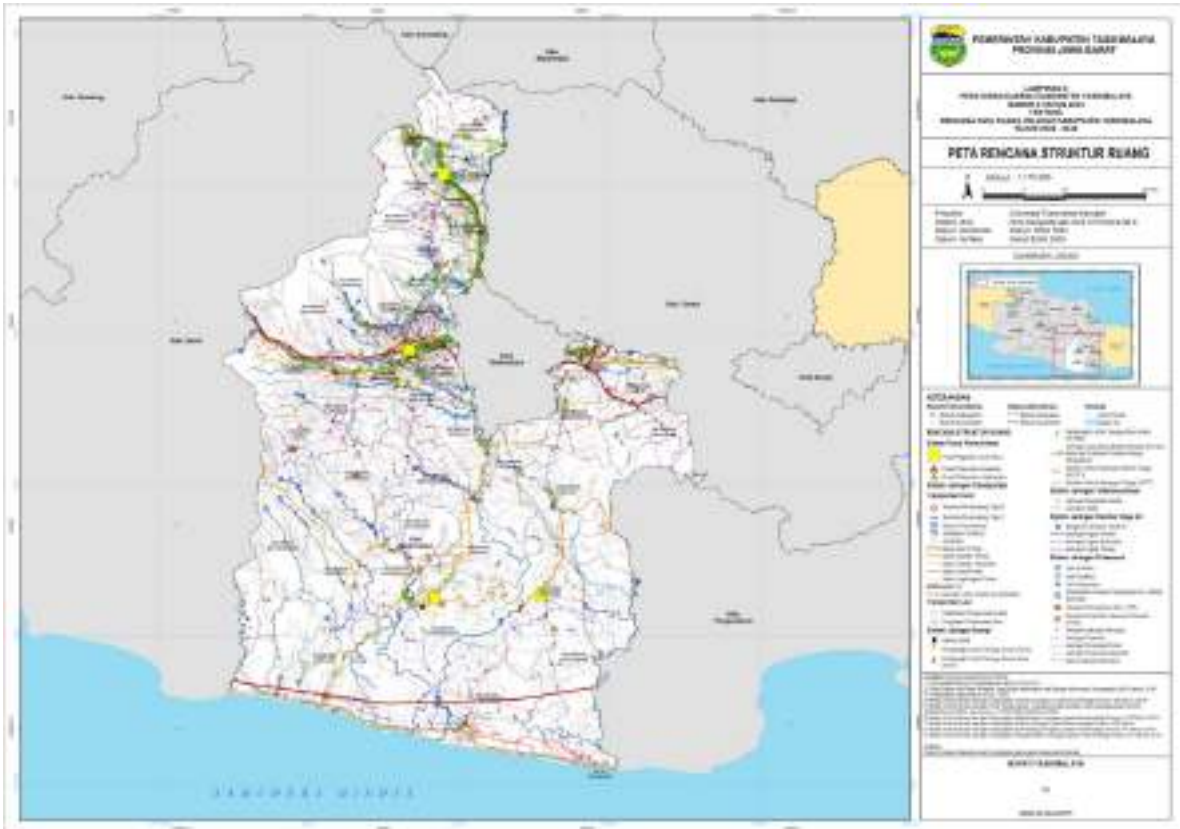
Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Di Kabupaten Tasikmalaya, Kawasan Lindung terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu:

- Badan Air;



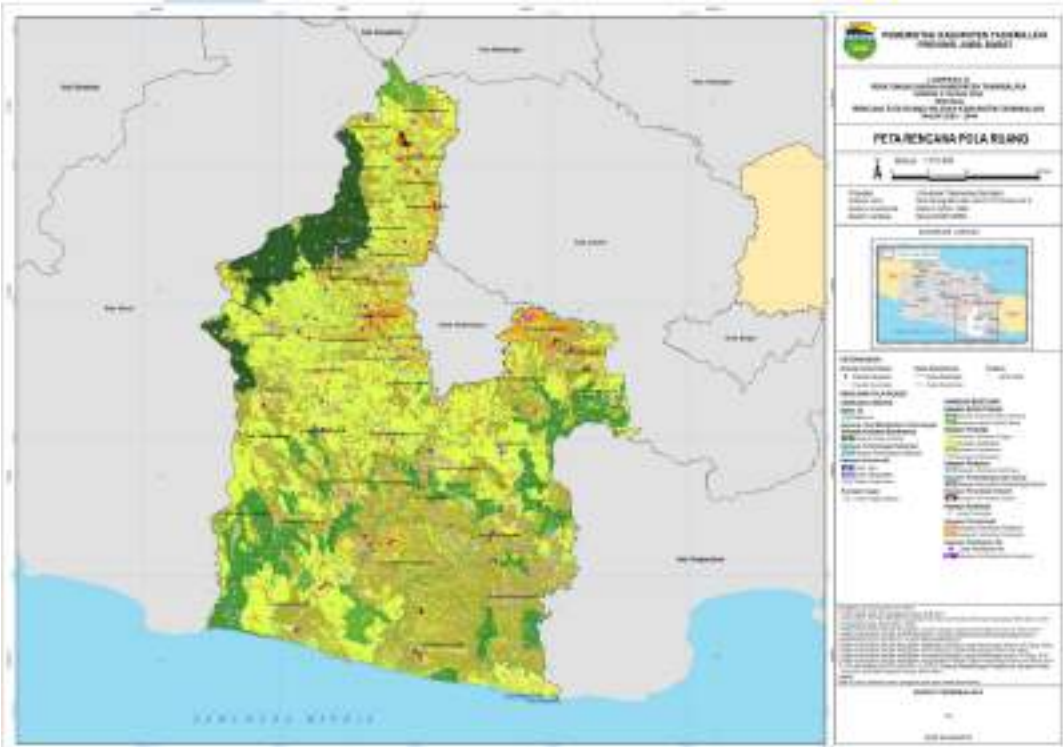


- Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya, meliputi: kawasan bergambut dan kawasan hutan lindung;
- Kawasan Perlindungan Setempat, meliputi: sempadan sungai, sempadan pantai, sempadan danau/waduk/embung, dan sempadan mata air, serta dapat juga berupa Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berada di area perkotaan di dalam wilayah kabupaten yang secara kaidah perpetaan dapat digambarkan dalam skala RTRW kabupaten;
- Kawasan Konversi, meliputi: Kawasan suaka alam dan Kawasan pelestarian alam;
- Kawasan Cagar Budaya.



Gambar 2.5
Peta Rencana Struktur Ruang
Sumber: RTRW Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024-2044





Gambar 2.6
Peta Rencana Pola Ruang
Sumber: RTRW Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024-2044



Gambar 2.7
Peta Sebaran Kawasan Industri
Sumber: Dinas PUTRLH, 2025



Sumber: Dinas PUTRLH, 2025





Gambar 2.10
Peta Sebaran Kawasan Permukiman
Sumber: Dinas PUTRLH, 2025

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Kabupaten Tasikmalaya memiliki potensi sumber daya alam yang beragam dan berkontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi daerah. Potensi tersebut meliputi:

a. Pertanian

Pertanian menjadi sektor unggulan sekaligus tulang punggung perekonomian Kabupaten Tasikmalaya. Kontribusinya mencapai lebih dari 30% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Luas panen padi setiap tahunnya melebihi 150 ribu hektar, menjadikan daerah ini sebagai salah satu lumbung beras di Jawa Barat. Selain padi, komoditas lain yang berkembang adalah jagung, ubi kayu, kedelai, hortikultura (cabai, tomat, sayuran dataran tinggi, buah-buahan), serta tanaman perkebunan (kopi, teh, kelapa, cengkeh).

Produk-produk pertanian juga banyak diolah menjadi makanan khas maupun produk UMKM seperti keripik, gula aren, hingga kopi



kemasan. Hal ini memperkuat peran sektor pertanian tidak hanya sebagai penyedia pangan, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi kreatif berbasis lokal.

b. Pariwisata

Kabupaten Tasikmalaya memiliki keindahan alam yang memikat, budaya yang kaya, serta tradisi religi yang kuat. Gunung Galunggung dengan kawahnya, Pantai Cipatujah dengan garis pantai ± 115 km, serta danau alami Situ Sanghiang menjadi daya tarik wisata alam.

Selain itu, kerajinan khas seperti anyaman telah menembus pasar nasional hingga internasional. Kesenian tradisional seperti benjang dan ronggeng gunung memperkaya daya tarik wisata budaya. Tidak kalah penting, wisata religi Pamijahan dan ziarah ke makam pahlawan nasional KH. Zainal Musthafa serta tokoh ulama lainnya menjadikan Tasikmalaya dikenal luas sebagai destinasi spiritual.

Setiap tahun, ratusan ribu wisatawan berkunjung ke berbagai destinasi di Tasikmalaya. Dengan promosi dan pengembangan infrastruktur yang memadai, sektor pariwisata dapat menjadi motor penggerak baru dalam pembangunan daerah.

c. Kelautan dan Perikanan

Wilayah selatan Tasikmalaya yang berbatasan dengan Samudera Hindia menyimpan potensi kelautan dan perikanan yang melimpah. Produksi tangkapan laut setiap tahun mencapai belasan ribu ton dengan komoditas unggulan tuna, tongkol, cakalang, udang, dan rajungan.

Di sisi lain, budidaya perikanan air tawar (lele, nila, gurame, ikan mas) berkembang luas di kolam-kolam desa, sementara budidaya air payau (udang dan bandeng) serta rumput laut mulai dikembangkan di pesisir. Selain memberikan penghidupan bagi nelayan dan pembudidaya, sektor ini juga berpotensi dikembangkan sebagai wisata bahari terpadu, misalnya wisata memancing, kuliner laut, serta konservasi penyu.

d. Kebudayaan Lokal

Kabupaten Tasikmalaya dikenal sebagai “Mutiara dari Priangan Timur” karena kaya akan potensi baik dari segi alam, budaya, maupun sumber daya manusianya. Selain itu Tasikmalaya dijuluki “Beieren





Van Java” pada masa kolonial bentang alam Kabupaten Tasikmalaya memiliki kemiripam dengan daerah Bavaria di Jerman, dengan lahan pertanian yang subur dan kehidupan Masyarakat yang religious dan berbudaya. Adapun potensi-potensi budaya yang ada di Kabupaten Tasikmalaya mencakup;

a) Cagar Budaya

Kabupaten Tasikmalaya memiliki sebanyak 34 situs Cagar Budaya, 3 Kawasan Cagar Budaya, 8 Bangunan Cagar Budaya, dan 1 Struktur Cagar Budaya. Mencakup 1 bangunan yang sudah ditetapkan yaitu Masjid Agung Manonjaya dan 1 Struktur Jembatan Cirahong yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Tingkat Nasional.

b) Upacara Adat

Beberapa daerah di Kabupaten Tasikmalaya memiliki ritual Upacara Adat yang rutin dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu setiap tahunnya. Hal ini dilakukan dalam rangka ungkapan rasa syukur masyarakat kepada Tuhan atas hasil laut maupun bumi yang dapat menyejahterakan kehidupan.

Tabel 2.7
Upacara Adat di Kabupaten Tasikmalaya

No	Upacara Adat	Tempat	Waktu	Benda Pusaka
1	Prosesi Syukur Laut Nusa Manuk Cikalong	Kp. Sukamenak, Desa Cimanuk, Kec. Cikalong	November	Jampana
2	Prosesi Seni Ngalokat Cai Situ Sanghyang	Kp. Tambakan / Pasir, Desa Cibalanarik, Kec. Tanjungjaya	Agustus	Air, kendi, rakit
3	Prosesi Syukur Nelayan Pamoekan	Kp. Pamoekan, Desa Sindangkerta, Kec. Cipatujah	Juli	
4	Hajat Lembur Sindangkerta	Kp. Cisaat, Desa Sindangkerta Kec. Cipatujah	Desember	
5	Syukur Laut Nelayan Pamayangsari	Kp. Pamayang, Desa Cikawungading, Kec. Cipatujah	Desember	Jampana

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2025





c) Masyarakat Adat Kampung Naga

Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu daerah di Jawa Barat yang kaya akan keberagaman budaya, termasuk keberadaan masyarakat adat. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu, memiliki asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, identitas budaya, hukum adat, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum.

Masyarakat adat yang ada di Kabupaten Tasikmalaya adalah Kampung Naga yang terletak di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu. Kampung ini dihuni oleh sekelompok masyarakat yang sangat kuat dalam menjaga adat istiadat peninggalan leluhurnya, yaitu adat Sunda. Mereka menjalankan tatanan hidup yang telah diwariskan secara turun-temurun dan menolak modernisasi dalam kehidupan.

Secara geografis, Kampung Naga terletak di sebuah lembah sekitar 1 km dari jalan raya utama Tasikmalaya-Garut, memiliki lahan seluas $\pm 1,5$ Ha dengan ketinggian ± 488 meter di atas permukaan laut. Di sebelah Utara dan Selatan berbatasan dengan Parit dan Pesawahan. Sungai Ciwulan di sebelah Timur, dan Bukit/Pasir Kumeli di sebelah Barat. Di sekitar lokasi Kampung Naga tepatnya di Hutan Keramat juga terdapat Makam Leluhur Kampung Naga yakni Eyang Sacaprana.

Masyarakat adat setempat sangat memegang teguh adat dan tradisi yang diwariskan oleh leluhur, serta hidup dalam lingkungan yang damai dan tradisional. Kampung Naga sering dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun internasional karena keunikan budayanya, dan juga menjadi studi kasus tentang peralihan masyarakat pedesaan Sunda dari pengaruh Hindu ke pengaruh Islam di Jawa Barat

d) Kesenian Daerah

Berdasarkan data, terdapat sekitar 30 kesenian daerah yang berkembang di Kabupaten Tasikmalaya diantaranya kesenian Angklung Sered, Calung Tarawangsa, seni Bangklungan, Lodong Gejlig, Karinding Lingkar, Reog, Angklung Landung, Angklung





Rendeng, Angklung Betot, Badeng, Seni Pagerageungan, Aseuk Hatong, Ibing Pencak Silat, dan Gondang.

- e) Status Penetapan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Kabupaten Tasikmalaya

Kabupaten Tasikmalaya memiliki Warisan Budaya Tak Benda yang telah ditetapkan di tingkat nasional sebanyak 2 WBTB, dan 3 WBTB tingkat provinsi.

Tabel 2.8
Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Tingkat Nasional

No	Nama	Alamat	Jenis OPK	Tahun
1	Terbang Sejak	Kp. Naga, Desa Neglasari, Kec. Salawu	Seni Pertunjukan	2024
2	Hajat Sasih	Kp. Naga, Desa Neglasari, Kec. Salawu	Ritus	2024

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2025

Tabel 2.9
Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Tingkat Provinsi

No	Nama	Alamat	Jenis OPK	Tahun
1	Dodol Eluk	Desa Pagerageung, Kec. Pagerageung	Makanan tradisional	2025
2	Anyaman Pandan Sukaruas	Kp. Sukaruas, Desa Sukaraja, Kec. Rajapolah	Kemahiran kerajinan tradisional	2025
3	Golok Galonggong (Bedog Galonggong)	Kp. Galonggong, Desa Cilangkap, Kec. Manonjaya	Kemahiran kerajinan tradisional	2025

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2025

- f) Integrasi Unsur Kebudayaan dengan Pariwisata

Keberadaan masyarakat adat seperti di Kampung Naga tidak terlepas dari tantangan besar, terutama terkait modernisasi, urbanisasi, dan perkembangan infrastruktur. Meskipun





masyarakat adat berusaha mempertahankan tradisi, pengaruh luar seperti arus wisatawan dan kebutuhan ekonomi bisa menjadi ancaman bagi keaslian adat dan nilai-nilai budaya.

Di sisi lain, keberadaan Kampung Naga juga memberikan peluang dalam bidang pariwisata dan pelestarian budaya. Keunikan budaya mereka menjadi daya tarik utama bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Potensi pariwisata ini dapat memberikan manfaat ekonomi tanpa mengorbankan tradisi dan adat yang mereka pertahankan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya memiliki peran strategis dalam pelestarian kehidupan masyarakat adat melalui kebijakan yang berorientasi pada perlindungan hak-hak masyarakat adat serta penguatan kegiatan budaya. Dukungan tersebut diwujudkan melalui upaya perlindungan wilayah adat, pengembangan pendidikan berbasis budaya, dan promosi pariwisata budaya yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat adat menjadi kunci dalam menjaga kelestarian tradisi serta adat istiadat, khususnya di Kampung Naga, sekaligus membuka peluang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui potensi budaya yang dimiliki.

2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten Tasikmalaya tercermin dari kemampuan lingkungan dalam menyediakan air dan pangan bagi masyarakat. Kedua aspek ini menjadi faktor kunci dalam mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.

a. Daya Dukung Air

Analisis daya dukung air dilakukan untuk menilai kemampuan penyediaan air dalam memenuhi kebutuhan penduduk. Analisis daya dukung air dilakukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023 tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional. Ketersediaan air Kabupaten Tasikmalaya dihitung berdasarkan data ketersediaan air pada wilayah aliran sungai sehingga diperoleh ketersediaan air andalan, yang





kemudian didistribusikan menggunakan indeks jasa ekosistem penyediaan air berdasarkan sistem grid.

Adapun Wilayah Sungai (WS) yang melewati Kabupaten Tasikmalaya adalah WS Ciwulan Cilaki seluas 50.765,76 Ha (ketersediaan air menurut SIGI PU 256,01 m³/detik) dan WS Citanduy seluas 219.916,23 Ha (ketersediaan air menurut SIGI PU 153,73 m³/detik). WS Ciwulan Cilaki di Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari DAS Ciwulan, DAS Cilangla, DAS Cimedang, DAS Cipatujah, dan DAS Cisaringi. WS Citanduy di Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari DAS Citanduy. Ketersediaan air tersebut lalu dibandingkan dengan total kebutuhan air Kabupaten Tasikmalaya, yang diperoleh berdasarkan kebutuhan domestik dan kebutuhan lahan, sehingga diperoleh status daya dukung air Kabupaten Tasikmalaya.

Menurut hasil analisis, ketersediaan air total di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2023 adalah 2.725.373.655,30 m³/tahun. Kebutuhan air total pada tahun 2023 adalah 2.722.054.377,00 m³/tahun yang terdiri dari kebutuhan air domestik dan kebutuhan air untuk lahan. Kebutuhan air domestik dihitung berdasarkan standar kebutuhan air untuk hidup layak (KHL) sebesar 43,2 m³/kapita/tahun dan dikalikan 2 sebagai faktor koreksi. Kebutuhan air untuk kegiatan ekonomi berbasis lahan memperhitungkan kelas lahan sawah, perkebunan, kebun campuran, dan tegalan/ladang. Jadi terdapat surplus ketersediaan air sebesar 3.319.278,30 m³/tahun. Berikut merupakan tabel ringkasan perhitungan daya dukung air tahun 2023.

Tabel 2.10
Perhitungan Daya Dukung Air Tahun 2023

Kebutuhan Air Total 2023	2.722.054.377,00 m3/tahun
Kebutuhan Domestik 2023	164.768.688,00 m3/tahun
Kebutuhan Lahan 2023	2.557.285.689,00 m3/tahun
Ketersediaan Air	2.725.373.655,30 m3/tahun
Selisih 2023	3.319.278,30 m3/tahun
Status 2023	Belum Terlampaui 0,12%
Ambang Batas Penduduk 2023	38.417 jiwa

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029, 2024

Ditinjau secara spasial, kecamatan dengan status terlampaui secara umum berada di bagian tengah kabupaten dan beberapa kecamatan di bagian selatan, yaitu Kecamatan Rajapolah, Cisayong,





Sukaratu, Leuwisari, Padakembang, Singaparna, Salawu, Puspahiang, Taraju, Sukarame, Sodonghilir, Sukaraja, Parungponteng, Cipatujah, Cikalong, Karangnunggal, Cikatomas, Salopa, Gunungtanjung, dan Karangjaya.

b. Daya Dukung Pangan

Analisis daya dukung pangan dilakukan untuk mengevaluasi status daya dukung pangan suatu wilayah dengan membandingkan ambang batas daya dukung. Daya dukung pangan dianggap telah melampaui ambang batas jika kebutuhan pangan penduduk melebihi ketersediaan pangan yang dapat disediakan oleh suatu wilayah. Berikut merupakan data produksi tanaman pangan di Kabupaten Tasikmalaya.

Tabel 2.11
Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2020-2024

No.	Jenis Bahan Pangan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Padi	780.555	819.383	736.052	673.269	659.817
2.	Ubi kayu	64.184	57.690	29.709	27.115	18.097
3.	Ubi jalar	19.726	16.652	12.118	9.929	7.609
4.	Sukun	1.387,8	1.307,5	1.446,1	1.763,2	2.475,6
5.	Jagung	57.308	35.699	24.395	30.832	35.721
Jumlah (ton)		923.160,8	930.731,5	803.720,1	742.908,20	723.719,60
Energi (juta kkal)		1.949.126	1.938.492	1.678.160	1.615.180	1.529.457

Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya

Berdasarkan data ketersediaan pangan tahun 2020 - 2024, ketersediaan pangan cenderung menurun dengan rata-rata -10,04% per tahun. Ketersediaan pangan dihitung dengan mengonversi jumlah produksi tanaman pangan menjadi satuan kilo kalori (kkal). Kebutuhan pangan menggunakan standar sebesar 2.150 kkal/orang/tahun sehingga kebutuhan pangan pada tahun 2023 adalah sebesar 1.502.621 juta kkal/tahun, sementara jumlah ketersediaannya adalah sebesar 1.615.180 juta kkal/tahun. Secara umum, kondisi daya dukung pangan di Kabupaten Tasikmalaya berstatus belum terlampaui. Data historis pada tabel tersebut kemudian digunakan untuk menentukan baseline daya dukung pangan pada tahun 2023. Berikut rincian perhitungan daya dukung pangan tahun 2023.



Tabel 2.12
Perhitungan Daya Dukung Pangan Tahun 2023

Kebutuhan Pangan 2023	1.502.621.250.000,00 kkal/tahun
Ketersediaan Pangan 2023	1.615.180.371.313,19 kkal/tahun
Selisih 2023	112.559.121.313,19 kkal/tahun
Status 2023	Belum Terlampaui 6,9%
Ambang Batas Penduduk 2023	143.433 jiwa

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029, 2024

Menurut hasil proyeksi, ketersediaan pangan pada tahun 2023 adalah sebesar 1.615.180 juta kkal/tahun, dan masih terdapat surplus sebesar 112.559 juta kkal/tahun. Adanya LP2B berkontribusi dalam menahan penurunan ketersediaan pangan sehingga tidak terlalu signifikan, dimana pada tahun 2023 ketersediaan pangan dari LP2B adalah sebesar 1.160.935 juta kkal/tahun dan angka ini akan menurun lebih lambat karena penerapan usaha penyediaan dan pengelolaan pangan berkelanjutan.

Ditinjau secara spasial, kecamatan dengan status terlampaui di sebagian besar wilayahnya berada di bagian tengah dan utara Kabupaten Tasikmalaya, yaitu Kecamatan Bojongasih, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Cisayong, Kecamatan Gunungtanjung, Kecamatan Jamanis, Kecamatan Kadipaten, Kecamatan Leuwisari, Kecamatan Manonjaya, Kecamatan Padakembang, Kecamatan Rajapolah, Kecamatan Salawu, Kecamatan Salopa, Kecamatan Sariwangi, Kecamatan Singaparna, Kecamatan Sukahening, Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Sukarame, Kecamatan Sukaratu, Kecamatan Sukaresik, dan Kecamatan Tanjungjaya. Secara spasial dapat dilihat pada Gambar 2.9.





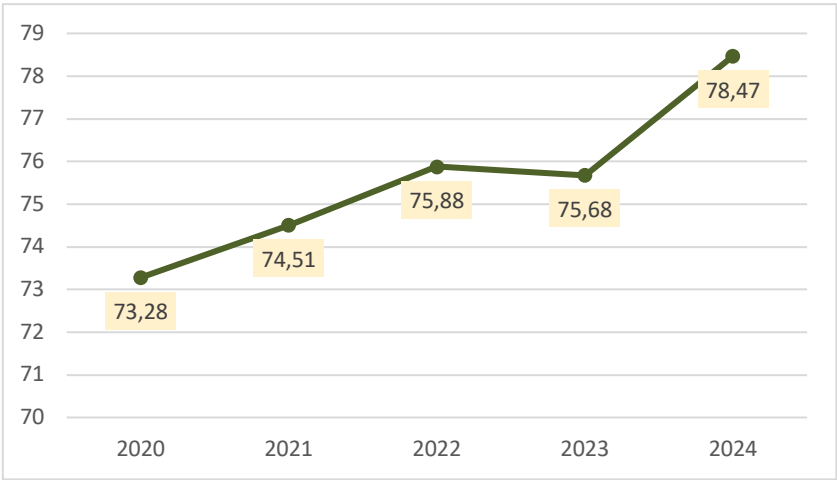
Peta Daya Dukung Air Kabupaten Tasikmalaya
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029





Untuk mengukur tingkat ketahanan pangan suatu wilayah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian yang dikenal sebagai Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Sistem ini disusun berdasarkan definisi ketahanan pangan dan mencakup ketiga subsistem utama dalam sistem ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan.

Penyusunan IKP didasarkan pada sembilan indikator utama yang merupakan turunan dari ketiga, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator yang digunakan dalam IKP didasarkan pada: (i) hasil review terhadap indeks ketahanan pangan global; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan; dan (iv) ketersediaan data secara rutin untuk periode tertentu (tahunan) serta mencakup seluruh kabupaten/kota dan provinsi. Berikut adalah capaian Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024.



Gambar 2.13
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025 (diolah)

Selama periode 2020–2024, capaian Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tasikmalaya secara umum menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2024, nilai IKP tercatat sebesar 78,47 poin dan masuk dalam kategori “sangat tahan”, yang mencerminkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan di wilayah ini telah berjalan cukup baik.





Namun demikian, meskipun capaian indeks mengalami peningkatan, Kabupaten Tasikmalaya masih menempati peringkat ke-24 dari 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Posisi ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan di Kabupaten Tasikmalaya masih relatif tertinggal dibandingkan dengan sebagian besar daerah lain di provinsi ini.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terfokus dan berkelanjutan untuk memperkuat sistem ketahanan pangan daerah, antara lain melalui peningkatan kapasitas produksi pertanian, perluasan akses terhadap pangan bergizi, pengurangan angka kemiskinan, penguatan intervensi gizi masyarakat, serta perbaikan sistem distribusi dan infrastruktur pangan.

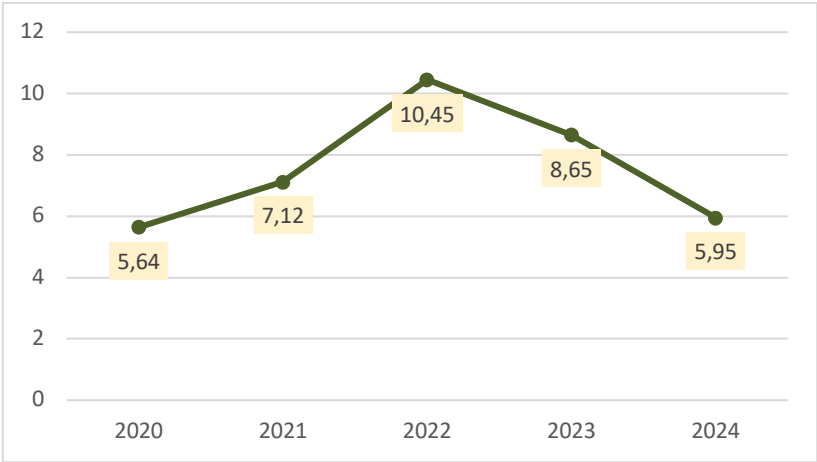
b. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan atau dikenal dengan istilah *Prevalence of Undernourishment* (PoU) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kondisi kerawanan pangan dan gizi suatu wilayah. Indikator ini mencerminkan proporsi penduduk yang secara reguler mengonsumsi pangan dalam jumlah yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan energi minimum harian guna hidup sehat, aktif, dan produktif.

Ketidacukupan konsumsi pangan terjadi ketika asupan energi dari makanan sehari-hari berada di bawah kebutuhan minimum yang telah ditentukan, yang didasarkan pada karakteristik demografis seperti usia, jenis kelamin, dan tinggi badan. Dengan demikian, PoU menggambarkan proporsi penduduk yang mengalami defisit energi kronis dalam suatu populasi pada tahun tertentu.

Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU) dihitung sebagai persentase populasi yang asupan energinya berada di bawah ambang batas kebutuhan minimum energi terhadap total populasi pada periode waktu tertentu.





Gambar 2.14
Prevalensi Ketidacukupan Pangan Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2020-2024
Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Selama periode 2020–2024, prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan di Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan tren yang fluktuatif. Namun demikian, pada tahun 2024, nilai PoU tercatat sebesar 5,95 persen, yang berarti sekitar 6 dari setiap 100 penduduk mengalami konsumsi energi di bawah kebutuhan minimum harian.

Capaian ini menunjukkan adanya perbaikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, namun angka ini masih menunjukkan adanya kelompok masyarakat yang rentan terhadap kerawanan pangan dan gizi, terutama di wilayah dengan tingkat kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap pangan yang tinggi.

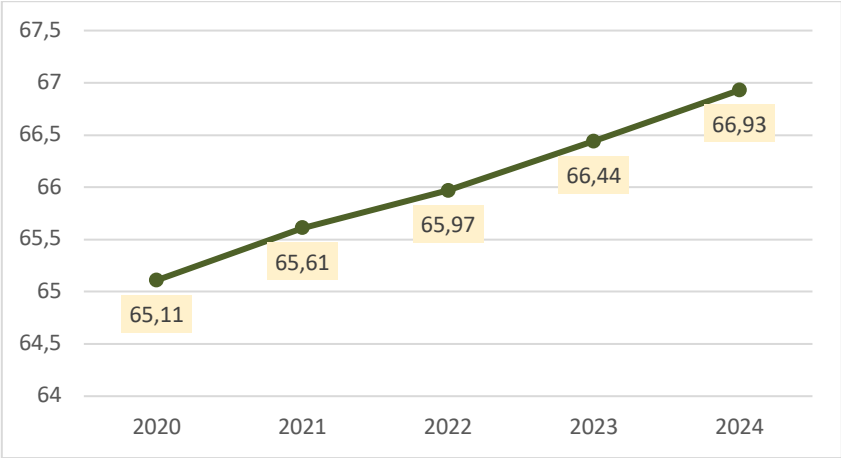
Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk menurunkan angka PoU lebih lanjut, seperti peningkatan program perlindungan sosial berbasis pangan, edukasi gizi masyarakat, serta penguatan sistem distribusi dan ketersediaan pangan di daerah-daerah yang rawan. Upaya ini penting untuk memastikan seluruh masyarakat, khususnya kelompok rentan, dapat memperoleh pangan yang cukup dan bergizi untuk menunjang kualitas hidup yang sehat dan produktif.

c. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Persentase penduduk berakses air minum adalah proporsi penduduk yang memiliki akses ke sumber air minum yang aman, memadai, dan terjangkau, sehingga dapat memenuhi kebutuhan air minum sehari-hari.



Pengukuran persentase penduduk berakses air minum dilakukan untuk mengevaluasi tingkat ketersediaan dan aksesibilitas air minum yang aman dan memadai bagi masyarakat, sehingga dapat memantau kemajuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar air minum.



Gambar 2.15
Persentase Penduduk Berakses Air Minum Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024
Sumber: DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya, 2025 (diolah)

Berdasarkan tren selama tahun 2020-2024 menunjukkan progres yang cukup signifikan. Pada tahun 2024 realisasi penduduk berakses air minum mencapai 66,93%. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan perhatian pemerintah Daerah terkait pendanaan untuk program dan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan dasar (SPM).

Kenaikan yang konsisten ini dicapai melalui strategi pembangunan infrastruktur yang terukur dan tidak hanya berfokus pada sistem perpipaan milik PERUMDA Air Minum Tirta Sukapura. Secara realistis, Pemerintah Daerah telah berhasil mengintegrasikan dan memverifikasi peningkatan akses melalui penyediaan air minum non-perpipaan yang layak (seperti pembangunan sumur bor dalam, perlindungan mata air, dan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Komunal/SPAM Komunal) di daerah-daerah yang sulit dijangkau jaringan pipa konvensional. Pendekatan multi-sektor ini memastikan bahwa walaupun pertumbuhan perpipaan mungkin lambat, cakupan akses air minum yang aman dan layak tetap meningkat secara inklusif. Stabilitas pertumbuhan ini menunjukkan bahwa program-program pemeliharaan dan pengembangan (baik teknis maupun non-teknis) telah mampu mengimbangi peningkatan jumlah penduduk dan menjaga agar tingkat layanan tidak menurun,



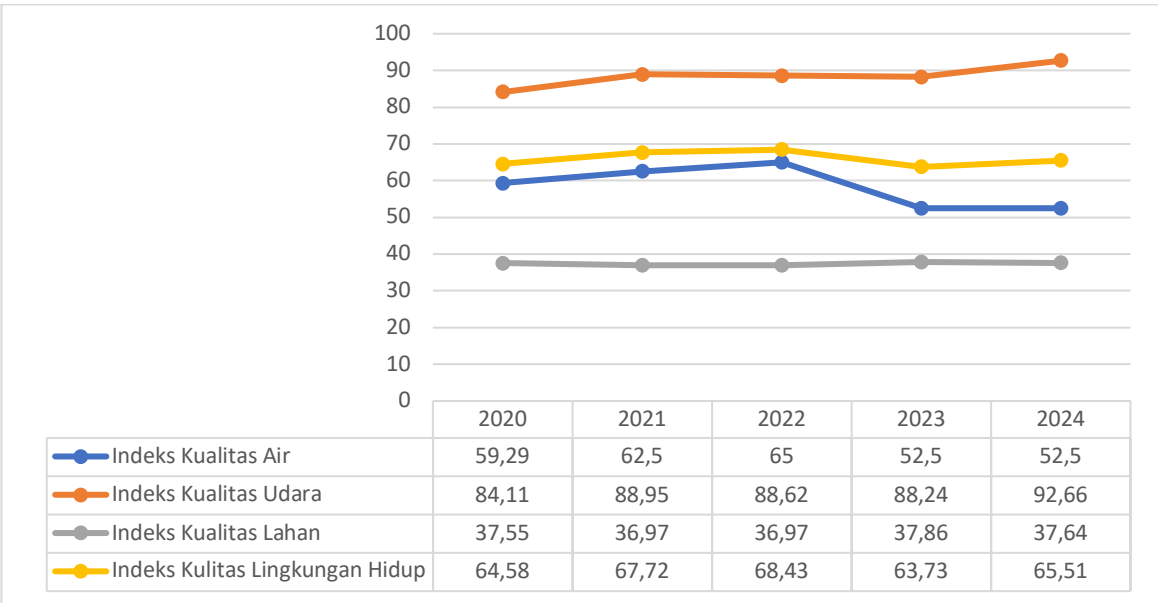
yang merupakan pencapaian penting dalam konteks pelayanan publik daerah.

2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

Lingkungan hidup yang berkualitas merupakan salah satu fondasi penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Tasikmalaya.

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Urusan lingkungan hidup memiliki urgensi yang tinggi dalam menentukan arah pembangunan dan kemajuan wilayah Kabupaten Tasikmalaya, khususnya dalam perencanaan pembangunan lima tahun mendatang. Untuk penilaian mutu lingkungan hidup dapat dihitung dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH mencakup nilai sejumlah indikator, termasuk kualitas air, udara, dan kualitas penggunaan lahan. Berikut adalah capaian IKLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024.



Gambar 2.16
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2020-2024

Sumber: DPUTRLH Kab. Tasikmalaya, 2025 (diolah)

Data capaian IKLH menunjukkan bahwa nilai IKLH Kabupaten Tasikmalaya cenderung meningkat dari tahun 2020 hingga 2022 yaitu diangka 68,43. Pada tahun 2023 IKLH Kabupaten Tasikmalaya mengalami penurunan hingga angka 63,73. Hal ini dipengaruhi oleh menurunnya kualitas air danau dan rendahnya sampah tertangani yang mempengaruhi kondisi lingkungan hidup. Selain itu, perlu



diketahui bahwa pada tahun 2023 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah memberlakukan rumus baru untuk menentukan nilai IKLH sehingga nilai IKLH Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2023 juga mengalami perubahan.

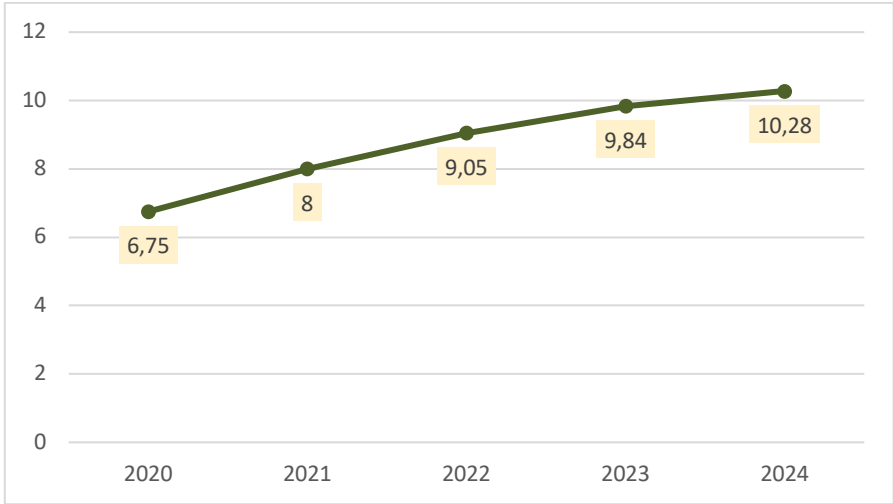
Pada Tahun 2024, realisasi indeks kualitas lingkungan hidup mengalami peningkatan sebesar 1,78 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Secara umum, kondisi IKLH Kabupaten Tasikmalaya masih berada pada kategori 'sedang'. Indeks Kualitas Air juga termasuk dalam kriteria 'sedang', sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas air minum yang dikonsumsi oleh masyarakat.

Namun, Indeks Kualitas Lahan masuk dalam kategori 'kurang', hal ini disebabkan oleh banyaknya lahan kritis dan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang perlu dipulihkan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Diperlukan kerja sama untuk penghijauan dan reboisasi dalam menangani lahan dan DAS kritis secara optimal.

b. Persentase Sampah yang Terkelola

Masalah persampahan juga berdampak pada kondisi lingkungan. Apabila sampah tidak dikelola dengan efektif, hal ini dapat menyebabkan pencemaran. Di Kabupaten Tasikmalaya, pengelolaan persampahan dilayani oleh satu-satunya TPST, yaitu TPST Nangkaleah yang terletak di Kecamatan Mangunreja. Namun, pelayanan pengelolaan sampah ini belum optimal karena hanya mencakup 13 kecamatan dari 39 kecamatan sehingga nilai persentase sampah yang terkelola baru mencapai 10,28% pada Tahun 2024 dengan jumlah sampah yang tertangani sebanyak 36.157 ton dari 351.785 ton. Berikut adalah grafik persentase sampah yang terkelola dari Tahun 2020-2024.





Gambar 2.17
Persentase Sampah yang Terkelola
Tahun 2020-2024

Sumber: DPUTRLH Kab. Tasikmalaya, 2025 (diolah)

Persentase timbunan sampah yang terolah mencapai 0,85% pada tahun 2024 dari total timbunan harian sebesar 768,368 ton, yang terdiri atas 60% sampah organik dan 40% anorganik. Layanan pengumpulan sampah meningkat menjadi 8%, tetapi penanganan di wilayah perkotaan baru mencapai 8,9%, sedangkan di wilayah perdesaan masih 0%, disebabkan keterbatasan sarana pengumpulan.

Permasalahan persampahan di Kabupaten Tasikmalaya berakar pada keterbatasan infrastruktur dan jangkauan pelayanan. Keterbatasan ini menyebabkan hanya sedikit sampah yang berhasil terkelola, sementara sisanya berpotensi berakhir di tempat pembuangan sampah liar (TPA Ilegal), yang memicu pencemaran lingkungan. Layanan pengumpulan sampah sangat minim di wilayah perdesaan, disebabkan oleh keterbatasan armada pengangkutan sampah serta sarana penunjang lainnya yang tidak memadai untuk menjangkau seluruh wilayah. Selain itu, komposisi sampah harian yang didominasi oleh 60% sampah organik dan 40% anorganik menjadi tantangan karena masih minimnya praktik pemilahan sampah di tingkat sumber, sehingga memperberat beban operasional satu-satunya fasilitas pengolahan, yaitu TPA Nangkaleah, yang juga menghadapi isu keterbatasan daya tampung dan usia pakai.





Tabel 2.13
Timbunan Sampah Tahun 2020-2024

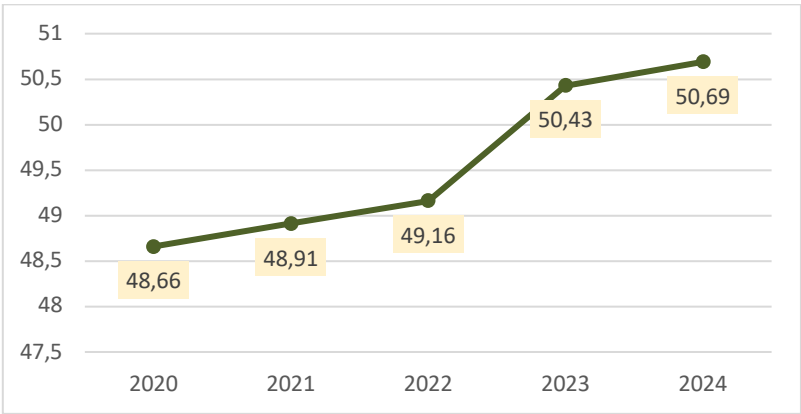
Timbunan Sampah 2020 – 2024			
Tahun	kg/hari	kg/ton	ton/tahun
2020	744.424,00	744,42	271.714,76
2021	750.756,00	750,76	274.025,94
2022	756.888,00	756,89	276.264,12
2023	762.820,00	762,82	278.429,30
2024	768.368,00	768,37	280.454,32

Sumber: DPUTRLH Kab. Tasikmalaya, 2025

c. Persentase Rumah Tinggal Berakses Sanitasi

Persentase rumah tinggal berakses sanitasi adalah proporsi rumah tinggal yang memiliki akses ke fasilitas sanitasi yang memadai, aman, dan sehat, seperti jamban atau toilet yang terhubung dengan sistem pembuangan yang baik.

Pengukuran persentase rumah tinggal berakses sanitasi dilakukan untuk mengevaluasi tingkat ketersediaan dan aksesibilitas fasilitas sanitasi yang memadai dan sehat bagi masyarakat, sehingga dapat memantau kemajuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar sanitasi dan kesehatan.



Gambar 2.18
Persentase Rumah Tinggal Berakses Sanitasi
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024
Sumber: DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya, 2025 (diolah)



Berdasarkan tren selama tahun 2020-2024 menunjukkan progres yang cukup signifikan, meningkat dari 48,66% pada tahun 2020 menjadi 50,69% pada tahun 2024. Peningkatan ini didorong oleh adanya peningkatan perhatian Pemerintah Daerah terkait pendanaan untuk program dan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan dasar. Secara kritis, keberhasilan Kabupaten Tasikmalaya melampaui batas 50% akses sanitasi pada tahun 2023 (mencapai 50,43%) merupakan pencapaian psikologis penting. Tren percepatan ini, yang terlihat dari lonjakan signifikan antara tahun 2022 dan 2023, menunjukkan efektivitas program-program seperti Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) atau peningkatan infrastruktur MCK komunal. Namun, meskipun terdapat progres, angka 50,69% di tahun 2024 secara realistis berarti setengah dari rumah tangga di Tasikmalaya masih belum memiliki akses sanitasi yang layak, yang seringkali mengarah pada praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di daerah pedesaan terpencil. Oleh karena itu, tantangan terbesar ke depan adalah mempertahankan momentum pertumbuhan yang dicapai pada tahun 2023, sambil mengatasi hambatan berupa masyarakat yang sulit dijangkau dan perlunya teknologi sanitasi yang sesuai dengan kondisi geografis serta keterbatasan lahan di wilayah Tasikmalaya.

2.1.1.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim merupakan kemampuan suatu wilayah dalam mengantisipasi, merespons, serta memulihkan diri dari dampak bencana maupun perubahan iklim, sehingga fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan dapat tetap berjalan secara berkelanjutan.

a. Wilayah Rawan Bencana

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mendefinisikan bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.



Salah satu faktor pemicu terjadi bencana adalah kondisi wilayah. Secara topografi, Kabupaten Tasikmalaya memiliki topografi yang beragam yaitu dataran bergelombang lemah sampai bergelombang kuat di daerah selatan sampai tengah, dan ke utara topografinya berupa perbukitan sampai pegunungan. Rata-rata curah hujan kabupaten Tasikmalaya adalah sebesar 3.442 mm, Kondisi curah hujan berpengaruh terhadap potensi bencana.

Sebagai salah satu wilayah Rawan Bencana dengan intensitas tinggi yang telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat memerlukan perhatian khusus pemerintah Daerah terutama dalam perencanaan pembangunan harus mengacu RTRW dan KLHS.

Pada Tahun 2018 Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah melakukan Pengkajian Risiko Bencana di Kabupaten Tasikmalaya yang menghasilkan Tingkat Risiko Bencana melalui penghitungan 3 komponen utama yaitu bahaya, kerentanan dan kapasitas. Ketiga komponen tersebut ditentukan berdasarkan parameter masing-masing.

Komponen bahaya ditentukan melalui analisis probabilitas (peluang kejadian) dan intensitas (besarnya kejadian), komponen kerentanan dihitung berdasarkan empat parameter yaitu, kerentanan sosial (penduduk terpapar), kerentanan ekonomi (kerugian lahan produktif) kerentanan fisik (kerugian akibat kerusakan rumah dan bangunan), dan kerentanan lingkungan (kerusakan lingkungan). Terakhir komponen kapasitas ditentukan dengan menggunakan 2 parameter yaitu, ketahanan daerah (sektor pemerintah) dan kesiapsiagaan masyarakat (sektor masyarakat). Pengkajian juga bertujuan untuk mengetahui luas dan indeks bahaya, sementara bagi Pemerintah Daerah akan menjadi bahan dalam menentukan kebijakan penanganan bencana di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Potensi bencana yang ada di Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan hasil kajian bencana dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.14
Potensi Bencana di Kabupaten Tasikmalaya

No	Jenis Bencana
1	Banjir
2	Banjir Bandang
3	Cuaca Ekstrim
4	Gelombang Ekstrim dan Abrasi
5	Gempa Bumi
6	Kebakaran Hutan dan Lahan
7	Kekeringan
8	Letusan Gunung Api
9	Tanah Longsor
10	Tsunami

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

1) Bencana Banjir

Berdasarkan hasil kajian, potensi bahaya banjir di kabupaten Tasikmalaya diperkirakan seluas 53.154 Ha yang tersebar pada 39 kecamatan, dengan kategori terdiri atas 11 kecamatan Kelas **BAHAYA RENDAH**, 3 kecamatan kelas **BAHAYA SEDANG** dan 25 kecamatan termasuk kelas **BAHAYA TINGGI**, sementara kecamatan Sukaresik dan kecamatan Cipatujah menjadi wilayah yang sering mengalami bencana banjir terparah. Sebagaimana terlihat pada Tabel 2.14.

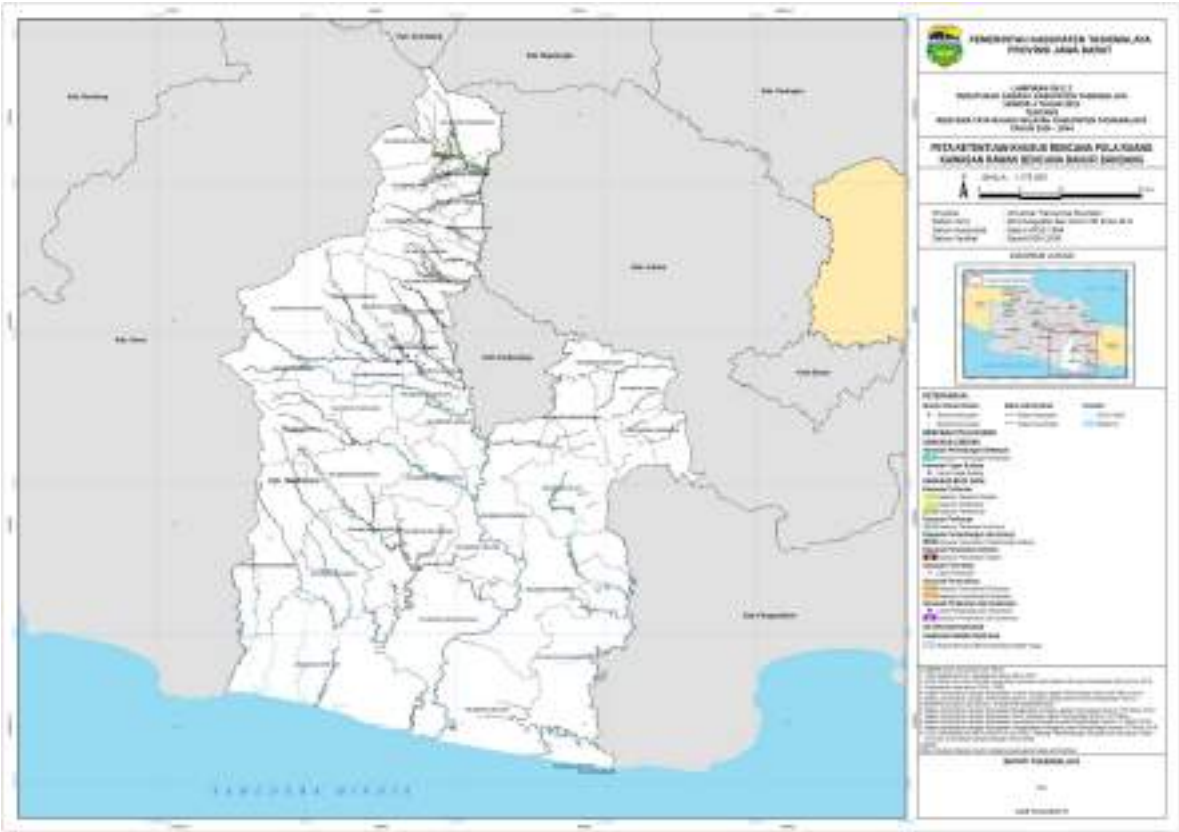
Tabel 2.15
Risiko Bencana Banjir per Kecamatan
di Kabupaten Tasikmalaya

No.	Kecamatan	Luas Risiko (Ha)			Total	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Bantarkalong	897,21	232,06	300,53	1.429,80	Rendah
2	Bojongasih	593,88	139,22	190,45	923,55	Rendah
3	Bojonggambir	268,45	180,88	630,57	1.079,90	Tinggi
4	Ciawi	241,68	278,48	331,81	851,97	Tinggi
5	Cibalong	852,38	181,35	197,17	1.230,91	Rendah
6	Cigalontang	525,60	369,01	888,35	1.782,97	Tinggi
7	Cikalong	2.566,53	657,77	544,29	3.768,59	Rendah
8	Cikatomas	1.763,41	430,98	417,87	2.612,26	Rendah
9	Cineam	380,89	202,60	346,03	929,52	Tinggi
10	Cipatujah	3.756,50	1.070,21	1.292,07	6.118,78	Tinggi
11	Cisayong	429,13	371,82	376,93	1.177,88	Tinggi
12	Culamega	359,54	150,27	344,94	854,75	Tinggi
13	Gunungtanjung	192,76	55,84	84,41	333,01	Tinggi
14	Jamanis	159,48	144,14	122,82	426,44	Tinggi



No.	Kecamatan	Luas Risiko (Ha)			Total	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
15	Jatiwaras	709,01	214,40	258,77	1.182,18	Rendah
16	Kadipaten	177,04	177,13	284,09	638,26	Tinggi
17	Karangjaya	135,32	68,36	182,28	385,96	Tinggi
18	Karangnunggal	3.092,53	838,88	651,23	4.582,64	Rendah
19	Leuwisari	230,76	244,68	167,41	642,85	Tinggi
20	Mangunreja	356,73	122,64	107,38	586,76	Rendah
21	Manonjaya	208,67	104,16	173,94	486,77	Tinggi
22	Padakembang	341,84	418,10	436,81	1.196,75	Tinggi
23	Pegerageung	643,57	340,17	206,62	1.190,36	Tinggi
24	Pancatengah	3.138,09	834,84	868,62	4.841,55	Rendah
25	Parungponteng	568,75	167,41	184,26	920,42	Rendah
26	Puspahiang	165,21	45,75	106,78	317,74	Tinggi
27	Rajapolah	174,22	100,26	81,75	356,23	Tinggi
28	Salawu	233,54	151,59	249,73	634,86	Tinggi
29	Salopa	740,15	235,79	451,15	1.427,10	Tinggi
30	Sariwangi	424,82	303,75	318,99	1.047,56	Tinggi
31	Singaparna	562,24	472,16	259,12	1.293,52	Tinggi
32	Sodonghilir	548,34	199,56	364,66	1.112,56	Tinggi
33	Sukahening	56,61	88,64	181,76	327,01	Tinggi
34	Sukaraja	518,74	112,38	136,99	768,11	Rendah
35	Sukarame	917,68	584,67	361,97	1.864,32	Sedang
36	Sukaratu	541,33	637,40	399,96	1.578,68	Sedang
37	Sukaresik	367,24	310,35	284,96	962,54	Tinggi
38	Tanjungjaya	708,31	163,15	230,71	1.102,17	Tinggi
39	Taraju	63,13	47,75	77,50	186,56	Tinggi
Kabupaten Tasikmalaya		28.609,47	11.448,63	13.095,68	53.153,78	Tinggi

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023



Gambar 2.19
Peta Sebaran Bencana Banjir Kabupaten Tasikmalaya
Sumber: RTRW Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024-2044

2) Banjir Bandang

Dari parameter bahaya banjir bandang, maka dapat ditentukan luas bahaya dan kelas bahaya banjir bandang per kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya pada Tabel 2.16.

Tabel 2.16
Luas Bahaya dan Kelas Bahaya Banjir Bandang per Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya

No.	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Bantarkalong	7,19	56,86	159,06	223,11	Tinggi
2	Bojongasih	11,36	69,30	192,21	272,87	Tinggi
3	Bojonggambir	4,96	59,04	290,83	354,83	Tinggi
4	Ciawi	17,81	161,74	298,77	478,32	Tinggi
5	Cibalong	4,77	49,35	190,05	244,17	Tinggi
6	Cigalontang	3,21	65,58	276,91	345,70	Tinggi
7	Cikalong	3,13	31,66	303,93	338,71	Tinggi
8	Cikatomas	2,51	43,11	167,67	213,30	Tinggi
9	Cineam	-	22,91	79,39	102,30	Tinggi
10	Cipatujah	6,67	39,47	239,34	285,48	Tinggi
11	Cisayong	39,05	195,44	475,03	709,52	Tinggi
12	Culamega	0,69	40,08	187,10	227,87	Tinggi



No.	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
13	Gunungtanjung	-	4,17	26,34	30,51	Tinggi
14	Jamanis	19,70	93,08	165,70	278,48	Tinggi
15	Jatiwaras	1,68	48,24	159,72	209,64	Tinggi
16	Kadipaten	0,95	20,30	67,59	88,84	Tinggi
17	Karangjaya	1,80	10,84	58,42	71,07	Tinggi
18	Karangnunggal	13,26	76,11	407,61	496,99	Tinggi
19	Mangunreja	3,51	16,94	57,23	77,69	Tinggi
20	Manonjaya	0,87	34,86	78,32	114,06	Tinggi
21	Pagerageung	5,33	59,45	176,52	241,30	Tinggi
22	Pancatengah	1,55	55,39	302,96	359,89	Tinggi
23	Parungponteng	-	16,14	48,75	64,89	Tinggi
24	Puspahiang	0,39	12,93	44,31	57,63	Tinggi
25	Rajapolah	4,71	50,75	136,57	192,03	Tinggi
26	Salawu	3,69	50,39	136,28	190,37	Tinggi
27	Salopa	6,89	62,72	287,27	356,88	Tinggi
28	Sariwangi	7,44	53,99	102,77	164,20	Tinggi
29	Singaparna	2,36	12,42	44,17	58,94	Tinggi
30	Sodonghilir	6,10	91,00	216,74	313,84	Tinggi
31	Sukahening	7,34	55,73	129,02	192,10	Tinggi
32	Sukaraja	4,22	21,54	87,64	113,40	Tinggi
33	Sukarame	-	14,04	66,47	80,51	Tinggi
34	Sukaratu	15,97	104,77	268,14	388,88	Tinggi
35	Sukaresik	15,10	65,54	108,59	189,23	Tinggi
36	Tanjung Jaya	2,73	21,88	83,59	108,20	Tinggi
37	Taraju	4,83	33,59	160,88	199,30	Tinggi
Kabupaten Tasikmalaya		231,79	1.921,38	6.281,89	8.435,05	Tinggi

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

3) Bencana Cuaca Ekstrim

Adapun potensi luas bahaya dan kelas bahaya cuaca ekstrim per kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.17
Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim per Kecamatan
di Kabupaten Tasikmalaya

No.	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Bantarkalong	-	20,04	610,66	630,69	Tinggi
2	Bojongasih	-	26,29	583,46	609,75	Tinggi
3	Bojonggambir	-	178,71	82,79	261,51	Tinggi
4	Ciawi	-	66,63	1.550,52	1.617,15	Tinggi
5	Cibalong	-	99,55	1.044,92	1.144,47	Tinggi
6	Cigalontang	-	6,77	479,09	485,86	Tinggi
7	Cikalong	-	1.981,96	5.175,43	7.157,39	Tinggi



No.	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
8	Cikatomas	-	260,27	3.203,00	3.463,27	Tinggi
9	Cineam	-	95,04	2.302,93	2.397,97	Tinggi
10	Cipatujah	-	2.773,83	6.805,25	9.579,08	Tinggi
11	Cisayong	-	68,34	4.124,85	4.193,19	Tinggi
12	Gunungtanjung	-	37,96	756,67	794,63	Tinggi
13	Jamanis	-	46,47	2.073,18	2.119,66	Tinggi
14	Jatiwaras	-	34,09	1.470,31	1.504,40	Tinggi
15	Kadipaten	-	4,33	493,46	497,79	Tinggi
16	Karangnunggal	-	618,99	6.974,52	7.593,51	Tinggi
17	Leuwisari	-	572,28	3.292,70	3.864,98	Tinggi
18	Mangunreja	-	46,91	944,82	991,73	Tinggi
19	Manonjaya	-	126,17	2.706,99	2.833,16	Tinggi
20	Padakembang	-	111,86	3.142,56	3.254,43	Tinggi
21	Pagerageung	-	59,04	1.872,37	1.931,41	Tinggi
22	Pancatengah	-	1.239,53	9.006,68	10.246,21	Tinggi
23	Parungponteng	-	-	14,66	14,66	Tinggi
24	Puspahiang	-	2,82	166,51	169,33	Tinggi
25	Rajapolah	-	57,09	2.078,27	2.135,37	Tinggi
26	Salawu	-	17,64	353,92	371,56	Tinggi
27	Salopa	-	271,66	1.354,38	1.626,04	Tinggi
28	Sariwangi	-	366,12	2.212,07	2.578,18	Tinggi
29	Singaparna	-	124,53	2.314,72	2.439,25	Tinggi
30	Sodonghilir	-	-	10,35	10,35	Tinggi
31	Sukahening	-	45,22	805,69	850,91	Tinggi
32	Sukaraja	-	80,84	1.206,71	1.287,56	Tinggi
33	Sukarame	-	114,35	2.596,59	2.710,94	Tinggi
34	Sukaratu	-	98,12	3.631,89	3.730,01	Tinggi
35	Sukaresik	-	175,00	1.415,02	1.590,02	Tinggi
36	Tanjung Jaya	-	114,98	1.365,14	1.480,12	Tinggi
37	Taraju	-	54,51	90,76	145,27	Tinggi
Kabupaten Tasikmalaya		-	9.997,95	78.313,86	88.311,81	Tinggi

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

4) Bencana Gelombang Ekstrim Abrasi

Dari parameter bahaya gelombang ekstrim dan abrasi, maka dapat ditentukan luas bahaya dan kelas bahaya bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Kabupaten Tasikmalaya. Adapun rekapitulasi pengkajian bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di masing-masing kecamatan dijelaskan pada Tabel 2.18.

Tabel 2.18
Potensi Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi
per Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya

No.	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Cikalong	-	-	322,14	322,14	Tinggi
2	Cipatujah	-	-	473,50	473,50	Tinggi



No.	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
3	Karangnunggal	-	-	61,46	61,46	Tinggi
Kabupaten Tasikmalaya		-	-	857,09	857,09	Tinggi

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

Tabel 2.11 menunjukkan bahwa besaran luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Kabupaten Tasikmalaya seluas 857,09 Ha yang terdapat pada 3 kecamatan dengan kelas bahaya TINGGI.

5) Bencana Gempa Bumi

Dari kajian dan analisa parameter bahaya gempa bumi, diperoleh luas bahaya dan kelas bahaya gempa bumi di Kabupaten Tasikmalaya. Adapun potensi luas bahaya untuk bencana gempa bumi di Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat pada Tabel 2.19.

Tabel 2.19
Potensi Bahaya Gempa Bumi per Kecamatan
di Kabupaten Tasikmalaya

No.	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Bantarkalong	4.024,04	1.698,63	260,33	5.983,00	Sedang
2	Bojongasih	2.897,55	820,52	139,93	3.858,00	Rendah
3	Bojonggambir	13.382,96	3.546,04	-	16.929,00	Rendah
4	Ciawi	3.914,50	554,57	62,92	4.532,00	Sedang
5	Cibalong	4.217,65	1.619,12	21,23	5.858,00	Rendah
6	Cigalontang	9.170,02	2.690,38	114,59	11.975,00	Sedang
7	Cikalong	3.297,90	9.151,91	1.516,19	13.966,00	Sedang
8	Cikatomas	8.050,54	4.936,27	281,19	13.268,00	Sedang
9	Cineam	7.700,88	178,12	-	7.879,00	Rendah
10	Cipatujah	9.006,43	12.830,26	2.830,30	24.667,00	Tinggi
11	Cisayong	3.467,15	2.472,85	-	5.940,00	Sedang
12	Culamega	5.455,17	1.376,83	-	6.832,00	Rendah
13	Gunungtanjung	2.656,42	974,58	-	3.631,00	Sedang
14	Jamanis	1.589,39	533,29	5,32	2.128,00	Sedang
15	Jatiwaras	5.858,98	1.434,00	44,02	7.337,00	Rendah
16	Kadipaten	4.281,91	276,69	20,40	4.579,00	Sedang
17	Karangjaya	4.637,24	152,76	-	4.790,00	Rendah
18	Karangnunggal	3.816,91	7.724,04	2.092,05	13.633,00	Sedang
19	Leuwisari	1.741,98	3.486,33	97,69	5.326,00	Sedang
20	Mangunreja	522,27	1.466,37	3,36	1.992,00	Sedang
21	Manonjaya	2.502,02	1.438,98	-	3.941,00	Sedang
22	Padakembang	662,39	2.997,51	111,10	3.771,00	Sedang
23	Pagerageung	5.851,30	815,93	6,77	6.674,00	Sedang
24	Pancatengah	6.287,41	12.693,85	1.203,74	20.185,00	Sedang
25	Parungponteng	3.265,58	1.430,87	30,55	4.727,00	Sedang



No.	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
26	Puspahiang	2.960,13	529,87	-	3.490,00	Rendah
27	Rajapolah	748,11	1.396,89	-	2.145,00	Sedang
28	Salawu	4.164,43	885,57	-	5.050,00	Sedang
29	Salopa	10.214,74	1.950,64	10,62	12.176,00	Sedang
30	Sariwangi	2.327,29	2.068,88	569,83	4.966,00	Tinggi
31	Singaparna	-	1.919,36	562,64	2.482,00	Tinggi
32	Sodonghilir	7.172,42	2.138,58	-	9.311,00	Sedang
33	Sukahening	2.816,27	25,73	-	2.842,00	Rendah
34	Sukaraja	3.038,18	1.269,82	-	4.308,00	Rendah
35	Sukarame	113,77	2.137,55	712,68	2.964,00	Tinggi
36	Sukaratu	2.486,26	3.049,58	177,16	5.713,00	Sedang
37	Sukaesik	627,67	1.141,70	10,63	1.780,00	Sedang
38	Tanjung Jaya	1.869,60	1.799,40	-	3.669,00	Sedang
39	Taraju	3.900,65	1.684,35	-	5.585,00	Sedang
Kabupaten Tasikmalaya		160.698,15	99.298,61	10.885,24	270.882,00	Tinggi

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

Secara keseluruhan Kabupaten Tasikmalaya memiliki potensi luas bahaya bencana gempa bumi sebesar 270.882 Ha yang tersebar pada 10 kecamatan kelas bahaya RENDAH, 25 kecamatan kelas bahaya SEDANG, dan 4 kecamatan kelas bahaya TINGGI.

6) **Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)**

Dari parameter bahaya kebakaran hutan dan lahan, maka dapat ditentukan luas bahaya dan kelas bahaya per kecamatan yang terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tasikmalaya yang dapat dilihat pada Tabel 2.20.

Tabel 2.20
Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan per Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya

No.	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Bantarkalong	393,82	-	-	393,82	Rendah
2	Bojongasih	853,34	37,07	-	890,41	Rendah
3	Bojonggambir	1.787,40	124,44	-	1.911,84	Sedang
4	Ciawi	1.477,47	5,99	-	1.483,46	Rendah
5	Cibalong	1.318,26	-	-	1.318,26	Rendah
6	Cigalontang	4.747,20	-	-	4.747,20	Rendah
7	Cikalong	247,08	774,03	-	1.021,11	Sedang
8	Cikatomas	1.208,83	77,55	-	1.286,37	Rendah
9	Cineam	1.810,28	214,32	-	2.024,60	Sedang



No.	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
10	Cipatujah	2.458,95	3.330,46	-	5.789,41	Sedang
11	Cisayong	777,11	-	-	777,11	Rendah
12	Culamega	1.604,42	258,62	-	1.863,04	Rendah
13	Gunungtanjung	343,38	-	-	343,38	Rendah
14	Jatiwaras	493,36	231,99	-	725,35	Sedang
15	Kadipaten	806,08	341,48	-	1.147,56	Sedang
16	Karangjaya	1.628,30	196,67	-	1.824,96	Sedang
17	Karangnunggal	489,41	274,02	-	763,43	Sedang
18	Leuwisari	1.941,54	-	-	1.941,54	Rendah
19	Manonjaya	45,57	-	-	45,57	Rendah
20	Padakembang	345,18	-	-	345,18	Rendah
21	Pagerageung	1.003,55	232,94	-	1.236,49	Rendah
22	Pancatengah	1.324,70	479,42	-	1.804,12	Sedang
23	Parungponteng	437,01	18,49	-	455,51	Rendah
24	Puspahiang	435,05	-	-	435,05	Rendah
25	Salawu	1.037,93	-	-	1.037,93	Rendah
26	Salopa	1.384,00	503,74	-	1.887,75	Sedang
27	Sariwangi	2.409,78	-	-	2.409,78	Rendah
28	Sodonghilir	738,12	-	-	738,12	Rendah
29	Sukahening	1.269,40	7,89	-	1.277,29	Rendah
30	Sukaraja	148,25	294,25	-	442,50	Sedang
31	Sukaratu	1.366,10	-	-	1.366,10	Rendah
32	Tanjung Jaya	-	44,07	-	44,07	Sedang
33	Taraju	592,40	582,48	-	1.174,88	Sedang
Kabupaten Tasikmalaya		36.923,23	8.029,94	-	44.953,18	Sedang

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

7) Bencana Kekeringan

Parameter bahaya kekeringan yang digunakan dalam kajian ini adalah kekeringan meteorologis. Hasil analisi bahaya kering berupa luas bahaya dan kelas bahaya per kecamatan yang terdampak bencana kekeringan di Kabupaten Tasikmalaya yang dapat dilihat pada Tabel 2.21.

Tabel 2.21
Potensi Bahaya Kekeringan per Kecamatan
di Kabupaten Tasikmalaya

No.	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Bantarkalong	654,90	4.771,28	556,82	5.983,00	Sedang
2	Bojongasih	-	3.269,74	588,26	3.858,00	Sedang
3	Bojonggambir	15.164,70	-	1.764,30	16.929,00	Rendah
4	Ciawi	214,72	3.135,67	1.181,62	4.532,00	Tinggi
5	Cibalong	-	5.176,33	681,67	5.858,00	Sedang



No.	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
6	Cigalontang	8.917,73	1.244,15	1.813,12	11.975,00	Sedang
7	Cikalong	-	12.773,06	1.192,94	13.966,00	Sedang
8	Cikatomas	-	11.639,54	1.628,46	13.268,00	Sedang
9	Cineam	-	5.679,97	2.199,03	7.879,00	Sedang
10	Cipatujah	5.571,95	17.105,08	1.989,97	24.667,00	Sedang
11	Cisayong	158,57	3.714,79	2.066,65	5.940,00	Tinggi
12	Culamega	2.062,21	4.136,09	633,70	6.832,00	Sedang
13	Gunungtanjung	-	2.477,61	1.153,39	3.631,00	Sedang
14	Jamanis	-	1.329,27	798,73	2.128,00	Tinggi
15	Jatiwaras	-	6.108,07	1.228,93	7.337,00	Sedang
16	Kadipaten	26,24	3.889,10	663,66	4.579,00	Sedang
17	Karangjaya	-	3.736,13	1.053,87	4.790,00	Sedang
18	Karangnunggal	-	12.505,04	1.127,96	13.633,00	Sedang
19	Leuwisari	2.285,63	1.853,51	1.186,87	5.326,00	Sedang
20	Mangunreja	71,24	1.347,98	572,78	1.992,00	Sedang
21	Manonjaya	-	2.248,39	1.692,61	3.941,00	Tinggi
22	Padakembang	229,99	2.234,42	1.306,58	3.771,00	Sedang
23	Pagerageung	256,13	5.290,38	1.127,49	6.674,00	Tinggi
24	Pancatengah	41,39	16.645,86	3.497,74	20.185,00	Sedang
25	Parungponteng	-	3.742,71	984,29	4.727,00	Sedang
26	Puspahiang	1.472,48	1.553,79	463,73	3.490,00	Sedang
27	Rajapolah	-	1.101,76	1.043,24	2.145,00	Tinggi
28	Salawu	4.055,10	52,85	942,06	5.050,00	Tinggi
29	Salopa	-	10.013,87	2.162,13	12.176,00	Sedang
30	Sariwangi	3.907,59	364,29	694,11	4.966,00	Tinggi
31	Singaparna	-	1.769,23	712,77	2.482,00	Tinggi
32	Sodonghilir	4.371,17	3.194,49	1.745,34	9.311,00	Sedang
33	Sukahening	193,30	1.963,61	685,10	2.842,00	Sedang
34	Sukaraja	-	3.388,41	919,59	4.308,00	Sedang
35	Sukarame	-	2.151,97	812,03	2.964,00	Tinggi
36	Sukaratu	1.091,52	3.320,53	1.300,95	5.713,00	Tinggi
37	Sukaresik	-	932,79	847,21	1.780,00	Tinggi
38	Tanjung Jaya	-	2.940,53	728,47	3.669,00	Sedang
39	Taraju	4.240,94	64,37	1.279,69	5.585,00	Rendah
Kabupaten Tasikmalaya		54.987,50	168.866,64	47.027,86	270.882,00	Tinggi

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

Secara keseluruhan bencana kekeringan di Kabupaten Tasikmalaya memiliki potensi luas bahaya dengan total 270.882 Ha yang tersebar pada 2 kecamatan kelas bahaya RENDAH, 25 kecamatan kelas bahaya SEDANG, dan 12 kecamatan kelas bahaya TINGGI.





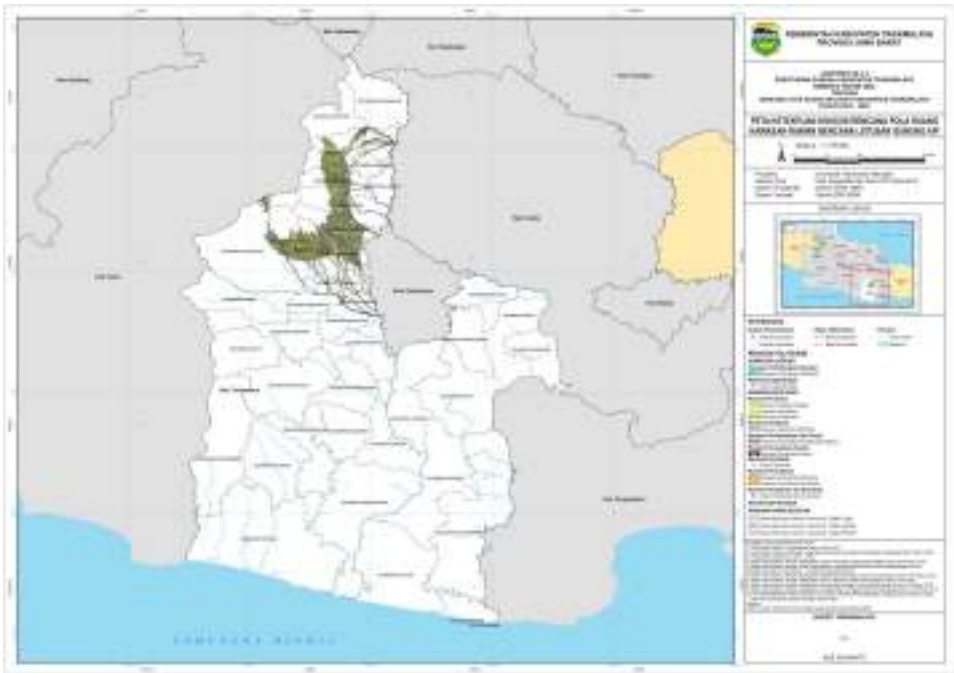
8) **Bencana Letusan Gunung Api Galunggung**

Dari parameter bahaya letusan gunung api, maka dapat ditentukan luas bahaya dan kelas bahaya per kecamatan yang terdampak bencana Letusan Gunung Api Galunggung di Kabupaten Tasikmalaya yang dapat dilihat pada Tabel 2.22.

Tabel 2.22
Potensi Bahaya Letusan Gunung Api Galunggung
per Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya

No.	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Cigalontang	1.448,20	149,90	-	1.598,10	Rendah
2	Cisayong	1.092,88	116,12	-	1.209,00	Sedang
3	Lewisari	2.502,28	962,40	-	3.464,68	Rendah
4	Mangunreja	38,15	-	-	38,15	Rendah
5	Padakembang	2.223,23	537,50	-	2.760,73	Rendah
6	Sariwangi	2.396,36	810,28	-	3.206,64	Rendah
7	Singaparna	342,78	10,46	-	353,24	Rendah
8	Sukahening	441,04	-	-	441,04	Rendah
9	Sukaraja	14,03	-	-	14,03	Rendah
10	Sukarame	451,90	-	-	451,90	Rendah
11	Sukaratu	1.968,06	2.646,60	-	4.614,66	Sedang
12	Tanjung Jaya	86,24	-	-	86,24	Rendah
Kabupaten Tasikmalaya		13.005,16	5.233,26	-	18.238,42	Sedang

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023



Gambar 2.20
Peta Sebaran Bencana Letusan Gunung Api Galunggung
Sumber: RTRW Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024-2044



9) **Bencana Tanah Longsor**

Dari parameter bahaya tanah longsor, maka dihasilkan potensi bahaya tanah longsor di Kabupaten Tasikmalaya memiliki potensi luas bahaya dengan total luasan 164.326 Ha. Bahaya tanah longsor tersebar pada 3 kecamatan kelas bahaya RENDAH, 27 kecamatan kelas bahaya SEDANG, dan 8 kecamatan kelas bahaya TINGGI di Kabupaten Tasikmalaya. Adapun potensi luas bahaya tanah longsor dan kelas bahaya per kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat secara lebih rinci pada tabel berikut.

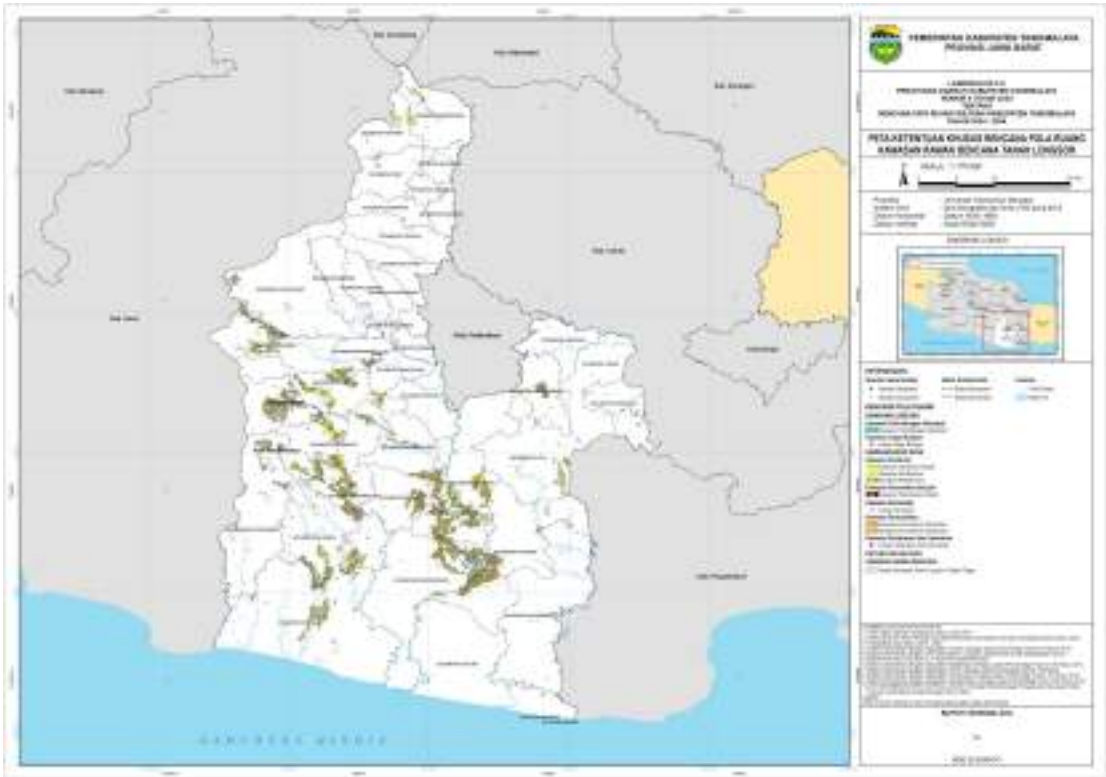
Tabel 2.23
Potensi Bahaya Tanah Longsor per Kecamatan
di Kabupaten Tasikmalaya

No.	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Bantarkalong	574,41	2.576,24	1.584,31	4.734,96	Tinggi
2	Bojongasih	315,59	2.349,32	384,50	3.049,41	Sedang
3	Bojonggambir	1.411,49	12.631,84	855,03	14.898,36	Sedang
4	Ciawi	172,62	2.322,02	246,32	2.740,96	Sedang
5	Cibalong	241,09	1.798,88	2.251,78	4.291,75	Tinggi
6	Cigalontang	38,19	8.491,42	1.319,66	9.849,28	Sedang
7	Cikalong	2.450,54	4.282,91	12,53	6.745,98	Sedang
8	Cikatomas	1.399,74	6.649,22	1.108,77	9.157,73	Tinggi
9	Cineam	77,04	4.854,63	213,88	5.145,55	Sedang
10	Cipatujah	3.054,62	9.923,87	983,32	13.961,80	Sedang
11	Cisayong	149,82	1.111,07	180,53	1.441,42	Sedang
12	Culamega	589,37	4.738,01	780,37	6.107,76	Sedang
13	Gunungtanjung	216,36	2.288,93	246,50	2.751,79	Sedang
14	Jamanis	12,86	-	-	12,86	Rendah
15	Jatiwaras	161,99	4.145,87	796,87	5.104,74	Tinggi
16	Kadipaten	317,74	2.848,97	327,69	3.494,40	Sedang
17	Karangjaya	16,10	3.879,73	246,49	4.142,32	Sedang
18	Karangnunggal	1.553,70	2.791,57	1.208,11	5.553,38	Tinggi
19	Leuwisari	92,48	1.011,87	387,03	1.491,38	Sedang
20	Mangunreja	56,62	774,15	176,32	1.007,09	Sedang
21	Manonjaya	194,91	920,28	42,36	1.157,55	Sedang
22	Padakembang	136,39	232,75	31,56	400,69	Sedang
23	Pagerageung	625,19	3.169,12	654,30	4.448,61	Sedang
24	Pancatengah	3.807,42	5.601,01	51,76	9.460,20	Sedang
25	Parungponteng	119,12	2.923,95	211,36	3.254,42	Sedang
26	Puspahiang	25,80	2.632,97	387,49	3.046,26	Tinggi
27	Rajapolah	4,34	-	-	4,34	Rendah
28	Salawu	15,05	3.666,68	571,04	4.252,78	Sedang
29	Salopa	61,10	8.809,84	834,21	9.705,16	Sedang
30	Sariwangi	146,36	1.732,67	467,38	2.346,41	Sedang



No.	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
31	Singaparna	79,00	39,24	-	118,24	Sedang
32	Sodonghilir	385,11	5.225,45	2.012,84	7.623,39	Tinggi
33	Sukahening	235,29	1.216,39	150,19	1.601,86	Sedang
34	Sukaraja	405,68	2.445,62	-	2.851,30	Sedang
35	Sukarame	285,76	-	-	285,76	Rendah
36	Sukaratu	231,92	983,83	565,34	1.781,08	Sedang
37	Tanjung Jaya	265,03	1.669,84	119,05	2.053,92	Sedang
38	Taraju	8,29	2.902,83	1.340,91	4.252,04	Tinggi
Kabupaten Tasikmalaya		19.934,13	123.642,98	20.749,80	164.326,91	Tinggi

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023



Gambar 2.21
Peta Sebaran Bencana Longsor Kabupaten Tasikmalaya
Sumber: RTRW Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024-2044

Berdasarkan hasil analisis bahaya diketahui bahwa Kecamatan Cigalontang mempunyai kelas bahaya tanah longsor TINGGI dan Kecamatan Sodonghilir dan Kecamatan Sukahening yang berada pada kelas SEDANG mengalami bencana tanah longsor sebanyak 5 kejadian dalam Tahun 2018 (data BPBD Kabupaten Tasikmalaya). Kejadian bencana tanah longsor disebabkan oleh intensitas curah hujan yang tinggi dan ketidakmampuan tanah menahan beban sehingga menyebabkan gerakan tanah/longsor.



10)Bencana Tsunami

Dari parameter Tsunami, maka dapat dapat ditentukan luas bahaya dan kelas bahaya per kecamatan yang terdampak bencana Tsunami di Kabupaten Tasikmalaya seperti pada Tabel 2.24.

Tabel 2.24
Potensi Bahaya Tsunami per Kecamatan
di Kabupaten Tasikmalaya

No.	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Cikalong	21,75	17,23	281,54	320,52	Tinggi
2	Cipatujah	5,66	16,69	280,04	302,40	Tinggi
3	Karangnunggal	2,59	7,12	62,10	71,81	Tinggi
Kabupaten Tasikmalaya		30,00	41,04	623,69	694,73	Tinggi

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

Tabel 2.17. menunjukkan secara keseluruhan bencana tsunami di Kabupaten Tasikmalaya memiliki potensi luas bahaya dengan total luasan 694.73 Ha yang berada pada kelas TINGGI.



Gambar 2.22
Peta Sebaran Bencana Tsunami Kabupaten Tasikmalaya
Sumber: RTRW Kab. Tasikmalaya Tahun 2024-2044

b. Indeks Risiko Bencana

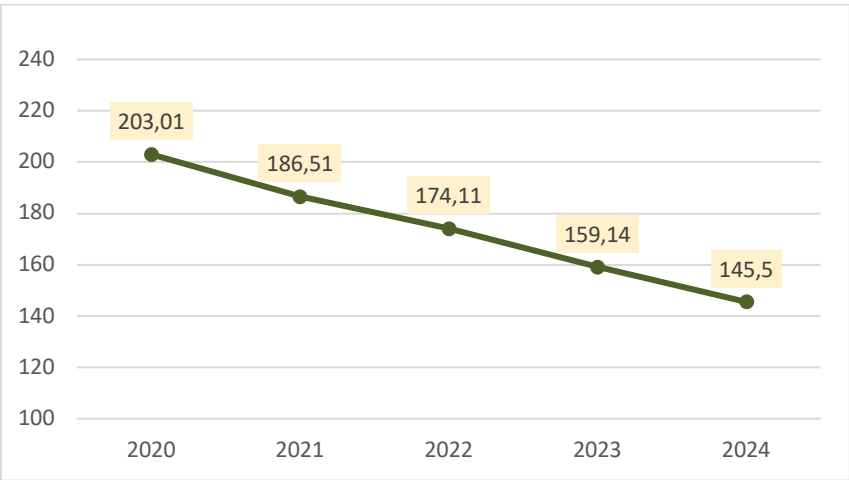
Kabupaten Tasikmalaya berada di daerah yang memiliki kerawanan bencana tinggi, baik bencana alam geologi maupun



hidrometeorologi. Bencana alam geologi berupa tsunami, gunung api, dan gempa bumi. Sedangkan bencana alam hidrometeorologi di antaranya kekeringan, banjir, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, dan gelombang ekstrim dan abrasi.

Selama Tahun 2020-2024, indeks risiko bencana di Kabupaten Tasikmalaya mengalami penurunan signifikan sebesar 57,51 poin, dari 203,1 pada tahun 2020 menjadi 145,50 poin pada Tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan adanya peningkatan efektivitas berbagai upaya mitigasi dan penanggulangan bencana, baik melalui pembangunan infrastruktur pengendali bencana, penguatan sistem peringatan dini, maupun peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi kondisi darurat.

Meskipun demikian, nilai indeks 145,50 pada tahun 2024 masih menunjukkan tingkat risiko yang relatif tinggi, mengingat kondisi geografis dan topografis Kabupaten Tasikmalaya yang rentan terhadap bencana geologi maupun hidrometeorologi. Oleh karena itu, strategi mitigasi dan adaptasi perlu terus diperkuat agar tren penurunan indeks risiko bencana dapat berlanjut secara konsisten dan berkesinambungan.



Gambar 2.23
Indeks Risiko Bencana Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2025 (diolah)

c. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Penurunan emisi GRK kumulatif menjadi salah satu indikator penting terkait perubahan iklim sebagaimana Indonesia berkomitmen mengurangi emisi GRK sebesar 358 juta ton CO2 pada tahun 2030.





Kabupaten Tasikmalaya turut mendukung target nasional tersebut dengan menetapkan target penurunan emisi GRK kumulatif sebesar 621.707,06 ton CO₂eq pada tahun 2025, 1.248.130,04 ton CO₂eq pada tahun 2029, dan 1.404.735,78 ton CO₂eq pada tahun 2030.

Upaya untuk mencapai target penurunan emisi GRK diperlukan agar isu kebencanaan dan perubahan iklim dapat teratasi sesuai target dalam rentang waktu 5 tahun pembangunan. Beberapa Langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain efisiensi energi, implementasi energi baru dan terbarukan, bahan bakar rendah karbon, reklamasi tambang, dan lainnya.

Penanganan perubahan iklim melalui aksi penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di tingkat kabupaten merupakan sebuah inisiatif yang bersifat kompleks dan multisektor. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada koordinasi yang solid dan keterlibatan aktif dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau dinas terkait. Setiap dinas memegang peran krusial sesuai dengan fungsi dan program kerjanya masing-masing.

Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPUTRLH) berdiri di garis depan sebagai koordinator utama. Dinas ini mengemban mandat untuk menyusun inventarisasi emisi GRK lokal, melakukan pelaporan, serta menggerakkan aksi mitigasi dan adaptasi. Fokus DPUTRLH mencakup peningkatan pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) untuk menangkap gas metana, mendorong daur ulang sampah, dan memantau kualitas udara. Melalui program perencanaan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, dinas ini memastikan aspek kelestarian menjadi prioritas.

Secara paralel, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memainkan peran strategis dalam mengintegrasikan upaya ini ke dalam kerangka pembangunan yang lebih luas. Bappeda memastikan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi GRK (RAD-GRK) tidak hanya menjadi dokumen pelengkap, melainkan terpatri kuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sehingga memiliki legitimasi anggaran dan kebijakan.





Aksi mitigasi kemudian merambah ke sektor-sektor spesifik. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika berfokus pada emisi dari sektor transportasi. Melalui program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), dinas ini mendorong kebijakan pembangunan infrastruktur rendah karbon dan pengelolaan sistem transportasi yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Di sektor hulu, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan mengambil peran vital. Dinas ini mengimplementasikan metode pertanian rendah emisi, seperti pengelolaan pupuk tepat guna dan pengurangan pembakaran lahan, serta mengembangkan varietas tanaman yang lebih tangguh terhadap perubahan iklim melalui program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.

Terakhir, sektor ekonomi dan industri juga tidak luput dari perhatian. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mengelola emisi dari sektor industri melalui program perencanaan dan pembangunan industri yang mengedepankan efisiensi energi dan produksi bersih.

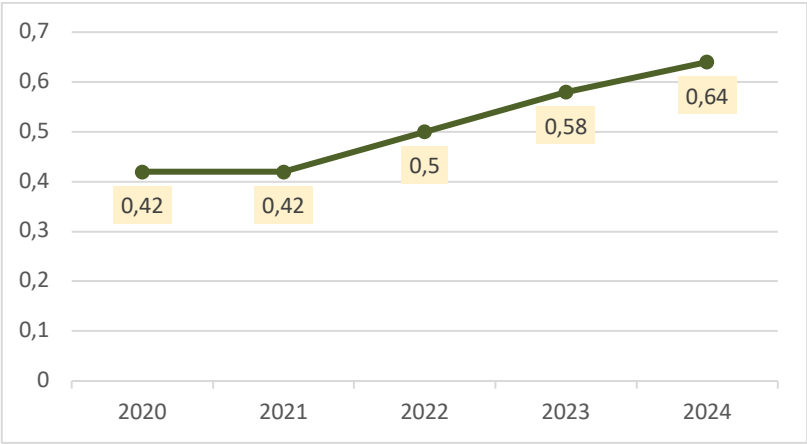
Keseluruhan peran ini menunjukkan bahwa aksi penurunan GRK di tingkat kabupaten adalah sebuah orkestrasi kebijakan dan implementasi yang terkoordinasi. Sinergi antar-SKPD ini merupakan kunci untuk menciptakan pembangunan daerah yang tangguh iklim (*climate-resilient*) dan berkelanjutan.

d. Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan komponen penilaian untuk melihat ketahanan (kapasitas) sebuah daerah dalam hal kebencanaan. Semakin tinggi nilai IKD, maka menunjukkan kapasitas daerah dalam menangani risiko bencana. Untuk IKD yang tergolong tinggi berada pada angka 0,8-1; kategori sedang yaitu 0,4-0,8; dan kategori rendah kurang dari 0,4.

Kabupaten Tasikmalaya merupakan daerah yang rawan bencana sehingga harus memiliki kesiapan dalam menghadapi bencana. Secara umum, pada Tahun 2020 sampai 2024 IKD Kabupaten Tasikmalaya mengalami kenaikan dan berada pada kategori sedang. Capaian IKD dapat dilihat pada grafik berikut.





Gambar 2.24
Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2025 (diolah)

2.1.1.7 Demografi

Aspek demografi menggambarkan kondisi penduduk secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu. Aspek demografi di Kabupaten Tasikmalaya dapat digambarkan melalui kondisi demografi seperti ukuran, struktur dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk pada populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnis tertentu.

Perkembangan demografi berperan penting dalam pembangunan karena merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Besaran, komposisi dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang dan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan.

a. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk

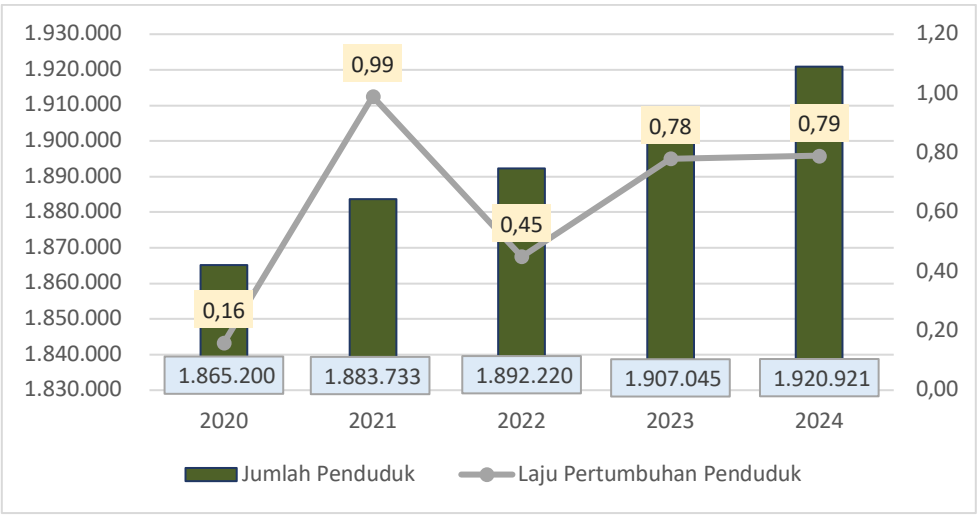
Jumlah penduduk Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024 tercatat sebanyak 1.920.921 jiwa, terdiri atas 972.023 jiwa penduduk laki – laki dan 948.898 jiwa penduduk perempuan dengan laju pertumbuhan penduduk tahun 2020-2024 sebesar 0,79 persen.

Laju pertumbuhan penduduk per tahun adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase





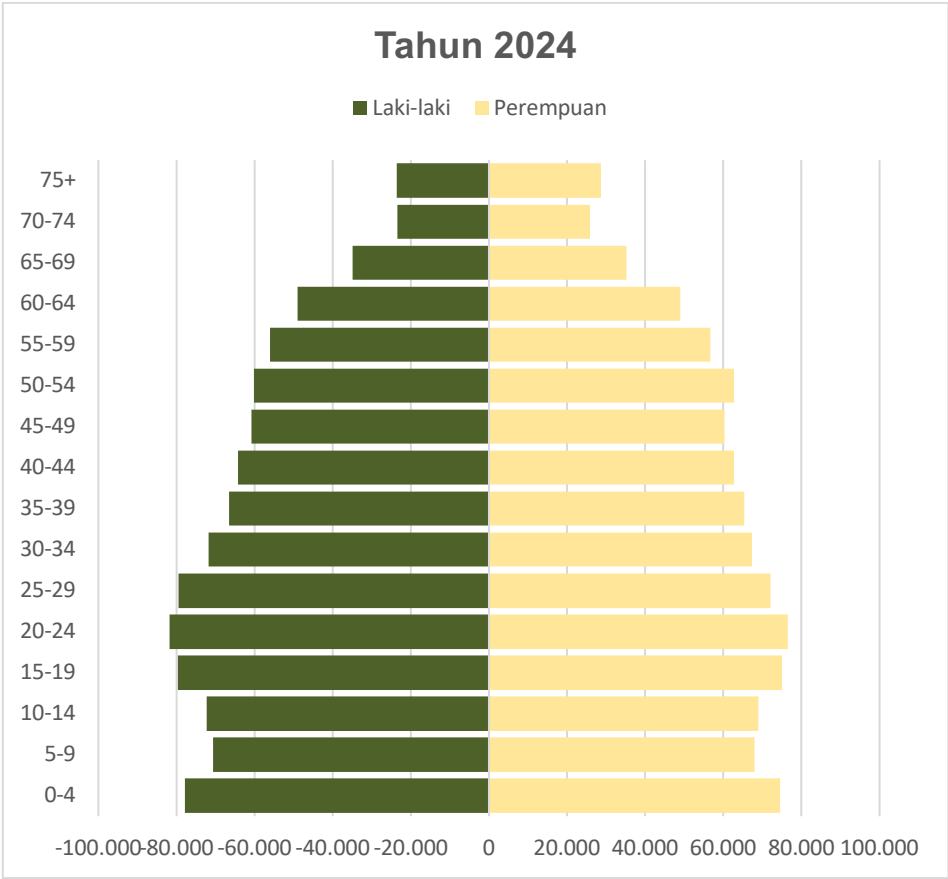
dari penduduk dasar. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2024 sebesar 0,79% dan mengalami kenaikan 0,01% dari tahun 2023.



Gambar 2.25
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2025

Penduduk di Kabupaten Tasikmalaya dapat dianalisis berdasarkan struktur umur. Hal ini dapat dijadikan sebagai informasi yang penting karena berkaitan dengan resiko dan kebutuhan pelayanan yang berbeda-beda pada setiap kelompok umur. Jika dilihat dari struktur usia penduduk, berdasarkan gambar piramida penduduk Kabupaten Tasikmalaya selama tahun 2024 didominasi oleh penduduk usia 15-19 tahun dan usia 20-24 tahun.

Pada gambar berikut digambarkan piramida penduduk Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024.



Gambar 2.26
Piramida Penduduk Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024
Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2025

Angka tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Tasikmalaya relatif lebih besar dibandingkan penduduk usia non produktif sekaligus merupakan bonus demografi. Secara rinci penduduk Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan kelompok umur disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.25
Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

Kelompok Umur	2020	2021	2022	2023	2024
0-4	144.093	144.285	144.720	151.696	152.285
5-9	139.723	138.616	138.421	137.163	138.673
10-14	153.235	151.215	149.202	143.983	141.224
15-19	160.841	159.858	159.343	156.763	154.647
20-24	157.284	156.624	156.033	158.540	158.238
25-29	144.192	144.311	144.754	149.848	151.499
30-34	134.907	135.126	135.463	137.721	139.050
35-39	130.115	130.695	131.680	131.477	131.818
40-44	122.715	123.532	124.307	125.433	126.912
45-49	126.081	128.341	130.798	122.372	121.118
50-54	118.048	120.780	123.697	122.039	122.955



Kelompok Umur	2020	2021	2022	2023	2024
55-59	107.274	110.712	114.245	112.037	112.879
60-64	80.687	84.126	87.887	93.878	98.018
65-69	60.542	63.705	66.838	67.237	70.094
70-74	43.055	46.560	50.379	47.095	49.321
75+	42.411	45.247	48.521	49.763	52.190
Jumlah	1.865.203	1.883.733	1.906.288	1.907.045	1.920.921

Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2025

b. Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan

Distribusi penduduk adalah pola persebaran penduduk di suatu wilayah, baik berdasarkan batas-batas geografis maupun berdasarkan batas-batas administrasi pemerintahan. Distribusi dan kepadatan penduduk di Kabupaten Tasikmalaya tidak merata. Kondisi ini penting diwaspadai karena berpotensi negatif dalam pembangunan dari aspek sosial, ekonomi, budaya dan politik.

Secara sosial, daerah yang penduduknya padat akan banyak bermunculnya masalah sosial, seperti pemukiman kumuh, angka kemiskinan yang tinggi, dan lainnya. sedangkan daerah yang penduduknya rendah cenderung merasa terisolir atau tertutup dari dunia luar yang membuat mereka tidak bisa berkomunikasi dan mengembangkan potensinya. Secara ekonomi, sebaran penduduk yang tidak merata dapat menimbulkan terpusatnya kegiatan ekonomi pada daerah tertentu. Sebagai contoh Kecamatan Singaparna yang menjadi pusat ekonomi karena penduduknya paling padat. Berbeda dengan daerah lain yang tidak bisa berkembang karena penduduknya sedikit. Akibatnya daerah yang padat penduduk membuat tingginya angka pengangguran. Dari aspek budaya, sebaran penduduk yang tidak merata akan membuat upaya untuk melestarikan budaya hanya terpusat pada daerah tertentu saja. Secara budaya, sebaran penduduk yang tidak merata dapat menimbulkan sistem politik yang tidak seimbang.



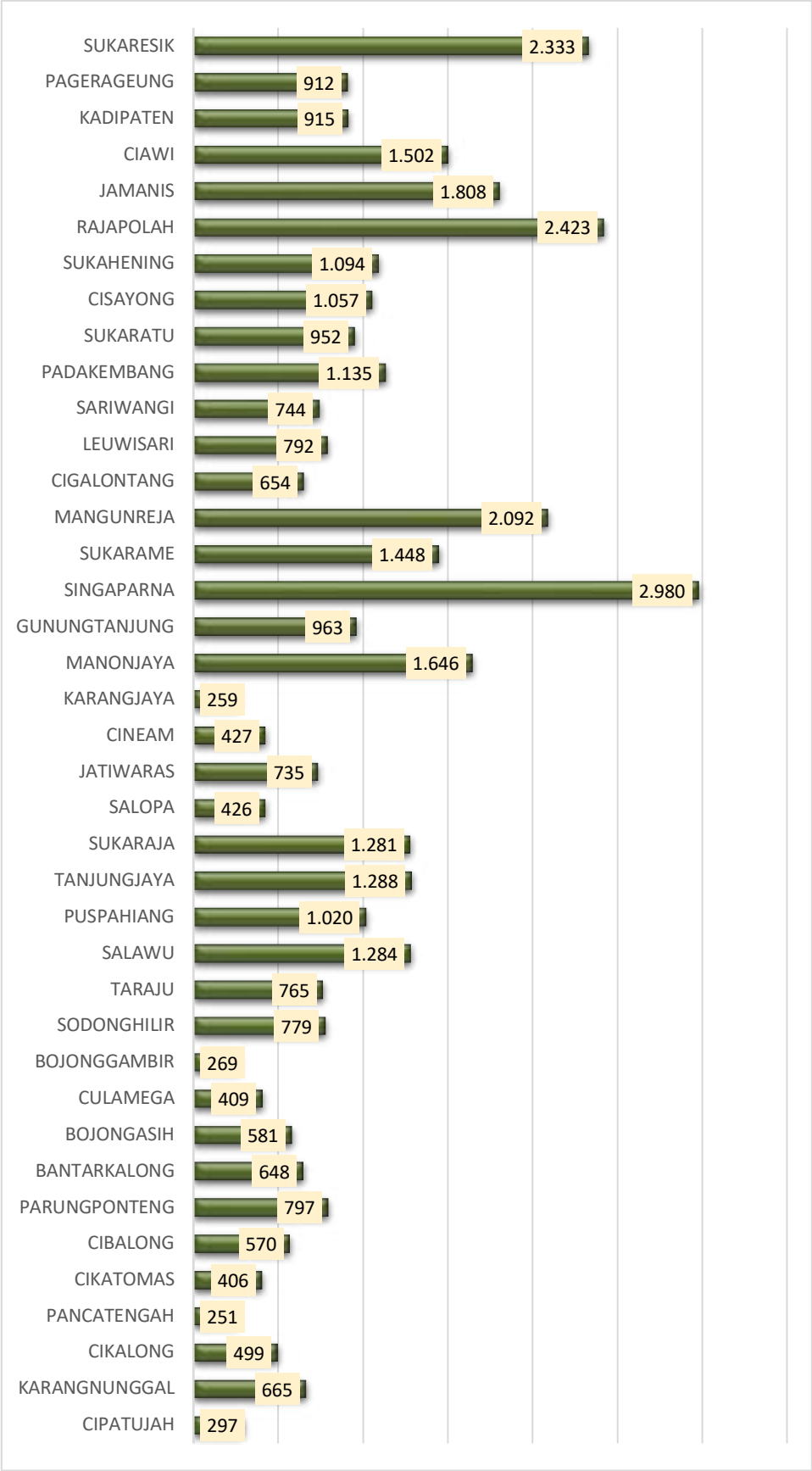


Tabel 2.26
Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

No.	Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk/km ²
1	Cipatujah	3,82	297
2	Karangnunggal	4,72	665
3	Cikalong	3,63	499
4	Pancatengah	2,64	251
5	Cikatomas	2,80	406
6	Cibalong	1,74	570
7	Parungponteng	1,96	797
8	Bantarkalong	2,02	648
9	Bojongasih	1,17	581
10	Culamega	1,46	409
11	Bojonggambir	2,37	269
12	Sodonghilir	3,78	779
13	Taraju	2,22	765
14	Salawu	3,37	1.284
15	Puspahiang	1,85	1.020
16	Tanjungjaya	2,46	1.288
17	Sukaraja	2,87	1.281
18	Salopa	2,70	426
19	Jatiwaras	2,81	735
20	Cineam	1,75	427
21	Karangjaya	0,65	259
22	Manonjaya	3,38	1.646
23	Gunungtanjung	1,68	963
24	Singaparna	3,85	2.980
25	Sukarame	2,23	1.448
26	Mangunreja	2,17	2.092
27	Cigalontang	4,08	654
28	Leuwisari	2,19	792
29	Sariwangi	1,92	744
30	Padakembang	2,23	1.135
31	Sukaratu	2,83	952
32	Cisayong	3,27	1.057
33	Sukahening	1,62	1.094
34	Rajapolah	2,71	2.423
35	Jamanis	2,00	1.808
36	Ciawi	3,54	1.502
37	Kadipaten	2,18	915
38	Pagerageung	3,17	912
39	Sukaresik	2,16	2.333
Tasikmalaya		100.00	

Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2025





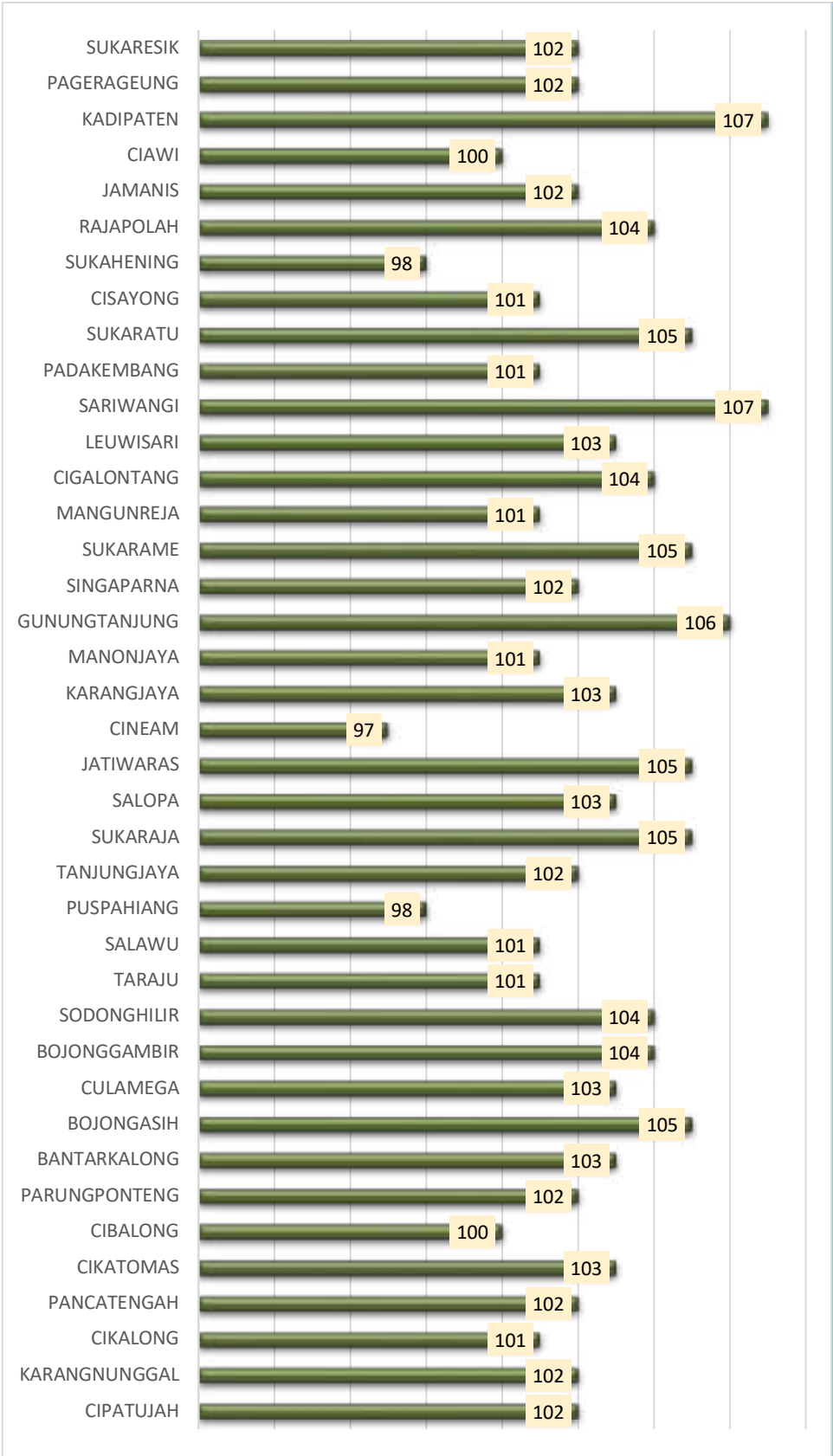
Gambar 2.27
Rata-Rata Kepadatan Penduduk Per Km² Menurut Kecamatan
di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024
Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2025



c. Sex Ratio

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan per 100 penduduk perempuan. Data rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. *Sex ratio* Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2024 sebesar 102. Artinya tiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 102 orang penduduk laki-laki. Pada tahun 2024 data *Sex Ratio* menurut kecamatan dari BPS sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.26.





Gambar 2.28
Sex Ratio Menurut Kecamatan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024
Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2025



d. **Proyeksi Penduduk**

Proyeksi demografi merupakan suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan komponen yang berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk dimasa yang akan datang. Komponen-komponen tersebut akan menentukan besaran jumlah penduduk dan struktur penduduk.

Proyeksi demografi perlu dilakukan karena dinamika struktur penduduk yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Perubahan struktur penduduk umumnya terjadi pada distribusi usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, serta kondisi penduduk di perkotaan dan perdesaan. Pemahaman terhadap dinamika struktur penduduk diharapkan dapat memberi masukan bagi kebutuhan penyediaan jenis layanan sarana dan prasarana suatu wilayah.

1) **Proyeksi Jumlah dan Kepadatan Penduduk**

Tabel 2.27
Proyeksi Jumlah dan Kepadatan Penduduk Tahun 2025-2029

Kabupaten Tasikmalaya	2024	Proyeksi				
		2025	2026	2027	2028	2029
Jumlah Penduduk (Orang)	1.920.921	1.933.814	1.946.197	1.958.117	1.969.543	1.980.430
Kepadatan Penduduk (Orang/Km2)	710	714	719	723	728	732

Sumber: BPS, 2025

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, kepadatan penduduk juga diproyeksikan meningkat dari 710 km jiwa/km2 pada Tahun 2024 menjadi 732 jiwa/km2 pada Tahun 2029. Peningkatan kepadatan tersebut relatif stabil dari tahun ke tahun, dengan rata-rata pertambahan sekitar 4–5 jiwa/km² per tahun.

Kondisi ini mencerminkan bahwa Kabupaten Tasikmalaya masih akan mengalami pertumbuhan penduduk yang konsisten dalam lima tahun ke depan, sehingga akan berdampak pada kebutuhan lahan, perumahan, serta penyediaan sarana dan prasarana publik.

2) **Proyeksi Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin**

Penduduk berdasarkan jenis kelamin merupakan bentuk analisis dari sudut pandang gender. Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan per 100 penduduk perempuan. Data rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan





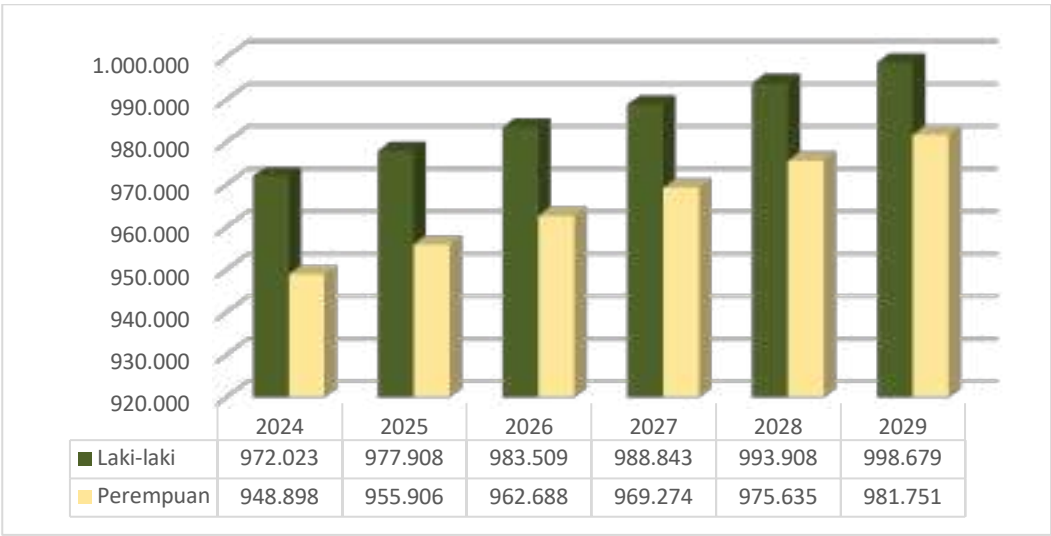
berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil.

Proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan jumlah penduduk perempuan pada Tahun 2029, dengan sex ratio sebesar 101. Artinya tiap 101 orang penduduk laki-laki terdapat 100 orang penduduk perempuan. Berikut adalah tabel dan grafik perkembangan proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029.

Tabel 2.28
Proyeksi Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2025-2029

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2024 (Orang)	Proyeksi Penduduk (Orang)				
		2025	2026	2027	2028	2029
Laki-Laki	972.023	977.908	983.509	988.843	993.908	998.679
Perempuan	948.898	955.906	962.688	969.274	975.635	981.751
Sex Ratio	102	102	102	102	101	101

Sumber: BPS, 2025

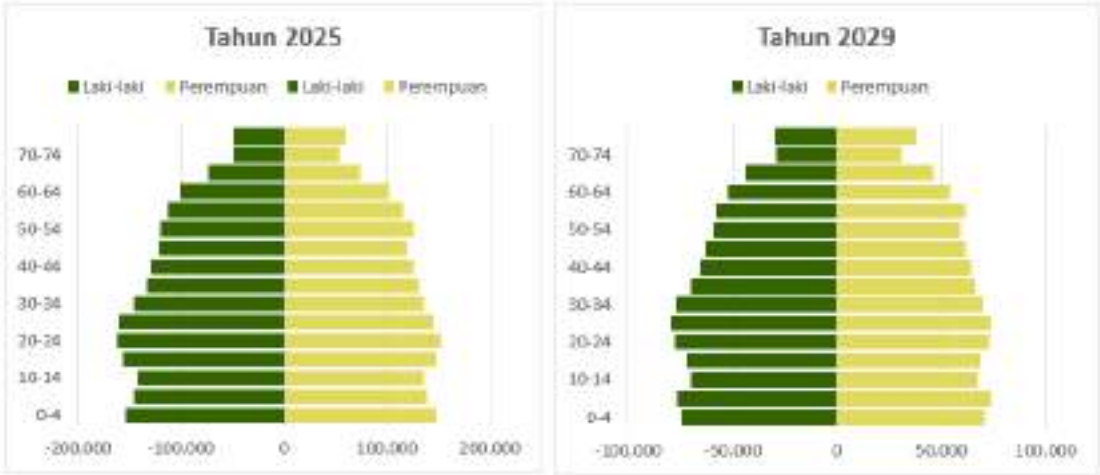


Gambar 2.29
Proyeksi Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029

Sumber: BPS, 2025 (diolah)

3) Proyeksi Penduduk berdasarkan Kelompok Umur

Proyeksi jumlah dan struktur penduduk berdasarkan umur di Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut:



Gambar 2.30
Proyeksi Struktur Penduduk Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2025 dan 2029
Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Dilihat dari klasifikasi berdasarkan kelompok umur, maka proyeksi komposisi Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2045 akan didominasi oleh kelompok usia produktif yakni usia 15-64 tahun, disusul oleh kelompok usia muda/belum produktif dengan rentang usia 0-14 tahun, dan terakhir kelompok usia lanjut yakni usia 65 tahun ke atas.

Tabel 2.29
Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Tasikmalaya
Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2025-2029

Jenis Kelamin	Kelompok Umur	Jumlah (orang)				
		2025	2026	2027	2028	2029
Laki-laki	0-4	76.780	76.133	75.487	74.841	74.190
	5-9	72.693	74.269	75.655	76.632	76.917
	10-14	70.949	70.021	69.487	69.496	70.263
	15-19	78.369	76.796	75.083	73.365	71.808
	20-24	81.215	80.624	79.964	79.178	78.182
	25-29	80.085	80.320	80.239	79.916	79.452
	30-34	72.813	74.006	75.266	76.459	77.428
	35-39	66.846	67.449	68.218	69.138	70.171
	40-44	64.719	64.989	65.109	65.180	65.360
	45-49	60.766	61.100	61.685	62.406	63.072
	50-54	60.245	60.061	59.718	59.347	59.118
	55-59	56.363	56.708	57.101	57.478	57.727
	60-64	50.410	51.358	51.917	52.210	52.427
	65-69	36.514	38.340	40.279	42.178	43.836
	70-74	24.563	25.507	26.555	27.721	29.023
	75+	24.578	25.828	27.080	28.363	29.705
	Jumlah	977.908	983.509	988.843	993.908	998.679
Perempuan	0-4	73.711	73.088	72.469	71.846	71.216
	5-9	69.764	71.271	72.591	73.546	73.872
	10-14	68.001	67.297	66.913	66.974	67.690
	15-19	73.737	72.390	71.005	69.674	68.491



Jenis Kelamin	Kelompok Umur	Jumlah (orang)				
		2025	2026	2027	2028	2029
	20-24	76.336	75.941	75.285	74.397	73.336
	25-29	72.536	72.994	73.417	73.748	73.896
	30-34	67.694	68.179	68.774	69.419	70.036
	35-39	65.499	65.641	65.770	65.929	66.178
	40-44	63.320	63.770	64.074	64.272	64.425
	45-49	59.790	59.768	60.214	60.962	61.755
	50-54	62.901	62.456	61.519	60.369	59.385
	55-59	57.517	58.472	59.556	60.562	61.243
	60-64	50.926	52.324	53.285	53.982	54.633
	65-69	36.910	38.961	41.299	43.716	45.931
	70-74	27.069	28.049	29.018	30.071	31.351
	75+	30.195	32.087	34.085	36.168	38.313
	Jumlah	955.906	962.688	969.274	975.635	981.751
Laki laki + Perempuan	0-4	150.491	149.221	147.956	146.687	145.406
	5-9	142.457	145.540	148.246	150.178	150.789
	10-14	138.950	137.318	136.400	136.470	137.953
	15-19	152.106	149.186	146.088	143.039	140.299
	20-24	157.551	156.565	155.249	153.575	151.518
	25-29	152.621	153.314	153.656	153.664	153.348
	30-34	140.507	142.185	144.040	145.878	147.464
	35-39	132.345	133.090	133.988	135.067	136.349
	40-44	128.039	128.759	129.183	129.452	129.785
	45-49	120.556	120.868	121.899	123.368	124.827
	50-54	123.146	122.517	121.237	119.716	118.503
	55-59	113.880	115.180	116.657	118.040	118.970
	60-64	101.336	103.682	105.202	106.192	107.060
	65-69	73.424	77.301	81.578	85.894	89.767
	70-74	51.632	53.556	55.573	57.792	60.374
	75+	54.773	57.915	61.165	64.531	68.018
	Jumlah	1.933.814	1.946.197	1.958.117	1.969.543	1.980.430

Sumber: BPS, 2025

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

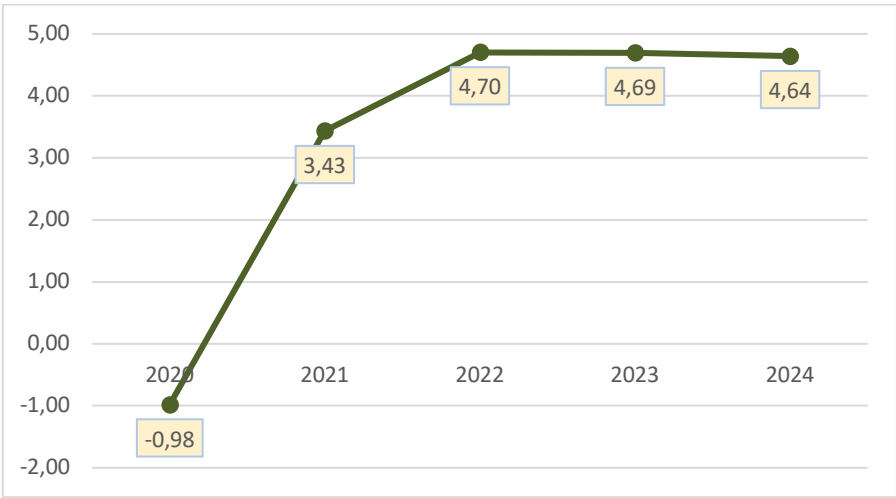
Kesejahteraan ekonomi mencerminkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup yang layak melalui aktivitas ekonomi yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Kondisi kesejahteraan ekonomi di Kabupaten Tasikmalaya dipengaruhi oleh struktur ekonomi daerah, tingkat pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, serta pemerataan hasil pembangunan.

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan



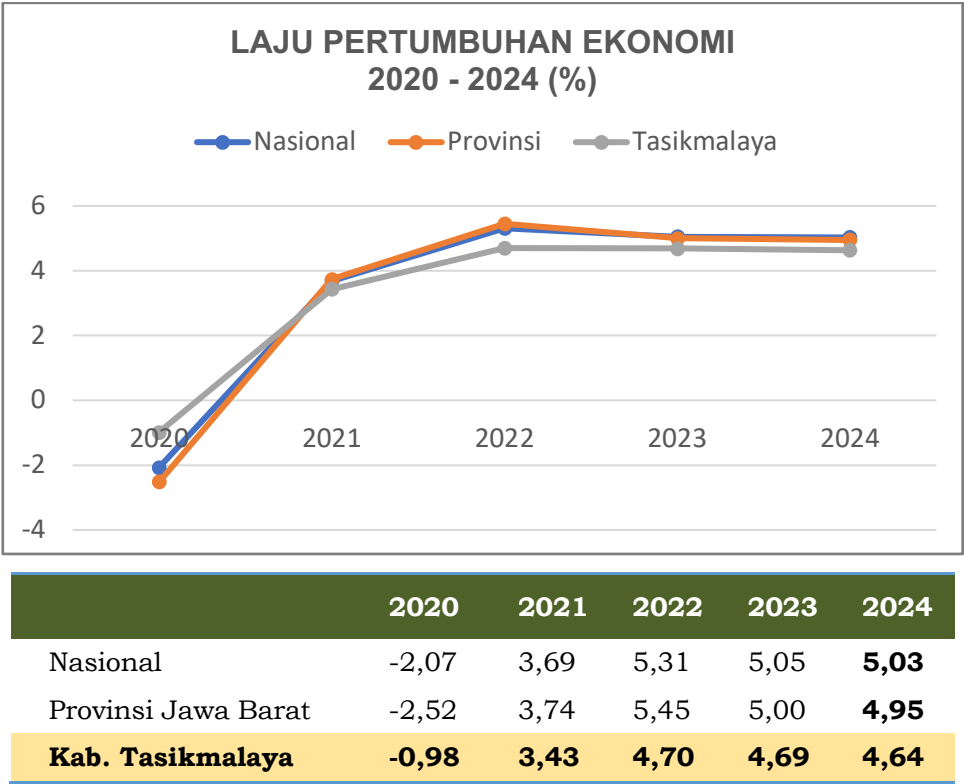
ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Besaran nilai laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Berikut adalah grafik pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020-2024.



Gambar 2.31
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2025

Terdapat fluktuasi dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya selama tahun 2020-2024. Meskipun angka pertumbuhan ekonomi cenderung naik dan turun, tren umum menunjukkan adanya peningkatan. Sedangkan, pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan akibat dampak pandemi Covid-19 sebelum pertumbuhan ekonomi mulai pulih kembali pada tahun 2021 dengan nilai 3,43% didorong oleh pelonggaran pembatasan dan stimulus ekonomi. Tren positif berlanjut pada 2022 dan 2023 hingga mencapai 4,69% dan 4,64%, menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Tasikmalaya dalam kondisi stabil.





Gambar 2.32
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024
Sumber: BPS, 2025

Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2020-2024 berada di bawah Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Berikutnya adalah tabel perbandingan LPE Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten/Kota Sekitar.

Tabel 2.30
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2022-2024

Keterangan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)		
	2022	2023	2024
Kabupaten Garut	5,08	4,94	4,95
Kabupaten Tasikmalaya	4,70	4,69	4,64
Kabupaten Ciamis	5,02	4,99	4,97
Kabupaten Pangandaran	5,03	5,26	5,12
Kota Tasikmalaya	5,01	5,96	5,22
Kota Banjar	4,29	4,71	5,48

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025

Peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tasikmalaya mencerminkan berbagai upaya pemerintah daerah dalam memperkuat fondasi ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang inklusif.



Beberapa langkah yang telah dilakukan antara lain melalui revitalisasi pasar tradisional, pengembangan destinasi wisata lokal, pemberian kemudahan perizinan usaha melalui pelayanan satu pintu, pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi melalui program MTU (Mitra Terampil Usaha) dan BLK (Balai Latihan Kerja), serta pembangunan pusat layanan terpadu UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).

Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk mendorong sektor ekonomi di Kabupaten Tasikmalaya, memberikan dukungan bagi pelaku usaha, meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja, serta memperluas peluang bisnis.

Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang positif dan berkelanjutan, diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan manusia di Kabupaten Tasikmalaya. Pemerintah perlu terus mendorong sektor-sektor ekonomi potensial, menciptakan iklim investasi yang kondusif, dan menjalankan kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

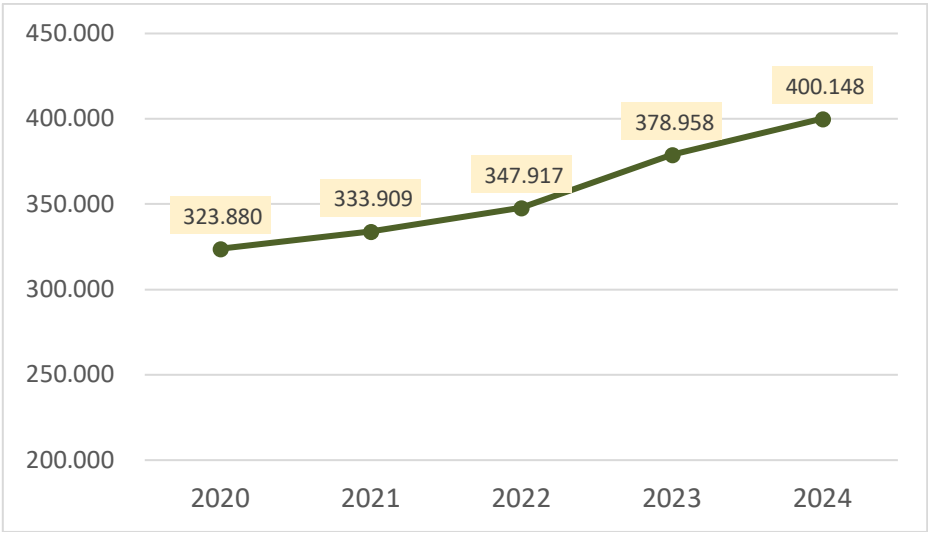
b. Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan adalah isu kompleks yang menjadi perhatian utama pemerintah karena dampaknya yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kondisi kemiskinan dapat menghambat pembangunan manusia, mengingat individu yang hidup dalam kemiskinan umumnya mengalami keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, perumahan layak, dan peluang ekonomi.

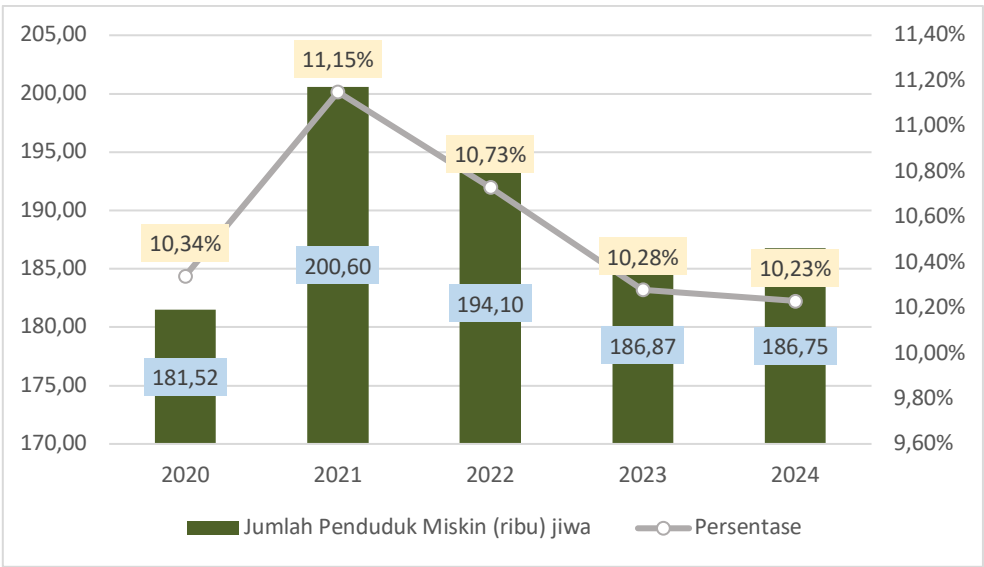
Dalam pengukuran kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan pendekatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dalam konsep ini, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk makanan dan kebutuhan non-makanan seperti pendidikan, kesehatan, perumahan layak, dan lainnya. Indikator yang digunakan adalah pengeluaran per kapita per bulan, dimana individu yang memiliki pengeluaran di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.



Tingkat kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 dilihat dari pendapatan di bawah Rp400.148/kapita/bulan sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut.

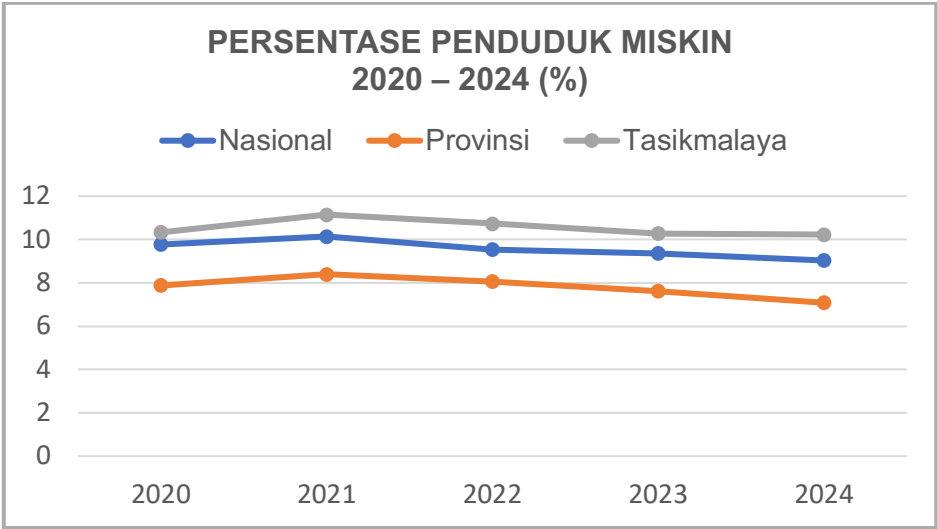


Gambar 2.33
Garis Kemiskinan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2025



Gambar 2.34
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2025





	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	9,78	10,14	9,54	9,36	9,03
Provinsi Jawa Barat	7,88	8,4	8,06	7,62	7,46
Kab. Tasikmalaya	10,34	11,15	10,73	10,28	10,23

Gambar 2.35
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024
Sumber: BPS, 2025

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 10,23%, namun masih berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Oleh karena itu dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan dan program terkait penanggulangan kemiskinan agar tepat sasaran.

Tabel 2.31
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2022-2024

Kabupaten/Kota	Tingkat Kemiskinan (%)		
	2022	2023	2024
Kabupaten Garut	10,42	9,77	9,68
Kabupaten Tasikmalaya	10,73	10,28	10,23
Kabupaten Ciamis	10,42	7,42	7,39
Kabupaten Pangandaran	7,72	8,98	8,75
Kota Tasikmalaya	12,72	11,53	11,10
Kota Banjar	6,73	6,14	5,85

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025



Persentase Penduduk Miskin (p0) Kabupaten Tasikmalaya selama periode tahun 2020-2024 secara signifikan mengalami penurunan, hal ini berarti bahwa pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya telah memberikan dampak positif dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Namun adanya Pandemi Covid-19 yang berlangsung selama dua tahun menjadi salah satu faktor kenaikan persentase penduduk miskin menjadi 10,34% pada tahun 2020, sedangkan pada tahun 2021 menjadi 11,15% dan menurun kembali pada tahun 2022 dan 2023 menjadi 10,73% dan 10,28%.

Permasalahan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Nilai agregat dari *poverty gap index* menunjukkan biaya mengentaskan kemiskinan dengan membuat target transfer yang sempurna terhadap penduduk miskin dalam hal tidak adanya biaya transaksi dan faktor penghambat. Semakin kecil nilai *poverty gap index*, semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program. Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

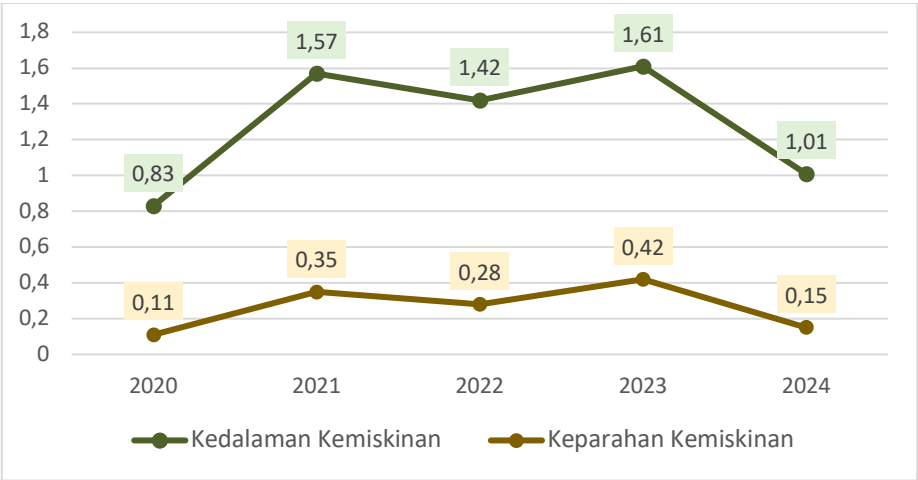
Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indikator ini memberikan informasi yang saling melengkapi pada insiden





kemiskinan. Sebagai contoh, mungkin terdapat kasus bahwa beberapa kelompok penduduk miskin memiliki insiden kemiskinan yang tinggi tetapi jurang kemiskinannya (*poverty gap*) rendah, sementara kelompok penduduk lain mempunyai insiden kemiskinan yang rendah tetapi memiliki jurang kemiskinan yang tinggi bagi penduduk yang miskin.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Tasikmalaya mengalami penurunan. Pada tahun 2024, P1 tercatat mengalami penurunan menjadi 1,01 yang semula 1,61 pada tahun 2023. Demikian pula halnya dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan dari 0,42 pada tahun 2023 menjadi 0,15 pada tahun 2024.



Gambar 2.36
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2025

c. PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didefinisikan sebagai jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. PDRB mencerminkan kinerja ekonomi suatu daerah dan menjadi salah satu indikator utama dalam mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi regional.

PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB), menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun (harga yang mengalami perubahan sesuai dengan ekonomi yang terjadi), sedangkan PDRB atas dasar harga konstan

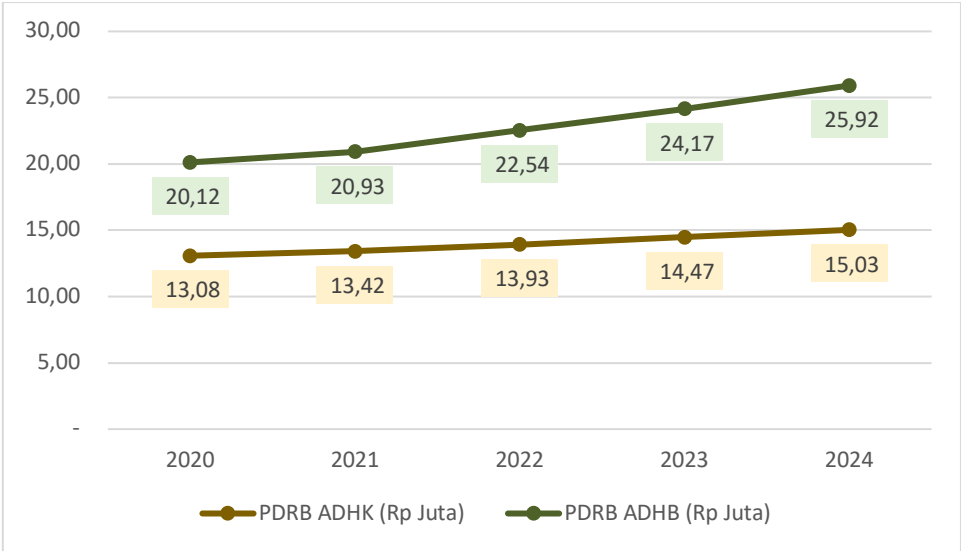




(ADHK), menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar.

Berdasarkan indikator pertumbuhan ekonomi yang tercermin melalui PDRB, Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024, PDRB per Kapita Kabupaten Tasikmalaya atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat sebesar Rp25.916.290,00 sedangkan PDRB per Kapita Kabupaten Tasikmalaya atas dasar harga konstan 2010 (ADHK) mencapai Rp15.034.290,00.

Selama tahun 2020-2024, sektor-sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Atas Dasar Harga Konstan adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Perdagangan Besar dan Eceran, Konstruksi, Industri Pengolahan, Informasi dan Komunikasi, serta Jasa Pendidikan. Perkembangan nilai PDRB per Kapita Kabupaten Tasikmalaya selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.37
PDRB Per Kapita Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2025

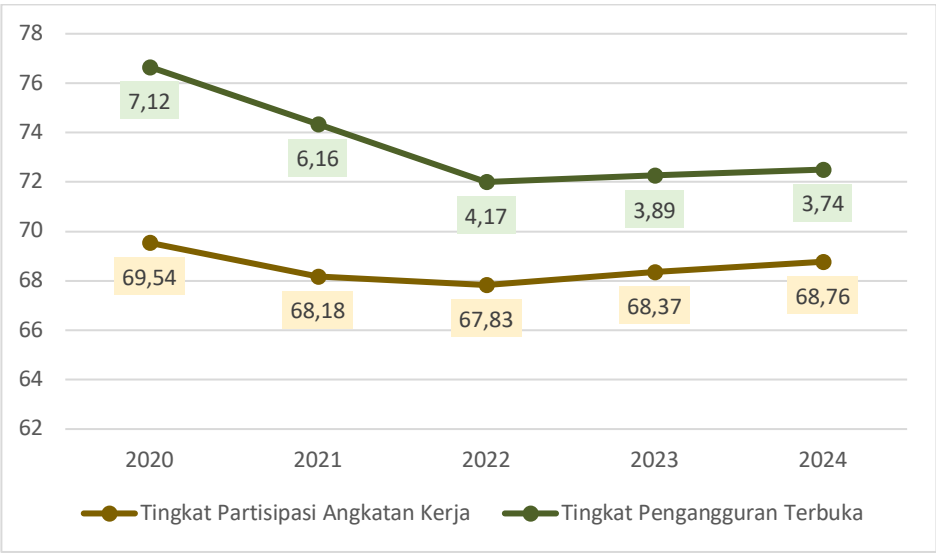
d. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Definisi ini mengacu pada rumus yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dan besar kecilnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dapat ditentukan oleh 2 variabel, yaitu jumlah angkatan kerja dan jumlah pengangguran.

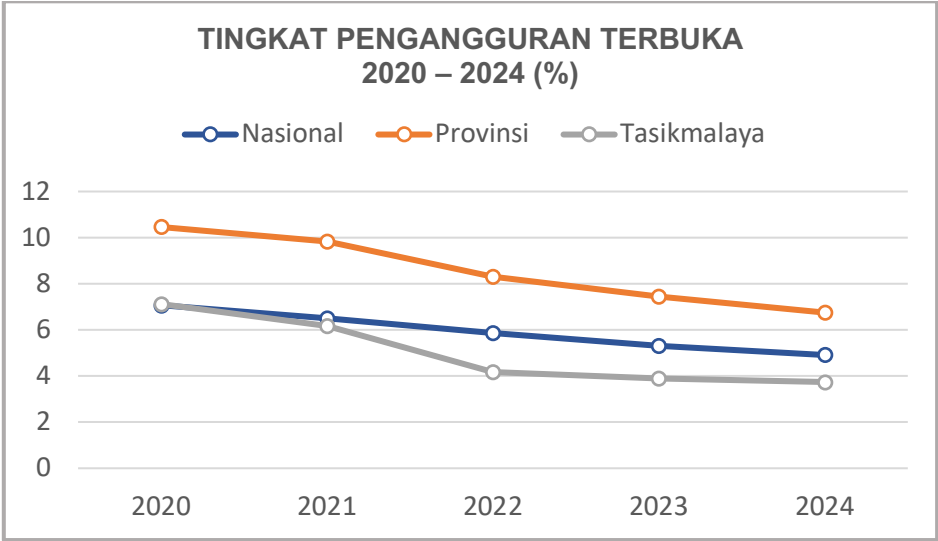


Jumlah angkatan kerja secara alamiah cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, seiring dengan penambahan penduduk usia kerja (diatas 15 tahun) dan kecenderungan individu yang telah menyelesaikan pendidikan untuk memasuki pasar kerja. Namun, fokus utama dalam pengukuran TPT pada variabel jumlah pengangguran. Yang termasuk daam kategori pengangguran meliputi mereka yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari pekerjaan, bekerja kurang dari dua hari dalam seminggu, atau berusaha mendapatkan pekerjaan yang lebih sesuai.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran meliputi pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, tingkat pendidikan, tingkat upah, dan tingkat inflasi. Berikut adalah gambar yang menjelaskan perkembangan TPT dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Tasikmalaya selama tahun 2020-2024, serta perbandingannya dengan tingkat nasional dan Provinsi Jawa Barat.



Gambar 2.38
Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2025



	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	7,07	6,49	5,86	5,32	4,91
Provinsi Jawa Barat	10,46	9,82	8,31	7,44	6,75
Kab. Tasikmalaya	7,12	6,16	4,17	3,89	3,74

Gambar 2.39
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024
Sumber: BPS, 2025

Tingkat pengangguran di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2024 sebesar 3,74% cukup baik di bawah capaian Provinsi Jawa Barat maupun Nasional. Berikut adalah tabel perbandingan tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten/Kota Sekitar.

Tabel 2.32
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2022-2024

Kabupaten/Kota	TPT (%)		
	2022	2023	2024
Kabupaten Garut	7,60	7,33	6,96
Kabupaten Tasikmalaya	4,17	3,89	3,74
Kabupaten Ciamis	3,75	3,52	3,37
Kabupaten Pangandaran	1,56	1,52	1,58
Kota Tasikmalaya	6,62	6,55	6,49
Kota Banjar	5,53	5,43	5,44

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2025



Pada Tahun 2024, Kabupaten Tasikmalaya menempati peringkat ketiga terendah dalam TPT di wilayah Priangan, setelah Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten Ciamis. Tingkat pengangguran ini juga merupakan yang terendah selama lima tahun terakhir, menunjukkan tren perbaikan yang signifikan dalam penyerapan tenaga kerja.

Meskipun Kabupaten Tasikmalaya memiliki sedikit lapangan usaha skala besar, data menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk telah bekerja, terutama di sektor pertanian, serta UMKM yang turut menyerap Angkatan kerja. Hal ini didukung oleh konsistensi Balai Latihan Kerja (BLK) yang melaksanakan program jemput bola ke desa-desa untuk menyelenggarakan pelatihan-pelatihan sesuai kebutuhan pasar kerja.

Selain itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengalami kenaikan dari 68,37% pada tahun 2023 sebesar menjadi 68,76% pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan semakin banyaknya penduduk usia kerja yang aktif dalam pasar tenaga kerja, baik sebagai pencari kerja maupun pekerja aktif.

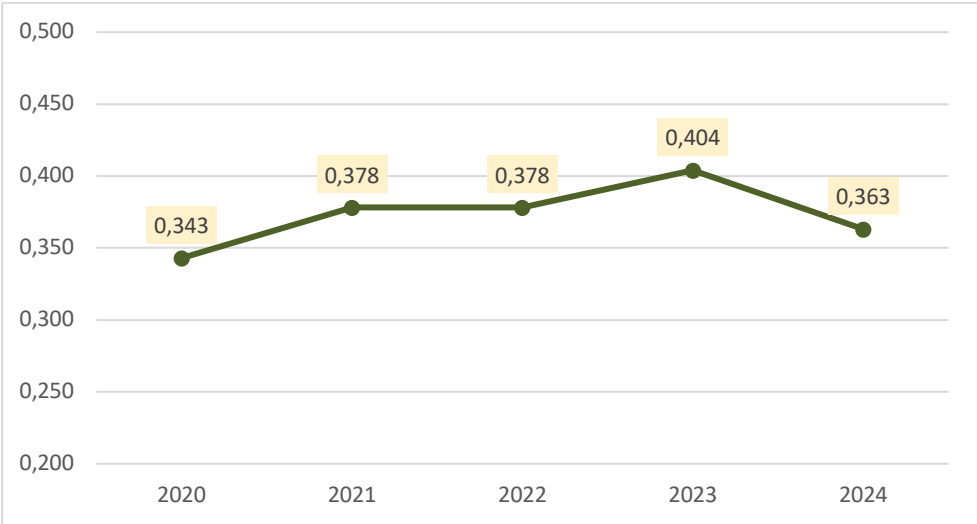
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan tren positif ini melalui penguatan sektor UMKM, penyediaan pelatihan yang relevan, serta penciptaan iklim ekonomi yang mendukung pertumbuhan lapangan kerja.

e. Indeks Gini

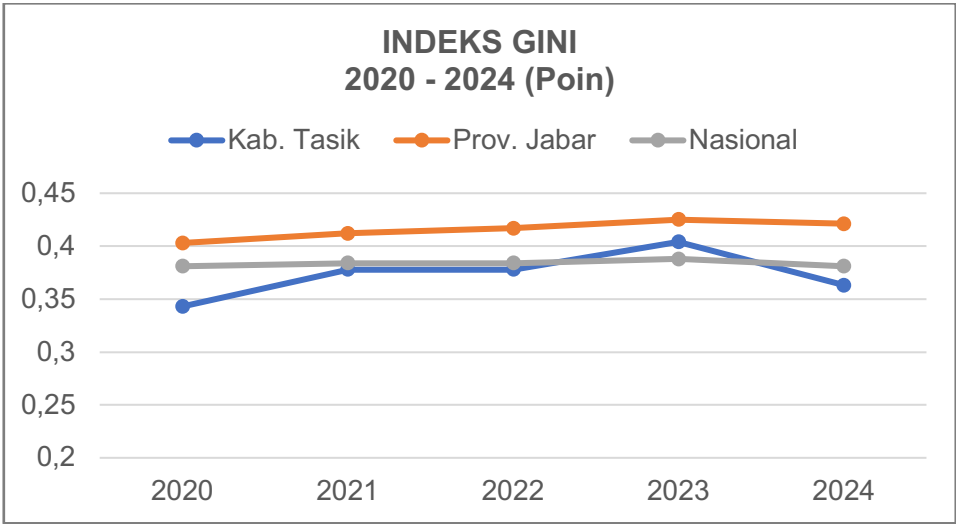
Gini Ratio merupakan indikator yang menggambarkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di suatu wilayah. Nilai *Gini Ratio* berada dalam rentang antara 0 hingga 1. *Gini Ratio* bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama (tidak ada ketimpangan). Sedangkan *gini ratio* bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Semakin mendekati 0 nilai *gini ratio*, semakin merata distribui pendapatan suatu wilayah. Adapun kategori *Gini Ratio* adalah sebagai berikut:

- a) $G < 0,3$ = ketimpangan rendah,
- b) $0,3 \leq G \leq 0,5$ = ketimpangan sedang, dan
- c) $G > 0,5$ = ketimpangan tinggi.





Gambar 2.40
Indeks Gini Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2025



	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	0,381	0,384	0,384	0,388	0,381
Provinsi Jawa Barat	0,403	0,412	0,417	0,425	0,421
Kab. Tasikmalaya	0,343	0,378	0,378	0,404	0,363

Gambar 2.41
Perbandingan Gini Ratio Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024
Sumber: BPS, 2025

Pada Tahun 2024, Indeks Gini Kabupaten Tasikmalaya tercatat 0,363 poin, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 0,404. Meskipun demikian, Gini Ratio ini masih berada pada kategori yang sama yaitu SEDANG. Jika dibandingkan, nilai Gini Ratio Kabupaten Tasikmalaya lebih rendah daripada Provinsi Jawa Barat, namun masih lebih tinggi dibandingkan angka nasional. Hal ini



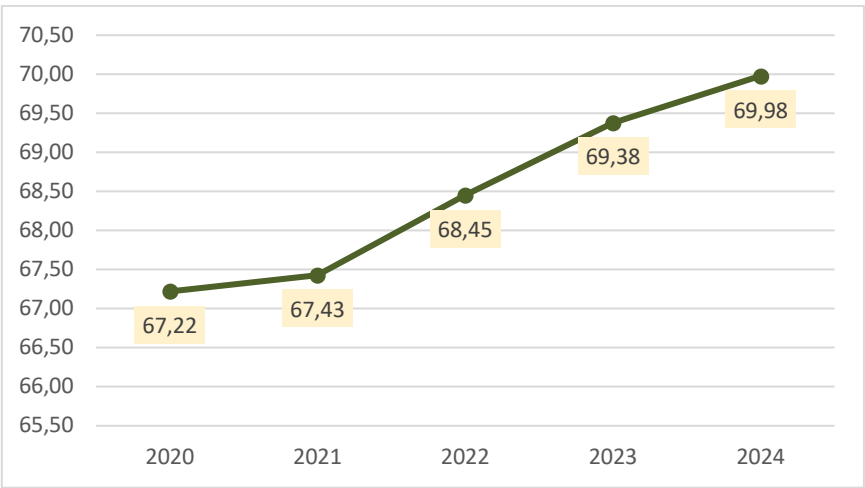
menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Kabupaten Tasikmalaya relatif lebih terkendali dibandingkan wilayah provinsi, meskipun masih belum sebaik capaian secara nasional.

Penurunan Gini Ratio ini diharapkan menjadi indikator positif dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan serta mendorong daya beli dan kesejahteraan masyarakat secara merata. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan strategi pembangunan ekonomi inklusif serta penguatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi diharapkan dapat terus menekan tingkat ketimpangan di Kabupaten Tasikmalaya.

f. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. IPM memberikan gambaran mengenai capaian pembangunan manusia dari tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. IPM juga menjadi salah satu indikator dalam menentukan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) oleh pemerintah pusat. Kriteria pengelompokan IKM adalah sebagai berikut:

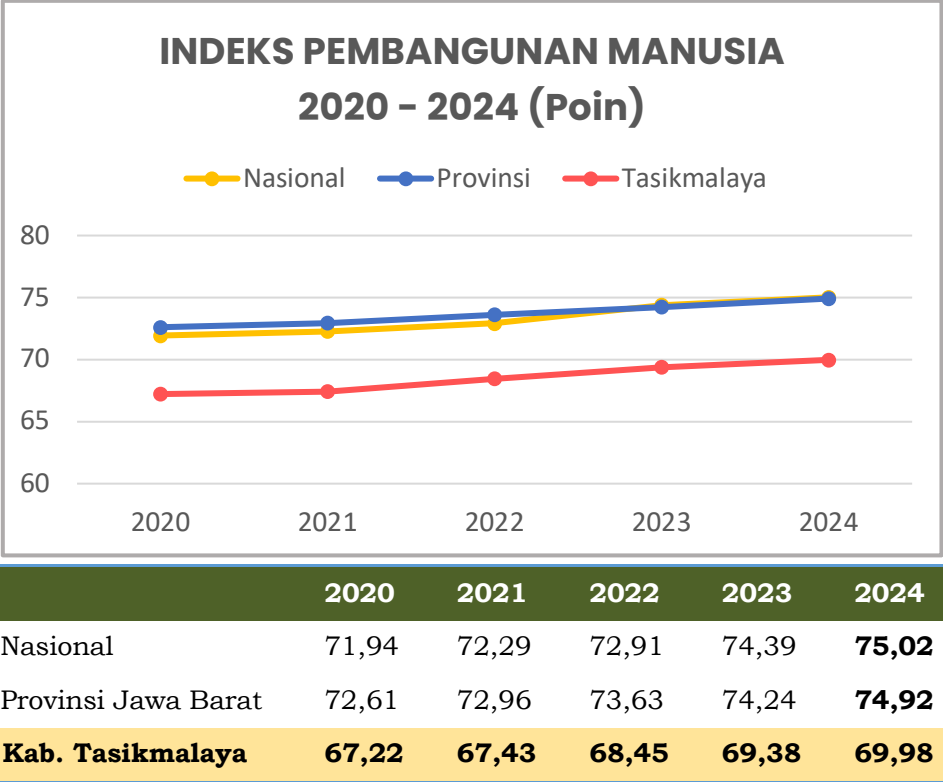
- IPM <60 : IPM rendah
- 60 ≤ IPM <70 : IPM sedang
- 70 ≤ IPM< 80 : IPM tinggi
- IPM ≥ 80 : IPM sangat tinggi



Gambar 2.42
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2025





Gambar 2.43
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024
Sumber: BPS, 2025

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di sekitarnya, capaian IPM Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2024 menempati posisi yang relatif lebih rendah, meskipun masih berada di atas Kabupaten Garut. Kabupaten Ciamis dan Kota Tasikmalaya mencatat IPM yang lebih tinggi, bahkan telah masuk dalam kategori tinggi. Berikutnya adalah tabel perbandingan IPM Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten/Kota Sekitar.

Tabel 2.33
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten/Kota Sekitar, Tahun 2022-2024

Kabupaten/Kota	IPM (Poin)		
	2022	2023	2024
Kabupaten Garut	68,51	69,22	69,91
Kabupaten Tasikmalaya	68,45	69,38	69,98
Kabupaten Ciamis	72,52	73,12	73,64
Kabupaten Pangandaran	70,21	70,57	71,03
Kota Tasikmalaya	74,84	75,47	76,03
Kota Banjar	73,93	74,45	75,01

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025



Selama lima tahun terakhir, IPM Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, meskipun masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat dan nasional. Pada tahun 2024, IPM Kabupaten Tasikmalaya mencapai 69,98 poin dengan kategori SEDANG, naik sebesar 0,60 poin dari tahun sebelumnya (2023) yang sebesar 69,38. Meskipun belum mencapai kategori tinggi, posisi ini menunjukkan kemajuan yang positif dalam pembangunan manusia di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

Dalam meningkatkan capaian IPM, perlu meningkatkan capaian pada faktor atau variabel pembentuk yaitu Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan dan Pengeluaran per Kapita, serta melakukan analisis terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi pada ketiga variabel di Kabupaten Tasikmalaya.

Capaian indeks pendidikan pada tahun 2024 adalah sebesar 61,68 poin. Peningkatan indeks pendidikan dapat dicapai melalui peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan di sektor pendidikan yang berdampak langsung terhadap kedua indikator tersebut.

Kemudian, capaian indeks kesehatan Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024 sebesar 83,17 poin. Beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain masih tingginya jumlah kematian bayi yang berkontribusi pada tingginya rasio kematian bayi, angka kematian ibu yang masih cukup tinggi, rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat, serta angka stunting yang masih menjadi isu nasional. Selain itu, belum adanya pemerataan dan keterjangkauan layanan kesehatan, keterbatasan dan distribusi tenaga Kesehatan tidak merata, rasio jumlah RS dengan jumlah penduduk.

Pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp8.965.000,00 per tahun, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp8.562.000,00 per tahun. Peningkatan ini menunjukkan membaiknya daya beli masyarakat dan menjadi sinyal positif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan.



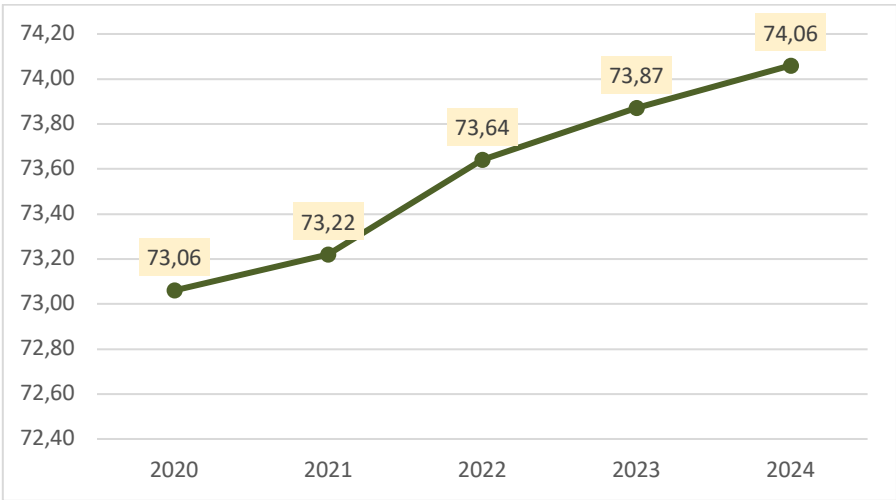
2.1.2.2 Kesehatan Untuk Semua

Kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara dan menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Konsep kesehatan untuk semua mengedepankan akses layanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

a. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup saat lahir merupakan indikator yang menggambarkan rata-rata jumlah tahun hidup yang diharapkan dapat ditempuh oleh seseorang sejak dilahirkan, dengan asumsi pola kematian pada tahun tersebut berlaku secara konstan sepanjang hidupnya. Indikator ini mencerminkan tingkat kesehatan masyarakat secara umum, karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pelayanan kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat, gizi, sanitasi, serta kondisi lingkungan.

Peningkatan Usia Harapan Hidup menjadi cerminan keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan masyarakat dan menjadi fondasi penting bagi peningkatan produktivitas serta kualitas hidup penduduk. Usia Harapan Hidup juga berkorelasi erat dengan capaian indikator kesehatan lainnya, seperti penurunan angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), peningkatan cakupan imunisasi, serta perbaikan status gizi masyarakat.



Gambar 2.44
Usia Harapan Hidup
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2025





Secara umum, Usia Harapan Hidup di Kabupaten Tasikmalaya dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa berbagai program kesehatan yang dijalankan oleh pemerintah daerah telah memberikan dampak yang positif. Di antaranya adalah peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, penanganan stunting, penguatan layanan kesehatan ibu dan anak, serta promosi hidup sehat di masyarakat.

Namun demikian, capaian tersebut masih merupakan yang terendah yaitu peringkat ke-27 dari 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi masih cukup besar, terutama dalam hal pemerataan layanan kesehatan di wilayah pelosok, keterbatasan infrastruktur, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan penyakit.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis melalui kolaborasi lintas sektor dan penguatan sistem kesehatan daerah secara menyeluruh. Upaya tersebut penting untuk memastikan bahwa peningkatan Usia Harapan Hidup dapat terus berlanjut dan mencakup seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata, sehingga tidak ada satu pun wilayah yang tertinggal dalam pencapaian pembangunan kesehatan.

b. Prevalensi Stunting

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

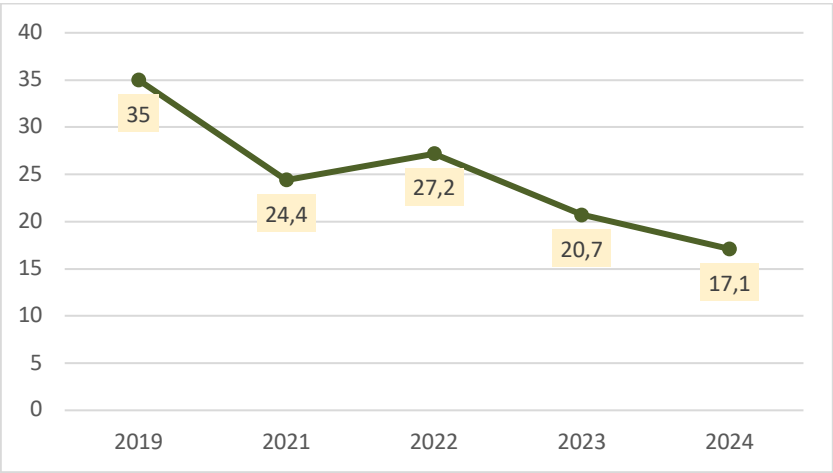
Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Tasikmalaya diatur oleh Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 22 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Kemudian pada tahun 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya juga telah mengeluarkan Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 445/Kep.28-Dinsos PPKBP3A/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dari tingkat Kabupaten, kecamatan sampai tingkat Desa. Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) merupakan kerja lintas sektor dalam rangka penanganan stunting dan





tugas awal tim tersebut yakni mengidentifikasi dan menginventarisir wilayah yang membutuhkan perhatian khusus. Terdiri dari TPPS Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Berbagai upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka penurunan angka stunting di Kabupaten Tasikmalaya telah berhasil. Pada tahun 2020 tidak dilaksanakan penilaian angka stunting di seluruh Indonesia karena dampak pandemi Covid-19. Selanjutnya, pada tahun 2024 angka stunting mengalami penurunan sebesar 3,6%, dari 20,7% pada tahun 2023 menjadi 17,10%. Penurunan ini didukung oleh intervensi spesifik dan sensitif, seperti pemberian makanan tambahan, peningkatan layanan posyandu, imunisasi, serta perbaikan sanitasi. Meski demikian, tantangan masih ada, terutama pada wilayah pedesaan dengan akses terbatas layanan kesehatan, kesenjangan sosial-ekonomi, serta rendahnya pengetahuan gizi dan praktik pengasuhan anak. Oleh karena itu, meskipun capaian 17,1% menunjukkan arah yang positif, upaya berkelanjutan tetap diperlukan agar target nasional prevalensi stunting di bawah 14% dapat tercapai. Berikut adalah grafik prevalensi stunting di Kabupaten Tasikmalaya dari tahun 2020-2024.



Gambar 2.45
Prevalensi Stunting
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2025

2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah. Pemerataan akses serta peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten



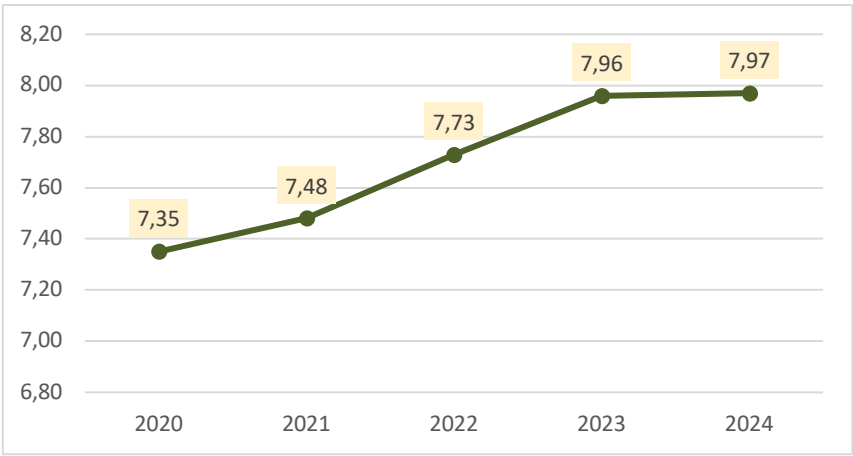


Tasikmalaya menjadi prioritas agar seluruh masyarakat dapat memperoleh hak pendidikan yang layak.

a. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah-RLS didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Di Indonesia sendiri, Rata-rata Lama Sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SM diperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah.

Rata-rata lama sekolah merupakan variabel yang dapat mempengaruhi jumlah persentase penduduk miskin di suatu wilayah. Semakin tinggi capaian angka rata-rata lama sekolahnya maka bisa diprediksi jumlah penduduk miskinnya relatif kecil. Peningkatan keahlian atau pendidikan akan membuat orang lebih mudah mencari pekerjaan atau lebih banyak pilihan pekerjaan. Saputra (2011) menyatakan teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia.



Gambar 2.46
Rata-rata Lama Sekolah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2025

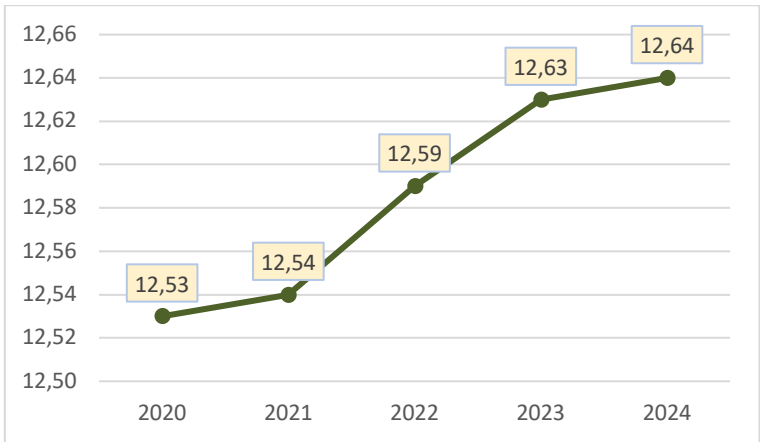




Pada tahun 2024, capaian Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Tasikmalaya 7,97 tahun, meningkat sebesar 0,01 dari tahun sebelumnya. Hal ini dapat diartikan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Tasikmalaya hanya mampu mengenyam pendidikan sampai kelas 7 atau kelas 1 SMP.

b. Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah-HLS (*Expected Years of Schooling - EYS*). HLS adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuklamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu.



Gambar 2.47
Angka Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2025

HLS Kabupaten Tasikmalaya dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2024, HLS mencapai 12,64 tahun atau meningkat 0,01 tahun dibanding tahun 2023 dengan capaian 12,63 tahun.

c. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan pengukuran terhadap upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai sarana belajar sepanjang hayat. Indeks ini





mengukur usaha pemerintah dalam mencapai budaya literasi masyarakat.

IPLM terdiri dari dua unsur utama. Pertama, Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) yang mencakup beberapa komponen seperti pemerataan layanan perpustakaan, ketersediaan koleksi, ketersediaan tenaga perpustakaan, tingkat pemberdayaan layanan perpustakaan, ketersediaan perpustakaan ber-SNP, serta tingkat keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan. Kedua, aspek masyarakat yang melibatkan beberapa faktor seperti jumlah penduduk, jumlah civitas sekolah, jumlah civitas akedemika, dan jumlah penduduk yang bekerja.

Capaian IPLM selama Tahun 2022-2024 di Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan tren positif yaitu 40,311 pada tahun 2022, 52,48 pada tahun 2023, dan mengalami peningkatan menjadi 69,95 pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa adanya kemajuan dalam upaya pembangunan literasi masyarakat, yang tercermin dalam perbaikan dalam akses dan kualitas pendidikan literasi. Keberhasilan dalam program-program literasi yang diterapkan selama periode tersebut menunjukkan bahwa strategi dan kebijakan yang diterapkan mulai membuahkan hasil yang positif.

Tabel 2.34
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	N/A	N/A	40,311	52,48	69,95

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025

d. Angka Literasi dan Numerasi

Literasi adalah kemampuan membaca, memahami, dan menggunakan informasi dari teks, sedangkan numerasi adalah keterampilan berpikir dengan konsep dan prosedur matematika untuk menyelesaikan persoalan sehari-hari. Kedua aspek ini merupakan fondasi penting bagi peningkatan kualitas pendidikan. Berikut adalah capaian angka literasi dan numerasi di Kabupaten Tasikmalaya:





Tabel 2.35
Angka Literasi dan Numerasi
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022-2024

No	Uraian	Tahun		
		2022	2023	2024
1.	Kemampuan Literasi Jenjang SD	59,54%	68,54%	79,60%
2.	Kemampuan Literasi Jenjang SMP	51,45%	60,87%	71,68%
3.	Kemampuan Numerasi Jenjang SD	36,01%	54,11%	75,23%
4.	Kemampuan Numerasi Jenjang SMP	35,16%	39,61%	68,20%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2025

Data capaian Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022–2024 menunjukkan peningkatan yang konsisten. Literasi jenjang SD meningkat dari 59,54% pada 2022 menjadi 79,60% pada 2024, sementara jenjang SMP naik dari 51,45% menjadi 71,68% pada periode yang sama. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan yang berkelanjutan dalam kemampuan pemahaman membaca di kedua jenjang.

Sementara itu, kemampuan numerasi mengalami peningkatan lebih signifikan. Pada jenjang SD, capaian meningkat dari 36,01% pada 2022 menjadi 75,23% pada 2024. Di jenjang SMP, capaian yang awalnya rendah sebesar 35,16% pada 2022 juga melonjak menjadi 68,20% pada 2024. Perkembangan ini menunjukkan efektivitas intervensi pembelajaran, sekaligus menggambarkan keseriusan pemerintah daerah dalam memperkuat keterampilan dasar siswa. Secara keseluruhan, tren positif ini menegaskan adanya peningkatan kualitas pembelajaran yang signifikan di Kabupaten Tasikmalaya.

2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial yang adaptif menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan manusia yang inklusif di Kabupaten Tasikmalaya. Konsep ini tidak hanya menekankan pada pemberian perlindungan dasar, tetapi juga menyiapkan masyarakat agar mampu menghadapi berbagai risiko, baik ekonomi, sosial, kesehatan, maupun bencana alam.

Salah satu indikator yang mencerminkan perkembangan perlindungan sosial adalah kepesertaan dalam program jaminan sosial tenaga kerja. Di Kabupaten Tasikmalaya, cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja cenderung meningkat dari tahun ke tahun,





meskipun pertumbuhannya relatif lambat. Pada Tahun 2021 proporsi kepesertaan mencapai 30,2%, kemudian naik menjadi 32,9% pada 2022. Selanjutnya, tahun 2023 meningkat lagi ke 34,2%, dan angka ini bertahan hingga 2024 tanpa kenaikan lebih lanjut. Secara keseluruhan, selama periode 2021–2024 terjadi peningkatan sebesar 4 poin.

Tabel 2.36
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
Proporsi Peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	%	N/A	30,2	32,9	34,2	34,2

Sumber: DPMPSTPTK, 2025

Peningkatan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja ini mencerminkan adanya kesadaran yang mulai tumbuh di kalangan pekerja maupun pemberi kerja terhadap pentingnya perlindungan sosial. Faktor pendukungnya antara lain regulasi pemerintah, dorongan dari perusahaan-perusahaan formal, serta upaya sosialisasi oleh instansi terkait. Namun, masih rendahnya cakupan menunjukkan adanya sejumlah tantangan. Pertama, sebagian besar tenaga kerja di Kabupaten Tasikmalaya bekerja di sektor informal, sehingga belum seluruhnya terakomodasi dalam program jaminan sosial. Kedua, masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat kepesertaan, ditambah dengan kemampuan finansial yang rendah untuk membayar iuran secara rutin. Ketiga, proses pendaftaran dan kepatuhan pemberi kerja, khususnya usaha kecil dan menengah, juga belum optimal.

Dengan demikian, meskipun capaian kepesertaan sudah menunjukkan arah perbaikan, mengindikasikan perlunya strategi lebih adaptif, seperti perluasan cakupan bagi pekerja informal, penyederhanaan mekanisme pendaftaran, subsidi iuran bagi masyarakat miskin, serta penguatan pengawasan kepatuhan perusahaan.





2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Tasikmalaya ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah ditengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh budaya global. Pembangunan seni dan budaya di Kabupaten Tasikmalaya sudah mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman terhadap nilai budaya dan penggunaan Bahasa Sunda di lingkungan pendidikan dan instansi pemerintah.

Kebudayaan Tasikmalaya yang telah terbentuk selama ribuan tahun menampilkan corak khas yang menunjukkan adanya akulturasi budaya yang kuat. Hal itu didasari oleh lokasi Tasikmalaya yang strategis, dan disinggahi banyak orang dari berbagai latar belakang yang berbeda sehingga sejak dulu Tasikmalaya sudah menjadi pusat peradaban yang penuh warna dengan percampuran bahasa, adat istiadat, dan keyakinan. Meskipun secara umum kebudayaan Tasikmalaya lebih didominasi oleh sunda religius, tetapi kebudayaan seperti Jawa dan Melayu juga berkembang cukup baik di Kabupaten Tasikmalaya. Latar belakang percampuran berbagai kebudayaan yang berbeda seperti itu pada akhirnya menjadikan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya sebagai masyarakat religius, egaliter, demokratis dan toleran. Semua jenis kebudayaan dan seni berkembang tanpa ada gejolak, baik yang berasal dari Sunda, Jawa ataupun Melayu.

Kabupaten Tasikmalaya memiliki banyak keragaman budaya tradisional dan ritus adat yang berkaitan erat dengan latar belakang budayanya sebagai masyarakat religius agraris. Dengan kondisi alam Kabupaten Tasikmalaya yang subur dan banyak dipergunakan menjadi pertanian, budaya agraris dengan pengaruh keyakinan Sunda Buhun berkembang luas di berbagai pelosok Kabupaten Tasikmalaya.

Kesenian yang terdapat di Kabupaten Tasikmalaya diantaranya meliputi seni tari, seni teater, seni sastra, seni musik, seni film, seni rupa dan seni media. Kesenian tersebut diantaranya adalah Terbang Sejak, Calung Renteng, Angklung Sered, Seni Kaulinan Pagarageungan, Aseuk Hatong, Lodong Gejlig, Rarangken Huma, Angklung Landung, Angklung Rendeng, Angklung Betot, Calung Tarawangsa dan Rarangken Sawah. Jumlah seni dan budaya di





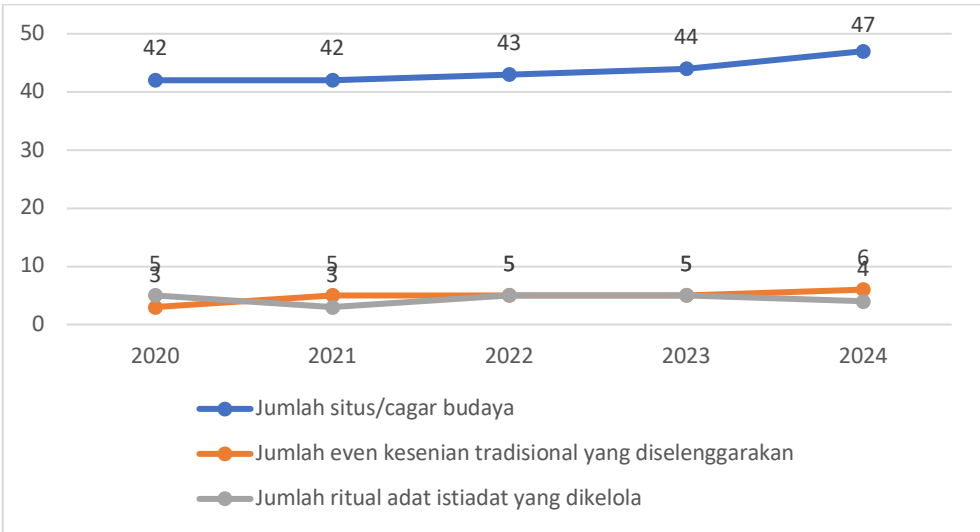
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.37
Perkembangan Urusan Seni Budaya
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah situs/cagar budaya	Cagar Budaya	42	42	43	44	47
Jumlah even kesenian tradisional yang diselenggarakan	Kegiatan	3	5	5	5	6
Jumlah ritual adat istiadat yang dikelola	Kegiatan	5	3	5	5	4

Sumber: LKIP Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

Perkembangan Seni Budaya di Kabupaten Tasikmalaya, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.48
Grafik Perkembangan Seni Budaya
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 - 2024
Sumber: LKIP Kabupaten Tasikmalaya, 2025

Perkembangan urusan seni dan budaya di Kabupaten Tasikmalaya selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang cukup positif. Jumlah situs atau cagar budaya mengalami peningkatan dari 42 pada tahun 2020 menjadi 47 pada tahun 2024, yang mencerminkan upaya berkelanjutan dalam pelestarian dan pendokumentasian warisan budaya daerah. Jumlah penyelenggaraan even kesenian tradisional juga menunjukkan peningkatan, dari 3 kegiatan pada tahun 2020 menjadi 6 kegiatan pada tahun 2024,



sebagai bentuk penguatan eksistensi budaya lokal. Sementara itu, jumlah ritual adat istiadat yang dikelola sempat mengalami penurunan pada tahun 2021 akibat pembatasan sosial selama masa pandemi, namun kembali stabil pada tahun-tahun berikutnya meskipun sedikit menurun menjadi 4 kegiatan pada tahun 2024.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat fluktuasi pada beberapa indikator, pelaksanaan urusan seni dan budaya di Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan arah yang progresif dalam rangka pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya daerah. Pencapaian ini tidak terlepas dari pelaksanaan Program Pengembangan Kebudayaan, Program Pengembangan Kesenian Tradisional, dan Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

Selain kekayaan seni dan budaya, kehidupan beragama di Kabupaten Tasikmalaya juga memegang peranan penting dalam membentuk identitas masyarakat. Kabupaten Tasikmalaya dikenal sebagai salah satu daerah yang religius di Jawa Barat, dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Keberadaan pesantren, madrasah, dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya telah menjadi pusat pembinaan moral, spiritual, dan sosial masyarakat. Tradisi keislaman yang kuat tercermin dalam aktivitas keagamaan sehari-hari, mulai dari pengajian rutin, peringatan hari-hari besar Islam, hingga kegiatan sosial berbasis masjid dan pesantren.

Meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, Kabupaten Tasikmalaya tetap menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan kerukunan antarumat beragama. Agama lain seperti Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu juga dianut oleh sebagian masyarakat, dan semuanya hidup berdampingan secara damai. Kehidupan antarumat beragama berlangsung harmonis, dengan mengedepankan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan.

Pemerintah daerah bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) secara aktif memfasilitasi dialog lintas agama, menjaga komunikasi yang baik, serta mendorong partisipasi semua pemeluk agama dalam pembangunan daerah. Berbagai kegiatan kolaboratif, seperti kerja bakti lintas agama, doa bersama untuk keselamatan daerah, serta partisipasi dalam penanganan bencana, menjadi contoh nyata penguatan kerukunan umat beragama. Upaya ini turut





diperkuat dengan dukungan regulasi dan kebijakan daerah yang berpihak pada terpeliharanya keharmonisan sosial-keagamaan.

Dengan perpaduan antara religiusitas yang kuat, kerukunan antarumat beragama, dan kekayaan budaya yang beragam, Kabupaten Tasikmalaya memiliki modal sosial yang besar untuk mewujudkan masyarakat yang damai, maslahat, dan berkemajuan, sekaligus tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kearifan lokal dan agama.

2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif

Keluarga merupakan pondasi utama pembentukan kualitas sumber daya manusia. Di Kabupaten Tasikmalaya, penguatan fungsi keluarga terus diarahkan agar menjadi lingkungan yang sehat, harmonis, serta mampu melahirkan generasi berkarakter. Kesenjangan gender juga menjadi prioritas dengan membuka ruang yang adil bagi laki-laki dan perempuan dalam pendidikan, ekonomi, kesehatan, maupun kepemimpinan.

a. Indeks Pembangunan Keluarga

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan indikator komposit yang digunakan untuk menilai kualitas keluarga melalui tiga dimensi utama, yaitu ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan. iBangga menjadi cerminan sejauh mana keluarga di Kabupaten Tasikmalaya mampu berfungsi secara optimal dalam menciptakan lingkungan yang harmonis, mandiri, dan sejahtera.

Tabel 2.38
Capaian Indeks Pembangunan Keluarga
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Keluarga	Poin	N/A	52,66	52,22	57,77	59,61

Sumber: Dinas Sosial PPKB P3A, 2025

Data pada tabel menunjukkan bahwa capaian iBangga di Kabupaten Tasikmalaya selama periode 2020–2024 mengalami tren yang fluktuatif namun cenderung meningkat. Pada tahun 2020, data iBangga belum tersedia. Tahun 2021 tercatat sebesar 52,66 poin, kemudian Tahun 2022 sempat terjadi sedikit penurunan menjadi 52,22 poin. Namun, pada tahun 2023 IPK melonjak menjadi 57,77





poin, dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 59,61 poin. Secara keseluruhan, dalam kurun waktu 2021–2024, capaian IPK naik sebesar 6,95 poin, yang menunjukkan adanya perbaikan kualitas keluarga di berbagai aspek.

Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kenaikan signifikan pada tahun 2023 dan 2024 didorong oleh meningkatnya akses terhadap layanan kesehatan ibu dan anak, penguatan program pemberdayaan ekonomi keluarga, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perencanaan keluarga, serta meluasnya jangkauan program perlindungan sosial.

Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat dan lembaga pendidikan dalam penguatan nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial juga menjadi faktor pendorong peningkatan IPK di Kabupaten Tasikmalaya. Dengan tren yang cenderung positif, capaian iBangga Kabupaten Tasikmalaya mencerminkan adanya perbaikan kualitas keluarga yang berkesinambungan. Hal ini menjadi modal penting untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera, setara, inklusif, dan berdaya saing, sekaligus mendukung pencapaian pembangunan manusia di daerah.

b. Perlindungan Anak

Kabupaten Tasikmalaya masih memiliki berbagai tantangan yang terkait dengan upaya perlindungan anak. Salah satunya adalah masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak. Pada Tahun 2022 jumlah kasus kekerasan terhadap anak sebesar 58 kasus. Jenis kekerasan yang dialami korban paling besar adalah kekerasan seksual. Kemudian pada Tahun 2023 jumlah kasus kekerasan terhadap Anak meningkat menjadi 134 kasus dengan kekerasan seksual tetap menjadi kekerasan yang paling banyak terjadi pada anak. Data tersebut mengindikasikan bahwa anak di Kabupaten Tasikmalaya rentan menjadi korban kekerasan anak dengan berbagai latar belakang, situasi dan kondisi anak dimana berada, bahkan kekerasan dapat terjadi baik di ranah domestik, lembaga pendidikan maupun lembaga berbasis agama.

Tantangan dalam hal upaya perlindungan anak lainnya adalah tingginya kasus perkawinan anak di Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan Data Perkawinan Anak di Jawa Barat yang bersumber dari <https://stopanjabarberaksi.id> pada Tahun 2022 terdapat





sebanyak 748 dispensasi nikah yang dikabulkan, kemudian pada Tahun 2023 turun menjadi 636 dispensasi nikah yang dikabulkan. Meskipun angka perkawinan anak mengalami penurunan, tetapi angka perkawinan di Kabupaten Tasikmalaya masih menjadi yang tertinggi dibanding dengan kabupaten/kota di Jawa Barat. Sehingga kasus perkawinan anak masih harus mendapatkan perhatian yang serius di Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini penting karena perkawinan anak memiliki beragam dampak negatif baik sisi kesehatan maupun dari sisi sosial ekonomi yang merampas hak anak untuk sejahtera.

Salah satu strategi dalam melindungi anak Indonesia, pemerintah, melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (KemenPPPA) berupaya untuk menyajikan potret capaian perlindungan anak secara umum melalui penyusunan Indeks Perlindungan Anak (IPA). IPA yang disusun oleh KemenPPPA bersama dengan BPS menyajikan potret perlindungan anak di Indonesia melalui presentasi atas 5 klaster. Penyajian lima klaster ini mengacu pada Konvensi Hak Anak dengan mengaplikasikan 4 klaster Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan 1 klaster pembentuk Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA). Secara rinci klaster pada indeks dijabarkan menjadi klaster I: Hak Sipil dan Kebebasan; klaster II: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; klaster III: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; klaster IV: Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang; dan klaster V: Perlindungan Khusus.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adapun yang dimaksud dengan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Sedangkan perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.





Berikut ini adalah realisasi Indeks Perlindungan Anak (IPA) di Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2021 sampai 2024, dimana IPA di Kabupaten Tasikmalaya mengalami kenaikan dari Tahun 2021 sebesar 59,36 Poin menjadi 61,90 Poin pada Tahun 2024.

Tabel 2.39
Capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA)
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Poin	N/A	59,36	60,31	61,90	61,90

Sumber: Kementerian PPPA, berbagai tahun

c. Indeks Pembangunan Pemuda

Berdasarkan UU No.40 Tahun 2019 tentang Kepemudaan, pemuda adalah warga negara berusia 16 hingga 30 tahun yang berada pada fase penting pertumbuhan dan perkembangan. Pada rentang usia ini, pemuda umumnya sedang menempuh pendidikan menengah hingga tinggi, memasuki angkatan kerja produktif, berada pada masa usia subur bagi perempuan, serta menjalani transisi dari remaja menuju dewasa. Pada fase ini, pendidikan yang baik menjadi modal utama untuk meningkatkan kesejahteraan, sementara kondisi kesehatan yang optimal diperlukan agar pemuda dapat beraktivitas dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan pemuda di Indonesia diarahkan untuk menciptakan generasi yang sehat, berpendidikan, terampil, berdaya, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

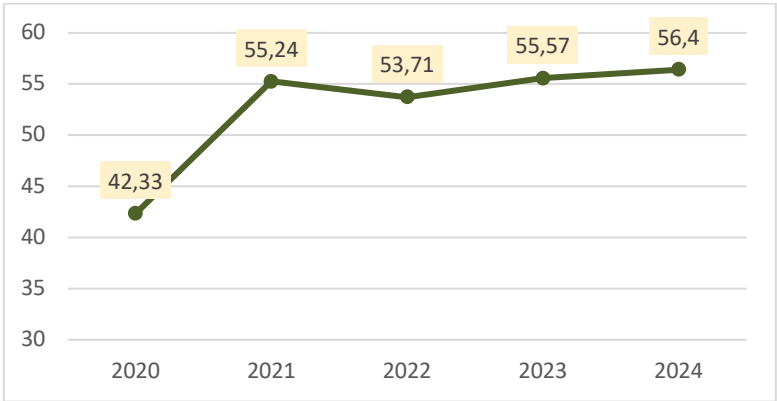
Saat ini Indonesia berada pada fase bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan usia tidak produktif, yang diperkirakan mencapai puncaknya pada tahun 2030. Besarnya jumlah pemuda diharapkan menjadi motor penggerak produktivitas nasional. Namun, tanpa perhatian dan penanganan yang tepat, potensi ini justru dapat berubah menjadi beban sosial ekonomi di masa depan. Diperlukan upaya yang terukur dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa setiap fase kehidupan pemuda dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.

Salah satu alat ukur yang digunakan untuk menilai kondisi dan perkembangan pemuda adalah Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).





Indeks ini menggambarkan kualitas hidup pemuda melalui 5 domain utama, yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. Berikut adalah capaian indeks pembangunan pemuda di Kabupaten Tasikmalaya:



Gambar 2.49
Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2020 - 2024

Sumber: Bappenas, 2025 (diolah)

Capaian IPP Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan perkembangan yang cenderung meningkat selama periode 2020–2024 meskipun sempat mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, IPP berada pada angka 42,33 dan melonjak signifikan menjadi 55,24 pada tahun 2021. Kenaikan ini mengindikasikan adanya perbaikan besar dalam aspek-aspek pembangunan pemuda, seperti akses pendidikan, kegiatan pemberdayaan, dan stabilisasi kondisi sosial ekonomi setelah masa awal pandemi. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 53,71 yang menunjukkan adanya hambatan dalam keberlanjutan program atau ketidakstabilan kondisi ekonomi dan sosial pemuda.

Setelah itu, IPP kembali meningkat secara bertahap pada tahun 2023 dan 2024, masing-masing menjadi 55,57 dan 56,40. Walaupun peningkatannya tidak sebesar tahun 2021, kondisi ini menggambarkan adanya proses pemulihan dan perbaikan yang lebih stabil. Namun demikian, angka yang berfluktuasi dan kenaikan yang relatif lambat mengindikasikan masih adanya berbagai permasalahan mendasar, seperti keterbatasan lapangan kerja bagi pemuda, keterlibatan pemuda dalam pembangunan, minimnya ruang partisipasi dan pengembangan diri, serta tantangan kesejahteraan





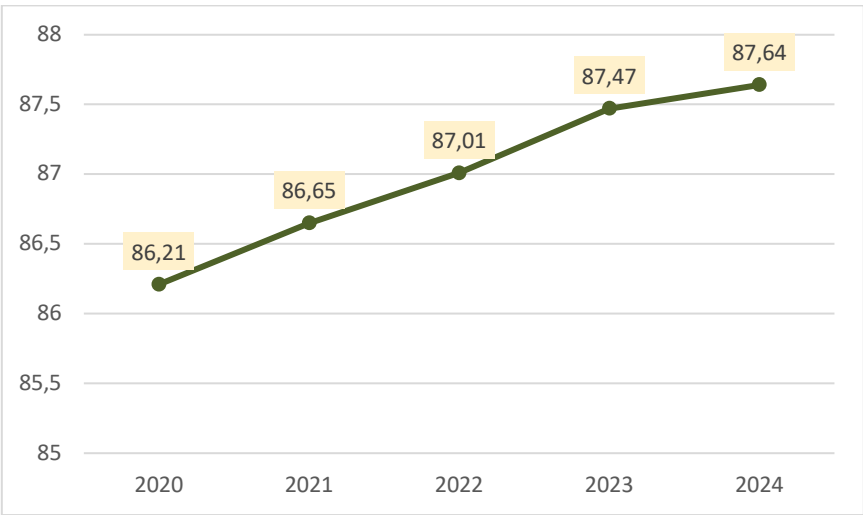
termasuk kesehatan pasca pandemi. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan program secara lebih konsisten dan berkelanjutan untuk mendorong pembangunan pemuda yang lebih optimal.

d. Indeks Pemberdayaan Gender, Indeks Pembangunan Gender, dan Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah ukuran untuk melihat sejauh mana capaian pembangunan manusia (pendidikan, kesehatan, dan ekonomi) dinikmati secara setara oleh laki-laki dan perempuan. IPG dihitung dengan membandingkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan terhadap IPM laki-laki.

Selama periode 2020–2024, IPG Kabupaten Tasikmalaya cenderung mengalami peningkatan dari 86,21 pada Tahun 2020 menjadi 87,64 pada Tahun 2024, yang menunjukkan semakin kecilnya kesenjangan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Peningkatan ini mencerminkan adanya kemajuan dalam akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, serta partisipasi dalam ekonomi.

Meningkatnya IPG didorong oleh meningkatnya angka partisipasi sekolah perempuan, menurunnya angka kematian ibu, serta bertambahnya kontribusi perempuan dalam perekonomian rumah tangga. Namun, kesenjangan masih ada, terutama dalam hal kesempatan kerja formal dan tingkat pendapatan yang masih relatif lebih rendah dibanding laki-laki.



Gambar 2.50
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2020 - 2024

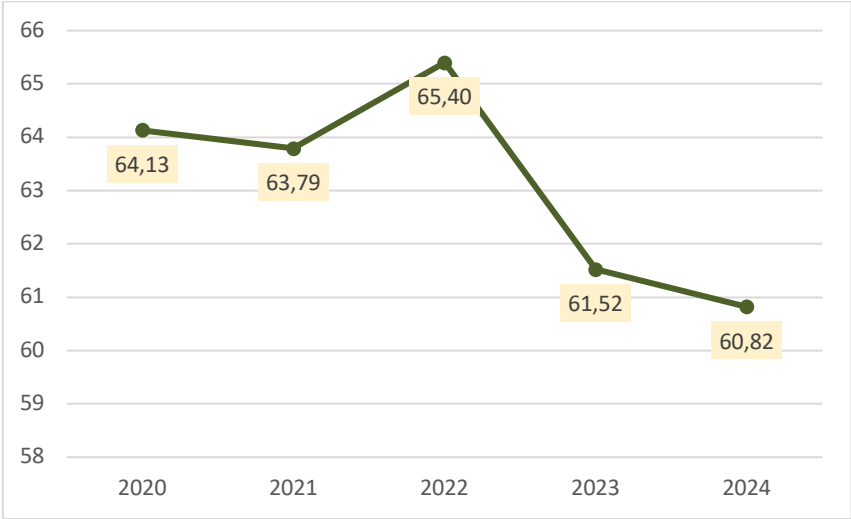
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025 (diolah)





Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur sejauh mana perempuan dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik, yang tercermin dari keterlibatan dalam angkatan kerja, posisi manajerial, serta peran dalam lembaga legislatif.

Nilai IDG Kabupaten Tasikmalaya pada periode 2020–2024 menunjukkan peningkatan secara perlahan, menandakan keterlibatan perempuan dalam dunia kerja dan pengambilan keputusan mulai membaik, meskipun laju kenaikannya tidak terlalu cepat. Perbaikan IDG didorong oleh meningkatnya keterlibatan perempuan dalam dunia kerja dan adanya representasi perempuan di lembaga politik maupun jabatan struktural pemerintahan. Namun, hambatan yang masih dihadapi antara lain stereotip gender, beban ganda perempuan (domestik dan publik), serta rendahnya akses perempuan terhadap jabatan strategis dibanding laki-laki.



Gambar 2.51
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2020 - 2024
Sumber: BPS, 2025 (diolah)

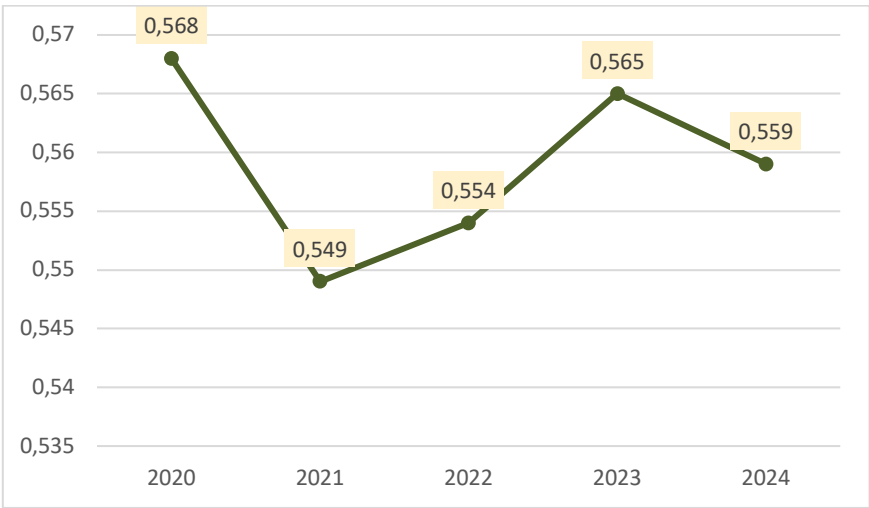
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) mengukur ketimpangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi utama, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi angkatan kerja. Semakin rendah nilai IKG, maka semakin kecil ketimpangan gender. Selama Tahun 2020–2024, IKG Kabupaten Tasikmalaya cenderung menurun, yang berarti ketimpangan gender semakin berkurang. Penurunan ini sejalan dengan meningkatnya





akses perempuan pada layanan kesehatan reproduksi, pendidikan, dan lapangan kerja.

Penurunan IKG dipengaruhi oleh meningkatnya angka harapan hidup perempuan, membaiknya akses kesehatan ibu dan anak, serta berkurangnya kesenjangan partisipasi pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Namun, masih ada tantangan berupa kesenjangan upah, partisipasi tenaga kerja perempuan yang lebih rendah, serta keterwakilan politik yang masih terbatas.



Gambar 2.52
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2020 - 2024
Sumber: BPS, 2025 (diolah)

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Pada Tahun 2022 dan 2023, persentase penduduk Kabupaten Tasikmalaya kategori usia muda, usia produktif dan usia lansia tidak banyak berubah. Komposisi penduduk usia produktif di Kabupaten Tasikmalaya memiliki persentase terbesar yaitu mencapai 68,63% pada Tahun 2022 dan 68,70% pada Tahun 2023. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Tasikmalaya sudah memasuki tahapan bonus demografi (*demographic dividend*) sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Rasio ketergantungan Kabupaten Tasikmalaya selama dua tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Selama periode lima tahun terakhir (2020–2024), persentase penduduk Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan kelompok usia muda, usia produktif, dan usia lanjut cenderung stabil. Komposisi penduduk usia produktif (15–64 tahun) memiliki persentase terbesar yaitu





mencapai 68,57% pada Tahun 2024. Dominasi penduduk usia produktif ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tasikmalaya telah memasuki fase bonus demografi (*demographic dividend*), yaitu kondisi ketika proporsi penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk usia non-produktif.

Tabel 2.40
Rasio Ketergantungan Kabupaten Tasikmalaya

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Penduduk Usia <15 Tahun	437.051	434.116	432.343	432.842	432.182
2	Jumlah Penduduk Usia >64 Tahun	146.008	155.512	165.738	164.095	171.605
3	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) dan (2)	583.059	589.628	598.081	596.937	603.787
4	Jumlah Penduduk Usia 15-64 Tahun	1.282.144	1.294.105	1.308.517	1.310.108	1.317.134
5	Rasio Ketergantungan (3)/(4)	45,48%	45,56%	45,71%	45,56%	45,84%

Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2025 (diolah)

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa selama lima tahun terakhir cenderung stabil. Rasio ketergantungan di Kabupaten Tasikmalaya sebesar 45,84 persen artinya 100 orang penduduk usia produktif mempunyai tanggungan sebanyak 46 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

Secara numerik, rasio ketergantungan Kabupaten Tasikmalaya selama lima tahun terakhir tetap berada di bawah angka 50%. Hal ini mengindikasikan bahwa beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif masih dalam kategori moderat dan relatif ringan. Bila kualitas penduduk usia produktif—dalam hal pendidikan, keterampilan, profesionalitas, dan kreativitas—terus ditingkatkan, maka beban ketergantungan dapat ditekan lebih lanjut dan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Sebaliknya, semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin berat beban ekonomi yang ditanggung oleh kelompok usia produktif. Oleh karena itu, salah satu strategi penting dalam menekan rasio ketergantungan adalah dengan menurunkan angka kelahiran melalui penguatan program keluarga berencana, disertai peningkatan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh.





2.1.3.2 IPTEK, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

Perkembangan IPTEK serta inovasi memiliki peran strategis dalam meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi di Kabupaten Tasikmalaya. Pemanfaatan teknologi yang tepat guna, inovasi produk maupun jasa, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor utama dalam memperkuat struktur perekonomian daerah.

a. Indeks Inovasi Daerah

Berdasarkan Amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi dan Kepala Daerah melaporkan inovasi daerah yang akan dilaksanakan kepada Menteri. Sedangkan berdasarkan Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Penilaian Dan Pemberian Penghargaan Dan/Atau Insentif Inovasi Daerah. Atas dasar itulah ada sebuah kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk lebih memperhatikan bagaimana daerahnya dapat menciptakan lebih banyak inovasi.

Sampai saat ini, inovasi yang ada di Kabupaten Tasikmalaya sudah cukup banyak, akan tetapi pengelolaan inovasi oleh Perangkat Daerah belum optimal. Hal tersebut bisa terlihat pada ajang *Innovation Government Award* (IGA) Tahun 2024, Kabupaten Tasikmalaya hanya mengirimkan 7 Inovasi. Adapun kendala yang dihadapi adalah berkaitan dengan administrasi yang tidak disiapkan secara maksimal oleh Perangkat Daerah yang membidangi inovasi di Kabupaten Tasikmalaya.

Namun pada Tahun 2024 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi 47,59 dari 43,12 pada Tahun 2023. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Tasikmalaya berada pada peringkat 23 dari 27 kabupaten/kota. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

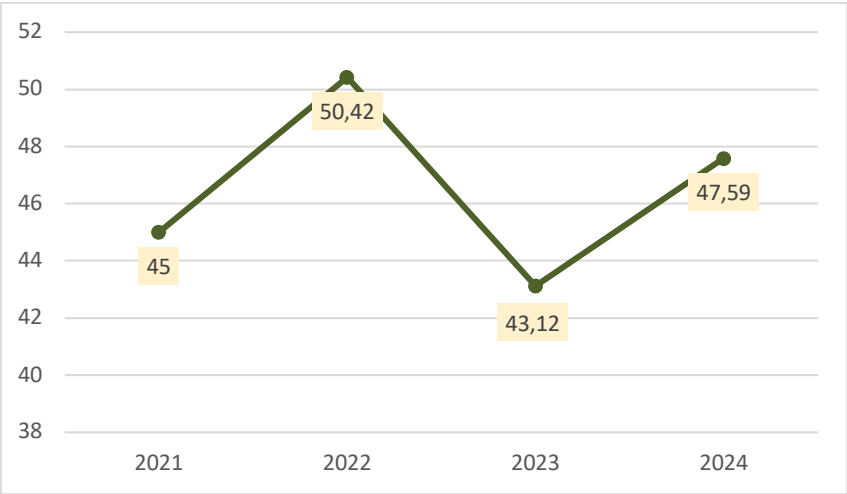


Tabel 2.41
Perbandingan Skor Indeks Inovasi Daerah Kabupaten
Tasikmalaya Tahun 2024 dengan Kabupaten/Kota Lain di
Provinsi Jawa Barat

No	Peringkat Nasional	Kabupaten/Kota	Skor Indeks Inovasi	Keterangan
1	8	Kabupaten Bogor	88,21	Sangat Inovatif
2	5	Kota Bekasi	80,94	Sangat Inovatif
3	7	Kota Sukabumi	76,84	Sangat Inovatif
4	21	Kabupaten Sumedang	73,23	Sangat Inovatif
5	18	Kota Cimahi	69,70	Sangat Inovatif
6	43	Kabupaten Bandung	65,89	Sangat Inovatif
7	48	Kabupaten Sukabumi	64,82	Sangat Inovatif
8	98	Kabupaten Karawang	57,38	Inovatif
9	38	Kota Bandung	57,15	Inovatif
10	41	Kota Bogor	57,04	Inovatif
11	119	Kabupaten Majalengka	55,15	Inovatif
12	122	Kabupaten Bekasi	55,07	Inovatif
13	50	Kota Depok	54,50	Inovatif
14	132	Kabupaten Cirebon	53,91	Inovatif
15	55	Kota Cirebon	53,24	Inovatif
16	142	Kabupaten Subang	52,65	Inovatif
17	146	Kabupaten Garut	52,16	Inovatif
18	66	Kota Tasikmalaya	49,36	Inovatif
19	170	Kabupaten Purwakarta	48,92	Inovatif
20	176	Kabupaten Cianjur	48,52	Inovatif
21	178	Kabupaten Pangandaran	48,03	Inovatif
22	69	Kota Banjar	47,64	Inovatif
23	185	Kabupaten Tasikmalaya	47,59	Inovatif
24	200	Kabupaten Indramayu	46,37	Inovatif
25	240	Kabupaten Bandung Barat	42,02	Inovatif
26	247	Kabupaten Ciamis	41,38	Inovatif
27	330	Kabupaten Kuningan	29,82	Kurang Inovatif

Sumber: Kepmendagri Nomor 400.10.11-4898 Tahun 2024





Gambar 2.53
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2021 - 2024

Sumber: Bappelitbangda Kab. Tasikmalaya, 2025 (diolah)

Namun, untuk mengatasi kendala tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya khususnya pada bidang Penelitian dan Pengembangan berinisiatif untuk memberi pengarah, membantu dan menjembatani semua pemrakarsa (pengusul) inovasi dalam melengkapi administrasi inovasinya, sehingga inovasi di Kabupaten Tasikmalaya bisa terkoordinir. Selain itu, untuk menampung semua inovasi yang ada di Kabupaten Tasikmalaya dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya:

1. Mengundang Perangkat Daerah, Kecamatan, Desa dan Masyarakat yang mempunyai inovasi;
2. Sosialisasi *Tasikmalaya Innovation Award* (TIA) ke seluruh kecamatan yang dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing desa;
3. Kunjungan wilayah yang mempunyai inovasi;
4. Mengadakan penghargaan inovasi tingkat Kabupaten Tasikmalaya.

Tasikmalaya Innovation Award (TIA) merupakan lomba inovasi daerah tingkat Kabupaten yang dilakukan untuk Perangkat Daerah, Kecamatan, Desa, BumDes dan Masyarakat serta unsur pemerintah daerah lainnya. Tujuan adanya TIA ini untuk mendorong semangat Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk menciptakan inovasi, sehingga dapat mendukung peningkatan pembangunan daerah





berbasis inovasi dan penelitian, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Indeks Inovasi Daerah (IID), penghargaan pembangunan daerah tingkat kabupaten/kota, penerapan *good governance*, juga berpartisipasi dalam *Inovation Goverment Award* (IGA).

b. Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan adalah perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Tabel 2.42
Rasio Kewirausahaan Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Wirausaha	25.463	25.463	22.105	22.105	26.107
Total Angkatan Kerja	944.706	944.706	940.713	940.713	1.025.501
Rasio Kewirausahaan	2,70%	2,70%	2,35%	2,35%	2,55%

Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2025 (diolah)

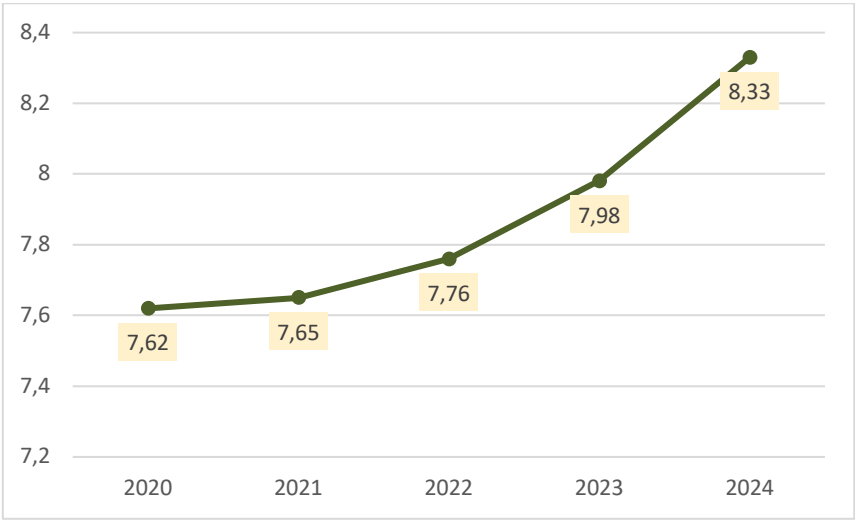
Rasio kewirausahaan di Kabupaten Tasikmalaya mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir. Pada Tahun 2020 dan 2021, rasio kewirausahaan berada di angka 2,70 persen, namun mengalami penurunan menjadi 2,35 persen pada Tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2024 mengalami kenaikan hingga mencapai 2,55 persen. Peningkatan yang substansial ini mencerminkan adanya perkembangan yang pesat dalam sektor kewirausahaan di Kabupaten Tasikmalaya, yang kemungkinan didorong oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan akses terhadap modal usaha, pelatihan kewirausahaan, serta dukungan kebijakan dari pemerintah daerah yang lebih intensif dan terarah.





c. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Rasio Industri Pengolahan merupakan indikator yang menggambarkan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian daerah, khususnya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Indikator ini mencerminkan sejauh mana sektor industri pengolahan berkembang dan berperan dalam struktur ekonomi wilayah.



Gambar 2.54
Rasio PDRB Industri Pengolahan
Tahun 2020 - 2024

Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2025 (diolah)

Data menunjukkan tren peningkatan rasio industri pengolahan di Kabupaten Tasikmalaya selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, nilai rasio tercatat sebesar 7,62, kemudian sedikit naik menjadi 7,65 pada 2021. Tahun 2022 meningkat lagi menjadi 7,76, dan pada 2023 mencapai 7,98. Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada 2024 dengan nilai 8,33. Secara keseluruhan, dalam lima tahun terakhir terjadi kenaikan sebesar 0,71 poin, yang menggambarkan adanya pertumbuhan positif di sektor industri pengolahan.

Peningkatan rasio industri pengolahan ini menunjukkan bahwa sektor tersebut mulai berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah. Faktor pendukungnya antara lain adanya dorongan pemerintah dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis pengolahan, peningkatan permintaan produk lokal, serta tumbuhnya industri makanan, minuman, dan kerajinan yang menjadi ciri khas Tasikmalaya.

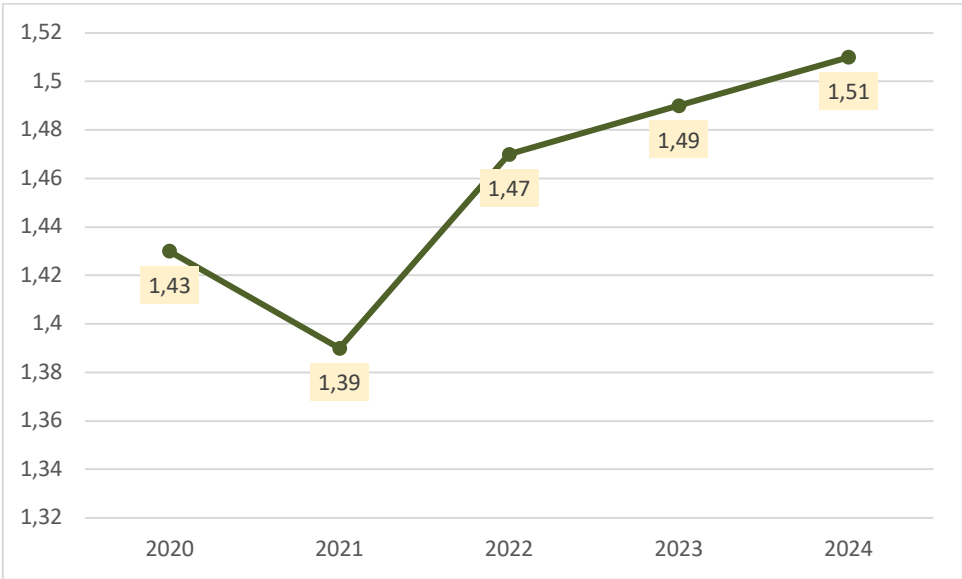




Namun demikian, meskipun meningkat, kontribusi industri pengolahan masih relatif kecil dibanding sektor lain seperti pertanian dan perdagangan. Hal ini dapat disebabkan oleh keterbatasan investasi skala besar, rendahnya pemanfaatan teknologi, keterbatasan akses pasar, serta ketergantungan pada bahan baku lokal yang fluktuatif. Selain itu, dominasi industri skala kecil dan rumah tangga membuat produktivitas sektor ini masih belum optimal.

d. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Rasio Akomodasi Makan dan Minum adalah indikator yang menggambarkan kontribusi sektor penyediaan akomodasi serta makanan dan minuman terhadap perekonomian daerah. Indikator ini mencerminkan peran sektor pariwisata, kuliner, dan jasa perhotelan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.



Gambar 2.55
Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum
Tahun 2020 - 2024
Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2025 (diolah)

Selama periode 2020–2024, rasio akomodasi makan dan minum di Kabupaten Tasikmalaya relatif stabil dengan kecenderungan meningkat. Pada 2020, nilai rasio tercatat 1,43, kemudian menurun sedikit menjadi 1,39 pada 2021, kemungkinan dipengaruhi dampak pandemi Covid-19 terhadap pariwisata dan usaha kuliner. Setelah itu, terjadi pemulihan bertahap dengan nilai 1,47 pada 2022, meningkat lagi menjadi 1,49 pada 2023, dan mencapai 1,51 pada 2024. Secara keseluruhan, dalam lima tahun terakhir terdapat kenaikan sebesar





0,08 poin, menunjukkan pertumbuhan yang perlahan namun konsisten.

Kenaikan rasio ini menandakan mulai pulihnya sektor akomodasi serta usaha makanan dan minuman pasca pandemi. Faktor pendukungnya antara lain meningkatnya mobilitas masyarakat, tumbuhnya daya tarik wisata Tasikmalaya, serta bertambahnya pelaku UMKM kuliner dan jasa penginapan. Selain itu, promosi pariwisata dan dukungan pemerintah terhadap pengembangan ekonomi kreatif juga turut memberi kontribusi.

Pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Tasikmalaya menjadi salah satu strategi penting dalam memperkuat sektor akomodasi dan makanan-minuman. Berbagai subsektor ekonomi kreatif, seperti kuliner, kriya, fesyen, seni pertunjukan, serta konten digital, semakin berkembang seiring meningkatnya permintaan wisata berbasis budaya lokal. Produk kriya khas Tasikmalaya seperti anyaman bambu, bordir, dan batik, tidak hanya menjadi daya tarik wisata belanja, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat. Dukungan terhadap festival budaya, promosi digital melalui media sosial, serta kolaborasi dengan komunitas kreatif lokal turut mendorong daya saing sektor ini.

Namun demikian, laju pertumbuhan yang relatif kecil mengindikasikan masih adanya tantangan. Sektor ini masih sangat dipengaruhi fluktuasi jumlah wisatawan, keterbatasan investasi di sektor perhotelan, serta daya saing kuliner lokal yang harus terus ditingkatkan. Selain itu, sebagian besar usaha kuliner, akomodasi, dan pelaku ekonomi kreatif masih berskala kecil sehingga produktivitasnya belum optimal. Oleh karena itu, perlu strategi berkelanjutan berupa peningkatan kualitas SDM kreatif, digitalisasi pemasaran, dan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif agar sektor ini dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap perekonomian daerah.

2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Ekonomi hijau adalah model pembangunan ekonomi untuk menunjang pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada investasi, kapital dan infrastruktur, lapangan kerja dan keterampilan untuk





mewujudkan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Indeks ekonomi hijau ditujukan sebagai alat untuk mengukur progres dan capaian transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau secara *tangible*, representatif, dan akurat.

Secara prinsip, Indeks Ekonomi Hijau Daerah terdiri atas tiga pilar utama, yaitu pilar ekonomi, pilar sosial, dan pilar lingkungan. Namun, dengan mempertimbangkan kapasitas, kewenangan, ketersediaan data, serta mekanisme pelaporan di tingkat kabupaten/kota, maka pengukuran yang dilakukan di tingkat daerah difokuskan pada Indeks Ekonomi Hijau Daerah pada Pilar Ekonomi. Hal ini berarti bahwa penghitungan indeks di tingkat kabupaten/kota hanya mencakup pilar ekonomi, dengan parameter yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.

Adapun pilar sosial dan pilar lingkungan tidak dievaluasi di tingkat kabupaten/kota, karena sebagian besar indikatornya telah tercermin dalam indikator kinerja lain yang terdapat pada dokumen perencanaan daerah sebagai turunan dari indikator provinsi.

Parameter yang digunakan dalam perhitungan Indeks Ekonomi Hijau Daerah pada Pilar Ekonomi meliputi:

- A. Produktivitas Akuakultur;
- B. Produktivitas Padi;
- C. Produktivitas Tenaga Kerja Industri;
- D. Produktivitas Tenaga Kerja Jasa; dan
- E. PDRB Perkapita.

Berdasarkan hasil kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, penghitungan Indeks Ekonomi Hijau untuk kabupaten/kota dilakukan hanya pada pilar ekonomi. Berikut capaian skor Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Tasikmalaya:

Tabel 2.43
Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Ekonomi Hijau	Poin	N/A	N/A	N/A	28,58	27,58

Sumber: Hasil Perhitungan Provinsi Jawa Barat, 2025





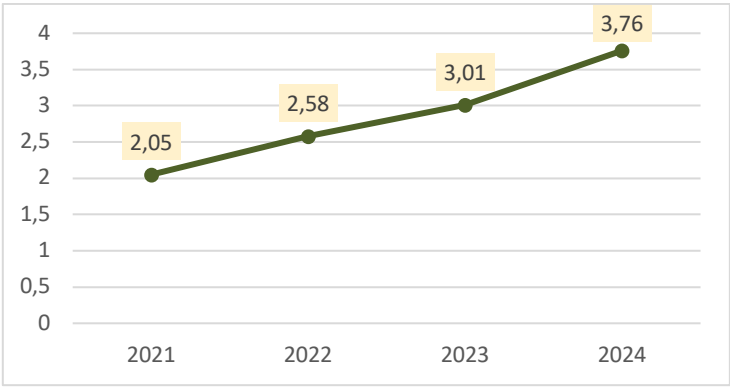
2.1.3.4 Transformasi Digital

Transformasi digital merupakan proses pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas layanan publik, tata kelola, serta efektivitas dan efisiensi birokrasi. Transformasi ini tidak hanya sekedar penggunaan teknologi, tetapi juga melibatkan perubahan budaya kerja, pola pikir (mindset), dan model pelayanan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, indeks SPBE merupakan hasil pelaksanaan dari sistem pemerintahan berbasis elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. SPBE meliputi beberapa domain antara lain Domain Kegiatan Pemerintahan, Teknologi dan Informasi serta Layanan.

Capaian indeks SPBE di Kabupaten Tasikmalaya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami kenaikan, namun pada Tahun 2020 tidak dilakukan penilaian karena Kabupaten Tasikmalaya tidak dijadikan lokus oleh Provinsi. Pada Tahun 2024 mencapai 3,76 naik dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,05. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2.56
Indeks SPBE Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2020 - 2024

Sumber: Dishubkominfo Kab. Tasikmalaya, 2025 (diolah)





2.1.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Integrasi ekonomi domestik dan global merupakan salah satu faktor penting dalam memperkuat daya saing dan ketahanan ekonomi daerah. Kabupaten Tasikmalaya, dengan potensi sumber daya alam, produk pertanian, UMKM, serta sektor ekonomi kreatif yang dimilikinya, memiliki peluang untuk memperluas pasar baik di tingkat nasional maupun internasional.

a. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah komponen penting dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menggambarkan investasi fisik berupa penambahan aset tetap, seperti pembangunan gedung, infrastruktur, mesin, dan peralatan, yang digunakan dalam proses produksi. PMTB mencerminkan tingkat investasi suatu daerah, yang berperan besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang.

Tabel 2.44
Pembentukan Modal Tetap Bruto
di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Miliar Rupiah	7.175,69	7.978,33	8.519,67	8.841,08	9.838,27

Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2025

Berdasarkan tabel diatas, PMTB Kabupaten Tasikmalaya mengalami tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, nilai PMTB tercatat sebesar Rp7.175,69 miliar dan terus naik setiap tahunnya, mencapai Rp9.838,27 miliar pada 2024. Peningkatan terbesar terjadi pada 2024 dengan kenaikan signifikan dibanding tahun sebelumnya, yakni sekitar Rp997,19 miliar. Secara umum, tren ini menggambarkan adanya aktivitas investasi yang semakin kuat di Kabupaten Tasikmalaya.

Peningkatan PMTB ini menunjukkan adanya dorongan investasi di sektor pembangunan infrastruktur, properti, maupun sarana produksi lainnya. Hal ini dapat dipengaruhi oleh membaiknya kondisi ekonomi pascapandemi COVID-19, meningkatnya peran pemerintah dalam mendorong pembangunan daerah, serta bertambahnya minat investor swasta. Namun, tantangan yang mungkin dihadapi adalah bagaimana memastikan bahwa investasi tersebut merata di seluruh





wilayah dan mampu mendorong terciptanya lapangan kerja produktif. Keberlanjutan peningkatan PMTB juga perlu dijaga melalui kebijakan yang mendukung iklim investasi kondusif, perbaikan infrastruktur dasar, dan penguatan daya saing daerah.

b. Realisasi Investasi

Iklim investasi suatu negara atau suatu daerah mencerminkan kinerja kebijakan pemerintah dan peraturan dalam mengendalikan baik konsep dan tingkat operasional. Secara umum, saat ini iklim investasi di Indonesia dalam kondisi yang tidak memuaskan. Iklim investasi daerah yang baik mencerminkan sejumlah kondisi yang berkaitan dengan wilayah tertentu yang membentuk kesempatan dan insentif bagi investor untuk membuka usaha yang layak dari segi bisnis. Daya saing investasi daerah tidak terjadi dengan serta merta. Pembentukan daya saing investasi, berlangsung terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor.

Masalah ekonomi pasca Covid-19 sangat berpengaruh terhadap iklim investasi daerah dan harus segera diatasi, oleh karena itu sangat dibutuhkan kesungguhan pemangku kebijakan untuk memacu investasi di Kabupaten Tasikmalaya sehingga mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 2.45
Hasil Kinerja Penanaman Modal (Investasi)
di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Investor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)/Penanaman Modal Asing (PMA)	Investor	424	1.427	-	-	1.537
2.	Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)/ Penanaman Modal Asing (PMA)	Rp	750.600.276.197	8.599.700.000	211.553.020.823	446.296.142.757	228.279.000.000

Sumber: Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya, 2025

2.1.3.6 Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Keseimbangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan perdesaan memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Tasikmalaya. Perkotaan berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi, perdagangan,

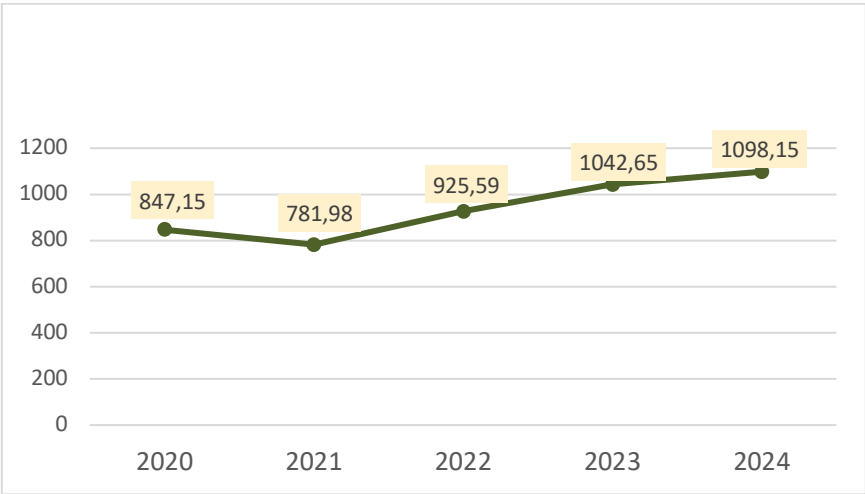




jasa, serta industri kreatif, sementara wilayah perdesaan berperan sebagai basis produksi pangan, komoditas pertanian, serta sumber daya alam. Keterhubungan yang sinergis antara keduanya menjadi kunci dalam menciptakan rantai pasok yang saling menguatkan.

a. Kemantapan Jalan

Berdasarkan Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor PU.12.06/Kep.483-DPUTRLH/2023 tentang Ruas-Ruas Jalan menurut statusnya sebagai Jalan Kabupaten, total panjang jalan di Kabupaten Tasikmalaya mencapai 1.230,47 km yang terdiri 178 ruas jalan. Ruas jalan Pamoyanan-Suryalaya telah berpindah kewenangan menjadi ruas jalan provinsi dengan panjang 9,45 km.



Gambar 2.57
Kondisi Jalan Mantap Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2020-2024

Sumber: LKPJ Kabupaten Tasikmalaya, 2025 (diolah)

Salah satu indikator utama keberhasilan dalam sektor infrastruktur jalan adalah Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota. Indikator ini mencerminkan persentase panjang jalan yang berada dalam kondisi baik dan sedang berdasarkan survei kondisi jalan yang dilakukan berdasarkan metode Indeks Kondisi Perkerasan (IKP) atau Analisis Perhitungan *Surface Distress Index* (SDI). Kedua metode ini merupakan parameter pengukuran yang digunakan untuk menilai kondisi fungsional permukaan jalan sesuai dengan standar Bina Marga.

Pada Tahun 2021, tingkat kemantapan jalan di Kabupaten Tasikmalaya mengalami penurunan signifikan dari 847,15 km menjadi 781,98 km. Penurunan ini disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang



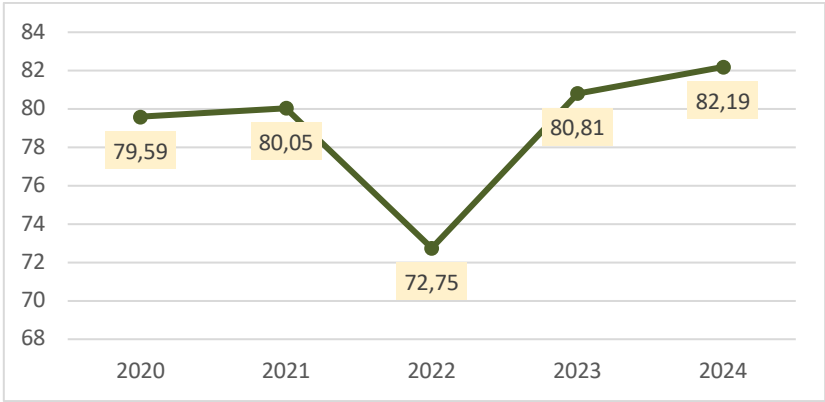


melanda Indonesia, dimana terjadi pengalihan anggaran besar-besaran untuk menangani dampak kesehatan dan sosial dari wabah tersebut. Akibatnya, anggaran untuk pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur, termasuk jalan, menjadi terbatas.

Situasi mulai membaik pada Tahun 2021, ketika tingkat kemantapan jalan meningkat menjadi 82,15 persen. Peningkatan ini didukung oleh pendanaan dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yang memberikan suntikan dana untuk memulihkan dan memperbaiki infrastruktur jalan yang terdampak. Seiring dengan pulihnya pendanaan pembangunan, kondisi jalan di Kabupaten Tasikmalaya pun menunjukkan perbaikan yang signifikan. Pada Tahun 2024, tingkat kemantapan jalan mencapai 1.098,15 km, mencerminkan upaya pemerintah daerah yang berhasil dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas infrastruktur jalan pasca-pandemi.

b. Tingkat Keselamatan Jalan

Keselamatan jalan merupakan salah satu aspek vital dalam manajemen infrastruktur transportasi, terutama di Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki wilayah dengan topografi yang bervariasi dan tingkat mobilitas penduduk yang cukup tinggi. Keselamatan jalan tidak hanya ditentukan oleh kondisi fisik jalan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pengelolaan lalu lintas, pemeliharaan rutin, serta edukasi bagi pengguna jalan. Kabupaten Tasikmalaya, dengan jaringan jalan yang menghubungkan area pedesaan dan perkotaan, menghadapi tantangan khusus dalam menjaga tingkat keselamatan jalan yang memadai.



Gambar 2.58
Persentase Tingkat Keselamatan Jalan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 - 2024
Sumber: LKIP Tahun 2020-2024



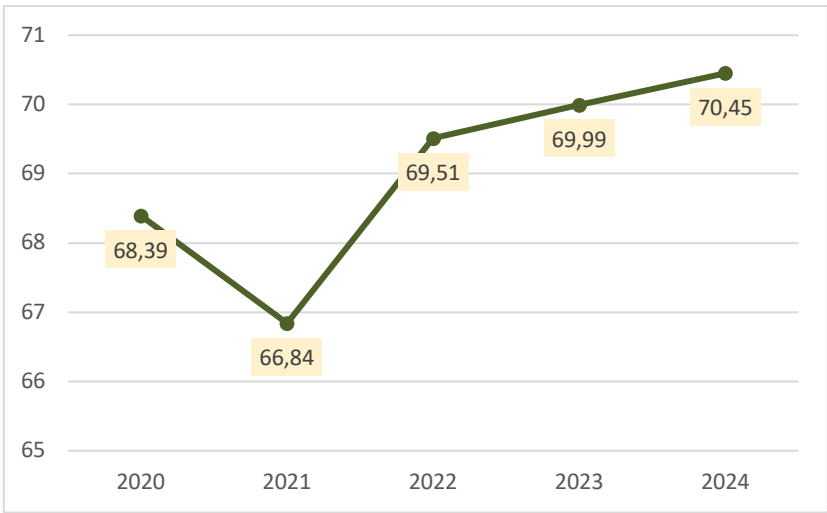


Selama periode 2020-2023, Kabupaten Tasikmalaya mengalami fluktuasi dalam tingkat keselamatan jalan. Pada Tahun 2020, tingkat keselamatan jalan berada pada angka 79,59%. Namun, pada Tahun 2022 menurun menjadi 72,75%. Penurunan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk peningkatan volume kendaraan yang signifikan dan kondisi jalan yang memburuk.

Pada Tahun 2023 dan 2024, tingkat keselamatan jalan kembali meningkat menjadi 80,81% dan 82,19%. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tasikmalaya telah berhasil menerapkan kebijakan yang lebih baik dalam hal pengelolaan dan pemeliharaan jalan, serta adanya dukungan dana tambahan pasca-pandemi yang memungkinkan perbaikan infrastruktur.

c. Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor PU.01.01/KEP.332-DPUTRLH/2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya memiliki kewenangan penuh atas pengelolaan 27 Daerah Irigasi yang mencakup luas areal sebesar 58.011 hektar. Tanggung jawab ini sangat penting dalam mendukung kegiatan pertanian, yang menjadi tulang punggung perekonomian lokal. Pengelolaan yang efisien dan distribusi air yang optimal menjadi kunci dalam menjaga produktivitas pertanian, terutama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan cuaca yang tidak menentu.



Gambar 2.59
Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik
Tahun 2020 - 2024

Sumber: LKIP Tahun 2020-2024





Kondisi irigasi di Kabupaten Tasikmalaya selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi, di mana persentase irigasi dalam kondisi baik mencapai 68,39% pada Tahun 2020, turun menjadi 66,84% pada Tahun 2021, namun kembali meningkat pada Tahun 2022 sampai 2024 mencapai 70,45%. Meskipun sempat mengalami penurunan, perbaikan stabil dalam tiga tahun terakhir mencerminkan upaya pemeliharaan dan perbaikan irigasi yang telah dilakukan secara efektif oleh pemerintah daerah.

Keberhasilan dalam pengelolaan irigasi ini tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga berpotensi meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat, serta mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Tasikmalaya.

2.1.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

Sebagaimana dikutip dari laman resmi Bank Indonesia (BI), inflasi diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kebalikan dari inflasi adalah deflasi, yakni penurunan harga barang secara umum dan terus menerus. Penyebab inflasi karena banyak faktor. Menurut laman resmi Kementerian Keuangan, setidaknya ada enam faktor penyebab inflasi antara lain permintaan yang tinggi terhadap suatu barang atau jasa sehingga membuat harga barang atau jasa tersebut mengalami kenaikan. Penyebab inflasi lainnya yakni adanya peningkatan biaya produksi, bertambahnya uang yang beredar di masyarakat, dan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Penyebab inflasi berikutnya perilaku masyarakat yang seringkali memprediksi atau biasa disebut sebagai inflasi ekspektasi, dan terakhir penyebab inflasi karena kekacauan ekonomi dan politik

Berdasarkan the *Classification of individual consumption by purpose*, inflasi yang diukur dengan IHK di Indonesia dikelompokkan ke dalam 7 kelompok pengeluaran yaitu :

- 1) Kelompok Bahan Makanan;
- 2) Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau;
- 3) Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar;
- 4) Kelompok Sandang;
- 5) Kelompok Kesehatan;



- 6) Kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga;
- 7) Kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan.

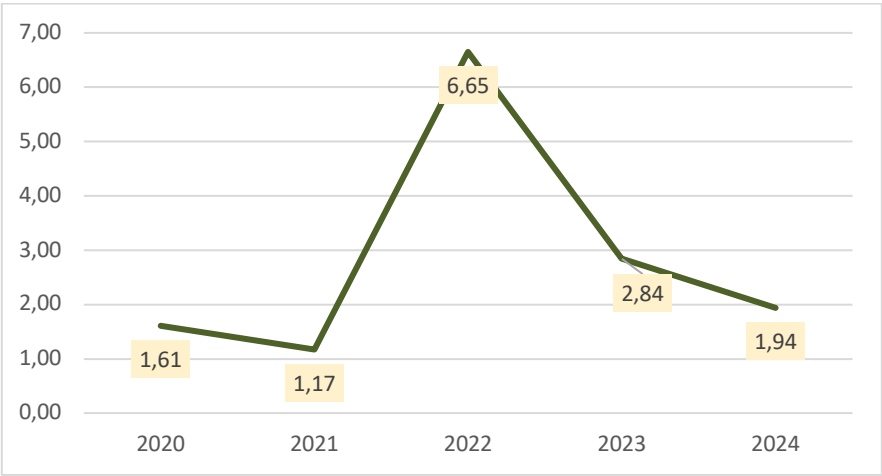
Berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi dibagi menjadi 4 yaitu:

- 1) **Inflasi Ringan**, yaitu inflasi yang mudah untuk dikendalikan dan belum begitu mengganggu perekonomian suatu negara. Terjadi kenaikan harga barang/jasa secara umum, yaitu di bawah 10% per tahun dan dapat dikendalikan.
- 2) **Inflasi Sedang**, yaitu inflasi yang dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat berpenghasilan tetap, namun belum membahayakan aktivitas perekonomian suatu negara. Inflasi ini berada di kisaran 10% – 30% per tahun.
- 3) **Inflasi Berat**, yaitu inflasi yang mengakibatkan kekacauan perekonomian di suatu negara. Pada kondisi ini umumnya masyarakat lebih memilih menyimpan barang dan tidak mau menabung karena bunganya jauh lebih rendah ketimbang nilai inflasi. Inflasi ini berada di kisaran 30% – 100% per tahun.
- 4) **Inflasi Sangat Berat** (*Hyperinflation*), yaitu inflasi yang telah mengacaukan perekonomian suatu negara dan sangat sulit untuk dikendalikan meskipun dilakukan kebijakan moneter dan fiskal. Inflasi ini berada di kisaran 100% ke atas per tahun.

Kondisi perekonomian yang baik, idealnya adalah apabila angka pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibanding dengan perkembangan harga atau besaran PDRB ADHK berada di atas PDRB ADHB. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara makro potensi ekonomi di Kabupaten Tasikmalaya masih dalam tahap berkembang sebagaimana yang terjadi pada hampir seluruh daerah di Provinsi Jawa Barat, bahkan di tingkat nasional. Sementara itu, tingkat pendapatan masyarakat dapat ditunjukkan oleh PDRB yang dapat menggambarkan tingkat kemajuan perekonomian pada suatu daerah. Tingkat pendapatan perkapita dibandingkan dengan laju inflasi akan menunjukkan seberapa besar kekuatan daya beli masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini bisa dikatakan jika pertumbuhan pendapatan diasumsikan sama dengan kesejahteraan masyarakat maka gap antara pertumbuhan pendapatan dengan tingkat inflasi menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum.



Perkembangan inflasi Kabupaten Tasikmalaya mengacu pada tingkat inflasi Kota Tasikmalaya. Sampai dengan bulan Desember 2024 tingkat inflasi Kota Tasikmalaya sebesar 1,94% (mtm). Perkembangan inflasi Kota/Kabupaten Tasikmalaya dapat terlihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.60
Inflasi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2025

Secara umum inflasi di Kota/Kabupaten Tasikmalaya termasuk kriteria ringan atau *creeping inflation* karena kurang dari 10% setahun. Inflasi seperti ini wajar terjadi pada negara atau daerah berkembang yang selalu berada dalam proses pembangunan. Inflasi sendiri memiliki dampak positif maupun dampak negatif, hal ini tergantung pada parah atau tidaknya inflasi.

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif menjadi kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan responsif terhadap perubahan. Integritas diwujudkan melalui transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan praktik KKN, sehingga meningkatkan kepercayaan publik dan iklim investasi.

Sementara itu, adaptivitas tercermin dari kemampuan pemerintah daerah menyesuaikan kebijakan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi, termasuk melalui digitalisasi layanan publik.

a. Indeks Reformasi Birokrasi

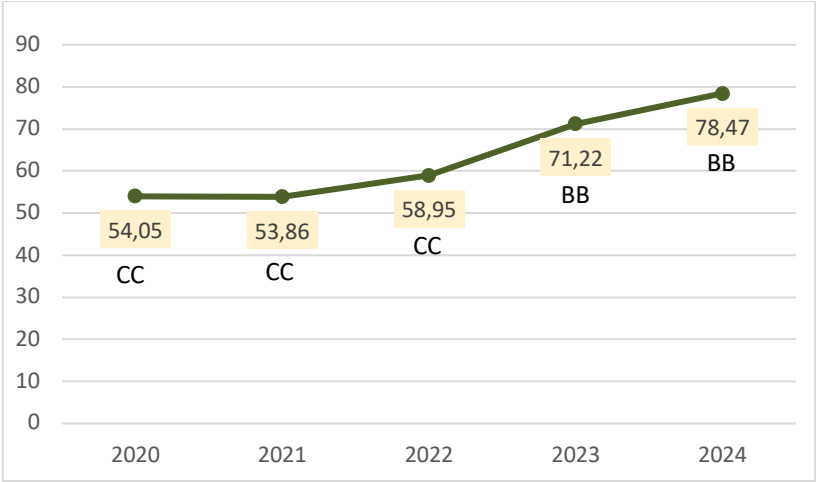
Indeks reformasi birokrasi menggambarkan sejauhmana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh instansi





pemerintah, yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Capaian indeks reformasi birokrasi Kabupaten Tasikmalaya dalam kurun waktu 5 tahun cenderung mengalami kenaikan. Pada Tahun 2024 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 71,22 menjadi 78,47 poin dengan kategori “BB” (sangat baik). Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tasikmalaya terus berupaya untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Gambar 2.61
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2020 - 2024

Sumber: Sekretariat Daerah, 2025 (diolah)

b. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah di Indonesia. Terdiri dari 6 aspek dan 30 indikator yaitu Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), Konsultasi dan Pengaduan, serta Inovasi Pelayanan.

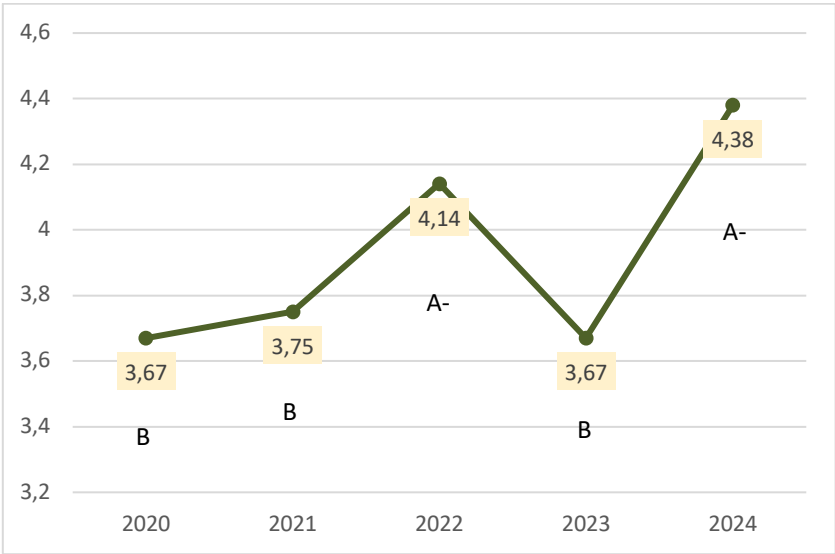
Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Tasikmalaya periode 2020–2024 menunjukkan tren yang berfluktuasi. Pada 2020 indeks tercatat 3,67 dan sedikit meningkat pada 2021 menjadi 3,75. Tahun 2022 mengalami lonjakan hingga 4,14, namun kembali turun signifikan ke





angka 3,67 pada 2023. Meski demikian, pada Tahun 2024 meningkat kembali hingga mencapai 4,38.

Penurunan indeks pada 2023 disebabkan oleh perbedaan lokasi penilaian yang dilakukan Kementerian PANRB serta kesiapan perangkat daerah yang menjadi lokus evaluasi. Dari total 155 unit penyelenggara pelayanan publik, terdapat 20 unit perangkat daerah, 39 kecamatan, dan 40 puskesmas yang dinilai, di mana sebagian belum sepenuhnya siap. Peningkatan signifikan pada 2024 mengindikasikan adanya perbaikan nyata pada aspek kebijakan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan, mekanisme konsultasi-pengaduan, serta inovasi pelayanan, sehingga pelayanan publik di Kabupaten Tasikmalaya semakin responsif dan berkualitas. Berikut adalah capaian indeks pelayanan publik dari Tahun 2020-2024.



Gambar 2.62
Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2020 - 2024

Sumber: Sekretariat Daerah, 2025 (diolah)

2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial

Indeks ketenteraman dan ketertiban umum adalah pengukuran terhadap tingkat pencapaian ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Aspek yang dinilai antara lain:

- 1. Persentase pelanggaran perda dan perkara yang diselesaikan
- 2. Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan
- 3. Persentase anggota linmas desa yang diberdayakan





4. Persentase anggota Satpol PP dan PPNS yang kompeten

Tabel 2.46
Capaian Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	N/A	50	56,25	62,5	62,5

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2025

Selama periode 2020-2024, indeks ketenteraman dan ketertiban umum mengalami peningkatan, dari 50% pada Tahun 2021 menjadi 62,5% pada Tahun 2024. Hal ini mencerminkan bahwa kebijakan, program, dan tindakan yang diterapkan untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas masyarakat semakin efektif. Namun, masih terdapat kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) agar lebih optimal dalam menjaga ketertiban umum.

2.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

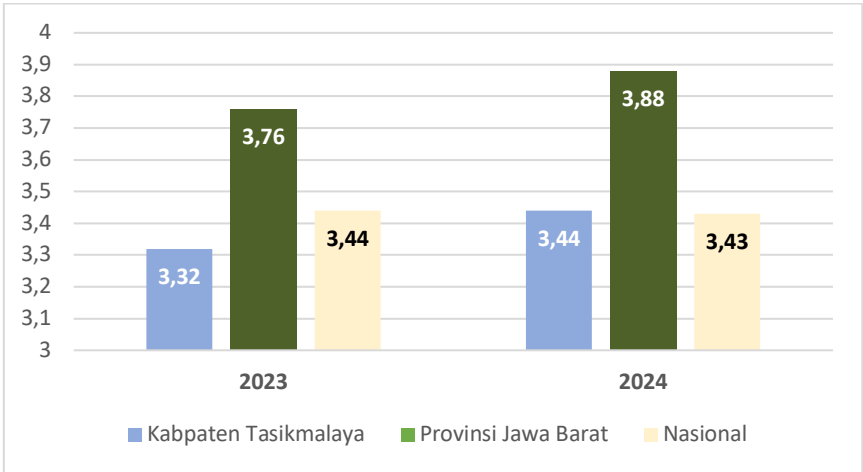
Daya saing daerah merupakan salah satu aspek penting dalam tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berkaitan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah dan infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

Pengukuran daya saing pada tingkat Kabupaten/Kota melalui Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang merefleksikan tingkat produktivitas daerah. IDSD terdiri dari empat komponen, yaitu Lingkungan Pendukung, Sumber Daya Manusia, Pasar, dan Ekosistem Inovasi. Hasil pengukuran IDSD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2023-2024 mengalami peningkatan sebesar 0,12 poin, dari 3,32 pada tahun 2023 menjadi 3,44 pada tahun 2024. Akan tetapi, capaian tersebut masih berada dibawah Provinsi Jawa Barat, namun sedikit diatas rata-





rata Nasional. Berikut adalah grafik capaian indeks daya saing daerah Kabupaten Tasikmalaya.



Gambar 2.63
Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025

2.1.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi, berikut adalah capaian mengenai kinerja urusan pemerintahan daerah di Kabupaten Tasikmalaya:

a. Layanan Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

1) Pendidikan

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menetapkan Pendidikan sebagai salah satu program prioritas pada RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2045 guna mencapai misi mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Gambaran capaian IKU urusan Pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.47
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020–2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	75,69	122,57	79,6	79,6	79,6
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat.	%	100,39	97,10	101,97	99,61	101,14
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Sederajat	%	93,65	92,46	97,23	95,55	95,76
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat	%	108,09	101,08	92,67	100,86	101,35



No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Sederajat	%	90	92,01	80,43	86,89	84,27
6	Rasio Guru SD-MI terhadap Murid SD-MI	Rasio	01:20	01:21	01:22	01:25	01:26
7	Rasio Guru SMP-MTs terhadap Murid SMP-MTs	Rasio	01:16	01:17	01:19	01:20	01:22
8	Angka Melanjutkan (AM) dari SD-MI ke SMP-MTs	%	120,45	94,87	100	100	100
9	Persentase PKBM yang menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan	%	52,08	58,33	62,08	67,08	72,08
10	Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	%	80,47	53,18	55,18	57,18	59,18
11	Persentase angka putus sekolah jenjang SD	%	7	6	5	4	3
12	Persentase angka putus sekolah jenjang SMP	%	19	17	15	13	11
13	Angka Partisipasi Sekolah usia 5-6 Tahun	%	N/A	N/A	N/A	78,93	83,58
14	Angka Partisipasi Sekolah usia 7 - 15 Tahun	%	91,83	92,31	97,15	99,09	98,63
15	Angka Partisipasi Sekolah Usia 7 -18 Kesetaraan	%	N/A	N/A	N/A	11,44	14,78

Sumber: LKIP Tahun 2020-2024

Capaian indikator kinerja urusan pendidikan dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren yang positif, yang tercermin dari peningkatan berbagai indikator partisipasi dan mutu pendidikan. Meskipun demikian, kinerja sektor pendidikan masih menghadapi sejumlah permasalahan yang saling berkaitan dan memerlukan penanganan yang komprehensif.

Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD masih relatif rendah dan belum mampu menyamai capaian rata-rata provinsi maupun nasional, yang menandakan masih terbatasnya akses layanan pendidikan anak usia dini, terutama di wilayah pedesaan. Kondisi serupa juga terlihat pada jenjang pendidikan menengah, di mana keterjangkauan dan kualitas layanan pendidikan belum merata, khususnya di wilayah terpencil dan perdesaan.





Di sisi lain, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) juga masih menjadi tantangan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kesempatan pengembangan profesional serta masih banyaknya guru yang belum memiliki sertifikasi profesi. Pertumbuhan penduduk yang pesat berdampak pada kebutuhan akan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas. Kemudian angka kemiskinan yang masih tinggi menyebabkan sebagian anak usia sekolah terpaksa bekerja dan tidak melanjutkan pendidikan.

2) Kesehatan

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kesehatan merupakan salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Penyelenggaraan urusan kesehatan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan dan cakupan akses pelayanan. Pedoman penyelenggaraan urusan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang kesehatan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 4 tahun 2019.

Capaian indikator kinerja urusan Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.48
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Orang	5	179	199	262	264
2.	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	Orang	4	5	6	8	7
3.	Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	Orang	75	47	45	36	40
4.	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Orang	1	10	16	7	6
5.	Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup	Orang	5	155	165	240	236





No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
6.	Prosentase Keluarga Sehat	%	31,69	39,67	44,51	39,67	54,31
7.	Prosentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	%	91,25	93,94	98,99	99,57	97,10
8.	Prosentase Ibu Bersalin mendapatakan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	94,84	98,79	98,25	94,78	99,10
9.	Prosentase Bayi Baru Lahir mendapatakan pelayanan persalinan sesuai standar	%	99,69	103,97	98,24	98,32	100
9.	Presentase Balita mendapatakan pelayanan sesuai standar	%	75,6	88,26	88,98	98,34	98,22
10.	Presentase anak pada pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	78,02	94,00	90,16	90,17	97,30
11.	Presentase warga negara usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	43,59	83,19	87,40	100
12.	Presentase orang usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	72,8	51,30	85,10	87,40	95,54
13.	Presentase balita gizi buruk	%	0,03	4,60	0,52	0,41	0,41
14.	Presentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100
15.	Presentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkn pemeriksaan HIV sesuai standar	%	99,34	99,52	58,28	70	92,84
16.	Presentase orang penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	%	100	67,5	105,81	112,12	92,37
17.	Presentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan secondary prevention sesuai standar	%	100	13,5	81,37	100	97,20
18.	Presentase penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	77,22	83,40	100





No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
19.	Presentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan Kesehatan	%	80,07	88,18	86,20	87,23	94,83
20.	Prosentase Desa Siaga Aktif	%	19,09	100	64,10	69,23	69,23
21.	Prosentase Kecamatan mempunyai cakupan PHBS Rumah Tangga mencapai 50%	%	57,2	17,50	46,37	44,49	48,21
22.	Prosentase Desa STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) yang telah mencapai akses 100%	%	0	0	0	0	9,79
23.	Rasio Puskesmas per satuan penduduk (1 : 30.000)	1/30.000	1/45.047	1/46.467	1/48.492	1/47.676	1/49.901
24.	Rasio Puskesmas Pembantu per satuan penduduk	0/000	1/11.777	1/11.308	1/11.911	1/12.394	1/12.097
25.	Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk	0/00000	0,11	1/932.949	1/940.900	1/979.111	1/665.353
26.	Rasio Poliklinik per satuan penduduk	0/000	1/28.601	1/29.617	1/34.850	1/31.798	1/7309
27.	Pembangunan Rumah Sakit type D/RS Pratama Cikatomas	Buah	0	0	0	1	1
28.	Rintisan Pembangunan Rumah Sakit Tipe D/RS Pratama Ciawi, Manonjaya, Karangnunggal	Buah	0	0	0	0	0
29.	Prosentase Puskesmas yang terakreditasi sesuai standar nasional	%	100	100	100	100	100
30.	Prosentase Pemenuhan Obat Esensial di Pelayanan Dasar	%	100	100	91,78	57,50	100
31.	Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk	0/00	0,09	0,122	0,125	0,083	0,16
32.	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	85,5	80,7	89,80	89,86	90,44
33.	Prosentase Bayi mendapatkan Asi Eksklusif	%	73,4	90,46	88,90	89,30	82,30



No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
34	Cakupan Alat dan Sarana Prasarana Rumah Sakit	%	77	80	82,62	82,78	83,86
35	Cakupan Pendayagunaan Fasilitas Pendukung Pelayanan Rumah Sakit	%	77	79	95,45	82,30	82,30

Sumber: LKIP Tahun 2020-2024

Penyelenggaraan bidang kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat dari capaian Indeks Kesehatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Indeks Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya sampai dengan tahun 2024 tercatat sebesar 83,17%. Indeks Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya terus mengalami kenaikan selama 5 tahun terakhir. Namun demikian, capaian tersebut belum sepenuhnya menjawab kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi. Sistem pelayanan kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan saling berkaitan. Salah satu kendala utama adalah belum optimalnya sistem rujukan antara Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL), yang berdampak pada efektivitas layanan berjenjang. Di sisi lain, distribusi dan ketersediaan tenaga medis (dokter umum dan spesialis), tenaga kesehatan maupun tenaga non-kesehatan masih belum merata, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, terutama di daerah terpencil dan perbatasan. Penyelenggaraan bidang kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya selama beberapa tahun terakhir menunjukkan arah yang positif.

Sistem pelayanan kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya masih belum berjalan secara optimal. Hubungan rujukan antara Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) belum sepenuhnya efektif, sehingga layanan berjenjang sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Di lapangan, ketersediaan tenaga medis dan tenaga kesehatan juga belum merata, baik dari segi jumlah maupun kompetensi. Kondisi ini paling terasa di wilayah-wilayah terpencil dan perbatasan, di mana masyarakat masih kesulitan mengakses layanan kesehatan yang memadai.





Selain itu, sebagian besar target Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kesehatan masih belum tercapai secara optimal. Jumlah fasilitas kesehatan seperti puskesmas, puskesmas pembantu, poliklinik, dan rumah sakit pun masih belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat dan masih di bawah standar nasional. Permasalahan lain yang turut memperlambat peningkatan layanan adalah belum terintegrasinya sistem informasi antar fasilitas kesehatan, sehingga koordinasi dan pemantauan pelayanan belum berjalan dengan baik. Pemanfaatan teknologi digital seperti telemedicine juga masih sangat terbatas, padahal teknologi tersebut berpotensi besar untuk menjawab tantangan geografis dan keterbatasan tenaga kesehatan di daerah-daerah sulit dijangkau.

Pertumbuhan penduduk yang cukup pesat turut memberikan tekanan terhadap sistem layanan kesehatan. Kebutuhan masyarakat akan layanan medis meningkat, sementara kapasitas fasilitas dan sumber daya yang tersedia belum sepenuhnya mampu mengimbangnya. Di sisi lain, faktor sosial-ekonomi seperti rendahnya pendapatan, masih tingginya angka kemiskinan, serta keterbatasan akses terhadap pangan bergizi, air bersih, dan sanitasi layak juga berpengaruh terhadap rendahnya derajat kesehatan masyarakat. Perubahan iklim turut menambah kompleksitas permasalahan kesehatan. Fenomena cuaca ekstrem, polusi udara, dan perubahan pola curah hujan telah memicu munculnya berbagai penyakit, baik yang menular maupun tidak menular. Dampak tidak langsung seperti krisis air bersih, berkurangnya ketersediaan pangan, serta tekanan psikologis akibat bencana alam juga semakin dirasakan masyarakat di beberapa wilayah.

Di samping itu, masih terdapat tantangan sosial dan budaya di tengah masyarakat, terutama di wilayah pedesaan, di mana kepercayaan tradisional dan mitos tertentu membuat sebagian warga enggan memanfaatkan layanan kesehatan modern. Ketimpangan geografis juga menjadi kendala tersendiri, karena banyak daerah pedalaman dan perbatasan yang sulit dijangkau tenaga medis maupun layanan kesehatan dasar.

Kondisi tersebut semakin diperberat oleh fluktuasi anggaran daerah akibat refocusing kebijakan dan keterbatasan fiskal, yang



berdampak pada keberlanjutan program kesehatan. Di tengah berbagai tantangan tersebut, Kabupaten Tasikmalaya juga menghadapi beban ganda penyakit, yaitu meningkatnya kasus penyakit menular seperti TBC dan DBD, bersamaan dengan penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi.

Gambaran ini menunjukkan bahwa sektor kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya masih memerlukan penguatan sistem secara menyeluruh, baik melalui peningkatan kualitas dan pemerataan layanan, pengembangan tenaga kesehatan, pemanfaatan teknologi digital, maupun kolaborasi lintas sektor. Upaya-upaya tersebut menjadi kunci penting untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sehat, produktif, dan sejahtera di masa mendatang.

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu sektor strategis yang berperan penting dalam mendukung peningkatan konektivitas wilayah, pelayanan dasar infrastruktur, serta pengembangan tata ruang yang berkelanjutan. Kinerja pelaksanaan urusan ini dapat diukur melalui capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021–2026.

Secara umum, capaian indikator kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada periode tahun 2020–2024 menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu merealisasikan sasaran pembangunan infrastruktur yang telah ditetapkan. Melalui pengukuran terhadap IKU tersebut, dapat diketahui tingkat efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan program pembangunan di bidang pekerjaan umum, seperti peningkatan kualitas jalan, penyediaan air bersih, pengelolaan sumber daya air, serta penataan ruang yang selaras dengan arah pembangunan wilayah.

Adapun capaian indikator kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya selama periode tahun 2020–2024 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.49
Capaian Indikator Kinerja
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Poin	0,481	0,512	0,542	0,566	0,568
2	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	68,39	66,84	69,51	69,99	70,45
3	Persentase Ketersediaan Bangunan Pemerintahan dan Fasilitas Pendukungnya yang Layak Difungsikan	%	46,94	47,67	51,40	59,08	62,39
4	Ketaatan terhadap RTRW	%	21,76	21,77	22,44	26,61	26,62
5	Persentase penduduk berakses air minum	%	65,11	65,61	65,97	66,44	66,93
6	Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	%	48,66	48,91	49,16	50,43	50,69

Sumber: LKIP Tahun 2020-2024

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum di Kabupaten Tasikmalaya telah menunjukkan kemajuan. Hal ini tercermin dari beberapa capaian indikator, antara lain tingkat kemantapan jalan, kondisi jaringan irigasi yang baik, serta cakupan pelayanan air minum dan sanitasi. Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur terutama yang terkait dengan infrastruktur pelayanan dasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Capaian kinerja pada sektor jalan juga menunjukkan peningkatan positif. Hingga akhir tahun 2024, panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik sepanjang 699,00 km dari total panjang jalan sebesar 1.230,47 km dengan 178 ruas jalan yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor PU.12.06/KEP.483-DPUTRLH/2023 tentang Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten. Dengan demikian, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik pada tahun 2024 mencapai 0,568 atau 56,8%. Capaian ini masih perlu ditingkatkan agar kebutuhan infrastruktur pelayanan dasar masyarakat dapat terpenuhi seluruhnya.





Salah satu fokus utama adalah pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten, karena jaringan irigasi berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi yang berperan penting dalam mendukung produktivitas lahan pertanian. Program rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan dalam upaya meningkatkan kondisi jaringan irigasi, sehingga mampu meningkatkan capaian indikator persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik dari 69,99% pada tahun 2023 menjadi 70,45% pada tahun 2024.

Sementara itu, pembangunan infrastruktur yang terkait dengan penyediaan air minum juga terus dibangun dan ditingkatkan. Meskipun tidak signifikan, cakupan pelayanan air minum menunjukkan peningkatan dari 66,44% pada tahun 2023 menjadi 66,93% pada tahun 2024.

4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pembangunan bidang perumahan rakyat adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimal luas bangunan serta kesehatan penghuninya, bertujuan menjamin hak warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Sasarannya adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum memiliki tempat tinggal layak (Rumah Tidak Layak Huni) atau yang digolongkan ke dalam penduduk miskin. Sedangkan kawasan permukiman menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Realisasi capaian indikator kinerja bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman selama Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.





Tabel 2.50
Capaian Indikator Kinerja
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Rumah Layak Huni	Poin	0,2527	0,2528	0,2535	0,2541	0,2546
2	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU pada kurun waktu tertentu	%	52,06	52,14	52,16	52,18	52,28

Sumber: LKIP Tahun 2020-2024

Selama periode tahun 2020–2024, rasio rumah layak huni di Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, meskipun dalam skala yang relatif kecil. Rasio tersebut meningkat dari 0,2527 poin pada tahun 2020 menjadi 0,2546 poin pada tahun 2024, atau naik sebesar 0,0019 poin dalam lima tahun terakhir. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2024 dengan peningkatan sebesar 0,0005 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini sejalan dengan bertambahnya jumlah rumah layak huni sebanyak 917 unit pada tahun 2024, sehingga total rumah layak huni mencapai 459.325 unit. Dengan jumlah penduduk sebesar 1.803.800 jiwa, rasio rumah layak huni terhadap jumlah penduduk mencapai 0,2546, yang menggambarkan bahwa sekitar 25,46% dari total kebutuhan hunian layak telah terpenuhi.

Meskipun menunjukkan arah perbaikan, capaian tersebut masih relatif rendah jika dibandingkan dengan kebutuhan aktual masyarakat. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor utama, antara lain keterbatasan kapasitas fiskal daerah dalam mendanai program perumahan rakyat, serta terbatasnya intervensi program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) yang bersumber dari APBN dan APBD. Peningkatan rasio rumah layak huni perlu diarahkan melalui strategi kolaboratif antara Pemerintah Daerah, sektor swasta, dan masyarakat, antara lain melalui:

- a. Integrasi program perumahan dan penataan permukiman lintas perangkat daerah;
- c. Kemitraan dengan sektor swasta melalui skema CSR dan pembiayaan berbasis masyarakat.





- d. Penyediaan data spasial dan sosial ekonomi yang akurat untuk mendukung perencanaan intervensi yang tepat sasaran,
- e. Optimalisasi pemanfaatan Dana Desa dan bantuan pemerintah pusat untuk peningkatan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Melalui langkah-langkah tersebut diharapkan upaya peningkatan rasio rumah layak huni dapat berlangsung lebih efektif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

5) Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat bertujuan mewujudkan kondisi kehidupan masyarakat yang tenteram, aman yang memungkinkan setiap warga dapat melaksanakan kehidupannya secara wajar. Dalam upaya pencapaian tujuan tersebut telah ditetapkan indikator kinerja utama untuk periode 2021-2026.

Capaian indikator kinerja utama urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tahun 2020 - 2024 tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2.51
Capaian Indikator Kinerja
Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	95,56	99,36	99,64
2	Indeks Risiko Bencana	Point	203,01	186,51	174,11	159,14	145,50
3	Indeks Kapasitas Daerah (Kebencanaan)	Poin	Sedang	Sedang	0,50	0,58	0,64

Sumber: LKIP Tahun 2020-2024

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tasikmalaya selama periode tahun 2020–2024 dalam kerangka RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021–2026 menunjukkan hasil yang cukup baik. Pada periode ini, urusan kebencanaan masih





menjadi bagian dari kewenangan Satpol PP. Keberhasilan capaian target IKU tersebut merupakan hasil dari implementasi berbagai kebijakan dan program strategis, antara lain peningkatan intensitas penegakan peraturan daerah (Perda), penguatan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) melalui kegiatan pelatihan dan pembinaan, serta peningkatan kolaborasi dengan unsur kepolisian, TNI, dan tokoh masyarakat. Selain itu, meningkatnya kesadaran hukum masyarakat juga turut berkontribusi terhadap terciptanya situasi ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu mendapatkan perhatian. Beberapa di antaranya yaitu belum meratanya kapasitas dan kompetensi personel Satpol PP dan Linmas di tingkat kecamatan maupun desa, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pengamanan, serta masih adanya potensi konflik sosial terutama di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi. Selain itu, koordinasi lintas instansi dalam penanganan kondisi darurat belum sepenuhnya responsif, dan sistem pelaporan serta pengelolaan data gangguan ketenteraman dan ketertiban umum masih perlu dioptimalkan.

6) Sosial

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial, meliputi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan, korban eksploitasi dan diskriminasi yang dikelompokkan sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Selain melalui intervensi pemerintah, penyelenggaraan urusan sosial juga dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan berbagai kelompok sosial yang berperan dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial. Unsur masyarakat tersebut termasuk dalam kategori Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), yang terdiri atas Tenaga Kesejahteraan Sosial





Kecamatan (TKSK), Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Karang Taruna, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Penyuluh Sosial, serta dunia usaha dan berbagai unsur masyarakat lainnya yang berkomitmen dalam mendukung peningkatan kesejahteraan sosial.

Berikut gambaran capaian Indikator Kinerja Utama Urusan sosial Tahun 2020-2024.

Tabel 2.52
Capaian Indikator Kinerja
Urusan Sosial Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase PPKS yang tertangani	%	100	100	4,13	4,21	4,24
2	Persentase masyarakat miskin dan rentan miskin yang memperoleh bantuan sosial	%	2,67	41,70	57,96	76,66	81,60
3	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/ Kota	%	100	100	100	100	100
4	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	100	100	100	100	100

Sumber: LKIP Tahun 2020-2024

Secara umum, capaian kinerja urusan sosial Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan beberapa perkembangan positif yang patut diapresiasi. Komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, lansia terlantar, anak terlantar, serta korban bencana, terbukti kuat dan konsisten. Hal ini tercermin dari capaian indikator yang stabil pada angka 100% selama lima





tahun terakhir. Selain itu, respons pemerintah daerah terhadap situasi bencana, baik alam maupun sosial, menunjukkan kesiapsiagaan yang tinggi dan optimal, dengan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana yang selalu tercapai sepenuhnya. Capaian lain yang menonjol adalah peningkatan signifikan bantuan sosial yang diterima oleh masyarakat miskin dan rentan, dari hanya 2,67% pada tahun 2020 menjadi 81,60% pada tahun 2024. Ini mencerminkan efektivitas program perluasan jangkauan bantuan sosial di wilayah tersebut.

Namun demikian, terdapat tantangan serius yang perlu segera ditangani, terutama terkait dengan cakupan pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang rendah, sehingga diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem layanan sosial PPKS, termasuk validasi ulang terhadap metode pendataan, pelaporan, dan cakupan sasaran.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah disarankan untuk melakukan evaluasi terhadap data dan sistem pendataan PPKS guna mengidentifikasi akar masalah. Selain itu, integrasi sistem data sosial antara pemerintah daerah dengan Dinas Sosial Provinsi maupun pusat perlu ditingkatkan untuk memastikan akurasi dan akuntabilitas dalam penanganan PPKS. Pemerintah juga perlu mengoptimalkan program penjangkauan aktif (outreach) melalui sinergi antara desa, kecamatan, dan lembaga kesejahteraan sosial (LKS), guna memastikan tidak ada kelompok rentan yang terlewatkan. Di sisi lain, capaian positif yang telah diraih, khususnya terkait pemenuhan kebutuhan dasar bagi disabilitas, lansia, anak, dan korban bencana, perlu terus dipertahankan melalui mekanisme monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan.

b. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1) Tenaga Kerja

Penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan memperluas penyediaan lapangan pekerjaan. Gambaran kondisi ketenagakerjaan pada umumnya dapat dilihat dari aspek ketersediaan dan kebutuhan (demand), artinya jumlah penduduk yang mencari pekerjaan terpenuhi oleh jumlah lapangan kerja yang tersedia.

Adapun capaian indikator kinerja urusan Tenaga kerja Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di berikut:





Tabel 2.53
Capaian Indikator Kinerja
Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	%	23,85	29,37	29,99	31,74	50,12
2	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	2,08	3,38	12,82	13,67	15,41
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	69,54	68,18	67,83	68,37	68,76
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,12	6,16	4,17	3,89	3,74

Sumber : LKIP Tahun 2020-2024

Capaian kinerja urusan tenaga kerja Kabupaten Tasikmalaya selama periode 2020–2024 secara umum menunjukkan perkembangan yang positif. Persentase tenaga kerja yang berhasil ditempatkan mengalami peningkatan signifikan dari 23,85 persen pada tahun 2020 menjadi 50,12 persen pada tahun 2024. Capaian ini menggambarkan efektivitas berbagai program penempatan tenaga kerja, pelatihan berbasis kompetensi, serta kemitraan dengan dunia usaha dan industri. Membaiknya kondisi ekonomi pasca-pandemi COVID-19 juga turut mendorong peningkatan daya serap tenaga kerja, baik di sektor formal maupun informal. Sementara itu, persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak juga menunjukkan tren peningkatan dari 2,08 persen pada tahun 2020 menjadi 15,41 persen pada tahun 2024. Meskipun peningkatannya cukup signifikan, angka tersebut masih tergolong rendah, yang menunjukkan bahwa kesadaran dan kemampuan perusahaan terutama skala kecil dan menengah dalam menerapkan prinsip kerja layak masih terbatas.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Tasikmalaya relatif stabil dalam lima tahun terakhir, berada pada kisaran 67 hingga 70 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan tenaga kerja cukup terjaga, namun peningkatan partisipasi masyarakat usia produktif dalam pasar kerja masih belum optimal akibat rendahnya tingkat pendidikan, keterampilan, dan akses





terhadap informasi ketenagakerjaan. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan tren yang sangat positif dengan penurunan dari 7,12 persen pada tahun 2020 menjadi 3,74 persen pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memperluas kesempatan kerja melalui pengembangan sektor UMKM, pelaksanaan program padat karya, serta peningkatan aktivitas ekonomi lokal.

Meskipun capaian kinerja menunjukkan hasil yang menggembirakan, masih terdapat sejumlah kendala yang perlu mendapat perhatian. Kualitas dan kesesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia industri masih terbatas, sehingga menyebabkan sebagian pencari kerja tidak terserap optimal. Lapangan kerja formal masih terbatas, sementara sebagian besar pekerja terserap di sektor informal dengan tingkat perlindungan dan produktivitas yang rendah. Selain itu, kepatuhan perusahaan terhadap penerapan standar kerja layak, seperti upah minimum, jaminan sosial, dan keselamatan kerja, masih perlu ditingkatkan. Keterbatasan jaringan dan fasilitas layanan antar kerja, khususnya di wilayah perdesaan, serta terbatasnya anggaran dan sarana pelatihan kerja juga menjadi kendala dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak difokuskan pada upaya peningkatan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan melalui peningkatan peran perempuan dalam masyarakat agar dapat mandiri secara sosial dan ekonomi, penguatan kelembagaan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan.

Pembentukan dan penguatan kelembagaan berbasis gender merupakan salah satu upaya yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan kesetaraan gender. Sedangkan upaya peningkatan pemberdayaan perempuan berbasis keluarga telah dilaksanakan melalui pemberdayaan kelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)





dan program Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) yang dilaksanakan setiap tahun.

Capaian indikator pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.54
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	90	100	100	100	100
2	Status capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	status/ skor	Pratama dengan skor 505	Menuju Madya skor 550,65	Menuju Madya skor 499,60	Menuju Madya skor 579,36	Belum Rilis
3	Persentase pelaksanaan PUG termasuk PPRG pada Instansi Pemerintah	%	10,94	100	100	100	100
4	Persentase pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada lembaga pemerintah dan non pemerintah	%	53,33	56,92	56,92	100	-
5	Persentase lembaga layanan Pemenuhan Hak Anak yang terfasilitasi	%	65	65	65	100	100
6	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	64,13	63,79	65,40	61,52	64,32

Sumber : LKIP Tahun 2020-2024

Secara keseluruhan, Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam aspek kelembagaan, layanan dasar, dan integrasi gender dalam kebijakan daerah. Namun, pencapaian yang belum stabil pada indikator Kabupaten Layak Anak serta rendahnya laju pertumbuhan IDG menjadi perhatian serius yang memerlukan penanganan strategis lintas. Layanan penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan capaian yang sangat baik. Sejak tahun 2021, pelayanan tersebut telah mencapai tingkat pencapaian 100%, dengan penanganan dilakukan oleh petugas terlatih pada unit layanan terpadu. Kondisi ini mencerminkan bahwa sistem perlindungan perempuan





dan anak telah berjalan efektif dengan dukungan sumber daya manusia yang kompeten dan responsif terhadap kebutuhan korban.

Selain itu, pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Jika pada tahun 2020 capaian awal PUG dan PPRG baru mencapai 10,94%, maka pada tahun-tahun berikutnya telah meningkat hingga 100%. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi isu gender dalam kebijakan dan program pembangunan daerah telah berjalan dengan sangat baik.

Kemajuan juga terlihat dalam aspek pemenuhan hak anak, di mana pada tahun 2023 seluruh lembaga layanan, baik di instansi pemerintah maupun non-pemerintah, telah melaksanakan pelebagaan pemenuhan hak anak dengan capaian 100%. Kondisi ini menunjukkan meningkatnya jangkauan perlindungan dan pelayanan anak secara kelembagaan di Kabupaten Tasikmalaya.

Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu mendapat perhatian. Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA) menunjukkan fluktuasi skor yang cukup signifikan selama lima tahun terakhir, yang mengindikasikan koordinasi lintas sektor serta konsistensi dukungan kebijakan belum optimal. Di sisi lain, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) juga menunjukkan kecenderungan stagnan dengan nilai rata-rata berkisar antara 61% hingga 65%, yang menandakan masih adanya kesenjangan dalam peran, akses, dan kontrol perempuan terhadap pendidikan, ekonomi, serta proses pengambilan keputusan di berbagai sektor pembangunan. Fluktuasi capaian KLA dan stagnasi IDG perlu menjadi perhatian pemerintah Daerah antara lain dengan penguatan kolaborasi lintas sektor dan peningkatan efektivitas kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara berkelanjutan.

3) Pangan

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Gambaran capaian kinerja urusan pangan di Kabupaten Tasikmalaya selama tahun 2020-2024 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:





Tabel 2.55
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pangan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	81,5	80,25	81,80	93,40	88,45
2	Penguatan cadanan pangan	Ton	100	35,00	16,5	N/A	38,00
2	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	%	0,81	N/A	0,91	-1,02	0,96
3	Persentase rata-rata ketersediaan energi dan protein dalam bahan pangan per kapita	%	81,5	N/A	3,27	2,68	3,34
4	Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat	%	2	108,63	114,18	96,36	98,28

Sumber : LKIP Tahun 2020-2024

Capaian indikator bidang ketahanan pangan Kabupaten Tasikmalaya selama periode 2020–2024 menunjukkan kemajuan yang cukup baik meskipun belum stabil sepenuhnya. Keberhasilan terlihat pada meningkatnya diversifikasi pangan (PPH) dan konsumsi pangan masyarakat, namun masih terdapat tantangan pada aspek cadangan pangan dan stabilitas produksi pertanian.

Nilai Pola Pangan Harapan (PPH) menunjukkan tingkat keberagaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat. Selama periode 2020–2024, capaian PPH Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan tren berfluktuasi namun cenderung meningkat, Kenaikan signifikan pada tahun 2023 menandakan meningkatnya diversifikasi konsumsi pangan masyarakat, terutama pada kelompok pangan non-beras seperti umbi, sayuran, buah, dan sumber protein hewani. Namun, sedikit penurunan pada tahun 2024 menunjukkan perlunya upaya menjaga kestabilan konsumsi pangan seimbang, terutama melalui edukasi gizi masyarakat dan penguatan ketahanan pangan lokal.

Kinerja produksi komoditas pertanian menunjukkan variasi yang cukup dinamis. Penurunan signifikan setelah 2020 mengindikasikan adanya kendala dalam pengelolaan cadangan pangan daerah, baik dari sisi alokasi anggaran, kapasitas gudang, maupun mekanisme distribusi. Meskipun terdapat peningkatan kembali pada 2024, capaian ini masih menunjukkan



perlunya strategi penguatan kelembagaan cadangan pangan, termasuk optimalisasi lumbung pangan masyarakat dan kerja sama dengan lembaga distribusi pangan. Penurunan tajam pada 2023 menunjukkan adanya permasalahan signifikan pada produktivitas pertanian akibat faktor cuaca ekstrem, serangan organisme pengganggu tanaman (OPT), maupun penurunan luas tanam. Namun, pemulihan pada 2024 mengindikasikan efektivitas program peningkatan produksi, karena adanya pendampingan para penyuluh pertanian melalui penggunaan benih unggul, penyediaan pupuk bersubsidi, dan penguatan kelompok tani.

Ketersediaan energi dan protein per kapita relatif membaik pasca-2022, meskipun masih terdapat fluktuasi. Peningkatan pada 2024 karena adanya perbaikan distribusi pangan bergizi dan ketersediaan bahan pangan lokal yang lebih baik. capaian indikator konsumsi pangan masyarakat juga memperlihatkan variasi yang cukup besar. Sedangkan untuk peningkatan konsumsi pangan masyarakat terdapat kenaikan cukup signifikan pada 2021-2022, hal ini menunjukkan keberhasilan program diversifikasi konsumsi pangan dan peningkatan akses pangan rumah tangga. Namun, demikian dampak pasca-pandemi dan dampak inflasi pangan terhadap daya beli masyarakat menjadi pemicu sehingga peningkatannya berjalan lambat.

4) **Pertanahan**

Urusan pemerintahan bidang pertanahan merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren yang sebagian kewenangannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Urusan ini memiliki peran strategis dalam mendukung kepastian hukum hak atas tanah, penataan ruang wilayah, serta mendorong penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan. Urusan pemerintahan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Kabupaten dikelola oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, adapun indikator kinerja adalah jumlah masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan dengan capaian kinerja tahun 2024 sebanyak 4 lokasi.

Tabel 2.56
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanahan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah masalah ganti kerugian dan santunan	Lokasi	0	1	4	4	4





No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
	tanah untuk pembangunan yang terselesaikan						

Sumber : LKIP Tahun 2020-2024

Urusan pemerintahan bidang pertanahan di Kabupaten Tasikmalaya memiliki peran strategis dalam mendukung kepastian hukum hak atas tanah, penataan ruang, serta pelaksanaan pembangunan daerah. Pemerintah daerah berwenang dalam perencanaan dan pengendalian pemanfaatan tanah, fasilitasi penyelesaian sengketa, serta pengelolaan tanah aset pemerintah daerah, sementara kewenangan strategis seperti penetapan hak dan pendaftaran tanah tetap menjadi domain pemerintah pusat melalui Kementerian ATR/BPN. Tantangan utama urusan ini antara lain terbatasnya kewenangan daerah, dan belum optimalnya sertifikasi aset daerah.

5) **Lingkungan Hidup**

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang meliputi perencanaan, pemanfaatan pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Tasikmalaya penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya misi ke-4, yaitu Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berkelanjutan.

Adapun capaian setiap indikator kinerja urusan Lingkungan Hidup sebagaimana di atas dapat digambarkan sebagai berikut:





Tabel 2.57
Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	64,58	67,72	68,43	63,73	65,51
2	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	6,75	8	9,05	9,84	10,28

Sumber : LKIP Tahun 2020-2024

Pada tahun 2024, pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) meningkat dari 63,73 poin pada tahun 2023 menjadi 65,51 poin pada tahun 2024, yang menandakan adanya perbaikan kondisi kualitas air, udara, dan tutupan lahan. Peningkatan ini mencerminkan efektivitas berbagai program pelestarian lingkungan yang dilakukan pemerintah daerah bersama masyarakat, seperti kegiatan penghijauan, konservasi lahan kritis, dan pengendalian pencemaran lingkungan.

Meskipun capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan tren peningkatan, namun pengelolaan lingkungan hidup masih menghadapi sejumlah permasalahan dan tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Permasalahan utama yang dihadapi meliputi:

- a. Terbatasnya cakupan layanan persampahan, di mana penanganan sampah baru mencakup sebagian wilayah (13 dari 39 kecamatan), sementara sebagian besar wilayah lainnya masih mengandalkan pengelolaan secara mandiri oleh masyarakat.
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, termasuk armada pengangkut, tempat penampungan sementara, serta fasilitas daur ulang yang belum memadai.
- c. Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan, sehingga masih ditemui praktik pembuangan sampah sembarangan dan minimnya pemilahan sampah dari sumber.
- d. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pada perangkat daerah yang menangani urusan





lingkungan hidup, baik dalam aspek pengawasan, penegakan hukum, maupun pengelolaan data dan informasi lingkungan.

- f. Kualitas lingkungan yang masih rentan terhadap degradasi, khususnya pada wilayah dengan aktivitas pertanian intensif, alih fungsi lahan, serta kawasan padat penduduk yang belum memiliki sistem pengelolaan limbah yang memadai.

Tantangan ke depan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah bagaimana memperkuat tata kelola lingkungan yang partisipatif dan berbasis data, meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah secara berkelanjutan, serta mengintegrasikan aspek pelestarian lingkungan ke dalam seluruh sektor pembangunan. Upaya ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian sumber daya alam, guna mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang bersih, hijau, dan berkelanjutan.

6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan Pembangunan sektor lain. Sebagai upaya untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dalam rangka memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang diambil oleh penduduk, maka sesuai amanat Pasal 7 (tujuh) ayat 1 (satu) pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan.

Gambaran capaian kinerja urusan kependudukan dan Catatan Sipil tercantum dalam tabel berikut:





Tabel 2.58
Capaian Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Rata -rata kepemilikan dokumen kependudukan	%	73,43	76,85	87,46	89,59	96,68
	a. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)	%	97,54	99,23	97,84	98,57	99,83
	b. Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak	%	38,41	47,59	53,80	60,48	86,40
	c.Cakupan Penerbitan Akta Kematian	%	71,3	82,07	100	100	100
	d.Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran Usia 0-18 Tahun	%	95,06	95,85	98,20	99,33	99,00
2.	Jumlah validasi data kependudukan oleh Perangkat Daerah pengguna hak akses	Data	N/A	N/A	11.930	26.473	34.459

Sumber: LKIP Tahun 2020-2024

Dalam mewujudkan kebijakan Pemerintah, sejak tahun 2016 fokus pelayanan administrasi dokumen kependudukan masyarakat dilakukan dengan strategi meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan penataan administrasi kependudukan dengan indikator capaian kinerja meliputi Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga berdasarkan Aplikasi SIAK, Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak, Cakupan Akta Kematian, Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran Usia 0-18 Tahun, Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran berdasarkan Aplikasi SIAK dan Pengolahan Perubahan Data yang terakumulasikan pada upaya terwujudnya tertib pengelolaan Administrasi kependudukan dan meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan.

Dalam rangka penyempurnaan database pembangunan kependudukan serta pencapaian target peningkatan cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA), maka pada tahun 2020 hingga 2022 telah dilakukan kerjasama pemanfaatan data dengan





lembaga/SKPD/desa, namun masih adanya keterbatasan alat perekaman KTP-elektronik dan alat Pencetakan KIA.

7) **Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kedisiplinan serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Gambaran capaian kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.59
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Posyandu aktif	%	98,11	100	100	100	100
2	Persentase penyelenggaraan penataan desa mandiri dan maju	%	19,66	24,78	46,43	64,95	82,9
3	Persentase peningkatan kerjasama desa	%	0,57	0,28	0	0	0

Sumber: LKIP Tahun 2020-2024

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, capaian kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Berdasarkan data dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), indikator persentase Posyandu aktif menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan capaian 98,11 persen pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 100 persen sejak tahun 2021 hingga 2024. Capaian tersebut menggambarkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan kegiatan Posyandu sebagai wadah partisipasi masyarakat di bidang kesehatan, khususnya dalam pelayanan ibu dan anak serta upaya pencegahan stunting. Konsistensi tingkat keaktifan





Posyandu juga mencerminkan pembinaan kelembagaan masyarakat yang efektif serta dukungan yang kuat dari pemerintah desa dan masyarakat.

Indikator penyelenggaraan penataan desa mandiri dan maju menunjukkan peningkatan yang signifikan dari 19,66 persen pada tahun 2020 menjadi 82,9 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini menggambarkan kemajuan yang pesat dalam pelaksanaan berbagai program pembinaan dan pendampingan desa, seperti peningkatan kapasitas aparatur, penguatan tata kelola pemerintahan desa, serta pemanfaatan dana desa secara produktif untuk mendukung kemandirian ekonomi dan peningkatan pelayanan publik. Capaian ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan nasional yang berorientasi pada percepatan transformasi desa tertinggal menjadi desa maju dan mandiri.

Berbeda halnya dengan indikator persentase peningkatan kerjasama desa yang menunjukkan tren menurun dan bahkan stagnan pada 0 persen sejak tahun 2022. Kondisi ini mengindikasikan belum berkembangnya inisiatif kolaboratif antar desa dalam bentuk kerja sama sosial, ekonomi, maupun pelayanan publik. Fenomena ini mencerminkan bahwa aspek kelembagaan dan fasilitasi pemerintah daerah dalam mendorong kerja sama antar desa masih perlu diperkuat agar potensi kolektif antarwilayah dapat dioptimalkan.

Meskipun secara umum capaian urusan pemberdayaan masyarakat dan desa menunjukkan hasil positif, masih terdapat sejumlah permasalahan yang perlu menjadi perhatian ke depan. Permasalahan utama yang dihadapi adalah masih rendahnya tingkat kerjasama antar desa yang disebabkan oleh keterbatasan pemahaman aparatur terhadap manfaat kerja sama desa, minimnya fasilitasi dari pemerintah daerah, serta belum adanya kelembagaan yang berfungsi optimal dalam mendorong sinergi antar desa. Selain itu, kapasitas sumber daya manusia aparatur desa masih bervariasi, terutama dalam aspek perencanaan pembangunan, administrasi keuangan, dan pengelolaan program desa, yang berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.

Permasalahan lain yang dihadapi adalah tingginya ketergantungan desa terhadap dana transfer seperti Dana Desa dan





Alokasi Dana Desa (ADD), sehingga kemandirian ekonomi desa belum sepenuhnya terwujud. Pengelolaan potensi ekonomi lokal melalui BUMDes dan kegiatan produktif masyarakat masih terbatas, baik dari sisi inovasi, akses pasar, maupun dukungan pendampingan usaha. Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa juga belum merata. Meskipun lembaga kemasyarakatan seperti Posyandu dan PKK aktif, namun kesadaran masyarakat terhadap peran kolektif dalam pembangunan masih perlu ditingkatkan agar pembangunan desa lebih inklusif.

Selain itu, inovasi dalam pemberdayaan masyarakat masih tergolong rendah. Program yang dijalankan cenderung bersifat top-down dan belum sepenuhnya berbasis pada kebutuhan lokal serta potensi unggulan desa. Minimnya kolaborasi dengan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan sektor swasta turut menjadi faktor yang membatasi ruang inovasi.

8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Perkembangan demografi memiliki peran yang penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Penduduk dapat menjadi modal dasar pembangunan, namun juga berpotensi menjadi permasalahan apabila tidak dikelola dengan baik. Besaran, komposisi dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

Kabupaten Tasikmalaya, dengan luas wilayah 270.682 hektar, memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak yaitu 1.920.921 jiwa berdasarkan data BPS Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024. Laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2024 tercatat sebesar 0,79%. Pertumbuhan tersebut mencerminkan kondisi kesehatan masyarakat yang membaik, sebagaimana ditunjukkan oleh meningkatnya Indeks Kesehatan pada tahun 2024 menjadi 83,17 poin.

Namun demikian, peningkatan jumlah penduduk juga harus menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah, terutama dalam aspek pengendalian penduduk. Jika laju pertumbuhan penduduk terus meningkat tanpa diimbangi dengan pengendalian yang efektif, hal ini dapat berdampak pada tekanan terhadap kebutuhan pelayanan dasar dan kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan.



Oleh karena itu, diperlukan perencanaan program dan kegiatan yang tepat sasaran dari urusan terkait untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan kapasitas pembangunan daerah.

Gambaran capaian Indikator kinerja urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.60
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Prosentase Pemakaian Kontrasepsi (CPR)	%	67	64,1	68,48	68,1	70,05
2	Prosentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmetneed</i>) (%)	%	12,64	13,4	19,51	9,92	7,2
3	Angka Kelahiran Total (TFR)	%	2,41	1,54	2,25	2,15	2,11
4	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	Tahun	21	19	19	19	20,5
5	Prosentase pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)	%	0	0	0	0	50
6	Jumlah Lembaga dan Pendidikan Institusi yang di bina	Lembaga	0	-	-	-	-
7	Prosentase Ketersediaan Data	%	100	100	100	100	100
8	Jumlah Gedung Balai Penyuluhan KB	Gedung	9	11	11	11	16
9	Prosentase Pemenuhan BKB Kit/Stunting	%	23	-	-	-	-
10	Rasio Akseptor KB	%	70,82	71,9	79,07	72,44	69,63

Sumber: LKIP Tahun 2020-2024

Pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Tasikmalaya selama periode tahun 2020-2024 menunjukkan capaian yang relatif baik dengan beberapa indikator mengalami kemajuan signifikan. Persentase pemakaian





kontrasepsi (CPR) meningkat dari 67 persen pada tahun 2020 menjadi 70,05 persen pada tahun 2024, hal ini menandakan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengendalian kelahiran. Sejalan dengan itu, kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) menurun cukup signifikan dari 19,51 persen pada tahun 2022 menjadi 7,2 persen pada tahun 2024, menunjukkan meningkatnya akses dan kualitas layanan KB bagi pasangan usia subur. Angka kelahiran total (TFR) juga mengalami perbaikan dari 2,41 menjadi 2,11, mengarah pada kondisi ideal bagi keseimbangan pertumbuhan penduduk. Selain itu, median usia kawin pertama perempuan meningkat dari 19 tahun menjadi 20,5 tahun, mencerminkan adanya perubahan positif dalam perilaku masyarakat terhadap usia ideal pernikahan.

Dari sisi kelembagaan, ketersediaan data kependudukan terjaga dengan capaian 100 persen selama lima tahun terakhir, dan sarana pelayanan KB juga meningkat dengan bertambahnya jumlah balai penyuluhan dari 9 gedung pada tahun 2020 menjadi 16 gedung pada tahun 2024. Namun demikian, beberapa indikator masih menunjukkan keterbatasan, antara lain pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang baru mulai terealisasi 50 persen pada tahun 2024 setelah sebelumnya stagnan, serta belum tersedianya data lembaga dan institusi pendidikan yang dibina. Rasio akseptor KB juga mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun pada dua tahun terakhir, mengindikasikan adanya permasalahan dalam keberlanjutan pemakaian kontrasepsi.

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan ini antara lain masih terbatasnya jangkauan dan pemerataan pelayanan KB terutama di wilayah perdesaan, keterbatasan jumlah tenaga penyuluh lapangan, serta rendahnya kontinuitas akseptor dalam penggunaan kontrasepsi jangka panjang. Selain itu, koordinasi lintas sektor dalam implementasi GDPK belum optimal, sehingga integrasi kebijakan kependudukan dengan perencanaan pembangunan daerah masih lemah. Usia kawin pertama yang relatif rendah juga menjadi tantangan karena berdampak pada peningkatan risiko stunting dan kemiskinan. Di sisi lain, rendahnya pembinaan kelembagaan pendidikan kependudukan menunjukkan bahwa sinergi



antara pemerintah daerah, dunia pendidikan, dan masyarakat dalam memperkuat ketahanan keluarga masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu penguatan pada aspek pelayanan, kelembagaan, dan koordinasi kebijakan sangat diperlukan. Arah kebijakan ke depan perlu difokuskan pada peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan KB, optimalisasi pelaksanaan GDK, peningkatan edukasi usia kawin ideal, serta penguatan kemitraan dengan lembaga pendidikan dan masyarakat guna mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga yang berkualitas.

9) **Perhubungan**

Pelayanan urusan perhubungan berkaitan erat dengan kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan dan kelancaran sarana transportasi dan prasarana pelengkap. Urusan Perhubungan menyelenggarakan pengelolaan angkutan, teknik sarana perhubungan dan lalu lintas merujuk pada penetapan indikator kinerja capaian sasaran terciptanya ketertiban dan keselamatan pengguna jalan, terciptanya peningkatan kinerja pelayanan transportasi dan tersedianya sarana dan prasarana perhubungan yang memadai dan berkualitas.

Capaian indikator kinerja urusan perhubungan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.61
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase tingkat keselamatan jalan	%	N/A	72,75	74,45	80,81	82,19
2.	Persentase penggunaan moda transportasi umum di perkotaan	%	N/A	25,3	27,62	30,25	33,14

Sumber: LKIP Tahun 2020-2024
N/A artinya indikator baru digunakan pada tahun 2021

Capaian kinerja urusan perhubungan di Kabupaten Tasikmalaya selama periode 2021-2024 menunjukkan perkembangan yang positif, terutama pada peningkatan keselamatan jalan dan peningkatan penggunaan moda transportasi umum. Pada indikator persentase





tingkat keselamatan jalan, capaian meningkat dari 72,75 persen pada tahun 2021 menjadi 82,19 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya pengurangan angka kecelakaan lalu lintas melalui perbaikan infrastruktur jalan, peningkatan rambu dan marka jalan, serta kegiatan edukasi keselamatan bagi masyarakat. Hal ini juga mencerminkan efektivitas koordinasi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman dan tertib.

Sementara itu, indikator persentase penggunaan moda transportasi umum di perkotaan mengalami peningkatan dari 25,3 persen pada tahun 2021 menjadi 33,14 persen pada tahun 2024. Kenaikan ini menggambarkan adanya pergeseran perilaku masyarakat dari penggunaan kendaraan pribadi menuju moda transportasi umum, meskipun peningkatannya masih relatif lambat. Faktor pendorongnya antara lain peningkatan layanan angkutan umum perkotaan, penataan rute transportasi, serta kesadaran masyarakat terhadap efisiensi biaya dan dampak lingkungan dari penggunaan kendaraan pribadi. Namun, capaian ini juga menunjukkan bahwa proporsi pengguna transportasi umum masih rendah dibandingkan dengan potensi kebutuhan mobilitas di kawasan perkotaan.

Meskipun capaian kedua indikator menunjukkan tren positif, pelaksanaan urusan perhubungan di Kabupaten Tasikmalaya masih menghadapi beberapa permasalahan: Pertama, tingkat keselamatan jalan yang baru mencapai 82,19 persen menandakan masih adanya risiko kecelakaan lalu lintas, terutama di wilayah dengan kondisi jalan sempit, minim penerangan, dan belum dilengkapi fasilitas keselamatan yang memadai seperti trotoar, marka jalan, serta rambu peringatan di daerah rawan kecelakaan. Selain itu, perilaku berkendara masyarakat yang belum sepenuhnya tertib juga menjadi faktor penyumbang terjadinya kecelakaan. Kedua, penggunaan moda transportasi umum masih tergolong rendah karena keterbatasan jumlah armada, jangkauan trayek yang belum merata, serta kurangnya kenyamanan dan ketepatan waktu layanan angkutan umum. Di sisi lain, meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi turut memperparah kondisi lalu lintas di wilayah perkotaan dan menurunkan minat masyarakat terhadap transportasi publik. Ketiga,



integrasi antar moda transportasi dan koordinasi antar instansi terkait transportasi masih belum optimal. Belum tersedianya sistem transportasi terpadu antara angkutan kota, angkutan pedesaan, dan transportasi berbasis digital menjadi kendala dalam menciptakan layanan transportasi yang efisien. Keempat, keterbatasan anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi juga berpengaruh terhadap lambatnya peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan pelayanan publik di sektor transportasi.

10) **Komunikasi dan Informatika**

Upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis *e-government* di Kabupaten Tasikmalaya merupakan tujuan penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika. Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan beberapa indikator sebagai ukuran keberhasilan yang kepada sasaran Kabupaten Tasikmalaya.

Capaian indikator kinerja utama Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

Tabel 2.62
Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Poin	2	1,4	1,6	1,8	3,1
2	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	%	35,23	58,34	44,35	65	67,84
3	Indeks KAMI	Level	II	II	II	II	II

Sumber: LKIP Tahun 2020-2024

Capaian kinerja urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya selama periode 2020–2024 menunjukkan perkembangan yang beragam pada setiap indikator. Pada Indeks Domain Tata Kelola SPBE, kinerja sempat mengalami penurunan dari 2,0 poin pada tahun 2020 menjadi 1,4 poin pada tahun 2021, hal ini karena belum optimalnya implementasi tata kelola pemerintahan berbasis elektronik di awal periode. Namun, sejak tahun 2022 capaian mulai meningkat secara bertahap hingga mencapai 3,1 poin pada tahun 2024. Peningkatan ini karena pemerintah daerah melalui Dinas terkait melakukan evaluasi dan telah memperbaiki arsitektur SPBE,





memperkuat integrasi aplikasi, serta meningkatkan kompetensi SDM di bidang TIK. Meski demikian, kendala yang masih dihadapi antara lain rendahnya koordinasi antarperangkat daerah, keterbatasan tenaga ahli digital, serta belum konsistennya penerapan standar dan pedoman SPBE di seluruh satuan kerja.

Pada indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik, kinerja menunjukkan tren yang cukup fluktuatif. Setelah mengalami peningkatan signifikan dari 35,23% pada tahun 2020 menjadi 58,34% pada tahun 2021, capaian sempat menurun ke 44,35% pada tahun 2022, kemudian meningkat kembali hingga mencapai 67,84% pada tahun 2024. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam pengelolaan informasi publik, pelaksanaannya belum konsisten di seluruh perangkat daerah. Peningkatan pada dua tahun terakhir mencerminkan penguatan fungsi PPID, pemanfaatan media digital, serta peningkatan transparansi layanan publik. Adapun permasalahan utama yang masih dihadapi mencakup kurangnya pengawasan terhadap kinerja PPID pembantu, belum meratanya akses dan kualitas informasi publik, serta masih rendahnya literasi digital masyarakat yang menyebabkan informasi belum terserap optimal.

Sementara itu, Indeks KAMI (Keamanan Informasi) stagnan pada Level II selama lima tahun berturut-turut, menunjukkan bahwa sistem keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya masih berada pada tahap pengelolaan dasar. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya perlindungan terhadap data dan sistem elektronik belum berjalan maksimal. Permasalahan yang mendasari kondisi tersebut meliputi belum tersedianya kebijakan dan infrastruktur keamanan informasi yang terstandarisasi, belum optimalnya pembentukan dan fungsi tim keamanan siber daerah (CSIRT), serta terbatasnya pelatihan keamanan informasi bagi ASN. Secara umum, meskipun terdapat kemajuan dalam aspek tata kelola dan keterbukaan informasi, Kabupaten Tasikmalaya masih perlu memperkuat fondasi keamanan informasi dan konsistensi implementasi digitalisasi pemerintahan agar transformasi digital daerah dapat berjalan lebih aman, efektif, dan berkelanjutan.



11) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Selama periode 2020–2024, capaian indikator kinerja pada sektor ini menunjukkan dinamika yang cukup signifikan, baik dari sisi perkembangan jumlah pelaku usaha maupun peningkatan kualitas kelembagaan koperasi. Berikut adalah capaian indikator kinerja urusan koperasi, usaha kecil dan menengah selama tahun 2020-2024.

Tabel 2.63
Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Volume Usaha Koperasi	Rp	485.81 3.822.0 00	490.67 1.960.2 20	356.112. 848.643	362.350. 540.276	347.540. 991.587
2	Persentase Usaha Mikro	%	99.71	99,73	99,75	144,42	99,79
3	Jumlah Usaha Mikro	Unit	84.968	91.765	95.970	154.592	129.032
4	Jumlah koperasi yang berkualitas	Koperasi	N/A	-	0	4	21

Sumber: LKIP Tahun 2020-2024

Pada indikator Volume Usaha Koperasi, terjadi penurunan yang cukup nyata dari Rp485,81 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp347,54 miliar pada tahun 2024. Meskipun sempat meningkat sedikit pada tahun 2021, tren keseluruhan menunjukkan penurunan lebih dari 28% dalam lima tahun terakhir. Kondisi ini mengindikasikan melemahnya aktivitas ekonomi koperasi yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain menurunnya partisipasi anggota, keterbatasan akses permodalan, serta dampak pandemi COVID-19 yang menekan kinerja koperasi di sektor konsumsi dan produksi. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun koperasi berperan penting dalam perekonomian masyarakat, daya tahannya terhadap perubahan ekonomi masih perlu diperkuat melalui peningkatan manajemen dan diversifikasi usaha.





Sementara itu, Persentase Usaha Mikro menunjukkan angka yang relatif stabil di kisaran 99,7%, menandakan bahwa struktur ekonomi Kabupaten Tasikmalaya masih didominasi oleh pelaku usaha mikro. Dari sisi Jumlah Usaha Mikro, terjadi peningkatan yang cukup pesat dari 84.968 unit pada tahun 2020 menjadi 154.592 unit pada tahun 2023, sebelum turun menjadi 129.032 unit pada tahun 2024. Kenaikan tajam tersebut menunjukkan pertumbuhan wirausaha baru, terutama pasca-pandemi, seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk menciptakan sumber pendapatan mandiri. Namun penurunan di tahun 2024 menggambarkan masih rendahnya daya tahan usaha mikro terhadap persaingan dan tantangan pasar, terutama karena keterbatasan akses modal, teknologi, dan jaringan pemasaran.

Pada sisi lain, Jumlah Koperasi yang Berkualitas menunjukkan tren positif dengan peningkatan dari tidak ada koperasi berkualitas pada tahun 2022 menjadi empat koperasi pada tahun 2023 dan meningkat signifikan menjadi 21 koperasi pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam pembinaan dan penilaian kelembagaan koperasi, terutama melalui upaya revitalisasi koperasi tidak aktif, pendampingan manajerial, serta penerapan prinsip tata kelola yang lebih baik. Meski demikian, jumlah tersebut masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan total koperasi yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, sehingga diperlukan upaya lanjutan dalam mendorong koperasi menuju kemandirian dan profesionalisme.

12) Penanaman Modal

Penanaman modal merupakan kegiatan penempatan dana oleh penanam modal dalam negeri maupun asing untuk mengembangkan usaha di berbagai sektor sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Di Kabupaten Tasikmalaya, investasi memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis pada potensi lokal seperti industri pengolahan, pertanian, perdagangan, serta pariwisata. Melalui peningkatan investasi, berbagai sektor usaha dapat berkembang sehingga membuka lapangan kerja baru, memperluas





aktivitas ekonomi masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah. Pasca pandemi, investasi juga menjadi pendorong utama pemulihan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya dengan berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas, penyerapan tenaga kerja, penguatan sektor UMKM, serta memberikan efek berganda (multiplier effect) terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.

Capaian indikator kinerja bidang Penanaman Modal tahun 2020-2024, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.64
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Investor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)/Penanaman Modal Asing (PMA)	Investor	424	66	88	291	1.537
2	Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)/ Penanaman Modal Asing (PMA)	Rp	750.600. 276.197	8.599. 700.000	211.553. 020.823	446.296. 142.757	228.279. 000.000
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perijinan di Kabupaten Tasikmalaya	Skor	85,63	86,04	88,52	86,91	89,02

Sumber: LKIP Tahun 2020-2024

Berdasarkan data capaian indikator kinerja urusan Penanaman Modal Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020–2024, dapat diketahui bahwa kinerja investasi daerah menunjukkan dinamika yang cukup signifikan baik dari sisi jumlah investor, nilai realisasi investasi, maupun tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan. Secara umum, capaian tersebut mencerminkan adanya peningkatan minat investasi di Kabupaten Tasikmalaya, meskipun di beberapa tahun masih terlihat fluktuasi yang menunjukkan adanya tantangan dalam menciptakan iklim investasi yang stabil dan berkelanjutan.





Terjadi peningkatan pada jumlah investor dari 424 investor pada tahun 2020 menjadi 1.537 investor pada tahun 2024. Meskipun sempat mengalami penurunan tajam pada tahun 2021 (66 investor) dan masih relatif rendah pada tahun 2022 (88 investor). Kondisi ini menunjukkan bahwa minat pelaku usaha terhadap investasi di Kabupaten Tasikmalaya semakin membaik seiring dengan pulihnya perekonomian pasca pandemi serta meningkatnya kemudahan dalam proses perizinan. Lonjakan jumlah investor pada tahun 2024 juga dapat diartikan sebagai hasil dari perbaikan regulasi, promosi investasi, serta dukungan kebijakan pemerintah daerah yang mendorong tumbuhnya sektor-sektor potensial seperti perdagangan, industri kecil menengah, dan pariwisata.

Sementara itu, realisasi investasi PMDN/PMA menunjukkan pola yang berfluktuasi. Fluktuasi yang cukup besar ini menunjukkan bahwa meskipun minat investor meningkat, realisasi investasi belum stabil. Hal ini dapat disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti keterbatasan kesiapan infrastruktur pendukung investasi, proses perizinan teknis di tingkat pusat maupun daerah, serta faktor eksternal seperti kondisi ekonomi nasional dan global yang memengaruhi keputusan investasi.

Pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan, capaian menunjukkan tren positif dan relatif stabil di kisaran skor tinggi. Nilai IKM meningkat dari 85,63 pada tahun 2020 menjadi 89,02 pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa pelayanan perizinan di Kabupaten Tasikmalaya sudah berjalan baik dan semakin memuaskan masyarakat serta pelaku usaha. Peningkatan ini dapat dikaitkan dengan implementasi sistem pelayanan berbasis digital, penyederhanaan prosedur perizinan, dan peningkatan kapasitas aparatur pelayanan publik.

Namun demikian, beberapa permasalahan dan kendala masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan penanaman modal di Kabupaten Tasikmalaya. Pertama, fluktuasi realisasi investasi menunjukkan masih lemahnya kesinambungan proyek investasi dan belum optimalnya koordinasi antar instansi dalam memfasilitasi investor. Kedua, kesiapan infrastruktur dan ketersediaan lahan investasi di beberapa wilayah belum sepenuhnya mendukung kebutuhan investor.



Ketiga, keterbatasan data dan promosi investasi yang terintegrasi menyebabkan potensi daerah belum sepenuhnya dikenal oleh investor potensial. Keempat, perizinan teknis lintas sektor masih memerlukan penyederhanaan dan sinkronisasi dengan sistem perizinan nasional. Meskipun demikian, peningkatan IKM menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas layanan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dengan memperkuat promosi investasi, meningkatkan infrastruktur penunjang, dan menjaga konsistensi pelayanan perizinan, Kabupaten Tasikmalaya memiliki peluang besar untuk menarik lebih banyak investasi yang berkualitas dan berkelanjutan di masa mendatang.

13) **Kepemudaan dan Olahraga**

Pembangunan bidang Kepemudaan dan Olahraga bertujuan untuk meningkatkan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan baik melalui organisasi kepemudaan maupun prestasi lainnya yang diharapkan lebih meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Perkembangan capaian indikator kinerja urusan Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dapat dilihat pada tabel di berikut:

Tabel 2.65
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	39,14	41,36	42,51	42,39	44,95
2	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan	%	51,78	51,56	55,63	55,64	53,50
3	Tingkat Prestasi Olahraga	Medali	3	43	156	130	52
4	Tingkat Partisipasi Masyarakat Berolahraga	%	0	43,44	43,49	43,49	38,0
5	Persentase wirausaha muda	%	-	0	21,51	20,56	21,04
6	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	%	22,22	27,03	24,06	24,06	24,05
7	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	%	21	19,91	24,59	23,78	21,2





No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
8	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	10,52	49,35	56,34	59,70	56,34
9	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	%	16	23,60	23,60	47,29	37,03
10	Cakupan Pelatih yang Bersertifikat	%	13,33	18,07	18,07	22,54	23,04

Sumber: LKIP Tahun 2020-2024

Capaian kinerja urusan kepemudaan dan olahraga Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020–2024 menunjukkan perkembangan yang cukup dinamis dengan beberapa indikator yang mengalami peningkatan, namun sebagian lainnya masih berfluktuasi. Pada aspek kepemudaan, tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri terus mengalami peningkatan dari 39,14% pada tahun 2020 menjadi 44,95% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan dalam mendorong kemandirian ekonomi pemuda melalui berbagai program pelatihan kewirausahaan, ekonomi kreatif, serta dukungan pengembangan UMKM muda. Meskipun demikian, capaian ini masih tergolong sedang jika dibandingkan dengan potensi jumlah pemuda di Kabupaten Tasikmalaya, sehingga upaya pemberdayaan dan pendampingan berkelanjutan masih perlu diperkuat.

Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan juga relatif stabil, berada di kisaran 51–55%, dengan capaian tertinggi pada tahun 2023 sebesar 55,64%. Kondisi ini menunjukkan bahwa semangat berorganisasi di kalangan pemuda masih cukup baik, namun mulai menghadapi tantangan akibat perubahan pola partisipasi generasi muda yang kini lebih banyak berorientasi pada komunitas berbasis digital dan kegiatan nonformal. Di sisi lain, tingkat prestasi olahraga mengalami fluktuasi yang cukup tajam. Dari hanya 3 medali pada tahun 2020, capaian meningkat pesat menjadi 156 medali pada tahun 2022, namun kemudian menurun menjadi 52 medali pada tahun 2024. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembinaan atlet belum sepenuhnya berkelanjutan, kemungkinan disebabkan oleh keterbatasan kompetisi, sarana latihan yang belum merata, serta kurang optimalnya pembinaan pasca-event olahraga.





Partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga menurun pada tahun 2024. Sementara itu, persentase wirausaha muda mulai menunjukkan kemajuan sejak tahun 2022, dengan capaian sekitar 20–21%, hal ini berarti potensi kewirausahaan mulai tumbuh di kalangan pemuda meskipun masih memerlukan dukungan modal, pelatihan, dan jejaring pemasaran. Persentase organisasi pemuda yang aktif masih tergolong rendah dan fluktuatif di kisaran 22–27%, menunjukkan bahwa sebagian organisasi belum aktif karena keterbatasan dana, lemahnya kaderisasi, dan minimnya kolaborasi dengan pemerintah daerah.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam kepramukaan juga mengalami fluktuasi cenderung menurun. Hal ini mengindikasikan perlunya inovasi kegiatan kepramukaan agar lebih relevan dengan minat generasi muda. Dari sisi olahraga, cakupan pembinaan olahraga dan pembinaan atlet muda menunjukkan tren positif. Cakupan pembinaan olahraga meningkat signifikan dari 10,52% pada tahun 2020 menjadi 56,34% pada tahun 2024, menandakan adanya perhatian pemerintah terhadap pengembangan berbagai cabang olahraga. Begitu pula cakupan pembinaan atlet muda yang naik dari 16% menjadi 47,29% pada tahun 2023, meskipun sedikit menurun pada 2024 menjadi 37,03%. Selain itu, cakupan pelatih bersertifikat meningkat konsisten dari 13,33% pada tahun 2020 menjadi 23,04% pada tahun 2024, menunjukkan peningkatan kompetensi tenaga kepelatihan meski masih perlu diperluas agar sesuai dengan kebutuhan pembinaan atlet.

Berdasarkan capaian tersebut berarti masih terdapat sejumlah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Tasikmalaya. Rendahnya partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi dan kewirausahaan disebabkan oleh keterbatasan akses modal serta kurangnya program pendampingan yang berkelanjutan. Fluktuasi prestasi olahraga menunjukkan bahwa pembinaan atlet belum berjalan secara konsisten, ditambah dengan keterbatasan sarana dan prasarana olahraga di daerah. Selain itu, rendahnya keaktifan organisasi kepemudaan dan kepramukaan disebabkan oleh lemahnya kaderisasi dan minimnya dukungan anggaran. Partisipasi masyarakat dalam olahraga pun belum stabil



karena terbatasnya fasilitas publik dan masih rendahnya kesadaran akan pentingnya aktivitas fisik.

14) Statistik

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang statistik bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan data statistik daerah, khususnya data statistik sektoral yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Data berperan penting dalam setiap tahapan pembangunan, terutama pada penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya terus berupaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan data statistik daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah.

Tabel 2.66
Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase ketersediaan data statistik sektoral untuk tiap bidang urusan pemerintahan	%	71	71	83,33	90	100

Sumber: LKIP Tahun 2020-2024

Capaian kinerja urusan statistik Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020–2024 menunjukkan perkembangan yang sangat positif dan konsisten meningkat dari tahun ke tahun. Persentase ketersediaan data statistik sektoral untuk tiap bidang urusan pemerintahan meningkat signifikan dari 71% pada tahun 2020 hingga akhirnya mencapai 100% pada tahun 2024. Peningkatan yang berkesinambungan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya telah berhasil memperkuat sistem pengelolaan data sektoral yang terintegrasi antarperangkat daerah. Capaian 100% di tahun 2024 menandakan bahwa seluruh bidang urusan pemerintahan daerah telah memiliki data sektoral yang tersedia dan terkelola dengan baik, sehingga mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan secara lebih akurat dan berbasis bukti (*evidence-based policy*).





Keberhasilan ini juga mencerminkan meningkatnya koordinasi antara Badan Pusat Statistik (BPS) dengan perangkat daerah, optimalisasi pemanfaatan aplikasi satu data daerah, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan data statistik. Namun demikian, ke depan perlu dijaga keberlanjutan kualitas dan akurasi data agar ketersediaan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga benar-benar relevan, mutakhir, dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pengambilan kebijakan pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya.

15) Persandian

Persandian bertujuan untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah. Hal ini merupakan hal yang amat penting di era serba teknologi informasi saat ini. Modernisasi pemerintahan akan sangat bergantung dan didukung oleh penggunaan teknologi informasi di segala aspek mulai dari administrasi perkantoran (*e-office*), perencanaan (*e-planning*), keuangan (*e-budgetting*), dan fungsi pemerintahan lainnya. Pemberdayaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menghadapi beberapa risiko diantaranya penyadapan, hacking dan berbagai ancaman lainnya. Hadirnya ancaman dalam pengelolaan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi (*e-government*) tersebut membuat pengelolaan persandian oleh pemerintah daerah menjadi penting.

Tabel 2.67
Capaian Indikator Kinerja Urusan Persandian
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan tingkat keamanan informasi	%	30	30	30	-	-

Sumber: LKIP Tahun 2020-2024

16) Kebudayaan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kebudayaan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Kekayaan budaya yang dimiliki Kabupaten Tasikmalaya yang harus terus digali





dan dilestarikan. Untuk itu, pengarusutamaan kebudayaan dalam berbagai aspek pembangunan dinilai penting dan strategis dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Persentase seni dan budaya yang dilestarikan menjadi salah satu indikator yang menunjukkan kemajuan kebudayaan.

Berikut capaian kinerja urusan kebudayaan dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 2.68
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah warisan budaya tak benda yang ditetapkan	Buah	1	1	1	2	3
2	Jumlah warisan budaya benda yang ditetapkan	Buah	2	1	1	0	1
3	Jumlah even kesenian tradisional yang diselenggarakan	Kegiatan	5	5	5	6	10
4	Jumlah ritual adat istiadat yang dikelola	Kegiatan	3	3	5	5	4
5	Jumlah situs/cagar budaya	Cagar Budaya	42	42	43	44	47
6	Persentase pelestarian warisan budaya	Persen	18,18	20,31	23,86	35,82	41,42

Sumber: LKIP Tahun 2020-2024

Capaian kinerja urusan kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya selama periode 2020–2024 secara umum menunjukkan tren peningkatan positif, meskipun masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperhatikan. Jumlah warisan budaya tak benda dari mulai tahun 2020 dari 1 (satu) warisan budaya menjadi 3 (tiga) hingga tahun 2024. Hal ini mencerminkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam melestarikan dan mendokumentasikan kekayaan budaya lokal. Namun, proses penetapan tersebut masih menghadapi kendala berupa lamanya prosedur verifikasi dari instansi berwenang, keterbatasan data pendukung, serta kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang kebudayaan.





Sementara itu, jumlah warisan budaya Benda dari target yang harus ditetapkan mulai tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan fluktuasi, pada tahun 2020 tercatat 2 (dua) menurun menjadi 1 pada 2021–2022, tidak ada penetapan pada 2023, dan kembali meningkat menjadi 1 pada 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pelestarian benda budaya belum berjalan secara konsisten, antara lain akibat keterbatasan anggaran penelitian, kompleksitas proses penetapan, dan belum optimalnya dokumentasi terhadap benda-benda bersejarah di daerah. Di sisi lain, penyelenggaraan even kesenian tradisional mengalami perkembangan cukup signifikan. Jumlah kegiatan meningkat dari 5 kegiatan pada 2020–2022 menjadi 6 pada 2023 dan melonjak menjadi 10 pada 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya kebangkitan aktivitas seni tradisional pasca-pandemi, meskipun masih terkendala oleh keterbatasan dana, fasilitas, dan partisipasi generasi muda.

Jumlah ritual adat istiadat yang dikelola relatif stabil, dengan peningkatan dari 3 kegiatan pada 2020–2021 menjadi 5 kegiatan pada 2022–2023, dan sedikit menurun menjadi 4 kegiatan pada 2024. Meskipun demikian, pelestarian adat masih menghadapi tantangan berupa menurunnya minat masyarakat terhadap tradisi, kurangnya dukungan kelembagaan, serta pengaruh modernisasi terhadap nilai-nilai lokal. Adapun jumlah situs atau cagar budaya mengalami peningkatan konsisten dari 42 situs pada tahun 2020 menjadi 47 situs pada tahun 2024. Hal ini menandakan adanya kemajuan dalam inventarisasi dan penetapan situs budaya, meskipun masih dihadapkan pada permasalahan perlindungan hukum, kerusakan fisik situs, dan keterbatasan tenaga konservator di daerah.

Capaian ini menggambarkan upaya nyata pemerintah daerah dalam memperkuat kebijakan dan pelaksanaan program pelestarian budaya. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan sinergi antar-perangkat daerah, optimalisasi pemanfaatan teknologi digital untuk dokumentasi dan promosi budaya, serta penambahan alokasi anggaran agar pelestarian warisan budaya dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.



17) Perpustakaan

Dalam penyelenggaraan urusan perpustakaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses informasi dan pengetahuan melalui pelayanan perpustakaan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Gambaran capaian indikator kinerja pada urusan perpustakaan di Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.69
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	64,17	56,15	65,15	55,9	72,15
2	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Poin	23,5	-	40,311	52,48	78
3	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Skor	0,372	0,392	0,275	0,2568	0,05
4	Presentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	%	0,235	-	0,117	1	1
5	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Skor	0,00085	0,00085	0,00041	0,0629	1
6	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	TMB	79	21	16	81	97
7	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialihmedia (digitalisasi) / terdaftar yang ada di wilayahnya	Paket	0	0	4	4	0
8	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	Koleksi	0	0	50	50	50

Sumber: LKIP Tahun 2020-2024





Capaian indikator kinerja urusan perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya selama periode 2020–2024 menunjukkan perkembangan yang bervariasi antara satu indikator dengan lainnya. Secara umum, terlihat adanya peningkatan pada beberapa aspek penting seperti tingkat kegemaran membaca masyarakat dan indeks pembangunan literasi, meskipun masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan terkait ketersediaan sarana, prasarana, serta keterjangkauan layanan perpustakaan di seluruh wilayah. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun, dengan capaian tertinggi sebesar 72,15 pada tahun 2024 setelah sempat menurun pada tahun 2021 dan 2023. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan minat baca masyarakat yang mulai membaik, didorong oleh berbagai kegiatan promosi literasi dan pemasyarakatan budaya gemar membaca di tingkat sekolah maupun komunitas.

Sejalan dengan itu, indeks pembangunan literasi masyarakat juga meningkat signifikan dari 23,5 pada tahun 2020 menjadi 78 pada tahun 2024. Peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa upaya pemerintah daerah dalam memperluas akses layanan literasi, termasuk melalui pengembangan pojok baca dan kegiatan literasi berbasis masyarakat, telah memberikan hasil yang positif.

Namun demikian, indikator rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan jumlah penduduk justru menunjukkan tren penurunan dari 0,372 pada tahun 2020 menjadi hanya 0,05 pada tahun 2024. Hal ini menandakan masih rendahnya jumlah koleksi buku dan bahan pustaka yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran untuk pengadaan koleksi baru serta belum optimalnya sistem distribusi koleksi ke perpustakaan desa atau sekolah. Sementara itu, persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat menunjukkan peningkatan signifikan dari 0,235 persen pada tahun 2020 menjadi 1 persen pada tahun 2024, yang menggambarkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas perpustakaan, meskipun angka tersebut masih sangat kecil dibanding potensi pengguna yang ada.

Indikator rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk juga menunjukkan peningkatan cukup besar pada tahun



2024 dengan skor 1 setelah beberapa tahun sebelumnya sangat rendah. Hal ini mencerminkan adanya upaya penambahan dan peningkatan kapasitas tenaga pengelola perpustakaan, baik melalui rekrutmen baru maupun pelatihan kompetensi pustakawan. Adapun jumlah kegiatan pemasyarakatan gemar membaca mengalami fluktuasi, namun meningkat signifikan dari 16 kegiatan pada tahun 2022 menjadi 97 kegiatan pada tahun 2024, menunjukkan adanya intensifikasi kegiatan literasi di berbagai lapisan masyarakat.

Indikator digitalisasi naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara menunjukkan hasil yang relatif terbatas. Jumlah naskah kuno yang dialihmedia hanya mencapai empat paket pada tahun 2022 dan 2023, sementara koleksi budaya etnis nusantara mencapai 50 item dan belum bertambah dalam dua tahun terakhir. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pelestarian dan digitalisasi warisan budaya lokal belum menjadi prioritas utama, padahal potensinya cukup besar untuk memperkuat identitas dan pengetahuan lokal masyarakat Tasikmalaya.

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pengembangan urusan perpustakaan antara lain: (1) keterbatasan anggaran untuk pengadaan koleksi dan peningkatan fasilitas layanan; (2) belum meratanya distribusi dan akses layanan perpustakaan terutama di wilayah perdesaan; (3) rendahnya minat baca masyarakat akibat kurangnya kebiasaan literasi di lingkungan keluarga dan sekolah; (4) minimnya tenaga pustakawan profesional yang memiliki kompetensi pengelolaan modern; serta (5) belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan perpustakaan dan digitalisasi naskah daerah.

18) Kearsipan

Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya terus berupaya menjamin tersedianya arsip yang autentik dan terpercaya dari setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah. Penyelenggaraan urusan kearsipan dilakukan berdasarkan kaidah, prinsip, dan standar kearsipan yang berlaku, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan. Arsip-arsip tersebut diharapkan dapat menjadi alat bukti yang sah dan memiliki nilai guna.





Apabila arsip yang tercipta memiliki nilai guna kesejarahan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya wajib untuk menyelamatkan dan mengamankan arsip sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sangat bergantung pada standar pengelolaan arsip secara baku yang telah dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah. Capaian indikator kinerja urusan kearsipan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.70
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Kearsipan secara Baku	%	49,2 (31/63)	52,38 (33/63)	10,17 (6/59)	13,15 (8/59)	32,30 (19/59)
2	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	54,12	56,28	45,735	48,28	48,28
3	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	40	53,33	38,33	38,33	39,16

Sumber: LKIP Tahun 2020-2024

Capaian kinerja urusan kearsipan Kabupaten Tasikmalaya selama periode 2020–2024 menunjukkan perkembangan yang belum stabil dan masih menghadapi berbagai kendala dalam penyelenggaraan tata kelola arsip yang sesuai dengan standar





nasional. Berdasarkan data capaian indikator, persentase perangkat daerah yang menyelenggarakan kearsipan secara baku mengalami fluktuasi cukup tajam. Pada tahun 2020, capaian sebesar 49,2 persen (31 dari 63 perangkat daerah), mulai menunjukkan perbaikan secara bertahap pada tahun 2023 dan meningkat cukup signifikan menjadi 32,30 persen (19 dari 59 perangkat daerah) pada tahun 2024. Fluktuasi ini menggambarkan belum konsistennya implementasi penyelenggaraan kearsipan yang sesuai standar di lingkungan perangkat daerah, yang disebabkan oleh lemahnya komitmen kelembagaan serta belum optimalnya pembinaan dan pengawasan kearsipan secara menyeluruh.

Indikator tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti pertanggungjawaban nasional juga menunjukkan tren yang belum menggembirakan. Nilai capaian mengalami penurunan dari 56,28 persen pada tahun 2021 menjadi 48,28 persen pada tahun 2024. Kondisi ini menandakan bahwa upaya penyelamatan, pengelolaan, dan penataan arsip masih menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam hal penataan arsip aktif dan inaktif di masing-masing perangkat daerah. Ketersediaan arsip yang belum optimal dapat berdampak pada lemahnya fungsi arsip sebagai alat akuntabilitas dan bahan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan.

Sementara itu, tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara juga menunjukkan capaian yang relatif stagnan, dengan nilai sekitar 38–40 persen selama tiga tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan arsip yang utuh, autentik, dan mudah diakses masih menjadi tantangan utama dalam tata kelola kearsipan daerah. Kelemahan ini berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik dan menghambat upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Permasalahan utama yang dihadapi dalam urusan kearsipan antara lain: (1) belum seluruh perangkat daerah memiliki sumber daya manusia yang kompeten di bidang kearsipan; (2) minimnya sarana dan prasarana penyimpanan arsip yang memenuhi standar, termasuk fasilitas arsip dinamis dan arsip statis; (3) rendahnya kesadaran dan





komitmen pimpinan perangkat daerah terhadap pentingnya penyelenggaraan kearsipan yang baku; (4) belum optimalnya penerapan sistem kearsipan digital atau aplikasi e-arsip; serta (5) terbatasnya pembinaan, pengawasan, dan koordinasi antara Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan perangkat daerah lainnya.

Beberapa upaya yang dilakukan dalam mendukung pengelolaan arsip yaitu pembinaan kearsipan melalui workshop, bimbingan teknis, pengawasan internal kearsipan, pengelolaan arsip melalui pengintensifan kegiatan penyusutan arsip pada perangkat daerah, inovasi pengelolaan arsip berbasis TIK, penyelamatan dan pelestarian arsip melalui penelusuran arsip-arsip tokoh-tokoh skala Kabupaten Tasikmalaya, alih media arsip serta digitalisasi arsip, penyelamatan arsip perangkat daerah yang dibubarkan atau digabungkan, serta penyelamatan arsip pasca bencana.

c. Urusan Pemerintahan Pilihan

1) Kelautan dan Perikanan

Urusan kelautan dan perikanan merupakan salah satu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksanaannya. Kewenangan pemerintah kabupaten dalam urusan ini terutama mencakup pengelolaan sumber daya perikanan di perairan darat, pengembangan usaha perikanan budidaya, pengawasan mutu hasil perikanan, pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan, serta pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana perikanan di wilayah administratif kabupaten.

Berikut adalah capaian kinerja urusan kelautan dan perikanan selama tahun 2020-2024:

Tabel 2.71
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya +	%	2,9	1,34	2,25	2,72	2,72





No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap						
2	Produksi perikanan	Ton	69.169,51	73.740,17	81.534	83.748	84.623,33
3	Konsumsi ikan	Ton	30,5	35,32	37,07	38,43	Belum rilis
4	Cakupan bina kelompok nelayan	Kelompok	90	70	82	92	102
5	Produksi perikanan kelompok nelayan	Ton	1770,21	1578,99	1281,77	1282,29	1285,28
6	Nilai tukar nelayan	Indeks	Belum bisa dihitung, harus dengan kajian				
7	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: <i>one data</i> KKP)	Ton	70.710,00	73.740,17	81.534	83.748	83.338,05

Sumber: LKIP Tahun 2020-2024

Capaian indikator kinerja urusan kelautan dan perikanan Kabupaten Tasikmalaya selama periode 2020–2024 menunjukkan perkembangan yang cukup baik, khususnya dalam peningkatan produksi perikanan dan pemberdayaan kelompok nelayan, meskipun masih terdapat sejumlah kendala yang perlu mendapat perhatian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nelayan dan keberlanjutan sumber daya perikanan. Laju pertumbuhan produksi perikanan (tangkap dan budidaya) menunjukkan tren yang relatif fluktuatif. Persentase pertumbuhan produksi tercatat sebesar 2,9 persen pada tahun 2020, menurun menjadi 1,34 persen pada tahun 2021 akibat dampak pandemi COVID-19 terhadap aktivitas ekonomi masyarakat pesisir hingga mencapai 2,72 persen pada 2024. Peningkatan ini mengindikasikan adanya pemulihan aktivitas produksi perikanan yang cukup baik seiring membaiknya kondisi ekonomi dan meningkatnya produktivitas kelompok pembudidaya ikan di berbagai wilayah.

Indikator produksi perikanan secara total menunjukkan peningkatan yang konsisten dari 69.169,51 ton pada tahun 2020 menjadi 84.623,33 ton pada tahun 2024. Kenaikan ini menggambarkan bahwa sektor perikanan di Kabupaten Tasikmalaya terus tumbuh, baik pada subsektor perikanan budidaya maupun



tangkap. Hal ini didorong oleh peningkatan kapasitas sarana produksi, seperti ketersediaan benih, pakan, serta optimalisasi lahan perikanan budidaya air tawar. Namun demikian, produktivitas kelompok nelayan masih relatif stagnan, dengan produksi perikanan kelompok nelayan hanya sedikit meningkat dari 1.281,77 ton pada tahun 2022 menjadi 1.285,28 ton pada tahun 2024, menunjukkan bahwa peningkatan produksi secara keseluruhan lebih banyak disumbang oleh pelaku budidaya skala menengah dan besar.

Selanjutnya, tingkat konsumsi ikan masyarakat menunjukkan tren positif dari 30,5 ton pada tahun 2020 menjadi 38,43 ton pada tahun 2023, sedangkan data tahun 2024 belum dirilis. Peningkatan konsumsi ini menunjukkan keberhasilan program diversifikasi pangan berbasis ikan serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi dari hasil perikanan. Cakupan bina kelompok nelayan juga menunjukkan peningkatan signifikan, dari 90 kelompok pada tahun 2020 menjadi 102 kelompok pada tahun 2024, yang menandakan upaya pemerintah daerah dalam memperluas jangkauan pembinaan, pelatihan, dan pendampingan terhadap pelaku usaha perikanan berjalan cukup efektif. Namun demikian, capaian ini masih perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok nelayan agar dapat lebih mandiri dan berdaya saing.

Indikator nilai tukar nelayan (NTN) belum dapat dihitung karena memerlukan kajian lebih lanjut yang mempertimbangkan variabel pendapatan, biaya produksi, serta fluktuasi harga ikan di tingkat pasar. Ketidadaan data ini mengindikasikan bahwa aspek kesejahteraan nelayan belum sepenuhnya terukur secara komprehensif, sehingga perlu dilakukan studi atau survei untuk mengetahui tingkat kesejahteraan dan daya beli nelayan secara akurat.

Permasalahan utama dalam pelaksanaan urusan kelautan dan perikanan di Kabupaten Tasikmalaya antara lain: masih terbatasnya sarana dan prasarana produksi serta akses permodalan bagi nelayan kecil dan pembudidaya ikan; rendahnya tingkat adopsi teknologi budidaya modern dan pengolahan pascapanen; belum optimalnya sistem pemasaran dan rantai distribusi hasil perikanan; minimnya kegiatan pengawasan sumber daya perairan yang berpotensi





menyebabkan degradasi lingkungan dan penurunan kualitas air; serta belum tersedianya data sosial-ekonomi nelayan yang komprehensif untuk mendukung perencanaan kebijakan berbasis bukti.

2) **Pariwisata**

Sektor pariwisata Kabupaten Tasikmalaya memiliki peran yang sangat penting sejalan dengan perkembangan dan kontribusi yang diberikan sektor pariwisata melalui penerimaan devisa, peningkatan pendapatan daerah, pengembangan wilayah, serta penyerapan investasi dan tenaga kerja. Melalui multiplier effect-nya, sektor pariwisata mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, percepatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja dapat didorong melalui pengembangan dan promosi sektor pariwisata secara berkelanjutan.

Berikut adalah capaian indikator kinerja urusan pariwisata Tahun 2020-2024.

Tabel 2.72
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	658.170	590.908	726.021	783.115	1.031.163
2	Jumlah PAD Sektor Pariwisata	Rupiah	986.264.000	1.450.963.735	8.789.646.191	11.668.515.299	12.372.290.170
3	Persentase peningkatan keanekaragaman produk ekonomi kreatif	%	0,96	0,41	1,26	2,53	3,7
4	Jumlah Daya Tarik, Destinasi Wisata dan Kawasan Pariwisata Yang Telah Dikembangkan	Unit	8	2	7	3	3
5	Jumlah Pendapatan Retribusi Sektor Pariwisata	Rupiah	979.264.000	1.022.316.500	1.181.502.000	1.169.248.500	1.796.558.800
6	Tingkat hunian akomodasi	%	3	5,32	6,59	7,49	17,37
7	Persentase peningkatan usaha pariwisata yang terdaftar	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A





No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
8	Persentase Produk/ Karya Ekraf terdaftar HAKI	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang disertifikasi	%	0	0,21	1,25	2,03	2,79
10	Persentase Pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara	%	134 orang	2	27,05	91,34	62,27

Sumber: LKIP Tahun 2020-2024

Sejalan dengan hal tersebut, RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 – 2026 telah menetapkan akselerasi pertumbuhan sektor pariwisata sebagai salah satu strategi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pada tahun 2024, jumlah kunjungan wisatawan mengalami peningkatan menjadi 1.031.163 orang, yang terdiri dari 1.029.477 wisatawan nusantara dan 1.686 wisatawan mancanegara. Meskipun terjadi peningkatan, angka ini masih berada di bawah target yang ditetapkan, yaitu sebanyak 1.583.705 orang.

Capaian tersebut menunjukkan bahawa upaya revitalisasi serta peningkatan prasarana pada Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) perlu terus dilakukan untuk bisa bersaing dengan destinasi wisata daerah lain diluar wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Selain itu, aksesibilitas menuju lokasi wisata dan tingginya curah hujan juga mempengaruhi jumlah kunjungan, serta adanya bencana alam seperti longsor dan banjir yang menghambat akses ke tempat wisata.

Arah kebijakan yang dipilih dalam pengembangan sektor pariwisata, membawa dampak terhadap pertumbuhan desa wisata dari 26 desa wisata, saat ini sudah terdapat 92 desa wisata yang terdaftar dan telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Tasikmalaya nomor 556/Kep.206-DISPARPORA/2022 sebagai desa wisata. Melalui pembinaan dan pemberdayaan yang dilakukan, saat ini sudah terdapat 5 desa wisata yang berubah status dari desa wisata rintisan menjadi desa wisata berkembang.

Terdapat beberapa desa wisata yang difasilitasi oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya yang





meraih prestasi seperti Desa Taraju, Desa Bojongsari dan Desa Cidugaleun yang terpilih sebagai 100 dan 500 besar Nasional dengan kategori Desa Wisata Rintisan Kemanpar Ekraf.

Selain itu, Desa Wisata Taraju mendapatkan peringkat 1 Provinsi Jawa Barat dengan kategori pengelolaan desa wisata dan Desa Wisata Guranteng yang terpilih menjadi peringkat 2 kategori digitalisasi Desa Wisata Provinsi Jawa Barat, Desa Wisata Taraju juga berhasil menjadi juara pertama Kategori Digital dan Konten Kreatif Anugerah Desa Wisata Indonesia Tahun 2023. Pada tahun 2024 Kabupaten Tasikmalaya menerima penghargaan bidang pengembangan pariwisata melalui program Pariwisata Ramah Muslim Terbaik Tingkat Provinsi Jabar.

Diharapkan dengan fasilitasi dan pendampingan yang dilakukan dapat meningkatkan kualitas dan daya saing desa wisata Kabupaten Tasikmalaya, sehingga dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Tasikmalaya.

3) **Pertanian**

Sektor pertanian, termasuk di dalamnya subsektor perikanan, merupakan potensi unggulan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Kabupaten Tasikmalaya. Besarnya kontribusi sektor ini perlu diimbangi dengan langkah-langkah intensifikasi melalui modernisasi pertanian dan pengembangan industri pengolahan hasil, guna meningkatkan daya saing produksi di masa mendatang. Hal ini menjadi penting mengingat tantangan ke depan, khususnya terkait alih fungsi lahan yang semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Capaian indikator kinerja urusan Pertanian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.73
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Prosentase peningkatan produksi komoditas peternakan yang ASUH	%	0,33	0,58	2,10	-0,71	1,39





No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
2	Meningkatnya penyuluhan pertanian	%	52,96	24,53	40,83	80,32	93,38
3	Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	%	N/A	2,05	0,91	-1,02	0,96

Sumber: LKIP Tahun 2020-2024

Capaian indikator kinerja urusan pertanian Kabupaten Tasikmalaya selama periode 2020–2024 menunjukkan perkembangan yang cukup baik, meskipun masih terdapat dinamika fluktuatif pada beberapa indikator yang menggambarkan pengaruh kondisi eksternal seperti cuaca, harga komoditas, dan ketersediaan sarana produksi pertanian. Secara umum, sektor pertanian tetap menjadi penopang utama perekonomian daerah, namun masih dihadapkan pada tantangan dalam menjaga stabilitas produksi dan peningkatan kesejahteraan petani.

Indikator persentase peningkatan produksi komoditas peternakan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) menunjukkan tren yang berfluktuasi selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020 capaian sebesar 0,33 persen meningkat menjadi 1,39 persen pada tahun 2024. Hal ini menggambarkan adanya ketidakstabilan dalam produksi peternakan yang dipengaruhi oleh ketersediaan pakan, serangan penyakit hewan, serta perubahan kondisi pasar. Meski demikian, capaian hingga tahun 2024 menunjukkan efektivitas program pembinaan kesehatan hewan, peningkatan kapasitas peternak, dan perbaikan sistem manajemen produksi ternak yang mulai memberikan hasil positif.

Indikator peningkatan kegiatan penyuluhan pertanian memperlihatkan capaian yang sangat signifikan dan konsisten meningkat dari 52,96 persen pada tahun 2020 menjadi 93,38 persen pada tahun 2024. Capaian ini mencerminkan bahwa kegiatan penyuluhan pertanian telah berjalan semakin intensif dan menjangkau lebih banyak petani di berbagai wilayah. Peningkatan ini juga menunjukkan peran aktif pemerintah daerah dalam memperkuat sistem penyuluhan, baik melalui optimalisasi Balai Penyuluhan





Pertanian (BPP) maupun pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung penyebaran inovasi pertanian. Kondisi ini berkontribusi terhadap peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani, meskipun masih perlu diimbangi dengan peningkatan sarana pendukung dan tenaga penyuluh yang memadai.

Capaian pada indikator peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan menunjukkan pertumbuhan yang relatif rendah dan tidak stabil. Setelah meningkat sebesar 2,05 persen pada tahun 2021, capaian menurun menjadi 0,91 persen pada tahun 2022 dan bahkan sempat mengalami kontraksi sebesar -1,02 persen pada tahun 2023, sebelum kembali positif sebesar 0,96 persen pada tahun 2024. Kondisi ini mengindikasikan bahwa produksi pertanian sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim, serangan organisme pengganggu tanaman, serta keterbatasan irigasi dan akses terhadap sarana produksi. Penurunan produksi pada tahun 2023 diduga terkait dengan faktor cuaca ekstrem dan keterlambatan musim tanam, yang berdampak pada produktivitas komoditas utama seperti padi dan hortikultura.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan pertanian di Kabupaten Tasikmalaya antara lain: masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana produksi seperti irigasi, alat dan mesin pertanian (alsintan), serta pupuk bersubsidi; rendahnya regenerasi petani akibat berkurangnya minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian; belum optimalnya sistem rantai pasok dan pemasaran hasil pertanian; rendahnya akses petani terhadap pembiayaan dan inovasi teknologi pertanian; serta tingginya ketergantungan pada kondisi cuaca yang menyebabkan produktivitas tidak stabil.

4) Energi dan Sumber Daya Mineral

Urusan energi dan sumber daya mineral merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan dasar, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam regulasi tersebut, kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam bidang energi dan sumber daya mineral difokuskan pada pengelolaan energi terbarukan





skala kecil, pengawasan pemanfaatan energi dan konservasi energi di tingkat lokal, pembangunan dan pengelolaan instalasi tenaga listrik non-komersial di daerah terpencil, serta pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan energi alternatif dan sumber daya mineral yang tidak strategis. Urusan di bidang energi dan sumber daya mineral diukur dengan satu indikator yaitu persentase perizinan pemanfaatan sumber daya alam yang terfasilitasi. Urusan ini diampu oleh Sekretariat Daerah. Berikut adalah capaian kinerja urusan energi dan sumber daya mineral tahun 2020-2024:

Tabel 2.74
Capaian Indikator Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase perizinan pemanfaatan sumber daya alam yang terfasilitasi	%	100	100	100	N/A	N/A

Sumber: LKIP Tahun 2020-2024

Capaian indikator kinerja urusan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Tasikmalaya dalam lima tahun terakhir menunjukkan hasil yang relatif stabil, terutama pada indikator persentase perizinan pemanfaatan sumber daya alam yang terfasilitasi. Pada periode tahun 2020 hingga 2022, capaian indikator tersebut mencapai 100 persen, yang mencerminkan bahwa seluruh permohonan perizinan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah Kabupaten Tasikmalaya telah difasilitasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan kinerja positif dalam aspek pelayanan publik dan koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemangku kepentingan, baik pelaku usaha maupun masyarakat, dalam proses pengelolaan perizinan.

Namun demikian, pada tahun 2023 dan 2024 data capaian tidak tersedia (N/A), yang mengindikasikan adanya kendala dalam proses pendataan, pelaporan, atau pergeseran kewenangan perizinan akibat perubahan regulasi di tingkat pusat. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta kebijakan penyederhanaan perizinan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), sebagian besar kewenangan perizinan





di sektor ESDM dialihkan ke pemerintah provinsi dan pusat. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya peran pemerintah kabupaten dalam memfasilitasi perizinan secara langsung, sehingga capaian indikator tidak dapat diukur sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.

Selain faktor regulasi, tantangan lain yang dihadapi antara lain masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknis di bidang energi dan sumber daya mineral, minimnya infrastruktur pendukung pemanfaatan energi alternatif di daerah, serta kurangnya data terintegrasi mengenai potensi sumber daya alam non-logam dan batuan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Ke depan, diperlukan penguatan koordinasi lintas tingkat pemerintahan serta pengembangan sistem informasi yang terintegrasi untuk memastikan keberlanjutan fungsi fasilitasi dan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam di tingkat daerah.

5) **Perdagangan**

Perdagangan merupakan salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penguatan daya saing daerah. Secara umum, urusan perdagangan mencakup berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pertukaran barang dan jasa, baik di tingkat domestik maupun internasional, serta penguatan sistem distribusi dan perlindungan konsumen. Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya secara berkelanjutan menyelenggarakan urusan perdagangan guna mendukung stabilitas harga, meningkatkan akses pasar bagi pelaku usaha, serta menciptakan iklim perdagangan yang sehat dan kompetitif.

Capaian kinerja urusan perdagangan Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020–2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.75
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertumbuhan Pelaku Usaha Perdagangan	%	1	1	602	12,8	10,66





No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
2	PDRB Sektor Perdagangan	Rp. Juta	6.807.282	7.144.879,30	7.810.320,50	8.507.691,5	8.959.520
3	Ekspor Bersih Perdagangan	US \$	2.658.628,37	4.540.781,79	8.283.933,87	11.275.591,77	30.530.245,74
4	Cakupan pelayanan Tera dan tera ulang alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap lainnya (UTTP)	Unit	8282	10178	4.406	3238	2883
5	Persentase Kenaikan Ekspor bersih Produk Kabupaten Tasikmalaya	%	2	2	82,43	36,11	11

Sumber: LKIP Tahun 2020-2024

Capaian indikator kinerja urusan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya dalam periode tahun 2020–2024 menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, meskipun masih dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam menjaga stabilitas dan kesinambungan pertumbuhan sektor ini. Pertumbuhan pelaku usaha perdagangan mengalami peningkatan yang fluktuatif namun positif. Setelah tumbuh moderat pada tahun 2020–2021 sebesar 1 persen, terjadi lonjakan yang sangat tinggi pada tahun 2022 sebesar 602 persen, menunjukkan adanya peningkatan signifikan jumlah pelaku usaha baru, baik dari sektor perdagangan mikro maupun menengah. Namun, pada tahun 2023 dan 2024 laju pertumbuhan kembali melandai menjadi 12,8 persen dan 10,66 persen. Fluktuasi ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh faktor pemulihan pasca-pandemi COVID-19, kemudahan akses perizinan melalui sistem OSS, serta meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat setelah pembatasan sosial berakhir.

Dari sisi kontribusi ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor perdagangan menunjukkan tren peningkatan yang stabil, dari Rp6,8 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp8,96 triliun pada tahun 2024, atau tumbuh rata-rata sekitar 7 persen per tahun. Kinerja ini menegaskan bahwa sektor perdagangan tetap menjadi salah satu pilar utama penggerak ekonomi daerah, sejalan dengan meningkatnya konsumsi masyarakat dan aktivitas perdagangan antarwilayah. Capaian ekspor bersih perdagangan juga menunjukkan peningkatan





luar biasa, dari USD 2,65 juta pada tahun 2020 menjadi USD 30,53 juta pada tahun 2024. Lonjakan ini mencerminkan meningkatnya daya saing produk lokal Kabupaten Tasikmalaya di pasar global, terutama produk kerajinan, hasil pertanian olahan, dan industri kecil menengah (IKM). Namun demikian, persentase kenaikan ekspor bersih menunjukkan tren menurun pada dua tahun terakhir, dari 82,43 persen pada 2022 menjadi hanya 11 persen pada 2024, yang menandakan perlambatan pertumbuhan ekspor meskipun secara nilai total meningkat signifikan. Sementara itu, capaian cakupan pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) menunjukkan tren penurunan tajam dari 10.178 unit pada tahun 2021 menjadi hanya 2.883 unit pada tahun 2024.

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan perdagangan antara lain: belum optimalnya digitalisasi layanan dan pendataan pelaku usaha perdagangan; menurunnya cakupan pelayanan metrologi akibat keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana; keterbatasan akses promosi dan fasilitasi ekspor bagi pelaku UMKM; serta lemahnya sinergi antara sektor perdagangan, perindustrian, dan pariwisata dalam memperluas pasar produk lokal.

6) Perindustrian

Urusan perindustrian memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah, karena sektor ini mampu menjadi prime mover yang mendorong pertumbuhan ekonomi secara luas. Industri tidak hanya berkontribusi signifikan terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tetapi juga memberikan efek ganda (multiplier effect) terhadap sektor-sektor lainnya seperti jasa, penyediaan bahan baku, transportasi, distribusi/perdagangan, serta pariwisata.

Pembangunan sektor industri menjadi sangat penting dalam meningkatkan nilai tambah produk, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Namun demikian, meskipun terdapat berbagai capaian positif dalam pengembangan sektor industri, pertumbuhan industri di Kabupaten Tasikmalaya



belum sepenuhnya optimal dan belum mampu mencapai daya saing yang diharapkan, baik di pasar nasional maupun internasional.

Capaian Kinerja urusan Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.76
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertumbuhan Industri	%	1,2	0,8	1,1	1,5	1,9
2	PDRB Sektor Industri	Rp. Juta	2.854.810,7	3.003.519,3	3.310.543,22	3.676.746,2	4.146.390
3	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	%	2,61	2,58	-	11,7	12,7
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Ijin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan oleh Instansi Terkait	%	100	100	100	100	100

Sumber: LKIP Tahun 2020-2024

Capaian indikator kinerja urusan Perindustrian Kabupaten Tasikmalaya selama periode tahun 2020–2024 menunjukkan perkembangan yang positif dan cenderung stabil, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan dalam upaya memperkuat daya saing industri lokal dan meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian daerah. Pertumbuhan industri mengalami peningkatan secara bertahap dari 1,2 persen pada tahun 2020 menjadi 1,9 persen pada tahun 2024. Laju pertumbuhan yang konsisten ini mencerminkan adanya pemulihan dan penguatan aktivitas industri pasca-pandemi COVID-19, terutama pada sektor industri kecil dan menengah (IKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Kinerja positif ini juga selaras dengan peningkatan PDRB sektor industri pengolahan, yang naik dari Rp2,85 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp4,14 triliun pada tahun 2024, menunjukkan peningkatan nilai tambah yang cukup signifikan dalam kegiatan produksi dan pengolahan hasil pertanian, kerajinan, serta industri rumah tangga.





Dari sisi pemberdayaan pelaku industri, cakupan bina kelompok pengrajin mengalami peningkatan yang cukup besar, dari hanya 2,58 persen pada tahun 2021 menjadi 12,7 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan perhatian pemerintah daerah terhadap pembinaan dan pendampingan kelompok pengrajin dalam hal peningkatan kapasitas produksi, inovasi desain, dan akses pemasaran. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antarwilayah, di mana sebagian besar kegiatan pembinaan masih terkonsentrasi di wilayah yang memiliki akses infrastruktur dan sentra industri yang lebih baik.

Pada aspek regulasi dan pengawasan, persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan terhadap izin usaha industri (IUI) menunjukkan capaian optimal dengan angka 100 persen secara konsisten sepanjang 2020–2024. Hal ini menandakan bahwa seluruh kegiatan perizinan dan pengawasan terhadap industri kecil dan menengah telah terlaksana sesuai ketentuan, serta mencerminkan kinerja administrasi yang baik dalam tata kelola perindustrian daerah.

Meskipun capaian indikator secara umum menunjukkan tren positif, masih terdapat beberapa permasalahan utama yang perlu mendapat perhatian. Pertama, sebagian besar industri di Kabupaten Tasikmalaya masih berskala kecil dan menghadapi keterbatasan dalam teknologi, akses pembiayaan, serta kemampuan inovasi produk. Kedua, konektivitas antara sentra produksi dan pasar belum optimal, terutama di wilayah perdesaan. Ketiga, sinergi antara sektor perindustrian, perdagangan, dan pariwisata belum sepenuhnya terbangun, sehingga potensi produk unggulan lokal belum maksimal terserap di pasar domestik maupun ekspor. Keempat, belum optimalnya pemanfaatan digitalisasi industri juga menjadi tantangan dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing pelaku IKM.

7) Transmigrasi

Urusan transmigrasi merupakan urusan pilihan yang didasarkan pada Undang undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan urusan transmigrasi merupakan upaya pemerintah untuk meratakan pembangunan wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Namun, berdasarkan data capaian indikator kinerja urusan transmigrasi di Kabupaten Tasikmalaya selama tahun 2020-2024, belum terdapat realisasi kegiatan yang signifikan. Kondisi ini disebabkan oleh tidak adanya alokasi target transmigran dari Provinsi, sehingga kegiatan transmigrasi, baik dari segi pelatihan calon transmigran maupun penyediaan sarana dan prasarana di lokasi transmigrasi lokal, tidak dapat dilaksanakan.

Tabel 2.77
Capaian Indikator Kinerja Urusan Transmigrasi
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah transmigran yang telah memiliki sertifikat pelatihan	KK	0	0	0	0	0
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Translok	Paket	0	0	0	0	0

Sumber: LKIP Tahun 2020-2024

d. Urusan Penunjang

1) Kesekretariatan Daerah

Urusan kesekretariatan daerah merupakan motor penggerak dan koordinator jalannya pemerintahan di Kabupaten. Tugasnya memastikan kebijakan Bupati terumus dengan baik dan dilaksanakan secara terkoordinasi oleh seluruh instansi di bawahnya, serta menyediakan dukungan administrasi yang diperlukan.

Berikut adalah capaian kinerja urusan kesekretariatan daerah tahun 2020-2024.

Tabel 2.78
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesekretariatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Predikat Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	Predikat	B	B	B	B	B
2	Nilai IKM Kabupaten	Poin	78,93	80,48	81	81,72	82,48
3	Persentase regulasi peraturan pusat yang ditindaklanjuti menjadi peraturan perundang-undangan daerah	%	100	100	100	100	100





No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
4	Persentase penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan nasional yang dilaksanakan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100
5	Persentase bahan kebijakan umum lingkup perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100
6	Level kematangan/ maturitas pengadaan barang dan jasa	Level	0	4	6	8	9
7	Persentase bahan kebijakan umum lingkup pemerintahan	%	100	100	100	100	100

Sumber: LKIP Tahun 2020-2024

Capaian kinerja Urusan Kesekretariatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020–2024 menunjukkan hasil yang positif dan konsisten. Predikat hasil evaluasi AKIP Kabupaten yang tetap berada pada kategori “B” menandakan sistem akuntabilitas kinerja telah berjalan cukup baik, meskipun masih diperlukan peningkatan kualitas perencanaan dan penguatan tindak lanjut hasil evaluasi agar dapat naik ke level “BB” atau “A”. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat juga menunjukkan tren meningkat dari 78,93 pada tahun 2020 menjadi 82,48 pada tahun 2024, mencerminkan adanya perbaikan layanan publik meski peningkatannya masih relatif moderat. Capaian 100% pada indikator tindak lanjut regulasi pusat, pelaksanaan kegiatan keagamaan dan nasional, serta bahan kebijakan lingkup pemerintahan, perekonomian, dan pembangunan menunjukkan kinerja administrasi dan koordinasi antarperangkat daerah yang solid.

Namun demikian, sebagian indikator masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya mencerminkan kualitas maupun dampak kebijakan terhadap masyarakat. Sementara itu, capaian level kematangan pengadaan barang dan jasa yang meningkat drastis dari level 0 menjadi 9 menunjukkan kemajuan signifikan dalam tata kelola pemerintahan dan penerapan sistem yang transparan.





2) **Kesekretariatan DPRD**

Sekretariat DPRD merupakan unsur pendukung yang menyelenggarakan pelayanan administrasi dan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD, yang berkedudukan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD, serta secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berikut adalah tabel capaian kinerja urusan sekretariatan DPRD selama tahun 2020-2024.

Tabel 2.79
Capaian Indikator Kinerja Urusan Sekretariatan DPRD
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase fasilitasi dukungan terhadap penyelenggaraan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD	%	100	88,43	100	100	100

Sumber: LKIP Tahun 2020-2024

Capaian kinerja Urusan Sekretariatan DPRD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020–2024 secara umum menunjukkan hasil yang sangat baik. Persentase fasilitasi dukungan terhadap penyelenggaraan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD mencapai 100% pada hampir seluruh tahun pelaksanaan, kecuali pada tahun 2021 yang menurun menjadi 88,43%. Hal ini mencerminkan bahwa Sekretariat DPRD secara konsisten mampu memberikan dukungan administratif, teknis, dan operasional bagi pelaksanaan fungsi-fungsi utama DPRD. Penurunan capaian pada tahun 2021 kemungkinan disebabkan oleh adanya pembatasan aktivitas akibat pandemi COVID-19 yang berdampak pada optimalisasi kegiatan DPRD, termasuk dalam hal fasilitasi rapat, penyusunan produk hukum daerah, serta kegiatan pengawasan di lapangan. Setelah kondisi mulai normal, capaian kembali meningkat ke angka 100% dan dipertahankan hingga 2024, menandakan adanya pemulihan kinerja yang cepat serta peningkatan koordinasi antara Sekretariat DPRD dan anggota dewan.





Meskipun capaian kinerja terlihat optimal, permasalahan yang masih perlu mendapat perhatian adalah aspek kualitas fasilitasi dan dukungan terhadap fungsi DPRD yang belum sepenuhnya terukur secara komprehensif. Indikator yang digunakan masih menitikberatkan pada kuantitas atau keterlaksanaan kegiatan, bukan pada efektivitas dan dampak dukungan tersebut terhadap peningkatan kualitas produk legislasi, pengawasan, maupun penganggaran daerah. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi DPRD perlu terus diperkuat untuk memastikan bahwa dukungan yang diberikan tidak hanya lengkap secara formal, tetapi juga mampu meningkatkan kinerja substantif DPRD dalam menjalankan perannya.

e. Urusan Pendukung
1) Perencanaan

Urusan perencanaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 termasuk urusan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan. Capaian kinerja urusan perencanaan diukur melalui nilai perencanaan kinerja dalam Evaluasi SAKIP Kabupaten. Berikut capaian kinerja urusan perencanaan untuk tahun 2020-2024:

Tabel 2.80
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perencanaan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai perencanaan kinerja dalam Evaluasi SAKIP Kabupaten	%	23,45	23,46	21,64	21,80	21,87

Sumber: LKIP Tahun 2020-2024

Capaian kinerja Urusan Perencanaan Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020–2024 menunjukkan tren yang relatif stagnan dengan kecenderungan sedikit menurun. Nilai perencanaan kinerja dalam Evaluasi SAKIP tercatat sebesar 23,45% pada tahun 2020 dan hanya sedikit meningkat menjadi 23,46% pada tahun 2021, namun kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 21,64%





dan hanya naik tipis hingga 21,87% pada tahun 2024. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kualitas perencanaan kinerja daerah belum mengalami perbaikan signifikan selama lima tahun terakhir. Meskipun sistem perencanaan telah berjalan secara rutin, masih terdapat kelemahan dalam keterpaduan antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program. Selain itu, hasil tersebut menunjukkan bahwa perencanaan kinerja belum sepenuhnya berbasis pada outcome dan belum sepenuhnya mendukung penguatan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan perencanaan adalah kapasitas sumber daya manusia perencana serta pemanfaatan data dan sistem informasi perencanaan berbasis teknologi masih perlu ditingkatkan agar mampu menghasilkan perencanaan yang lebih akurat, terukur, dan berorientasi pada hasil pembangunan daerah.

2) Keuangan

Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu indikator utama yang ditekankan oleh pemerintah dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi dan upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan memperoleh akses seluas-luasnya terhadap informasi mengenai keuangan daerah.

Dalam upaya mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan, pemerintah juga menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mewajibkan setiap badan publik untuk menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara yang sederhana. Berikut adalah capaian kinerja urusan keuangan Tahun 2020-2024.





Tabel 2.81
Capaian Indikator Kinerja Urusan Keuangan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	100	100	100	100	100
2	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	%	74	77,98	80,77	84,68	82,95
3	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	%	-6,48	8,14	25,21	3,97	6,16
4	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	8,51	11,57	9,69	9,49	10,07
5	Persentase SILPA terhadap APBD	%	3,19	6,19	4,56	4,03	1,02
6	Penetapan APBD	Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
7	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	4,89	12,823	10,14	8,293	7,281
8	Rasio PAD	%	0,82	11,57	9,69	9,49	10,07
9	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi <i>transfer expenditures</i>)	%	57,62	65,51	64,84	64,52	63,66
10	Opini Laporan Keuangan	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
11	Deviasi realisasi PAD terhadap Belanja Total dalam APBD	%	13,84	4,134	1,567	1,513	2,716
12	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	8,21	12,454	9,092	13,827	5,596
13	Manajemen Aset		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
14	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	3,10	5,937	4,488	4,088	1,043
15	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya ==> pendapatan pemerintah/pdb	%	0,82	0,95	0,72	0,74	0,84





No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
16	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB ==> pajak daerah/pdb	%	0,19	0,19	0,22	0,23	0,24

Sumber: LKIP Tahun 2020-2024

Capaian kinerja Urusan Keuangan Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020–2024 secara umum menunjukkan pengelolaan keuangan daerah yang baik dan stabil, dengan beberapa indikator yang memperlihatkan tren positif namun masih menyisakan beberapa tantangan struktural. Selama lima tahun terakhir, penetapan APBD selalu dilakukan tepat waktu (100%) dan laporan keuangan konsisten memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, yang mencerminkan tingkat kepatuhan tinggi terhadap peraturan perundang-undangan serta penerapan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan. Selain itu, rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan menunjukkan penurunan dari 12,82% pada 2021 menjadi 7,28% pada 2024, mengindikasikan efisiensi dalam pengendalian belanja aparatur. Persentase Barang Milik Daerah (BMD) yang memiliki dokumen kepemilikan juga meningkat dari 74% pada 2020 menjadi 84,68% pada 2023, meskipun sedikit menurun di 2024 menjadi 82,95%, menunjukkan upaya berkelanjutan dalam penertiban dan legalisasi aset daerah.

Dari sisi pendapatan daerah, kinerja menunjukkan fluktuasi. Pertumbuhan Pajak Daerah sempat mengalami kontraksi pada 2020 sebesar -6,48% akibat dampak pandemi COVID-19, namun pulih signifikan menjadi 25,21% pada 2022 sebelum menurun kembali ke level moderat 6,16% di 2024. Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan relatif stabil di kisaran 8,5%–11,5%, mencerminkan ketergantungan daerah yang masih cukup besar terhadap dana transfer dari pusat. Sementara itu, rasio SILPA terhadap APBD cenderung menurun dari 6,19% (2021) menjadi hanya 1,02% (2024), yang menandakan semakin optimalnya pemanfaatan anggaran meski tetap perlu diimbangi dengan pengendalian efisiensi belanja. Rasio belanja urusan pemerintahan umum berada pada kisaran 57–65%, menunjukkan dominasi belanja aparatur dan kebutuhan rutin dalam struktur APBD.





Dari aspek efektivitas pendapatan, deviasi realisasi PAD terhadap belanja total dan terhadap anggaran PAD menunjukkan fluktuasi yang relatif kecil, mengindikasikan peningkatan akurasi perencanaan fiskal daerah. Namun demikian, rasio PAD terhadap PDB daerah yang hanya mencapai sekitar 0,82–0,84% dan rasio penerimaan pajak terhadap PDB yang berkisar 0,19–0,24% memperlihatkan kontribusi fiskal daerah terhadap perekonomian masih terbatas.

Beberapa permasalahan dalam urusan keuangan daerah, antara lain: masih rendahnya kemandirian fiskal, terlihat dari porsi PAD yang relatif kecil terhadap total pendapatan dan PDB daerah, fluktuasi pertumbuhan pajak daerah yang menunjukkan ketergantungan pada sektor-sektor ekonomi tertentu serta belum optimalnya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, Pengelolaan aset daerah yang masih perlu ditingkatkan dalam hal kelengkapan dokumen kepemilikan dan optimalisasi pemanfaatan aset produktif, serta belanja rutin pada urusan pemerintahan umum menunjukkan ruang fiskal untuk belanja pembangunan masih terbatas.

3) Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Sesuai dengan peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tasikmalaya mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan latihan dan tugas lain yang diberikan Bupati.

Sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola sumber daya aparatur, BKPSDM telah menetapkan indikator kinerja utama untuk periode 2021-2026. Indikator tersebut digunakan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Capaian kinerja urusan kepegawaian tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.





Tabel 2.82
Capaian Indikator Kinerja Utama Urusan Kepegawaian
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Sistem Merit	Poin	280	289,5	280	284,5	313
2	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	N/A	N/A	57,84	67,12	85,5

Sumber: LKIP Tahun 2020-2024

Capaian kinerja Urusan Kepegawaian Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020–2024 menunjukkan perkembangan yang positif, khususnya dalam penguatan tata kelola manajemen aparatur dan reformasi birokrasi. Indeks Sistem Merit mengalami peningkatan dari 280 pada tahun 2020 menjadi 313 pada tahun 2024, halo ini berarti adanya kemajuan dalam penerapan prinsip meritokrasi dalam manajemen kepegawaian daerah, seperti dalam aspek rekrutmen, promosi, mutasi, serta pengembangan kompetensi pegawai berbasis kinerja. Meski sempat mengalami sedikit fluktuasi pada tahun 2022 dengan nilai turun ke 280, capaian tersebut kembali meningkat signifikan pada dua tahun terakhir, yang menunjukkan adanya perbaikan sistem dan konsistensi dalam implementasi kebijakan berbasis kinerja dan profesionalisme ASN.

Sementara itu, nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah juga menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan sejak pertama kali diukur pada tahun 2022. Nilainya naik dari 57,84 pada tahun 2022 menjadi 85,5 pada tahun 2024, yang menggambarkan kemajuan besar dalam upaya pembenahan tata kelola pemerintahan, peningkatan integritas, serta perbaikan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Peningkatan ini menunjukkan bahwa berbagai inisiatif seperti digitalisasi proses administrasi kepegawaian, penyederhanaan birokrasi, dan penguatan budaya kerja berorientasi hasil mulai memberikan dampak nyata terhadap kinerja kelembagaan.

4) Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan Pengembangan di daerah memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan,





dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah. Penelitian dan pengembangan juga diarahkan untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menghasilkan kebijakan yang berbasis data, riset, dan inovasi. Melalui kegiatan penelitian dan pengembangan, pemerintah daerah berupaya menyediakan landasan ilmiah bagi pengambilan keputusan serta memperkuat sinergi antara lembaga pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan.

Berikut adalah capaian kinerja urusan penelitian dan pengembangan tahun 2020-2024.

Tabel 2.83
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder	%	0	100	100	100	100
2	Indeks Inovasi Daerah	Inovatif	Kurang Inovatif	45,72 (Inovatif)	50,42 (Inovatif)	43,12 (Inovatif)	47,59 (Inovatif)

Sumber: LKIP tahun 2020-2024

Pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Tasikmalaya difokuskan pada pengumpulan dan pengolahan data strategis, analisis kebijakan daerah, serta pengembangan inovasi daerah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan potensi lokal. Upaya ini mencakup kegiatan penyusunan kajian sektoral, pengembangan sistem informasi dan data daerah, serta fasilitasi inovasi pelayanan publik oleh perangkat daerah, diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif, efisien, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain: keterbatasan sumber daya manusia dengan kompetensi penelitian yang memadai, minimnya anggaran riset daerah, serta rendahnya pemanfaatan hasil penelitian dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan menjadi





kendala utama yang perlu mendapat perhatian. Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah dengan perguruan tinggi dan lembaga riset belum sepenuhnya optimal, sehingga potensi kolaborasi dalam inovasi daerah belum tergarap maksimal.

f. Unsur Pengawasan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menerapkan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih, dimana Inspektorat Daerah berperan sebagai pionir untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut.

Inspektorat Daerah merupakan instansi yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemerintahan. Sebagai pengawas internal pemerintah daerah, Inspektorat Daerah diharapkan dapat mendeteksi secara dini potensi penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran dan kebijakan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Untuk menjalankan fungsi pengawasan secara optimal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, Inspektorat Daerah juga bekerja sama dengan lembaga pengawas eksternal seperti KPK, BPKP dan BPK.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada pemerintah daerah dan masyarakat, Inspektorat juga diminta berperan aktif dalam pengawasan serta pengendalian mutu pelayanan publik, khususnya di lingkungan pemerintahan daerah. Capaian kinerja urusan pengawasan selama tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.84
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengawasan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang selesai ditindaklanjuti	%	81,75	83,79	88,92	89,19	90,29
2	Hasil leveling lembaga pengawasan	Level	2	2	2	3	3

Sumber: LKIP tahun 2020-2024





Capaian kinerja Urusan Pengawasan Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020–2024 menunjukkan peningkatan yang konsisten dan menggambarkan perbaikan dalam efektivitas fungsi pengawasan internal pemerintah daerah. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang ditindaklanjuti mengalami peningkatan signifikan dari 81,75% pada tahun 2020 menjadi 90,29% pada tahun 2024. Capaian ini menunjukkan bahwa perangkat daerah semakin responsif terhadap temuan audit dan rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh inspektorat, sehingga tingkat kepatuhan terhadap prinsip akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik semakin membaik. Peningkatan ini juga menandakan adanya koordinasi yang lebih efektif antara unit kerja pengawasan dan perangkat daerah yang diawasi, serta penguatan fungsi monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Selain itu, hasil leveling lembaga pengawasan meningkat dari level 2 pada periode 2020–2022 menjadi level 3 pada tahun 2023 dan 2024. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan kapabilitas APIP dalam menjalankan fungsi pengawasan yang lebih proaktif, independen, dan berbasis risiko. Dengan berada pada level 3, APIP Kabupaten Tasikmalaya telah mencapai tahap di mana sistem pengawasan internal mulai terintegrasi dalam proses manajemen risiko dan pengambilan keputusan strategis di lingkungan pemerintah daerah.

Meskipun capaian tersebut positif, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Pertama, meskipun persentase tindak lanjut rekomendasi audit meningkat, masih terdapat sebagian kecil rekomendasi yang belum ditindaklanjuti secara tuntas, yang umumnya terkait dengan permasalahan administratif, aset daerah, atau ketidaklengkapan bukti pertanggungjawaban keuangan. Kedua, peningkatan level kapabilitas APIP masih perlu didorong menuju level 4, yang menuntut kemampuan pengawasan yang sepenuhnya berbasis manajemen risiko dan memberikan nilai tambah strategis bagi perbaikan kinerja pemerintahan. Ketiga, keterbatasan jumlah dan kompetensi auditor internal, terutama dalam bidang audit kinerja dan audit berbasis



teknologi informasi, menjadi tantangan dalam menjaga kualitas pengawasan yang komprehensif dan adaptif terhadap dinamika pemerintahan modern.

2.1.5 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

SPM adalah jenis pelayanan dasar yang pada hakikatnya merupakan hak bagi setiap warga untuk memperoleh pelayanan, sehingga menjadi kewajiban pemerintah untuk mengadakannya. Dari sisi manajemen pemerintahan, bidang-bidang pelayanan dasar yang tercakup dalam SPM ini termasuk dalam penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Adapun jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, meliputi: SPM Bidang Pendidikan, SPM Bidang Kesehatan, SPM Bidang Pekerjaan Umum, SPM Bidang Perumahan Rakyat, SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, dan SPM Bidang Sosial.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya telah menerapkan keenam SPM tersebut. Adapun capaian hasil penerapan masing-masing jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan melalui program perangkat daerah terkait pada Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:





Tabel 2.85
Capaian Target Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

No	Urusan	Program	Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Pencapaian	Target 2024	Capaian 2024	Perangkat Daerah
1	Bidang Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan Dasar			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah warga negara usia 7 -15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	99,79%	
			Pendidikan Kesetaraan			
			Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	14,78%	
			Pendidikan Usia Dini			
			Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	83,59%	
2	Bidang Kesehatan	Program Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	96,45%	Dinas Kesehatan





No	Urusan	Program	Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Pencapaian	Target 2024	Capaian 2024	Perangkat Daerah
			Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	99,10%	
			Jumlah bayi lahir yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	97,66%	
			Jumlah balita yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	98,22%	
			Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	97,30%	
			Jumlah warga negara usia produktif (15 – 59 tahun) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	
			Jumlah warga negara usia lanjut (60 tahun ke atas) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	96,59%	
			Jumlah warga penderita hipertensi yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	97,20%	
			Jumlah warga penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	100%	
			Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani Kesehatan	100%	94,83%	
			Jumlah warga terduga yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	97,50%	





No	Urusan	Program	Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Pencapaian	Target 2024	Capaian 2024	Perangkat Daerah
			Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	92,84%	
3	Bidang Pekerjaan Umum	Program pengelolaan dan pengembangan penyediaan sistem air minum	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari			Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	100%	
		Program pengelolaan dan pengembangan penyediaan sistem air limbah	Penyediaan pengolahan air limbah domestik			
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	100%	
4	Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan	Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota			Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan
			Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	





No	Urusan	Program	Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Pencapaian	Target 2024	Capaian 2024	Perangkat Daerah
			Fasilitasi Penyediaan Rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah			Permukiman dan Lingkungan Hidup
			Jumlah warga negara yang terkena relokasi program pemerintah daerah	100%	100%	
5	Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota	100%	99,64%	
			Standar operasional Prosedur Satpol PP	100%	100%	
			Standar sarana prasarana Satpol PP	100%	100%	
			Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat	100%	89,18%	
			Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda Dan Perkada	100%	100%	





No	Urusan	Program	Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Pencapaian	Target 2024	Capaian 2024	Perangkat Daerah
	Bidang Ketentaraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran			Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	
		Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana			
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			





No	Urusan	Program	Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Pencapaian	Target 2024	Capaian 2024	Perangkat Daerah
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	
6	Bidang Sosial	1. Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial			Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Bencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	100%	100%	
		3. Program Penanganan Bencana	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti			
			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial			
			Terpenuhinya kebutuha dasar anak terlantar di luar panti	100%	100%	
			Persentase anak (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti			
			Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial			
			Terpenuhinya kebutuhan dasar lanjut usia terlantar di luar panti	100%	100%	
			Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti			





No	Urusan	Program	Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Pencapaian	Target 2024	Capaian 2024	Perangkat Daerah
			Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial			
			Terpenuhinya kebutuhan dasar gelandangan pengemis di luar panti	100%	100%	
			Persentase % gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti			
			Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/kota			
			Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial daerah kab/kota	100%	100%	
			Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota			

Sumber: Laporan SPM Kabupaten Tasikmalaya, 2025





Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian penerapan SPM di kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2024, pada beberapa urusan belum mencapai target 100%. Berikut analisis terhadap capaian penerapan SPM sesuai bidang:

a. Bidang Pendidikan

Secara keseluruhan, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan untuk tahun 2024 menunjukkan kinerja yang kontras antara keberhasilan akses pendidikan formal dasar dan tantangan besar dalam penjangkauan kelompok rentan. Capaian partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs) berada pada level yang sangat optimal, mencapai 99,79%. Angka ini merupakan bukti keberhasilan program wajib belajar dan intervensi pemerintah dalam menjamin akses merata. Di sisi lain, capaian partisipasi anak usia 5-6 tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berada pada angka 83,59%, menunjukkan kinerja yang baik namun masih memiliki ruang untuk ditingkatkan guna memastikan kesiapan sekolah bagi sisa 16,41% populasi. Namun, tantangan terberat berada pada indikator partisipasi pendidikan kesetaraan bagi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah, dengan capaian yang sangat rendah, hanya 14,78%. Kesenjangan signifikan ini mengindikasikan bahwa mayoritas kelompok yang terputus dari sekolah formal tidak sepenuhnya berhasil kembali mengikuti pendidikan nonformal.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap penerapan SPM bidang Pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan bahwa meskipun capaian partisipasi pendidikan telah tinggi, terdapat sejumlah tantangan struktural dan kultural yang menghambat peningkatan kualitas dan akses universal. Dari sisi kultural, permasalahan utama adalah kurangnya pemahaman orang tua mengenai pentingnya pendidikan yang seringkali disebabkan oleh tingkat pendidikan orang tua yang rendah, berakibat pada minimnya dorongan untuk menyekolahkan anak. Dari sisi infrastruktur dan SDM, masalah mendesak adalah kurangnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik, di mana rasio ketersediaan guru berstatus PNS masih belum ideal. Selain itu, sarana dan prasarana di semua jenjang belum memadai,



dengan masih adanya kekurangan ruang kelas dan kondisi rusak sedang/berat. Tantangan teknis lainnya adalah proses pendataan dan verifikasi Anak Tidak Sekolah (ATS) yang belum optimal, yang berpotensi menyebabkan ketidaktepatan sasaran program.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya telah merumuskan strategi respons yang terfokus. Untuk mengatasi hambatan kultural, dilakukan koordinasi intensif dengan Dinas Sosial, P2KBP3A untuk memberikan pemahaman dan pendampingan kepada para perempuan tentang pentingnya pendidikan. Penanganan masalah ATS dilakukan melalui kerjasama dan fokus pendataan serta verifikasi yang melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan, dan Dinas Sosial/P2KBP3A. Sementara itu, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dioptimalkan melalui pemanfaatan berbagai sumber dana, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat, dan sumber sah lainnya. Terakhir, masalah kualitas guru non-PNS diatasi dengan program peningkatan kualifikasi dan kompetensi melalui pemberian bimbingan teknis, pendampingan TIK, dan insentif.

b. Bidang Kesehatan

Secara umum, capaian SPM bidang kesehatan menunjukkan kinerja yang sangat baik dan merata di hampir semua indikator, menunjukkan keberhasilan sistem pelayanan kesehatan dasar dalam menjangkau masyarakat. Indikator kunci seperti layanan kesehatan bagi ibu bersalin (99,90%) telah mencapai hampir sempurna, mencerminkan aksesibilitas dan pemanfaatan fasilitas persalinan yang tinggi. Capaian tinggi juga terlihat pada kelompok ibu hamil (96,45%), balita (98,22%), bayi baru lahir (97,66%), usia pendidikan dasar (97,30%), dan usia lanjut (96,59%), yang semuanya berada di atas 96%. Angka ini menunjukkan bahwa program kesehatan primer, seperti Posyandu, Puskesmas, dan program screening di sekolah, telah berjalan efektif.

Walaupun demikian, capaian untuk penyakit tidak menular (PTM) seperti hipertensi (97,20%) dan layanan untuk gangguan jiwa berat (94,83%) juga tergolong tinggi, menunjukkan fokus yang baik pada upaya penanggulangan penyakit kronis dan masalah kesehatan





mental. Namun, tantangan signifikan terdeteksi pada layanan kesehatan bagi masyarakat dengan risiko terinfeksi virus (HIV/AIDS), yang mencapai 92,84%. Angka ini merupakan capaian terendah dari seluruh indikator yang disampaikan, mengindikasikan bahwa kelompok rentan ini masih menjadi segmen yang paling sulit dijangkau dan dipertahankan dalam program pelayanan kesehatan rutin.

Berikut analisis terhadap capaian target SPM bidang kesehatan:

1. Cakupan pelayanan antenatal (ANC) bagi ibu hamil yang telah memenuhi standar mencapai 96,45%. Permasalahan utama yang menyebabkan sisa ibu hamil belum terlayani sesuai standar adalah hambatan geografis dan ekonomi. Secara spesifik, masih terdapat ibu hamil yang memeriksakan diri di luar Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), sehingga sulit terdata dan terpantau oleh sistem Puskesmas setempat. Selain itu, kendala jarak tempuh yang jauh menuju FKTP, serta biaya pemeriksaan penunjang (seperti USG) yang kurang terjangkau bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu, menjadi faktor penghalang signifikan dalam pemenuhan standar pelayanan antenatal secara menyeluruh.
2. Cakupan pelayanan persalinan sesuai standar telah mencapai 99,10%, sebuah angka yang mendekati universal. Sisa 0,90% ibu bersalin yang belum terlayani sesuai standar disebabkan oleh beberapa kendala utama, yaitu: (1) Jarak tempuh menuju Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang masih cukup jauh, menjadi hambatan bagi ibu bersalin di daerah terpencil. (2) Adanya kasus persalinan yang dilakukan di luar wilayah FKTP dan/atau tidak dilaporkan, menyebabkan ibu tersebut tidak tercatat dalam cakupan standar pelayanan, serta (3) Masih terdapat sebagian kecil ibu bersalin yang secara sengaja atau tidak sengaja tidak mengikuti prosedur persalinan yang ditetapkan sesuai standar kesehatan.
3. Cakupan pelayanan bayi baru lahir sesuai standar mencapai 97,66%. Capaian yang tinggi ini masih dihadapkan pada tantangan untuk mencapai cakupan penuh. Hambatan utama yang teridentifikasi adalah: (1) Masih terdapat bayi baru lahir yang belum mendapatkan pelayanan sesuai standar, baik dari sisi





- kuantitas (jumlah kunjungan/perawatan) maupun dari sisi kualitas layanan. (2) Faktor geografis berupa akses yang sulit menuju fasilitas kesehatan menghambat pemenuhan standar pelayanan pada periode emas ini. (3) Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya dan prosedur pelayanan bayi baru lahir sesuai standar juga menjadi faktor penting yang menyebabkan orang tua tidak membawa bayinya untuk mendapatkan seluruh rangkaian pemeriksaan yang diwajibkan.
4. Cakupan pelayanan kesehatan Balita sesuai standar telah mencapai 98,22%, mencerminkan keberhasilan yang tinggi dalam menjangkau populasi krusial ini. Namun, untuk mencapai cakupan penuh, tantangan yang dihadapi antara lain: (1) Masih terdapat tenaga kesehatan yang belum terlatih secara optimal, sehingga memengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan. (2) Banyaknya sasaran Balita yang berada di wilayah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau, menghambat aksesibilitas pelayanan rutin. (3): Adanya Balita yang berdomisili di luar wilayah kerja Kabupaten/Kota namun tetap dilayani oleh fasilitas setempat. Meskipun pelayanan diberikan, mereka tidak dapat dimasukkan sebagai cakupan resmi Kabupaten Tasikmalaya, sehingga secara statistik menahan angka capaian 100%.
 5. Cakupan skrining kesehatan anak pada usia pendidikan dasar telah mencapai 97,39%. Kesenjangan yang ada disebabkan oleh masalah sumber daya manusia (SDM) dan dukungan teknis. Permasalahan utama adalah keterbatasan jumlah petugas kesehatan yang tersedia. Selain itu, terdapat keterbatasan petugas non-kesehatan yang terlatih (seperti guru atau kader) yang seharusnya dapat membantu pelaksanaan skrining kesehatan di sekolah. Kondisi ini menyebabkan sebagian kecil anak usia pendidikan dasar belum mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar yang ditetapkan.
 6. Cakupan skrining kesehatan sesuai standar bagi Warga Negara Indonesia (WNI) usia 15-59 tahun belum mencapai target penuh karena kendala utama pada keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Keterbatasan ini mencakup kurangnya jumlah petugas kesehatan yang tersedia untuk melaksanakan skrining secara





- luas dan merata, terutama di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan dalam kegiatan di luar gedung (seperti Posbindu atau screening massal). Kondisi ini menyebabkan upaya penjangkauan sasaran usia produktif menjadi tidak optimal, sehingga sebagian WNI usia 15-59 tahun belum mendapatkan pelayanan skrining kesehatan secara berkala sesuai dengan standar yang ditetapkan.
7. Cakupan skrining kesehatan sesuai standar bagi Warga Negara Indonesia (WNI) usia 60 tahun ke atas mencapai 96,59%, menunjukkan tingkat jangkauan yang sangat tinggi pada kelompok usia lanjut. Namun, untuk mencapai capaian universal, kendala utama yang dihadapi adalah faktor dukungan komunitas dan kesadaran masyarakat. Secara spesifik: (1) Pemberdayaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM), seperti Posbindu, masih belum optimal dalam menjangkau seluruh sasaran. (2) Lansia tidak rutin memanfaatkan layanan cek kesehatan di Posbindu, Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes), atau klinik swasta lainnya;
 8. Cakupan pelayanan kesehatan bagi penderita hipertensi telah mencapai 97,20%, menunjukkan penanganan Penyakit Tidak Menular (PTM) yang efektif. Namun, capaian 100% masih terhambat oleh beberapa kendala utama: kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk melakukan kontrol kesehatan berkala, keterbatasan dan belum optimalnya kader terlatih di Posbindu untuk skrining dan pemantauan, koordinasi dengan lintas sektor yang belum maksimal dalam mendukung program penjangkauan. dan belum terintegrasinya pelaporan dari fasilitas kesehatan swasta ke dalam sistem daerah;
 9. Cakupan pelayanan kesehatan ODGJ mencapai 94,83%. Angka ini belum maksimal karena dua hambatan utama yaitu kurangnya dukungan dari keluarga dan masyarakat di sekitar pasien, yang menghambat proses pengobatan dan rehabilitasi dan belum optimalnya koordinasi dengan lintas sektor terkait;
 10. Cakupan pelayanan penderita TB sesuai standar mencapai 97,50%, faktor penyebabnya antara lain: penentuan target menggunakan data proyeksi yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan, menyebabkan kesulitan dalam pengukuran capaian,





masih banyak tenaga kesehatan yang belum terlatih secara spesifik dalam penanganan TB, serta adanya stigma di masyarakat yang menganggap penyakit TB sebagai aib, menyebabkan penderita malu untuk diperiksa dan berobat, sehingga menghambat proses penemuan kasus baru;

11. Cakupan pemeriksaan HIV bagi Orang yang Berisiko Terinfeksi HIV (OBA) mencapai 92,84%, merupakan capaian terendah dalam SPM Kesehatan. Kesenjangan ini terutama disebabkan oleh target nasional yang sangat ambisius dalam SPM Bidang Kesehatan, lokasi hotspot kelompok risiko (seperti Wanita Penjaja Seks/WPS) masih sulit diidentifikasi dan dipantau, sehingga proses penjangkauan (suspect finding) menjadi tidak optimal, dan belum optimalnya koordinasi antara program internal kesehatan dan lintas sektor terkait dalam upaya penjangkauan dan tracing kontak.

c. Bidang Pekerjaan Umum

Jenis pelayanan dasar urusan pekerjaan umum terdiri atas pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Capaian pelaksanaan SPM bidang pekerjaan umum telah sesuai target yaitu 100%, namun berdasarkan laporan dinas terkait dalam pelaksanaannya masih menghadapi permasalahan dan kendala, antara lain:

1. Data pada dokumen RISPAM tidak relevan dengan kondisi eksisting;
2. Pelaporan kinerja penyelenggaraan SPAM belum optimal;
3. Sarana penyedotan lumpur tinja tidak beroperasi (rusak);
4. Keterbatasan SDM fasilitator lapangan pengolahan air limbah domestik;
5. Data teknis terbaru tidak tersedia, masih menggunakan RISPAM & SSK 2019–2024;
6. RISPAM dan SSK belum direviu selama 15–20 tahun;
7. Data akses dan kondisi pelayanan SPAM belum ter-update;
8. Data rumah tangga terlayani/tidak terlayani belum diperbarui;
9. Perhitungan kebutuhan SPM air limbah domestik belum optimal akibat data dukung terbatas;





10. Jakstra SPAM Daerah belum tersedia
11. Data prioritas pengembangan SPALD-S, SPALD-T, dan pendanaan belum tersedia;
12. Perhitungan biaya pemeliharaan dan sarpras air limbah belum memadai;
13. Jakstrada SPAM Kabupaten/Kota belum disusun;
14. Integrasi sistem informasi antar-OPD belum efektif;
15. Pemantauan penyelenggaraan pelayanan air minum & air limbah domestik belum optimal;
16. Keterbatasan anggaran pengembangan dan rehabilitasi sarpras;
17. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik;
18. Koordinasi lintas sektor belum optimal;
19. Sarpras SPAM dan SPALD mengalami penurunan fungsi (*aging*);
20. Sistem pemantauan berbasis GIS belum tersedia.

Upaya penanganan yang telah dilakukan oleh Dinas terkait antara lain:

1. Pengalokasian anggaran untuk review RISPAM pada tahun mendatang;
2. Peningkatan koordinasi antar-perangkat daerah untuk memperbaiki mekanisme pelaporan;
3. Penyediaan anggaran pemeliharaan dan operasional sarana pengangkutan;
4. Pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM serta kerja sama dengan akademisi/tenaga ahli;
5. Pemutakhiran data melalui survei lapangan dan integrasi database sanitasi;
6. Perencanaan review dokumen perencanaan SPAM dan sanitasi;
7. Penyusunan sistem pemutakhiran data secara berkala;
8. Integrasi data pelayanan dengan OPD terkait dan survei verifikasi lapangan;
9. Penguatan sistem pengumpulan data dan pendampingan teknis perhitungan kebutuhan;
10. Penyusunan Kebijakan dan Strategi SPAM Daerah;
11. Penyusunan daftar prioritas kegiatan dan rencana pendanaan tahunan;





12. Penambahan komponen biaya pemeliharaan dalam perencanaan SPM;
13. Percepatan penyusunan Jakstrada oleh daerah;
14. Penyusunan mekanisme pemantauan rutin dan berbasis indikator;
15. Pengembangan sistem informasi terintegrasi sanitasi dan air minum;
16. Optimalisasi perencanaan pendanaan serta pengajuan dukungan ke pemerintah pusat/provinsi;
17. Penguatan forum koordinasi sanitasi dan air minum;
18. Sosialisasi dan edukasi terkait pentingnya pengelolaan air limbah;
19. Perencanaan rehabilitasi dan peningkatan kapasitas sarpras;
20. Pengembangan sistem pemetaan berbasis spasial untuk wilayah pelayanan.

d. Bidang Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Jenis pelayanan dasar bidang urusan perumahan dan permukiman meliputi Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dan Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota. Capaian pelaksanaan SPM bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman telah sesuai target yaitu 100%, namun berdasarkan laporan dinas terkait dalam pelaksanaannya masih menghadapi permasalahan dan kendala, antara lain:

1. Belum ada keseragaman pemahaman terkait implementasi SPM urusan perumahan rakyat;
2. Koordinasi dengan tim satgas bencana dalam pendataan korban bencana dan kerusakan rumah belum optimal;
3. Rembug warga untuk penentuan calon penerima dan calon lokasi tidak dilaksanakan;
4. Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana dan lahan potensial relokasi belum optimal;
5. Komponen perhitungan biaya penyediaan/rehabilitasi rumah layak huni tidak sesuai Permen PUPR 13/2023;





6. Pemahaman dan koordinasi penganggaran SPM Perumahan belum optimal;
7. Penganggaran pemenuhan SPM Perumahan hanya bergantung pada APBD;
8. Basis data rumah rusak dan RTLH belum terintegrasi dan terverifikasi;
9. Mekanisme verifikasi teknis kondisi rumah pascabencana belum baku;
10. Ketersediaan lahan relokasi terbatas.

Selanjutnya untuk mengatasi berbagai permasalahan, beberapa solusi yang telah dilaksanakan oleh Dinas terkait, antara lain:

1. Melakukan penyamaan persepsi melalui sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi SPM;
2. Meningkatkan koordinasi dan integrasi pendataan dengan satgas bencana;
3. Melakukan pemetaan teknis lokasi rawan bencana dan inventarisasi lahan relokasi.
4. Melakukan penyesuaian perhitungan biaya sesuai regulasi yang berlaku;
5. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam penyusunan anggaran SPM Perumahan;
6. Mengupayakan sumber pendanaan alternatif melalui pemerintah provinsi/pusat dan skema kolaboratif;
7. Penyusunan dan pemutakhiran basis data terpadu melalui verifikasi lapangan;
8. Penyusunan SOP verifikasi teknis rumah rusak dan rehabilitasi;
9. Koordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk identifikasi dan penetapan lahan relokasi.

e. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) di Kabupaten Tasikmalaya secara umum menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam aspek pelayanan hukum, namun perlu peningkatan dalam aspek kapasitas sumber





daya manusia (SDM). Capaian layanan hukum telah mencapai angka 99,64%, yang berarti hampir seluruh kasus pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang ditangani Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah ditindaklanjuti dengan layanan memadai kepada masyarakat terdampak. Angka ini mencerminkan efektivitas dan responsivitas yang tinggi dalam penegakan ketertiban umum.

Namun, capaian untuk standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan Perlindungan Masyarakat masih berada di angka 89,18%. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan SPM bidang Trantibumlinmas, antara lain:

1. Pendataan warga negara, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan aset warga pada radius 0-50 meter dari lokasi penegakan Perda/Perkada yang terdampak belum optimal;
2. Rekapitulasi Perda dan Perkada yang memuat sanksi pada aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Tasikmalaya belum sepenuhnya termutakhirkan;
3. Peningkatan kapasitas SDM (Satpol PP, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, dan Satuan Perlindungan Masyarakat/Linmas) dalam pelatihan dasar, fungsional, dan teknis belum optimal;
4. Pelaksanaan fungsi penyidikan oleh PPNS dan fungsi Linmas belum berjalan optimal;
5. Kondisi sarana dan prasarana belum memenuhi standar minimal sesuai Permendagri Nomor 17 Tahun 2019;
6. Pelayanan kerugian materiil dan biaya pengobatan bagi pihak terdampak belum dapat diterapkan secara optimal.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, langkah-langkah yang dilakukan meliputi:

1. Menyusun SOP dan menyediakan format pendataan (manual/digital), serta melaksanakan pelatihan bagi petugas pendataan lapangan;
2. Melakukan koordinasi aktif dengan Bagian Hukum dan monitoring berkala pembaruan pada aplikasi JDIH;
3. Menyusun rencana pengembangan kompetensi dan melaksanakan pelatihan teknis, dasar, dan fungsional secara berkelanjutan bagi SDM terkait;





4. Melakukan optimalisasi pembinaan teknis operasional dan evaluasi kinerja PPNS dan Linmas;
5. Menyusun dokumen pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana sesuai Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 dan menetapkan prioritas pemenuhannya setiap tahun;
6. Menyusun standar perhitungan dan membentuk Tim Penilai Kerugian akibat pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada.

f. Bidang Sosial

Meskipun capaian target telah terpenuhi, pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang sosial masih menghadapi beberapa permasalahan krusial. Salah satunya adalah data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), khususnya yang terkait dengan SPM, yang belum sepenuhnya merupakan hasil verifikasi dan validasi, melainkan masih berdasarkan usulan dari daerah. Selain itu, koordinasi antar lintas sektor dalam penanganan masalah sosial dinilai belum optimal.

Untuk mengatasi kendala tersebut, sejumlah upaya telah dan akan terus dilakukan. Upaya ini meliputi peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dan lintas daerah dalam penanganan PPKS, terutama yang berkaitan dengan SPM. Selanjutnya, dilakukan peningkatan upaya pemenuhan kebutuhan dasar yang relevan dengan SPM, serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Tidak kalah penting, dilakukan juga peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk penanganan PPKS.

2.2 Gambaran Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel menjadi kunci untuk menjamin keberlanjutan program pembangunan, pelayanan publik, dan penguatan kapasitas fiskal daerah.





Proses pengelolaan keuangan daerah mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. Seluruh proses ini diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang menjadi instrumen utama dalam pelaksanaan pembangunan. Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) disusun setiap akhir tahun anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban fiskal.

Pengelolaan keuangan daerah menghadapi sejumlah tantangan, seperti ketergantungan pada dana transfer pusat, rendahnya optimalisasi PAD, serta meningkatnya kebutuhan belanja infrastruktur dan layanan dasar. Untuk itu, diperlukan strategi pengelolaan yang menjaga keseimbangan antara pendapatan, belanja, dan pembiayaan, guna menciptakan kondisi fiskal yang sehat dan berkelanjutan.

Penyusunan keuangan daerah dalam RPJMD berpedoman pada sejumlah regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta peraturan teknis lainnya yang mengatur mekanisme pengelolaan APBD.

Periode tahun 2020–2025 merupakan rentang waktu yang sarat dinamika dalam pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Beberapa faktor eksternal maupun internal sangat mempengaruhi struktur dan pola kebijakan fiskal, baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah.

Pada periode Tahun 2020–2021 Indonesia mengalami dampak akibat terjadinya Pandemi COVID-19 yang memberi tekanan besar terhadap pendapatan daerah dan mengalami penyesuaian dan *refocusing* anggaran khususnya pendapatan asli daerah (PAD) dan transfer pusat. Demikian juga dengan Belanja daerah yang difokuskan pada penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, serta dukungan pemulihan ekonomi lokal. Hal tersebut seiring dengan terbitnya penyesuaian regulasi melalui kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri dan peraturan perundangan terkait penanganan pandemi.



Memasuki tahun 2022, merupakan periode pemulihan fiskal bertahap, dimulai dari sektor pendapatan daerah, terutama dari sektor-sektor yang sebelumnya terdampak pandemi seperti retribusi dan pajak daerah. Pemerintah daerah mulai kembali melaksanakan belanja pembangunan secara lebih optimal, seiring berkurangnya tekanan akibat pandemi. Meskipun defisit anggaran masih terjadi, namun lebih terkendali dibanding dua tahun sebelumnya.

Pada periode selanjutnya yaitu tahun 2023, seiring dengan perubahan aturan dan kebijakan di pusat, maka keuangan daerah mengalami konsolidasi fiskal dan penyesuaian kebijakan. Pemerintah Daerah fokus pada peningkatan efisiensi belanja dan optimalisasi PAD yang diimbangi dengan upaya pemenuhan target Pembangunan melalui penyelarasan dan sinkronisasi antara program prioritas daerah dengan kebijakan nasional.

Tantangan berikutnya pada periode tahun 2024 yang merupakan tahun politik dan transisi pemerintahan pusat dan daerah. Perubahan kebijakan nasional menjelang pemilu dan transisi pemerintahan berdampak pada dinamika alokasi transfer pusat. Belanja cenderung lebih berhati-hati, dengan kecenderungan peningkatan belanja rutin dan penyesuaian kegiatan strategis. Di sisi lain, pemerintah daerah tetap didorong untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan pelayanan dasar masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang masih fluktuatif.

Terakhir periode tahun 2025 merupakan masa penyesuaian arah kebijakan paska-pemilu yang menjadi masa penyesuaian awal atas arah pembangunan yang selaras dengan visi-misi kepala daerah terpilih. Penyusunan anggaran diarahkan untuk mendukung target-target jangka menengah serta RPJMD baru. Fokus kembali pada peningkatan PAD berkelanjutan, penguatan tata kelola keuangan, serta efisiensi dan efektivitas belanja publik.

Keuangan daerah tahun 2025–2030 diperkirakan akan mengalami pergeseran menuju sistem yang lebih adaptif, berkelanjutan, dan berbasis kinerja. Tantangan fiskal seperti keterbatasan ruang fiskal, ketergantungan pada transfer pusat, dan tekanan belanja pegawai masih akan menjadi perhatian. Namun dengan perencanaan strategis dan tata kelola yang baik, daerah dapat



mengoptimalkan potensi fiskalnya untuk mendukung pembangunan yang inklusif dan berdaya saing. Periode 2025–2030 ini diproyeksikan menjadi fase penting bagi Kabupaten Tasikmalaya dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah dan mendukung pencapaian visi pembangunan jangka menengah dan panjang. Dalam rentang waktu ini, pengelolaan keuangan daerah diarahkan untuk lebih adaptif, efisien, dan berbasis hasil (*outcome*), dengan tetap memperhatikan kesinambungan fiskal.

Dalam periode 2025–2030, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dihadapkan pada tantangan untuk menjaga stabilitas fiskal sambil tetap mendorong pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Upaya optimalisasi pendapatan, peningkatan efisiensi belanja, dan reformasi tata kelola menjadi kunci dalam menciptakan struktur keuangan daerah yang sehat, adaptif, dan pro-rakyat. Dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang konsisten, keuangan daerah diharapkan mampu menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Tasikmalaya.





2.2.1 Kinerja Keuangan Daerah

Dalam periode tahun 2020 hingga 2024, struktur pendapatan dan belanja APBD Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan dinamika yang mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan fiskal serta mendukung program pembangunan daerah. Secara lengkap berikut data Realisasi APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 – 2024.

Tabel 2.86
Realisasi APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 - 2024

NO	URAIAN		REALISASI TAHUN (Rp)				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pendapatan Asli Daerah		305.887.233.378,47	375.030.394.259,50	305.275.588.113,46	317.593.241.698,35	358.951.018.708,80
	a.	Pajak Daerah	69.688.389.521,00	75.360.502.247,00	94.355.650.449,00	98.097.622.047,00	104.138.533.398,00
	b.	Retribusi Daerah	9.254.128.255,00	5.150.543.572,00	5.563.282.922,00	5.815.257.303,00	217.094.989.467,97
	c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	29.200.666.163,00	23.193.457.737,00	24.739.258.843,00	24.152.104.549,00	25.815.979.302,00
	d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	197.744.049.439,47	271.325.890.703,50	180.617.395.899,46	189.528.257.799,35	11.901.516.540,83
2.	Pendapatan Transfer		3.091.122.019.429,00	2.676.601.440.691,00	2.829.876.900.161,00	3.019.170.020.300,00	3.202.211.167.547,00
	a.	Transfer Pemerintah Pusat	2.400.915.175.531,00	2.468.959.174.520,00	2.551.215.838.278,00	2.685.908.607.010,00	2.894.758.114.030,00
		1) Dana Perimbangan	2.001.464.118.531,00	2.036.322.383.520,00	2.140.944.286.278,00	2.274.525.069.310,00	2.472.812.378.030,00
		a) Dana Transfer Umum	1.466.494.939.447,00	1.481.129.625.568,00	1.450.960.744.561,00	1.540.920.711.173,00	1.663.102.562.309,00
		(1) DBH	85.302.380.447,00	105.137.340.568,00	89.440.051.911,00	75.129.936.173,00	96.307.934.000,00
		(2) DAU	1.381.192.559.000,00	1.375.992.285.000,00	1.361.520.692.650,00	1.465.790.775.000,00	1.566.794.628.309,00
		b) Dana Transfer Khusus	534.969.179.084,00	555.192.757.952,00	689.983.541.717,00	733.604.358.137,00	809.709.815.721,00
		(1) DAK Fisik	112.038.741.532,00	122.403.568.111,00	124.462.742.555,00	135.153.932.017,00	202.373.578.508,00





NO	URAIAN					REALISASI TAHUN (Rp)				
						2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				(2)	DAK Non Fisik	422.930.437.552,00	432.789.189.841,00	565.520.799.162,00	598.450.426.120,00	607.336.237.213,00
		2)	Dana Insentif Fiskal Daerah			-	29.749.130.000,00	-	11.645.735.000,00	15.091.502.000,00
		3)	Dana Otonomi Khusus			-	-	-	-	-
		4)	Dana Keistimewaan			-	-	-	-	-
		5)	Dana Desa			399.451.057.000,00	402.887.661.000,00	410.271.552.000,00	399.737.802.700,00	406.854.234.000,00
	b.	Transfer Antar Daerah				690.206.843.898,00	207.642.266.171,00	278.661.061.883,00	333.261.413.290,00	307.453.053.517,00
		1)	Pendapatan Bagi Hasil			147.162.587.267,00	153.469.596.821,00	178.241.735.502,00	190.648.011.341,00	200.428.161.317,00
		2)	Bantuan Keuangan			543.044.256.631,00	54.172.669.350,00	100.419.326.381,00	142.613.401.949,00	107.024.892.200,00
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah					196.222.755.544,00	189.937.724.968,00	15.350.305.144,00	9.367.230.145,00	5.378.176.655,00
	a.	Hibah				195.993.000.000,00	4.486.194.500,00	15.091.990.992,00	9.367.230.145,00	5.378.176.655,00
	b.	Dana Darurat				-	-	-	-	-
	c.	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan				229.755.544,00	185.451.530.468,00	258.314.152,00	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH					3.593.232.008.351,47	3.241.569.559.918,50	3.150.502.793.418,46	3.346.130.492.143,35	3.566.540.362.910,80
1.	Belanja Operasi					2.312.921.150.685,69	2.153.448.062.426,00	2.184.268.734.960,00	2.267.250.757.208,00	2.630.302.009.078,49
	a.	Belanja Pegawai				1.432.764.612.297,00	1.351.143.258.118,00	1.306.693.637.113,00	1.290.521.364.264,00	1.410.012.558.941,00
	b.	Belanja Barang dan Jasa				692.088.685.806,69	721.361.637.808,00	749.733.799.805,00	839.881.917.814,00	971.819.413.065,49
	c.	Belanja Bunga				-	-	-	-	-
	d.	Belanja Subsidi				-	-	-	-	-
	e.	Belanja Hibah				170.518.750.000,00	80.943.166.500,00	122.782.898.042,00	133.862.975.130,00	242.165.537.072,00
	f.	Belanja Bantuan Sosial				17.549.102.582,00	-	5.058.400.000,00	2.984.500.000,00	6.304.500.000,00
2.	Belanja Modal					567.241.060.116,00	239.410.778.173,00	306.853.259.829,00	342.668.586.667,00	421.159.805.198,00





NO	URAIAN		REALISASI TAHUN (Rp)				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	a.	Belanja Tanah	4.885.375.000,00	16.001.585.000,00	15.496.596.040,00	2.909.382.000,00	2.802.517.200,00
	b.	Belanja Peralatan dan Mesin	355.508.496.283,00	80.344.113.610,00	73.466.519.983,00	88.301.672.635,00	126.631.707.661,00
	c.	Belanja Bangunan dan Gedung	105.698.132.543,00	62.858.296.986,00	61.186.317.085,00	105.486.942.192,00	91.942.929.583,00
	d.	Belanja Jalan	65.641.671.647,00	55.317.239.010,00	139.510.648.603,00	122.378.296.749,00	164.385.225.451,00
	e.	Belanja Irigasi dan Jaringan					
	f.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	35.507.384.643,00	24.876.817.170,00	16.753.399.861,00	23.584.794.501,00	35.113.975.303,00
	g.	Belanja Modal Aset Lainnya	-	12.726.397,00	439.778.257,00	7.498.590,00	283.450.000,00
3.	Belanja Tidak Terduga		89.770.961.269,00	30.599.444.557,00	15.926.092.876,00	30.279.044.577,00	26.020.100.684,00
4.	Belanja Transfer		717.637.025.120,00	740.060.465.000,00	664.301.485.000,00	661.560.573.700,00	664.070.085.400,00
	a.	Belanja Bagi Hasil	9.024.599.000,00	8.074.504.000,00	8.847.620.000,00	9.413.659.000,00	11.919.051.400,00
	b.	Belanja Bantuan Keuangan	708.612.426.120,00	731.985.961.000,00	655.453.865.000,00	652.146.914.700,00	652.151.034.000,00
	JUMLAH BELANJA DAERAH		3.687.570.197.190,69	3.163.518.750.156,00	3.171.349.572.665,00	3.301.758.962.152,00	3.741.552.000.360,49
	SURPLUS/ (DEFISIT)		(94.338.188.839,22)	78.050.809.762,50	(20.846.779.246,54)	44.371.529.991,35	(175.011.637.449,69)
1.	Penerimaan Pembiayaan		215.110.501.718,18	117.876.412.772,96	195.927.222.535,46	144.580.444.143,92	269.375.603.676,27
	a.	SiLPA	215.110.501.718,18	117.876.412.772,96	195.927.222.535,46	144.580.444.143,92	132.951.974.135,27
	b.	Pencairan Dana Cadangan					60.000.000.000,00
	c.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan					
	d.	Penerimaan Pinjaman Daerah					76.423.629.541,00
	e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau					
	f.	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.					
2.	Pengeluaran Pembiayaan		2.974.773.900,00	-	30.499.999.145,00	56.000.000.000,00	56.423.629.541,00



NO	URAIAN		REALISASI TAHUN (Rp)				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	a.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	2.974.773.900,00				56.423.629.541,00
	b.	Penyertaan Modal Daerah			20.499.999.145,00	6.000.000.000,00	
	c.	Pembentukan Dana Cadangan			10.000.000.000,00	50.000.000.000,00	
	d.	Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau					
	e.	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan					
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO		212.135.727.818,18	117.876.412.772,96	165.427.223.390,46	88.580.444.143,92	212.951.974.135,27
			117.797.538.978,96	195.927.222.535,46	144.580.444.143,92	132.951.974.135,27	37.940.336.685,58

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Tasikmalaya (Audited), 2025



**a. Pendapatan Daerah**

Pendapatan Daerah merupakan unsur penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah selama periode RPJMD Tahun 2025–2029. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Secara umum pada APBD Kabupaten Tasikmalaya periode 2020–2024, total pendapatan daerah mengalami fluktuasi, namun menunjukkan kecenderungan meningkat pada tahun 2024. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan tren peningkatan sebesar 5,27%. Peningkatan signifikan terlihat pada komponen Pajak Daerah selama periode 5 tahun terakhir (2020–2024), rata-rata realisasi Pajak Daerah mengalami tren peningkatan sebesar 10,87%. Pendapatan Transfer tetap menjadi kontributor utama pendapatan daerah, dengan nilai yang jauh lebih besar dibanding PAD. Meskipun sempat menurun pada tahun 2021 dan 2022, namun terjadi peningkatan kembali pada tahun 2023 dan 2024, mencerminkan pulihnya alokasi transfer pusat dan dana perimbangan. Secara keseluruhan, pendapatan daerah pada tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang mencerminkan peningkatan kapasitas fiskal daerah. Kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah mencapai 10,06%.

b. Belanja Daerah

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan, meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten



Tasikmalaya selama lima tahun terakhir mengalami dinamika yang erat kaitannya dengan kondisi fiskal dan prioritas pembangunan daerah. Belanja daerah pada tahun 2020–2022 relatif stabil dengan fokus pada penanganan dampak pandemi COVID-19, sehingga sebagian besar diarahkan untuk belanja wajib dan mendesak, terutama di sektor kesehatan dan jaring pengaman sosial.

Selanjutnya pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan peningkatan belanja yang lebih signifikan, seiring dengan membaiknya kondisi fiskal dan difokuskan pada belanja pembangunan infrastruktur, pendidikan, serta reformasi pelayanan publik. Peningkatan belanja tersebut diharapkan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, peningkatan kualitas layanan publik, dan pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD dan visi-misi kepala daerah.

b. Pembiayaan Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pada tabel diatas, secara umum pada periode tahun 2020-2024 realisasi pembiayaan daerah menunjukkan angka yang fluktuatif dengan kecenderungan terdapat penurunan, tetapi pada tahun 2024 terdapat peningkatan kembali yang cukup signifikan. Peningkatan tersebut terjadi diantaranya karena Penerimaan Pembiayaan menjadi salah satu sumber pembiayaan belanja daerah yaitu untuk pelaksanaan Pilkada Serentak yang berasal dari dana Cadangan sebesar Rp60.000.000.000,00. Selain itu pada tahun 2024 terdapat realisasi pinjaman daerah oleh RSUD Kiai Haji Zaenal Musthafa sesuai dengan hasil audit BPK.





2.2.2 Neraca Daerah

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.





Tabel 2.87
Neraca Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	TAHUN (Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ASET					
	A. Aset Lancar	230.822.094.530,77	247.379.139.092,21	204.689.906.105,31	178.657.332.644,62	135.211.754.943,00
	B. Investasi Jangka Panjang	152.160.484.885,94	168.669.725.263,12	208.245.522.229,03	255.021.620.082,72	216.059.962.627,14
	C. Aset Tetap	4.541.739.966.349,38	4.132.237.318.577,99	3.953.482.659.152,05	3.755.573.353.179,40	3.704.405.019.146,89
	Dana Cadangan			10.000.000.000,00	60.000.000.000,00	-
	D. Aset Lainnya	142.163.008.745,10	161.131.076.691,37	198.785.408.894,99	176.203.513.641,75	159.010.669.292,37
	Properti Investasi					30.354.161.072,67
	JUMLAH ASET	5.066.885.554.511,19	4.709.417.259.624,69	4.575.203.496.381,38	4.425.455.819.548,49	4.245.041.567.082,07
2	KEWAJIBAN					
	A. Kewajiban Jangka Pendek	42.158.086.959,16	18.524.490.188,33	37.602.224.816,33	63.727.275.944,58	133.112.668.071,99
	B. Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	42.158.086.959,16	18.524.490.188,33	37.602.224.816,33	63.727.275.944,58	133.112.668.071,99
3	EKUITAS					
	Ekuitas	5.024.727.467.552,03	4.690.892.769.436,36	4.537.601.271.565,05	4.361.728.543.603,91	4.111.928.899.010,08
	JUMLAH EKUITAS	5.024.727.467.552,03	4.690.892.769.436,36	4.537.601.271.565,05	4.361.728.543.603,91	4.111.928.899.010,08
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		5.066.885.554.511,19	4.709.417.259.624,69	4.575.203.496.381,38	4.425.455.819.548,49	4.245.041.567.082,07

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Tasikmalaya, 2025





Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada periode tahun 2020-2024 mengalami penurunan dengan rata-rata 4,31%. Rata-rata pertumbuhan untuk masing-masing jenis aset antara lain Investasi Jangka Panjang rata-rata tumbuh sebesar 10,37%, Aset Lainnya dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 3,90% sedangkan Aset Lancar dan Aset Tetap mengalami penurunan rata-rata sebesar 11,78% dan 4,93%.

Kewajiban Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya pada periode tahun 2020-2024 mengalami pertumbuhan dengan rata-rata pertumbuhan selama periode tersebut sebesar 56,32% yang berasal dari Kewajiban Jangka Pendek.

Ekuitas Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada periode tahun 2020-2024 mengalami penurunan dari tahun ke tahun dengan rata-rata penurunan sebesar 4,88%.

2.2.3 Kerangka Pendanaan

a. Proyeksi Pendapatan

Proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2026–2030 disusun dengan mempertimbangkan arah kebijakan fiskal nasional, kondisi keuangan pusat, potensi sumber pendapatan lokal serta dinamika ekonomi makro dan kebijakan transfer ke daerah. Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, pendapatan daerah diperkirakan akan mengalami tren peningkatan secara bertahap, namun tetap dibayangi oleh berbagai tantangan fiskal nasional yang bersifat struktural.

Pemerintah pusat, melalui kebijakan fiskal yang ekspansif namun terarah, terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara inklusif dan berkelanjutan. Fokus utama adalah penguatan sumber-sumber penerimaan negara, efisiensi belanja, dan peningkatan kualitas transfer ke daerah. Dalam konteks ini, kebijakan Dana Transfer ke Daerah (TKD) diproyeksikan semakin diarahkan untuk memperkuat kinerja fiskal daerah, mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan.

Seiring dengan implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU





HKPD), pemerintah daerah diharapkan mampu menggali potensi PAD secara lebih optimal, melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, digitalisasi sistem pajak daerah dan retribusi daerah, penguatan kelembagaan dan kapasitas SDM pengelola pendapatan serta peningkatan kontribusi BUMD dan kemitraan strategis. Oleh karena itu, PAD diproyeksikan meningkat secara bertahap, sejalan dengan pemulihan ekonomi dan penguatan kapasitas fiskal daerah.

Namun demikian, proyeksi pendapatan dari dana transfer pusat masih akan menjadi komponen utama pendapatan daerah hingga tahun 2030. Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tetap menjadi instrumen penting dalam menjaga kesinambungan layanan publik dasar dan mendukung agenda pembangunan prioritas nasional di daerah. Dalam merespons dinamika kebijakan fiskal nasional dan kondisi fiskal pusat yang masih menghadapi tekanan defisit dan pembiayaan utang, daerah perlu menyusun strategi penguatan pendapatan yang berkelanjutan, berbasis data, dan sesuai dengan potensi ekonomi wilayah masing-masing.

b. Proyeksi Belanja

Proyeksi belanja daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2026–2030 disusun dengan mempertimbangkan kondisi fiskal daerah yang masih menghadapi keterbatasan ruang fiskal, ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, serta dinamika kebutuhan pembangunan daerah yang semakin kompleks.

Selama periode lima tahun ke depan, belanja daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian visi pembangunan jangka menengah dan tujuan strategis daerah, dengan tetap menjaga prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Fokus belanja diarahkan pada program prioritas yang selaras dengan RPJMD, RKPD tahunan, dan prioritas pembangunan nasional, terutama dalam peningkatan kualitas layanan dasar, pengurangan kemiskinan, penguatan ekonomi lokal, serta pembangunan infrastruktur dasar yang merata dan berkelanjutan.

Kondisi fiskal Kabupaten Tasikmalaya saat ini masih ditandai oleh:



- Ketergantungan terhadap dana transfer pusat (seperti DAU dan DAK), yang mencapai lebih dari 70% total pendapatan daerah;
- Rendahnya kontribusi PAD, meskipun terdapat potensi yang masih bisa digali dari sektor pertanian, perdagangan, dan jasa;
- Keterbatasan ruang fiskal akibat besarnya porsi belanja pegawai dan belanja wajib lainnya, yang menyisakan ruang sempit bagi belanja pembangunan (belanja modal).

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, proyeksi belanja daerah tahun 2026–2030 akan diarahkan pada beberapa strategi utama:

1) Pengendalian Belanja Operasi

Belanja operasi, terutama belanja pegawai, akan dikendalikan secara ketat agar tidak menggerus kemampuan belanja pembangunan. Optimalisasi belanja barang dan jasa juga akan dilakukan melalui efisiensi pengadaan dan digitalisasi proses kerja pemerintahan.

2) Peningkatan Porsi Belanja Modal

Belanja modal akan diprioritaskan untuk mendukung infrastruktur dasar, konektivitas antarwilayah, serta sarana dan prasarana layanan publik. Namun peningkatan belanja ini tetap bergantung pada ketersediaan ruang fiskal dan dukungan dari dana transfer pusat.

3) Peningkatan Kualitas Belanja Daerah

Pendekatan berbasis kinerja dan hasil (*outcome-based budgeting*) akan terus ditingkatkan untuk memastikan bahwa setiap belanja publik memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

4) Pemanfaatan Skema Pembiayaan Alternatif

Dalam rangka mengatasi keterbatasan fiskal, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya harus sudah mencari sumber pembiayaan Pembangunan lain, seperti skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dan pinjaman daerah yang tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian fiskal.

Secara umum, struktur belanja daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2026–2030 diproyeksikan dengan kondisi belanja operasi tetap dominan, namun porsinya akan ditekan secara bertahap. Belanja





modal diproyeksikan meningkat secara gradual untuk mendukung kebutuhan infrastruktur dan layanan dasar. Belanja tidak terduga dan belanja transfer disesuaikan secara proporsional sesuai kondisi dan kebutuhan aktual. Dengan proyeksi tersebut Kabupaten Tasikmalaya diharapkan dapat mengelola keuangan daerah secara lebih produktif, adaptif, dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan pembangunan lima tahun ke depan.

c. Proyeksi Pembiayaan

Proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2026–2030 disusun sebagai bagian integral dari upaya menjaga keseimbangan anggaran daerah sekaligus mendukung pelaksanaan program pembangunan prioritas yang belum sepenuhnya terdani melalui pendapatan daerah. Dalam lima tahun ke depan, pembiayaan daerah diperkirakan tetap berperan penting, terutama dalam mengatasi kesenjangan antara kebutuhan belanja pembangunan dan kapasitas pendapatan riil.

Secara umum, struktur pembiayaan daerah diproyeksikan masih akan bertumpu pada dua komponen utama, yaitu: penerimaan pembiayaan daerah, yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan potensi penerimaan pinjaman daerah; serta pengeluaran pembiayaan, terutama dalam bentuk penyertaan modal (investasi) kepada BUMD.

Berdasarkan tabel 2.87 menunjukkan, bahwa proyeksi pendapatan dan proyeksi belanja pada tahun anggaran 2026 mengalami defisit dimana proyeksi belanja lebih besar daripada proyeksi pendapatan sehingga untuk menutupi defisit tersebut sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dalam hal APBD diperkirakan defisit Pemerintah Daerah dapat melakukan alternatif pembiayaan yang berasal dari pinjaman daerah.

Pinjaman Daerah dipertimbangkan sebagai alternatif pembiayaan dalam pembangunan infrastruktur jalan yang merupakan program prioritas dalam upaya menjawab tuntutan masyarakat yang menghendaki peningkatan kualitas jalan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, akses terhadap pelayanan dasar, kelancaran





distribusi hasil pertanian, destinasi wisata dan konektivitas antar wilayah.

Pembiayaan daerah terdiri dari:

1) Penerimaan Pembiayaan Daerah

SiLPA Tahun Sebelumnya diproyeksikan tetap menjadi sumber utama penerimaan pembiayaan. Namun demikian, seiring dengan upaya peningkatan akurasi perencanaan dan penyerapan anggaran, tren besaran SiLPA diharapkan menurun secara gradual. SiLPA akan digunakan secara selektif untuk membiayai kegiatan prioritas yang tertunda atau mendesak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa dalam hal APBD diperkirakan defisit ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut diantaranya dapat berasal dari pinjaman daerah. Pinjaman Daerah akan dipertimbangkan sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur strategis dan pelayanan dasar yang tidak dapat sepenuhnya dibiayai dari APBD murni. Namun, pemanfaatannya tetap mempertimbangkan kapasitas fiskal, batasan defisit, dan kemampuan bayar daerah sesuai prinsip kehati-hatian fiskal dan regulasi dalam UU HKPD.

2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Penyertaan Modal Daerah (PMD) diproyeksikan meningkat secara selektif, terutama kepada BUMD yang dinilai berkontribusi terhadap pelayanan publik dan peningkatan PAD. Proyeksi ini dilakukan dengan catatan bahwa pemberian PMD didasarkan pada hasil evaluasi kinerja dan prospek usaha BUMD secara obyektif.

Pengeluaran pembiayaan lainnya, termasuk pelunasan kewajiban atau pengembalian sisa dana kegiatan tertentu, diperkirakan bersifat minimal dan tergantung pada dinamika kegiatan selama periode berjalan.

Dengan proyeksi ini, pembiayaan daerah diharapkan dapat menjadi instrumen yang adaptif dan strategis dalam mendukung pembangunan Kabupaten Tasikmalaya secara berkelanjutan, terutama di tengah tantangan fiskal dan tuntutan pelayanan publik yang terus meningkat.





Tabel 2.88
Proyeksi Kerangka Pendanaan Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2026-2030

NO	URAIAN		BASELINE TAHUN 2024	PROYEKSI TAHUN (Rp)				
				2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)			(3)	(3)	(5)	(6)	(7)
1.	Pendapatan Asli Daerah		394.687.684.463,00	484.567.750.669,30	496.616.669.030,67	509.035.184.407,09	521.836.348.226,50	535.033.707.046,01
	a.	Pajak Daerah	110.710.124.764,00	186.510.395.226,00	193.970.811.035,04	201.729.643.476,44	209.798.829.215,50	218.190.782.384,12
	b.	Retribusi Daerah	244.931.878.724,00	21.899.983.514,00	22.228.483.266,71	22.561.910.515,71	22.900.339.173,45	23.243.844.261,05
	c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	25.815.978.806,00	23.528.444.135,30	23.999.013.018,01	24.478.993.278,37	24.968.573.143,93	25.467.944.606,81
	d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	13.229.702.169,00	252.628.927.794,00	256.418.361.710,91	260.264.637.136,57	264.168.606.693,62	268.131.135.794,03
2.	Pendapatan Transfer		3.243.330.894.427,00	2.737.056.494.884,50	2.793.193.831.848,04	2.851.124.119.887,49	2.911.159.970.626,18	2.973.756.482.338,77
	a.	Transfer Pemerintah Pusat	2.934.871.427.325,00	2.466.061.467.826,00	2.516.075.527.744,00	2.567.733.862.670,89	2.621.345.236.274,09	2.677.360.794.152,24
		1) Dana Perimbangan	2.512.925.691.325,00	2.127.498.941.000,00	2.171.334.408.500,00	2.216.171.394.864,81	2.262.033.983.790,80	2.308.946.851.391,52
		a) Dana Transfer Umum	1.682.748.766.294,00	1.526.638.871.000,00	1.564.465.737.800,00	1.603.234.037.457,81	1.642.967.252.809,73	1.683.689.453.100,64
		(1) DBH	102.780.740.294,00	27.128.398.000,00	27.467.502.975,00	27.810.846.762,19	28.158.482.346,71	28.510.463.376,05
		(2) DAU	1.579.968.026.000,00	1.499.510.473.000,00	1.536.998.234.825,00	1.575.423.190.695,62	1.614.808.770.463,02	1.655.178.989.724,59
		b) Dana Transfer Khusus	830.176.925.031,00	600.860.070.000,00	606.868.670.700,00	612.937.357.407,00	619.066.730.981,07	625.257.398.290,88
		(1) DAK Fisik	210.035.030.000,00	1.550.471.000,00	1.565.975.710,00	1.581.635.467,10	1.597.451.821,77	1.613.426.339,99
		(2) DAK Non Fisik	620.141.895.031,00	599.309.599.000,00	605.302.694.990,00	611.355.721.939,90	617.469.279.159,30	623.643.971.950,89
	2)	Dana Insentif Fiskal Daerah	15.091.502.000,00	2.268.359.826,00	3.402.539.739,00	5.103.809.608,50	7.655.714.412,75	11.483.571.619,13
	3)	Dana Otonomi Khusus						
	4)	Dana Keistimewaan						
	5)	Dana Desa	406.854.234.000,00	336.294.167.000,00	341.338.579.505,00	346.458.658.197,58	351.655.538.070,54	356.930.371.141,60





NO	URAIAN		BASELINE TAHUN 2024	PROYEKSI TAHUN (Rp)				
				2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)			(3)	(3)	(5)	(6)	(7)
	b.	Transfer Antar Daerah	308.459.467.102,00	270.995.027.058,50	277.118.304.104,05	283.390.257.216,61	289.814.734.352,10	296.395.688.186,53
	1)	Pendapatan Bagi Hasil	201.374.357.052,00	160.697.363.707,00	163.511.710.852,00	166.375.466.167,00	169.289.499.571,00	172.254.696.362,00
	2)	Bantuan Keuangan	107.085.110.050,00	110.297.663.351,50	113.606.593.252,05	117.014.791.049,61	120.525.234.781,10	124.140.991.824,53
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		8.329.294.158,00	20.185.250.000,00	-	-	-	-
	a.	Hibah	8.329.294.158,00	20.185.250.000,00	-	-	-	-
	b.	Dana Darurat						
	c.	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan						
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH			3.646.347.873.048,00	3.241.809.495.553,80	3.289.810.500.878,71	3.360.159.304.294,59	3.432.996.318.852,69	3.508.790.189.384,78
1.	Belanja Operasi		2.707.527.355.959,00	2.371.133.292.212,01	2.416.399.246.143,55	2.435.619.132.858,20	2.495.244.447.253,67	2.519.950.898.696,45
	a.	Belanja Pegawai	1.455.241.412.582,00	1.539.486.004.120,00	1.531.788.574.099,40	1.524.129.631.228,90	1.516.508.983.072,76	1.508.926.438.157,39
	b.	Belanja Barang dan Jasa	1.001.914.633.901,00	715.122.797.329,21	758.273.190.132,16	785.152.019.717,30	852.397.982.268,91	884.686.978.627,06
	c.	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
	d.	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
	e.	Belanja Hibah	244.044.309.476,00	111.186.023.164,80	120.999.014.314,00	120.999.014.314,00	120.999.014.314,00	120.999.014.314,00
	f.	Belanja Bantuan Sosial	6.327.000.000,00	5.338.467.598,00	5.338.467.598,00	5.338.467.598,00	5.338.467.598,00	5.338.467.598,00
2.	Belanja Modal		431.337.567.776,00	424.031.438.462,95	230.333.905.795,14	280.577.930.339,75	292.872.067.882,32	343.007.987.947,90
	a.	Belanja Tanah	2.891.000.000,00	35.000.000.000,00	3.880.134.000,00	3.880.134.000,00	3.880.134.000,00	3.880.134.000,00
	b.	Belanja Peralatan dan Mesin	130.541.988.182,00	61.002.598.453,80	81.811.814.324,17	82.964.418.014,62	84.162.096.441,24	85.406.154.984,12
	c.	Belanja Gedung dan Bangunan	95.266.361.868,00	16.430.119.530,40	17.251.625.506,92	18.114.206.782,27	19.019.917.121,38	19.970.912.977,45
	d.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	167.182.916.294,00	306.255.959.678,75	122.047.571.164,05	170.276.410.742,86	180.467.159.519,69	228.408.025.186,34
	e.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	35.129.404.432,00	5.342.760.800,00	5.342.760.800,00	5.342.760.800,00	5.342.760.800,00	5.342.760.800,00



NO	URAIAN		BASELINE TAHUN 2024	PROYEKSI TAHUN (Rp)				
				2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)			(3)	(3)	(5)	(6)	(7)
	f.	Belanja Modal Aset Lainnya	325.897.000,00	-	-	-	-	-
3.	Belanja Tidak Terduga		30.951.050.997,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00
4.	Belanja Transfer		666.746.372.451,00	617.254.044.878,85	623.077.348.940,02	623.962.241.096,64	624.879.803.716,70	625.831.302.740,42
	a.	Belanja Bagi Hasil	14.430.338.451,00	20.841.037.874,00	21.619.929.430,18	22.429.155.399,22	23.269.916.838,89	24.143.462.664,52
	b.	Belanja Bantuan Keuangan	652.316.034.000,00	596.413.007.004,85	601.457.419.509,85	601.533.085.697,42	601.609.886.877,81	601.687.840.075,90
JUMLAH BELANJA DAERAH			3.836.562.347.183,00	3.472.059.495.553,80	3.299.810.500.878,71	3.370.159.304.294,59	3.442.996.318.852,69	3.518.790.189.384,78
SURPLUS/ (DEFISIT)			(190.214.474.135,00)	(230.250.000.000,00)	(10.000.000.000,00)	(10.000.000.000,00)	(10.000.000.000,00)	(10.000.000.000,00)
1.	Penerimaan Pembiayaan		192.951.974.135,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00
	a.	SiLPA	132.951.974.135,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00
	b.	Pencairan Dana Cadangan	60.000.000.000,00	-	-	-	-	-
	c.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan						
	d.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
	e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau						
	f.	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.						
2.	Pengeluaran Pembiayaan		2.737.500.000,00	19.885.250.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
	a.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo						
	b.	Penyertaan Modal Daerah	2.737.500.000,00	19.885.250.000,00	-	-	-	-





NO	URAIAN		BASELINE TAHUN 2024	PROYEKSI TAHUN (Rp)				
				2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)			(3)	(3)	(5)	(6)	(7)
	c.	Pembentukan Dana Cadangan			15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
	d.	Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau						
	e.	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO		190.214.474.135,00	5.114.750.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
			-	(225.135.250.000,00)	-	-	-	-

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Tasikmalaya, 2025



**a. Kebijakan Pendapatan**

Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2026–2030 diarahkan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah secara berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan dinamika kebijakan fiskal nasional yang semakin mengedepankan efisiensi, kemandirian fiskal daerah, serta transformasi struktural dalam pengelolaan keuangan pusat dan daerah.

Seiring dengan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), pemerintah pusat mendorong daerah untuk lebih proaktif dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengurangi ketergantungan terhadap transfer pusat, serta meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan daerah. Kebijakan fiskal nasional juga menekankan pada peningkatan kualitas belanja dan penguatan sinergi fiskal pusat-daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan.

Menyesuaikan arah kebijakan tersebut, kebijakan pendapatan Kabupaten Tasikmalaya tahun 2026–2030 difokuskan pada dua strategi utama:

1) Penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya akan mengoptimalkan PAD sebagai pilar utama kemandirian fiskal daerah. Fokus utama diarahkan pada:

- Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- Penerapan sistem digitalisasi dalam pelayanan dan pemungutan;
- Optimalisasi pengelolaan aset daerah dan BUMD sebagai sumber PAD produktif;
- Edukasi dan penegakan regulasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2) Pemanfaatan Dana Transfer Pusat Secara Efisien dan Tepat Sasaran

Dengan tetap tingginya ketergantungan terhadap Dana Transfer ke Daerah (TKD), terutama Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), kebijakan pendapatan akan diarahkan pada:



- Peningkatan kualitas perencanaan dan pemanfaatan dana transfer sesuai arah pembangunan nasional;
- Optimalisasi pemanfaatan Dana Insentif Fiskal dan Dana Desa berbasis kinerja;
- Mendorong penyesuaian belanja dengan arah transfer berbasis formula dan output.

Kebijakan pendapatan daerah pada periode 2026–2030 akan terus diselaraskan dengan arah kebijakan fiskal pusat yang mengedepankan konsolidasi fiskal, efisiensi belanja, serta peningkatan kemandirian fiskal daerah. Dengan demikian, Kabupaten Tasikmalaya diharapkan mampu menciptakan struktur pendapatan yang lebih sehat, berdaya tahan, dan mampu mendukung agenda pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Sebagaimana pada Tabel 3, Pendapatan Daerah secara total diprediksikan tumbuh 1 sampai dengan 2,5% yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah tumbuh 3% sedangkan untuk pada tahun 2026 dengan memperhatikan kerangka ekonomi makro tidak mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya sehingga Pendapatan Transfer tumbuh 2,4% setelah tahun 2026 sampai tahun 2030. Secara signifikan pendapatan transfer dari pemerintah pusat untuk Dana Bagi Hasil (DBH) tumbuh 0,5% dan Dana Alokasi Umum (DAU) dapat tumbuh 3,5%.

b. Kebijakan Belanja

Kebijakan belanja daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2026–2030 disusun dengan mempertimbangkan secara cermat kemampuan pendapatan daerah serta kondisi fiskal yang masih menghadapi tantangan struktural, terutama terkait dengan rendahnya kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Dalam kerangka tersebut, belanja daerah diarahkan pada penguatan efisiensi, peningkatan produktivitas belanja, dan konsistensi terhadap prioritas pembangunan.

1) Penyesuaian Belanja dengan Kapasitas Fiskal Daerah

Mengacu pada proyeksi pendapatan daerah yang tumbuh secara moderat, terutama PAD yang masih terbatas, maka belanja daerah akan disusun secara realistis dan berimbang. Pengendalian terhadap



belanja yang bersifat konsumtif, seperti belanja barang dan jasa, menjadi kunci utama dalam menjaga ruang fiskal untuk belanja pembangunan. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya akan mengedepankan belanja yang benar-benar mendukung peningkatan kualitas layanan dasar, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.

2) Prioritas pada Belanja Wajib dan Prioritas

Belanja daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD, RKPD, dan prioritas nasional. Fokus utama akan meliputi:

- Pemenuhan belanja wajib pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar;
- Belanja infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi, seperti jalan, irigasi, pasar, dan digitalisasi pelayanan publik;
- Belanja perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama di sektor pertanian, UMKM, dan desa.

3) Efisiensi dan Pengendalian Belanja Operasi

Kebijakan belanja akan mengedepankan prinsip efisiensi, terutama terhadap komponen belanja operasi seperti belanja barang/jasa, perjalanan dinas, dan belanja pegawai. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik akan didorong untuk menekan beban operasional dan meningkatkan produktivitas pemerintahan.

4) Peningkatan Kualitas Belanja Pembangunan (Belanja Modal)

Dengan ruang fiskal yang terbatas, belanja modal akan diprioritaskan pada kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat dan perekonomian lokal. Pemerintah daerah akan menerapkan pendekatan belanja berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) untuk memastikan bahwa alokasi anggaran berdampak pada peningkatan *output* dan *outcome* pembangunan. Pada tabel 3 belanja modal sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati akan tumbuh sampai dengan 25,7% dan setelah tercapai target akan bertumbuh antara 3,3% sampai 1,5% disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan arah pembangunan pemerintah pusat dan provinsi.



5) Penguatan Koordinasi Pembiayaan Alternatif

Menghadapi keterbatasan fiskal, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya juga akan menjajaki skema pembiayaan alternatif melalui dukungan dari provinsi dan pusat untuk mendanai proyek-proyek strategis daerah yang membutuhkan investasi besar dan berjangka panjang.

Dengan kebijakan belanja yang realistis, prioritas, dan berorientasi pada hasil, Kabupaten Tasikmalaya diharapkan mampu menjaga keberlanjutan fiskal dan memperkuat daya dorong belanja daerah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal. Kebijakan belanja selama periode 2026–2030 tidak hanya mencerminkan kemampuan pendapatan yang tersedia, tetapi juga komitmen daerah dalam menciptakan tata kelola keuangan yang sehat, transparan, dan akuntabel.

c. Kebijakan Pembiayaan

Dalam proyeksi pembiayaan tahun 2026–2030, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya akan berfokus pada:

- Menekan pembentukan SiLPA yang terlalu besar melalui peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian anggaran, sehingga nilai SiLPA diproyeksikan tetap.
- Menjajaki skema pembiayaan inovatif seperti pinjaman daerah dan KPBU dengan tetap mematuhi prinsip akuntabilitas dan efisiensi;
- Meningkatkan akuntabilitas dalam penggunaan PMD dan memastikan kontribusinya terhadap perekonomian daerah;
- Memastikan seluruh aktivitas pembiayaan tidak menimbulkan beban fiskal berlebihan di masa mendatang.

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis

2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah, Laporan KLHS RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029, dan hasil penjaringan aspirasi, maka rumusan permasalahan pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya yang mencakup berbagai aspek adalah sebagai berikut:



2.3.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

- a. Risiko bencana masih tinggi, terlihat dari nilai Indeks Risiko Bencana sebesar 145,50 poin. Hal ini disebabkan oleh letak geografis di daerah rawan bencana gempa bumi, karakteristik geologi yang labil, dan hidrometeorologi yang rawan terjadinya banjir, longsor dan kekeringan.
- b. Rendahnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana, terlihat dari nilai Indeks Ketahanan Daerah yaitu sebesar 0,64 poin. Nilai indeks ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tasikmalaya memiliki ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana kategori sedang.
- c. Masih belum optimalnya cakupan pelayanan bencana kebakaran. Hal ini mengakibatkan masing lamanya tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). Hal ini disebabkan oleh terbatasnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan SDM pemadam kebakaran yang terbatas.
- d. Masih belum optimalnya kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan data tahun 2024, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup hanya mencapai 65,51 poin dengan kategori sedang yang memerlukan perbaikan.
- e. Masih rendahnya sampah yang tertangani yaitu 10,28% pada tahun 2024. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya sarana persampahan (bank sampah, truk pengangkut sampah, gerobak sampah dan lainnya), rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan, rendahnya pemilahan sampah di sumber, dan belum adanya tempat pengolahan sampah yang memadai TPST.
- f. Masih rendahnya keragaman konsumsi pangan masyarakat. Hal ini terlihat dari nilai Pola Pangan Harapan (PPH) yang hanya mencapai 88,45 poin pada Tahun 2024 dari skor ideal 100, menurun dibandingkan dari tahun sebelumnya yang mencapai 90 poin. Penurunan ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat tentang keragaman pangan dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan yang beragam, bergizi dan seimbang.



- g. Masih lemahnya ketahanan pangan di Kabupaten Tasikmalaya. Hal tersebut tercermin dari capaian Indeks Ketahanan Pangan pada tahun 2024 yang hanya berada di angka 78,47 poin. Angka ini menempatkan Tasikmalaya di peringkat 24 dari 27 Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Barat, dan menunjukkan adanya tantangan serius. Rendahnya ketahanan pangan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan infrastruktur pertanian, minimnya diversifikasi pangan lokal, serta belum optimalnya dukungan dalam hal teknologi dan akses pasar.
- h. Laju pertumbuhan penduduk yang masih cukup tinggi, yaitu sebesar 0,79%. Jumlah penduduk di Kabupaten Tasikmalaya terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dan pada tahun 2024 mencapai 1.920.921 jiwa. Pertumbuhan penduduk ini berdampak pada kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, meningkatnya kebutuhan akan pangan, energi, air bersih, hunian, serta sarana dan prasarana wilayah perkotaan dan perdesaan dalam jangka panjang.
- i. Persebaran penduduk yang belum merata. Pada tahun 2024, kepadatan penduduk di Kabupaten Tasikmalaya tercatat sebesar 709 jiwa/km². Dari 39 kecamatan yang ada, beberapa kecamatan memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, seperti Kecamatan Singaparna, Sukarame, Sukaresik, dan Rajapolah. Ketidakmerataan ini menunjukkan konsentrasi penduduk di area tertentu, yang berpotensi menimbulkan kesenjangan dalam pembangunan dan penyediaan layanan publik.

2.3.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

- a. Masih banyaknya masyarakat yang berpenghasilan rendah di bawah garis kemiskinan, yaitu Rp400.148/kapita/bulan. Berdasarkan data tahun 2024, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tasikmalaya mencapai 186,75 ribu penduduk dengan persentase 10,23%. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya akses terhadap pekerjaan layak dan minimnya lapangan kerja yang tersedia.
- b. Belum optimalnya layanan perlindungan dan jaminan sosial. Hal ini terlihat dari nilai persentase masyarakat miskin dan rentan





miskin yang memperoleh bantuan sosial pada tahun 2024 mencapai 81,60%. Namun demikian, penyaluran bantuan sosial belum tepat sasaran, tepat waktu dan tepat kualitas yang disebabkan oleh belum validnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai dasar penerima bantuan, terbatasnya SDM pengelola Data DTKS di tingkat desa, serta rasio pendamping terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) belum ideal. Rasio ideal berdasarkan pedoman PKH yaitu 1:250-300 KPM.

- c. Belum optimalnya perlindungan sosial bagi korban bencana. Hal ini disebabkan belum memadainya penyediaan sarana prasarana pelaksanaan penanggulangan pada masa tanggap darurat, terbatasnya *buffer stock* untuk penanggulangan bencana, belum tersedianya shelter kawasan di wilayah rawan bencana, dan terbatasnya SDM Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan tenaga Kampung Siaga Bencana (KSB). Ideal jumlah SDM untuk Kampung Siaga Bencana adalah 5 orang per desa.
- d. Belum optimalnya layanan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial. Hal ini disebabkan oleh banyaknya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tidak sebanding dengan kemampuan daerah. Pada Tahun 2024, capaian persentase PPKS yang tertangani baru mencapai 4,24 persen. Selain itu, masih rendahnya kesadaran semua pihak dalam penanganan kasus PPKS.
- e. Terdapat ketimpangan pendapatan, terlihat dari nilai Indeks Gini pada tahun 2024 sebesar 0,363 poin. Hal ini disebabkan oleh belum meratanya kenaikan pengeluaran perkapita di seluruh masyarakat.
- f. Masih tingginya kematian ibu, yaitu nilai AKI sebesar 40 orang/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan yang berkualitas, kurangnya sarana dan prasarana pertolongan persalinan, asupan makanan pada ibu hamil yang kurang bergizi, masih kurang optimalnya manajemen sistem rujukan dan kegawat-daruratan pelayanan kesehatan ibu



melahirkan, serta jumlah tenaga kesehatan yang belum sesuai standar dan penyebarannya tidak merata.

- g. Masih tingginya kematian bayi, yaitu nilai AKB sebesar 8 orang/1.000 kelahiran hidup pada tahun 2024, sedangkan target pada tahun tersebut adalah 3 orang/1.000 kelahiran hidup. Hal ini disebabkan masih belum optimalnya akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan yang berkualitas dan kurangnya pemeriksaan dan pemberian imunisasi pada ibu hamil dan bayi.
- h. Masih adanya kasus kematian balita dengan Angka Kematian Balita (AKABA) pada tahun 2024 yaitu 6 orang/1000 kelahiran hidup, sedangkan target pada tahun tersebut adalah 1 orang/1.000 kelahiran hidup. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan perilaku keluarga dalam memberikan asupan gizi, ASI eksklusif, pemberian MP ASI, serta imunisasi dasar lengkap pada balita dan cakupan pemantauan tumbuh kembang balita (Kartu Menuju Sehat) belum optimal.
- i. Belum optimalnya capaian *Universal Health Coverage* (UHC) di Kabupaten Tasikmalaya, yaitu baru mencapai 86,73% s/d Maret 2025, masih di bawah target UHC Nasional sebesar 98%.
- j. Jumlah RSUD masih sangat kurang dari jumlah ideal, mengingat jumlah penduduk dan luas wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang cukup besar.
- k. Masih tingginya angka prevalensi stunting yaitu 20,7% menurut data Survei Status Kesehatan Indonesia (SKI) pada tahun 2023. Tingginya angka prevalensi stunting ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat tentang makanan sehat dan bergizi serta kurangnya akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak.
- l. Masih rendahnya angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS). RLS Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2024 tercatat sebesar 7,97 tahun, dan berada pada posisi 9 terendah di Provinsi Jawa Barat. Angka ini lebih rendah dibandingkan RLS Provinsi Jawa Barat yang mencapai 8,87 tahun. Kondisi ini disebabkan oleh tingginya jumlah penduduk berusia diatas 25 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan tingkat SLTP.



- m. Masih rendahnya tingkat literasi masyarakat. Hal ini terlihat dari capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) tahun 2024 yaitu 78 poin dari 100 poin. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya budaya membaca di kalangan masyarakat, yang dipengaruhi oleh jumlah perpustakaan umum yang minim, koleksi bahan bacaan yang belum memadai, jumlah pengunjung perpustakaan yang masih sedikit, serta keterbatasan jumlah tenaga pengelola perpustakaan.
- n. Rendahnya persentase pelestarian warisan budaya yaitu sebesar 41,42% pada tahun 2024. Kondisi ini disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain:
- Masih rendahnya pelestarian kesenian dan pengembangan kebudayaan lokal.
 - Belum optimalnya pengelolaan objek pemajuan kebudayaan, termasuk aspek perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan daerah.
 - Belum tersedianya sumber daya manusia daerah yang tersertifikasi sebagai penilai seni dan budaya.
 - Belum optimalnya koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pelaku seni dalam pemanfaatan potensi budaya.
 - Belum terbentuknya Dewan Kebudayaan dan Dewan Kesenian Daerah.
- o. Rendahnya tingkat prestasi olahraga. Hal ini tercermin dari jumlah perolehan medali pada Tahun 2024 sebanyak 52 medali, menurun signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 130 medali. Penurunan ini disebabkan oleh masih terbatasnya jumlah pelatih dan wasit tersertifikasi, belum adanya pusat kegiatan olahraga, prestasi atlet masih bertumpu pada atlet binaan NPCI (*National Paralympic Committee of Indonesia*), dan rendahnya tingkat partisipasi kontingen atlet Kabupaten Tasikmalaya dalam berbagai kejuaraan olahraga.
- p. Masih rendahnya upaya pemberdayaan perempuan di bidang sosial, hukum, dan politik. Hal ini tercermin dari nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2024 sebesar 64,32. Kondisi ini disebabkan oleh fokus pemberdayaan perempuan yang masih dominan pada aspek ekonomi dan sosial, keterbatasan standar dan





- kelembagaan layanan, seperti belum terstandarisasinya Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sebagai penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- q. Masih rendahnya capaian pemenuhan indikator Kabupaten Layak Anak, yaitu 579,36 poin pada tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh belum terintegrasinya sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Kemudian belum tersedianya data program pemenuhan hak dan perlindungan anak serta partisipasi anak di tingkat kecamatan dan desa, kurangnya SDM yang memahami Konvensi Hak Anak, terutama di sektor layanan langsung, dan belum tersedianya sarana dan prasarana perlindungan seperti rumah aman bagi anak korban dan saksi.
 - r. Masih belum optimalnya kualitas pembangunan keluarga. Hal ini terlihat dari rendahnya Indeks Pembangunan Keluarga/iBangga tahun 2024 yaitu sebesar 59,61 poin dari nilai 100 poin. Nilai iBangga ini terdiri: Aspek Kemandirian Keluarga, Aspek Ketentraman Keluarga, dan Aspek Kebahagiaan Keluarga.
 - s. Masih belum optimalnya kepesertaan ber-KB. Hal ini terlihat dari capaian kepesertaan ber-KB tahun 2024 baru mencapai 70,05%. Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam mewujudkan keluarga kecil, sehat dan sejahtera. Selain itu, keterbatasan akses infrastruktur terhadap fasilitas kesehatan pelayanan KB, terbatasnya jumlah tenaga lapangan KB, serta kurangnya sarana prasana pengendalian penduduk dan KB.
 - t. Masih tingginya angka kelahiran di Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini terlihat dari nilai *Total Fertility Rate* Kabupaten Tasikmalaya sebesar 2,11 dari nilai ideal sebesar 2,1. Tingginya nilai TFR ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam ber-KB, dan masih tingginya angka kebutuhan masyarakat dalam ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmeet need*).

2.3.1.3 Aspek Daya Saing

- a. Lambatnya Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tasikmalaya. Kinerja ekonomi Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024 dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 4,64% masih di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat (4,95%) dan rata-rata nasional (5,03%).



Meskipun beberapa tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya mengalami peningkatan, namun hal tersebut belum diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. masih banyaknya masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan, ketimpangan pendapatan yang masih cukup tinggi, serta terbatasnya lapangan kerja menjadi tanda bahwa perekonomian kita masih perlu mendapat perhatian lebih.

- b. Rendahnya kunjungan wisatawan. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2024 tercatat sebanyak 1.031.163 orang, masih jauh dibawah target yang ditetapkan sebesar 1.583.705 orang. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: terbatasnya media promosi pariwisata, kurangnya event dan atraksi pariwisata, terbatasnya infrastruktur dan fasilitas pendukung di destinasi wisata maupun desa wisata, serta rendahnya pemahaman pelaku pariwisata mengenai prinsip kepariwisataan seperti Sapta Pesona dan standar CHSE (*Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability*).
- c. Kualitas koperasi di Kabupaten Tasikmalaya masih tergolong rendah, terlihat dari minimnya jumlah koperasi berkualitas, yaitu baru 5 dari 265 koperasi (1,89%) pada Tahun 2024. Berdasarkan Permenkop Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pemeringkatan Koperasi, koperasi yang berkualitas dinilai dari aspek kelembagaan, usaha, keuangan, serta manfaat bagi anggota dan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jumlah pengurus dan pengelola koperasi yang memiliki sertifikat kompetensi dan sertifikat dasar perkoperasian, kurangnya aparatur yang memiliki sertifikasi kompetensi dalam pengawasan koperasi, serta belum memiliki sistem pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang memadai.
- d. Masih kurangnya koperasi aktif yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yaitu 105 dari 265 koperasi (39,6%) pada Tahun 2024. Hal ini menunjukkan masih lemahnya tata kelola dan partisipasi anggota dalam kegiatan koperasi.
- e. Rendahnya keunggulan dan daya saing usaha mikro. Pada tahun 2024, terdapat 129.032 usaha mikro di Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini disebabkan oleh masih lemahnya kapasitas SDM pelaku



usaha mikro, terbatasnya kapasitas tenaga pendamping, rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap legalitas usaha atau produk, sulitnya akses pembiayaan yang dapat dijangkau oleh pelaku usaha mikro, minimnya sarana promosi untuk memperluas akses pemasaran produk, serta terbatasnya akses terhadap kemitraan usaha yang mendukung pengembangan usaha mikro.

- f. Masih belum meratanya distribusi strata desa mandiri di Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan data capaian strata desa Tahun 2024, jumlah desa mandiri sebanyak 83 desa, desa maju sebanyak 145 desa, dan desa berkembang sebanyak 123 desa.
- g. Masih belum optimalnya pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan. Hal ini ditandai dengan terbatasnya revitalisasi pasar kabupaten, kondisi pasar desa yang masih belum memadai, serta belum adanya pasar rakyat yang berbasis SNI 8152:2021.
- h. Masih rendahnya pertumbuhan pelaku usaha perdagangan yaitu sebesar 10,66% pada tahun 2024, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang sebesar 12,8%.
- i. Masih rendahnya pertumbuhan sektor industri. Hal ini terlihat dari capaian pertumbuhan industri pada tahun 2024 yang hanya mencapai 1,9%. Kondisi tersebut dikarenakan masih rendahnya jumlah industri kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten Tasikmalaya
- j. Pada tahun 2024, target persentase peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura tidak tercapai. Dari target 1,05 persen, realisasi hanya mencapai -1,02 persen. Penurunan ini disebabkan oleh:
 - Belum optimalnya produksi pertanian. Hal ini karena biaya distribusi kebutuhan saprodi mahal, kelangkaan saprodi, sarana prasarana belum memadai, kurangnya pemakaian teknologi pertanian, degradasi lahan, dan menurunnya daya dukung lahan pertanian.
 - Dampak perubahan iklim dan bencana. Terjadinya perubahan iklim tersebut berdampak langsung pada pergeseran musim yang menyulitkan para petani menentukan masa tanam dan masa panen bagi tanaman mereka. Selain itu, fluktuasi suhu



dan kelembapan udara yang semakin meningkat dapat menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan organisme pengganggu tanaman. perubahan iklim ekstrim berakibat kekeringan.

- Keterbatasan kualitas SDM dan belum adanya regenerasi petani. Mayoritas petani di Kabupaten Tasikmalaya berusia di atas 45 tahun (sekitar 70% menurut data BPS), dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah. Kurangnya minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian, serta masih dominannya pola pikir subsisten (berorientasi pada kepuasan, bukan profit), menjadi tantangan tersendiri dalam peningkatan produktivitas. Regenerasi petani perlu segera didorong agar keberlanjutan sektor pertanian tetap terjaga.
 - Belum idealnya jumlah penyuluh. Berdasarkan arahan Instruksi Presiden, idealnya diperlukan 3 penyuluh per desa. Dengan jumlah desa sebanyak 351, maka Kabupaten Tasikmalaya membutuhkan 1.053 penyuluh. Namun, saat ini baru tersedia 228 penyuluh, jauh dari kebutuhan ideal.
- k. Masih rendahnya produksi perikanan kelompok nelayan di Kabupaten Tasikmalaya, yaitu 1.285,28 ton pada tahun 2024, jauh dibawah target sebesar 1.813,56 ton. Selain itu, cakupan bina kelompok nelayan belum optimal, dengan target sebanyak 105 kelompok dan realisasi hanya mencapai 102 kelompok. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya sarana dan prasarana pemberdayaan usaha nelayan skala kecil dan masih terbatasnya sarana pembudidayaan ikan.
- l. Rendahnya tingkat konsumsi ikan. Pada tahun 2023, Angka Konsumsi Ikan di Kabupaten Tasikmalaya 38,43 kg/kapita/tahun lebih rendah dibanding Jawa Barat (38,2 kg/kapita/tahun) maupun Nasional (56,48 kg/kapita/tahun).
- m. Masih rendahnya kompetensi angkatan kerja yang sesuai dengan pasar tenaga kerja. Berdasarkan data tahun 2024, tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,74% dan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 68,76%. Hal ini disebabkan karena masih belum optimalnya cakupan pelayanan balai latihan kerja.



- n. Terbatasnya lapangan pekerjaan baru karena rendahnya investasi perusahaan baru di Kabupaten Tasikmalaya.
- o. Masih rendahnya proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik. Pada tahun 2024, panjang jalan dalam kondisi baik baru mencapai 56,8%. Hal ini oleh disebabkan masih terbatasnya kegiatan pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin jalan sehingga umur jalan tidak sesuai dengan yang diharapkan serta kondisi geografis yang sebagian besar rawan gerakan tanah.
- p. Masih rendahnya persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik. Pada tahun 2024, luas daerah irigasi dalam kondisi baik baru mencapai 70,45%. Hal ini disebabkan masih terbatasnya kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi dan seringnya longsor serta gerakan tanah yang merusak jaringan irigasi.
- q. Masih rendahnya persentase rumah tinggal berakses sanitasi, yaitu 50,69% pada tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kemampuan masyarakat dalam penyediaan sarana sanitasi yang layak dan aman.
- r. Masih rendahnya persentase penduduk berakses air minum, yaitu 66,93% pada tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kemampuan masyarakat dalam penyediaan air minum yang layak dan aman.
- s. Masih rendahnya cakupan ketersediaan bangunan pemerintahan dan fasilitas pendukungnya yang laik fungsi, yaitu 61,50 persen pada tahun 2024. Jumlah kebutuhan bangunan pemerintah sebanyak 92 unit, sedangkan jumlah bangunan yang telah dibangun yaitu sebanyak 54 unit. Adapun jumlah kebutuhan fasilitas pendukung bangunan gedung pemerintah sebanyak 276 unit, sedangkan jumlah pembangunan fasilitas pendukung bangunan gedung pemerintah yang sudah dibangun sebanyak 213 unit.
- t. Masih rendahnya rasio rumah layak huni. Berdasarkan data tahun 2024, rasio rumah layak huni adalah sebesar 0,2546.
- u. Masih rendahnya cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU yaitu 52,28% pada tahun 2024. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan yang tidak terpelihara karena belum





- diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- v. Tingkat keselamatan jalan masih rendah, yaitu sebesar 82,19% pada tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh rendahnya persentase kendaraan yang laik jalan, terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pelengkap jalan, rendahnya kualitas infrastruktur jalan, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas yang bertanggungjawab.
 - w. Rendahnya realisasi investasi. Pada tahun 2024, realisasi investasi di Kabupaten Tasikmalaya tercatat sebesar Rp228 miliar, mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp446 Milyar. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: belum optimalnya promosi investasi, belum tersusunnya peraturan daerah tentang penanaman modal, belum tersusunnya dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM), belum tersedianya peta potensi dan peluang investasi, serta belum optimalnya infrastruktur pendukung proses investasi.
 - x. Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hasil penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Tasikmalaya atas laporan keuangan Tahun 2023 sebesar 84,007, namun masih dibawah Kota Tasikmalaya yang mencapai 85,769.
 - y. Tingkat kemandirian fiskal daerah belum optimal. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024, kemandirian fiskal Kabupaten Tasikmalaya baru mencapai 10,06%, yang menurut klasifikasi tingkat kemandirian fiskal daerah termasuk dalam kategori “rendah sekali”. Rendahnya kontribusi PAD mengindikasikan bahwa sebagian besar Pendapatan Daerah masih sangat bergantung pada dana transfer Pemerintah Pusat/Provinsi.

2.3.1.4 Aspek Pelayanan Umum

- a. Belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini terlihat dari nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2024 sebesar 78,47 dengan kategori "BB". Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya pelaksanaan program RB yang berdampak langsung





kepada masyarakat, serta belum optimalnya penajaman pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah. Kualitas tata kelola pemerintahan juga ditentukan oleh nilai SAKIP. Nilai SAKIP Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2024 adalah 64,80 atau Kategori B. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya penerapan manajemen kinerja sebagai upaya dalam mengimplementasi SAKIP, belum adanya koordinator antar komponen yang dijadikan komponen penilaian SAKIP, belum adanya penyesuaian aturan baru yang mengatur implementasi SAKIP, dan penyusunan laporan kinerja yang merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja tahunan belum dilaporkan secara maksimal khususnya di Kecamatan.

- b. Masih belum optimalnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini terlihat dari capaian nilai Indeks Domain Tata Kelola SPBE Tahun 2024 yaitu 3,76 poin. Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya dukungan infrastruktur teknologi, terbatasnya kualitas SDM, belum optimalnya pemanfaatan jaringan intra pemerintah daerah, dan belum optimalnya layanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi dan berdaya guna.
- c. Belum optimalnya kualitas inovasi daerah. Hal ini terlihat dari nilai skor Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2024 yang mencapai 47,59 poin dari target 49 poin, dengan predikat Inovatif dan berada pada peringkat 23 dari 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
- d. Belum optimalnya pengimplementasian sistem pengendalian internal pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang berkualitas dengan capaian Tahun 2024 berada pada level 3.
- e. Belum optimalnya manajemen aparatur sipil negara berdasarkan sistem merit. Hal ini terlihat dari hasil penilaian Indeks Sistem Merit Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 yaitu sebesar 313 dari 400 poin.
- f. Profesionalitas ASN belum optimal, yang tercermin dari capaian Indeks Profesionalitas ASN dengan capaian tahun 2024 sebesar 80,02 poin dari 100 poin, dengan predikat sedang. Kondisi ini



- disebabkan oleh kompetensi ASN yang belum seluruhnya memenuhi standar karena penempatan belum optimal sesuai hasil *assessment* dan belum semua PNS memiliki kompetensi sesuai dengan standar jabatan.
- g. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral. Hal ini terlihat dari nilai Indeks Pembangunan Statistik Sektoral Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024 sebesar 2,69 poin dari 5,0 poin dan mendapat predikat "Baik" atau tingkat kematangan "Terdefinisi".
 - h. Rendahnya cakupan tingkat keamanan informasi, terlihat dari capaian Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 yang berada pada tingkat kematangan level II, yang didefinisikan "Penerapan Kerangka Kerja Dasar". Capaian tersebut masih di bawah target yang telah ditetapkan, yaitu level III. Hal ini disebabkan karena urusan persandian masih dianggap kurang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang persandian, khususnya tenaga sandiman, serta sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar untuk mendukung pengelolaan persandian dan keamanan informasi secara optimal.
 - i. Adanya potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Hal ini tercermin dari capaian persentase pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum sebesar 99,64% dari target 100%.

2.3.2 Isu Strategis Daerah

2.3.2.1 Isu Menurut KLHS

Berdasarkan laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029, berikut adalah beberapa hal yang menjadi isu strategis:

- a. **Isu PB Strategis 1: Menurunnya kualitas dan kuantitas lingkungan hidup akibat pemanfaatan, pengelolaan dan perlindungan yang belum optimal serta rendahnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup**

Pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan hidup yang tidak sesuai dengan daya dukung lahan dan tidak disertai dengan upaya perlindungan yang optimal dapat mempengaruhi kualitas dan





kuantitas sumber daya alam. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan salah satu instrumen yang menggambarkan kondisi lingkungan hidup dan berguna untuk memberikan informasi dalam mendukung pengambilan keputusan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kabupaten Tasikmalaya memiliki nilai IKLH yang cenderung meningkat dari tahun 2020 hingga 2022. Dalam 2 tahun tersebut terjadi peningkatan IKLH sebesar 3,85. Namun pada tahun 2023 IKLH Kabupaten Tasikmalaya mengalami penurunan sebesar 4,7 poin sehingga IKLH Kabupaten Tasikmalaya tahun 2023 menjadi 63,73 atau berada pada kategori sedang.

b. Isu PB Strategis 2: Tingginya tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim dan bahaya terhadap bencana geologi maupun hidrometeorologi

Kabupaten Tasikmalaya memiliki tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim dan bahaya terhadap bencana yang tinggi. Menurut data BNPB, Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2023 adalah sebesar 159,14 dan masuk dalam kategori tinggi. Angka ini sudah mengalami penurunan sejak tahun 2020 dimana IRB Kabupaten Tasikmalaya pada saat itu adalah 192,95. Kabupaten Tasikmalaya berada pada urutan ketiga dengan IRB tertinggi di Jawa Barat setelah Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi, dan lebih tinggi dibandingkan dengan IRB Jawa Barat yaitu 123,16 (kategori sedang).

Kabupaten Tasikmalaya memiliki beberapa potensi bahaya bencana iklim kelas sedang hingga tinggi. Potensi bencana tersebut berupa potensi bencana kekeringan seluas 271.130 Ha, potensi bencana longsor seluas 174.969 Ha, potensi bencana cuaca ekstrim seluas 41.033 Ha, potensi bencana kebakaran hutan dan lahan seluas 37.377 Ha, potensi bencana banjir seluas 12.510 Ha dan potensi bencana abrasi seluas 4.215 Ha.

Bencana-bencana tersebut merupakan bencana hidrometeorologi yang menandakan bahwa Kabupaten Tasikmalaya memiliki kerentanan terhadap perubahan iklim. Secara umum, Kabupaten Tasikmalaya berada pada kategori “agak rentan” terhadap perubahan





iklim, dengan nilai Indeks Kapasitas Adaptif (IKA) 0,48 serta Indeks Keterpaparan dan Sensitivitas (IKS) 0,57.

c. Isu PB Strategis 3: Belum meratanya akses dan pelayanan pendidikan termasuk ketersediaan sarana dan prasarana, kapasitas SDM kependidikan yang memadai, dan pengembangan sistem teknologi informasi digital di segala jenjang

Salah satu pertimbangan yang dilihat untuk melihat isu-isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) yang ada di Kabupaten Tasikmalaya ini adalah kondisi muatan lingkungan hidup dan kondisi umum daerah. Kondisi muatan lingkungan hidup terdiri dari kondisi.

Akses dan pelayanan bidang pendidikan merupakan salah satu aspek penting yang harus didukung dan diperhatikan dalam pembangunan berkelanjutan untuk memastikan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan manusia dimana salah satu faktor yang mempengaruhi IPM adalah tingkat pendidikan. IPM Kabupaten Tasikmalaya terus mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga tahun 2023. Dalam 5 tahun tersebut, terjadi peningkatan IPM sebesar 4,38 poin sehingga pada tahun 2023, IPM Kabupaten Tasikmalaya adalah sebesar 69,38. Walaupun meningkat, IPM Kabupaten Tasikmalaya tahun 2023 masih berada di bawah IPM Jawa Barat (74,24) dan IPM Nasional (73,55). IPM Kabupaten Tasikmalaya pun berada pada posisi ketiga paling rendah di Jawa Barat setelah Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Garut.

d. Isu PB Strategis 4: Belum meratanya pelayanan Kesehatan dan kurangnya kualitas Kesehatan masyarakat

Kondisi kesehatan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya ditunjukkan melalui beberapa indikator utama, antara lain Usia Harapan Hidup (UHH), Angka Kematian Ibu (AKI), dan prevalensi stunting pada balita. UHH Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2020–2023 berada pada kisaran 68–72 tahun, masih lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Barat (74 tahun) dan nasional (71–72 tahun). Angka Kematian Ibu juga masih tinggi, dengan peningkatan signifikan pada tahun 2021 sebesar 157 per 100.000 kelahiran hidup dan kembali naik menjadi 158 pada tahun 2022.



Sementara itu, prevalensi stunting balita tahun 2022 tercatat sebesar 27,2%, lebih tinggi dibandingkan angka Provinsi Jawa Barat yang sebesar 20,2%, yang menunjukkan masih rendahnya kualitas kesehatan anak dan potensi gangguan tumbuh kembang di masa depan.

Selain itu, pelayanan dan jaminan kesehatan masyarakat masih memerlukan perhatian. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2023 telah mencapai 83,33%, angka yang cukup tinggi namun belum menjangkau seluruh masyarakat. Ketersediaan fasilitas kesehatan, khususnya rumah sakit dan rumah sakit bersalin, belum sepenuhnya memenuhi standar kebutuhan sesuai SNI. Distribusi tenaga kesehatan juga belum merata, dengan konsentrasi terbesar berada di Kecamatan Singaparna sebesar 23%, sementara di 18 kecamatan lainnya masih di bawah 1,9%. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan sistem pelayanan kesehatan yang lebih merata dan berkeadilan di seluruh wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

e. Isu PB Strategis 5: Lambatnya penurunan tingkat kemiskinan dan belum optimalnya perlindungan serta pemerataan bantuan sosial

Kondisi kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya dapat dikatakan parah. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya persentase penduduk miskin di Kabupaten Tasikmalaya dari tahun 2018-2024 yang berada di atas nilai persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Barat dengan angka berkisar dari 9-11%. Selain itu, persentase penduduk miskin Kabupaten Tasikmalaya juga terlihat meningkat hingga mencapai 11,15% pada tahun 2021 sebagai dampak dari kebijakan saat pandemi Covid-19. Namun tidak menutup kemungkinan dikarenakan juga pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya yang belum optimal karena pada tahun sebelumnya yaitu 2018 dan 2019 angka kemiskinan Kabupaten Tasikmalaya sudah tergolong tinggi.

Melihat kondisi tahun setelahnya yaitu tahun 2022-2024, angka persentase penduduk miskin berangsur menurun. Namun tetap angka tersebut masih jauh diatas nilai Provinsi Jawa Barat yang berada pada angka 7%, sedangkan Kabupaten Tasikmalaya masih berada pada angka 10% atau tepatnya 10,73% pada tahun 2022 dan 10,28% pada tahun 2023.



f. Isu PB Strategis 6: Masih rendahnya persentase hunian layak dan terjangkau, akses terhadap infrastruktur pelayanan dasar, dan konektivitas antar wilayah

Proporsi rumah tangga di Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau masih di bawah 50% dan cenderung fluktuatif. Pada tahun 2023, angkanya tercatat sebesar 36,95%, turun dari 40,54% pada tahun sebelumnya. Lingkungan sehat dan aman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) baru mencapai 52,2%. Sementara itu, kawasan kumuh masih ditemukan seluas 227,05 hektare yang tersebar di 37 desa dari 6 kecamatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan hunian layak dan infrastruktur dasar permukiman masih menjadi tantangan.

Akses terhadap infrastruktur pelayanan dasar dan konektivitas wilayah juga masih terbatas. Akses sanitasi aman meningkat menjadi 8,34% pada tahun 2022, dan persentase timbulan sampah yang terolah mencapai 9,42% pada tahun 2023 dari total timbulan harian sebesar 963,8 ton, yang terdiri atas 60% sampah organik dan 40% anorganik. Layanan pengumpulan sampah meningkat menjadi 8%, tetapi penanganan di wilayah perkotaan baru mencapai 8,9%, sedangkan di wilayah perdesaan masih 0%, disebabkan keterbatasan sarana pengumpulan. Akses air minum perpipaan dilayani oleh PDAM Tirta Sukapura dengan sekitar 15.000 pelanggan rumah tangga pada tahun 2022. Sementara itu, kondisi mantap jalan nasional (jalan kabupaten) mencapai 71,02% pada tahun 2022, meningkat dari 67,99% pada tahun 2021, namun sedikit menurun dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 71,39%.

g. Isu PB Strategis 7: Belum optimalnya pembangunan wilayah secara berkelanjutan dan terintegrasi antara tata ruang termasuk pengembangan permukiman inklusif, aman dan tangguh serta pemenuhan target kawasan lindung dan kebutuhan RTH

Adanya kawasan hijau seperti hutan dan RTH di suatu wilayah dapat mendukung kenyamanan dan keberlanjutan suatu wilayah. Kabupaten Tasikmalaya memiliki kawasan hutan dengan luas 45.543 Ha. Kawasan ini terdiri atas kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi tetap, kawasan hutan produksi terbatas, dan kawasan konservasi yang seluruhnya telah masuk ke dalam wilayah PIPPIB





(Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru). Akan tetapi, luas hutan pada tahun 2023 hanya mencapai 17% dari luas lahan Kabupaten Tasikmalaya sedangkan target kawasan hutan Kabupaten Tasikmalaya adalah sebesar 20% sehingga perlu adanya upaya untuk meningkatkan luas kawasan tersebut. Selain itu, luas RTH perkotaan di Kabupaten Tasikmalaya belum mencapai minimal luas sesuai peraturan yaitu 30% sementara RTH perkotaan di Kabupaten Tasikmalaya baru mencapai 20% sehingga perlu adanya upaya untuk meningkatkan luas kawasan tersebut.

h. Isu PB Strategis 8: Belum optimalnya pengembangan ekonomi daerah seperti produktivitas dan daya saing ekonomi, bisnis UMKM dan Pariwisata, serta pengembangan ekonomi berbasis keunggulan wilayah

Kondisi ekonomi Kabupaten Tasikmalaya ditunjukkan melalui berbagai indikator, seperti rasio PDRB sektor industri pengolahan dan akomodasi, Indeks Daya Saing Daerah (IDSD), serta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Rasio PDRB industri pengolahan mengalami peningkatan hingga 7,98% pada 2023, namun belum menjadi sektor utama karena dominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sebagian besar industri masih berskala kecil dan menengah, dengan UMKM mendominasi hingga 99% sejak 2019–2022. Rasio PDRB sektor akomodasi, makan, dan minum juga meningkat menjadi 1,49% pada 2023, meskipun kontribusinya masih rendah dibandingkan potensi sektor pariwisata yang besar. Secara keseluruhan, kontribusi PDRB ADHB Kabupaten Tasikmalaya terhadap Provinsi Jawa Barat masih kecil, yakni sekitar 1,8%, dan PDRB per kapitanya berada di kisaran Rp20–24 juta, jauh di bawah rata-rata provinsi. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sempat menurun drastis pada 2020 akibat pandemi, namun meningkat kembali menjadi 4,69% pada 2023, meskipun masih di bawah capaian Provinsi Jawa Barat.

Dari sisi daya saing dan ketenagakerjaan, IDSD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2023 berada pada angka 3,32 dan tergolong kategori “Sedang”, namun masih di bawah rata-rata provinsi dan nasional. Peningkatan masih dibutuhkan dalam aspek infrastruktur, stabilitas ekonomi, sistem keuangan, keterampilan, dan inovasi.





Sementara itu, Indeks Inovasi Daerah (IID) mencapai 50,42 poin pada 2022 dan dikategorikan sebagai “inovatif” oleh BSKDN Kemendagri tahun 2023, meski masih bersifat sementara. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tasikmalaya pada 2023 menurun menjadi 3,89%, termasuk kategori rendah, menunjukkan penyerapan tenaga kerja yang membaik. Namun, sebagian besar pekerja masih berada di sektor informal, yang pada umumnya tidak mendapatkan jaminan kerja dan memiliki penghasilan yang tidak pasti.

2.3.2.2 Isu Global

a. Demografi Global

Perkembangan demografi global memengaruhi ekonomi dan sosial dunia. Menurut data *World Population Prospects* (2022), saat ini, populasi dunia telah melebihi 7 miliar dan diperkirakan mencapai sekitar 9,7 miliar pada tahun 2050. Kebutuhan terhadap pangan, energi, dan air akan semakin meningkat seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian sektor produksi untuk mendorong rentang kehidupan (*life-span*) yang semakin panjang.

Meskipun jumlah penduduk terus bertambah, namun laju pertumbuhannya terus melambat. PBB memproyeksikan bahwa penduduk global pada Tahun 2030 dan tahun 2045 masing-masing tumbuh menjadi 8,5 miliar dan 9,5 miliar penduduk. Lonjakan ini didorong oleh penurunan angka kematian dan peningkatan harapan hidup sejak lahir. Terkait proporsi demografi seperti bertambahnya kelompok penduduk usia tua (*aging population*) dan tingginya jumlah penduduk usia muda akan memberikan tantangan seperti kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan. Turunnya angka kelahiran disebabkan antara lain oleh fenomena tidak memiliki anak (*childfree*) dan menunda pernikahan. Sementara itu, perkawinan di bawah umur masih banyak terjadi di negara berkembang. Akses terhadap media digital yang tidak terkendali berisiko meningkatkan kekerasan, perdagangan manusia, adiksi terhadap pornografi, perilaku menyimpang, dan perilaku berisiko anggota keluarga. Hal-hal tersebut menjadi tantangan bagi keluarga dalam memaknai dan menjalankan fungsinya secara optimal.



Penduduk dunia diprediksi akan semakin terfokus di Asia dan Afrika, yang sekaligus akan muncul sebagai kekuatan baru dalam ekonomi global. Saat ini, populasi besar dan pertumbuhan ekonomi yang stabil di kawasan-kawasan ini menarik minat para investor internasional. Pada saat bersamaan, beberapa negara berkembang di Kawasan Asia berpotensi menjadi pemimpin teknologi dan inovasi serta perekonomian dunia di masa mendatang.

b. Geopolitik dan Geoekonomi

1) Geopolitik

Dinamika geopolitik global akan menjadi tantangan bagi setiap negara. Perkembangan tersebut dapat berdampak luas pada berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan yang perlu diantisipasi adalah eskalasi persaingan anatarnegara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kekuatan baru tersebut memengaruhi pergolakan di kawasan maupun tatanan global serta sikap Indonesia dalam dunia internasional.

Perang Rusia-Ukraina memicu inflasi global pada energi dan pangan, meningkatkan belanja militer, dan memperpanjang ketegangan geopolitik, sehingga membuka peluang konflik baru di berbagai wilayah. Persaingan geopolitik di Kawasan Indo-Pasifik, yang meliputi Samudera Hindia dan Pasifik, semakin intens dan masuk dalam panggung global. Wilayah ini kini dipandang strategis karena potensi ekonomi dan maritimnya. Akibatnya, daya Tarik kawasan ini makin besar, sehingga menimbulkan persaingan pengaruh antara negara dalam dan luar kawasan.

Indonesia menyikapi kontestasi geopolitik Kawasan Indo-Pasifik tersebut dengan mengedepankan *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* untuk memperkuat kerja sama dan meredam friksi di kawasan. Indo-Pasifik berperan strategis sebagai wilayah perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran serta menciptakan peluang ekonomi inklusif melalui peningkatan kerja sama antarnegara.

Krisis di berbagai sektor mengancam stabilitas geopolitik global. Gangguan ini dapat memicu krisis energi dan pangan, lalu menciptakan ketidakpastian geo-ekonomi yang meluas. Karena tantangan ini bersifat lintas batas, diperlukan kolaborasi erat antar





sektor dan negara untuk mencegah efek berantai dan menjaga kestabilan global.

2) Geoekonomi

Negara berkembang kini memegang peranan semakin besar dalam ekonomi global. Kontribusinya terhadap *output* dunia melonjak dari 34% pada 1980 menjadi 55% pada 2015, dan diperkirakan mencapai 71% pada 2050, dengan Asia menyumbang sekitar 54% dari total *output* global. Sebaliknya, bangsa negara manju (G7) menyusut dari 32% pada 2015 menjadi sekitar 20% pada 2050. Meskipun pendapatan per kapita negara maju tetap lebih tinggi, diperkirakan pada 2050 ada sekitar 84 negara berkembang yang pendapatannya per kapitanya akan melebihi beberapa negara Eropa Selatan pada 2015.

Sektor komoditas tidak lagi menjadi motor utama pertumbuhan negara berkembang. Meski selama enam dekade mengandalkan ekspor komoditas sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, 54% ekspor negara di Kawasan Amerika Latin, 81% di Afrika, dan 75% di negara Kawasan Timur Tengah berbasis pada produk komoditas.

Kebijakan makroekonomi yang kredibel dan hati-hati menjadi pijakan penting bagi pertumbuhan negara berkembang, sementara investasi jangka panjang pada sumber daya manusia dan infrastruktur memperkuat dasar ekonomi untuk tumbuh tinggi dan berkelanjutan. Lamnya reformasi untuk memperbaiki iklim usaha pun mendukung munculnya struktur ekonomi yang lebih kompetitif dan berkualitas.

Dengan kebijakan tepat, negara berkembang dapat mengejar ketertinggalan teknologi dan ekonomi dari negara maju. Struktur demografi yang lebih muda memberikan keuntungan dalam mendorong pertumbuhan, terutama melalui sektor manufaktur yang diharapkan menjadi mesin utama ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Kawasan Asia, didorong oleh tingginya tingkat tabungan dan produktivitas, diprediksi menjadi lokomotif pertumbuhan global, sementara di Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin, perbaikan investasi dan transaksi di sektor jasa bernilai tambah tinggi menjadi motor lain. Faktor pendukung utama termasuk perdagangan internasional yang terbuka, peningkatan iklim usaha dan inovasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang kesemuanya



menjadi penentu utama keberhasilan percepatan teknologi dan pertumbuhan ekonomi negara berkembang.

Perekonomian global pada 2050 diproyeksikan mencapai sekitar tiga kali lipat dibanding 2015. Menurut studi PwC, ekonomi dunia dapat lebih dari menggandakan ukurannya hingga 2050. Pada 2015, output global tercatat sebesar sekitar USD 74 triliun, dengan kontribusi dari Amerika Serikat sebesar USD 17,9 triliun, China USD 11,0 triliun, dan India USD 2,1 triliun. Proyeksi 2050 menunjukkan lima negara terbesar—yakni China, India, AS, Jepang, dan Indonesia diperkirakan menyumbang sekitar 55 % dari total output global.

c. Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi digital telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat seperti *Internet of Things (IoT)*, *blockchain*, *Hyper Connection*, *Artificial Intelligence (AI)*, *Distributed Ledger Technology (DLT)*, *Production Lifecycle Management*, *Robotic Process Automation (RPA)*, *Edge Computing*, *Auto Robotic System*, *3D*, dan *Future Technologies*. Perkembangan teknologi menuntut masyarakat untuk adaptif, dengan dukungan literasi dan pola pikir yang baik guna memanfaatkannya secara optimal serta meminimalkan risiko disrupsi.

Pandemi COVID-19 mempercepat disrupsi teknologi. Banyak UMKM dan koperasi mendigitalisasi usaha untuk bertahan, meningkatkan produktivitas dan pasar. Namun adopsi teknologi masih terbatas karena SDM, modal, dan infrastruktur, sehingga hambatan ini harus diatasi agar teknologi bisa mendorong efektivitas, efisiensi, dan produktivitas usaha.

Teknologi masa depan akan memengaruhi manufaktur, termasuk percepatan otomasi di hampir semua aktivitas industri seperti *nanoteknologi*, *blockchain*, *robotika cerdas*, *IoT*, *AI*, teknologi imersif, digitalisasi yang mendukung konektivitas, material maju, rekayasa genetik dan bioteknologi; manufaktur aditif (*3D printing*, *rapid prototyping*, *powder bed system*, dan lainnya). Perkembangan teknologi di masa depan juga akan memengaruhi sektor Pendidikan. Melalui pemanfaatan AI, penyelenggaraan pendidikan akan menjadi lebih efisien, efektif, transparan, dan ekonomis.



Teknologi kini menggantikan pekerjaan. AI sudah bisa menulis artikel dan membuat grafik, menggoyang industri media dan mengancam pekerjaan kreatif, yang kini berisiko digantikan atau setidaknya ditandingi AI. Teknologi yang berkembang mendorong remote working, menciptakan peluang bagi sektor TIK dan mendukung pola WFA, namun sekaligus menekan sektor properti perkantoran dan real estate yang bergantung pada kerja konvensional; keberhasilan WFA bergantung pada kepercayaan antara pekerja dan pemberi kerja agar kualitas kerja tetap terjaga.

Perkembangan teknologi mengubah cara kerja pemerintah dengan mendorong inovasi, efisiensi, dan pelayanan publik berbasis bukti. Digitalisasi menuntut redesign proses pelayanan dan pola interaksi, serta mendukung pembenahan kebijakan dan regulasi agar lebih terencana, terpadu, sistematis, interkonektif, dan partisipatif, termasuk pemetaan serta evaluasi regulasi yang tumpang tindih atau inkonsisten.

d. Urbanisasi Dunia

Urbanisasi meningkat pesat: dua pertiga penduduk dunia diperkirakan tinggal di kota pada 2050, dengan 95 % pertambahan terjadi di negara emerging economies. Di Asia, populasi perkotaan akan meningkat 1,7× dalam empat dekade ke depan. Pada 2020, ada 23 megacity (populasi >10 juta), meningkat signifikan dari hanya 2 pada 1970. Di banyak kota di Asia dan Afrika, sekitar 25–30 % warga perkotaan tinggal di pemukiman tanpa air bersih, drainase, sanitasi, listrik, dan jalan memadai. Urbanisasi yang buruk menyebabkan perluasan kota ke wilayah sekitarnya, mengubah lahan pertanian jadi permukiman dan zona perdagangan/jasa. Ekonominya pun bergeser ke industri, jasa, dan perdagangan, mendorong paradigma pengelolaan kota lebih kompak lewat efisiensi layanan.

Perkembangan TIK memacu inovasi di kota, khususnya dalam menyelesaikan masalah harian. Pendekatan smart tech dan pengelolaan big data akan jadi kunci kota terdepan. Pandemi COVID-19, meski menimbulkan kerugian, juga memicu teknologi yang memudahkan kolaborasi jarak jauh. Fokus pada pendekatan hijau menjadi peluang untuk kebijakan yang humanis dan ramah lingkungan. Kota yang mampu beradaptasi pasca-pandemi dan





menerapkan pendekatan hijau akan menarik SDM kompetitif untuk tinggal dan berkarya.

e. Konstelasi Perdagangan Global

Peran negara berkembang, khususnya kelompok E7, menguat pesat dalam ekonomi global. E7 diproyeksikan akan tumbuh dua kali lebih cepat daripada G7 secara rata-rata hingga 2050, dan diperkirakan akan melampaui dominasi G7 dalam perekonomian dunia, menggantikan peran negara maju. Pertumbuhan perdagangan negara berkembang didorong oleh tren intra-Asia yang kuat, terutama dari Tiongkok, India, dan ASEAN, serta meningkatnya pendapatan dan populasi Afrika khususnya di Nigeria dan Afrika Selatan yang mendorong ekspansi perdagangan internasional untuk memenuhi kebutuhan tinggi penduduk.

Pertumbuhan kolaborasi produksi internasional melalui (*global production networks/GPN*) dan (*global value chain/GYC*) makin kuat dan beragam. Skema ini menjadi pilihan utama industri karena tak hanya menurunkan biaya produksi, tetapi juga meningkatkan investasi asing serta perdagangan internasional. Kawasan Asia Timur dan ASEAN siap menjadi pusat GVC dunia berkat infrastruktur memadai, pasar besar, dan SDM industri berkualitas untuk barang manufaktur ekspor.

Perdagangan internasional semakin dipengaruhi oleh cepatnya perubahan teknologi dan digital serta tren keberlanjutan. Teknologi digital menambah kompleksitas dan diversifikasi produksi, mengurangi biaya transaksi dan mempercepat struktur perdagangan. Negara yang cepat beradaptasi, mengolah sumber daya alam menjadi produk kompleks dan berkelanjutan, akan semakin berperan penting dalam rantai nilai perdagangan global. Perdagangan kawasan menguatkan posisi Asia Pasifik sebagai hub strategis. Kemitraan seperti RCEP dan IPEF yang melibatkan ekonomi besar, sumber daya melimpah, dan posisi geografis strategis memperluas peluang perdagangan, memperkuat rantai pasok global, menarik investasi, serta mendorong inovasi dan teknologi. Akibatnya, pusat perdagangan internasional semakin terpusat di Asia, khususnya Indo-Pasifik.

**f. Perubahan Iklim**

Perubahan iklim, kerusakan lingkungan, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati (*Triple Planetary Crisis*) diperkirakan terus berlanjut dan berdampak negatif pada lingkungan, kesehatan, penghidupan, dan pembangunan jika tak ada perubahan signifikan. Krisis ini mendorong pergeseran dari paradigma pembangunan *business-as-usual* menuju praktik berkelanjutan, termasuk transisi ke ekonomi rendah emisi di sektor energi, industri, lahan, kelautan, pangan, pertanian, limbah, dan ekonomi sirkular.

Tren ekonomi hijau dan rendah karbon telah menjadi strategi global: negara maju dan berkembang menetapkan target penurunan emisi ambisius Norwegia *net-zero* pada 2030, Spanyol dan Selandia Baru pada 2050, Tiongkok dan Indonesia pada 2060. Jalur ini mengedepankan ekonomi hijau dan stimulus ramah lingkungan sebagai arah utama pembangunan. Energi baru dan terbarukan diperkirakan akan menjadi sumber utama global karena menipisnya energi fosil dan tekanan perubahan iklim. Teknologi terbarukan khususnya tenaga surya dan angin akan semakin murah dan kompetitif. Teknologi nuklir generasi IV seperti SMR akan diutamakan untuk keselamatan. Pengembangan elektrolisis *green hydrogen* dan sel bahan bakar (*fuel cell*) juga berkembang pesat, terutama untuk transportasi berat (truk, kereta, kapal, udara) dan sebagai bahan baku industri seperti petrokimia dan pupuk.

2.3.2.3 Isu Strategis Nasional

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, isu-isu strategis nasional yang menjadi fokus pembangunan meliputi hal-hal berikut:

a. Rendahnya Produktivitas

Tingkat produktivitas masih rendah di tengah persaingan global yang semakin meningkat. Mengacu pada rilis laporan *Asian Productivity Organization* (2024), rata-rata produktivitas Indonesia yang tercermin dari *Total Factor Productivity* selama tahun 2015-2022 hanya tumbuh positif sebesar 60 basis poin dari periode sebelumnya tahun 2010-2015 (-0,9 persen ke -0,3 persen). Capaian tersebut relatif tertinggal dibandingkan Korea Selatan yang mampu mencapai 1,78



ketika masih berada pada posisi menuju negara maju periode 1971-1995 dan Tiongkok sebesar 2,12 selama kurun waktu 2005-2022. Kondisi produktivitas yang rendah di antaranya disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia yang masih tertinggal, terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang tertinggal, serta kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah. Rendahnya Produktivitas tenaga kerja perempuan dipengaruhi oleh lingkungan kerja yang belum mendukung mereka untuk masuk dan bertahan di pasar kerja, antara lain norma sosial budaya yang membebankan peran pengasuhan dan tugas domestik pada perempuan, jam kerja yang kurang fleksibel, serta minimnya akses layanan *daycare* berkualitas yang terjangkau.

Produktivitas yang rendah juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung melambat. Selama tahun 2005-2010, ekonomi Indonesia mampu tumbuh rata-rata 5,7 persen. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi melambat menjadi rata-rata 4,7 persen selama tahun 2010-2015. Pertumbuhan ekonomi meningkat kembali mencapai rata-rata 5,0 persen selama tahun 2015-2019 dan 5,05 persen pada tahun 2023.

Selain itu, produktivitas yang rendah menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi potensial. Kondisi inilah yang menyebabkan ekonomi Indonesia sulit tumbuh lebih cepat dan stagnan dalam rentang 5,0 persen.

b. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Berdasarkan *Asian Productivity Organization* (2024), produktivitas tenaga kerja Indonesia yang diukur dari Produk Domestik Bruto per tenaga kerja tahun 2022 relatif rendah, yaitu sebesar US\$28.600 per pekerja. Angka tersebut masih tertinggal jauh di bawah Amerika Serikat US\$149.100 per pekerja dan di bawah rata-rata Kawasan *Association of Southeast Asian Nations* sebesar US\$30.200 per pekerja. Tantangan peningkatan produktivitas tenaga kerja di antaranya disumbang oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dicerminkan dari capaian rata-rata nilai *Programme for International Student Assessment* siswa Indonesia untuk semua aspek (membaca,



matematika, dan sains) sebesar 369,3 pada tahun 2022. Angka tersebut menurun disbanding tahun 2018 dengan nilai rata-rata 382 serta masih tertinggal dibandingkan siswa dari negara-negara *The Organization for Economic Co-operation and Development* sebesar 488,33.

Pembangunan manusia unggul juga dihadapkan pada tantangan rendahnya daya saing tenaga kerja yang ditunjukkan dengan rendahnya kualifikasi Pendidikan tenaga kerja. Berdasarkan pada kualifikasi Pendidikan, data Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2024 menunjukkan sebesar 52,32 persen penduduk yang termasuk angkatan kerja merupakan lulusan Pendidikan rendah (sekolah menengah pertama/ madrasah tsanawiyah sederajat ke bawah), sedangkan penduduk yang termasuk angkatan kerja berpendidikan menengah (sekolah menengah atas/ sekolah menengah kejuruan sederajat) sebesar 34,82 persen dan penduduk yang termasuk angkatan kerja berpendidikan tinggi sebesar 12,86 persen. Kualifikasi Pendidikan tenaga kerja yang rendah berdampak pada keterserapan tenaga kerja di pasar kerja, hanya 41,23 persen pekerja yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi. Oleh karena itu, untuk mencapai pembangunan yang optimal, Indonesia harus mampu mengatasi berbagai dampak risiko ini dan melakukan investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

c. Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat

Calon kelas menengah merupakan kelompok sosial ekonomi terbesar di Indonesia pada periode 2019-2024, jumlahnya meningkat sebesar 8,65 juta orang sehingga mencapai 137,5 juta orang atau sekitar 49,2 persen dari total populasi. Di sisi lain, jumlah warga yang rentan miskin juga meningkat sebanyak 12,72 juta orang dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, angka ini mencapai 67,69 juta atau 24,33 persen dari total populasi (Badan Pusat Statistik, 2024). Meskipun jumlah masyarakat calon kelas menengah dan yang rentan miskin terus bertambah, populasi kelas menengah justru mengalami penurunan. Risiko pergeseran status ini, dari kelas menengah menjadi calon kelas menengah dan rentan miskin disebabkan oleh tingginya angka pemutusan hubungan kerja. Pada Agustus 2024, tercatat



46.420 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (Kementerian Ketenagakerjaan, 2024) dan angka ini diperkirakan akan terus meningkat.

Salah satu faktor yang memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja adalah rendahnya daya beli masyarakat. Hal ini terlihat dari deflasi yang terjadi pada komponen harga yang diatur pemerintah dan harga bergejolak. Menurut Laporan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (2024), komponen harga yang diatur pemerintah mengalami deflasi dari 1,68 persen pada Agustus 2024 menjadi 1,40 persen pada September 2024. Sementara itu, komponen harga bergejolak mengalami deflasi yang signifikan, dari 3,04 persen pada Agustus 2024 menjadi 1,43 persen pada September 2024. Daya beli masyarakat yang rendah berimplikasi pada menurunnya permintaan terhadap barang-barang yang diproduksi oleh industri. Dengan permintaan yang lemah, industri tidak dapat memenuhi biaya operasional, yang pada akhirnya memaksa untuk mengurangi jumlah karyawan atau bahkan menutup usaha.

d. Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) diproyeksikan mencapai 147,71 juta jiwa. Hal ini menjadi pembangungan, yaitu tingginya kebutuhan hidup Masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam (pangan, energi, dan air) serta lahan. Selain itu, terdapat kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial, jaminan kesehatan, pendidikan, dan pembukaan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi dalam Upaya pemenuhan kebutuhan penduduk yang besar.

e. Krisis Lingkungan

Perkembangan dunia saat ini dihadapkan dengan tiga krisis lingkungan (*triple planetary crisis*) yang mengancam masa depan bumi dan manusia, yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan. Sekitar 50-75 persen dari populasi global berpotensi terdampak kondisi iklim yang





mengancam jiwa pada tahun 2100 (*Intergovernmental Panel on Climate Change*, 2022). Kerugian ekonomi akibat risiko bencana diperkirakan sebesar Rp22,8 triliun per tahun (Kementerian Keuangan, 2023), sementara jumlah kematian selama 10 tahun terakhir mencapai 9.176 orang (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2024).

Sekitar satu juta spesies tumbuhan dan hewan menghadapi ancaman kepunahan (*Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services*, 2019). Sementara itu, risiko polusi udara merupakan penyebab penyakit dan kematian dini terbesar di dunia, serta menyebabkan hingga 4,2 juta kematian setiap tahun (*United Nations Framework Convention on Climate Change*, 2022). Indonesia merupakan negara dengan Tingkat polusi tertinggi di Asia Tenggara dengan konsentrasi *particulate matter* 2,5 (*World Health Organization*, 2021). Sekitar 70 persen dari 20 ribu sumber air minum rumah tangga yang diuji tercemar (Badan Pusat Statistik, 2022). Pada tahun 2020, sebanyak 40,3 persen timbulan sampah merupakan sampah makanan dan diproyeksikan akan menghasilkan 344 kg/kapita/tahun pada tahun 2045 (*Proyeksi Business-As-Usual, Report Food and Loss Waste in Indonesia*, 2021). Perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi udara juga secara langsung akan menyebabkan krisis sumber daya alam.

Ekstraksi sumber daya alam di dunia meningkat tiga kali lipat dalam lima dekade terakhir dengan pertumbuhan lebih dari 2,3 persen per tahun. Indonesia sebagai negara dengan Tingkat ekstraksi pertambangan terbesar ke-8 di dunia (*United Nations Environment Programme*, 2023), turut berkontribusi dalam krisis tersebut. Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2022 menunjukkan masih terdapat 2.741 lokasi tambang ilegal yang berpotensi merusak lingkungan. Pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi yang tinggi serta kelangkaan dan persaingan untuk mengakses sumber daya alam (energi, air, dan pangan) di tingkat global berpotensi mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah.

Risiko *Triple Planetary Crisis* berimplikasi pada pencapaian target pembangunan, baik jangka menengah maupun jangka Panjang dan tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang rendah emisis gas





rumah kaca di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian, serta limbah dan penerapan ekonomi sirkuler. Untuk itu, penyelarasan aspek pertumbuhan ekonomi dan lingkungan menjadi hal yang perlu diprioritaskan.

f. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah

Pemberantasan korupsi merupakan isu strategis yang membutuhkan sinergi dari semua pemangku kepentingan. Hal ini menjadi prasyarat Upaya percepatan pencapaian sasaran Pembangunan nasional, mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, serta meningkatkan investasi. Hal ini merupakan pijakan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi.

Dalam lima tahun terakhir, Indeks Persepsi Korupsi/ *Corruption Perception Index* Indonesia menunjukkan tren penurunan dari 40 pada tahun 2019 menjadi 34 pada tahun 2022 dan stagnan di angka yang sama pada 2023 (peringkat 115 dari 180 negara). Adapun pada indikator Indeks perilaku Anti Korupsi Indonesia, meski mengalami tren perbaikan pada periode 2019-2022, namun capaian tersebut sedikit mengalami tantangan pada tahun berikutnya. Hal ini mencerminkan risiko dalam pencapaian pemberantasan korupsi. Selanjutnya, tata Kelola data memainkan peran kunci dalam mendukung pembangunan nasional, terutama dalam pengambilan Keputusan yang lebih akurat, efektif, dan berkelanjutan. Tingkat keamanan data privasi dan siber untuk data pemerintah dan nasional belum sepenuhnya dapat mengantisipasi terjadinya risiko peretasan dan pembajakan serta pengelolaan data dalam skala besar yang dapat menciptakan potensi pelanggaran privasi dan ancaman keamanan.

2.3.2.4 Isu Strategis Provinsi Jawa Barat

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, berikut adalah isu-isu yang sesuai konteks pembangunan daerah di Jawa Barat:





a. Isu *Green and Blue Economy* Serta Pembangunan Inklusif

Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan perlu memperhatikan keterlibatan masyarakat dalam bentuk ekonomi inklusif yang memperhatikan batasan-batasan lingkungan, tantangan global dan regional, pemanfaatan teknologi, serta produktivitas ekonomi lokal. Paradigma *green dan blue economy* yang berkembang saat ini harus melibatkan masyarakat Jawa Barat sebagai bagian dari keseimbangan sistem sosial ekologi di Jawa Barat, sesuai dengan semangat konsep pembangunan *green and blue economy*.

Green dan blue economy dengan pembangunan inklusif berupaya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana, dan memperkuat kapasitas masyarakat untuk mengatasi tantangan pembangunan yang ada, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

b. Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Perkembangan penduduk menciptakan potensi sumber daya manusia yang perlu dipersiapkan untuk dapat berdaya saing dalam menghadapi peluang dan tantangan global dan regional. Kondisi ini perlu dilakukan antara lain dengan mempersiapkan penguatan ketahanan sosial masyarakat dari aspek pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan norma sosial-budaya masyarakat.

Perbaikan terhadap kualitas dan daya saing sumber daya manusia memerlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat secara keseluruhan. Investasi dalam pendidikan, pelatihan, inovasi, kesejahteraan, dan pemberdayaan adalah kunci untuk mencapai tujuan ini dalam upaya meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

c. Kesenjangan Pembangunan Dan Infrastruktur Pelayanan Dasar

Kesenjangan pembangunan dan belum optimalnya konektivitas wilayah akibat kurang meratanya penyediaan maupun kualitas infrastruktur pelayanan dasar merupakan salah satu permasalahan sekaligus tantangan utama dalam penyelenggaraan pembangunan di Jawa Barat. Kesenjangan dalam penyelenggaraan pembangunan akan menciptakan perbedaan kualitas kehidupan, termasuk kualitas sumber daya manusianya. Dalam *Indonesia Development Forum*



(2018), kesenjangan ini berkaitan dengan permasalahan dalam pemenuhan layanan dasar meliputi kurangnya akses pada layanan dasar khususnya di antara masyarakat marginal yang dapat menyebabkan kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia.

Penanggulangan kesenjangan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar memerlukan komitmen yang kuat dari berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, organisasi internasional, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Investasi yang tepat waktu dan strategi yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa setiap individu dapat menikmati hak dasarnya secara merata dan berkelanjutan.

d. Keberlanjutan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan

Perlindungan terhadap lingkungan dan ekosistem wilayah untuk memperkuat fungsi daya dukung dan daya tampung lingkungan secara berkelanjutan menghadapi tekanan pembangunan, risiko dampak perubahan iklim, dan kerawanan bencana merupakan salah satu isu utama yang perlu dipertimbangkan dalam merumuskan RPJMD dalam tahap Pembangunan Fondasi Daerah di Jawa Barat 2025-2029.

Pengelolaan sumber daya alam untuk pemanfaatan kebutuhan penyelenggaraan pembangunan yang dapat menopang kehidupan manusia merupakan tantangan utama dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan, terdapat upaya untuk mempertahankan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan manusia dalam jangka pendek dengan keberlanjutan pemanfaatannya untuk menunjang kehidupan yang berkelanjutan dalam pembangunan serta memperhatikan kesejahteraan sosial, ekonomi dan kelestarian fungsi lingkungan hidup hingga masa yang akan datang. Oleh karena itu, kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia, makhluk hidup lainnya dan keseimbangan antar keduanya (daya dukung lingkungan hidup) serta kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya (daya tampung lingkungan hidup) penting untuk diketahui, dipahami dan dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan.



Perlindungan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan adalah tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa ekosistem wilayah dan lingkungan dapat berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat jangka panjang bagi kehidupan dan penghidupan manusia dan di wilayah Provinsi Jawa Barat.

e. Keberlanjutan Penataan Ruang

Perkembangan penduduk dan kebutuhan pembangunan fisik memerlukan pengaturan dan penataan ruang yang dapat mengakomodir kebutuhan ruang budidaya sekaligus melindungi ruang berfungsi lindung guna menjamin penyediaan jasa ekosistem lingkungan yang berkelanjutan. Isu keberlanjutan penataan ruang menjadi sangat relevan dalam konteks pembangunan perkotaan dan pedesaan yang berkelanjutan.

Melalui pendekatan yang berkelanjutan dalam penataan ruang diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat, inklusif, dan produktif bagi generasi saat ini dan masa depan. Dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam setiap keputusan penataan ruang diharapkan dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan secara menyeluruh.

f. Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Dinamika penyelenggaraan pembangunan dan tuntutan pelayanan publik yang lebih efisien, efektif, dan berintegritas memerlukan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan didukung peran serta dan kerjasama para pemangku kepentingan.

Isu kualitas tata kelola pemerintahan merupakan faktor krusial dalam menentukan efektivitas dan keberhasilan sebuah pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kualitas tata kelola pemerintahan berperan penting dalam membentuk kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang stabil dan berkelanjutan. Pemerintah yang baik mampu mengelola negara dengan adil, efektif, dan transparan, sehingga mampu memenuhi harapan masyarakat dan mendukung perkembangan yang berkelanjutan.



2.3.2.5 Isu Strategis Kabupaten Tasikmalaya

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang perlu menjadi perhatian utama dalam perencanaan pembangunan daerah karena memiliki dampak yang signifikan terhadap pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu-isu tersebut bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah atau panjang, serta menentukan arah pembangunan ke depan

Perumusan isu strategis Kabupaten Tasikmalaya disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan sampai dengan tahun 2024. Selain itu, perumusan ini juga mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain kondisi dan permasalahan aktual yang dihadapi daerah, hasil kajian dari Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2029, serta perkembangan isu-isu global, nasional, dan isu regional di tingkat Provinsi Jawa Barat. Berikut adalah beberapa isu strategis pada Rencana Jangka Menengah Kabupaten Tasikmalaya 2025-2029:

a. Peningkatan Infrastruktur

Kabupaten Tasikmalaya masih dihadapkan pada beberapa tantangan terkait dengan infrastruktur ekonomi dan pelayanan dasar. Tantangan dalam hal infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi seperti jalan, yaitu masih rendahnya proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik. Pada tahun 2024, dari total panjang ruas jalan 1.230,47 km, panjang jalan dalam kondisi baik baru mencapai 699,00 km atau 56,8%.

Selain dari proporsi dan kualitas jalan, dalam hal perlengkapan jalan seperti penerangan jalan umum pun masih perlu ditingkatkan, dimana baru sebanyak 5.266 unit PJU atau 20,63% dari yang seharusnya 26.000 unit di seluruh Kabupaten Tasikmalaya.

Dalam hal infrastruktur pelayanan dasar, kurangnya sarana persampahan, seperti bank sampah, truk pengangkut sampah, dan gerobak sampah, serta rendahnya peran serta Masyarakat dalam pengelolaan sampah dan pemilahan sampah di sumber. Kemudian masih rendahnya persentase rumah tinggal berakses sanitasi, yaitu 50,69%, sementara persentase penduduk berakses air minum yang layak mencapai 66,93% pada tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kemampuan masyarakat dalam penyediaan sarana sanitasi



dan air minum yang layak dan aman. Rasio rumah layak huni pun masih menunjukkan angka yang rendah dengan nilai 0,2546 pada tahun 2024. Selain itu, berdasarkan data pada tahun 2022 masih terdapat kawasan kumuh yang tersebar di 37 desa dengan luas 227.05 Ha. Serta belum optimalnya cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU, yaitu 52,28% pada tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh banyaknya Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan yang tidak terpelihara karena belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Pembangunan infrastruktur untuk mendukung kegiatan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar perlu diprioritaskan untuk memastikan terlaksananya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Tasikmalaya, serta dalam rangka mengurangi ketimpangan antar wilayah. Pembangunan infrastruktur ekonomi antara lain jalan, penjajagan stasiun perberhentian penumpang dan barang Stasiun Rajapolah, penjajagan reaktivasi Stasiun Pirusa akan membuka akses baru atau semakin mempermudah akses yang sudah ada untuk menjangkau wilayah tersebut. Kemudahan akses tersebut nantinya dapat meningkatkan aktivitas ekonomi di suatu wilayah.

Kabupaten Tasikmalaya dalam pengaturan kedatangan, keberangkatan, menaik dan menurunkan orang atau barang sesuai dengan RTRW Provinsi Jawa Barat telah terdapat terminal tipe B berlokasi di Singaparna yang direncanakan akan direlokasi ke Kecamatan Padakembang, akan tetapi apabila melihat potensi pergerakan orang dan barang diharapkan bisa difasilitasi dengan angkutan antar provinsi sehingga perlu diusulkan dalam penetapan RTRW Nasional untuk dibangunnya terminal tipe A di Kabupaten Tasikmalaya.

Pemerataan infrastruktur dan pelayanan dasar yang berkualitas bertujuan untuk memastikan seluruh masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya mendapatkan manfaat dari seluruh Pembangunan. peningkatan Infrastruktur ekonomi dan pelayanan dasar sebagai upaya untuk mendukung bahwa masyarakat memiliki akses yang memadai dan berkualitas terhadap layanan. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar berdampak pada kesehatan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia, kualitas lingkungan hidup, serta produktivitas





dan mendukung transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola di masa depan.

Sebagai dampak dari rencana pembangunan tol Getaci, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya harus menyesuaikan tata ruang dan menyiapkan sarana prasarana sesuai dengan trase yang ditetapkan oleh Pemerintah serta menyusun kajian dampak pembangunan tol Getaci terhadap pertumbuhan sosial ekonomi daerah.

b. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

Kualitas dan daya saing sumber daya manusia merupakan aspek penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial di Kabupaten Tasikmalaya. Secara umum kualitas sumber daya manusia mencakup kualifikasi pendidikan, kesehatan, serta terkait dengan kualitas dari kependudukan.

Dalam bidang pendidikan terlihat bahwa angka partisipasi sekolah (APS) usia 7-15 tahun pada tahun 2024 sebesar 98,63 persen (belum mencapai 100 persen), artinya masih ada anak usia 7-15 tahun yang tidak mengikuti sekolah khususnya pada jenjang SD hingga. Adapun RLS (rata-rata lama sekolah) Kabupaten Tasikmalaya masuk ke dalam 10 terendah di Jawa Barat. Berkaitan dengan kesehatan, masalah gizi masyarakat masih menjadi kendala yang di hadapi Kabupaten Tasikmalaya. Persoalan stunting masih menjadi tantangan hingga saat ini, dimana masih tingginya angka prevalensi stunting menurut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yaitu 17,1% pada tahun 2024. Serta masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), yaitu 40 orang/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2024, dan masih tingginya Angka Kematian Bayi (AKB), yaitu 8 orang/1.000 kelahiran hidup pada tahun 2024, sedangkan target pada tahun tersebut adalah 3 orang/1.000 kelahiran hidup.

Dalam hal pengendalian penduduk, masih tingginya persentase kebutuhan ber-KB yang belum terpenuhi, serta terkait dengan kependudukan, masih belum optimalnya ketersediaan dan kondisi Sarana dan prasarana pendukung aspek kependudukan. Isu mengenai sumber daya manusia (SDM) merupakan tantangan penting



di Kabupaten Tasikmalaya. Dalam menghadapi tantangan di masa depan, sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan mampu berdaya saing menjadi modal utama dalam pembangunan ekonomi dan sosial.

c. Penanganan Masalah Sosial dan Kemiskinan

Dengan serapan tenaga kerja yang didominasi pada sektor pertanian, rata-rata pendapatan masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya terbilang cukup rendah. Salah satu tantangan utama yang dihadapi Kabupaten Tasikmalaya adalah terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Tasikmalaya, salah satunya, ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggi merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap daerah. Namun manfaat tersebut harus juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Beberapa indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya meliputi, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Ketimpangan Pendapatan (*Gini Ratio*), Persentase Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan sosial.

Terkait dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi, terdapat fluktuasi dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya selama tahun 2020-2024. Meskipun angka pertumbuhan ekonomi cenderung naik dan turun, tren umum menunjukkan adanya peningkatan. Dalam hal *Gini Ratio*, tahun 2024 Indeks Gini Kabupaten Tasikmalaya mengalami penurunan menjadi 0,363 poin dari 0,404 pada tahun 2023, namun masih berada pada kategori yang sama yaitu SEDANG. Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat Indeks Gini Kabupaten Tasikmalaya lebih rendah, namun masih berada diatas nasional.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 10,23%, namun masih berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Masih banyaknya masyarakat yang berpenghasilan rendah di bawah garis kemiskinan, yaitu Rp400.148/kapita/bulan. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya akses terhadap pekerjaan layak dan lapangan pekerjaan. Adapun



untuk Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2024 dibandingkan dengan kabupaten/kota di sekitarnya berada pada peringkat ketiga terendah setelah Kabupaten Pangandaran dan kabupaten Ciamis.

Berkaitan dengan masalah sosial, yaitu masih belum optimalnya penanganan kasus Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memerlukan penanganan khusus, seperti: kasus penelantaran anak, anak berhadapan hukum, anak korban tindak kekerasan, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), penyandang penyakit sosial (LGBT, tuna susila, eks korban Napza, eks Warga Binaan Lapas), anak jalanan/ anak *punk* dan kasus PMKS lainnya. Dimana pada tahun 2024 baru sebesar 4,24 persen (realisasi cakupan pelayanan 100%).

Dengan beberapa kondisi yang disebutkan diatas, peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya belum optimal. Dibutuhkan Upaya seluruh pemangku kepentingan yang terintegrasi untuk lebih mengoptimalkan tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut.

d. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana

Perhatian terhadap lingkungan hidup dan kebencanaan di Kabupaten Tasikmalaya menjadi hal yang sangat penting. Dalam hal kebencanaan, kabupaten Tasikmalaya berlokasi di daerah yang memiliki kerawanan bencana tinggi, baik bencana alam geologi maupun hidrometeorologi. Bencana alam geologi berupa tsunami, gunung api, dan gempa bumi. Sedangkan bencana alam hidrometeorologi di antaranya kekeringan, banjir, cuaca ekstrem, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, dan gelombang ekstrem dan abrasi. Pada tahun 2020-2024, nilai indeks risiko bencana di Kabupaten Tasikmalaya cenderung fluktuatif dan pada tahun 2024 indeks risiko bencana menurun kembali hingga 174,11 dari 145,50 pada tahun 2024.

Sementara itu terkait dengan lingkungan hidup, capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tasikmalaya mengalami tren yang dinamis setiap tahunnya. Pada tahun 2024 kondisi IKLH Kabupaten Tasikmalaya saat ini masuk dalam kategori 'sedang'



dengan nilai 65,51. Hal tersebut tercermin dari Indeks Kualitas Air termasuk dalam kriteria 'sedang', sehingga diperlukan Upaya untuk meningkatkan kualitas air minum yang dikonsumsi oleh masyarakat. Disamping itu Indeks Kualitas Lahan di Kabupaten Tasikmalaya masuk dalam kategori 'kurang', hal ini disebabkan oleh banyaknya lahan kritis dan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang perlu dipulihkan di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Diperlukan kerja sama untuk penghijauan dan reboisasi dalam menangani lahan dan DAS kritis secara optimal.

Karena dampak signifikan yang dapat ditimbulkan dari oleh perubahan iklim terhadap kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Mitigasi perubahan iklim memerlukan upaya kolaboratif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Isu lingkungan hidup dan peningkatan ketahanan bencana menjadi prioritas penanganannya dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya 2025-2029. Semua pihak baik perangkat daerah, pelaku usaha, Masyarakat dan stakeholder lainnya memiliki peran dan tanggungjawab terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana.

e. Percepatan Pembangunan Desa berbasis Potensi Lokal yang Didukung Sektor Digital

Pembangunan antara perkotaan dan perdesaan harus dilaksanakan dengan proporsional dan seimbang. Masyarakat desa memiliki peran yang penting dalam pembangunan daerah, mengingat karakteristik wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian merupakan cerminan gambaran umum kondisi perekonomian daerah. Tujuan dari penguatan peran desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan adalah untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa dan mendorong tercapainya desa mandiri dan maju di seluruh Kabupaten Tasikmalaya dimana pada tahun 2024 persentase penyelenggaraan penataan desa mandiri dan maju baru mencapai angka 82,9%.



**f. Peningkatan Nilai Tambah Sektor Potensial**

Sebagian besar ekonomi daerah Kabupaten Tasikmalaya ditopang oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kontribusi terhadap total PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 36,81% pada tahun 2024. Sedangkan sektor lainnya yang cukup dominan adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor hanya dapat menyumbang sebesar 18,00%. Sektor lainnya seperti industri pengolahan yang diharapkan dapat memberikan daya ungkit terhadap ekonomi daerah hanya berkontribusi sekitar 8,33%.

Meskipun sektor pertanian menjadi penopang utama ekonomi daerah Kabupaten Tasikmalaya, namun apabila dilihat dari 10 tahun terakhir terdapat kecenderungan penurunan nilai tambah dari tahun ke tahun yang semula pada tahun 2014 berkontribusi sebesar 39 persen menjadi 36,81 persen pada tahun 2024. Demikian pula kecenderungan penurunan nilai tambah ini juga terjadi pada sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dari 20,74 persen pada tahun 2014 menjadi 18,00 persen di tahun 2024.

Pada sektor pariwisata, pengembangan masih dihadapkan dengan realita masih rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Tasikmalaya. Dalam pembangunan sektor kepariwisataan terdapat beberapa indikator yang dipakai untuk mengukur kinerja sektor pariwisata diantaranya adalah jumlah kunjungan wisatawan, dan nilai PAD yang dihasilkan dari sektor pariwisata. Pada tahun 2023, sektor pariwisata masih belum secara optimal berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi di Kabupaten Tasikmalaya. Di samping atraksi, aksesibilitas menuju objek-objek wisata dan juga amenities yang memadai sebagai fasilitas penunjang bagi wisatawan sangat penting dalam mendorong sektor pariwisata.

Isu berikutnya adalah belum optimalnya investasi dalam mendorong sektor-sektor potensial. Potensi investasi daerah yang belum terpetakan dan belum tersedianya dukungan media promosi yang memadai menjadi sebagian faktor yang mengakibatkan nilai investasi di Kabupaten Tasikmalaya masih terbatas.

Pada sisi lain, penciptaan nilai tambah masih menghadapi masalah seperti: (i) intensifikasi budidaya perikanan yang belum optimal; (ii) menurunnya hasil produksi pertanian (tanaman pangan);



(iii) kondisi sarana perdagangan diantaranya pasar yang membutuhkan penangaan melalui relokasi; (iv) proses hilirisasi produk masih rendah; (v) belum optimalnya pengelolaan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan yang merupakan sektor utama di Kabupaten Tasikmalaya; dan (vi) rendahnya diversifikasi/kontribusi sektor sekunder dan tersier dalam mendukung penyerapan tenaga kerja.

g. Penciptaan Iklim Investasi untuk Mendorong Pengembangan Usaha dan Penciptaan Lapangan Kerja

Investasi berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja baru. Realisasi investasi dalam dan luar negeri di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2024 baru mencapai Rp228.279.000.000,00. Untuk menyerap lulusan baru yang siap kerja dan mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Tasikmalaya dibutuhkan investasi padat karya yang dapat membuka lowongan kerja yang banyak.

Secara umum biaya logistik di Indonesia masih terbilang cukup mahal/ inefisien. Demikian juga permasalahan logistik terjadi di Kabupaten Tasikmalaya. Untuk menarik para investor agar bersedia menanamkan modalnya di Kabupaten Tasikmalaya, maka dibutuhkan antara lain: peningkatan konektivitas, dan peningkatan kualifikasi tenaga kerja, serta menjamin kondusivitas dan stabilitas keamanan daerah.

h. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan merupakan pilar utama dalam pelaksanaan pembangunan dan penyediaan layanan publik di Kabupaten Tasikmalaya. Belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Tasikmalaya terlihat dari nilai Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2024 sebesar 78,47 dengan kategori "BB". Nilai ini masih rendah apabila dibandingkan dengan Kabupaten/kota sekitar, seperti Kabupaten Ciamis yang mencapai 82,37 dan Kota Banjar yang mencapai 85,71. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan RB belum dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan belum optimalnya penajaman pelaksanaan program reformasi birokrasi pada pemerintah daerah serta perangkat daerah.



Selain itu, kualitas tata kelola pemerintahan juga dinilai dari nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Tasikmalaya sebesar 64,80 yang berada dalam kategori B pada tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain belum optimalnya penerapan manajemen kinerja dalam mengimplementasikan SAKIP, belum adanya koordinator antar komponen yang menjadi penilaian SAKIP, serta belum adanya penyesuaian aturan baru yang mengatur implementasi SAKIP di Kabupaten Tasikmalaya. Selain itu, laporan pertanggungjawaban kinerja tahunan belum dilaporkan secara maksimal, terutama di tingkat Kecamatan.

Pelayanan publik yang berkualitas harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang kolaboratif melibatkan berbagai pihak dalam proses pengambilan kebijakan. Tata Kelola pemerintahan harus berbasis elektronik dengan pemanfaatan teknologi yang optimal. Integrasi data dalam pelaksanaan administrasi dan pembuatan kebijakan menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam mencapai tujuan ini, peningkatan Kualitas aparatur & tata kelola pemerintahan perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Secara ringkas, teknik penyimpulan isu strategis daerah di Kabupaten Tasikmalaya pada tabel berikut:



Tabel 2.89
Teknik Penyimpulan Isu Strategis Daerah

PERMASALAHAN (1)	ISU KLHS (2)	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH (6)
		GLOBAL (3)	NASIONAL (4)	REGIONAL (5)	
Aspek Geografi dan Demografi					
1. Tingginya Risiko Bencana yaitu sebesar 145,50 poin, kategori tinggi (Peringkat 3 dari 27 Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat)	2. Tingginya tingkat perentanan terhadap perubahan iklim dan bahaya terhadap bencana geologi maupun hidrometeorologi	6. Perubahan Iklim	5. Krisis Lingkungan	4. Keberlanjutan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana
2. Rendahnya Ketahanan Daerah dalam penanggulangan bencana (IKD sebesar 0,64 poin)					
3. Masih belum optimalnya cakupan pelayanan bencana kebakaran					
4. Kualitas lingkungan hidup masih rendah (IKLH 2024: 65,51 poin, kategori sedang yang memerlukan perbaikan)	1. Menurunnya kualitas dan kuantitas lingkungan hidup akibat pemanfaatan, pengelolaan dan perlindungan yang belum oprimal serta rendahnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup				
5. Persentase sampah yang tertangani masih rendah yaitu 10,28%					
6. Laju Pertumbuhan penduduk yang masih tinggi dan persebaran penduduk yang belum merata		1. Demografi Global 4. Urbanisasi Dunia	4. Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif		
Aspek Kesejahteraan Masyarakat					
1. Masih banyaknya masyarakat yang berpenghasilan rendah dibawah garis kemiskinan (persentase penduduk miskin 2024: 10,23%)	5. Lambatnya penurunan tingkat kemiskinan dan belum optimalnya		3. Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat	3. Kesenjangan Pembangunan dan Infrastruktur Dasar	3. Penanganan Masalah Sosial dan Kemiskinan



PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
		GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Pengeluaran perkapita masih rendah (Rp8.965.000/orang/tahun, peringkat 27 dari 27 Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat)	perlindungan serta pemerataan bantuan sosial				
3. Belum optimalnya layanan perlindungan dan jaminan sosial					
4. Belum optimalnya perlindungan sosial bagi korban bencana					
5. Belum optimalnya layanan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial					
6. Terdapat ketimpangan pendapatan (2024: 0,363 poin)					
7. Usia Harapan Hidup masih rendah (2024: 74,06 tahun, peringkat 27 dari 27 Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat)					
8. Belum optimalnya capaian <i>Universal Health Coverage</i> (UHC) di Kabupaten Tasikmalaya, yaitu baru mencapai 86,73% s/d Maret 2025, masih di bawah target UHC Nasional sebesar 98%.	4. Belum meratanya pelayanan kesehatan dan kurangnya kualitas kesehatan masyarakat				
9. Masih tingginya angka prevalensi stunting					
10. Masih rendahnya angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 2024: 7,97					
11. Masih rendahnya tingkat literasi masyarakat. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) 2024: 78 poin	3. Belum meratanya akses dan pelayanan pendidikan termasuk ketersediaan sarana dan prasarana, kapasitas SDM kependidikan yang memadai, dan pengembangan sistem teknologi informasi digital di segala jenjang		2. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	2. Kualitas dan Daya Saing SDM	2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing
12. Rendahnya persentase pelestarian warisan budaya yaitu sebesar 41,42% pada tahun 2024					
13. Masih rendahnya upaya pemberdayaan perempuan (IDG 2024: 64,32 poin)					
14. Masih rendahnya capaian pemenuhan indikator kabupaten layak anak					



PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
		GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aspek Daya Saing Daerah					
1. Rendahnya jumlah kunjungan wisatawan. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2024 tercatat sebanyak 1.031.163 orang	8. Belum optimalnya pengembangan ekonomi daerah seperti produktivitas dan daya saing ekonomi, bisnis UMKM dan Pariwisata, serta pengembangan ekonomi berbasis keunggulan wilayah	2. Geopolitik dan Geoekonomi	1. Rendahnya produktivitas	1. Green dan Blue economy	6. Peningkatan nilai tambah sektor potensial
2. Kualitas koperasi di Kabupaten Tasikmalaya masih tergolong rendah, terlihat dari minimnya jumlah koperasi berkualitas, yaitu baru 5 dari 265 koperasi (1,89%) pada Tahun 2024		3. Perkembangan Teknologi			
3. Rendahnya keunggulan dan daya saing usaha mikro. Pada tahun 2024, terdapat 129.032 usaha mikro di Kabupaten Tasikmalaya.		5. Konstelasi Perdagangan Global			
4. Indeks Desa Membangun sebesar 0,7735 poin masih di kategori “maju” belum “mandiri”					5. Percepatan Pembangunan Desa berbasis potensi lokal yang didukung sektor digital
5. Masih belum optimalnya pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan					
6. Masih rendahnya peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura					
7. Masih rendahnya produksi perikanan kelompok nelayan					
8. Masih rendahnya kompetensi angkatan kerja yang sesuai dengan pasar tenaga kerja					
9. Masih rendahnya persentase panjang jaringan jalan dan irigasi dalam kondisi baik	6. Masih rendahnya persentase hunian layak dan terjangkau, akses terhadap infrastruktur pelayanan dasar, dan				1. Peningkatan Infrastruktur
10. Masih rendahnya persentase rumah tangga berakses sanitasi dan air minum					



PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
		GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. Masih rendahnya rasio rumah layak huni	konektivitas antar wilayah				
12. Masih rendahnya perwujudan pemanfaatan ruang, struktur ruang 16,67% dan polar uang 36,85% pada tahun 2024	7. Belum Optimalnya pembangunan wilayah secara berkelanjutan dan terintegrasi antara tata ruang termasuk pengembangan permukiman inklusif, aman dan tangguh serta pemenuhan target kawasan lindung dan kebutuhan RTH			5. Keberlanjutan Penataan Ruang	
13. Rendahnya persentase tingkat keselamatan jalan					
14. Rendahnya realisasi investasi					7. Penciptaan Iklim Investasi untuk Mendorong Pembangunan Usaha dan Penciptaan Lapangan Kerja
15. Masih rendahnya persentase pajak daerah terhadap PAD					
Aspek Pelayanan Umum					
1. Belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan (RB 2024: 78,47)			6. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	6. Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	8. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
2. Masih belum optimalnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Tasikmalaya (SPBE: 3,76 poin)					
3. Belum optimalnya inovasi daerah (47,59 poin, peringkat 23 dari 27 Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat)					
4. Belum optimalnya pengimplementasian sistem pengendalian internal pemerintahan					



PERMASALAHAN (1)	ISU KLHS (2)	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH (6)
		GLOBAL (3)	NASIONAL (4)	REGIONAL (5)	
5. Belum optimalnya manajemen aparat sipil negara berdasarkan sistem merit					
6. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral					
7. Adanya potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat					

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya, 2025 (Diolah)





BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH





BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 dalam kerangka visi jangka panjang Tahun 2025-2045. Arah kebijakan, strategi dan program prioritas disusun untuk mencapai sasaran pembangunan secara berkelanjutan. Pembangunan daerah ini juga selaras dengan visi pembangunan pada tingkat provinsi dan nasional guna menciptakan keselarasan kebijakan serta kontribusi optimal bagi pembangunan regional dan nasional.

3.1 Visi dan Misi

3.1.1 Dasar Perumusan Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029

Perumusan Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya mengacu pada Visi Misi Presiden periode 2025-2029 yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Visi Misi Gubernur Jawa Barat periode 2025-2029 yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, serta didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2045.

Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu **“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”**, yang mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra- putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di Tahun 2045. Visi tersebut dicapai melalui 8 (Delapan) Misi Asta Cita, 17 Program Prioritas, 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan 320 Program Kerja seperti pada gambar berikut.



Gambar 3.1
Visi RPJMN Tahun 2025-2029
 Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029, 2025

Upaya pencapaian visi melalui 8 (delapan) Misi Asta Cita tersebut diantaranya:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan



8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Pelaksanaan Asta Cita tersebut didukung oleh 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor, diantaranya:

1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air;
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara;
3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi;
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi;
5. Pemberantasan kemiskinan;
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba;
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat;
8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi;
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif;
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas;
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup;
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani;
13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/ perkotaan dan rakyat yang membutuhkan;
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif karakteristik-mandiri lainnya;
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis SDA, termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi;
16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah; dan



17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.

Selanjutnya langkah-langkah berupa 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)/ *Quick Wins*, diantaranya:

1. Memberikan Makan Bergizi Gratis untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Anak Balita;
2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di Kabupaten;
3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional;
4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi;
5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut;
6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara;
7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ke 23%.

Sedangkan Visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 yaitu **“Jawa Barat Istimewa - Lembur Diurus, Kota Ditata”**. Pernyataan tersebut mengandung makna tata kelola wilayah yang adil dan seimbang antara pengembangan wilayah perdesaan dan perkotaan, antara pembangunan ekonomi dan konservasi. Kalimat Visi tersebut memberi pemahaman bahwa tujuan pembangunan daerah pada Tahun 2025-2029 adalah untuk menciptakan kondisi Jawa Barat yang istimewa dalam penyelenggaraan pembangunannya, dengan memperhatikan unsur mikro lokal sebagai asal muasal tradisi





(dimaknai dengan lembur/perdesaan) maupun unsur kemajuan pembangunan yang lebih makro (dimaknai dengan kota/perkotaan) sebagai potensi pengungkit pertumbuhan wilayah yang dapat mendorong kemampuan Jawa Barat untuk bersaing sebagai daerah yang unggul dalam segala bidang pembangunan.

Secara filosofi frasa, kalimat Jawa Barat Istimewa – Lembur Diurus, Kota Ditata, memiliki makna sebagai berikut:

1. **JABAR** merupakan akronim dari Jawa Barat sebagai Provinsi yang terdiri atas penduduk/masyarakat dan wilayah/daerah yang terbagi dalam 27 Kabupaten/Kota.
2. **ISTIMEWA** memiliki arti situasi atau kondisi di mana penyelenggara pemerintah, dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk mengistimewakan masyarakat, baik istimewa dalam memberikan pelayanan, maupun istimewa dalam pelaksanaan pembangunan. Istimewa adalah situasi situasi atau kondisi terunggul, termaju, paripurna, dan teratas.
3. **LEMBUR DIURUS**, Lembur dalam Bahasa Sunda berarti desa atau kampung, dan diurus berarti dikelola atau dipelihara menjadi lebih baik. Hal ini mencakup pengelolaan sumber daya alam berbasis potensi lokal, peningkatan infrastruktur pelayanan dasar, serta pemberdayaan masyarakat desa agar berkembang dan menikmati kesejahteraan yang setara dengan daerah perkotaan. Pengelolaan perdesaan meliputi pengembangan kawasan pertanian, perikanan dan kelautan, peternakan, pariwisata serta sektor lainnya yang dilaksanakan dengan tetap menjaga fungsi konservasi dan keberlanjutan lingkungan hidup serta menjaga kearifan lokal dan tradisi.
4. **KOTA DITATA**, Kota merujuk pada kawasan perkotaan atau kota-kota besar di Jawa Barat, sedangkan ditata berarti dikelola atau ditata dengan baik. Slogan ini mengandung arti bahwa pemerintah akan fokus pada penataan kota, termasuk perbaikan infrastruktur, transportasi, tata ruang, pengelolaan limbah, dan pembangunan ekonomi yang lebih terencana. Pembangunan wilayah perkotaan akan diwujudkan sebagai kawasan perdagangan barang dan jasa, serta kawasan industri yang





dikelola untuk pengelolaan sumber daya dan daya saing daerah. Hal ini bertujuan untuk menjadikan kota-kota di Jawa Barat sebagai tempat yang nyaman untuk ditinggali, dengan memperhatikan kesejahteraan warganya dan menciptakan kota yang lebih maju, modern, serta ramah lingkungan.

Secara keseluruhan, “Lembur Diurus, Kota Ditata” mencerminkan visi pembangunan yang seimbang antara pedesaan dan perkotaan. Jawa Barat ingin memastikan bahwa daerah pedesaan tidak akan tertinggal dalam hal pembangunan dan pemberdayaan, sementara di sisi lain, kota-kota di Jawa Barat juga mendapat perhatian serius dalam hal penataan dan perbaikan kualitas hidup, sehingga baik di desa maupun kota dapat berkembang secara berkelanjutan dan harmonis.

Visi tersebut dicapai melalui misi yang dijabarkan ke dalam 4 misi, diantaranya:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul;
2. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan;
3. Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Perdesaan, serta Miskin dan Kaya; dan
4. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan prinsip *Good and Clean Governance*.

Untuk mendukung program prioritas pembangunan daerah disusun langkah strategis pembangunan dalam bentuk 9 (sembilan) Langkah Membangun Jabar (*9 Langkah Ngawangun Jabar*) yang meliputi:

1. **Langkah Pertama**, yaitu pembangunan infrastruktur jalan sampai ke pelosok desa dan infrastruktur permukiman perkotaan;
2. **Langkah Kedua**, yaitu pembangunan jaringan irigasi di seluruh wilayah pertanian serta mendorong terciptanya ekosistem pertanian organik;
3. **Langkah Ketiga**, yaitu pengembangan pendidikan berkarakter dan penambahan ruang kelas baru, serta mencetak 10.000 Manajer Putra Daerah;
4. **Langkah Keempat**, yaitu pengembangan lapangan kerja baru;





5. **Langkah Kelima**, yaitu penyempurnaan RSUD Kabupaten/Kota dengan penambahan layanan khusus;
6. **Langkah Keenam**, yaitu penanganan stunting dan gizi buruk dan pengembangan industri pengobatan berbasis kearifan lingkungan;
7. **Langkah Ketujuh**, yaitu pemulihan kondisi lingkungan Jawa Barat;
8. **Langkah Kedelapan**, yaitu pengembangan pengelolaan sampah mandiri;
9. **Langkah Kesembilan**, yaitu pembangunan desa berbasis kearifan lingkungan dan transformasi birokrasi.

Adapun dalam perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 telah berpedoman pada RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2045 yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2024. Visi yang tertuang dalam RPJPD yaitu **“Kabupaten Tasikmalaya Yang Religius/Islami, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”**. Visi tersebut merupakan keberlanjutan visi pembangunan periode sebelumnya dan diharapkan dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dengan tetap berpedoman pada tujuan nasional seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, serta pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat sehingga pembangunan Kabupaten Tasikmalaya dapat terwujud dan terukur tingkat keberhasilan pada setiap tahapannya.

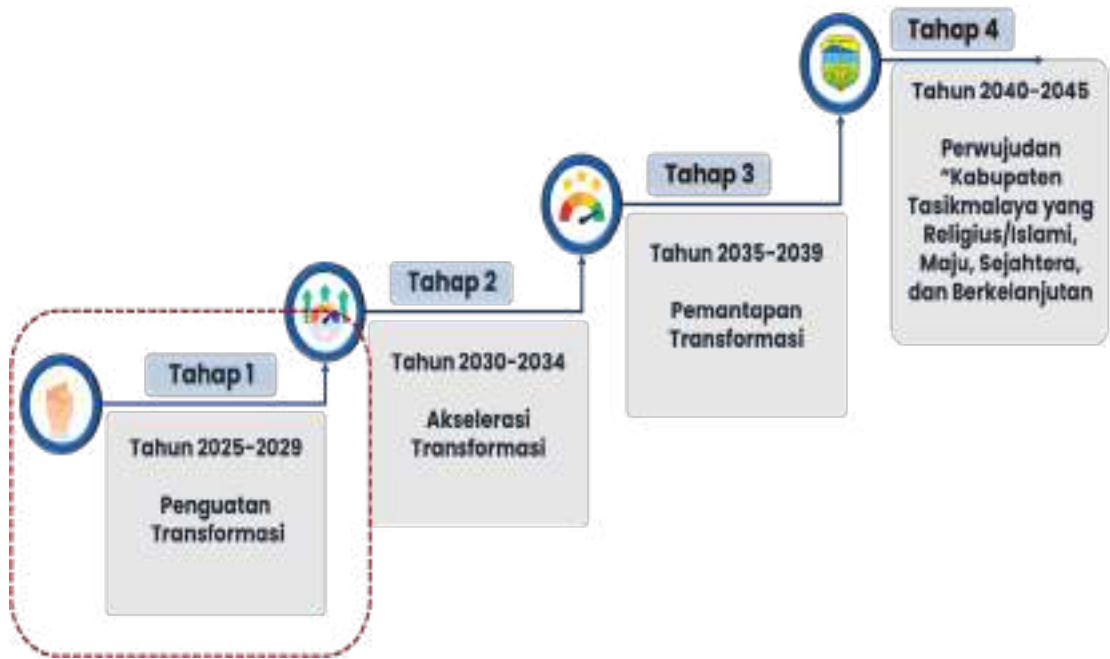
Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 8 (delapan) misi yang tercantum pada gambar sebagai berikut.





Gambar 3.2
Misi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2045
Sumber: RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2045, 2025

Pada dokumen RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2045, telah ditetapkan tema pembangunan untuk tahap I periode RPJMD Tahun 2025–2029 yaitu **“Penguatan Transformasi”** sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut.



Gambar 3.3
Penahapan RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2045
Sumber: RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2045, 2025



Tahap pertama ini ditujukan untuk penguatan landasan yang kokoh bagi transformasi pembangunan di masa mendatang, melalui penguatan kapasitas dan potensi daerah, pelestarian hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai, serta perbaikan pada aspek-aspek yang masih menunjukkan kinerja rendah agar pembangunan dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya untuk masa jabatan Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2030 yang disusun berdasarkan pada RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2045, dengan mengacu pada RPJMN Tahun 2025–2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029.

3.1.2 Visi Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran dari visi yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya terpilih. Visi ini menjadi dasar dalam merumuskan arah dan prioritas pembangunan daerah, dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti kondisi dan potensi wilayah, permasalahan pembangunan yang ada, tantangan yang dihadapi, isu-isu strategis yang berkembang, serta kebijakan pembangunan di pusat maupun nasional. Visi tersebut akan menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun ke depan, sekaligus sebagai sasaran tahap awal pencapaian RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2045, yang berfokus pada penguatan transformasi di setiap aspek pembangunan. Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 yaitu:





**“TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, MAJU, ADIL, DAN
MAKMUR”**



Gambar 3.4
Visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029
Sumber: Hasil analisis, 2025

Makna dari visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut:

1. Religius/Islami

Frasa “Religius/Islami” merupakan saran masukan dari para pendahulu, termasuk para ulama yang telah dimunculkan pada dokumen RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 yang dijabarkan kembali melalui dokumen jangka menengah.

Berdasarkan saran dan masukan dari para ulama dapat dideskripsikan religius atau keberagamaan merupakan pencerminan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan agama yang dianutnya, dengan demikian makna religius disini mencakup seluruh umat pemeluk agama.

Adapun “Islami” adalah penegasan kondisi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang 99,9% beragama Islam, namun tidak boleh dinafikan keberadaan penganut agama lain. Seiring makna Islam yang universal, kaum Muslim percaya bahwa ditengah perbedaan itu terdapat titik-titik persamaan. Oleh karena itu kaum Muslimin yang berada di Kabupaten Tasikmalaya justru didorong untuk dapat “bekerja sama” dengan kelompok-kelompok lain yang berbeda keyakinan dengan bertitik tolak dari “*kalimattin sawa*” (prinsip atau kalimat yang disepakati bersama).



Keutuhan manusia pada hakikatnya ditentukan oleh *dimensi religius, budaya, dan ilmiah* (Soerjanto Poespowardojo; *Strategi Kebudayaan*). *Dimensi religius* mengingatkan bahwa manusia tidak bisa dipandang hanya sebagai angka atau faktor semata. Sebaliknya, manusia harus dihargai dengan mempertahankan kepribadian, kebebasan, dan martabatnya. Dengan memperhatikan dimensi ini, kita dapat menghindari perlakuan dan sikap yang sewenang-wenang terhadap manusia.

Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dikenal menjunjung tinggi nilai-nilai Religius/Islami, namun tanpa kesan simbolik yang terlalu khas atau eksklusif. Mengacu pada peran aktif organisasi sosial keagamaan Islam yang berkembang di Tasikmalaya seperti NU, Muhammadiyah, Persis, PUI, dan harakah Islam lainnya, kaum Muslim di Tasikmalaya dipercaya bersikap terbuka terhadap perubahan serta mampu mengambil pelajaran dari berbagai peradaban lainnya. Masyarakatnya cenderung bersikap toleran terhadap kemajemukan, termasuk kemajemukan di dalam komunitas itu sendiri.

Nilai-nilai Religius/Islami berperan sebagai modal sosial bagi Kabupaten Tasikmalaya dalam mewujudkan manusia dan masyarakat yang berakhlak, maju, dan berdaya saing. Nilai-nilai ini menjadi landasan moral dan etika, serta sumber inspirasi dan motivasi bagi setiap individu untuk berbuat kebaikan melalui sikap saling mengasihi, berbagi, tolong-menolong, dan peduli terhadap sesama manusia serta lingkungan. Falsafah hidup yang berorientasi pada kebaikan bersama ini diwujudkan melalui aktivitas filantropi, gotong royong, dan solidaritas sosial.

Islam sangat menekankan pentingnya nilai kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian. Nilai-nilai tersebut saling berkaitan erat dan menjadi dasar bagi terciptanya kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Pandangan holistik tentang kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian tidak hanya relevan bagi umat Muslim, tetapi juga dapat menjadi dasar untuk dialog dan kerja sama antar komunitas. Ketiga aspek ini saling terkait dalam ajaran Islam dan membentuk dasar dari hubungan antar sesama manusia serta hubungan manusia dengan Allah SWT.



Pada konteks kenegaraan dan kebangsaan, konsep Religius/Islami memiliki kaitan yang erat dengan Pancasila, karena nilai-nilai luhur Islam memperkuat nilai-nilai Pancasila. Sinergi antara nilai-nilai tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

- **Ketuhanan Yang Maha Esa:** Baik Islam maupun Pancasila sama-sama mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber segala sesuatu. Prinsip ini menjadi landasan utama bagi hubungan harmonis antara keduanya.
- **Kemanusiaan yang Adil dan Beradab:** Ajaran Islam sangat menekankan pentingnya kemanusiaan, keadilan, dan peradaban. Nilai-nilai ini sejalan dengan sila kedua Pancasila yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.
- **Persatuan Indonesia:** Islam mengajarkan persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah yang melampaui batas suku, ras, dan golongan. Hal ini sejalan dengan sila ketiga Pancasila yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa.
- **Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan:** Islam menuntut musyawarah untuk mencapai mufakat. Prinsip ini sejalan dengan sila keempat Pancasila yang menekankan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan.
- **Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia:** Islam juga mengajarkan keadilan sosial, seperti zakat, infak, dan sedekah yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Hal ini sejalan dengan sila kelima Pancasila yang menjunjung tinggi keadilan sosial.

2. Maju

Makna kata "maju" dalam visi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya diambil dari simbol daerah berupa pita kuning bertuliskan "Sukapura Ngadaun Ngora", yang melambangkan semangat pembaharuan dan kemajuan yang bersifat abadi. Kemajuan dalam konteks ini tidak hanya berarti pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencerminkan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh baik dari aspek sosial, ekonomi, infrastruktur, maupun tata kelola pemerintahan.



Menurut Todaro dan Smith (2011), kemajuan suatu daerah atau pembangunan yang berkelanjutan ditandai oleh tiga hal utama: peningkatan pendapatan, perbaikan kualitas hidup, dan perluasan pilihan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendekatan pembangunan manusia yang dikembangkan oleh UNDP, yang mengukur kemajuan berdasarkan indikator pendidikan, kesehatan, dan pendapatan.

Dilihat dari sisi sosial, kemajuan suatu wilayah dilihat dari kualitas sumber daya manusianya. Suatu daerah dianggap semakin berkembang apabila penduduknya memiliki kualitas yang baik dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Tingginya mutu pendidikan tercermin dari meningkatnya rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, sedangkan kualitas kesehatan tercermin dari angka harapan hidup yang tinggi.

Dilihat dari perkembangan ekonomi, daerah yang maju memiliki pendapatan per kapita yang tinggi. Ini umumnya terjadi karena wilayah tersebut didukung oleh sektor industri dan jasa yang kuat, yang mampu menyediakan lapangan kerja dengan penghasilan yang layak.

Apabila dilihat dari infrastruktur, daerah maju memiliki jaringan jalan yang memadai serta sistem transportasi publik yang efisien. Ketersediaan utilitas seperti listrik, air bersih, dan sistem pengelolaan limbah yang baik menjadi penunjang utama. Selain itu, infrastruktur teknologi informasi yang modern dengan akses internet cepat dan luas menjadi keunggulan tambahan. Sarana publik seperti taman, tempat rekreasi, ruang terbuka hijau, serta bangunan dan perumahan berkualitas juga tersedia secara memadai.

Sedangkan dari perspektif tata kelola pemerintahan, kemajuan suatu daerah tercermin melalui proses pengambilan keputusan yang transparan dan sistem pengelolaan anggaran yang terbuka, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi. Warga juga diberi ruang untuk berpartisipasi melalui forum diskusi dan mekanisme partisipatif lainnya. Pemerintah daerah menunjukkan semangat inovasi untuk meningkatkan kualitas layanan dan memiliki kemampuan manajerial yang baik dalam mengelola sumber daya yang ada.



3. Adil

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata adil berarti tidak berat sebelah, jujur, tidak berpihak, dan memperlakukan secara sama rata. Keadilan merujuk pada sikap lurus, jujur, dan ikhlas yang mencerminkan ketidakberpihakan. Dalam kehidupan bermasyarakat, keadilan tercermin dari adanya tatanan sosial yang menjunjung nilai-nilai kebenaran dan perlakuan yang sewajarnya terhadap setiap individu.

Secara etimologis, kata adil berasal dari bahasa Arab, dari akar kata 'adala-ya'dilu-'adl, yang berarti berbuat adil, menegakkan kejujuran, dan menjaga keseimbangan. Dalam konteks ini, keadilan tidak selalu berarti kesamaan mutlak, melainkan keseimbangan dan proporsionalitas sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing individu atau kelompok.

Seorang pemimpin yang adil adalah mereka yang mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, serta bersikap tanpa diskriminasi dalam membuat kebijakan dan mengambil keputusan.

Makna "keadilan" menurut Sumitro Djojohadikusumo dalam bukunya yang berjudul Ekonomi Pembangunan (1955), menekankan pentingnya pembangunan ekonomi yang inklusif dan merata, di mana pemerintah harus aktif memastikan pertumbuhan tidak hanya dinikmati oleh segelintir elite tetapi juga oleh masyarakat kecil, ia percaya bahwa negara harus berperan kuat dalam mengarahkan ekonomi namun tetap menghormati mekanisme pasar, dengan birokrasi yang efisien dan bebas korupsi agar kebijakan pro-rakyat dapat terlaksana. Ia juga menekankan keadilan sosial melalui perluasan akses pendidikan dan penciptaan lapangan kerja, khususnya di sektor padat karya, serta mendorong desentralisasi pembangunan untuk mengurangi kesenjangan antardaerah. Selain itu, Sumitro menegaskan bahwa pemerintahan yang adil harus didukung oleh birokrasi yang bersih dan penegakan hukum yang tegas terhadap korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan, sehingga sumber daya negara dapat didistribusikan secara adil bagi seluruh rakyat.

Konsep pembangunan yang adil (*equitable development*) merujuk pada pendekatan pembangunan yang memastikan semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok marginal dan rentan, mendapatkan



manfaat yang setara dari pertumbuhan ekonomi, akses terhadap sumber daya, pelayanan publik, dan peluang partisipasi dalam proses pembangunan. Keadilan dalam pembangunan tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada distribusi manfaat yang inklusif dan berkelanjutan.

Nilai-nilai keadilan ini sejalan dengan semangat yang terkandung dalam lambang daerah Kabupaten Tasikmalaya, yang merepresentasikan tekad untuk mewujudkan pembangunan yang berpihak pada semua. Kabupaten Tasikmalaya berkomitmen untuk menciptakan pemerataan, kesetaraan, dan perlakuan yang layak bagi seluruh warganya, agar tidak ada yang tertinggal, tersisih, atau terpinggirkan dalam proses pembangunan daerah.

4. Makmur

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makmur berarti sejahtera, serba kecukupan, dan tidak mengalami kekurangan. Kemakmuran juga dapat dimaknai sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, baik secara jasmani maupun rohani, sehingga tercipta rasa aman, puas, dan tenteram dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks bernegara, kemakmuran mencakup seluruh potensi dan kekayaan yang dimiliki oleh negara atau daerah, yang dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Kemakmuran bukan semata-mata tentang pencapaian materi dan pertumbuhan ekonomi, melainkan juga tentang keadilan sosial, kehidupan yang layak, dan kebahagiaan spiritual bagi seluruh masyarakat.

Konsep kemakmuran menekankan keseimbangan antara kesejahteraan lahir dan batin, serta akses terhadap fasilitas dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan, dan lingkungan yang bersih dan aman. Seluruh masyarakat berhak menikmati hasil pembangunan secara merata, tanpa diskriminasi dan ketimpangan.

Sementara itu, menurut Prof. Mubyarto (1999), seorang ekonom kerakyatan, kemakmuran rakyat harus menjadi pusat perhatian dalam pembangunan. Ia berpendapat bahwa ukuran utama





kemakmuran bukanlah pertumbuhan ekonomi makro semata, tetapi meningkatnya kualitas hidup masyarakat kecil, berkurangnya kemiskinan, dan meratanya akses terhadap sumber daya pembangunan.

Nilai-nilai ini selaras dengan makna simbol sawah berwarna hijau pada lambang daerah Kabupaten Tasikmalaya, yang merepresentasikan kesuburan tanah dan kemakmuran rakyatnya. Simbol tersebut mencerminkan tekad daerah untuk membangun kehidupan masyarakat yang produktif, sejahtera, dan berkelanjutan.

Kabupaten Tasikmalaya bercita-cita mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera secara menyeluruh berkecukupan dalam aspek ekonomi, hidup dalam ketenangan sosial dan spiritual, serta merasakan hasil pembangunan yang merata. Pemerintah daerah berkomitmen menciptakan lingkungan yang mendukung produktivitas, inklusivitas, dan pemerataan, sehingga setiap warga dapat hidup secara layak, bermartabat, dan penuh harapan akan masa depan yang lebih baik.

Indikasi terwujudnya pencapaian Visi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2045 sebagaimana termuat dalam RPJPD Kabupaten Tasikmalaya ditandai dengan 5 (lima) sasaran visi pada tahap pertama (Tahun 2025-2029) diantaranya:

- 1. Peningkatan Pendapatan per kapita;
- 2. Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan;
- 3. Peningkatan daya saing daerah;
- 4. Peningkatan daya saing sumber daya manusia; dan
- 5. Penurunan emisi GRK menuju *net zero emission*.

Tabel 3.1
Sasaran Visi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029

NO	SASARAN VISI	INDIKATOR	BASELINE 2025	TARGET 2029
1	Peningkatan Pendapatan per kapita	a. PDRB per kapita (Rp Juta)	26,57	30,93
		c. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	8,48	9,08
2	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	a. Tingkat Kemiskinan (%)	10.17	9,71
		b. Rasio gini (Indeks)	0,360	0,348

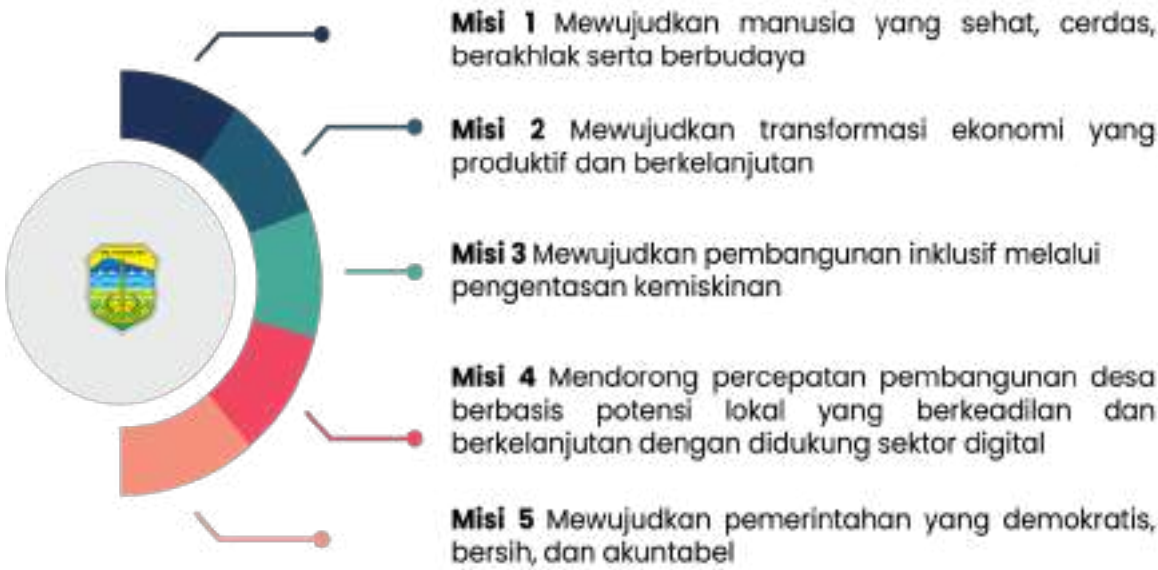


NO	SASARAN VISI	INDIKATOR	BASELINE 2025	TARGET 2029
		c. Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap Provinsi (%)	1,73	1,73
		d. Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,64	5,14
3	Peningkatan daya saing daerah	Indeks Daya Saing Daerah (poin)	3,56	3,98
4	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	70,27	73,48
5	Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan Intensitas Emisi GRK (Ton CO ² eq/2010 IDR Milyar)	5,57	8,39
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (poin)	66,06	68,32

Sumber: Hasil analisis, 2025

3.1.3 Misi Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029

Visi Kabupaten Tasikmalaya diterjemahkan ke dalam 5 (lima) Misi Pembangunan yang merupakan langkah untuk mencapai Visi, sebagaimana berikut:



Gambar 3.5
Misi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029

Sumber: Hasil analisis, 2025





Adapun penjelasan misi tersebut diantaranya:

1. Mewujudkan manusia yang sehat, cerdas, berakhlak serta berbudaya

Misi ini bertujuan untuk membentuk manusia seutuhnya yang tidak hanya unggul secara fisik dan intelektual, tetapi juga memiliki fondasi moral yang kuat dan identitas budaya yang kokoh. Misi ini membutuhkan upaya kolektif dari berbagai pihak, mulai dari keluarga, sekolah, pemerintah, hingga masyarakat luas.

2. Mewujudkan transformasi ekonomi yang produktif dan berkelanjutan

Misi ini berfokus pada perubahan mendasar dalam struktur dan cara kerja perekonomian untuk mencapai pertumbuhan yang lebih baik dan lebih tahan lama. Aspek produktif dalam transformasi ekonomi berarti meningkatkan kapasitas perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa dengan lebih efisien dan bernilai tinggi. Aspek berkelanjutan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai tidak merusak lingkungan atau mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Ini adalah keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial.

3. Mewujudkan pembangunan inklusif melalui pengentasan kemiskinan

Misi ini merupakan komitmen pemerintah daerah untuk membangun masyarakat yang sejahtera secara merata, tanpa meninggalkan kelompok rentan atau marjinal. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, terutama yang miskin dan rentan, mendapat akses dan manfaat dari pembangunan. Tujuan akhirnya yaitu terciptanya keadilan sosial dan peningkatan kualitas hidup bagi seluruh masyarakat, khususnya mereka yang selama ini tertinggal secara ekonomi dan sosial, sebagai bagian dari pembangunan yang berkeadilan.

4. Mendorong percepatan pembangunan desa berbasis potensi lokal yang berkeadilan dan berkelanjutan didukung sektor digital



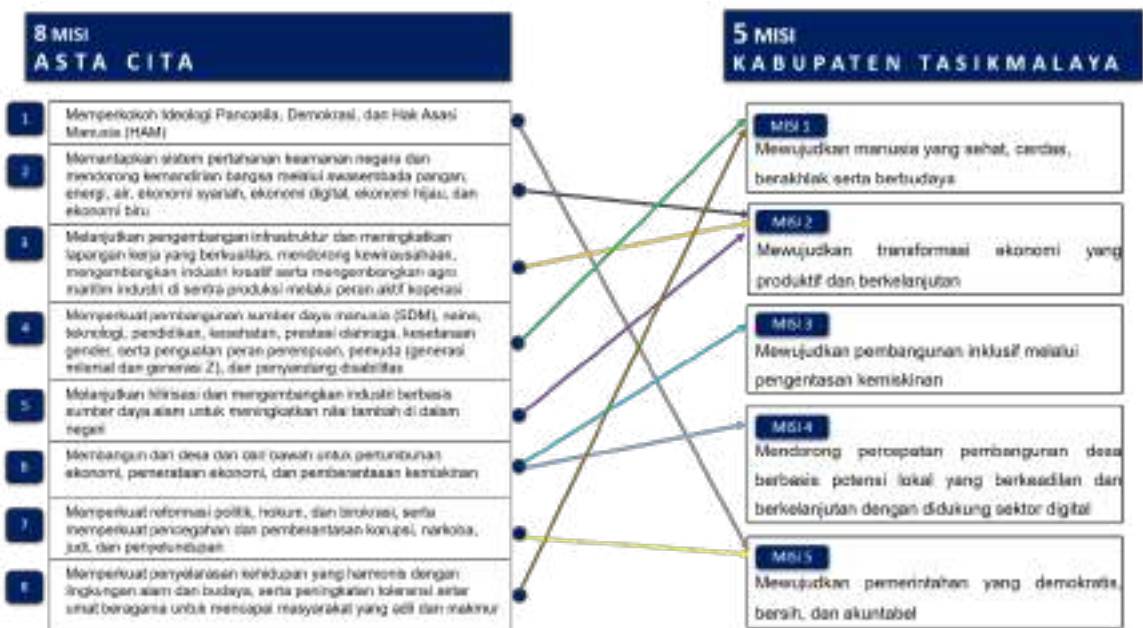


Misi ini menunjukkan arah kebijakan pembangunan desa yang fokus pada pemberdayaan kekuatan lokal, pemerataan hasil pembangunan, keberlanjutan sumber daya, serta pemanfaatan teknologi digital. Tujuan dari misi ini yaitu terciptanya desa yang maju, mandiri, dan sejahtera melalui pembangunan yang terarah, cepat, merata, dan adaptif terhadap perkembangan zaman, tanpa kehilangan jati diri lokal dan komitmen terhadap keadilan sosial.

5. Mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih dan akuntabel

Misi ini mencerminkan komitmen untuk membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, adil, partisipatif, dan bertanggung jawab kepada rakyat. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, mempercepat pembangunan, dan menciptakan kesejahteraan melalui sistem pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Rumusan misi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 telah diselaraskan dengan Misi/Asta Cita RPJMN Tahun 2025-2029 sebagaimana tertuang pada gambar berikut.



Gambar 3.6

Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 dengan Asta Cita RPJMN Tahun 2025-2029

Sumber: Hasil analisis, 2025





Selain dengan Misi/Asta Cita RPJMN Tahun 2025-2029, rumusan misi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 telah diselaraskan dengan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat 2025-2029 sebagaimana tertuang pada gambar berikut.



Gambar 3.7
Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 2029 dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029

Sumber: Hasil analisis, 2025

3.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan secara keseluruhan. Subbab ini memuat tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Tasikmalaya yang dirumuskan berdasarkan pendekatan teknokratik, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah berdasarkan data dan informasi yang telah digali dan dianalisis pada bab-bab selanjutnya.

Tujuan dan sasaran sebagai upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Tasikmalaya yaitu sebagai berikut:



1. Perwujudan Misi 1: Mewujudkan manusia yang sehat, cerdas, berakhlak serta berbudaya, memiliki tujuan yaitu: terwujudnya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, dengan sasaran:

- 1) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
- 2) Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
- 3) Meningkatnya karakter masyarakat yang religius, rukun, harmonis, berbudaya dan berwawasan kebangsaan
- 4) Meningkatnya kualitas keluarga, pemuda, dan kesetaraan gender
- 5) Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

2. Perwujudan Misi 2: Mewujudkan transformasi ekonomi yang produktif dan berkelanjutan, memiliki tujuan yaitu: meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan kemandirian pangan yang berkelanjutan didukung infrastruktur yang andal, dengan sasaran:

- 1) Meningkatnya ketahanan pangan daerah
- 2) Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dan perikanan dalam perekonomian
- 3) Meningkatnya perdagangan daerah
- 4) Meningkatnya daya saing UMKM dan industri
- 5) Meningkatnya kinerja koperasi
- 6) Meningkatnya investasi dan kesempatan kerja
- 7) Meningkatnya produktivitas pariwisata dan ekonomi kreatif
- 8) Terkendalinya stabilitas ekonomi daerah
- 9) Meningkatnya kualitas infrastruktur yang andal, berwawasan lingkungan serta tanggap bencana

3. Perwujudan Misi 3: Mewujudkan pembangunan inklusif melalui pengentasan kemiskinan, memiliki tujuan yaitu: meningkatnya pemerataan pembangunan, dengan sasaran:

- 1) Menurunnya kemiskinan

4. Perwujudan Misi 4: Mendorong percepatan pembangunan desa berbasis potensi lokal yang berkeadilan dan berkelanjutan





didukung sektor digital, memiliki tujuan yaitu: terwujudnya desa mandiri yang mendukung akselerasi pembangunan daerah, dengan sasaran:

- 1) Meningkatnya kemandirian desa

5. Perwujudan Misi 5: Mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih dan akuntabel, memiliki tujuan yaitu: terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, dengan sasaran:

- 1) Terwujudnya birokrasi yang adaptif dan berintegritas

Secara lebih rinci tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Tasikmalaya lengkap dengan indikator kinerja tujuan/sasaran disajikan pada tabel berikut.





Tabel 3.2

Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR		BASELINE 2024	TARGET TAHUN						
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
VISI : "TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI MAJU ADIL DAN MAKMUR"													
Misi 1 Mewujudkan Manusia yang Sehat Cerdas Berakhlak serta Berbudaya	T.1	Terwujudnya manusia yang berkualitas dan berdaya saing			Indeks Pembangunan Manusia (Poin)		69,98	70,27	70,93	71,51	72,12	72,76	73,43
			S.1.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	a.	Angka Harapan Hidup (Tahun)	74,06	74,37	74,42	74,98	75,29	75,29	75,90
					b.	Prevalensi Stunting (%)	17,10	15,41	13,96	12,71	11,64	10,71	9,91
			S.1.2	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	a.	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,97	8,03	8,09	8,15	8,21	8,27	8,33
					b.	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,64	12,66	12,7	12,73	12,76	12,79	12,82
			S.1.3	Meningkatnya karakter masyarakat yang religius, rukun, harmonis, berbudaya dan berwawasan kebangsaan	a.	Indeks Kesalehan Umat Beragama (Poin)	N/A	7	85,89	86,25	86,60	86,96	87,32
			S.1.4	Meningkatnya kualitas keluarga pemuda dan kesetaraan gender	a.	Indeks Pembangunan Keluarga (Poin)	59,61	60,70	61,50	62,40	63,50	64,10	65,00
					b.	Indeks Pembangunan Gender (Poin)	87,61	87,81	87,98	88,20	88,30	88,50	88,70
					c.	Indeks Pembangunan Pemuda (Poin)	56,4	57,25	58,1	58,98	59,86	60,76	61,67
		S.1.5	Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban	a.	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Poin)	53,49	57,72	61,72	70,39	77,87	84,91	90,45	



VISI/MISI	TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR		BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
								2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				umum serta perlindungan masyarakat									
Misi 2 Mewujudkan transformasi ekonomi yang produktif dan berkelanjutan	T.2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Kemandirian Pangan yang Berkelanjutan Didukung Infratraktur yang Andal			Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)		4,64	4,66 - 5,16	4,63 - 5,72	4,71 - 6,90	4,74 - 7,04	4,89 - 7,34	4,94 - 5,45
					Indeks Ketahanan Pangan (Poin)		78,47	79,25	80,04	80,84	81,72	82,53	83,36
			S.2.1	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	a.	Prevalence of Undernourishment (PoU) (%)	5,95	5,85	5,75	5,66	5,56	5,46	5,36
			S.2.2	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dan perikanan dalam Perekonomian	a.	PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan (Rp Miliar)	18.326,32	19.747,78	21.138,37	22.626,89	24.220,22	25.925,75	27.751,39
			S.2.3	Meningkatnya perdagangan daerah	a.	PDRB Sektor Perdagangan (Rp Miliar)	8.959,53	9.697,99	10.426,24	11.209,17	12.050,89	12.955,81	13.928,69
			S.2.4	Meningkatnya daya saing UMKM dan Industri	a.	PDRB Sektor Industri Pengolahan (Rp Miliar)	4.146,39	4.475,62	4.921,02	5.410,75	5.949,21	6.541,25	7.192,21
			S.2.5	Meningkatnya kinerja koperasi	a.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,70	0,70	0,75	0,80	0,85	0,90	0,95
			S.2.6	Meningkatnya Investasi dan kesempatan kerja	a.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (Rp Miliar)	9.838,27	10.498,70	11.298,12	12.158,40	13.084,19	14.080,47	15.152,61
					b.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,74	3,67	3,56	3,29	3,14	2,99	2,84
			S.2.7	Meningkatnya Produktivitas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	a.	PDRB Sektor Akomodasi Makan dan Minum (Rp Miliar)	749,65	817,92	895,37	980,17	1.072,99	1.174,61	1.285,85



VISI/MISI	TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			S.2.8 Terkendalinya Stabilitas Ekonomi Daerah	a.	Tingkat Inflasi (%)	1,94	1,51 - 3,49	1,51 - 3,49	1,51 - 3,49	1,51 - 3,49	1,51 - 3,49
			S.2.9 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur yang Andal Berwawasan Lingkungan serta Tanggap Bencana	a.	Indeks Kualitas Infrastruktur (%)	44,73	47,75	48,91	50,14	51,38	52,63
				b.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	65,51	67,60	67,85	68,10	68,36	68,61
				c.	Indeks Risiko Bencana (Poin)	145,5	141,14	136,90	132,79	128,81	124,95
Misi 3 Mewujudkan Pembangunan Inklusif melalui Pengentasan Kemiskinan	T.3	Meningkatnya pemerataan pembangunan			Rasio Gini (Poin)	0,363	0,360	0,357	0,354	0,351	0,348
					Tingkat Kemiskinan (%)	10,23	10,17	10,10	9,97	9,84	9,71
			S.3.1 Menurunnya kemiskinan	a.	Persentase Penduduk Miskin (%)	10,23	10,17	10,10	9,97	9,84	9,71
Misi 4 Mendorong Percepatan Pembangunan Desa Berbasis Potensi Lokal yang Berkeadilan dan Berkelanjutan dengan didukung Sektor Digital	T.4	Terwujudnya desa mandiri yang mendukung akselerasi pembangunan daerah			Indeks Desa (Poin)	0,7735	0,7755	0,7776	0,7796	0,7817	0,7837
			S.4.1 Meningkatnya kemandirian desa	a.	Laju Peningkatan Desa Mandiri (%)	50,91	10,84	9,78	8,91	8,18	7,56



VISI/MISI	TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Misi 5 Mewujudkan Pemerintahan yang demokratis, Bersih dan Akuntabel	T.5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik			Indeks Reformasi Birokrasi (Predikat)	BB	BB	A	A	A	A	A
			S.5.1	Terwujudnya birokrasi yang adaptif dan berintegritas	a	Persentase Capaian Reformasi Birokrasi General (Poin)	69,81	70	70,5	71	71,5	72

Sumber: Hasil analisis, 2025





3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

Arah kebijakan dalam RPJMD merupakan pedoman atau panduan yang digunakan untuk menentukan strategi dan prioritas pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun. Arah kebijakan ini menjadi landasan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun strategi pembangunan merupakan langkah-langkah konkrit yang dirumuskan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan yang ada. Rumusan strategi dan arah kebijakan untuk setiap tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel sebagai berikut.





Tabel 3.3
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
VISI : "TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, MAJU, ADIL, DAN MAKMUR"				
Misi 1 Mewujudkan Manusia yang Sehat, Cerdas, Berakhlak serta Berbudaya	T.1 Terwujudnya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	S.1.1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Meningkatkan Ketersediaan Layanan Kesehatan Dasar dan Rujukan
				Meningkatkan Pemerataan dan Kompetensi Tenaga Kesehatan
				Meningkatkan Akses dan Mutu Layanan Kesehatan Dasar dan Rujukan
			Penguatan program promotif dan preventif dalam bidang kesehatan	Kampanye gaya hidup sehat GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)
				Deteksi dini penyakit menular dan tidak menular (PTM)
				Vaksinasi dan imunisasi dasar lengkap
				Edukasi Penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
			Penguatan Pembiayaan dan Perlindungan Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan subsidi iuran bagi masyarakat miskin
				Mendorong kolaborasi dengan CSR dan filantropi kesehatan
			Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan	Mengoptimalkan penerapan Sanitasi Total Berbasis masyarakat (STBM)



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		S.1.2 Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Peningkatan akses pendidikan	Melaksanakan pengawasan keamanan makanan, minuman dan obat obatan
				Membangun ruang kelas baru dan rehabilitasi ruang kelas jenjang PAUD, SD dan SMP
				Meningkatkan sarana prasarana pendidikan
				Menuntaskan wajib belajar 9 tahun
				Mengembangkan pendidikan kesetaraan (PKBM, Kejar Paket A/B/C)
			Peningkatan mutu pendidikan	Meningkatkan kemampuan literasi, numerasi, dan pendidikan karakter peserta didik dalam kurikulum
				Mengembangkan konsentrasi pendidikan konsentrasi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan untuk mendukung program hilirisasi Agribisnis
			Peningkatan kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan	Meningkatkan kualitas pendidikan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga pendidik dan kependidikan
				Meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan
		S.1.3 Meningkatnya karakter masyarakat yang religius, rukun, harmonis, berbudaya, dan	Peningkatan kualitas keagamaan dan moral sebagai dasar pembentukan karakter bangsa	Mengoptimalkan nilai-nilai spiritual masyarakat dan ASN
				Memfasilitasi penguatan kelembagaan pesantren dan penyelenggaraan pendidikan pesantren melalui Implementasi Perda Pesantren



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		berwawasan kebangsaan	Peningkatan nilai keshalehan sosial	Meningkatkan kepedulian/ solidaritas sosial
				Meningkatkan relasi antar manusia (kebhinekaan)
				Memperkuat etika/budi pekerti
				Meningkatkan pelestarian lingkungan
				Meningkatkan ketaatan pada pemerintah
				Memperkuat etika digital
			Penguatan pembinaan kehidupan beragama yang harmonis	Mendorong kerukunan antarumat beragama melalui dialog lintas iman dan forum FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama)
				Melakukan penanganan preventif dan partisipatif terhadap potensi konflik berbasis keagamaan.
				Meningkatkan pendidikan politik dan pembinaan wawasan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat.
		Peningkatan pelestarian dan pemanfaatan kebudayaan daerah untuk memperkuat identitas dan karakter masyarakat		Melestarikan seni tradisi yang hampir punah
				Menyelenggarakan festival budaya daerah
				Merevitalisasi kawasan budaya, situs sejarah, dan cagar budaya.
	S.1.4 Meningkatnya Kualitas Keluarga, Pemuda dan Kesetaraan Gender	Peningkatan Kualitas dan Ketahanan Keluarga		Menguatkan edukasi pranikah dan pasca nikah berbasis nilai agama, budaya, dan kesehatan reproduksi.
				Mengembangkan keluarga sejahtera, keluarga sadar hukum, keluarga sehat, dan keluarga tangguh bencana



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Mengoptimalkan peran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL)
				Meningkatkan Edukasi pengasuhan berbasis hak anak dan perlindungan perempuan.
			Penguatan peran pemuda dalam pembangunan	Meningkatkan pendidikan karakter, kewirausahaan, dan kepemimpinan pemuda
				Memberikan dukungan terhadap organisasi kepemudaan, karang taruna, dan komunitas kreatif
				Mengembangkan pemuda pelopor, pemuda inovatif, dan pemuda tangguh bencana
				Meningkatkan akses pemuda terhadap pelatihan kerja dan jejaring usaha produktif
				Meningkatkan kualitas pemuda dalam pengabdian terhadap pembangunan desa
			Peningkatan daya saing olahraga	Membangun stadion dan pusat olahraga
				Meningkatkan kualitas pelaku olahraga
			Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan hak anak	Menyelenggarakan Integrasi perspektif gender dalam perencanaan dan penganggaran (Gender Responsive Budgeting/GRB)
				Meningkatkan Pemberdayaan perempuan melalui pendidikan, pelatihan ekonomi produktif, dan kewirausahaan



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta menguatkan layanan perlindungan korban
				Menguatkan Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pengambilan Keputusan
				Mewujudkan lingkungan yang aman, inklusif, dan layak anak
		S.1.5 Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Peningkatan efektivitas penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat secara konsisten	Memperkuat sistem penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang responsif dan berkelanjutan
			Penguatan kapasitas kelembagaan Satpol PP	Memperkuat kelembagaan dan profesionalisme Satpol PP dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat
			Pengembangan kemitraan yang sinergis dengan aparat keamanan dan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang tertib aman dan kondusif	Meningkatkan koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Daerah, TNI, Polri dan unsur masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang tertib, aman dan kondusif



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Misi 2 Mewujudkan Transformasi ekonomi yang produktif dan berkelanjutan	T.2 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan Kemandirian Pangan yang berkelanjutan didukung infrastruktur yang andal	S.2.1 Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Peningkatan ketersediaan, akses, dan keamanan pangan	Meningkatkan produksi dan penguatan cadangan pangan
				Menstabilkan harga pangan melalui Gerakan Pangan Murah
				Melakukan diversifikasi pangan berbasis potensi lokal
				Meningkatkan pemerataan distribusi pangan untuk meminimalisir daerah rawan pangan
				Mengawasi mutu dan keamanan pangan segar
		S.2.2 Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dan perikanan dalam perekonomian	Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan sektor pertanian dan perikanan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung pertanian dan perikanan
				Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Pertanian dan Perikanan melalui upaya regenerasi petani
				Mengoptimalkan upaya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
				Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan secara intensif
				Meningkatkan penggunaan benih/bibit unggul dan varietas adaptif
				Menerapkan Good Agricultural Practices (GAP) dan Good Aquaculture Practices (GAqP)
				Mengintensifkan Penyuluhan dan pendampingan teknologi kepada petani dan nelayan
				Meningkatkan kualitas dan diversifikasi produk pertanian dan perikanan terpadu



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Meningkatkan nilai tambah melalui upaya hilirisasi komoditas unggulan pertanian (kelapa, kopi, teh dan aren)
				Meningkatkan upaya pengendalian kesehatan hewan ternak dan peningkatan kualitas pangan asal hewan
				Mengembangkan upaya perluasan Pasar Hasil Pertanian dan Perikanan
				Mendukung program Agroforestry dan Agrosilvopastural dengan pendekatan 3P (People, Planet dan Profit)
			Perluasan akses pembiayaan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan	Memfasilitasi KUR sektor pertanian/perikanan, asuransi usaha tani (AUTP dan AUTS) dan asuransi nelayan
				Meningkatkan kualitas melalui penguatan kelembagaan petani/nelayan dan jejaring komunitas (kelompok tani, koperasi, BUMDes)
		S.2.3 Meningkatnya perdagangan daerah	Peningkatan kualitas infrastruktur perdagangan	Pembangunan/revitalisasi pasar rakyat
				Meningkatkan Sarana Distribusi Perdagangan
			Peningkatan volume ekspor	Diversifikasi produk ekspor
				Mengembangkan promosi dan kerjasama perdagangan
			Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Meningkatkan kualitas dan kapasitas pelaku ekspor
				Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah
				Kampanye cinta produk dalam negeri



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		S.2.4 Meningkatnya daya saing UMKM dan industri	Peningkatan kontribusi sektor industri	Meningkatkan kapasitas sumber daya industri
				Mengembangkan kawasan industri
				Mengelola sistem informasi industrial
				Meningkatkan promosi produk industri lokal
		Peningkatan daya saing UMKM		Meningkatkan kapasitas pelaku UMKM
				Meningkatkan upaya perluasan akses pasar, sumber pembiayaan, teknologi, dan kemitraan dalam pemberdayaan UMKM
				Meningkatkan kualitas dan daya saing produk UMKM melalui digitalisasi
		S.2.5 Meningkatnya peran dan kinerja koperasi	Peningkatan kontribusi dan daya saing koperasi	Meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan koperasi
				Revitalisasi koperasi
				Memfasilitasi pemberdayaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)
		S.2.6 Meningkatnya investasi dan kesempatan kerja	Peningkatan daya tarik investasi	Menyelenggarakan pameran dan promosi investasi
			Peningkatan investasi melalui hilirisasi sektor unggulan dan proyek padat karya	Meningkatkan kolaborasi dan promosi investasi
			Peningkatan Kesempatan Kerja	Meningkatkan investasi di bidang industri pengolahan dan proyek padat karya untuk meningkatkan lowongan pekerjaan
				Memperluas peluang kerja sektor formal maupun informal yang berkualitas



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Meningkatkan kualitas angkatan kerja melalui pendidikan dan vokasi serta sertifikasi kompetensi kerja
				Meningkatkan produktivitas tenaga kerja
				Meningkatkan perlindungan hubungan industrial
		S.2.7 Meningkatnya produktivitas pariwisata dan ekonomi kreatif	Peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan Pengembangan kawasan strategis pariwisata	Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pelaku pariwisata serta penguatan kelembagaan kepariwisataan daerah
				Meningkatkan aksesibilitas, amenitas serta atraksi di destinasi pariwisata
				Meningkatkan promosi dan pemasaran pariwisata
		Peningkatan kontribusi sektor ekonomi kreatif	Peningkatan kontribusi sektor ekonomi kreatif	Meningkatkan pemanfaatan ekonomi kreatif sebagai pengungkit pertumbuhan sektor pariwisata
				Meningkatkan kapasitas pelaku ekonomi kreatif
				Mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual
		S.2.8 Terkendalinya stabilitas ekonomi daerah	Penguatan pengendalian laju inflasi daerah	Meningkatkan kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
				Meningkatkan peran dan koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)
			Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah	Penguatan BUMD
				Mengoptimalkan Potensi TJSL/PKBL, KPBU, Ekonomi dan Keuangan Syariah, Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		S.2.9 Meningkatkan kualitas infrastruktur yang andal, berwawasan lingkungan serta tanggap bencana	Peningkatan ketersediaan infrastruktur untuk mendukung aksesibilitas transportasi dan pemenuhan layanan dasar	Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, sarana prasarana perhubungan, dan terminal
				Membangun jaringan infrastruktur sumber daya air
				Membangun dan memelihara bangunan pemerintahan dan fasilitas pendukungnya yang laik fungsi
				Mengoptimalkan pengelolaan sampah di tingkat desa dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Pengelola Sampah, membangun TPST Nangkaleah dan pengadaan sarana pendukungnya
				Membangun perumahan dan permukiman yang berakses air minum dan sanitasi layak
				Menata kawasan perkotaan Singaparna
				Melaksanakan pendataan, perencanaan, dan pengelolaan tanah
				Pembebasan lahan jalan jembatan Cirahong
			Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan daerah terhadap bencana	Memulihkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup termasuk didalamnya perlindungan sumber mata air dan penghijauan
				Menerapkan sekolah berwawasan lingkungan
				Meningkatkan ketahanan daerah untuk pengurangan risiko bencana
Misi 3 Mewujudkan Pembangunan		S.3.1 Menurunnya kemiskinan		Memenuhi Kebutuhan Dasar Rumah Tangga Miskin
				Menyediakan Jaminan dan Perlindungan Sosial



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Inklusif Melalui Pengentasan Kemiskinan	T.3 Menurunnya Tingkat Kemiskinan		Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin	Menyediakan Sarana Perlindungan Anak, Disabilitas dan Lansia
				Meningkatkan Akses terhadap Bantuan dan Layanan Sosial
			Peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat miskin	Memberdayakan usaha produktif keluarga miskin
				Mengembangkan Keterampilan dan Wirausaha Sosial
				Memfasilitasi akses pasar serta penguatan kemitraan ekonomi lokal
				Meningkatkan akses permodalan bagi keluarga miskin melalui layanan keuangan inklusif
				Menguatkan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat
			Pengurangan kantong kantong kemiskinan	Mengidentifikasi wilayah kantong-kantong kemiskinan melalui pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional
				Memetakan karakteristik keluarga miskin berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, dan kerentanan sosial di tiap wilayah
				Memfasilitasi program bantuan sosial yang tepat sasaran pada wilayah dengan konsentrasi kemiskinan tinggi sosial di tiap wilayah
				Meningkatkan akses masyarakat miskin di kantong kemiskinan terhadap layanan dasar (kesehatan, pendidikan, perumahan layak, dan jaminan sosial)



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Misi 4 Mendorong percepatan pembangunan desa berbasis potensi lokal yang berkeadilan dan berkelanjutan didukung sektor digital	T.4 Terwujudnya desa mandiri yang mendukung akselerasi pembangunan daerah	S.4.1 Meningkatnya kemandirian desa	Percepatan pembangunan desa menjadi desa maju dan mandiri	Mengintervensi kantong kemiskinan dengan pemberdayaan keluarga miskin melalui pengembangan KUBE dan peningkatan keterampilan kerja sesuai karakteristik wilayah
				Menguatkan peran pendamping sosial, TKSK, dan PSM dalam melakukan intervensi di kantong kemiskinan
				Mengembangkan kolaborasi dengan BUMDes, CSR, dan lembaga filantropi untuk mendukung program pengentasan kemiskinan di wilayah prioritas
				Memberikan pembinaan dan fasilitasi dalam upaya peningkatan ketersediaan dan kualitas layanan dasar perdesaan
				Melaksanakan pembinaan dan pendampingan terhadap aktivitas sosial serta kelembagaan masyarakat desa
				Mendorong pertumbuhan ekonomi desa melalui penguatan BUMDes, pengembangan usaha berbasis potensi lokal, peningkatan akses pasar, serta fasilitasi permodalan dan digitalisasi UMKM desa
				Melaksanakan pembinaan dan pendampingan desa dalam pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi bencana
				Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka peningkatan aksesibilitas desa



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Misi 5 Mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih dan akuntabel	T.5. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	S.5.1 Terwujudnya birokrasi yang adaptif dan berintegritas		Melaksanakan pembinaan dan pendampingan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital
				Melaksanaan pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi dalam penataan desa
				Meningkatkan kesejahteraan aparatur desa dan lembaga kemasyarakatan
			Peningkatan kuantitas dan kapasitas ASN	Mengadakan rekrutmen ASN
				Menguatkan Sistem Manajemen ASN
				Meningkatkan Kinerja, Etika, dan Integritas ASN
				Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi dalam Pengelolaan ASN
				Menguatkan budaya kerja ASN BerAKHLAK
			Peningkatan kualitas pelayanan publik	Menguatkan standar dan sistem pelayanan publik
				Meningkatkan digitalisasi pemerintahan, riset dan inovasi pelayanan publik
				Meningkatkan kompetensi dan etika aparatur dalam pelayanan
				Meningkatkan aksesibilitas dan inklusivitas layanan
				Menguatkan sistem pengawasan dan akuntabilitas layanan
				Memfasilitasi pembentukan dan keberlanjutan usulan Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) Tasikmalaya Selatan dan Tasikmalaya Utara



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Peningkatan kualitas penyelenggaraan kelembagaan pemerintah daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah
				Meningkatkan kualitas data statistik sektoral daerah
				Meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal pemerintah
				Meningkatkan kualitas dukungan kesekretariatan, administrasi, dan fasilitasi terhadap pelaksanaan fungsi DPRD
				Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan daerah
				Meningkatkan kualitas riset dan inovasi daerah
				Mengoptimalkan fungsi kelembagaan melalui kerja sama strategis dengan multi pihak dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan pengembangan ekonomi daerah
			Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Meningkatkan akuntabilitas penatausahaan keuangan
				Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah
				Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber: Hasil analisis, 2025





Strategi pembangunan juga dijabarkan ke dalam langkah-langkah yang berupa pembangunan sebagai prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Tahun 2026 sampai Tahun 2030 yang disajikan pada tabel berikut.



Gambar 3.8
Penahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2025-2029

Sumber: Hasil analisis, 2025

Adapun uraian dari masing-masing tema/fokus dijabarkan sebagai berikut.

Tema/Fokus	Uraian
2026	
Penguatan Fondasi Transformasi Ekonomi dan Sosial didukung Infrastruktur yang Andal	Tahap I RPJMD tahun 2025–2029 difokuskan pada penguatan fondasi transformasi ekonomi dan sosial yang didukung oleh infrastruktur yang andal. Arah pembangunan pada tahap ini menitikberatkan pada peningkatan produktivitas ekonomi lokal melalui penguatan sektor unggulan seperti pertanian, UMKM, dan ekonomi kreatif berbasis digital; peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan karakter sosial religius; serta pemerataan akses pelayanan dasar. Seluruh upaya tersebut ditopang oleh pembangunan dan perbaikan infrastruktur fisik dan sosial yang meliputi konektivitas antar wilayah, jaringan air bersih, energi, telekomunikasi, serta fasilitas publik sebagai prasyarat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, mengurangi kesenjangan antarwilayah, dan memperkuat fondasi pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Tasikmalaya.
2027	



Tema/Fokus	Uraian
Percepatan Transformasi Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur	Tahap II RPJMD Tahun 2025–2029 difokuskan pada percepatan transformasi ekonomi dan pembangunan infrastruktur sebagai upaya mempercepat perubahan menuju struktur ekonomi daerah yang lebih modern, efisien, dan berkelanjutan. Transformasi ekonomi pada tahap ini diarahkan pada perubahan proses bisnis, dari pola konvensional menuju sistem yang lebih produktif, inovatif, dan berbasis digital, dengan memperkuat kemitraan antara pelaku usaha, UMKM, dan dunia industri. Pada saat yang sama, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama dalam dua tahun awal, khususnya dalam peningkatan dan pemerataan konektivitas antarwilayah, pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan, jaringan air bersih, energi, serta infrastruktur sosial dan ekonomi strategis lainnya. Langkah ini dimaksudkan untuk memperlancar arus barang dan jasa, membuka akses ekonomi baru, serta memperkuat fondasi pelayanan publik yang mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
2028	
Akselerasi Hilirisasi Berbasis Lingkungan dan Digitalisasi Layanan Publik	Tahap III RPJMD Tahun 2025–2029 diarahkan pada akselerasi hilirisasi berbasis lingkungan dan digitalisasi layanan publik sebagai langkah memperkuat kemandirian ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Pada tahap ini, fokus pembangunan ekonomi bergeser pada pengembangan industri hilir yang mengolah hasil sumber daya lokal menjadi produk bernilai tambah tinggi dengan prinsip berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pendekatan ekonomi hijau diterapkan melalui efisiensi energi, pengelolaan limbah, serta penerapan praktik produksi bersih di sektor pertanian, perikanan, dan industri kecil menengah. Di sisi lain, digitalisasi layanan publik menjadi penggerak utama peningkatan efektivitas birokrasi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dengan memperluas penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, integrasi data, serta penggunaan aplikasi terpadu untuk pemerintahan daerah. Tahap ini menandai peralihan Tasikmalaya menuju daerah yang inovatif, berdaya saing, dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan serta kemudahan layanan publik digital.
2029	





Tema/Fokus	Uraian
	Tahap IV RPJMD Tahun 2025–2029 diarahkan pada pemerataan pembangunan dan penguatan kapasitas berbasis potensi lokal sebagai langkah untuk memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat dan wilayah. Fokus utama pada tahap ini adalah memperkuat pemerataan akses terhadap infrastruktur, pelayanan dasar, dan peluang ekonomi, terutama di wilayah perdesaan dan daerah tertinggal, agar kesenjangan antar wilayah semakin menurun. Pembangunan dilakukan dengan mengedepankan pendekatan berbasis potensi lokal, di mana setiap kecamatan dan desa didorong mengoptimalkan sumber daya unggulannya melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Di sisi lain, penguatan kapasitas aparatur dan kelembagaan daerah menjadi kunci agar pemerintahan mampu mengelola pembangunan secara efektif, adaptif, dan berkelanjutan. Tahap ini menjadi periode konsolidasi hasil transformasi sebelumnya, untuk mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang lebih merata, mandiri, dan berdaya saing sesuai karakteristik lokalnya.
2030	
Konsolidasi Keberlanjutan Pembangunan Daerah dalam Mewujudkan Indonesia Emas	Tahap V RPJMD Tahun 2025–2029 merupakan tahap konsolidasi keberlanjutan pembangunan daerah dalam mewujudkan Indonesia Emas, sekaligus menjadi periode transisi kepemimpinan dari kepala daerah lama ke kepala daerah baru. Fokus pada tahap ini diarahkan untuk menjaga kesinambungan program strategis, memperkuat kelembagaan daerah, dan memastikan keberlanjutan hasil pembangunan yang telah dicapai. Pemerintah daerah berupaya mengkonsolidasikan sistem perencanaan, penganggaran, dan pengendalian pembangunan agar tetap selaras dengan arah kebijakan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Pada tahap ini pula dilakukan penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pemantapan kemandirian ekonomi daerah berbasis inovasi dan keberlanjutan lingkungan. Tahap V menjadi momentum penting untuk memastikan transisi pemerintahan berjalan lancar, stabilitas pembangunan terjaga, dan Kabupaten Tasikmalaya tetap berada pada jalur kemajuan yang berkelanjutan menuju visi Indonesia Emas.





3.4 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam upaya pencapaian visi dan misi pembangunan, maka diperlukan rencana pembangunan yang konkret dalam bentuk program-program prioritas yang secara langsung berhubungan dengan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan saat proses pemilihan Kepala Daerah yang selanjutnya menjadi prioritas bagi Perangkat Daerah. Program-program prioritas pembangunan daerah dalam rangka perwujudan visi dan misi adalah sebagai berikut:

1. Program prioritas pembangunan daerah untuk misi mewujudkan manusia yang sehat, cerdas, berakhlak serta berbudaya, diantaranya:
 - (1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - (2) Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan
 - (3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - (4) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
 - (5) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
 - (6) Program Pengelolaan Pendidikan
 - (7) Program Pengembangan Kurikulum
 - (8) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - (9) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
 - (10) Program Pengembangan Bahasa dan Sastra
 - (11) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - (12) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - (13) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
 - (14) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - (15) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya





- (16) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
 - (17) Program Pengembangan Kebudayaan
 - (18) Program Pengembangan Kesenian Tradisional
 - (19) Program Pembinaan Sejarah
 - (20) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
 - (21) Program Pengendalian Penduduk
 - (22) Program Pembinaan Keluarga Berencana
 - (23) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
 - (24) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
 - (25) Program Perlindungan Perempuan
 - (26) Program Peningkatan Kualitas Keluarga
 - (27) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
 - (28) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
 - (29) Program Perlindungan Khusus Anak
 - (30) Program Pengembangan Daya Saing Kepemudaan
 - (31) Program Ketentraman dan Ketertiban Umum
2. Program prioritas pembangunan daerah untuk misi mewujudkan Transformasi ekonomi yang produktif dan berkelanjutan, diantaranya:
- (1) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
 - (2) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
 - (3) Program Penanganan Kerawanan Pangan
 - (4) Program Pengawasan Keamanan Pangan
 - (5) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - (6) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - (7) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
 - (8) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner





- (9) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- (10) Program Perizinan Usaha Pertanian
- (11) Program Penyuluhan Pertanian
- (12) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- (13) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- (14) Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- (15) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
- (16) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- (17) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
- (18) Program Pengembangan Ekspor
- (19) Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
- (20) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
- (21) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
- (22) Program Pengendalian Izin Usaha Industri
- (23) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
- (24) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
- (25) Program Pengembangan UMKM
- (26) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
- (27) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
- (28) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
- (29) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
- (30) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- (31) Program Promosi Penanaman Modal
- (32) Program Pelayanan Penanaman Modal
- (33) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- (34) Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
- (35) Program Kerja Sama Pelayanan Modal
- (36) Program Perencanaan Tenaga Kerja
- (37) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
- (38) Program Penempatan Tenaga Kerja
- (39) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- (40) Program Pemasaran Pariwisata





- (41) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
 - (42) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - (43) Program Perekonomian dan Pengembangan
 - (44) Program Pengelolaan Sumber Daya Air
 - (45) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - (46) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 - (47) Program Penataan Bangunan Gedung
 - (48) Program Penataan Bangunan dan Lingkungan
 - (49) Program Penyelenggaraan Jalan
 - (50) Program Pengembangan Jasa Konstruksi
 - (51) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - (52) Program Pengembangan Perumahan
 - (53) Program Kawasan Permukiman
 - (54) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
 - (55) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
 - (56) Program Perencanaan Lingkungan Hidup
 - (57) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - (58) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
 - (59) Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
 - (60) Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
 - (61) Program Pengelolaan Persampahan
 - (62) Program Penanggulangan Bencana
 - (63) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran
3. Program prioritas pembangunan daerah untuk misi mewujudkan pembangunan inklusif melalui pengentasan kemiskinan, diantaranya:





- (1) Program Pemberdayaan Sosial
 - (2) Program Rehabilitasi Sosial
 - (3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - (4) Program Penanganan Bencana
4. Program prioritas pembangunan daerah untuk misi mendorong percepatan pembangunan desa berbasis potensi lokal yang berkeadilan dan berkelanjutan didukung sektor digital, diantaranya:
- (1) Program Penataan Desa
 - (2) Program Peningkatan Kerjasama Desa
 - (3) Program Administrasi Pemerintahan Desa
 - (4) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
5. Program prioritas pembangunan daerah untuk misi mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih dan akuntabel, diantaranya:
- (1) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
 - (2) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
 - (3) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
 - (4) Program Penyelenggaraan Persandian Pengamanan untuk Pengamanan Informasi
 - (5) Program Pengelolaan Arsip
 - (6) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
 - (7) Program Perizinan Penggunaan Arsip
 - (8) Program Pendaftaran Penduduk
 - (9) Program Pencatatan Sipil
 - (10) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - (11) Program Pengelolaan Profil Kependudukan
 - (12) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 - (13) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - (14) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - (15) Program Kepegawaian Daerah
 - (16) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - (17) Program Penelitian dan Pengembangan





- (18) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- (19) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- (20) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
- (21) Program Penyelenggaraan Pengawasan
- (22) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel sebagai berikut.





Tabel 3.4
Program Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029

VISI/MISI		TUJUAN	SASARAN		OUTCOME		INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)
(1)		(2)	(3)		(4)		(5)	(6)
VISI : "TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, MAJU, ADIL, DAN MAKMUR"								
Misi 1 Mewujudkan Manusia yang Sehat Cerdas Berakhlak serta Berbudaya	T.1	Terwujudnya manusia yang berkualitas dan berdaya saing					Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	
			S.1.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat			Angka Harapan Hidup (Tahun)	
							Prevalensi Stunting (%)	
					O.1.1.1	Terpenuhinya Kebutuhan Perbekalan Kesehatan dan Sarana Prasarana Fasilitas Kesehatan Berdampak pada Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Fasyankes dengan Perbekalan Kesehatan dan Sarana Prasarana yang Terpenuhi Sesuai Standar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
						Terpenuhinya Kebutuhan Perbekalan Kesehatan dan Sarana Prasarana Fasilitas Kesehatan Berdampak pada Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Fasyankes dengan Perbekalan Kesehatan dan Sarana Prasarana yang Terpenuhi Sesuai Standar	
						Meningkatnya Pemanfaatan Sistem Informasi dalam Pelayanan Kesehatan	Persentase Fasyankes yang Memanfaatkan Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan	
						Meningkatnya Kepatuhan Fasilitas Kesehatan terhadap Standar Mutu	Persentase Faskes yang Mematuhi Standar Mutu	
						Meningkatnya Kesehatan Lingkungan	1. Persentase Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	
							2. Persentase Desa yang Memenuhi Syarat Kesehatan Lingkungan	
							Angka Populasi Bebas Penyakit Menular	





VISI/MISI	TUJUAN		SASARAN		OUTCOME		INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)	(6)
						Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Pengendalian Tidak Menular	Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular	
						Gizi Masyarakat Seimbang	Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada Balita	
						Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat	Persentase Masyarakat yang Menerapkan Perilaku Hidup Sehat	
						Meningkatnya Jaminan Kesehatan	Persentase Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	
						Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Program	Nilai Standar Pelayanan Minimal (12 Indikator SPM Bidang Kesehatan)	
						Minimum Requirement Akreditasi Level Paripurna Terpenuhi	Persentase Fasyankes dengan Kriteria Akreditasi Strata Paripurna yang Terpenuhi	
				O.1.1.3	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Profesional	Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terhadap Jumlah Penduduk	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
				O.1.1.4	Meningkatnya Mutu dan Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Keamanan Pangan	Cakupan Pengendalian dan Pengawasan Sarana Kefarmasian, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	
				O.1.1.5	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat di Bidang Kesehatan	Persentase Kecamatan yang Aktif dalam Kampanye Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
					S.1.2	Meningkatnya kualitas		
						Angka Harapan Lama Sekolah (%)		





VISI/MISI	TUJUAN		SASARAN		OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)
			<i>pendidikan masyarakat</i>	O.1.2.1	Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah Jenjang SD	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun	Program Pengelolaan Pendidikan
					Meningkatnya Literasi, Numerasi dan Karakter Anak Usia Sekolah Jenjang SD	1. Nilai Kompetensi Literasi Anak Usia SD 2. Nilai Kompetensi Numerasi Anak Usia SD 3. Nilai Karakter Anak Usia SD	
					Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah Jenjang SMP	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Tahun	
					Meningkatnya Literasi, Numerasi, dan Karakter Anak Usia Sekolah Jenjang SMP	1. Nilai Kompetensi Literasi Anak Usia SMP 2. Nilai Kompetensi Numerasi Anak Usia SMP 3. Nilai Karakter Anak Usia SMP	
					Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah Jenjang PAUD	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 Tahun	
					Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah Jenjang Nonformal/Kesetaraan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 -18 Tahun Kesetaraan	
					Meningkatnya Literasi, Numerasi dan Karakter Warga Belajar Paket C pada Pendidikan Kesetaraan	1. Nilai Kompetensi Literasi Warga Belajar Paket C 2. Nilai Kompetensi Numerasi Warga Belajar Paket C 3. Nilai Karakter Warga Belajar Paket C	
						1. Nilai Kompetensi Literasi Warga Belajar Paket B 2. Nilai Kompetensi Numerasi Warga Belajar Paket B	
						2. Nilai Kompetensi Numerasi Warga Belajar Paket B	
					Meningkatnya Literasi, Numerasi dan Karakter Warga Belajar Paket B pada Pendidikan Kesetaraan	1. Nilai Kompetensi Literasi Warga Belajar Paket B 2. Nilai Kompetensi Numerasi Warga Belajar Paket B	





VISI/MISI	TUJUAN		SASARAN		OUTCOME		INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)	(6)
						Meningkatnya Literasi, Numerasi dan Karakter Warga Belajar Paket A pada Pendidikan Kesetaraan	3. Nilai Karakter Warga Belajar Paket B	
							1. Nilai Kompetensi Literasi Warga Belajar Paket A	
							2. Nilai Kompetensi Numerasi Warga Belajar Paket A	
							3. Nilai Karakter Warga Belajar Paket A	
					O.1.2.2	Meningkatnya Penerapan Kurikulum Muatan Lokal pada Jenjang Satuan Pendidikan Dasar	Persentase Satuan Pendidikan yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	Program Pengembangan Kurikulum
					O.1.2.3	Meningkatnya Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Profesional	Indeks Refleksi Guru Paket C	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
							Indeks Refleksi Guru Paket B	
							Indeks Refleksi Guru Paket A	
							Indeks Refleksi Guru SMP	
							Indeks Refleksi Guru SD	
					S.1.3	Meningkatnya karakter masyarakat yang religius rukun harmonis berbudaya dan berwawasan kebangsaan	Indeks Kesalehan Umat Beragama (IKsUB) (Poin)	
							Status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
							Indeks Reformasi Hukum	
							Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	
					O.1.3.2	Meningkatnya penerapan hasil Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase masyarakat yang menerapkan hasil Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan





VISI/MISI	TUJUAN		SASARAN		OUTCOME		INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)	(6)
					O.1.3.3	Pemilu mendapatkan dukungan sumber daya	Persentase peningkatan bantuan untuk Pemilu	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
						Meningkatnya penerapan hasil pembinaan Pendidikan Politik bagi masyarakat	Meningkatnya penerapan hasil pembinaan Pendidikan Politik bagi masyarakat	
					O.1.3.4	Meningkatnya peran organisasi masyarakat dalam pembangunan daerah	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
					O.1.3.5	Meningkatnya kerja sama antar umat beragama dalam menciptakan kerukunan umat beragama	Persentase masyarakat yang menerapkan hasil pembinaan kerja sama kerukunan umat beragama	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya
							Meningkatnya penerapan hasil Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	
					O.1.3.6	Meningkatnya kewaspadaan daerah	Persentase lokasi rawan konflik sosial yang terdeteksi dini	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial





VISI/MISI	TUJUAN		SASARAN		OUTCOME		INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)	(6)
					O.1.3.7	Warisan Budaya Dikenal oleh Masyarakat Lokal dan Internasional	Persentase Karya Budaya yang Dikenal oleh Masyarakat Lokal dan Internasional	Program Pengembangan Kebudayaan
					O.1.3.8	Kesenian Dikenal oleh Masyarakat Lokal dan Internasional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dikenal Masyarakat Lokal dan Internasional	Program Pengembangan Kesenian Tradisional
					O.1.3.10	Meningkatnya Cagar Budaya Baru	Persentase Peningkatan Cagar Budaya Baru	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
			S.1.4	Meningkatnya Kualitas Keluarga Pemuda dan Kesetaraan Gender			Indeks Pembangunan Keluarga (Poin)	
							Indeks Pembangunan Gender (Poin)	
							Indeks Pembangunan Pemuda (Poin)	
					O.1.4.1	Terkendalnya pertambahan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Program Pengendalian Penduduk
					O.1.4.2	Meningkatnya Kesertaan Keluarga Berencana	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	Program Pembinaan Keluarga Berencana
							Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	
					O.1.4.3	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Keluarga	Persentase Masyarakat yang Aktif dalam Pembangunan Keluarga	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
					O.1.4.4	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Program Pengarusutamaan Gender dan





VISI/MISI	TUJUAN		SASARAN		OUTCOME		INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)	(6)
								Pemberdayaan Perempuan
					O.1.4.5	Meningkatnya Penyelesaian Kasus Kekerasan Eksploitasi Diskriminasi terhadap Perempuan	Persentase Kasus Kekerasan Eksploitasi Diskriminasi terhadap Perempuan yang terselesaikan	Program Perlindungan Perempuan
					O.1.4.6	Meningkatnya Partisipasi Keluarga dalam Pengarusutamaan Gender	Persentase Keluarga yang Aktif dalam Pengarusutamaan Gender (PUG)	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
					O.1.4.7	Meningkatnya Pemanfaatan Data Gender dan Anak	Persentase Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan anak
					O.1.4.8	Terjaminnya Pemenuhan Hak Semua Anak secara Komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
					O.1.4.9	Menurunnya Kekerasan Eksploitasi Diskriminasi terhadap Anak	Persentase Penurunan Kasus Kekerasan Eksploitasi Diskriminasi terhadap Anak	Program Perlindungan Khusus Anak
					O.1.4.10	Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Kewirausahaan pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
					O.1.4.11	Meningkatnya Kualitas Pembinaan SDM Keolahragaan	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
							Cakupan Pelatih yang Bersertifikat	
			S.1.5	Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban			Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Poin)	





VISI/MISI	TUJUAN		SASARAN		OUTCOME		INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)	(6)
				umum serta perlindungan masyarakat	O.1.5.1	Meningkatnya Penanggulangan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Terselesaikan	Program Ketenteraman dan Ketertiban Umum
					O.1.5.2	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Kepatuhan Masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					O.1.5.3	Meningkatnya Perlindungan terhadap Masyarakat	Persentase Anggota Satlinmas Aktif dalam Perlindungan Masyarakat	
					O.1.5.4	Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi Profesional Anggota Satpol PP PPNS dan Satlinmas	Persentase Anggota Satpol PP PPNS dan Satlinmas yang Bersertifikat Kompetensi	
					O.1.5.5	Meningkatnya Mutu Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase ketersediaan Mutu Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
Misi 2 Mewujudkan Transformasi ekonomi yang produktif dan berkelanjutan	T.2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Kemandirian Pangan yang Berkelanjutan Didukung Infrastruktur yang Andal	S.2.1	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah			Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	
							Indeks Ketahanan Pangan (Poin)	
							Prevalence of Undernourishment (PoU)	
					O.2.1.1	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
					O.2.1.2	Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase kebutuhan bantuan beras yang terpenuhi	Program Peningkatan Diversifikasi dan





VISI/MISI	TUJUAN		SASARAN		OUTCOME		INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)	(6)
								Ketahanan Pangan Masyarakat
					O.2.1.3	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase masyarakat yang terpenuhi kebutuhan konsumsi energi proterin hewani dan nabati	Program Penanganan Kerawanan Pangan
					O.2.1.4	Meningkatnya pengawasan pengawasan kerawanan pangan	Persentase Komoditas pangan strategis yang memenuhi standar keamanan pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan
			S.2.2	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dan perikanan dalam Perekonomian			PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan (Rp Miliar)	
					O.2.2.1	Meningkatnya Mutu Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kelas A	Persentase Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang memenuhi standar mutu	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
						Meningkatnya pengelolaan sarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Persentase pengelolaan sarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	
						Meningkatnya sarana peternakan	Persentase Peningkatan Sarana Peternakan	
					O.2.2.2	Meningkatnya Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
					O.2.2.3	Terkendalnya Penyakit Hewan Yang Beredar	Persentase Penanganan Kasus Penyakit Hewan	Program Pengendalian
						Meningkatnya Hewan Yang Memenuhi Standar Kesehatan Hewan	Persentase Hewan Ternak Yang Memenuhi Standar Kesehatan Hewan	Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat
						Meningkatnya Kualitas Pelayanan Puskesmas	(IKM)Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Puskesmas	Veteriner
					O.2.2.4	Terkendali dan Tertanggulangnya Bencana Pertanian	Persentase Kasus Bencana Pertanian Yang terselesaikan	Program Pengendalian dan





VISI/MISI	TUJUAN		SASARAN		OUTCOME		INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)	(6)
								Penanggulangan Bencana Pertanian
					O.2.2.5	Meningkatnya Usaha Peternakan Yang Berizin	Persentase Peternak yang mematuhi kebijakan peternakan	Program Perizinan Usaha Pertanian
					O.2.2.6	Meningkatnya penyuluhan pertanian	Persentase Kelompok Tani Yang Memiliki Kelas Kelembagaan Utama	Program Penyuluhan Pertanian
					O.2.2.7	Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Pengelolaan Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
					O.2.2.8	Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
					O.2.2.9	Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan	Persentase Peningkatan produksi pengelolaan produk perikanan	Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan
			S.2.3	Meningkatnya Perdagangan Daerah			PDRB Sektor Perdagangan (Rp Miliar)	
					O.2.3.1	Meningkatnya Kepatuhan pelaku usaha tentang ketentuan perdagangan	Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi ketentuan perdagangan	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
					O.2.3.2	Meningkatnya Akses Ekspor	Persentase komoditas ekspor ber SKA yang bisa masuk ke negara tujuan	
					O.2.3.3	Meningkatnya Pemanfaatan Sarana Prsarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana prasarana distribusi perdagangan yang berfungsi	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan





VISI/MISI	TUJUAN		SASARAN		OUTCOME		INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)	
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)	(6)	
					O.2.3.4	Meningkatnya stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting di tingkat pasar agen dan distributor Se-Kabupaten Tasikmalaya	Indeks Stabilitas Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	
					O.2.3.5	Penyaluran pupuk dan pestisida bersubsidi tepat sasaran	Persentase PUD dan PPTS yang menyalurkan pupuk dan pestisida sesuai RDKK		
					O.2.3.6	Meningkatnya pemasaran produk ekspor	persentase kenaikan nilai ekspor produk Kab. Tasikmalaya	Program Pengembangan Ekspor	
					O.2.3.7	Terjaminnya kepastian ukur dan kesesuaian barang dalam transaksi perdagangan	Persentase Peningkatan Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang serta Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) yang Memenuhi Ketentuan	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	
					O.2.3.8	Meningkatnya omzet pelaku usaha pada promosi dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase peningkatan omzet pelaku usaha yang diikutsertakan pada promosi dan pemasaran produk dalam negeri	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	
			S.2.4	Meningkatnya daya saing UMKM dan industri			PDRB Sektor Industri Pengolahan (Rp Miliar)		
					O.2.4.1	Meningkatnya produksi Industri Pengolahan	Nilai Produksi Industri Pengolahan	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	
					O.2.4.2	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap ketentuan industri	Tingkat kepatuhan pelaku usaha industri terhadap izin usaha industri	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	



VISI/MISI	TUJUAN		SASARAN		OUTCOME		INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)	(6)
					O.2.4.3	Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Persentase pelaku industri yang melaporkan data industri secara lengkap dan terkini pada SIINAS	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
					O.2.4.4	Meningkatnya kemandirian UMKM	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
					O.2.4.5	Meningkatnya skala usaha mikro menjadi usaha kecil	Laju Pertumbuhan omset usaha mikro	Program Pengembangan UMKM
			S.2.5	Meningkatnya Kinerja Koperasi			Laju Pertumbuhan Koperasi Berkualitas (%)	
					O.2.5.1	Meningkatnya kepatuhan koperasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase koperasi yang patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
					O.2.5.2	KSP/USP Koperasi memiliki jaminan koperasi sehat dan cukup sehat	Persentase KSP/USP Koperasi sehat dan cukup sehat	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
					O.2.5.3	Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase SDM Koperasi yang mengikuti pelatihan minimal 10 JP	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
					O.2.5.4	Meningkatnya Kapasitas Usaha Koperasi	Laju Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi



VISI/MISI	TUJUAN		SASARAN	OUTCOME		INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)
(1)	(2)		(3)	(4)		(5)	(6)
			S.2.6 Meningkatkan Investasi dan Kesempatan Kerja			Pembentukan Modal Tetap Bruto (Rp Miliar)	
				O.2.6.1	Meningkatnya pemanfaatan rencana umum penanaman modal	Persentase peningkatan investor pengakses rencana umum penanaman modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
				O.2.6.2	Meningkatnya akses investor terhadap potensi investasi	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	Program Promosi Penanaman Modal
				O.2.6.3	Pelayanan perizinan dan non perizinan secara digital sesuai standar	Persentase permohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terlayani secara digital sesuai standar	Program Pelayanan Penanaman Modal
				O.2.6.4	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Ketentuan Penanaman Modal	Persentase pelaku usaha yang melaporkan LKPM	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
				O.2.6.5	Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
						Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	
				O.2.6.6	Meningkatnya pemanfaatan rencana perencanaan ketenagakerjaan	Persentase Rekomendasi bahan kebijakan rencana tenaga kerja makro yang diterapkan	Program Perencanaan Tenaga Kerja
				O.2.6.7	Meningkatnya kompetensi pencari kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja





VISI/MISI	TUJUAN		SASARAN		OUTCOME		INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)	(6)
			S.2.7	Meningkatnya Produktivitas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	O.2.6.8	Meningkatnya usia kerja yang bekerja	Persentase usia kerja yang bekerja	Program Penempatan Tenaga Kerja
							PDRB Sektor Akomodasi Makan dan Minum (Rp Miliar)	
					O.2.7.1	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Peningkatan Retribusi Sektor Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
					O.2.7.2	Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Event Promosi Pariwisata yang terlaksana	Program Pemasaran Pariwisata
					O.2.7.3	Meningkatnya Daya Saing Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Pelaku Ekraf dibina yang memiliki HAKI	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
					O.2.7.4	Meningkatnya kapasitas SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Tenga Kerja Parwisata dan Ekonomi Kreatif yang Tersertifikasi	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			S.2.8	Terkendalinya Stabilitas			Tingkat Inflasi (%)	
					O.2.8.1	Meningkatnya Kinerja BUMD	Persentase BUMD dengan kinerja sehat	





VISI/MISI	TUJUAN		SASARAN		OUTCOME		INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)	(6)
			Ekonomi Daerah		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam		Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Program Perekonomian dan Pengembangan
					Progres kinerja perangkat daerah sesuai perencanaan		Persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti rekomendasi akselerasi kinerja	
					Meningkatnya Kualitas Pelayanan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik		Indeks Tata Kelola Pengadaan	
			S.2.9 Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur yang Andal Berwawasan Lingkungan serta Tanggap Bencana				Indeks Kualitas Infrastruktur (%)	
				O.2.9.1	Infrastruktur irigasi kewenangan kabupaten beroperasi dan berfungsi		Persentase Infrastruktur Irigasi Kewenangan Kabupaten Beroperasi dan Berfungsi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air
				O.2.9.2	Infrastruktur dasar air minum berfungsi		Persentase Infrastruktur Dasar Air Minum yang Berfungsi	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
				O.2.9.3	Meningkatnya Pelayanan Persampahan di Perkotaan		Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan di Perkotaan	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
				O.2.9.4	Infrastruktur Dasar Sanitasi Berfungsi		Persentase Infrastruktur Dasar Sanitasi Yang Berfungsi	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah





VISI/MISI	TUJUAN		SASARAN		OUTCOME		INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)	(6)
					O.2.9.5	Bangunan gedung pemerintah memenuhi ketentuan teknis bangunan	Persentase Bangunan Gedung Sesuai Ketentuan Teknis Bangunan	Program Penataan Bangunan Gedung
					O.2.9.6	Kawasan strategis tertata	Persentase kawasan strategis yang memenuhi standar	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan
					O.2.9.7	Meningkatnya Kualitas Konstruksi Jalan Pada Ruas-Ruas Jalan Kewenangan Kabupaten	Persentase jalan yang memenuhi standar teknis konstruksi jalan	Program Penyelenggaraan Jalan
					O.2.9.8	Meningkatnya peran masyarakat jasa konstruksi jawa barat dalam pembangunan infrastruktur	Tingkat partisipasi masyarakat jasa konstruksi dalam pembangunan infrastruktur	Program Pengembangan Jasa Konstruksi
					O.2.9.9	Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase pemanfaat ruang yang mematuhi ketentuan penataan ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
					O.2.9.10	Korban Bencana Mendapatkan Rumah Layak	Persentase Korban Bencana Yang Mendapatkan Rumah Layak	Program Pengembangan Perumahan
					O.2.9.11	Tertatanya Kawasan Kumuh	Persentase Penurunan Luas Kawasan Kumuh	Program Kawasan Permukiman
					O.2.9.12	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Areal Kawasan Kumuh	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
					O.2.9.13	PSU Perumahan Berfungsi Menunjang Fungsi Hunian	Persentase PSU Perumahan Yang berfungsi Menunjang Fungsi Hunian	Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)





VISI/MISI	TUJUAN		SASARAN		OUTCOME		INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)	(6)
					O.2.9.14	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lalu Lintas yang Berfungsi	Persentase Sarana dan Prasarana Lalu Lintas yang Berfungsi	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
						Meningkatnya Kualitas Layanan Terminal	IKM terminal	
						Berkurangnya Wilayah Parkir Sumber Kemacetan	Persentase penurunan titik parkir sumber kemacetan	
						Meningkatnya Kendaraan Bermotor Layak Jalan	Persentase kendaraan bermotor yang layak	
						Lalu Lintas Lancar	Persentase Penurunan Titik Rawan Kemacetan dan Kecelakaan	
						Meningkatnya Pengguna Angkutan Umum	Persentase Peningkatan Pengguna Angkutan Umum	
							Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	
					O.2.9.15	Perencanaan Lingkungan Hidup menjadi Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Yang Sudah Mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
					O.2.9.16	Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Persentase Capaian Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
					O.2.9.17	Meningkatnya Keanekaragaman Hayati di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
O.2.9.18	Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha Terhadap Hukum Lingkungan	Persentase Pelaku Usaha Yang Taat Terhadap Hukum Lingkungan	Program Pembinaan dan Pengawasan					





VISI/MISI	TUJUAN		SASARAN		OUTCOME		INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)	(6)
								terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
					O.2.9.19	Meningkatnya Penerima Penghargaan Adiwiyata	Persentase Penghargaan Adiwiyata yang Diterima	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
					O.2.9.20	Berkurangnya Timbulan Sampah di TPA	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Program Pengelolaan Persampahan
							Indeks Risiko Bencana	
					O.2.9.21	Meningkatnya Kualitas Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Nilai Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	Program Penanggulangan Bencana
						Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Bencana	Persentase Lokasi Bencana Yang Kembali Pada Kondisi Mendekati Normal Setelah Penanganan	
						Rehab Rekon sesuai Perencanaan	Nilai Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	
					O.2.9.22	Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase Kejadian Kebakaran dan Non Kebakaran yang tertangani sesuai standar	Program Pencegahan Penanganan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran
	T.3						Rasio Gini (Poin)	





VISI/MISI	TUJUAN		SASARAN		OUTCOME		INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)	(6)
Misi 3 Mewujudkan Pembangunan Inklusif Melalui Pengentasan Kemiskinan		Meningkatnya Pemerataan Pembangunan					Tingkat Kemiskinan (%)	
			S.3.1	Menurunnya kemiskinan			Persentase Penduduk Miskin (%)	
					O.3.1.1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Sosial	Persentase Masyarakat yang Aktif dalam Pemberdayaan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial
					O.3.1.2	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Kembali Berfungsi Sosial	Program Rehabilitasi Sosial
					O.3.1.3	Menurunnya Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
					O.3.1.4	Korban Bencana Pulih secara Sosial	Persentase Korban Bencana Alam Sosial dan/atau Non Alam yang Pulih secara Sosial	Program Penanganan Bencana
Misi 4 Mendorong percepatan pembangunan desa berbasis potensi lokal yang berkeadilan dan berkelanjutan didukung sektor digital	T.4	T.4 Terwujudnya desa mandiri yang mendukung akselerasi pembangunan daerah					Indeks Desa (Poin)	
			S.4.1	Meningkatnya kemandirian desa			Laju Peningkatan Desa Mandiri (%)	
					O.4.1.1	Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Desa yang Tertata	Program Penataan Desa
					O.4.1.2	Terlaksananya Kerja Sama antar Desa	Persentase fasilitasi kerja sama desa	Program Peningkatan Kerja Sama Desa
					O.4.1.3	Administrasi Desa Tertib	Nilai Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa pada Indeks Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa
						Meningkatnya Ekonomi Desa	Nilai Dimensi Ekonomi pada Indeks Desa	
						Meningkatnya Aksesibilitas Desa	Nilai Dimensi Aksesibilitas Desa pada Indeks Desa	





VISI/MISI	TUJUAN		SASARAN		OUTCOME		INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)	(6)
					O.4.1.4	Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Memiliki Kontribusi dalam Pembangunan Masyarakat Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang Aktif Berkontribusi dalam Pembangunan Masyarakat Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
Misi 5 Mewujudkan pemerintahan yang demokratis bersih dan akuntabel	T.5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik					Indeks Reformasi Birokrasi (Predikat)	
			S.5.1	Terwujudnya birokrasi yang adaptif dan berintegritas			Persentase Capaian Reformasi Birokrasi General (Poin)	
					O.4.1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Publik Kepada Masyarakat	Nilai akses dan diseminasi informasi	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
					O.4.1.2	Meningkatnya Penerapan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Tingkat kematangan kebijakan internal layanan jaringan intra pemerintah daerah	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
					O.4.1.3	Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik dalam Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik dalam Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
					O.4.1.4	Meningkatnya Tata Kelola Keamanan Informasi	Nilai tata kelola keamanan informasi	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
					O.4.1.5	Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Persentase ketersediaan arsip sesuai NSPK	Program Pengelolaan Arsip





VISI/MISI	TUJUAN		SASARAN		OUTCOME		INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)	(6)
					O.4.1.6	Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase arsip yang terlindungi dan terselamatkan	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
					O.4.1.7	Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Program Perizinan Penggunaan Arsip
					O.4.1.8	Meningkatnya kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	Program Pendaftaran Penduduk
					O.4.1.9	Meningkatnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	Program Pencatatan Sipil
					O.4.1.10	Meningkatnya pemanfaatan informasi administrasi kependudukan	Persentase pelayanan kependudukan yang menggunakan SIAK	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
					O.4.1.11	Meningkatnya kualitas pengelolaan profil kependudukan	Jumlah dokumen kependudukan yang dihasilkan sesuai kewajiban OPD berdasarkan Permendagri	Program Pengelolaan Profil Kependudukan
					O.4.1.12	Meningkatnya tata kelola anggaran	Ketepatan Waktu Penyusunan APBD	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
						Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Usulan Pencairan dari Perangkat Daerah dengan Penerbitan SP2D	
						Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu	
					O.4.1.13	Terwujudnya pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel	Persentase Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah





VISI/MISI	TUJUAN		SASARAN		OUTCOME		INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)	(6)
					O.4.1.14	Meningkatnya penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
						Pertumbuhan Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak dan Retribusi Daerah	
					O.4.1.15	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kebutuhan Pengadaan dan Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai Sistem Merit Aspek Perencanaan Kebutuhan Pengadaan dan Sistem Informasi Kepegawaian	Program Kepegawaian Daerah
						Promosi Mutasi dan Pengembangan Karir berdasarkan Sistem Merit	Nilai Sistem Merit Aspek Promosi Mutasi; dan Pengembangan Karier	
						Manajemen kinerja ASN Penggajian Penghargaan dan Disiplin berdasarkan Sistem Merit	Nilai Sistem Merit Aspek Manajemen Kinerja; Penggajian Penghargaan dan Disiplin; Perlindungan dan Pelayanan	
					O.4.1.16	Meningkatnya Kompetensi Teknis Dasar Manajerial dan Fungsional	Rata-rata Lama Pegawai yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
					O.4.1.17	Meningkatnya Diseminasi Hasil Kelitbangan	Persentase Hasil Kelitbangan yang Diseminasikan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
					O.4.1.18	Perencanaan Pembangunan Daerah Mendorong Perbaikan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
						Pengukuran Kinerja Dimanfaatkan dalam Perbaikan Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah	
					O.4.1.19	Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Mendorong Perbaikan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan





VISI/MISI	TUJUAN		SASARAN		OUTCOME		INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)	(6)
						Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Mendorong Perbaikan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Pembangunan Daerah
						Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Infrastruktur dan kewilayahan Mendorong Perbaikan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
						Pengukuran Kinerja Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Dimanfaatkan dalam Perbaikan Perencanaan Kinerja	Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
						Pengukuran Kinerja Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Dimanfaatkan dalam Perbaikan Perencanaan Kinerja	Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	
						Pengukuran Kinerja Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Dimanfaatkan dalam Perbaikan Perencanaan Kinerja	Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
					O.4.1.20	Tersusunnya Peraturan Perundang-undangan hasil penetapan	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
					O.4.1.21	Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan kinerja dan keuangan	Persentase tindaklanjut rekomendasi BPK tahun anggaran N-1	Program Penyelenggaraan Pengawasan
					O.4.1.23	Terwujudnya Efektivitas Pengendalian Korupsi	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi





VISI/MISI	TUJUAN		SASARAN		OUTCOME		INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)	(6)
					O.4.1.24	Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik sesuai standar dan tepat waktu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
					O.4.1.25	Terciptanya wilayah kecamatan yang aman tertib dan kondusif.	Persentase konflik sosial yang berhasil dimediasi	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
					O.4.1.26	Berkurangnya gangguan trantribum	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sumber: Hasil analisis, 2025





Untuk mendukung program prioritas pembangunan daerah, telah dirumuskan langkah-langkah strategis pembangunan yang mengacu pada janji politik Bupati dan Wakil Bupati pada saat masa pemilihan umum yang dijadikan sebagai bahan dalam merumuskan kebijakan pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya yang disebut 13 Program Gerak Cepat (Gercep), yang meliputi:

1. Santri Maju Santri Mampu

- Implementasi Perda Pesantren
- Pendidikan yang mencetak santri mandiri, berwawasan luas dan berdaya saing
- Perwujudan pesantren yang resik dan sehat
- Perwujudan Eco Pesantren yang terpadu dan terintegrasi
- Penyelenggaraan Festival Santri
- Penyelenggaraan Pekan Olahraga Santri
- Penyelenggaraan program Duta Santri
- 1 Kampung 1 Hafidz
- Peningkatan kesejahteraan ajengan, guru ngaji dan guru diniyah

2. DKM Cerdas

- Pendidikan diniyah sebagai syarat melanjutkan pendidikan formal
- Shalat berjamaah di masjid bagi Aparatur Sipil Negara
- Maghrib Mengaji di setiap DKM dengan program khusus 1 DKM, 1 Hafidz
- Peningkatan kesejahteraan bagi marbot dan guru ngaji
- Perwujudan masjid yang resik dan sehat
- Perwujudan Eco Masjid terpadu dan terintegrasi
- DKMB Mart di 39 Kecamatan

3. Rumah Sakit Baru Harapan Baru

- Pembangunan 3 Rumah Sakit di 3 Wilayah Kabupaten Tasikmalaya (Ciawi, Karangnunggal, dan Manonjaya)
- Pembentukan satuan tugas gerak cepat untuk layanan konseling kesehatan mental (layanan responsif dengan psikolog)





4. Pengembangan wisata berbasis alam, religi dan budaya

- Penyelenggaraan festival tahunan, seperti Festival Batik, Helaran Pencak Silat Buhun & Festival Tarian Tradisional
- Aktivasi sanggar budaya, padepokan, dan helaran budaya

5. Tasik Sport Center

- Revitalisasi stadion dan pusat olahraga di Kabupaten Tasikmalaya

6. Tasik Iman Tasik Aman

- Pengajian rutin mingguan atau bulanan di lingkungan pemerintahan
- Pembiasaan sholat dhuha dan maghrib mengaji
- Patroli keamanan bersama
- Pembuatan pos keamanan lingkungan atau poskamling terpadu
- Gerakan gotong royong

7. 1 Desa 1 Sarjana

- Pemberian bantuan mahasiswa berprestasi
- Pemberian insentif bagi Sekolah Menengah Kejuruan yang membuka jurusan Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan untuk mendukung program hilirisasi Agribisnis
- Peningkatan insentif bagi Guru Madrasah Diniyah, Guru PAUD hingga jenjang berikutnya (non-ASN)
- Peningkatan kapasitas dan kompetensi Guru
- Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
- Penerapan muatan lokal dalam kurikulum untuk pendidikan karakter dan budaya
- Penerapan Sekolah Adiwiyata (Sekolah berwawasan lingkungan)

8. Tasik Hejo

- Revitalisasi irigasi teknis
- Peningkatan produktivitas pertanian
- Penetapan kawasan resapan air





- Pengembangan kawasan pertanian terpadu
- Peningkatan produktivitas pembudidaya ikan dan nelayan tangkap yang berkelanjutan dengan menjaga kelestarian ekosistem laut
- Penanaman pohon di lahan kritis dan sepanjang jalan Kabupaten
- Dukungan terhadap *Agroforestry* dan *Agrosilvopastural* dengan pendekatan 3P (*People, Planet* dan *Profit*)
- Penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan kerusakan lingkungan
- Pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat (bank sampah, Rumah sampah berbasis Sekolah, TPS3R)

9. Jalan Kasep dalam 2 tahun

- Perbaikan ruas jalan Kabupaten
- Pemasangan penerangan jalan umum

10. Usaha Anti Rentenir

- Pelatihan kewirausahaan
- Fasilitasi pendanaan
- Digitalisasi pemasaran
- Pemberdayaan perempuan dan ibu rumah tangga
- Revitalisasi Pasar Tradisional

11. Tasik Creative Center

- Pengembangan pusat kreativitas yang akan menjadi wadah bagi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya untuk menyalurkan ide dan inovasi kreatif

12. Desa Naik Kelas

- Peningkatan kesejahteraan Aparatur Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT/RW/PKK/Posyandu/Linmas/Karang Taruna/LPM)
- Peningkatan kompetensi aparatur desa
- Digitalisasi desa cerdas (*Smart Village*)
- Desa berbudaya lingkungan (*Eco Village*)





- Pemetaan Desa berdasarkan potensi lokal berbasis digital

13. Pemerintahan Berbasis Digital

- Optimalisasi *command center* dan peningkatan pelayanan publik berbasis digital
- Pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP)
- Optimalisasi Pusat Kantor Pemerintahan
- Optimalisasi pemanfaatan aset daerah

3.4.1 Dukungan Program Daerah terhadap Program Prioritas Nasional

RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 juga mendukung sejumlah Program Prioritas Nasional yang didasarkan pada RPJMN Tahun 2025-2029. Berikut sejumlah program prioritas nasional yang membutuhkan dukungan Kabupaten Tasikmalaya yaitu sebagai berikut.

1. Makan Bergizi Gratis

Pemerintah meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan untuk:

- a. Peningkatan gizi dan partisipasi sekolah, meliputi: peningkatan akses dan pemenuhan makanan bergizi, penanaman perilaku dan gizi seimbang, peningkatan prestasi, partisipasi dan kehadiran anak sekolah
- b. pengurangan kemiskinan, meliputi: penciptaan lapangan kerja dan pengurangan beban rumah tangga dalam perolehan pangan
- c. pemberdayaan ekonomi lokal, meliputi pemanfaatan bahan pangan lokal, peningkatan kesejahteraan petani, nelayan, peternak dan UMKM.

Dukungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terhadap program ini diantaranya:

- a. Mendorong keterlibatan UMKM, petani dan nelayan dalam rantai pasok sehingga lebih banyak pihak terkait distribusi dan produksi pangan bergizi.
- b. Mendorong upaya makan bergizi secara teratur kepada kelompok rentan serta keamanan pangan yang dikonsumsi.
- c. Mendorong partisipasi siswa dalam kegiatan sekolah dan mengurangi angka putus sekolah, yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia.





- d. Memperkuat produksi pangan lokal untuk menghasilkan pangan yang berkualitas.
- e. Memfasilitasi terbentuknya dan terselenggaranya kantor satuan pelayanan yang representatif.

2. Sekolah Rakyat

Sekolah rakyat merupakan inisiatif strategis Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk menjawab tantangan kesenjangan akses Pendidikan bagi kelompok rentan dan marginal. Materi pembelajaran dirancang tidak hanya berisi kemampuan dasar dalam kurikulum standar tetapi juga ditambah dengan Pendidikan karakter, keterampilan hidup (*life skills*) serta pengetahuan sosial dan budaya lokal. Sekolah Rakyat merupakan sekolah terintegrasi dari Tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Sekolah Rakyat menyelenggarakan pendidikan unggulan yang tidak hanya menekankan aspek akademis tetapi juga mengutamakan pembentukan karakter dan kepribadian luhur. Sebagai *Centre of Excellence*, Sekolah Rakyat berkomitmen memberikan dampak positif kepada peserta didik dengan menginspirasi dan mengembangkan intelektual. Melalui *excellence of thought* (keunggulan dalam pemikiran) dan *excellence of character* (keunggulan dalam karakter). Sekolah Rakyat diharapkan menghasilkan lulusan yang cerdas intelektualnya, tangguh mentalnya, dan kuat karakternya.

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mendukung program ini melalui penyediaan lahan, perizinan, penyiapan guru serta tenaga pendidik.

3. Koperasi Merah Putih

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang wajib ditindaklanjuti oleh seluruh pemerintah daerah, disebutkan bahwa akan dilakukan percepatan pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Di Jawa Barat akan ada percepatan pembentukan koperasi sebanyak 5.877 unit.





Sedangkan di Kabupaten Tasikmalaya telah dibentuk koperasi sebanyak 351 unit di masing-masing desa.

Pembentukan koperasi merah putih ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang terjadi di wilayah perdesaan diantaranya pendapatan penduduk desa yang masih minim, kurangnya lapangan kerja di desa, tidak stabilnya harga bahan pokok, fasilitas Kesehatan masih terbatas dan terjebak pinjaman online atau rentenir. Unit usaha pada Koperasi Merah Putih diantaranya toko sembako, aktivitas simpan pinjam, klinik desa, apotik desa, gudang penyimpanan dan penyediaan logistik desa. Dukungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam pembentukan Koperasi Merah Putih diantaranya:

- a. Menyediakan anggaran untuk pembuatan akta notaris koperasi.
- b. Melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan dan pengawasan dalam pembentukan 351 koperasi desa merah putih.
- c. Melaporkan perkembangan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada Pemerintah Pusat.

4. Program 3 Juta Rumah

Program ini merupakan inisiatif strategis nasional dalam sektor perumahan yang diluncurkan untuk menjawab tantangan *backlog* perumahan nasional yang tinggi serta untuk memperluas akses Masyarakat terhadap hunian layak terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Tujuan utama Program 3 Juta Rumah yaitu:

- a. Mengurangi *backlog* kepemilikan rumah di Indonesia secara signifikan
- b. Meningkatkan kualitas hunian Masyarakat melalui perbaikan rumah tidak layak huni
- c. Memastikan akses perumahan yang layak, terjangkau dan berkelanjutan bagi seluruh kelompok Masyarakat.

Sasaran Program 3 Juta Rumah yaitu:

- a. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di wilayah perkotaan dan perdesaan.





- b. Pegawai negeri, TNI/Polri, pekerja sektor informal, serta generasi muda yang belum memiliki rumah.
- c. Daerah dengan kepadatan tinggi dan *backlog* perumahan yang tinggi, termasuk kawasan kumuh.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya terus berkomitmen untuk mendukung program 3 Juta Rumah khususnya agar dapat diimplementasikan di Kabupaten Tasikmalaya melalui kebijakan Pembangunan Rumah untuk masyarakat miskin. Berikut ini beberapa program yang secara langsung mendukung program 3 Juta Rumah, yaitu:

- a. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).
- b. Perbaikan Rumah bagi Korban Terdampak Bencana dan Pembangunan Rumah bagi Korban Relokasi Terdampak Program Pemerintah.
- c. Fasilitasi kolaborasi peran swasta dan BUMN/BUMD.
- d. Fasilitasi kelembagaan dan regulasi daerah.

3.5 Arah Kebijakan Kewilayahan

3.5.1 Kebijakan Pengembangan Kewilayahan dalam Perspektif Kabupaten

3.5.1.1 Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Pasal 2 ayat (1) huruf a, menetapkan bahwa Tujuan penataan Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya adalah mewujudkan daerah yang maju, aman, nyaman dan sejahtera berbasis sektor agribisnis dan pariwisata serta menjaga keharmonisan lingkungan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah tersebut, dibentuk tiga kebijakan utama yang terdiri atas:

- a. Kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
- b. Kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
- c. Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten.

Kebijakan penataan ruang ini kemudian dirinci melalui strategi penataan ruang dalam bentuk langkah-langkah konkret yang menjadi dasar perumusan rencana struktur dan pola ruang wilayah. Rincian





kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat dalam tabel berikut.





Tabel 3.5
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya

No	Kebijakan	Strategi
A. Pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten		
1	Pengembangan sistem pusat permukiman yang berhierarki dan proporsional dalam kesatuan sistem Wilayah Kabupaten	a. Mengembangkan Wilayah fungsional sistem pusat permukiman secara berjenjang dan bertahap sesuai pengembangan perkotaan secara keseluruhan; b. Memantapkan perkotaan Singaparna dan Karangnunggal sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL); c. Mendorong pengembangan perkotaan Ciawi dan Cikatomas sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL); d. Mengembangkan Wilayah fungsional ibukota Kecamatan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan dan Pusat Pelayanan Lingkungan; e. Menyediakan pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Kawasan Perkotaan paling sedikit seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dan 10% (sepuluh persen) Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat.
2	Pengembangan sistem jaringan prasarana Wilayah yang memadai	a. Mengembangkan alokasi prasarana dan sarana fisik, sosial, dan ekonomi sesuai fungsi dan terintegrasi dengan sistem pusat permukiman; b. Mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan, kualitas, serta jangkauan sarana prasarana Wilayah secara merata; c. Meningkatkan akses jaringan jalan yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan Wilayah Kabupaten; d. Meningkatkan ketersediaan dan pengembangan kualitas layanan sistem jaringan energi; e. Meningkatkan ketersediaan dan pengembangan kualitas layanan sistem jaringan telekomunikasi; f. Meningkatkan ketersediaan dan pengembangan kualitas layanan sistem jaringan sumber daya air; g. Meningkatkan ketersediaan dan pengembangan kualitas layanan sistem penyediaan air minum (SPAM);



No	Kebijakan	Strategi
		h. Meningkatkan ketersediaan dan pengembangan kualitas layanan sistem pengolahan air limbah (SPAL); i. Meningkatkan ketersediaan dan pengembangan kualitas layanan sistem jaringan persampahan; j. Meningkatkan ketersediaan dan pengembangan kualitas layanan sistem jaringan evakuasi bencana; k. Meningkatkan ketersediaan dan pengembangan kualitas layanan sistem drainase; dan l. Mengembangkan dan menerapkan teknologi modern dan ramah lingkungan dalam rencana jaringan prasarana.
B. Kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten		
1	Pengendalian pemanfaatan, pengelolaan, dan pelestarian Kawasan Lindung sesuai dengan fungsinya; dan	a. Memulihkan fungsi Kawasan Lindung secara bertahap b. Mengoptimalkan upaya pencapaian luas Kawasan berfungsi lindung c. mengendalikan pembangunan prasarana Wilayah di sekitar Kawasan Lindung; d. Mengoptimalkan pendayagunaan Kawasan Lindung hutan dan non hutan; e. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan pada Kawasan Lindung; f. Mengelola dan mengendalikan Wilayah pesisir dan laut yang berfungsi lindung; g. Merehabilitasi lahan kritis pada Kawasan Lindung; h. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH); i. Mengendalikan pemanfaatan dan fungsi hidrologi pada Badan Air melalui pengelolaan Daerah Aliran Sungai; j. Mengendalikan pemanfaatan fungsi Hutan Lindung sesuai fungsinya; k. Menetapkan dan mengendalikan pemanfaatan fungsi Kawasan Perlindungan Setempat pada Wilayah Kabupaten; l. Mengendalikan pemanfaatan fungsi Kawasan Konservasi sesuai fungsinya; m. Menetapkan dan meningkatkan pengelolaan Kawasan Cagar Budaya; dan n. Mengendalikan pemanfaatan fungsi Kawasan resapan air dan Kawasan karst.



No	Kebijakan	Strategi
2	Pembangunan berbasis mitigasi bencana dan berwawasan lingkungan.	a. Menjaga kelestarian Kawasan Lindung pada Kawasan rawan bencana; b. Mengendalikan fungsi kegiatan Budi Daya pada Kawasan Rawan Bencana secara adaptif dan berketahanan; c. Mewujudkan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; d. Menetapkan dan meningkatkan ketahanan pada Kawasan Rawan Bencana; e. Meningkatkan dan mengendalikan kerusakan lingkungan pada sungai, lahan kering, dan hutan serta mitigasi bencana alam; f. Meningkatkan pengelolaan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan; dan g. Mengendalikan pemanfaatan fungsi Kawasan rawan bencana.
3	Peningkatan produktivitas pertanian yang ditunjang dengan pengembangan agribisnis	a. Menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; b. Memantapkan lahan sawah beririgasi serta meningkatkan produktivitas pertanian; c. Mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur pendukung pertanian; d. Merehabilitasi dan memelihara jaringan irigasi; e. Meningkatkan produktivitas lahan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan; dan f. Mengembangkan sektor agribisnis untuk meningkatkan daya saing produk pertanian dan perekonomian Wilayah.
4	Pengembangan pariwisata dengan memanfaatkan potensi daya tarik wisata alam, budaya, dan buatan	a. Membangun perwilayahan pariwisata serta pengembangan daya tarik wisata dan desa wisata tematik yang memadukan keunggulan alam, geologi, budaya, dan agrowisata, sekaligus melindungi sumber daya alam dan budaya yang memiliki nilai penting; b. Mengembangkan pusat pelayanan primer yang berfungsi sebagai pusat pelayanan pariwisata dan pusat informasi pariwisata Daerah;



No	Kebijakan	Strategi
		c. Mengembangkan pusat pelayanan sekunder yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan pariwisata serta penyebaran wisatawan dan kegiatan wisata ke kawasan lain di sekitarnya; d. Mengembangkan kegiatan wisata pendidikan, wisata petualangan dan wisata kreatif pada daya tarik wisata berbasis budaya, agrowisata, keragaman geologi, dan industri kreatif; e. Membangun fasilitas pariwisata yang memadai dan ramah lingkungan, serta memenuhi kebutuhan wisatawan dan penduduk pada pusat pelayanan primer dan sekunder, desa wisata, serta daya tarik wisata; f. Mengembangkan pembinaan kepada masyarakat dan peningkatan pemahaman serta kesadaran kolektif masyarakat untuk menyiapkan Masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan dan berdaya saing yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan religi; dan g. Mendorong pengembangan regulasi investasi, khususnya kemudahan perizinan berusaha, yang dapat mempercepat pertumbuhan pariwisata Daerah.
5	Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Permukiman Perdesaan dengan mempertimbangkan keserasian, keseimbangan dan pembangunan berkelanjutan	a. Mengembangkan perumahan dan Kawasan permukiman yang terpadu, berkelanjutan, terjangkau dan layak huni, serta mewujudkan penyebaran penduduk yang proporsional; b. Mengembangkan perumahan dan Kawasan permukiman yang terintegrasi antar sektor, implementatif dan sesuai dengan kebutuhan Wilayah Kabupaten; c. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung pada perumahan dan Kawasan permukiman; d. Menerapkan mitigasi bencana pada perumahan dan Kawasan permukiman; dan e. Merevitalisasi Kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berwawasan lingkungan berkelanjutan.



No	Kebijakan	Strategi
6	Pengoptimalan potensi lahan budi daya dan sumber daya alam yang mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di Wilayah belum berkembang;	a. Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi pada Wilayah tertinggal; b. Mengembangkan perekonomian pada Kawasan Budi Daya pada Wilayah tertinggal; c. Meningkatkan akses Kawasan Budi Daya ke jaringan jalan pada Wilayah tertinggal; d. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung di pusat kegiatan; e. Meningkatkan produktivitas dan komoditas unggulan serta pengembangan keterkaitan hulu dan hilir; f. Mewujudkan dan mendorong pertumbuhan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju serta Industri Hijau pada Kawasan Peruntukan Industri; dan g. Mengembangkan perikanan tangkap dan budidaya dengan mengedepankan prinsip efisiensi, kualitas, percepatan dan berkesinambungan.
7	Peningkatan fungsi Kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara	a. Mengembangkan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan khusus pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan b. Turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.
C. Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten		
1	Penetapan dan pengembangan fungsi Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dalam rangka pengembangan perekonomian daerah yang produktif, efisien, berdaya saing dan berkelanjutan	a. Menetapkan Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi; b. Mengembangkan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi; c. Mengembangkan sektor strategis mengutamakan perkembangan ekonomi kreatif dan ekonomi lokal; d. Mengembangkan Kawasan wisata terpadu dengan kegiatan ekonomi lokal; dan e. Mengembangkan atraksi, aksesibilitas, amenitas, serta kelembagaan Kawasan wisata yang ramah lingkungan dan berbasis mitigasi bencana.



No	Kebijakan	Strategi
2	Penetapan dan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya dalam rangka pelestarian dan pengembangan adat istiadat, peninggalan sejarah, dan warisan budaya	a. Menetapkan Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; b. Mempertahankan dan mengembangkan lingkungan Kawasan untuk kepentingan adat istiadat, sejarah, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan kepariwisataan; c. Melaksanakan penataan wisata ziarah dan Kawasan pendidikan dengan konsep religi, lengkap dan terintegrasi; dan d. Memenuhi kebutuhan sarana penunjang Kawasan pendidikan.
3	Penetapan dan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dalam rangka pemanfaatan dan pengendalian sumber daya alam strategis yang berkelanjutan	a. Menetapkan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; b. Mempertahankan dan mengembangkan lingkungan Kawasan untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi; c. Mengembangkan dan menata Kawasan berbasis lingkungan dan mitigasi bencana; d. Melestarikan sumber daya alam Kawasan; dan e. Melestarikan spesies keanekaragaman hayati.

Sumber: RTRW Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024-2044, 2025

3.5.1.1.1 Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten terdiri dari dua elemen pokok yakni, system pusat permukiman serta system jaringan prasarana. Elemen pertama yaitu pusat permukiman, mengatur pola dan hierarki permukiman agar kegiatan masyarakat, ekonomi, dan sosial tertata dengan baik. Elemen kedua yaitu jaringan prasarana, menjamin bahwa layanan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah berjalan lancar dan sinergis. Dengan dua unsur ini, perencanaan ruang kabupaten diharapkan lebih terpadu dan mampu mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

1. Sistem Pusat Permukiman

Dalam Rencana Struktur Ruang RTRW Kabupaten Tasikmalaya, direncanakan penataan pusat-pusat pelayanan strategis yang tersebar





di berbagai wilayah Kabupaten. Konsep sistem pusat permukiman tersebut dibedakan dalam beberapa jenis, yaitu:

- a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa Kecamatan.
- b. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan.
- c. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.

Melalui penetapan PKL, PPK dan PPL yang sesuai peran dan skalanya, RTRW menyusun hierarki pusat-pusat kegiatan yang memperkuat struktur ruang kabupaten. Model ini menekankan integrasi antara pusat-pusat pelayanan di wilayah perkotaan dan perdesaan, agar dapat didukung jaringan prasarana yang efisien serta pelaporan yang mendukung fungsi sosial, ekonomi, dan administratif secara menyeluruh.

Tabel 3.6
Lokasi yang Ditetapkan menjadi PKL, PPK dan PPL sesuai RTRW

No	Fungsi	Kawasan
1	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	a. Kawasan Perkotaan Singaparna; b. Kawasan Perkotaan Karangnunggal; c. Kawasan Perkotaan Ciawi; dan d. Kawasan Perkotaan Cikatomas.
2	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	a. Kawasan Perkotaan Cibalong; b. Kawasan Perkotaan Cikalong; c. Kawasan Perkotaan Cineam; d. Kawasan Perkotaan Cipatujah; e. Kawasan Perkotaan Manonjaya; f. Kawasan Perkotaan Rajapolah; g. Kawasan Perkotaan Salawu; dan h. Kawasan Perkotaan Taraju.





No	Fungsi	Kawasan
3	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	a. Pusat Pelayanan Lingkungan Bojongasih; b. Pusat Pelayanan Lingkungan Cisayong; c. Pusat Pelayanan Lingkungan Culamega; d. Pusat Pelayanan Lingkungan Gunungtanjung; e. Pusat Pelayanan Lingkungan Pancatengah; f. Pusat Pelayanan Lingkungan Salopa; g. Pusat Pelayanan Lingkungan Sariwangi; h. Pusat Pelayanan Lingkungan Sodonghilir; i. Pusat Pelayanan Lingkungan Sukaraja; j. Pusat Pelayanan Lingkungan Sukaratu; dan k. Pusat Pelayanan Lingkungan Tanjungjaya.

Sumber: RTRW Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024-2044, 2025

2. Sistem Jaringan Prasarana

Sistem jaringan prasarana meliputi lima unsur penting—jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya—yang secara bersama-saling mendukung agar suatu wilayah dapat berfungsi secara terpadu, efisien dan berkelanjutan.

a. Sistem Jaringan Transportasi

Sistem jaringan transportasi yang diatur dalam Pasal 8 huruf a Perda Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2024 meliputi tiga unsur penting yakni, jaringan jalan, jaringan kereta api, dan jaringan transportasi laut. Ketiganya bekerja bersama untuk memastikan mobilitas orang dan barang bisa berjalan lancar di seluruh wilayah.

(1) Sistem Jaringan Jalan

Sistem jaringan jalan terdiri atas jalan umum; jalan tol; terminal penumpang; jembatan timbang; dan jembatan.

Rencana sistem jaringan jalan meliputi:

Tabel 3.7
Sistem Jaringan Jalan

Sistem Jaringan Jalan	Rencana
Jalan Arteri Primer	Bts. Kab. Tasikmalaya/Garut – Ciawi, Jln. Raya Ciawi (Ciawi), Jln. Raya Malangbong (Malangbong), Lingkar Gentong, Lingkar Gentong (Rencana), Rajapolah - Bts. Kab. Tasikmalaya/Ciamis.
Jalan Kolektor Primer-1	Bts. Kota Rajapolah - Bts. Kota Tasikmalaya, Cikaengan – Cipatujah, Cipatujah – Kalapagenep, Jln. Raya Rajapolah (Rajapolah), Kalapagenep - Cimerak.





Sistem Jaringan Jalan	Rencana
Jalan Kolektor Primer-2	Cikuray – Singaparna, Jalan Raya Cipatujah, Jl. Alternatif Kmp. Tenjowaringin, Jl. Raya Karangnunggal, Jl. Raya Singaparna, Karangnunggal – Cipatujah, Panaekan/Goler – Cimaragas, Singaparna - Tasikmalaya, Tasikmalaya – Karangnunggal, Tasikmalaya - Manonjaya - Panaekan/Goler.
Jalan Kolektor Primer-3	Jalan Horizontal Tengah Selatan, Jalan Pasar (Singaparna-Tasikmalaya), Rencana Jalan Lingkar Selatan Singaparna dan Rencana Jalan Lingkar Utara Singaparna
Jalan Kolektor Sekunder	Cimerah-Leuwisari, Dlm Kt. Ciawi - Kaum Kaler, Dlm Kt. Manonjaya - Dlm Kt. Manonjaya, Dlm Kt. Singaparna - Dlm Kt. Singaparna, Rancabakung – Pasirdagul, Jl. Masuk Terminal Ciawi – Panulisan, Jl. Zaenal Asikin, Kudang – Cibeuti, Mangunreja – Sukaraja, Pamegatan - Kalimanggis – Cihaur, Pasirhuni – Ciawi, Tineawati-Cintaraja.
Jalan Lokal	Jalan yang menghubungkan antar pusat-pusat permukiman dan kecamatan
Jalan Tol	Gedebage-Tasikmalay-Cilacap, Kuningan-Tasikmalaya, Cidaun-Cikalong dan Cikalong Cipucang.
Jaringan Kereta Api Antar Kota	Bogor-Yogyakarta, Cijulang-Rancabuaya, Galunggung-Tasikmalaya, Tasikmalaya-Cijulang dan Tasikmalaya Singaparna
Terminal Tipe B	Terminal Padakembang
Terminal Tipe C	Ciawi, Cibalong, Cikatomas, Cineam, Kalapagenep, Manonjaya, Rajapolah, Rancabakung (Karangnunggal), Simpang (Bantarkalong) dan Sodonghilir
Jembatan Timbang	Jembatan Timbang Gentong di Kec. Kadipaten
Stasiun Kereta Api	Stasiun Cirahayu, Stasiun Ciawi, Stasiun Manonjaya, Stasiun Pirusa, Stasiun Rajapolah dan Stasiun Singaparna
Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pelabuhan Cipatujah
Pangkalan Pendaratan Ikan	PPI Pamayangsari dan PPI Nusa Cimanuk

Sumber: RTRW Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024-2044, 2025

(2) Sistem Jaringan Energi

Sistem jaringan energi meliputi jaringan infrastruktur pipa minyak dan gas bumi, serta jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.





Tabel 3.8
Sistem Jaringan Energi

Jaringan Energi		Rencana
Jaringan yang menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan		melintasi Kec, Ciawi, Kec. Cineam, Kec. Jamanis, Kec. Kadipaten, Kec. Manonjaya, Kec. Rajapolah dan Kec. Sukaresik.
Pembangkit Tenaga Listrik	PLTS	Kec. Bojonggambir, Kec. Cikatomas, Kec. Cipatujah, Kec. Salopa, Kec. Singaparna dan Kec. Taraju
	PLTP	Karaha Bodas di Kecamatan Kadipaten.
	PLTM H	Curughawu (Kec. Cikatomas), Leuwi Kiara (Kec. Cipatujah), Curug Ketruk (Kec. Culamega), Suryalaya (Kec. Pagerageung)
Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)		Kasugihan-Tasikmalaya dan Tasikmalaya Depok
Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)		Ciamis-Banjar, Garut-Tasikmalaya, Tasikmalaya-Ciamis, Tasikmalaya-Malangbong, dan Tasikmalaya Baru-Karangnunggal
Gardu Listrik		Kecamatan Karangnunggal

Sumber: RTRW Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024-2044, 2025

(3) Sistem Jaringan Telekomunikasi

Dalam upaya memperkuat konektivitas digital di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, sistem jaringan telekomunikasi dibagi menjadi dua skema utama. Skema pertama, jaringan tetap, meliputi penggelaran jaringan fiber optik yang membentang sepanjang jalan arteri dan kolektor di seluruh kabupaten. Skema kedua, jaringan bergerak, berupa jaringan bergerak seluler yaitu menara *Base Transceiver Station* (BTS) yang menjangkau semua kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya, menjamin bahwa setiap wilayah kecamatan, baik pusat maupun terpencil memiliki akses komunikasi bergerak yang memadai. Dengan dua skema ini, pemerintah daerah menempatkan jaringan telekomunikasi sebagai infrastruktur strategis yang mendukung pembangunan ekonomi, pelayanan publik dan pemerataan akses informasi.

(4) Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Rencana struktur ruang sistem jaringan sumber daya air dirancang dengan dua unsur utama yang saling melengkapi yakni





pertama, jaringan irigasi yang terbagi ke dalam tiga tingkatan, terdiri dari jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier dan tersebar di seluruh kecamatan. Jaringan primer berfungsi sebagai saluran induk utama yang membawa air dalam jumlah besar dari sumber ke area luas, jaringan sekunder mendistribusikan ke unit-unit yang lebih kecil, dan jaringan tersier menyentuh langsung ke petak lahan pertanian masing-masing. Bersamaan dengan itu, kedua, bangunan sumber daya air seperti bendung atau bendungan dan bangunan pendukung jaringan irigasi lainnya juga tersebar di seluruh kecamatan, berfungsi sebagai titik awal pengambilan dan pengendalian air sebelum dialirkan ke sistem jaringan irigasi tersebut. Dengan demikian, sistem ini membentuk kerangka ruang yang menyeluruh dari sumber, pengendalian, hingga distribusi ke lahan-pertanian di tiap kecamatan, memastikan bahwa aspek pengelolaan air dapat terstruktur baik dan merata.

(5) Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Sebagai bagian penting dalam kerangka tata ruang wilayah, sistem jaringan prasarana lainnya menyajikan kerangka pengembangan infrastruktur yang mendukung kualitas hidup, pelayanan publik, dan ketahanan wilayah. Sistem ini mencakup berbagai jaringan seperti penyediaan air minum, pengelolaan limbah, persampahan, drainase, dan evakuasi bencana yang dijabarkan secara spasial dan terpadu. Dengan pengaturan ruang yang tepat, sistem prasarana lainnya menjadi pilar yang memperkuat penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan dan fungsi wilayah yang tangguh secara sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Tabel 3.9
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya	Jenis	Rencana
Sistem Penyediaan Air Minum	Unit Air Baku	Kec. Bantarkalong, Kec. Manonjaya, Kec. Sariwangi dan Kec. Sukaraja





Sistem Jaringan Prasarana Lainnya	Jenis	Rencana
	Unit dan Jaringan Produksi	Kec. Ciawi, Kec. Cisayong, Kec. Kadipaten, Kec. Leuwisari, Kec. Pagerageung, Kec. Rajapolah, Kec. Salawu, Kec. Sariwangi, Kec. Sukahening dan Kec. Sukaratu
Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)	Infrastruktur Pengolahan Air Limbah Domestik	di Kecamatan Mangunreja
Sistem Jaringan Persampahan	TPA	di Kecamatan Mangunreja
	TPST	Kec. Karangnunggal, Kec. Manonjaya, Kec. Pageregung
	TPS	Setiap kecamatan
Sistem Jaringan Drainase	Drainase Primer	Sungai yang berada di seluruh Kecamatan
	Drainase Sekunder	Anak sungai yang berada di seluruh Kecamatan
Sistem Jaringan Evakuasi Bencana	Jaringan Evakuasi Bencana	Berada pada jaringan jalan yang berpotensi bencana tinggi
	Tempat Evakuasi Bencana	Berada pada lapangan dan perkantoran yang terdekat dengan potensi bencana

Sumber: RTRW Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024-2044, 2025

3.5.1.1.2 Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten

Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten merupakan salah satu komponen kunci dalam dokumentasi rencana tata ruang wilayah (RTRW), yang memetakan secara spasial distribusi peruntukan ruang antara fungsi lindung dan budidaya dalam suatu wilayah kabupaten. Dengan mempertimbangkan kondisi fisik, sosial dan ekonomi daerah, pola ruang menjadi pedoman bagi pengembangan tata ruang yang harmonis, berkelanjutan dan berdaya saing, sekaligus menjadi instrumen penting dalam mencapai keterpaduan pembangunan antarwilayah.

Tabel 3.10
Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya

Pola Ruang		Luas
Kawasan Lindung	Badan Air	2.163,17
	Cagar Alam	9,32





Pola Ruang		Luas
	Kawasan Hutan Lindung	16.573,84
	Kawasan Perlindungan Setempat	348,83
	Suaka Margasatwa	17,33
	Taman Wisata Alam	0,42
Kawasan Lindung		19.112,91
Kawasan Budidaya	Kawasan Hortikultura	61.528,47
	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	25.917,94
	Kawasan Hutan Produksi Tetap	4.889,58
	Kawasan Perikanan Budi Daya	384,86
	Kawasan Perkebunan	83.549,50
	Kawasan Permukiman Perdesaan	10.174,99
	Kawasan Permukiman Perkotaan	10.777,86
	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	16,22
	Kawasan Peruntukan Industri	453,97
	Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan	143,89
	Kawasan Peternakan	22,44
	Kawasan Tanaman Pangan	53.709,51
Kawasan Budi Daya		251.569,23
Total		270.682,14

Sumber: RTRW Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024-2044, 2025



3.5.1.1.3 Kawasan Strategis Kabupaten

Kawasan Strategis Kabupaten adalah Wilayah dalam satu kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki dampak signifikan terhadap aspek ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta merupakan bagian integral dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten. Di Kabupaten Tasikmalaya, penataan ruang di kawasan-kawasan strategis ini dikelompokkan berdasarkan berbagai sudut pandang yaitu:

- a. Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- b. Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya;
- c. Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi.

Rincian mengenai penetapan kawasan strategis ini, termasuk lokasi spesifik dan rencana integrasinya dalam sistem ruang wilayah, disajikan lebih lengkap dalam tabel berikut.





Tabel 3.11
Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Tasikmalaya

No	Kawasan Strategis	Kepentingan	Tujuan Pengembangan	Arahan Konsep Pengembangan
1	Kawasan Perdagangan Kerajinan Rajapolah	Pertumbuhan Ekonomi	Mengembangkan dan menata wisata kerajinan dan sentra kerajinan di Wilayah utara Kabupaten	Sentra industri, pariwisata, perdagangan, jasa, permukiman
2	Kawasan Wisata Pantai Karangtawulan dan Ekowisata Pantai Selatan		Menata dan mengembangkan atraksi, aksesibilitas, amenitas, serta kelembagaan Kawasan wisata berbasis mitigasi bencana	Kawasan Pariwisata, Perdagangan, Jasa, dan Permukiman, serta pengendalian fungsi pesisir pantai
3	Kawasan Wisata Alam Gunung Galunggung		Menata dan mengembangkan atraksi, aksesibilitas, amenitas, serta kelembagaan Kawasan wisata yang ramah lingkungan dan berbasis mitigasi bencana	Kawasan Taman Bumi (Geopark) Galunggung, pengembangan pendukung pariwisata, serta pengendalian fungsi lindung Gunung Galunggung
4	Kawasan Agropolitan Puspahiang		Mengembangkan dan menata kawasan perkebunan penghasil komoditas manggis	Sentra budidaya dan distribusi manggis
5	Kawasan Kampung Naga	Sosial Budaya	Mengembangkan wisata budaya dengan tetap melestarikan adat istiadat dan budaya di Kampung Naga;	Wisata budaya dan pelestarian lingkungan sekitar Kampung Naga



No	Kawasan Strategis	Kepentingan	Tujuan Pengembangan	Arahan Konsep Pengembangan
6	Kawasan Wisata Ziarah Pamijahan		Penataan wisata ziarah dengan konsep religi, lengkap dan terintegrasi	Wisata religi dan pelestarian lingkungan lokasi wisata
7	Kawasan Wisata Ziarah Syeh Zainudin			
8	Kawasan Pesantren Suryalaya		Pengembangan dan penataan pondok pesantren tasawuf terbesar yang lengkap dan terintegrasi	Kawasan Pendidikan pesantren dan penunjangnya
9	Kawasan Pesantren Sukahideng dan Pesantren Sukamanah		Pengembangan dan penataan pondok pesantren yang lengkap dan terintegrasi	Kawasan Pendidikan pesantren dan penunjangnya
10	Kawasan Pesantren Miftahul Huda			
11	Kawasan Pesantren Cipasung			
12	Kawasan Pesantren Idrisyah			
13	Kawasan Pesantren Haurkuning			
14	Kawasan Geothermal Karaha Bodas	Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi	Mengembangkan dan menata Kawasan pembangkit listrik tenaga panas bumi Karaha Bodas berbasis lingkungan dan mitigasi bencana	Pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi dan pendukungnya yang berwawasan lingkungan



No	Kawasan Strategis	Kepentingan	Tujuan Pengembangan	Arahan Konsep Pengembangan
15	Kawasan Batu Mulia Jasper		Melestarikan dan mengembangkan taman bumi dengan formasi batuan yang unik dan khas berbasis lingkungan dan mitigasi bencana	Pengembangan taman bumi dan pendukungnya yang berwawasan lingkungan
16	Kawasan Plasma Nutfah Sirah Cimunjul		Melestarikan spesies keanekaragaman hayati	Pengembangan dan penataan Kawasan dan pendukungnya yang berwawasan lingkungan

Sumber: RTRW Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024-2044, 2025





3.5.2 Kebijakan Pengembangan Kewilayahan dalam Perspektif Provinsi

3.5.2.1 Pusat-pusat Permukiman

Pembagian sistem pusat permukiman dalam RTRW Provinsi terdiri atas:

- a. PKN, yang memiliki peran sebagai pusat koleksi dan distribusi skala internasional, nasional atau beberapa provinsi;
- b. PKW, yang memiliki peran pusat koleksi dan distribusi skala nasional; dan
- c. PKL, yang memiliki wilayah pelayanan Daerah Kabupaten/Kota dan beberapa kecamatan.

Tabel 3.12
Lokasi yang Ditetapkan Menjadi PKL sesuai RTRW

Fungsi	Lingkup Kabupaten Tasikmalaya
Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Singaparna Cikatomas Ciawi Karangnunggal

Sumber: RTRW Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024-2044, 2025

3.5.2.2 Wilayah Pelayanan

Kabupaten Tasikmalaya yang dikategorikan Pulau Kecil, masuk ke dalam Wilayah Pengembangan (WP) Priangan Timur–Pangandaran. WP Priangan Timur-Pangandaran merupakan sebuah kawasan andalan yang sejajar dengan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Pacangsanak (Pangandaran–Kalipucang–Segara Anakan) dan diprogramkan secara antisipatif untuk memacu pembangunan wilayah perbatasan.

Kabupaten Tasikmalaya, diarahkan untuk kegiatan pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, agroindustri, perikanan dan industri pengolahan perikanan, pusat pengembangan industri kerajinan, wisata alam, serta kegiatan pertambangan mineral logam dan non-logam. Hal ini menegaskan peran strategis Kabupaten Tasikmalaya sebagai salah satu titik penggerak ekonomi dan pelayanan wilayah barat daya Jawa Barat. Masuknya Kabupaten tersebut dalam WP Priangan Timur–





Pangandaran mencerminkan harapan bahwa peran sektor unggulan akan semakin terintegrasi dalam kerangka pembangunan regional.

3.5.2.3 Kawasan Strategis

Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disebut KSP adalah Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari RTRW Provinsi. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) meliputi:

Tabel 3.13
Kawasan Strategis Provinsi

N o	KSP	Wilayah
1	KSP Bandung Utara	Daerah Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat, yang berada di sebelah utara garis kontur 750 mdpl
2	KSP Sukabumi Bagian Selatan dan Sekitarnya	Daerah Kabupaten Sukabumi (Kecamatan Ciracap, Kecamatan Surade, Kecamatan Ciemas, Kecamatan Jampang Kulon, Kecamtan Waluran, Kecamatan Simpenan, Kecamatan Palabuhanratu, Kecamatan Cikakak, dan Kecamatan Cisolok);
3	KSP Patimban	Daerah Kabupaten Subang (sebagian Kecamatan Pusakanagara dan Kecamatan Pusakajaya)
4	KSP Kertajati Aerocity	Daerah Kabupaten Majalengka (sebagian Kecamatan Kertajati, Kecamatan Jatitujuh, dan Kecamatan Kadipaten);
5	KSP Mundu-Losari	Daerah Kabupaten Cirebon (sebagian Kecamatan Mundu, Kecamatan Pangenan, Kecamatan Gebang, Kecamatan Pabedilan, Kecamatan Losari, Kecamatan Astanajapura, dan Kecamatan Babakan)

Sumber: RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042, 2025





Berdasarkan data tersebut, Kabupaten Tasikmalaya **tidak tergolong sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat.**

3.5.3 Kebijakan Pengembangan Kewilayahan dalam Perspektif Nasional

Dalam kerangka pembangunan nasional, kebijakan pengembangan kewilayahan menempati posisi strategis sebagai instrumen utama pemerintah untuk mewujudkan pemerataan, memperkuat konektivitas, serta meningkatkan daya saing antarwilayah di seluruh Indonesia. Rangka kebijakan ini tercermin dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), yang kemudian diintegrasikan dalam dokumen perencanaan jangka panjang, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Kabupaten Tasikmalaya dikategorikan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL), yakni sebuah pusat yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan. Meski demikian, status ini tidak secara eksplisit disinggung dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) tetapi tercantum dalam RTRW Provinsi.

Dalam Rencana Pola Ruang Nasional, Kabupaten Tasikmalaya termasuk ke dalam Kawasan Strategis Nasional. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut KSN adalah Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan, termasuk Wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. KSN tersebut yakni KSNT Pulau-Pulau Kecil Terluar yang meliputi **Pulau Batu Kolotok dan Pulau Nusamanuk di Kabupaten Tasikmalaya.**

Selanjutnya, dalam dokumen RPJMN ditetapkan arah pembangunan kewilayahan sebagai bagian penting yang menyesuaikan potensi geografi, karakteristik sosial-ekonomi, dan kebutuhan spesifik tiap wilayah. Arah khusus untuk Kabupaten Tasikmalaya kemudian dijabarkan secara lebih rinci dalam tabel berikut, sebagai upaya konkret untuk mengintegrasikan kebijakan nasional dan lokal.





Tabel 3.14
Arah Kebijakan Kewilayahan dalam RPJMN Tahun 2025-2029

No	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
1	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi yiatu Citanduy-Ciwulan-Cilaki yang mana mencakup kawasan Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kab. Ciamis dan Kab. Pangandaran	Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat , antara lain pada D. I. Cikunten, D. I. Cikunten II, D. I. Manganti, D. I. Bantarheulang, D. I. Iakbok Utara
		Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah;
		Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi)
		Pengembangan dan Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan)
		Pengembangan dan peningkatan produktivitas holtikultura
		Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan holtikultura
		Konservasi sumber daya air kewenangan pemerintah pusat melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada catchment area, terutama pada DAS Ciwulan, DAS Citanduy, DAS Cijulang, DAS Cikandang, DAS Cimedang, DAS Cilangla
		Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik
		Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, anatara lain melalui; penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/ benih dan bibit berkualitas/ pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konbektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen



No	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
		Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan koperasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistic dan perluasan akses layanan sistem resi Gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama
		Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset petani
2	Kawasan Afirmasi yaitu Jawa Barat Bagian Selatan yang terdiri dari bagian pesisir Kab. Cianjur, Kab. Garut, dan Kab. Tasikmalaya (Pemerataan Pembanguna)	Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air baku, air minum, dan sanitasi, infrastruktur jarinsan transmisi, infrastruktur distribusi dan listrik perdesaan, serta rumah layak huni), serta peningkatan ketahanan air, energi, dan pangan
		Peningkatan ketahanan bencana
		Pengembangan rintisan PSDKU (Program Studi Di Luar Kampus Utama) dengan program studi sesuai keunggulan dan kebutuhan wilayah
		Pemberdayaan aktivitas ekonomi high value unggulan: pertanian holtikultura dan peternakan
		Peningkatan/ pembangunan jalan ruas Garut-Cikajang-Pameungpeuk, Cidaun-Ciwidey-Soreang, Sindangbarang-Sukanegara-Cianjur, Tasikmalaya-Cikatomas-Cikalong, dan Jalan Lintas Selatan Jawa Barat
		Percepatan transformasi digital pada kawasan afirmasi; perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, pengembangan SDM TIK dan digitalisasi Masyarakat, dan perluasan layanan penyiaran digital
		Percepatan transformasi digital pada kawasan afirmasi; perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, pengembangan SDM TIK dan digitalisasi Masyarakat, dan perluasan layanan penyiaran digital





No	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
		Penegembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan system rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, terutama di RSUD Pameungpeuk (PHTC)

Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029





BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH





BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah

Program pembangunan dan program perangkat daerah dirancang untuk mempercepat pencapaian target-target *outcomes* hingga *impacts*, memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM), serta mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien. Untuk itu, penting mengetahui kebutuhan dan kapasitas daerah dalam merancang langkah-langkah pembangunan dengan maksimal. Program Perangkat Daerah merupakan hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait, beserta program yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah. Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya berisi program-program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Rencana program Perangkat Daerah pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya disusun dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai Tahun 2026 hingga Tahun 2030. Selanjutnya, program yang telah disusun akan menjadi bagian dari upaya untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah sebagai pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan datang.

Program Perangkat Daerah yang disertai dengan indikator target dan pagu indikatif Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030 disajikan pada tabel berikut.





Tabel 4.1
Program dan Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

BIDANG/URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD Penanggung Jawab
				TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					932.679.463.645		951.888.052.918		970.925.813.976		990.344.330.256		1.010.151.216.861	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Indeks Reformasi Birokrasi Disdikbud	Poin	78,47	79,50	932.679.463.645	80	951.888.052.918	80,50	970.925.813.976	81	990.344.330.256	81,50	1.010.151.216.861	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					287.239.499.000		293.339.288.980		299.226.474.760		305.233.444.255		311.362.797.140	
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah Jenjang SD	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun	%	97,65	98,20	158.120.450.000	98,47	161.384.859.000	98,74	164.620.716.180	99,01	167.922.106.504	99,29	171.290.422.234	
Meningkatnya Literasi, Numerasi dan Karakter Anak Usia Sekolah Jenjang SD	1. Nilai Kompetensi Literasi Anak Usia SD	%	65,06	70,06	650.000.000	72,56	663.000.000	75,06	676.260.000	77,56	689.785.200	80,06	703.580.904	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2. Nilai Kompetensi Numerasi Anak Usia SD	%	60,04	65,84		68,74		71,64		74,54		77,44		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	3. Nilai Karakter Anak Usia SD	%	62,49	69,59		74,73		79,87		85,01		90,15		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah Jenjang SMP	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Tahun	%	97,65	98,20	75.263.079.000	98,47	76.870.340.580	98,74	78.415.907.392	99,01	79.993.201.539	99,29	81.602.939.170	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Meningkatnya Literasi, Numerasi, dan Karakter Anak Usia Sekolah Jenjang SMP	1. Nilai Kompetensi Literasi Anak Usia SMP	%	69,90	72,10	625.000.000	73,20	688.500.000	74,30	706.350.000	75,40	724.965.000	76,50	744.401.100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2. Nilai Kompetensi Numerasi Anak Usia SMP	%	62,82	65,82		67,32		68,82		70,32		71,82		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	3. Nilai Karakter Anak Usia SMP	%	54,50	57,13		58,79		60,46		62,12		63,79		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah Jenjang PAUD	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 Tahun	%	77,52	83,46	39.914.900.000	86,43	40.713.198.000	89,40	41.527.461.960	92,37	42.358.011.199	94,91	43.205.171.423	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



BIDANG/URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD Penanggung Jawab
				TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah Jenjang Nonformal/ Kesetaraan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 -18 Tahun Kesetaraan	%	19,33	27,53	12.616.070.000	31,63	12.868.391.400	35,73	13.125.759.228	39,83	13.388.274.413	43,93	13.656.039.901	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1. Nilai Kompetensi Literasi Warga Belajar Paket C	%	N/A	54,53	50.000.000	63,88	151.000.000	73,24	154.020.000	82,59	157.100.400	91,95	160.242.408	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2. Nilai Kompetensi Numerasi Warga Belajar Paket C	%	N/A	56,62		66,06		75,51		84,95		94,40		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	3. Nilai Karakter Warga Belajar Paket C	%	N/A	51,99		52,04		52,10		52,15		52,21		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Meningkatnya Literasi, Numerasi dan Karakter Warga Belajar Paket B pada Pendidikan Kesetaraan	1. Nilai Kompetensi Literasi Warga Belajar Paket B	%	N/A	51,35		53,65		55,96		58,26		60,57		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2. Nilai Kompetensi Numerasi Warga Belajar Paket B	%	N/A	59,92		67,74		75,56		83,38		91,20		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	3. Nilai Karakter Warga Belajar Paket B	%	N/A	52,66		52,43		52,20		51,97		51,74		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Meningkatnya Literasi, Numerasi dan Karakter Warga Belajar Paket A pada Pendidikan Kesetaraan	1. Nilai Kompetensi Literasi Warga Belajar Paket A	%	N/A	100		100		100		100		100		100
	2. Nilai Kompetensi Numerasi Warga Belajar Paket A	%	N/A	90,63	87,5	84,38	81,25	78,13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
	3. Nilai Karakter Warga Belajar Paket A	%	N/A	55,19	54,62	54,06	53,49	52,93	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					100.000.000		102.000.000		104.040.000		106.120.800		108.243.216	
Meningkatnya Penerapan Kurikulum Muatan Lokal pada Jenjang Satuan Pendidikan Dasar	Persentase Satuan Pendidikan yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	%	100	100	100.000.000	100	102.000.000	100	104.040.000	100	106.120.800	100	108.243.216	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					200.000.000		204.000.000		208.000.000		212.241.600		216.486.432	
Meningkatnya Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Profesional	Indeks Refleksi Guru Paket C	%	N/A	53,13	200.000.000	53,12	204.000.000	53,12	208.000.000	53,11	212.241.600	53,11	216.486.432	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Indeks Refleksi Guru Paket B	%	N/A	41,91		36,35		30,79		25,23		19,67		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Indeks Refleksi Guru Paket A	%	N/A	49,04		49,62		50,21		50,79		51,38		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



BIDANG/URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD Penanggung Jawab
				TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Indeks Refleksi Guru SMP	%	N/A	67,95		72,54		77,13		81,72		86,31		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Indeks Refleksi Guru SD	%	N/A	74,04		78,82		83,6		88,38		93,16		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					454.147.314.195		461.293.022.382		472.009.675.752		487.064.532.532		500.378.221.356	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang kesehatan	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	77,17	81,93	196.976.788.089	84,31	199.235.085.754	86,69	199.473.219.808	89,07	199.711.984.968	91,45	199.951.385.803	Dinas Kesehatan
	Fasilitas Kesehatan yang Menyelenggarakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	%	93.02.00	100	257.170.526.106	100	262.057.936.628	100	272.536.455.944	100	287.352.547.564	100	300.426.835.553	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					184.171.574.169		189.501.670.553		192.658.624.224		190.676.160.558		191.058.930.895	
Terpenuhinya Kebutuhan Perbekalan Kesehatan dan Sarana Prasarana Fasilitas Kesehatan Berdampak pada Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Fasyankes dengan Perbekalan Kesehatan dan Sarana Prasarana yang Terpenuhi Sesuai Standar	%	83	86	38.532.102.170	89	44.310.138.242	92	44.756.695.470	95	44.497.727.020	96	44.590.635.665	Dinas Kesehatan
Meningkatnya Pemanfaatan Sistem Informasi dalam Pelayanan Kesehatan	Persentase Fasyankes yang Memanfaatkan Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan	%	N/A	100	255.342.000	100	255.852.684	100	256.364.389	100	256.877.118	100	257.390.872	Dinas Kesehatan
Meningkatnya Kepatuhan Fasilitas Kesehatan terhadap Standar Mutu	Persentase Faskes yang Mematuhi Standar Mutu	%	N/A	100	339.276.000	100	414.615.276	100	415.704.891	100	416.802.346	100	417.907.716	Dinas Kesehatan
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan	1. Persentase Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	%	N/A	10	1.430.800.000	20,0	1.445.180.800	30	1.447.192.981	40	1.449.212.844	50	1.451.240.454	Dinas Kesehatan



BIDANG/URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD Penanggung Jawab
				TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	2. Persentase Desa yang Memenuhi Syarat Kesehatan Lingkungan	%	N/A	10	1.430.800.000	20	1.445.180.800	30	1.447.192.981	40	1.449.212.844	50	1.451.240.454	Dinas Kesehatan
Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Pengendalian Tidak Menular	Angka Populasi Bebas Penyakit Menular	%	N/A	25	9.729.005.600	50	9.407.438.598	65	9.426.863.208	80	9.446.506.678	95	9.466.373.204	Dinas Kesehatan
	Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular	%	N/A	55	14.593.508.400	60	14.111.157.896	65	14.140.294.812	70	14.169.760.016	85	14.199.559.806	Dinas Kesehatan
Gizi Masyarakat Seimbang	Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada Balita	%	8,5	7,5	19.773.856.000	7	19.793.629.856	6,5	19.813.423.486	5	19.833.236.909	4,5	19.853.070.146	Dinas Kesehatan
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat	Persentase Masyarakat yang Menerapkan Perilaku Hidup Sehat	%	15	19	502.922.000	21	511.980.440	23	521.210.049	25	530.614.150	27	540.196.133	Dinas Kesehatan
Meningkatnya Jaminan Kesehatan	Persentase Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	84,08	98,6	72.727.213.251	98,8	72.799.940.464	98,8	72.872.740.405	99	72.945.613.145	99,5	73.018.558.758	Dinas Kesehatan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Program	Nilai Standar Pelayanan Minimal (12 Indikator SPM Bidang Kesehatan)	%	100	100	24.856.748.748	100	25.006.555.497	100	25.038.841.552	100	25.071.255.488	100	25.103.798.847	Dinas Kesehatan
Minimum Requirement Akreditasi Level Paripurna Terpenuhi	Persentase Fasyankes dengan Kriteria Akreditasi Strata Paripurna yang Terpenuhi	%	N/A	N/A	-	N/A	-	97,5	2.522.100.000	97,5	609.342.000	100	708.958.840	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					4.077.234.400		4.148.006.744		4.189.486.811		4.231.381.680		4.273.695.496	
Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Profesional	Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terhadap Jumlah Penduduk	Nilai	1,37	1,87	4.077.234.400	2,37	4.148.006.744	2,87	4.189.486.811	3,37	4.231.381.680	3,87	4.273.695.496	Dinas Kesehatan
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					951.945.000		972.896.945		973.869.842		974.843.712		975.818.555	
Meningkatnya Mutu dan Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Keamanan Pangan	Cakupan Pengendalian dan Pengawasan Sarana Kefarmasian, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	%	27,5	37,5	951.945.000	47,5	972.896.945	57,5	973.869.842	67,5	974.843.712	82,5	975.818.555	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					4.240.395.000		4.269.635.395		4.274.380.030		4.279.138.910		4.283.912.239	



BIDANG/URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD Penanggung Jawab
				TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat di Bidang Kesehatan	Persentase Kecamatan yang Aktif dalam Kampanye Kesehatan	%	40	60	4.240.395.000	70	4.269.635.395	80	4.274.380.030	90	4.279.138.910	96	4.283.912.239	Dinas Kesehatan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					23.831.332.871		25.784.784.680		26.652.193.926		27.219.482.957		27.871.757.768	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan urusan pada Dinas PUTRLH	Indeks Reformasi Birokrasi Dinas PUTRLH	Poin	83,42	83,92	23.831.332.871	83,92	25.784.784.680	83,99	26.652.193.926	85,00	27.219.482.957	90,00	27.871.757.768	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					14.405.000.000		14.995.000.000		15.269.400.000		15.649.288.000		15.984.773.760	
Infrastruktur irigasi kewenangan kabupaten beroperasi dan berfungsi	Persentase Infrastruktur Irigasi Kewenangan Kabupaten Beroperasi dan Berfungsi	%	70,45	55,05	14.405.000.000	56,07	14.995.000.000	57,09	15.269.400.000	58,11	15.649.288.000	59,13	15.984.773.760	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					2.407.000.000		2.707.000.000		3.005.140.000		3.054.242.800		3.104.327.656	
Infrastruktur dasar air minum berfungsi	Persentase Infrastruktur Dasar Air Minum yang Berfungsi	%	66,93	67,95	2.407.000.000	68,45	2.707.000.000	68,95	3.005.140.000	69,45	3.054.242.800	69,95	3.104.327.656	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					0		0		0		200.000.000		3.400.000.000	



BIDANG/URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD Penanggung Jawab
				TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pelayanan Persampahan di Perkotaan	Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan di Perkotaan	%	0	0	0	0	0	0	0	14,16	200.000.000	16,14	3.400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					3.050.000.000		4.000.000.000		5.500.000.000		5.700.000.000		6.000.000.000	
Infrastruktur Dasar Sanitasi Berfungsi	Persentase Infrastruktur Dasar Sanitasi Yang Berfungsi	%	50,69	50,86	3.050.000.000	51,16	4.000.000.000	51,46	5.500.000.000	51,76	5.700.000.000	52,06	6.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					16.530.007.600		17.112.607.752		17.801.459.907		18.196.689.105		18.598.422.887	
Bangunan gedung pemerintah memenuhi ketentuan teknis bangunan	Persentase Bangunan Gedung Sesuai Ketentuan Teknis Bangunan	%	62,39	62,99	16.530.007.600	63,29	17.112.607.752	63,59	17.801.459.907	63,89	18.196.689.105	64,19	18.598.422.887	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN					5.725.000.000		5.839.500.000		5.956.290.000		6.075.415.800		5.795.638.964	
Kawasan strategis tertata	Persentase kawasan strategis yang memenuhi standar	%	70,29	72,09	5.725.000.000	72,59	5.839.500.000	73,09	5.956.290.000	73,59	6.075.415.800	74,09	5.795.638.964	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					277.930.280.000		49.042.264.448		47.329.396.185		47.639.938.957		45.350.737.736	



BIDANG/URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD Penanggung Jawab
				TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Konstruksi Jalan Pada Ruas-Ruas Jalan Kewenangan Kabupaten	Persentase jalan yang memenuhi standar teknis konstruksi jalan	%	56,91	66,29	277.930.280.000	66,66	49.042.264.448	67,03	47.329.396.185	67,40	47.639.938.957	67,77	45.350.737.736	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					0		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	
Meningkatnya peran masyarakat jasa konstruksi jawa barat dalam pembangunan infrastruktur	Tingkat partisipasi masyarakat jasa konstruksi dalam pembangunan infrastruktur	%	0	0	0	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					550.000.000		425.000.000		425.000.000		425.000.000		425.000.000	
Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase pemanfaat ruang yang mematuhi ketentuan penataan ruang	%	26,62	22,02	550.000.000	22,02	425.000.000	22,03	425.000.000	22,03	425.000.000	22,04	425.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN														
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					80.000.000		80.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Korban Bencana Mendapatkan Rumah Layak	Persentase Korban Bencana Yang Mendapatkan Rumah Layak	%	100	100	80.000.000	100	80.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN														
														Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang



BIDANG/URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD Penanggung Jawab
				TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					250.000.000		270.000.000		425.000.000		425.000.000		525.000.000	
Tertatanya Kawasan Kumuh	Persentase Penurunan Luas Kawasan Kumuh	%	0	0,1	250.000.000	0,15	270.000.000	0,2	425.000.000	0,2	425.000.000	0,3	525.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					0		200.000.000		400.000.000		400.000.000		600.000.000	
Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Areal Kawasan Kumuh	%	0	0	0	0,1	200.000.000	0,2	400.000.000	0,2	400.000.000	0,3	600.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					1.450.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		250.000.000	
PSU Perumahan Berfungsi Menunjang Fungsi Hunian	Persentase PSU Perumahan Yang berfungsi Menunjang Fungsi Hunian	%	52,28	53,06	1.450.000.000	54,31	300.000.000	55,56	300.000.000	56,81	300.000.000	58,06	250.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.869.669.973		9.917.636.211		10.434.018.022		10.890.151.423		11.465.996.494	



BIDANG/URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD Penanggung Jawab
				TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	48,89	50	8.869.669.973	52	9.917.636.211	54	10.434.018.022	56	10.890.151.423	58	11.465.996.494	Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.073.205.445		6.194.669.554		6.318.562.945		6.444.934.514		6.573.833.564	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Pada BPBD	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	59,10	61	6.073.205.445	62	6.194.669.554	63	6.318.562.945	64	6.444.934.514	65	6.573.833.564	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					8.751.745.531		13.042.586.500		12.382.000.000		15.861.473.000		12.743.743.500	
Meningkatnya Penanggulangan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Terselesaikan	%	100	100	5.814.138.020	100	7.526.586.500	100	6.001.000.000	100	8.106.473.000	100	5.735.243.500	Satuan Polisi Pamong Praja
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Kepatuhan Masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	%	100	100	300.000.000	100	390.000.000	100	635.000.000	100	685.000.000	100	827.500.000	Satuan Polisi Pamong Praja
Meningkatnya Perlindungan terhadap Masyarakat	Persentase Anggota Satlinmas Aktif dalam Perlindungan Masyarakat	%	95,32	100	2.200.000.000	100	3.700.000.000	100	3.950.000.000	100	5.050.000.000	100	4.200.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi Profesional Anggota Satpol PP PPNS dan Satlinmas	Persentase Anggota Satpol PP PPNS dan Satlinmas yang Bersertifikat Kompetensi	%	59,53	64,71	337.607.511	73,18	926.000.000	81,65	921.000.000	91,53	1.145.000.000	100	1.031.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
Meningkatnya Mutu Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase ketersediaan Mutu Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	35,29	40,93	100.000.000	50,58	500.000.000	58,49	875.000.000	67,07	875.000.000	78,28	950.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					2.476.250.000		2.525.775.000		2.576.290.500		2.627.816.000		2.680.372.000	



BIDANG/URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD Penanggung Jawab
				TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Nilai Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	Poin	75	75	2.117.500.000	75	1.962.500.000	75	1.962.500.000	75	1.962.500.000	75	2.112.500.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Bencana	Persentase Lokasi Bencana Yang Kembali Pada Kondisi Mendekati Normal Setelah Penanganan	%	100	100	308.750.000	100	463.275.000	100	513.790.500	100	565.316.000	100	467.872.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Rehab Rekon sesuai Perencanaan	Nilai Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	Poin	75	75	50.000.000	75	100.000.000	75	100.000.000	75	100.000.000	75	100.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
PROGRAM PENCEGAHAN PENANGANAN PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					1.001.526.000		2.380.000.000		2.430.000.000		2.705.000.000		3.078.500.000	
Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase Kejadian Kebakaran dan Non Kebakaran yang tertangani sesuai standar	%	100	100	1.001.526.000	100	2.380.000.000	100	2.430.000.000	100	2.705.000.000	100	3.078.500.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.960.182.824		6.999.386.481		7.141.374.210		7.286.201.694		7.433.925.728	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial PPKB P3A	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Sosial PPKB P3A	Poin	70	74	6.960.182.824	75	6.999.386.481	76	7.141.374.210	77	7.286.201.694	78	7.433.925.728	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					254.450.000		259.539.000		264.729.780		270.024.365		275.424.864	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Sosial	Persentase Masyarakat yang Aktif dalam Pemberdayaan Sosial	%	100	100	254.450.000	100	259.539.000	100	264.729.780	100	270.024.365	100	275.424.864	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan



BIDANG/URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD Penanggung Jawab
				TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Perlindungan Anak
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					624.225.000		636.709.500		649.433.690		662.432.564		675.681.215	
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Kembali Berkungsi Sosial	%	100	100	624.225.000	100	636.709.500	100	649.433.690	100	662.432.564	100	675.681.215	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					1.640.750.000		1.673.565.000		1.707.036.300		1.741.177.026		1.776.000.567	
Menurunnya Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	100	100	1.640.750.000	100	1.673.565.000	100	1.707.036.300	100	1.741.177.026	100	1.776.000.567	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PENANGANAN BENCANA					1.018.594.072		1.138.965.953		1.059.745.273		1.190.983.789		1.119.653.454	
Korban Bencana Pulih secara Sosial	Persentase Korban Bencana Alam Sosial dan/atau Non Alam yang Pulih secara Sosial	%	100	100	1.018.594.072	100	1.138.965.953	100	1.059.745.273	100	1.190.983.789	100	1.119.653.454	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					21.750.000		22.185.000		22.628.700		23.081.274		23.542.899	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Makam Pahlawan	IKM terhadap Makam Pahlawan	Nilai	N/A	70	21.750.000	80	22.185.000	80.3	22.628.700	81.5	23.081.274	82	23.542.899	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



BIDANG/URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD Penanggung Jawab
				TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA														
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					24.500.000		102.000.000		104.000.000		106.000.000		108.000.000	
Meningkatnya pemanfaatan rencana perencanaan ketenagakerjaan	Persentase Rekomendasi bahan kebijakan rencana tenaga kerja makro yang diterapkan	%	N/A	100	24.500.000	100	102.000.000	100	104.000.000	100	106.000.000	100	108.000.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					780.625.000		1.096.500.000		1.118.400.000		1.140.700.000		1.163.500.000	
Meningkatnya kompetensi pencari kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	100	100	780.625.000	100	1.096.500.000	100	1.118.400.000	100	1.140.700.000	100	1.163.500.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					1.425.000.000		1.635.000.000		1.770.000.000		1.804.000.000		1.864.000.000	
Meningkatnya usia kerja yang bekerja	Persentase usia kerja yang bekerja	%	N/A	20	1.425.000.000	30	1.635.000.000	40	1.770.000.000	50	1.804.000.000	60	1.864.000.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					225.000.000		260.000.000		295.000.000		330.000.000		365.000.000	
Terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan iklim ketenagakerjaan yang baik	Persentase tenaga kerja pada perusahaan yang menerapkan tata kelola ditangani	%	100	100	225.000.000	100	260.000.000	100	295.000.000	100	330.000.000	100	365.000.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK														
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					377.500.000		385.050.000		392.751.000		400.606.020		408.618.140	



BIDANG/URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD Penanggung Jawab
				TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	53,26	55	377.500.000	56	385.050.000	57	392.751.000	58	400.606.020	59	408.618.140	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					0		5.525.000		7.500.000		10.000.000		15.000.000	
Meningkatnya Penyelesaian Kasus Kekerasan Eksploitasi Diskriminasi terhadap Perempuan	Persentase Kasus Kekerasan Eksploitasi Diskriminasi terhadap Perempuan yang Terselesaikan	%	100	100	0	100	5.525.000	100	7.500.000	100	10.000.000	100	15.000.000	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					276.250.000		276.250.000		279.910.500		283.158.710		284.021.884	
Meningkatnya Partisipasi Keluarga dalam Pengarusutamaan Gender	Persentase Keluarga yang Aktif dalam Pengarusutamaan Gender (PUG)	%	N/A	100	276.250.000	100	276.250.000	100	279.910.500	100	283.158.710	100	284.021.884	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA DAN GENDER ANAK					0		5.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Meningkatnya Pemanfaatan Data Gender dan Anak	Persentase Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	%	N/A	100	0	100	5.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					580.000.000		586.600.000		590.252.000		595.457.040		600.716.181	
Terjaminnya Pemenuhan Hak Semua Anak secara Komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Poin	59,45	60,45	580.000.000	61,66	586.600.000	62,89	590.252.000	64,15	595.457.040	65,43	600.716.181	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk



BIDANG/URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD Penanggung Jawab
				TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					176.125.000		179.647.500		186.420.450		186.905.259		190.643.364	
Menurunnya Kekerasan Eksploitasi Diskriminasi terhadap Anak	Persentase Penurunan Kasus Kekerasan Eksploitasi Diskriminasi terhadap Anak	%	N/A	0,5	176.125.000	0,5	179.647.500	0,5	186.420.450	0,5	186.905.259	0,5	190.643.364	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN														
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					1.125.000.000		1.665.000.000		2.225.000.000		2.765.000.000		3.325.000.000	
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	%	N/A	100	1.125.000.000	100	1.665.000.000	100	2.225.000.000	100	2.765.000.000	100	3.325.000.000	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					8.629.312.500		9.393.312.500		10.217.312.500		11.101.312.500		12.045.312.500	
Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase kebutuhan bantuan beras yang terpenuhi	%	N/A	100	8.629.312.500	100	9.393.312.500	100	10.217.312.500	100	11.101.312.500	100	12.045.312.500	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					425.000.000		425.000.000		425.000.000		425.000.000		425.000.000	
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase masyarakat yang terpenuhi kebutuhan konsumsi energi proterin hewani dan nabati	%	N/A	100	425.000.000	100	425.000.000	100	425.000.000	100	425.000.000	100	425.000.000	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					137.000.000		137.000.000		137.000.000		137.000.000		137.000.000	



BIDANG/URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD Penanggung Jawab
				TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pengawasan pengawasan kerawanan pangan	Persentase Komoditas pangan strategis yang memenuhi standar keamanan pangan	%	N/A	100	137.000.000	100	137.000.000	100	137.000.000	100	137.000.000	100	137.000.000	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN														
PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM					0		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan tanah untuk kepentingan umum	Persentase Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang Selesai Tepat Waktu	%	0		0	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	Sekretariat Daerah
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					0		250.000.000		300.000.000		350.000.000		400.000.000	
Meningkatnya kepastian hukum atas status tanah garapan	Persentase Sengketa Tanah Garapan yang Diselesaikan	%	0	0	0	100	250.000.000	100	300.000.000	100	350.000.000	100	400.000.000	Sekretariat Daerah
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					2.750.000.000		60.800.000.000		58.200.000.000		57.200.000.000		55.200.000.000	
Meningkatnya kepastian hukum dan keadilan dalam pemberian ganti kerugian	Persentase Bidang Tanah yang Mendapatkan Ganti Kerugian sesuai Ketentuan	%	0	100	2.750.000.000	100	60.800.000.000	100	58.200.000.000	100	57.200.000.000	100	55.200.000.000	Sekretariat Daerah
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					69.600.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	
Hasil mediasi penyelesaian permasalahan tanah ditindaklanjuti	Persentase hasil mediasi permasalahan tanah garapan yang ditindaklanjuti	%	0	100	69.600.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	Sekretariat Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG					0		300.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Meningkatnya tertib administrasi dan kepastian hukum atas status tanah kosong	Persentase Tanah Kosong yang Terdata dalam Sistem Informasi Pertanahan	%	0	0	0	100	300.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	Sekretariat Daerah
PROGRAM PENANGANAN KONFLIK SENGKETA DAN					0		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000	



BIDANG/URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD Penanggung Jawab
				TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PERKARA PERTANAHAN														
Berkurangnya jumlah konflik dan sengketa pertanahan yang berlarut-larut	Persentase konflik sengketa dan perkara pertanahan yang tertangani	Kasus	0	0	0	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	Sekretariat Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP														
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					150.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000	
Perencanaan Lingkungan Hidup menjadi Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Yang Sudah Mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	%	100	100	150.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					0		10.000.000		25.000.000		125.000.000		25.000.000	
Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Persentase Capaian Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	%	0	0	0	68,10	10.000.000	68,36	25.000.000	68,61	125.000.000	68,86	25.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					3.918.200.000		2.734.800.000		2.797.496.000		2.961.445.920		3.026.674.838	
Meningkatnya Keanekaragaman Hayati di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Poin	37,64	38,39	3.918.200.000	39,14	2.734.800.000	39,89	2.797.496.000	40,64	2.961.445.920	41,39	3.026.674.838	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	



BIDANG/URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD Penanggung Jawab
				TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)														
Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha Terhadap Hukum Lingkungan	Persentase Pelaku Usaha Yang Taat Terhadap Hukum Lingkungan	%	0	66,05	50.000.000	66,45	50.000.000	66,85	50.000.000	67,25	50.000.000	67,65	50.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					100.000.000		200.000.000		200.000.000		250.000.000		250.000.000	
Meningkatnya Penerima Penghargaan Adiwiyata	Persentase Penghargaan Adiwiyata yang Diterima	%	0	34,05	100.000.000	34,55	200.000.000	35,05	200.000.000	35,55	250.000.000	36,05	250.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					2.175.000.000		627.900.000		638.458.000		649.227.160		660.211.703	
Berkurangnya Timbunan Sampah di TPA	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Poin	0	52,05	2.175.000.000	53,55	627.900.000	58,55	638.458.000	60,55	649.227.160	62,55	660.211.703	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.440.638.707		8.269.615.837		8.410.004.231		8.521.015.837		8.416.715.837	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan pada Disdukcapil	Indeks Reformasi Birokrasi Disdukcapil	Poin	74,08	74,25	8.440.638.707	74,50	8.269.615.837	74,75	8.410.004.231	75	8.521.015.837	75,25	8.416.715.837	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					1.371.274.770		1.658.107.634		1.685.107.634		1.815.532.190		2.106.897.075	



BIDANG/URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD Penanggung Jawab
				TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	%	93,12	97,43	1.371.274.770	97,93	1.658.107.634	98,44	1.685.107.634	98,94	1.815.532.190	99,45	2.106.897.075	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENCATATAN SIPIL					84.805.000		122.415.000		122.415.000		122.415.000		122.415.000	
Meningkatnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	%	99,50	98,83	84.805.000	99,08	122.415.000	99,33	122.415.000	99,58	122.415.000	99,83	122.415.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					24.281.330		74.281.230		74.281.230		74.281.230		74.281.230	
Meningkatnya pemanfaatan informasi administrasi kependudukan	Persentase pelayanan kependudukan yang menggunakan SIAK	%	N/A	100	24.281.330	100	74.281.230	100	74.281.230	100	74.281.230	100	74.281.230	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					0		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	
Meningkatnya kualitas pengelolaan profil kependudukan	Jumlah dokumen kependudukan yang dihasilkan sesuai kewajiban OPD berdasarkan Permendagri	Dokumen	N/A	0	0	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.731.630.280		4.826.262.886		4.922.788.143		5.021.243.906		5.121.668.784	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan pada DPMD	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	67,40	68	4.904.026.914	68,30	6.482.707.452	68,60	6.648.161.601	68,80	6.816.024.833	69	6.986.341.250	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PROGRAM PENATAAN DESA					3.343.800.000		3.720.676.000		3.693.089.520		3.766.951.310		3.842.290.337	
Meningkatnya Kualitas Penataan Desa	Persentase Desa yang Tertata	%	100	100	3.343.800.000	100	3.720.676.000	100	3.693.089.520	100	3.766.951.310	100	3.842.290.337	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					0		210.000.000		214.200.000		218.484.000		222.853.680	
Terlaksananya Kerja Sama antar Desa	Persentase Fasilitasi Kerja Sama Desa	%	100	0	0	100	210.000.000	100	214.200.000	100	218.484.000	100	222.853.680	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



BIDANG/URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD Penanggung Jawab
				TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					9.079.196.000		11.112.879.400		11.259.953.942		11.931.110.823		12.327.538.731	
Administrasi Desa Tertib	Nilai Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa pada Indeks Desa	Poin	N/A	67,17	9.079.196.000	68,18	11.112.879.400	69,2	11.259.953.942	70,24	11.931.110.823	71,29	12.327.538.731	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Meningkatnya Ekonomi Desa	Nilai Dimensi Ekonomi pada Indeks Desa	Poin	N/A	110,25	34.800.000	111,9	35.496.000	113,58	36.205.920	115,29	36.930.038	117,01	37.668.639	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Meningkatnya Aksesibilitas Desa	Nilai Dimensi Aksesibilitas Desa pada Indeks Desa	Poin	N/A	46,75	18.000.000	47,45	100.000.000	48,16	100.000.000	48,89	100.000.000	49,62	100.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					1.862.174.088		2.229.417.570		2.303.005.921		2.377.066.040		2.451.607.360	
Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Memiliki Kontribusi dalam Pembangunan Masyarakat Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang Aktif Berkontribusi dalam Pembangunan Masyarakat Desa	%	100	100	1.862.174.088	100	2.229.417.570	100%	2.303.005.921	100%	2.377.066.040	100%	2.451.607.360	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA														
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					265.800.000		271.116.000		276.538.320		282.069.086		287.710.468	
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran Perseribu Perempuan	29,7	29,4	265.800.000	29,2	271.116.000	28,6	276.538.320	28,2	282.069.086	27,6	287.710.468	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					2.785.396.000		2.841.103.920		2.897.925.998		2.955.884.518		3.015.002.209	
Meningkatnya Kesertaan Keluarga Berencana	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mCPR)	%	70,4	71,1	2.785.396.000	71,4	2.841.103.920	72,8	2.897.925.998	72,1	2.955.884.518	72,5	3.015.002.209	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga



BIDANG/URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD Penanggung Jawab
				TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	%	7,2	7		6,8		6,7		6,7		6,6		Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					9.692.948.150		9.886.807.113		10.084.543.255		10.286.234.120		10.491.958.802	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Keluarga	Persentase Masyarakat yang Aktif dalam Pembangunan Keluarga	%	N/A	15	9.692.948.150	16	9.886.807.113	17	10.084.543.255	18	10.286.234.120	19	10.491.958.802	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					34.184.431.237		35.512.219.862		36.222.464.259		36.946.913.544		37.685.851.815	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika dan Urusan Bidang Persandian	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	87,87	88,20	34.184.431.237	88,30	35.512.219.862	88,50	36.222.464.259	88,60	36.946.913.544	88,71	37.685.851.815	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					5.598.405.745		5.460.640.842		5.719.853.659		5.550.123.329		5.712.125.794	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lalu Lintas yang Berfungsi	Persentase Sarana dan Prasarana Lalu Lintas yang Berfungsi	%	19,86	26,02	4.907.651.552	27,68	4.276.071.566	29,58	4.461.592.998	32,03	4.550.824.858	34,87	4.641.841.355	
Meningkatnya Kualitas Layanan Terminal	IKM terminal	%	N/A	100	63.490.000	100	114.759.800	100	117.054.996	100	119.396.096	100	121.784.018	
Berkurangnya Wilayah Parkir Sumber Kemacetan	Persentase penurunan titik parkir sumber kemacetan	%	N/A	100	49.265.012	100	50.250.312	100	51.255.318	100	52.280.425	100	53.326.033	
Meningkatnya Kendaraan Bermotor Layak Jalan	Persentase kendaraan bermotor yang layak	%	N/A	100	84.400.209	100	156.088.213	100	159.209.977	100	162.394.177	100	165.642.061	
Lalu Lintas Lancar	Persentase Penurunan Titik Rawan	%	N/A	0,5	273.950.000	0,47	389.429.000	0,45	397.217.580	0,43	456.161.932	0,4	516.285.170	



BIDANG/URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD Penanggung Jawab
				TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kemacetan dan Kecelakaan													
Meningkatnya Pengguna Angkutan Umum	Persentase Peningkatan Pengguna Angkutan Umum	%	N/A	44,84	219.648.972	45,63	474.041.951	45,43	533.522.790	47,22	209.065.841	48,02	213.247.157	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA														
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					991.080.000		1.140.901.600		1.163.719.632		1.186.994.025		1.210.733.905	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Publik Kepada Masyarakat	Nilai akses dan diseminasi informasi	%	N/A	100	991.080.000	100	1.140.901.600	100	1.163.719.632	100	1.186.994.025	100	1.210.733.905	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					5.477.255.650		5.666.800.763		5.780.136.778		5.895.739.514		6.013.654.304	
Meningkatnya Penerapan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Tingkat kematangan kebijakan internal layanan jaringan intra pemrintah daerah	%	100	100	5.477.255.650	100	5.666.800.763	100	5.780.136.778	100	5.895.739.514	100	6.013.654.304	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.929.800.000		12.196.040.000		11.993.544.000		12.142.598.400		12.808.908.240	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan	Nilai RB Perangkat Daerah	Poin	78,88	79	10.929.800.000	79,5	12.196.040.000	80	11.993.544.000	80,5	12.142.598.400	81	12.808.908.240	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					100.000.000		150.000.000		200.000.000		250.000.000		300.000.000	
Meningkatnya kepatuhan koperasi terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan	Persentase koperasi yang patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	%	39,60	60	100.000.000	65	150.000.000	70	200.000.000	72,5	250.000.000	75	300.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					140.000.000		175.000.000		210.000.000		230.000.000		255.000.000	



BIDANG/URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD Penanggung Jawab
				TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KSP/USP Koperasi memiliki jaminan koperasi sehat dan cukup sehat	Persentase KSP/USP Koperasi sehat dan cukup sehat	%	78	80	140.000.000	80	175.000.000	81	210.000.000	83	230.000.000	85	255.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					500.000.000		650.000.000		800.000.000		950.000.000		1.200.000.000	
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase SDM Koperasi yang mengikuti pelatihan minimal 10 JP	%	N/A	20	500.000.000	25	650.000.000	30	800.000.000	35	950.000.000	40	1.200.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					75.000.000		80.000.000		85.000.000		90.000.000		95.000.000	
Meningkatnya Kapasitas Usaha Koperasi	Laju Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	-4	2,6	75.000.000	2,78	80.000.000	2,91	85.000.000	3,28	90.000.000	3,43	95.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)					1.885.000.000		2.060.000.000		2.135.000.000		2.210.000.000		2.285.000.000	
Meningkatnya kemandirian UMKM	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	%	N/A	11	1.885.000.000	12	2.060.000.000	13	2.135.000.000	14	2.210.000.000	15	2.285.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					400.000.000		450.000.000		575.000.000		600.000.000		625.000.000	
Meningkatnya skala usaha mikro menjadi usaha kecil	Laju Pertumbuhan omset usaha mikro	%	N/A	4	400.000.000	4	450.000.000	4	575.000.000	4	600.000.000	4	625.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.707.158.846		8.707.158.846		8.707.158.846		8.707.158.846		8.707.158.846	



BIDANG/URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD Penanggung Jawab
				TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang DPMPTSPTK	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	77	77	8.707.158.846	77,2	8.707.158.846	77,8	8.707.158.846	7820000000,00	8.707.158.846	79	8.707.158.846	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					293.500.000		555.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000	
Meningkatnya pemanfaatan rencana umum penanaman modal	Persentase peningkatan investor pengakses rencana umum penanaman modal	%	Rp. 517000 (Juta)	20	293.500.000	20	555.000.000	20	350.000.000	20	350.000.000	20	350.000.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					175.000.000		200.000.000		250.000.000		300.000.000		350.000.000	
Meningkatnya akses investor terhadap potensi investasi	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	%	N/A	4	175.000.000	4	200.000.000	4	250.000.000	4	300.000.000	4	350.000.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					315.250.000		350.000.000		385.000.000		425.000.000		450.000.000	
Pelayanan perizinan dan non perizinan secara digital sesuai standar	Persentase permohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terlayani secara digital sesuai standar	%	100	100	315.250.000	100	350.000.000	100	385.000.000	100	425.000.000	100	450.000.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					65.250.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Ketentuan Penanaman Modal	Persentase pelaku usaha yang melaporkan LKPM	%	15	15	65.250.000	15	150.000.000	15	150.000.000	15	150.000.000	15	150.000.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	



BIDANG/URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD Penanggung Jawab
				TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	%	N/A	0	0	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA														
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					2.425.000.000		5.300.000.000		3.300.000.000		2.550.000.000		2.750.000.000	
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Kewirausahaan pemuda	%	1,00*	1,01	2.425.000.000	1,02	5.300.000.000	1,03	3.300.000.000	1,04	2.550.000.000	1,05	2.750.000.000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					6.650.000.000		300.940.926.000		10.350.000.000		11.250.000.000		15.500.000.000	
Meningkatnya Kualitas Pembinaan SDM Keolahragaan	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	%	37,03	37,13	6.650.000.000	37,18	300.940.926.000	37,23	10.350.000.000	37,28	11.250.000.000	37,33	15.500.000.000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
	Cakupan Pelatih yang Bersertifikat	%	23,04	23,14		23,19		23,24		23,29		23,34		Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					300.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		600.000.000	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kepramukaan	%	100	100	300.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	600.000.000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK														
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					142.480.500		250.330.110		255.336.712		260.443.446		265.652.315	
Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik dalam Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik dalam Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	%	N/A	100	142.480.500	100	250.330.110	100	255.336.712	100	260.443.446	100	265.652.315	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN														



BIDANG/URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD Penanggung Jawab
				TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					173.941.630		257.420.463		262.568.872		267.820.249		273.176.654	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Meningkatnya Tata Kelola Keamanan Informasi	Nilai tata kelola keamanan informasi	%	N/A	100	173.941.630	100	257.420.463	100	262.568.872	100	267.820.249	100	273.176.654	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN														
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					927.000.000		945.540.000		964.450.800		983.739.816		927.000.000	
Warisan Budaya Dikenal oleh Masyarakat Lokal dan Internasional	Persentase Karya Budaya yang Dikenal oleh Masyarakat Lokal dan Internasional	%	31,50	35	927.000.000	37	945.540.000	40	964.450.800	42	983.739.816	45	927.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					398.000.000		405.960.000		414.079.200		422.360.784		430.808.000	
Kesenian Dikenal oleh Masyarakat Lokal dan Internasional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dikenal Masyarakat Lokal dan Internasional	%	45	50	398.000.000	52	405.960.000	55	414.079.200	57	422.360.784	60	430.808.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					200.000.000		204.000.000		208.080.000		212.241.600		216.486.432	
Meningkatnya Cagar Budaya Baru	Persentase Peningkatan Cagar Budaya Baru	%	100	100	200.000.000	100	204.000.000	100	208.080.000	100	212.241.600	100	216.486.432	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN														
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					417.600.000		426.000.000		435.000.000		445.000.000		455.000.000	
Meningkatnya Kegemaran Membaca	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai		70,5	417.600.000	71	426.000.000	71,5	435.000.000	72	445.000.000	72,5	455.000.000	Sekretariat Daerah
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					69.600.000		71.000.000		73.000.000		74.000.000		76.000.000	
Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dimiliki kuno	%		100	69.600.000	100	71.000.000	100	73.000.000	100	74.000.000	100	76.000.000	Sekretariat Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN														
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					208.800.000		213.000.000		218.000.000		222.000.000		227.000.000	



BIDANG/URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD Penanggung Jawab
				TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Persentase ketersediaan arsip sesuai NSPK	%	N/A	80	208.800.000	85	213.000.000	90	218.000.000	95	222.000.000	100	227.000.000	Sekretariat Daerah
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					-		75.000.000		77.000.000		79.000.000		80.000.000	
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase arsip yang terlindungi dan terselamatkan	%	N/A	-	-	100	75.000.000	100	77.000.000	100	79.000.000	100	80.000.000	Sekretariat Daerah
PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP					-		-		75.000.000		-		75.000.000	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	%	N/A		-	-	-	100	75.000.000	-	-	100	75.000.000	Sekretariat Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN														
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					4.860.000.000		5.390.000.000		5.960.000.000		6.650.000.000		7.150.000.000	
Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Pengelolaan Perikanan Tangkap	%	1,04	0,01	4.860.000.000	0,01	5.390.000.000	0,01	5.960.000.000	0,01	6.650.000.000	0,02	7.150.000.000	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					3.650.000.000		3.800.000.000		3.800.000.000		4.300.000.000		4.300.000.000	
Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Pengelolaan Perikanan Budidaya	%	0,69	0,005	3.650.000.000	0,005	3.800.000.000	0,005	3.800.000.000	0,005	4.300.000.000	0,005	4.300.000.000	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
Meningkatnya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase peningkatan kepatuhan pelaku usaha perikanan yang terdaftar di OSS terhadap persyaratan teknis dan administrasi berusaha	%	N/A	0,005	150.000.000	0,005	150.000.000	0,005	150.000.000	0,005	150.000.000	0,005	150.000.000	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					2.525.000.000		2.535.000.000		2.535.000.000		2.545.000.000		2.645.000.000	
Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan	Persentase Peningkatan produksi	%	N/A	0,01	2.525.000.000	0,01	2.535.000.000	0,01	2.535.000.000	0,01	2.545.000.000	0,01	2.645.000.000	Dinas Pertanian Ketahanan



BIDANG/URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD Penanggung Jawab
				TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	pengelolaan produk perikanan													Pangan dan Perikanan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.996.499.740		10.758.646.800		10.993.646.800		9.888.646.800		9.768.646.800	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan pada Disparpora	Indeks Reformasi Birokrasi Disparpora	Poin	77,49	77,6	7.996.499.740	77,7	10.758.646.800	77,8	10.993.646.800	77,9	9.888.646.800	78	9.768.646.800	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					250.000.000		5.200.000.000		5.400.000.000		5.650.000.000		5.250.000.000	
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Peningkatan Retribusi Sektor Pariwisata	%	34,93	2	250.000.000	3	5.200.000.000	3	5.400.000.000	3,50	5.650.000.000	4	5.250.000.000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					1.000.000.000		3.150.000.000		3.250.000.000		3.300.000.000		3.300.000.000	
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Event Promosi Pariwisata yang terlaksana	%	N/A	100	1.000.000.000	100	3.150.000.000	100	3.250.000.000	100	3.300.000.000	100	3.300.000.000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					75.000.000		625.000.000		375.000.000		10.375.000.000		375.000.000	
Meningkatnya Daya Saing Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Pelaku Ekraf dibina yang memiliki HAKI	%	1,18	4,86	75.000.000	6,19	625.000.000	7,32	375.000.000	8,77	10.375.000.000	9,96	375.000.000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					200.000.000		1.350.000.000		1.350.000.000		1.350.000.000		1.350.000.000	
Meningkatnya kapasitas SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Tenga Kerja Parwisata dan Ekonomi Kreatif yang Tersertifikasi	%	1,2	1,8	200.000.000	1,9	1.350.000.000	2,1	1.350.000.000	2,5	1.350.000.000	3	1.350.000.000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN					48.061.944.984		52.056.154.315		56.159.413.459		60.731.975.847		65.852.634.696	



BIDANG/URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD Penanggung Jawab
				TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	73,99	74	48.061.944.984	7425	52.056.154.315	745	56.159.413.459	7475	60.731.975.847	75	65.852.634.696	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					12.180.000.000		12.540.000.000		12.840.000.000		13.155.000.000		13.470.000.000	
Meningkatnya Mutu Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kelas A	Persentase Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang memenuhi standar mutu	%	100	100	12.180.000.000	100	12.540.000.000	100	12.840.000.000	100	13.155.000.000	100	13.470.000.000	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan
Meningkatnya pengelolaan sarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Persentase pengelolaan sarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	%	100	100		100		100		100		100		
Meningkatnya sarana peternakan	Persentase Peningkatan Sarana Peternakan	%	N/A	2		2		2		2		2		
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					60.850.000.000		85.150.000.000		105.050.000.000		131.800.000.000		152.300.000.000	
Meningkatnya Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian	%	N/A	100	60.850.000.000	100	85.150.000.000	100	105.050.000.000	100	131.800.000.000	100	152.300.000.000	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					1.680.000.000		1.680.000.000		1.680.000.000		1.680.000.000		1.680.000.000	
Terkendalinya Penyakit Hewan Yang Beredar	Persentase Penanganan Kasus Penyakit Hewan	%	N/A	100	1.680.000.000	100	1.680.000.000	100	1.680.000.000	100	1.680.000.000	100	1.680.000.000	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan
Meningkatnya Hewan Yang Memenuhi Standar Kesehatan Hewan	Persentase Hewan Ternak Yang Memenuhi Standar Kesehatan Hewan	%	90	90		92		93		94		95		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Puskesmas	(IKM)Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Puskesmas	Nilai	80,64	80,76		80,88		81		81,12		81,24		



BIDANG/URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD Penanggung Jawab
				TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					720.000.000		720.000.000		720.000.000		720.000.000		720.000.000	
Terkendali dan Tertanggulangnya Bencana Pertanian	Persentase Kasus Bencana Pertanian Yang Terselesaikan	%	100	100	720.000.000	100	720.000.000	100	720.000.000	100	720.000.000	100	720.000.000	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000	
Meningkatnya Usaha Peternakan Yang Berizin	Persentase Peternak yang mematuhi kebijakan peternakan	%	75	78	400.000.000	81	400.000.000	83	400.000.000	85	400.000.000	88	400.000.000	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					5.054.271.000		5.993.471.000		6.193.471.000		6.393.471.000		5.593.471.000	
Meningkatnya penyuluhan pertanian	Persentase Kelompok Tani Yang Memiliki Kelas Kelembagaan Utama	%	100	100	5.054.271.000	100	5.993.471.000	100	6.193.471.000	100	6.393.471.000	100	5.593.471.000	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN														
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Meningkatnya Kepatuhan pelaku usaha tentang ketentuan perdagangan	Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi ketentuan perdagangan	%	N/A	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan
Meningkatnya Akses Ekspor	Persentase komoditas ekspor ber SKA yang bisa masuk ke negara tujuan	%	N/A	100		100		100		100		100		
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					2.050.000.000		21.250.000.000		21.250.000.000		21.250.000.000		21.250.000.000	
Meningkatnya Pemanfaatan Sarana Prsarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana prasarana distribusi perdagangan yang berfungsi	%	50	55	2.050.000.000	60	21.250.000.000	65	21.250.000.000	70	21.250.000.000	75	21.250.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					450.000.000		650.000.000		650.000.000		650.000.000		650.000.000	
Meningkatnya stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok	Indeks Stabilitas Harga dan Stok Barang	Poin	96,25	96,25	450.000.000	96,25	650.000.000	96,3	650.000.000	96,3	650.000.000	96,35	650.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah



BIDANG/URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD Penanggung Jawab
				TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
dan penting di tingkat pasar agen dan distributor Se-Kabupaten Tasikmalaya	Kebutuhan Pokok dan Penting													Perindustrian dan Perdagangan
Penyaluran pupuk dan pestisida bersubsidi tepat sasaran	Persentase PUD dan PPTS yang menyalurkan pupuk dan pestisida sesuai RDKK	%	N/A	80		80		80		80		80		
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000	
Meningkatnya pemasaran produk ekspor	persentase kenaikan nilai ekspor produk Kab. Tasikmalaya	%	111	5	750.000.000	5	750.000.000	5	750.000.000	5	750.000.000	5	750.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
Terjaminnya kepastian ukur dan kesesuaian barang dalam transaksi perdagangan	Persentase Peningkatan Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang serta Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) yang Memenuhi Ketentuan	%	-10,5	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000	
Meningkatnya omzet pelaku usaha pada promosi dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase peningkatan omzet pelaku usaha yang diikuti sertakan pada promosi dan pemasaran produk dalam negeri	%	N/A	10	700.000.000	10	700.000.000	10	700.000.000	10	700.000.000	10	700.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN														
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					600.000.000		605.000.000		665.500.000		732.050.000		855.255.999	
Meningkatnya produksi Industri Pengolahan	Nilai Produksi Industri Pengolahan	Rp Triliun	5,58	6,73	600.000.000	7,43	605.000.000	8,25	665.500.000	9,2	732.050.000	10,3	855.255.999	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah



BIDANG/URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD Penanggung Jawab
				TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap ketentuan industri	Tingkat kepatuhan pelaku usaha industri terhadap izin usaha industri	%	100	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Persentase pelaku industri yang melaporkan data industri secara lengkap dan terkini pada SIINAS	%	30	35	200.000.000	40	200.000.000	45	200.000.000	50	200.000.000	55	200.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI														
PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI					0		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000	
Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi	Persentase program transmigrasi yang dilaksanakan	%	N/A	0	0	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					22.500.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	Persentase luas kawasan transmigrasi yang berkembang	%	N/A	100	22.500.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					0		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000	



BIDANG/URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD Penanggung Jawab
				TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	Persentase luas kawasan transmigrasi yang berkembang	%	N/A	0	0	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
SEKRETARIAT DAERAH														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					54.406.319.869		56.524.504.000		56.614.554.100		58.746.345.200		58.892.873.000	
Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi pada Sekretariat Daerah	Nilai IRB Sekretariat Daerah	Nilai	85,26	85,3	54.147.519.869	85,33	56.261.528.000	85,36	56.347.318.600	85,38	58.474.765.200	86	58.616.863.000	Sekretariat Daerah
Kelembagaan Tepat Fungsi Tepat Ukuran dan Tepat Proses	Indeks Kematangan Organisasi	Nilai	N/A	36,7	69.600.000	36,7	70.992.000	36,8	72.411.850	36,9	73.860.000	37	75.337.000	Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indek Kepuasan Masyarakat	Nilai	85,55	85,65	69.600.000	85,7	70.992.000	85,75	72.411.800	85,8	73.860.000	85,85	75.336.000	Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi pada Sekretariat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan evaluasi Revormasi Birokrasi	Persen	N/A	100	69.600.000	100	70.992.000	100	72.411.850	100	73.860.000	100	75.337.000	Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Dimensi Pelaporan Kinerja dalam Penilaian SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	9,04	9,06	50.000.000	9,07	50.000.000	9,08	50.000.000	9,09	50.000.000	9,1	50.000.000	Sekretariat Daerah
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					38.291.941.922		39.355.000.000		40.134.800.000		41.652.072.000		42.155.413.440	
Meningkatnya status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Kategori	3,4310 (Tinggi)	3,4510 (Tinggi)	928.730.000	3,4710 (Tinggi)	1.265.000.000	3,4910 (Tinggi)	1.318.100.000	3,5110 (Tinggi)	2.094.138.000	3,5310 (Tinggi)	1.841.420.760	Sekretariat Daerah
Meningkatnya reformasi Hukum	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	98%	98,25	372.800.000	98,5	387.000.000	98,7	394.740.000	98,75	402.634.800	99	410.687.496	Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat Berkualitas	Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Indeks	N/A	66%	36.990.411.922	67%	37.703.000.000	67%	38.421.960.000	69%	39.155.299.200	70%	39.903.305.184	Sekretariat Daerah
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					1.638.600.000		1.705.332.000		1.772.794.640		1.850.272.133		1.933.271.335	
Meningkatnya Kinerja BUMD	Persentase BUMD dengan kinerja sehat	Persen	83,33	100	174.000.000	100	177.480.000	100	181.029.600	100	184.650.192	100	188.343.196	Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang	Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Perekonomian dan	Nilai	N/A	70	646.800.000	70	693.696.000	70	745.225.920	70	801.852.038	70	864.082.839	Sekretariat Daerah



BIDANG/URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD Penanggung Jawab
				TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Administrasi Pembangunan													
Progres kinerja perangkat daerah sesuai perencanaan	Persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti rekomendasi akselerasi kinerja	Persen	N/A	100	139.200.000	100	141.984.000	100	144.823.680	100	147.720.153	100	150.674.557	Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Indeks	68	70	678.600.000	71	692.172.000	72	701.715.440	73	716.049.750	74	730.170.743	Sekretariat Daerah
SEKRETARIAT DPRD														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					50.912.682.938		55.958.951.232		61.502.366.355		64.681.244.673		69.214.095.800	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	Poin	71,35	71,4	5.490.171.119	71,45	5.998.688.231	71,45	6.591.057.054	71,5	6.946.859.907	72	7.476.790.100	Sekretariat DPRD
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesekretariatan DPRD	Nilai IRB Sekretariat DPRD	Poin	42	65	45.422.511.819	66	49.960.263.001	67	54.911.309.301	68	57.734.384.766	69	61.737.305.700	Sekretariat DPRD
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					22.692.042.679		24.729.022.447		26.969.700.192		28.202.072.951		30.523.660.908	
Tersusunnya Peraturan Perundang-undangan hasil penetapan	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	%	100%	100	22.692.042.679	100	24.729.022.447	100	26.969.700.192	100	28.202.072.951	100	30.523.660.908	Sekretariat DPRD
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
PERENCANAAN														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.035.376.541		11.639.684.072		11.508.477.753		11.738.647.308		11.973.420.254	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan pada Bappelitbangda	Indeks Reformasi Birokrasi Bappelitbangda	Poin	89,10	89,30	10.035.376.541	89,40	11.639.684.072	89,50	11.508.477.753	89,60	11.738.647.308	89,70	11.973.420.254	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					613.340.355		675.607.162		689.119.305		702.901.692		716.959.725	



BIDANG/URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD Penanggung Jawab
				TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Perencanaan Pembangunan Daerah Mendorong Perbaikan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	%	N/A	100	520.703.743	100	581.117.818	100	592.740.174	100	604.594.978	100	616.686.877	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Pengukuran Kinerja Dimanfaatkan dalam Perbaikan Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah	%	N/A	100	92.636.612	100	94.489.344	100	96.379.131	100	98.306.714	100	100.272.848	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					1.239.703.333		1.414.497.400		1.442.787.349		1.471.643.095		1.501.075.957	
Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Mendorong Perbaikan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	N/A	100	453.275.140	100	512.340.643	100	522.587.456	100	533.039.205	100	543.699.989	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Mendorong Perbaikan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	%	N/A	100	330.640.564	100	387.253.375	100	394.998.443	100	402.898.412	100	410.956.380	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Infrastruktur dan kewilayahan Mendorong Perbaikan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	N/A	100	332.301.854	100	388.947.891	100	396.726.849	100	404.661.386	100	412.754.614	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Pengukuran Kinerja Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Dimanfaatkan dalam Perbaikan Perencanaan Kinerja	Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	N/A	100	28.900.236	100	29.478.241	100	30.067.806	100	30.669.162	100	31.282.545	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Pengukuran Kinerja Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Dimanfaatkan dalam Perbaikan Perencanaan Kinerja	Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	%	N/A	100	53.955.450	100	55.034.559	100	56.135.250	100	57.257.955	100	58.403.114	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah



BIDANG/URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD Penanggung Jawab
				TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pengukuran Kinerja Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Dimanfaatkan dalam Perbaikan Perencanaan Kinerja	Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	N/A	100	40.630.089	100	41.442.691	100	42.271.545	100	43.116.975	100	43.979.315	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
KEUANGAN														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					32.990.110.350		37.130.113.237		37.500.865.754		37.198.439.954		37.640.865.754	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan pada BPKPD	Indeks Reformasi Birokrasi BPKPD	Poin	87,52	81,00	32.990.110.350	81,25	37.130.113.237	81,50	37.500.865.754	81,75	37.198.439.954	82,00	37.640.865.754	Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					613.201.996.242		717.408.238.904		714.539.823.720		711.694.311.007,00		709.654.266.611,00	
Meningkatnya tata kelola anggaran	Ketepatan Waktu Penyusunan APBD	Ketepatan Waktu Penyesuai an APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	1.830.031.000	Tepat Waktu	2.712.423.000	Tepat Waktu	2.848.041.000	Tepat Waktu	2.990.443.500	Tepat Waktu	3.139.966.500	Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah
Meningkaatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Usulan Pencairan dari Perangkat Daerah dengan Penerbitan SP2D	%	100	100	610.826.880.242	100	713.590.165.904	100	710.530.850.220	100	707.484.888.382	100	705.234.372.030	
Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu	%	100	100	545.085.000	100	1.105.650.000	100	1.160.932.500	100	1.218.979.125	100	1.279.928.081	
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					1.739.185.000	100	3.593.700.000	100	3.770.000.000	100	3.860.000.000	100	3.840.000.000	
Terwujudnya pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel	Persentase Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	%	100	100	1.739.185.000	100	3.593.700.000	100	3.770.000.000	100	3.860.000.000	100	3.840.000.000	Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					7.741.195.300		9.684.175.100		12.105.596.355		12.883.538.673		13.323.928.106	
Meningkatnya penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah	%	94,06	90	3.376.743.800	91	6.900.000.000	92	7.150.000.000	92	7.600.000.000	93	7.800.000.000	Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah



BIDANG/URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD Penanggung Jawab
				TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pertumbuhan Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak dan Retribusi Daerah	%	209,14	5	4.364.451.500	5	2.784.175.100	5	4.955.596.355	55	5.283.538.673	55	5.523.928.106	
KEPEGAWAIAN														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.129.203.942		10.681.788.021		10.589.423.781		10.874.341.973		11.091.828.812	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian	Nilai Reformasi Birokrasi BKPSDM	Poin	74,46	86,62	10.129.203.942	87,00	10.681.788.021	87,50	10.589.423.781	88,00	10.874.341.973	88,50	11.091.828.812	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					2.142.865.000		2.489.102.000		2.533.384.040		2.578.551.721		2.624.622.755	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kebutuhan Pengadaan dan Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai Sistem Merit Aspek Perencanaan Kebutuhan Pengadaan dan Sistem Informasi Kepegawaian	Poin	94	94	662.865.000	96	800.300.000	96	810.806.000	97	821.522.120	100	832.452.562	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Promosi Mutasi dan Pengembangan Karir berdasarkan Sistem Merit	Nilai Sistem Merit Aspek Promosi Mutasi; dan Pengembangan Karier	Poin	95	107,5	980.000.000	112,5	1.174.600.000	120	1.198.092.000	125	1.222.053.840	130	1.246.494.917	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Manajemen kinerja ASN Penggajian Penghargaan dan Disiplin berdasarkan Sistem Merit	Nilai Sistem Merit Aspek Manajemen Kinerja; Penggajian Penghargaan dan Disiplin; Perlindungan dan Pelayanan	Poin	124	126,5	500.000.000	126,5	514.202.000	129	524.486.040	129	534.975.761	129	545.675.276	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN														
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					2.826.000.000		3.912.842.920		3.984.964.878		3.992.963.676		4.121.029.449	
Meningkatnya Kompetensi Teknis Dasar Manajerial dan Fungsional	Rata-rata Lama Pegawai yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	JP/Orang /Tahun	15,1	21	2.826.000.000	22	3.912.842.920	23	3.984.964.878	24	3.992.963.676	25	4.121.029.449	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN														



BIDANG/URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD Penanggung Jawab
				TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					329.409.000		875.997.180		893.517.124		911.387.466		929.615.215	
Meningkatnya Diseminasi Hasil Kelitbangan	Persentase Hasil Kelitbangan yang Diseminasikan	%	N/A	100	329.409.000	100	875.997.180	100	893.517.124	100	911.387.466	100	929.615.215	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN														
INSPEKTORAT DAERAH														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					18.057.641.414		19.863.405.555		21.849.746.111		24.034.720.722		26.438.192.794	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	83,41	85,50	18.057.641.414	86	19.863.405.555	86,50	21.849.746.111	87	24.034.720.722	87,50	26.438.192.794	Inspektorat Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					3.085.300.000		3.393.830.000		3.733.213.000		4.106.534.300		4.517.187.730	
Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan kinerja dan keuangan	Persentase tindakanj ut rekomen dasi BPK tahun ang garan N-1	%	72,80	80	3.085.300.000	81	3.393.830.000	82	3.733.213.000	83	4.106.534.300	84	4.517.187.730	Inspektorat Daerah
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					1.562.200.000		1.718.420.000		1.890.262.000		2.079.288.200		2.287.217.020	
Terwujudnya Efektivitas Pengendalian Korupsi	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Level (Skor)	Level 2 Skor 2,436	Level 2 Skor 2,5	1.562.200.000	Level 2 Skor 2,6	1.718.420.000	Level 2 Skor 2,7	1.890.262.000	Level 2 Skor 2,8	2.079.288.200	Level 2 Skor 2,9	2.287.217.020	Inspektorat Daerah
UNSUR KEWILAYAHAN														
KECAMATAN CIBALONG														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1,970,426,923		2,009,615,462		2,579,083,000		2,771,135,000		2,945,240,000	
Meningkatnya Tata kelola administrasi Kecamatan yang efektif efisien dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	34.26		1,970,426,923		2,009,615,462		2,579,083,000		2,771,135,000	61	2,945,240,000	Kecamatan Cibalong
PROGRAM PENYELENGGARAAN					48.010.000		49.700.000		57.500.000		70.000.000		80.500.000	



BIDANG/URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD Penanggung Jawab
				TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														
Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik sesuai standar dan tepat waktu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	84.05	84.2	48.010.000	84.4	49.700.000	84.6	57.500.000	84.7	70.000.000	84.8	80.500.000	Kecamatan Cibalong
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					150.450.000		164.393.500		169.000.000		170.500.000		172.000.000	
Berkurangnya gangguan trantribum	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%		100	150.450.000	100	164.393.500	100	169.000.000	100	170.500.000	100	172.000.000	Kecamatan Cibalong
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					22.500.000		22.950.000		25.000.000		26.000.000		27.000.000	
Terciptanya wilayah kecamatan yang aman tertib dan kondusif.	Persentase konflik sosial yang berhasil dimediasi	%		100	22.500.000	100	22.950.000	100	25.000.000	100	26.000.000	100	27.000.000	Kecamatan Cibalong
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					5.000.000		5.100.000		6.000.000		7.000.000		8.000.000	
Pelayanan Administratif Bidang PMDEP sesuai Standar dan tepat waktu	Presentase permohonan administratif Bidang PMDEP yang terlayani sesuai standar	%		100	5.000.000	100	5.100.000	100	6.000.000	100	7.000.000	100	8.000.000	Kecamatan Cibalong
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					21.415.000		21.969.300		22.750.000		23.215.000		23.800.000	
Meningkatnya kapasitas dan kepatuhan pemerintahan desa terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan	Persentase desa tertib administrasi	%		100	21.415.000	100	21.969.300	100	22.750.000	100	23.215.000	100	23.800.000	Kecamatan Cibalong
KECAMATAN PARUNG PONTENG														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.782.848.179		1.961.118.996		2.151.741.944		2.361.373.297		2.609.958.664	
Meningkatnya Tata kelola administrasi Kecamatan yang efektif efisien dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	35,73	50	1.782.848.179	55	1.961.118.996	60	2.151.741.944	61	2.361.373.297		2.609.958.664	Kecamatan Parungponteng
PROGRAM PENYELENGGARAAN					39.104.000		43.014.400		47.315.840		52.047.424		57.252.166	



BIDANG/URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD Penanggung Jawab
				TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														
Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik sesuai standar dan tepat waktu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	81,93	82,5	39.104.000	83	43.014.400	83,5	47.315.840	83,8	52.047.424	84	57.252.166	Kecamatan Parungponteng
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					140.375.000		154.412.500		169.853.750		186.839.125		205.523.037	
Berkurangnya gangguan trantribum	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	140.375.000	100	154.412.500	100	169.853.750	100	186.839.125	100	205.523.037	Kecamatan Parungponteng
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					22.500.000		24.750.000		27.225.000		29.947.500		32.942.250	
Terciptanya wilayah kecamatan yang aman tertib dan kondusif.	Persentase konflik sosial yang berhasil dimediasi	%	100	100	22.500.000	100	24.750.000	100	27.225.000	100	29.947.500	100	32.942.250	Kecamatan Parungponteng
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					21.945.000		24.139.500		26.553.450		29.208.795		32.129.674	
Meningkatnya kapasitas dan kepatuhan pemerintahan desa terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan	Persentase desa tertib administrasi	%	100	100	21.945.000	100	24.139.500	100	26.553.450	100	29.208.795	100	32.129.674	Kecamatan Parungponteng
KECAMATAN JATIWARAS														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.894.097.640		1.965.100.000		2.021.800.000		2.078.200.000		2.134.700.000	
Meningkatnya Tata kelola administrasi Kecamatan yang efektif efisien dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	40,45	55	1.894.097.640	57	1.965.100.000	59	2.021.800.000	61	2.078.200.000	65	2.134.700.000	Kecamatan Jatiwaras
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					62.310.000		74.500.000		76.750.000		79.000.000		81.500.000	
Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik sesuai standar dan tepat waktu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	84,34	84,68	62.310.000	85,02	74.500.000	85,36	76.750.000	85,7	79.000.000	86,04	81.500.000	Kecamatan Jatiwaras
PROGRAM KOORDINASI					225.565.000		226.000.000		226.500.000		227.000.000		207.500.000	



BIDANG/URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD Penanggung Jawab
				TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														
Berkurangnya gangguan trantribum	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	225.565.000	100	226.000.000	100	226.500.000	100	227.000.000	100	207.500.000	Kecamatan Jatiwaras
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					25.000.000		26.000.000		27.000.000		28.000.000		29.000.000	
Terciptanya wilayah kecamatan yang aman tertib dan kondusif.	Persentase konflik sosial yang berhasil dimediasi	%	100	100	25.000.000	100	26.000.000	100	27.000.000	100	28.000.000	100	29.000.000	Kecamatan Jatiwaras
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA					0		26.000.000		26.000.000		26.000.000		26.000.000	
Pelayanan Administratif Bidang PMDEP sesuai Standar dan tepat waktu	Presentase permohonan administratif Bidang PMDEP yang terlayani sesuai standar	%	N/A	N/A	0	100	26.000.000	100	26.000.000	100	26.000.000	100	26.000.000	Kecamatan Jatiwaras
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					27.155.000		74.000.000		36.200.000		38.000.000		40.500.000	
Meningkatnya kapasitas dan kepatuhan pemerintahan desa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase desa tertib administrasi	%	100	100	27.155.000	100	74.000.000	100	36.200.000	100	38.000.000	100	40.500.000	Kecamatan Jatiwaras
KECAMATAN SALOPA														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.573.191.214		1.675.655.038		1.691.318.139		1.725.144.502		1.759.647.392	
Meningkatnya Tata kelola administrasi Kecamatan yang efektif efisien dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	35,51	36,22	1.573.191.214	36,94	1.675.655.038	37,68	1.691.318.139	38,44	1.725.144.502	39,21	1.759.647.392	Kecamatan Salopa
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					36.550.000		77.381.000		78.928.620		80.507.192		82.117.336	
Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik sesuai standar dan tepat waktu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	81,26	82,89	36.550.000	84,54	77.381.000	86,23	78.928.620	87,96	80.507.192	89,72	82.117.336	Kecamatan Salopa
PROGRAM KOORDINASI					150.475.000		162.664.500		165.917.790		172.620.869		193.632.787	



BIDANG/URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD Penanggung Jawab
				TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														
Berkurangnya gangguan trantribum	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100		150.475.000	10	162.664.500	10	165.917.790	10	172.620.869	10	193.632.787	Kecamatan Salopa
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					22.500.000		32.950.000		33.609.000		34.281.180		34.966.804	
Terciptanya wilayah kecamatan yang aman tertib dan kondusif.	Persentase konflik sosial yang berhasil dimediasi	%	100	100	22.500.000	108	32.950.000	108	33.609.000	108	34.281.180	108	34.966.804	Kecamatan Salopa
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					0		26.000.000		26.520.000		27.050.400		27.591.408	
Pelayanan Administratif Bidang PMDEP sesuai Standar dan tepat waktu	Presentase permohonan administratif Bidang PMDEP yang terlayani sesuai standar	%	100	100	0	100	26.000.000	100	26.520.000	100	27.050.400	100	27.591.408	Kecamatan Salopa
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					20.450.000		55.859.000		56.976.180		58.115.704		59.278.018	
Meningkatnya kapasitas dan kepatuhan pemerintahan desa terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan	Persentase desa tertib administrasi	%	100	100	20.450.000	100	55.859.000	100	56.976.180	100	58.115.704	100	59.278.018	Kecamatan Salopa
KECAMATAN TANJUNGPAYA														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.651.934.408		1.684.973.096		1.718.672.558		1.753.046.009		1.788.106.929	
Meningkatnya Tata kelola administrasi Kecamatan yang efektif efisien dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	0	52,05	1.651.934.408	55,05	1.684.973.096	56	1.718.672.558	57	1.753.046.009	61	1.788.106.929	Kecamatan Tanjungjaya
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					51.715.250		52.749.555		53.804.546		54.880.637		55.978.250	
Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik sesuai standar dan tepat waktu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	77,04	80	51.715.250	80,5	52.749.555	82	53.804.546	83	54.880.637	84	55.978.250	Kecamatan Tanjungjaya
PROGRAM KOORDINASI					140.500.000		143.310.000		146.176.200		149.099.724		152.081.718	



BIDANG/URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD Penanggung Jawab
				TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														
Berkurangnya gangguan trantribum	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	140.500.000	100	143.310.000	100	146.176.200	100	149.099.724	100	152.081.718	Kecamatan Tanjungjaya
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					22.500.000		22.950.000		23.409.000		23.877.180		24.354.724	
Terciptanya wilayah kecamatan yang aman tertib dan kondusif.	Persentase konflik sosial yang berhasil dimediasi	%	100	100	22.500.000	100	22.950.000	100	23.409.000	100	23.877.180	100	24.354.724	Kecamatan Tanjungjaya
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA					10.000.000		10.200.000		10.404.000		10.612.080		10.824.322	
Pelayanan Administratif Bidang PMDEP sesuai Standar dan tepat waktu	Presentase permohonan administratif Bidang PMDEP yang terlayani sesuai standar	%	100	100	10.000.000	100	10.200.000	100	10.404.000	100	10.612.080	100	10.824.322	Kecamatan Tanjungjaya
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					19.355.000		34.742.100		20.136.942		40.539.681		20.950.474	
Meningkatnya kapasitas dan kepatuhan pemerintahan desa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase desa tertib administrasi	%	100	100	19.355.000	100	34.742.100	100	20.136.942	100	40.539.681	100	20.950.474	Kecamatan Tanjungjaya
KECAMATAN PUSPAHIANG														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.726.758.266		1.950.524.504		1.990.064.633		2.030.014.405		2.068.539.470	
Meningkatnya Tata kelola administrasi Kecamatan yang efektif efisien dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	38.40	52,05	1.726.758.266	55,05	1.950.524.504	56	1.990.064.633	57	2.030.014.405	58	2.068.539.470	Kecamatan Puspahiang
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					35.610.000		42.555.000		43.464.100		44.379.382		45.400.970	
Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik sesuai standar dan tepat waktu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	84,3	84.75	35.610.000	85	42.555.000	85.05	43.464.100	85.07	44.379.382	85.1	45.400.970	Kecamatan Puspahiang
PROGRAM KOORDINASI					127.325.000		165.108.000		166.643.660		167.865.033		169.422.334	



BIDANG/URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD Penanggung Jawab
				TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														
Berkurangnya gangguan trantribum	Persentase Gangguan Ketentranman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	127.325.000	100	165.108.000	100	166.643.660	100	167.865.033	100	169.422.334	Kecamatan Puspahiang
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					22.500.000		22.950.000		23.409.000		23.877.180		24.354.724	
Terciptanya wilayah kecamatan yang aman tertib dan kondusif.	Persentase konflik sosial yang berhasil dimediasi	%	100	100	22.500.000	100	22.950.000	100	23.409.000	100	23.877.180	100	24.354.724	Kecamatan Puspahiang
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA							5.000.000		5.100.000		5.202.000		5.306.040	
Pelayanan Administratif Bidang PMDEP sesuai Standar dan tepat waktu	Presentase permohonan administratif Bidang PMDEP yang terlayani sesuai standar	%	100	100		100	5.000.000	100	5.100.000	100	5.202.000	100	5.306.040	Kecamatan Puspahiang
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					21.195.000		46.979.800		22.329.396		22.883.984		23.243.664	
Meningkatnya kapasitas dan kepatuhan pemerintahan desa terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan	Persentase desa tertib administrasi	%	100	100	21.195.000	100	46.979.800	100	22.329.396	100	22.883.984	100	23.243.664	Kecamatan Puspahiang
KECAMATAN SUKARAJA														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.560.746.644		1.645.988.913		1.679.448.691		1.713.127.666		1.741.963.369	
Meningkatnya Tata kelola administrasi Kecamatan yang efektif efisien dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	36,63	37,36	1.560.746.644	38,11	1.645.988.913	38,87	1.679.448.691	39,65	1.713.127.666	40,44	1.741.963.369	Kecamatan Sukaraja
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					34.585.000		35.276.700		35.982.234		36.701.878		37.435.916	
Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik sesuai standar dan tepat waktu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	83.56	83.60	34.585.000	83.75	35.276.700	83.85	35.982.234	84	36.701.878	84.1	37.435.916	Kecamatan Sukaraja
PROGRAM KOORDINASI					145.250.000		148.155.000		151.118.100		154.140.462		157.223.271	



BIDANG/URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD Penanggung Jawab
				TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														
Berkurangnya gangguan trantribum	Persentase Gangguan Ketentranamn dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	145.250.000	100	148.155.000	100	151.118.100	100	154.140.462	100	157.223.271	Kecamatan Sukaraja
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					20.500.000		20.910.000		21.328.200		21.754.764		22.189.859	
Terciptanya wilayah kecamatan yang aman tertib dan kondusif.	Persentase konflik sosial yang berhasil dimediasi	%	100	100	20.500.000	100	20.910.000		21.328.200		21.754.764		22.189.859	Kecamatan Sukaraja
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA							5.000.000		5.100.000		5.202.000		5.306.040	
Pelayanan Administratif Bidang PMDEP sesuai Standar dan tepat waktu	Persentase permohonan administratif Bidang PMDEP yang terlayani sesuai standar	%	100	100		100	5.000.000	100	5.100.000	100	5.202.000	100	5.306.040	Kecamatan Sukaraja
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					20.100.000		20.502.000		20.912.040		21.330.281		21.756.887	
Meningkatnya kapasitas dan kepatuhan pemerintahan desa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase desa tertib administrasi	%	100	100	20.100.000	100	20.502.000	100	20.912.040	100	21.330.281	100	21.756.887	Kecamatan Sukaraja
KECAMATAN SALAWU														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1,673,869,415		1,762,014,652		1,774,514,652		1,784,674,652		1,836,475,052	
Meningkatnya Tata kelola administrasi Kecamatan yang efektif efisien dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	38.93	52.05	1,673,869,415	55	1,762,014,652	56	1,774,514,652	57	1,784,674,652	58	1,836,475,052	Kecamatan Salawu
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					28,279,451	83	29,800,000	83.5	30,500,000	83.65	31,100,000	83.7	31,700,000	
Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik sesuai standar dan tepat waktu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82,12	82.5	28,279,451	83	29,800,000	83.5	30,500,000	83.65	31,100,000	83.7	31,700,000	Kecamatan Salawu
PROGRAM KOORDINASI					200.596.640		202.000.000		204.000.000		206.000.000		208.000.000	



BIDANG/URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD Penanggung Jawab
				TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														
Berkurangnya gangguan trantribum	Persentase Gangguan Ketentranman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	200.596.640	100	202.000.000	100	204.000.000	100	206.000.000	100	208.000.000	Kecamatan Salawu
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					13.871.650	100	15.000.000	100	15.200.000	100	15.400.000	100	15.600.000	
Terciptanya wilayah kecamatan yang aman tertib dan kondusif.	Persentase konflik sosial yang berhasil dimediasi	%	100	100	13.871.650	100	15.000.000	100	15.200.000	100	15.400.000	100	15.600.000	Kecamatan Salawu
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					24.225.581	100	24.585.000	100	25.150.000	100	25.600.000	100	26.220.000	
Meningkatnya kapasitas dan kepatuhan pemerintahan desa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase desa tertib administrasi	%	100	100	24.225.581	100	24.585.000	100	25.150.000	100	25.600.000	100	26.220.000	Kecamatan Salawu
KECAMATAN KARANGNUNGGAL														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.118.074.471		2.163.639.959		2.207.423.956		2.251.662.432		2.304.550.984	
Meningkatnya Tata kelola administrasi Kecamatan yang efektif efisien dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	41.89	52,10	2.118.074.471	53	2.163.639.959	54	2.207.423.956	56	2.251.662.432	100	2.304.550.984	Kecamatan Karangnunggal
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					49.055.000		50.548.100		51.751.338		52.786.364		42.096.328	
Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik sesuai standar dan tepat waktu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	84	85	49.055.000	86	50.548.100	87	51.751.338	88	52.786.364	89	42.096.328	Kecamatan Karangnunggal
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					263.975.000		269.266.500		274.651.830		248.932.866		285.747.763	
Berkurangnya gangguan trantribum	Persentase Gangguan Ketentranman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	263.975.000	100	269.266.500	100	274.651.830	100	248.932.866	100	285.747.763	Kecamatan Karangnunggal
PROGRAM PENYELENGGARAAN					18.650.000		19.023.000		19.403.460		19.791.529		20.187.359	



BIDANG/URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD Penanggung Jawab
				TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM														
Terciptanya wilayah kecamatan yang aman tertib dan kondusif.	Persentase konflik sosial yang berhasil dimediasi	%	100	100	18.650.000	100	19.023.000	100	19.403.460	100	19.791.529	100	20.187.359	Kecamatan Karangnunggal
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA					9.810.000		10.000.000		10.200.000		10.404.000		10.612.080	
Pelayanan Administratif Bidang PMDEP sesuai Standar dan tepat waktu	Presentase permohonan administratif Bidang PMDEP yang terlayani sesuai standar	%	100	100	9.810.000	100	10.000.000	100	10.200.000	100	10.404.000	100	10.612.080	Kecamatan Karangnunggal
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					27.635.000		78.186.900		28.750.654		44.325.666		29.912.178	
Meningkatnya kapasitas dan kepatuhan pemerintahan desa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase desa tertib administrasi	%	100	100	27.635.000	100	78.186.900	100	28.750.654	100	44.325.666	100	29.912.178	Kecamatan Karangnunggal
KECAMATAN BANTARKALONG														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.954.426.923		1.993.515.461		2.033.385.771		2.074.053.486		2.115.534.556	
Meningkatnya Tata kelola administrasi Kecamatan yang efektif efisien dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	37,23	40,5	1.954.426.923	45	1.993.515.461	48	2.033.385.771	50	2.074.053.486	55	2.115.534.556	Kecamatan Bantarkalong
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					37.980.000		38.739.600		39.514.392		40.304.680		41.110.773	
Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik sesuai standar dan tepat waktu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	83,3	84	37.980.000	84,3	38.739.600	84,5	39.514.392	84,75	40.304.680	85	41.110.773	Kecamatan Bantarkalong
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					148.425.000		151.393.500		154.421.370		157.509.797		160.659.993	
Berkurangnya gangguan trantribum	Persentase Gangguan Ketentranman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	148.425.000	100	151.393.500	100	154.421.370	100	157.509.797	100	160.659.993	Kecamatan Bantarkalong
PROGRAM PENYELENGGARAAN					22.500.000		22.950.000		23.409.000		23.877.180		24.354.724	



BIDANG/URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD Penanggung Jawab
				TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM														
Terciptanya wilayah kecamatan yang aman tertib dan kondusif.	Persentase konflik sosial yang berhasil dimediasi	%	100	100	22.500.000	100	22.950.000	100	23.409.000	100	23.877.180	100	24.354.724	Kecamatan Bantarkalong
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA					5.000.000		5.100.000		5.202.000		5.306.040		5.412.161	
Pelayanan Administratif Bidang PMDEP sesuai Standar dan tepat waktu	Presentase permohonan administratif Bidang PMDEP yang terlayani sesuai standar	%	100	100	5.000.000	100	5.100.000	100	5.202.000	100	5.306.040	100	5.412.161	Kecamatan Bantarkalong
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					19.745.000		25.139.900		20.542.698		20.953.552		21.372.623	
Meningkatnya kapasitas dan kepatuhan pemerintahan desa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase desa tertib administrasi	%	100	100	19.745.000	100	25.139.900	100	20.542.698	100	20.953.552	100	21.372.623	Kecamatan Bantarkalong
KECAMATAN CIPATUJAH														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.971.085.151		1.971.085.151		1.971.085.151		1.971.085.151		1.971.085.151	
Meningkatnya Tata kelola administrasi Kecamatan yang efektif efisien dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	0		1.971.085.151		1.971.085.151		1.971.085.151		1.971.085.151		1.971.085.151	Kecamatan Cipatujah
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					36.667.500		37.400.850		38.148.867		38.911.844		39.690.081	
Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik sesuai standar dan tepat waktu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85,65	85.75	36.667.500	85.85	37.400.850	85.95	38.148.867	88	38.911.844	90	39.690.081	Kecamatan Cipatujah
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					214.375.000		218.662.500		223.035.750		227.496.465		232.046.394	
Berkurangnya gangguan trantribum	Persentase Gangguan Ketentranman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	214.375.000	100	218.662.500	100	223.035.750	100	227.496.465	100	232.046.394	Kecamatan Cipatujah
PROGRAM PENYELENGGARAAN					20.000.000		20.400.000		20.808.000		21.224.160		21.648.643	



BIDANG/URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD Penanggung Jawab
				TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM														
Terciptanya wilayah kecamatan yang aman tertib dan kondusif.	Persentase konflik sosial yang berhasil dimediasi	%	100	100	20.000.000	100	20.400.000	100	20.808.000	100	21.224.160	100	21.648.643	Kecamatan Cipatujah
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					25.831.500		26.348.130		26.875.093		27.412.594		27.960.846	
Meningkatnya kapasitas dan kepatuhan pemerintahan desa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase desa tertib administrasi	%	100	100	25.831.500	100	26.348.130	100	26.875.093	100	27.412.594	100	27.960.846	Kecamatan Cipatujah
KECAMATAN CIKATOMAS														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.753.250.999		1.788.316.019		1.824.082.339		1.860.563.986		1.897.775.266	
Meningkatnya Tata kelola administrasi Kecamatan yang efektif efisien dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	43,76	50	1.753.250.999	60	1.788.316.019	70	1.824.082.339	75	1.860.563.986	80	1.897.775.266	Kecamatan Cikatomas
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					32.980.000		33.639.600		34.312.392		34.998.640		35.698.613	
Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik sesuai standar dan tepat waktu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	81,73	82	32.980.000	83	33.639.600	85	34.312.392	88	34.998.640	90	35.698.613	Kecamatan Cikatomas
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					154.425.000		157.513.500		160.663.770		163.877.045		167.154.586	
Berkurangnya gangguan trantribum	Persentase Gangguan Ketentranman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	154.425.000	100	157.513.500	100	160.663.770	100	163.877.045	100	167.154.586	Kecamatan Cikatomas
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					22.500.000		22.950.000		23.409.000		23.877.180		24.354.724	
Terciptanya wilayah kecamatan yang aman tertib dan kondusif.	Persentase konflik sosial yang berhasil dimediasi	%	100	100	22.500.000	100	22.950.000	100	23.409.000	100	23.877.180	100	24.354.724	Kecamatan Cikatomas
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					19.535.000		49.925.700		20.324.214		20.730.698		27.145.312	



BIDANG/URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD Penanggung Jawab
				TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kapasitas dan kepatuhan pemerintahan desa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase desa tertib administrasi	%	100	100	19.535.000	100	49.925.700	100	20.324.214	100	20.730.698	100	27.145.312	Kecamatan Cikatomas
KECAMATAN TARAJU														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.822.894.322		1.956.594.357		1.981.536.020		2.028.240.040		2.052.099.458	
Meningkatnya Tata kelola administrasi Kecamatan yang efektif efisien dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	35.74	52,05	1.822.894.322	55,05	1.956.594.357	56	1.981.536.020	57	2.028.240.040	58	2.052.099.458	Kecamatan Taraju
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					30.200.300		36.750.000		38.000.000		39.002.000		40.156.040	
Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik sesuai standar dan tepat waktu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	81.22	81.8	30.200.300	82.5	36.750.000	82.6	38.000.000	83	39.002.000	83.5	40.156.040	Kecamatan Taraju
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					150.900.000		170.900.000		171.300.000		171.708.000		172.124.160	
Berkurangnya gangguan trantribum	Persentase Gangguan Ketentrnanman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	150.900.000	100	170.900.000	100	171.300.000	100	171.708.000	100	172.124.160	Kecamatan Taraju
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					22.500.000		22.950.000		23.409.000		23.877.180		24.354.724	
Terciptanya wilayah kecamatan yang aman tertib dan kondusif.	Persentase konflik sosial yang berhasil dimediasi	%	100	100	22.500.000	100	22.950.000	100	23.409.000	100	23.877.180	100	24.354.724	Kecamatan Taraju
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA							5.000.000		5.100.000		5.202.000		5.306.040	
Pelayanan Administratif Bidang PMDEP sesuai Standar dan tepat waktu	Presentase permohonan administratif Bidang PMDEP yang terlayani sesuai standar	%	100	100		100	5.000.000	100	5.100.000	100	5.202.000	100	5.306.040	Kecamatan Taraju
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					18.265.000		43.749.800		33.999.393		24.253.984		19.513.664	



BIDANG/URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD Penanggung Jawab
				TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kapasitas dan kepatuhan pemerintahan desa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase desa tertib administrasi	%	100	100	18.265.000	100	43.749.800	100	33.999.393	100	24.253.984	100	19.513.664	Kecamatan Taraju
KECAMATAN PANCATENGAH														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.500.293.080		1.530.290.000		1.560.903.960		1.592.122.039		1.623.964.447	
Meningkatnya Tata kelola administrasi Kecamatan yang efektif efisien dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	35.17	50	1.500.293.080	53	1.530.290.000	55	1.560.903.960	57	1.592.122.039	60	1.623.964.447	Kecamatan Pancatengah
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					35.630.000		36.342.600		37.069.452		37.810.841		38.567.057	
Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik sesuai standar dan tepat waktu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	80	83.11	35.630.000	83.44	36.342.600	83.78	37.069.452	84.11	37.810.841	84.45	38.567.057	Kecamatan Pancatengah
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														
Berkurangnya gangguan trantribum	Persentase Gangguan Ketentranman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Pancatengah
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					22.500.000		22.950.000		23.409.000		23.877.180		24.354.723	
Terciptanya wilayah kecamatan yang aman tertib dan kondusif.	Persentase konflik sosial yang berhasil dimediasi	%	100	100	22.500.000	100	22.950.000	100	23.409.000	100	23.877.180	350	24.354.723	Kecamatan Pancatengah
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					24.215.000		24.694.300		25.188.286		25.692.051		26.205.589	
Meningkatnya kapasitas dan kepatuhan pemerintahan desa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase desa tertib administrasi	%	100	100	24.215.000	100	24.694.300	100	25.188.286	100	25.692.051	100	26.205.589	Kecamatan Pancatengah
KECAMATAN CIKALONG														



BIDANG/URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD Penanggung Jawab
				TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.727.925.984		1.983.737.309		1.955.299.921		2.089.868.628		2.208.350.048	
Meningkatnya Tata kelola administrasi Kecamatan yang efektif efisien dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	31,6		1.727.925.984		1.983.737.309		1.955.299.921		2.089.868.628	51	2.208.350.048	Kecamatan Cikalong
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					80.700.000		85.340.250		90.247.314		95.436.534		100.924.135	
Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik sesuai standar dan tepat waktu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	81.60	81.85	80.700.000	82.15	85.340.250	82.35	90.247.314	83	95.436.534	84	100.924.135	Kecamatan Cikalong
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					219.000.000		219.000.000		219.000.000		219.000.000		219.000.000	
Berkurangnya gangguan trantribum	Persentase Gangguan Ketentranman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	219.000.000	100	219.000.000	100	219.000.000	100	219.000.000	100	219.000.000	Kecamatan Cikalong
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	
Terciptanya wilayah kecamatan yang aman tertib dan kondusif.	Persentase konflik sosial yang berhasil dimediasi	%	100	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	Kecamatan Cikalong
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA					9.810.000		10.300.000		10.300.000		10.404.000		10.612.080	
Pelayanan Administratif Bidang PMDEP sesuai Standar dan tepat waktu	Presentase permohonan administratif Bidang PMDEP yang terlayani sesuai standar	%	100	100	9.810.000	100	10.300.000	100	10.300.000	100	10.404.000	100	10.612.080	Kecamatan Cikalong
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					14.000.000		65.000.000		25.000.000		37.000.000		25.000.000	
Meningkatnya kapasitas dan kepatuhan pemerintahan desa terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan	Persentase desa tertib administrasi	%	100	100	14.000.000	100	65.000.000	100	25.000.000	100	37.000.000	100	25.000.000	Kecamatan Cikalong
KECAMATAN SODONGHILIR														



BIDANG/URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD Penanggung Jawab
				TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.751.689.097		1.953.996.597		2.011.996.597		2.069.996.597		2.127.996.597	
Meningkatnya Tata kelola administrasi Kecamatan yang efektif efisien dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	36.88	40,5	1.751.689.097	41	1.953.996.597	45	2.011.996.597	46	2.069.996.597	47	2.127.996.597	Kecamatan Sodonghilir
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					29.460.000		44.500.000		48.000.000		52.000.000		56.000.000	
Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik sesuai standar dan tepat waktu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	86,23	86,23	29.460.000	87	44.500.000	87,5	48.000.000	88	52.000.000	88,5	56.000.000	Kecamatan Sodonghilir
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					201.075.000		220.000.000		223.000.000		225.000.000		228.000.000	
Berkurangnya gangguan trantribum	Persentase Gangguan Ketentranman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	201.075.000	100	220.000.000	100	223.000.000	100	225.000.000	100	228.000.000	Kecamatan Sodonghilir
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					22.500.000		25.000.000		26.000.000		27.000.000		28.000.000	
Terciptanya wilayah kecamatan yang aman tertib dan kondusif.	Persentase konflik sosial yang berhasil dimediasi	%	100	100	22.500.000	100	25.000.000	100	26.000.000	100	27.000.000	100	28.000.000	Kecamatan Sodonghilir
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					21.805.000		23.000.000		25.000.000		27.000.000		29.000.000	
Meningkatnya kapasitas dan kepatuhan pemerintahan desa terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan	Persentase desa tertib administrasi	%	100	100	21.805.000	100	23.000.000	100	25.000.000	100	27.000.000	100	29.000.000	Kecamatan Sodonghilir
KECAMATAN KADIPATEN														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.638.583.612		1.754.355.284		1.789.442.390		1.825.231.237		1.861.983.762	
Meningkatnya Tata kelola administrasi Kecamatan yang efektif efisien dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	37.95	55	1.638.583.612	60	1.754.355.284	62	1.789.442.390	64	1.825.231.237	65	1.861.983.762	Kecamatan Kadipaten



BIDANG/URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD Penanggung Jawab
				TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					22.637.120		28.089.862		30.898.849		33.988.734		37.387.607	
Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik sesuai standar dan tepat waktu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	84.92	85.5	22.637.120	86	28.089.862	86.5	30.898.849	87	33.988.734	87.5	37.387.607	Kecamatan Kadipaten
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					120.631.105		133.043.727		135.704.602		138.418.694		141.187.068	
Berkurangnya gangguan trantribum	Persentase Gangguan Ketentranman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	120.631.105	100	133.043.727	100	135.704.602	100	138.418.694	100	141.187.068	Kecamatan Kadipaten
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					24.876.590		25.374.122		25.881.604		26.399.236		26.927.221	
Terciptanya wilayah kecamatan yang aman tertib dan kondusif.	Persentase konflik sosial yang berhasil dimediasi	%	100	100	24.876.590	100	25.374.122	100	25.881.604	100	26.399.236	100	26.927.221	Kecamatan Kadipaten
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA					0		5.000.000		5.100.000		5.202.000		5.306.040	
Pelayanan Administratif Bidang PMDEP sesuai Standar dan tepat waktu	Presentase permohonan administratif Bidang PMDEP yang terlayani sesuai standar	%	100	100	0	100	5.000.000	100	5.100.000	100	5.202.000	100	5.306.040	Kecamatan Kadipaten
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					11.807.326		32.043.473		17.384.342		17.732.029		18.086.669	
Meningkatnya kapasitas dan kepatuhan pemerintahan desa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase desa tertib administrasi	%	100	100	11.807.326	100	32.043.473	100	17.384.342	100	17.732.029	100	18.086.669	Kecamatan Kadipaten
KECAMATAN PAGERAGEUNG														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.743.543.221		1.813.208.721		1.849.264.895		1.918.221.749		1.994.985.944	
Meningkatnya Tata kelola administrasi Kecamatan yang efektif efisien dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	61.15		1.743.543.221	61.20	1.813.208.721	61.21	1.849.264.895	61.23	1.918.221.749	61.24	1.994.985.944	Kecamatan Pagerageung



BIDANG/URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD Penanggung Jawab
				TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					31.450.000	85.5	32.079.000	85.6	32.600.000	85.65	33.196.000	85.7	33.596.000	
Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik sesuai standar dan tepat waktu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85.23	85.3	31.450.000	85.5	32.079.000	85.6	32.600.000	85.65	33.196.000	85.7	33.596.000	Kecamatan Pagerageung
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					165.400.000		173.708.000		177.182.169		180.725.803		184.340.319	
Berkurangnya gangguan trantribum	Persentase Gangguan Ketentranman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	165.400.000	100	173.708.000	100	177.182.169	100	180.725.803	100	184.340.319	Kecamatan Pagerageung
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					22.499.650		22.950.000		23.409.000		23.877.180		24.354.724	
Terciptanya wilayah kecamatan yang aman tertib dan kondusif.	Persentase konflik sosial yang berhasil dimediasi	%	100	100	22.499.650	100	22.950.000	100	23.409.000	100	23.877.180	100	24.354.724	Kecamatan Pagerageung
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA					0		5.000.000	100	5.100.000	100	5.202.000	100	5.306.040	
Pelayanan Administratif Bidang PMDEP sesuai Standar dan tepat waktu	Presentase permohonan administratif Bidang PMDEP yang terlayani sesuai standar	%	100	100	0	100	5.000.000	100	5.100.000	100	5.202.000	100	5.306.040	Kecamatan Pagerageung
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					22.675.350		53.128.857		23.591.434		24.063.263		24.544.528	
Meningkatnya kapasitas dan kepatuhan pemerintahan desa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase desa tertib administrasi	%	100	100	22.675.350	100	53.128.857	100	23.591.434	100	24.063.263	100	24.544.528	Kecamatan Pagerageung
KECAMATAN JAMANIS														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.658.705.692	61.5	1.691.879.806	61.6	1.725.718.402	61.7	1.760.232.769	61.8	1.795.437.420	
Meningkatnya Tata kelola administrasi Kecamatan yang efektif efisien dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	52.57	52.67	1.658.705.692	61.5	1.691.879.806	61.6	1.725.718.402	61.7	1.760.232.769	61.8	1.795.437.420	Kecamatan Jamanis



BIDANG/URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD Penanggung Jawab
				TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					67.411.308	81	68.759.534	82	70.134.725	83	71.537.419	83.5	72.968.168	
Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik sesuai standar dan tepat waktu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	77.74	80	67.411.308	81	68.759.534	82	70.134.725	83	71.537.419	83.5	72.968.168	Kecamatan Jamanis
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					132.124.496		134.766.986		137.462.326		140.211.572		143.015.804	
Berkurangnya gangguan trantribum	Persentase Gangguan Ketentranman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	132.124.496	100	134.766.986	100	137.462.326	100	140.211.572	100	143.015.804	Kecamatan Jamanis
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					17.115.700		17.458.014		17.807.174		18.163.317		18.526.583	
Terciptanya wilayah kecamatan yang aman tertib dan kondusif.	Persentase konflik sosial yang berhasil dimediasi	%	100	100	17.115.700	100	17.458.014	100	17.807.174	100	18.163.317	100	18.526.583	Kecamatan Jamanis
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA					25.000.000		25.500.000		26.010.000		26.530.200		27.060.804	
Pelayanan Administratif Bidang PMDEP sesuai Standar dan tepat waktu	Presentase permohonan administratif Bidang PMDEP yang terlayani sesuai standar	%	100	100	25.000.000	100	25.500.000	100	26.010.000	100	26.530.200	100	27.060.804	Kecamatan Jamanis
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					21.844.300		22.281.186		22.726.810		23.181.346		23.644.973	
Meningkatnya kapasitas dan kepatuhan pemerintahan desa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase desa tertib administrasi	%	100	100	21.844.300	100	22.281.186	100	22.726.810	100	23.181.346	100	23.644.973	Kecamatan Jamanis
KECAMATAN RAJAPOLAH														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.703.650.792		1.795.443.222		1.831.892.086		1.868.619.926		1.905.898.892	
Meningkatnya Tata kelola administrasi Kecamatan yang efektif efisien dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	35.51	52.05	1.703.650.792	55.05	1.795.443.222	56	1.831.892.086	57	1.868.619.926	58	1.905.898.892	Kecamatan Rajapolah



BIDANG/URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD Penanggung Jawab
				TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					29.000.000		30.092.000		30.693.840		31.307.717		31.933.872	
Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik sesuai standar dan tepat waktu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	80	83.15	29.000.000	83.80	30.092.000	83.95	30.693.840	84.00	31.307.717	84.15	31.933.872	Kecamatan Rajapolah
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					164.000.000		168.920.000		172.298.400		175.744.368		179.259.255	
Berkurangnya gangguan trantribum	Persentase Gangguan Ketentranman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	164.000.000	100	168.920.000	100	172.298.400	100	175.744.368	100	179.259.255	Kecamatan Rajapolah
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					22.500.000		22.950.000		23.409.000		23.877.180		24.354.724	
Terciptanya wilayah kecamatan yang aman tertib dan kondusif.	Persentase konflik sosial yang berhasil dimediasi	%	100	100	22.500.000	100	22.950.000	100	23.409.000	100	23.877.180	100	24.354.724	Kecamatan Rajapolah
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA					4.400.000		5.000.000		5.100.000		5.202.000		5.306.040	
Pelayanan Administratif Bidang PMDEP sesuai Standar dan tepat waktu	Presentase permohonan administratif Bidang PMDEP yang terlayani sesuai standar	%	100	100	4.400.000	100	5.000.000	100	5.100.000	100	5.202.000	100	5.306.040	Kecamatan Rajapolah
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					29.065.000		63.200.000		44.000.000		44.800.000		45.600.000	
Meningkatnya kapasitas dan kepatuhan pemerintahan desa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase desa tertib administrasi	%	100	100	29.065.000	100	63.200.000	100	44.000.000	100	44.800.000	100	45.600.000	Kecamatan Rajapolah
KECAMATAN CIAWI														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.734.301.744		1.764.691.777		1.805.625.613		1.817.255.124		1.878.572.885	
Meningkatnya Tata kelola administrasi Kecamatan yang efektif efisien dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	41.50	43	1.734.301.744	44	1.764.691.777	45	1.805.625.613	46	1.817.255.124	47	1.878.572.885	Kecamatan Ciawi



BIDANG/URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD Penanggung Jawab
				TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					27.687.500		28.241.250		28.806.075		29.382.196		29.969.840	
Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik sesuai standar dan tepat waktu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85.69	85.80	27.687.500	85.95	28.241.250	85.99	28.806.075		29.382.196		29.969.840	Kecamatan Ciawi
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					248.350.000		234.957.000		239.656.140		244.449.262		249.338.248	
Berkurangnya gangguan trantribum	Persentase Gangguan Ketentranman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	248.350.000	100	234.957.000	100	239.656.140	100	244.449.262	100	249.338.248	Kecamatan Ciawi
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					22.500.000		22.950.000		23.409.000		23.877.180		24.354.724	
Terciptanya wilayah kecamatan yang aman tertib dan kondusif.	Persentase konflik sosial yang berhasil dimediasi	%	100	100	22.500.000	100	22.950.000	100	23.409.000	100	23.877.180	100	24.354.724	Kecamatan Ciawi
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA					4.400.000		5.000.000		5.100.000		5.202.000		5.306.040	
Pelayanan Administratif Bidang PMDEP sesuai Standar dan tepat waktu	Presentase permohonan administratif Bidang PMDEP yang terlayani sesuai standar	%	100	100	4.400.000	100	5.000.000	100	5.100.000	100	5.202.000	100	5.306.040	Kecamatan Ciawi
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					21.675.200		52.108.704		22.550.878		23.001.895		23.461.933	
Meningkatnya kapasitas dan kepatuhan pemerintahan desa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase desa tertib administrasi	%	100	100	21.675.200	100	52.108.704	100	22.550.878	100	23.001.895	100	23.461.933	Kecamatan Ciawi
KECAMATAN CINEAM														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.696.889.793	60.1	1.730.827.589	60.15	1.765.444.141	60.2	1.800.753.023	60.25	1.800.753.023	
Meningkatnya Tata kelola administrasi Kecamatan yang efektif efisien dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	35.44	45	1.696.889.793	60.1	1.730.827.589	60.15	1.765.444.141	60.2	1.800.753.023	60.25	1.800.753.023	Kecamatan Cineam



BIDANG/URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD Penanggung Jawab
				TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					32.508.000		33.158.160		33.821.323		34.497.750		35.187.705	
Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik sesuai standar dan tepat waktu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85.21	85.30	32.508.000	85.45	33.158.160	85.75	33.821.323	85.90	34.497.750	85.95	35.187.705	Kecamatan Cineam
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					159.624.000		162.816.480		166.072.810		169.394.266		172.782.151	
Berkurangnya gangguan trantribum	Persentase Gangguan Ketentranman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	159.624.000	100	162.816.480	100	166.072.810	100	169.394.266	100	172.782.151	Kecamatan Cineam
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					17.694.834		18.048.731		18.409.705		18.777.899		19.153.457	
Terciptanya wilayah kecamatan yang aman tertib dan kondusif.	Persentase konflik sosial yang berhasil dimediasi	%	100	100	17.694.834	100	18.048.731	100	18.409.705	100	18.777.899	100	19.153.457	Kecamatan Cineam
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA														
Pelayanan Administratif Bidang PMDEP sesuai Standar dan tepat waktu	Presentase permohonan administratif Bidang PMDEP yang terlayani sesuai standar	%	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Cineam
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					25.359.066	100	25.866.247	100	26.383.572	100	26.911.244	100	27.449.469	
Meningkatnya kapasitas dan kepatuhan pemerintahan desa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase desa tertib administrasi	%	100	100	25.359.066	100	25.866.247	100	26.383.572	100	26.911.244	100	27.449.469	Kecamatan Cineam
KECAMATAN MANONJAYA														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.995.383.141		2.065.290.804		2.106.596.620		2.148.728.553		2.191.703.124	
Meningkatnya Tata kelola administrasi Kecamatan yang efektif efisien dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	39.29	60	1.995.383.141	60,5	2.065.290.804	60,75	2.106.596.620	61	2.148.728.553	61,5	2.191.703.124	Kecamatan Manonjaya



BIDANG/URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD Penanggung Jawab
				TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					50.435.711		51.444.425		52.473.314		53.522.780		54.593.236	
Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik sesuai standar dan tepat waktu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82.45	82.7	50.435.711	83	51.444.425	85	52.473.314	88	53.522.780	90	54.593.236	Kecamatan Manonjaya
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					197.175.000		201.118.500		205.140.870		209.243.687		213.428.561	
Berkurangnya gangguan trantribum	Persentase Gangguan Ketentranman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	197.175.000	100	201.118.500	100	205.140.870	100	209.243.687	100	213.428.561	Kecamatan Manonjaya
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					42.500.000		43.350.000		44.217.000		45.101.340		46.003.367	
Terciptanya wilayah kecamatan yang aman tertib dan kondusif.	Persentase konflik sosial yang berhasil dimediasi	%	100	100	42.500.000	100	43.350.000	100	44.217.000	100	45.101.340	100	46.003.367	Kecamatan Manonjaya
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					25.570.000		26.081.400		26.603.028		27.135.089		27.677.790	
Meningkatnya kapasitas dan kepatuhan pemerintahan desa terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan	Persentase desa tertib administrasi	%	100	100	25.570.000	100	26.081.400	100	26.603.028	100	27.135.089	100	27.677.790	Kecamatan Manonjaya
KECAMATAN BOJONGGAMBIR														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1,494,598,885		1.631.490.863		1.658.920.680		1.692.099.094		1.725.941.075	
Meningkatnya Tata kelola administrasi Kecamatan yang efektif efisien dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	42,1	50	1,494,598,885	51	1.631.490.863	52	1.658.920.680	53	1.692.099.094	54	1.725.941.075	Kecamatan Bojonggambir
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					52.745.512		52.745.512		53.800.423		54.876.431		55.973.960	
Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik sesuai standar dan tepat waktu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai/ target sesuaikan	81.40	81.75		82	52.745.512	82.25	53.800.423	82.45	54.876.431	82.67	55.973.960	Kecamatan Bojonggambir



BIDANG/URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD Penanggung Jawab
				TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					80.162.010		130.000.000		132.600.000		135.252.000		137.957.040	
Berkurangnya gangguan trantribum	Persentase Gangguan Ketentranman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	80.162.010	100	130.000.000	100	132.600.000	100	135.252.000	100	137.957.040	Kecamatan Bojonggambir
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					27.399.900		27.947.898		28.506.856		29.076.993		29.658.533	
Terciptanya wilayah kecamatan yang aman tertib dan kondusif.	Persentase konflik sosial yang berhasil dimediasi	%	100	100	27.399.900	100	27.947.898	100	28.506.856	100	29.076.993	100	29.658.533	Kecamatan Bojonggambir
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA							10.000.000		10.200.000		10.404.000		10.612.080	
Pelayanan Administratif Bidang PMDEP sesuai Standar dan tepat waktu	Presentase permohonan administratif Bidang PMDEP yang terlayani sesuai standar	%	100	100		100	10.000.000	100	10.200.000	100	10.404.000	100	10.612.080	Kecamatan Bojonggambir
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					28.439.610		64.008.402		29.588.570		30.180.342		51.783.948	
Meningkatnya kapasitas dan kepatuhan pemerintahan desa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase desa tertib administrasi	%	100	100	28.439.610	100	64.008.402	100	29.588.570	100	30.180.342	100	51.783.948	Kecamatan Bojonggambir
KECAMATAN CISAYONG														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.693.218.754		1.727.083.129		1.761.624.792		1.831.398.950		1.868.026.929	
Meningkatnya Tata kelola administrasi Kecamatan yang efektif efisien dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	62,4	62,5	1.693.218.754	62,6	1.727.083.129	62,7	1.761.624.792	62,8	1.831.398.950	62,9	1.868.026.929	Kecamatan Cisayong
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					34.560.000		41.472.000		42.301.440		43.147.469		44.010.418	
Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik sesuai standar dan tepat waktu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82,17	82,7	34.560.000	82,8	41.472.000	82,9	42.301.440	83	43.147.469	83,1	44.010.418	Kecamatan Cisayong



BIDANG/URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD Penanggung Jawab
				TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					190.800.000		214.616.000		218.908.320		223.286.486		227.752.216	
Berkurangnya gangguan trantribum	Persentase Gangguan Ketentranman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	190.800.000	100	214.616.000	100	218.908.320	100	223.286.486	100	227.752.216	Kecamatan Cisayong
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					22.500.000		22.950.000		23.409.000		23.877.180		24.354.724	
Terciptanya wilayah kecamatan yang aman tertib dan kondusif.	Persentase konflik sosial yang berhasil dimediasi	%	100	100	22.500.000	100	22.950.000	100	23.409.000	100	23.877.180	100	24.354.724	Kecamatan Cisayong
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA					0		5.000.000		5.100.000		5.202.000		5.306.040	
Pelayanan Administratif Bidang PMDEP sesuai Standar dan tepat waktu	Presentase permohonan administratif Bidang PMDEP yang terlayani sesuai standar	%	100	100	0	100	5.000.000	100	5.100.000	100	5.202.000	100	5.306.040	Kecamatan Cisayong
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					25.295.000		65.800.900		25.613.172		36.737.943		27.272.159	
Meningkatnya kapasitas dan kepatuhan pemerintahan desa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase desa tertib administrasi	%	100	100	25.295.000	100	65.800.900	100	25.613.172	100	36.737.943	100	27.272.159	Kecamatan Cisayong
KECAMATAN SARIWANGI														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					233.062.000		239.362.200		248.035.444		256.732.153		265.452.796	
Meningkatnya Tata kelola administrasi Kecamatan yang efektif efisien dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	39,07	43	233.062.000	45	239.362.200	47	248.035.444	50	256.732.153	55	265.452.796	Kecamatan Sariwangi
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					34.910.000		35.712.200		36.426.444		37.154.973		37.898.072	
Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik sesuai standar dan tepat waktu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85.38	85.5	34.910.000	85.75	35.712.200	85.9	36.426.444	86	37.154.973	86.1	37.898.072	Kecamatan Sariwangi



BIDANG/URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD Penanggung Jawab
				TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					148.025.000		152.625.500		155.678.010		158.791.570		161.967.402	
Berkurangnya gangguan trantribum	Persentase Gangguan Ketentranman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	148.025.000	100	152.625.500	100	155.678.010	100	158.791.570	100	161.967.402	Kecamatan Sariwangi
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					22.500.000		22.950.000		23.409.000		23.877.180		24.354.724	
Terciptanya wilayah kecamatan yang aman tertib dan kondusif.	Persentase konflik sosial yang berhasil dimediasi	%	100	100	22.500.000	100	22.950.000	100	23.409.000	100	23.877.180	100	24.354.724	Kecamatan Sariwangi
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA					4.400.000		5.000.000		5.100.000		5.202.000		5.306.040	
Pelayanan Administratif Bidang PMDEP sesuai Standar dan tepat waktu	Presentase permohonan administratif Bidang PMDEP yang terlayani sesuai standar	%	100	100	4.400.000	100	5.000.000	100	5.100.000	100	5.202.000	100	5.306.040	Kecamatan Sariwangi
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					22.945.000		53.403.900		23.871.978		24.349.418		24.836.406	
Meningkatnya kapasitas dan kepatuhan pemerintahan desa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase desa tertib administrasi	%	100	100	22.945.000	100	53.403.900	100	23.871.978	100	24.349.418	100	24.836.406	Kecamatan Sariwangi
KECAMATAN SINGAPARNA														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.917.839.053		1.956.195.834		1.995.319.751		2.035.226.146		2.075.930.669	
Meningkatnya Tata kelola administrasi Kecamatan yang efektif efisien dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	40,53	52,05	1.917.839.053	55,05	1.956.195.834	56,00	1.995.319.751	57,00	2.035.226.146	58,00	2.075.930.669	Kecamatan Singaparna
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					45.940.000		46.858.800		47.795.976		48.751.896		49.726.933	
Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik sesuai standar dan tepat waktu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	80,21	81,00	45.940.000	81,05	46.858.800	82	47.795.976	82,20	48.751.896	82,50	49.726.933	Kecamatan Singaparna



BIDANG/URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD Penanggung Jawab
				TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					184.625.000		188.317.500		192.083.850		195.925.527		199.844.038	
Berkurangnya gangguan trantribum	Persentase Gangguan Ketentranman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	184.625.000	100	188.317.500	100	192.083.850	100	195.925.527	100	199.844.038	Kecamatan Singaparna
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					20.000.000		20.400.000		20.808.000		21.224.160		21.648.643	
Terciptanya wilayah kecamatan yang aman tertib dan kondusif.	Persentase konflik sosial yang berhasil dimediasi	%	100	100	20.000.000	100	20.400.000	100	20.808.000	100	21.224.160	100	21.648.643	Kecamatan Singaparna
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA					10.000.000		10.200.000		10.404.000		10.612.080		10.824.322	
Pelayanan Administratif Bidang PMDEP sesuai Standar dan tepat waktu	Presentase permohonan administratif Bidang PMDEP yang terlayani sesuai standar	%	100	100	10.000.000	100	10.200.000	100	10.404.000	100	10.612.080	100	10.824.322	Kecamatan Singaparna
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					22.625.000		38.077.500		23.539.050		44.009.831		24.490.028	
Meningkatnya kapasitas dan kepatuhan pemerintahan desa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase desa tertib administrasi	%	100	100	22.625.000	100	38.077.500	100	23.539.050	100	44.009.831	100	24.490.028	Kecamatan Singaparna
KECAMATAN SUKARAME														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.775.091.323		1.949.172.750		1.988.695.726		2.028.565.012		2.069.038.826	
Meningkatnya Tata kelola administrasi Kecamatan yang efektif efisien dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	58.14	60	1.775.091.323	62	1.949.172.750	63	1.988.695.726	63	2.028.565.012	64	2.069.038.826	Kecamatan Sukarame
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					34.102.500		38.384.600		39.152.292		39.935.338		40.734.044	
Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik sesuai standar dan tepat waktu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85.18	85.30	34.102.500	85.75	38.384.600	86	39.152.292	86.15	39.935.338		40.734.044	Kecamatan Sukarame



BIDANG/URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD Penanggung Jawab
				TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					131.025.000		145.885.500		148.803.210		151.779.274		154.814.858	
Berkurangnya gangguan trantribum	Persentase Gangguan Ketentranman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	131.025.000	100	145.885.500	100	148.803.210	100	151.779.274	100	154.814.858	Kecamatan Sukarame
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					22.500.000		22.950.000		23.409.000		23.877.180		24.354.724	
Terciptanya wilayah kecamatan yang aman tertib dan kondusif.	Persentase konflik sosial yang berhasil dimediasi	%	100	100	22.500.000	100	22.950.000	100	23.409.000	100	23.877.180	100	24.354.724	Kecamatan Sukarame
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA					N/A		5.000.000		5.100.000		5.202.000		5.306.040	
Pelayanan Administratif Bidang PMDEP sesuai Standar dan tepat waktu	Presentase permohonan administratif Bidang PMDEP yang terlayani sesuai standar	%	100	100	N/A	100	5.000.000	100	5.100.000	100	5.202.000	100	5.306.040	Kecamatan Sukarame
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					20.105.000		35.507.100		20.917.242		26.335.587		21.762.839	
Meningkatnya kapasitas dan kepatuhan pemerintahan desa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase desa tertib administrasi	%	100	100	20.105.000	100	35.507.100	100	20.917.242	100	26.335.587	100	21.762.839	Kecamatan Sukarame
KECAMATAN SUKAHENING														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.741.379.911		1.791.911.771		1.888.451.306		1.828.919.632		1.891.029.325	
Meningkatnya Tata kelola administrasi Kecamatan yang efektif efisien dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	42,93	59	1.741.379.911	61	1.791.911.771	63	1.888.451.306	65	1.828.919.632	70	1.891.029.325	Kecamatan Sukahening
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					18.280.000		19.700.000		21.200.000		22.700.000		24.200.000	
Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik sesuai standar dan tepat waktu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	81,25	81,58	18.280.000	81,9	19.700.000	82,23	21.200.000	82,56	22.700.000	82,89	24.200.000	Kecamatan Sukahening



BIDANG/URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD Penanggung Jawab
				TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					132.372.000		135.000.000		140.000.000		145.000.000		150.000.000	
Berkurangnya gangguan trantribum	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	132.372.000	100	135.000.000	100	140.000.000	100	145.000.000	100	150.000.000	Kecamatan Sukahening
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					22.500.000		26.000.000		27.000.000		28.000.000		29.000.000	
Terciptanya wilayah kecamatan yang aman tertib dan kondusif.	Persentase konflik sosial yang berhasil dimediasi	%	100	100	22.500.000	100	26.000.000	100	27.000.000	100	28.000.000	100	29.000.000	Kecamatan Sukahening
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA					25.000.000		26.000.000		27.000.000		28.000.000		29.000.000	
Pelayanan Administratif Bidang PMDEP sesuai Standar dan tepat waktu	Presentase permohonan administratif Bidang PMDEP yang terlayani sesuai standar	%	100	100	25.000.000	100	26.000.000	100	27.000.000	100	28.000.000	100	29.000.000	Kecamatan Sukahening
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					21.076.550		43.000.000		29.500.000		31.000.000		32.500.000	
Meningkatnya kapasitas dan kepatuhan pemerintahan desa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase desa tertib administrasi	%	100	100	21.076.550	100	43.000.000	100	29.500.000	100	31.000.000	100	32.500.000	Kecamatan Sukahening
KECAMATAN SUKARATU														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.670.809.157		1.704.225.340		1.738.309.847		1.773.076.044		1.808.537.565	
Meningkatnya Tata kelola administrasi Kecamatan yang efektif efisien dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	33.91	50	1.670.809.157	51	1.704.225.340	52	1.738.309.847	53	1.773.076.044	54	1.808.537.565	Kecamatan Sukaratu
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					31.775.000		37.390.000		38.137.902		38.900.659		39.678.673	
Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik sesuai standar dan tepat waktu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	81.14	81.50	31.775.000	82	37.390.000	82.5	38.137.902	82.75	38.900.659	83	39.678.673	Kecamatan Sukaratu



BIDANG/URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD Penanggung Jawab
				TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					141.050.000		163.871.000		167.148.420		170.491.388		173.901.216	
Berkurangnya gangguan trantribum	Persentase Gangguan Ketentranman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	141.050.000	100	163.871.000	100	167.148.420	100	170.491.388	100	173.901.216	Kecamatan Sukaratu
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					22.500.000		22.950.000		23.409.000		23.877.180		24.354.724	
Terciptanya wilayah kecamatan yang aman tertib dan kondusif.	Persentase Desa yang Masyarakatnya Aktif dalam Pemberdayaan Bidang Kesos	%	100	100	22.500.000	100	22.950.000	100	23.409.000	100	23.877.180	100	24.354.724	Kecamatan Sukaratu
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA					0		5.000.000		5.100.000		5.202.000		5.306.040	
Pelayanan Administratif Bidang PMDEP sesuai Standar dan tepat waktu	Presentase permohonan administratif Bidang PMDEP yang terlayani sesuai standar	%	100	100	0	100	5.000.000	100	5.100.000	100	5.202.000	100	5.306.040	Kecamatan Sukaratu
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					5.140.000		45.242.800		5.347.656		5.454.609		5.563.701	
Meningkatnya kapasitas dan kepatuhan pemerintahan desa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase desa tertib administrasi	%	100	100	5.140.000	100	45.242.800	100	5.347.656	100	5.454.609	100	5.563.701	Kecamatan Sukaratu
KECAMATAN CIGALONTANG														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.769.791.724		1.805.187.558		1.841.291.309		1.878.117.135		1.915.679.478	
Meningkatnya Tata kelola administrasi Kecamatan yang efektif efisien dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	56,4	57	1.769.791.724	57,5	1.805.187.558	58	1.841.291.309	58,5	1.878.117.135	59	1.915.679.478	Kecamatan Cigalontang
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					35.880.000		36.597.600		37.329.552.00		38.076.143.04		38.837.665	
Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik sesuai standar dan tepat waktu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82.53	82.75	35.880.000	83.00	36.597.600	83.3	37.329.552.00	83.5	38.076.143.04	8.4	38.837.665	Kecamatan Cigalontang



BIDANG/URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD Penanggung Jawab
				TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					226.825.000		231.361.500		235.988.730		240.708.504		245.522.674	
Berkurangnya gangguan trantribum	Persentase Gangguan Ketentranman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	226.825.000	100	231.361.500	100	235.988.730	100	240.708.504	100	245.522.674	Kecamatan Cigalontang
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					21.550.000		21.981.000		22.420.620		22.869.032		23.326.413	
Terciptanya wilayah kecamatan yang aman tertib dan kondusif.	Persentase konflik sosial yang berhasil dimediasi	%	100	100	21.550.000	100	21.981.000	100	22.420.620	100	22.869.032	100	23.326.413	Kecamatan Cigalontang
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA					4.400.000		4.488.000		4.577.760		4.669.315		4.762.701	
Pelayanan Administratif Bidang PMDEP sesuai Standar dan tepat waktu	Presentase permohonan administratif Bidang PMDEP yang terlayani sesuai standar	%	100	100	4.400.000	100	4.488.000	100	4.577.760	100	4.669.315	100	4.762.701	Kecamatan Cigalontang
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					25.792.500		26.308.350		26.834.517		27.371.207		27.918.631	
Meningkatnya kapasitas dan kepatuhan pemerintahan desa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase desa tertib administrasi	%	100	100	25.792.500	100	26.308.350	100	26.834.517	100	27.371.207	100	27.918.631	Kecamatan Cigalontang
KECAMATAN LEUWISARI														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.895.941.592		1.928.964.516		1.967.543.806		2.006.894.682		2.047.032.576	
Meningkatnya Tata kelola administrasi Kecamatan yang efektif efisien dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	46.51	52,05	1.895.941.592	55,05	1.928.964.516	56	1.967.543.806	57	2.006.894.682	58	2.047.032.576	Kecamatan Leuwisari
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					29.000.000		29.580.000		30.171.600		15.228.339		31.390.533	
Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik sesuai standar dan tepat waktu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82.05	83.05	29.000.000	84	29.580.000	84.05	30.171.600	85	15.228.339	86	31.390.533	Kecamatan Leuwisari



BIDANG/URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD Penanggung Jawab
				TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					131.650.000		134.283.000		136.968.660		139.708.033		142.502.194	
Berkurangnya gangguan trantribum	Persentase Gangguan Ketentranman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	131.650.000	100	134.283.000	100	136.968.660	100	139.708.033	100	142.502.194	Kecamatan Leuwisari
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					22.500.000		22.950.000		23.409.000		23.877.180		24.354.724	
Terciptanya wilayah kecamatan yang aman tertib dan kondusif.	Persentase konflik sosial yang berhasil dimediasi	%	100	100	22.500.000	100	22.950.000	100	23.409.000	100	23.877.180	100	24.354.724	Kecamatan Leuwisari
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA					4.400.000		4.488.000		4.577.760		4.669.315		4.762.702	
Pelayanan Administratif Bidang PMDEP sesuai Standar dan tepat waktu	Presentase permohonan administratif Bidang PMDEP yang terlayani sesuai standar	%	100	100	4.400.000	100	4.488.000	100	4.577.760	100	4.669.315	100	4.762.702	Kecamatan Leuwisari
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					16.735.000		47.069.700		17.411.094		17.759.316		18.114.502	
Meningkatnya kapasitas dan kepatuhan pemerintahan desa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase desa tertib administrasi	%	100	100	16.735.000	100	47.069.700	100	17.411.094	100	17.759.316	100	18.114.502	Kecamatan Leuwisari
KECAMATAN PADAKEMBANG														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.822.867.703		1.891.525.057		1.929.355.558		2.027.942.469		2.007.301.554	
Meningkatnya Tata kelola administrasi Kecamatan yang efektif efisien dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	33,51	50	1.822.867.703	55	1.891.525.057	60	1.929.355.558	65	2.027.942.469	70	2.007.301.554	Kecamatan Padakembang
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					30.725.000		41.541.500		42.175.290		43.009.615		43.869.807	
Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik sesuai standar dan tepat waktu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82,06	82,8	30.725.000	83	41.541.500	84	42.175.290	85	43.009.615	86	43.869.807	Kecamatan Padakembang



BIDANG/URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD Penanggung Jawab
				TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					107.750.000		119.905.000		122.303.100		124.749.162		127.244.145	
Berkurangnya gangguan trantribum	Persentase Gangguan Ketentranman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	107.750.000	100	119.905.000	100	122.303.100	100	124.749.162	100	127.244.145	Kecamatan Padakembang
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					22.500.000		22.950.000		23.409.000		23.877.180		24.354.724	
Terciptanya wilayah kecamatan yang aman tertib dan kondusif.	Persentase konflik sosial yang berhasil dimediasi	%	100	100	22.500.000	100	22.950.000	100	23.409.000	100	23.877.180	100	24.354.724	Kecamatan Padakembang
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA					0		10.000.000		10.200.000		10.404.000		10.612.080	
Pelayanan Administratif Bidang PMDEP sesuai Standar dan tepat waktu	Presentase permohonan administratif Bidang PMDEP yang terlayani sesuai standar	%	100	100	0	100	10.000.000	100	10.200.000	100	10.404.000	100	10.612.080	Kecamatan Padakembang
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					19.500.000		69.890.000		20.287.800		20.693.556		21.107.428	
Meningkatnya kapasitas dan kepatuhan pemerintahan desa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase desa tertib administrasi	%	100	100	19.500.000	100	69.890.000	100	20.287.800	100	20.693.556	100	21.107.428	Kecamatan Padakembang
KECAMATAN GUNUNGTANJUNG														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.856.820.164	50	1.856.820.214	60.1	1.856.820.264	60.2	#VALUE!	60.25	#VALUE!	
Meningkatnya Tata kelola administrasi Kecamatan yang efektif efisien dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	38.47	50	1.856.820.164	50	1.856.820.214	60.1	1.856.820.264	60.2	#VALUE!	60.25	#VALUE!	Kecamatan Gunungtanjung
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					40.550.000		41.361.000		42.188.220		43.031.984		43.892.624	
Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik sesuai standar dan tepat waktu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	83.9		40.550.000	83	41.361.000	85	42.188.220	88	43.031.984	90	43.892.624	Kecamatan Gunungtanjung



BIDANG/URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD Penanggung Jawab
				TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					122.200.000		124.644.000		127.136.880		129.679.618		132.273.210	
Berkurangnya gangguan trantribum	Persentase Gangguan Ketentranman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	122.200.000	100	124.644.000	100	127.136.880	100	129.679.618	100	132.273.210	Kecamatan Gunungtanjung
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					22.500.000		22.950.000		23.409.000		23.877.180		24.354.724	
Terciptanya wilayah kecamatan yang aman tertib dan kondusif.	Persentase konflik sosial yang berhasil dimediasi	%	100	100	22.500.000	100	22.950.000	100	23.409.000	100	23.877.180	100	24.354.724	Kecamatan Gunungtanjung
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA														
Pelayanan Administratif Bidang PMDEP sesuai Standar dan tepat waktu	Presentase permohonan administratif Bidang PMDEP yang terlayani sesuai standar	%	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Gunungtanjung
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					21.870.000		22.307.400		22.753.548		23.208.619		23.672.791	
Meningkatnya kapasitas dan kepatuhan pemerintahan desa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase desa tertib administrasi	%	100	100	21.870.000	100	22.307.400	100	22.753.548	100	23.208.619	100	23.672.791	Kecamatan Gunungtanjung
KECAMATAN KARANGJAYA														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.867.145.592		1.940.192.504		1.983.958.393		2.028.240.040		2.052.099.458	
Meningkatnya Tata kelola administrasi Kecamatan yang efektif efisien dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	55.26	56	1.867.145.592	55,05	1.940.192.504	56	1.983.958.393	57	2.028.240.040	58	2.052.099.458	Kecamatan Karangjaya
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					51.870.000		52.907.400		53.965.548		28.514.663		56.145.756	
Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik sesuai standar dan tepat waktu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82.05	83.05	51.870.000	84	52.907.400	84.05	53.965.548	85	28.514.663	86	56.145.756	Kecamatan Karangjaya



BIDANG/URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD Penanggung Jawab
				TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					113.700.000		115.974.000		118.293.480		120.659.350		123.072.537	
Berkurangnya gangguan trantribum	Persentase Gangguan Ketentranman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	113.700.000	100	115.974.000	100	118.293.480	100	120.659.350	100	123.072.537	Kecamatan Karangjaya
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					25.000.000		25.500.000		26.010.000		26.530.200		27.060.804	
Terciptanya wilayah kecamatan yang aman tertib dan kondusif.	Persentase konflik sosial yang berhasil dimediasi	%	100	100	25.000.000	100	25.500.000	100	26.010.000	100	26.530.200	100	27.060.804	Kecamatan Karangjaya
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA														
Pelayanan Administratif Bidang PMDEP sesuai Standar dan tepat waktu	Presentase permohonan administratif Bidang PMDEP yang terlayani sesuai standar	%	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Karangjaya
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					23.790.000		24.265.800		24.751.116		25.246.138		25.751.061	
Meningkatnya kapasitas dan kepatuhan pemerintahan desa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase desa tertib administrasi	%	100	100	23.790.000	100	24.265.800	100	24.751.116	100	25.246.138	100	25.751.061	Kecamatan Karangjaya
KECAMATAN CULAMEGA														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.809.793.092		1.919.000.154		1.957.920.155		1.997.168.551		2.037.019.306	
Meningkatnya Tata kelola administrasi Kecamatan yang efektif efisien dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	39.45	41	1.809.793.092	45	1.919.000.154	48	1.957.920.155	50	1.997.168.551	55	2.037.019.306	Kecamatan Culamega
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					18.445.000		34.625.900		35.318.418		36.024.785		36.745.280	
Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik sesuai standar dan tepat waktu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	76.19	80	18.445.000	81	34.625.900	82	35.318.418	83	36.024.785	83.5	36.745.280	Kecamatan Culamega



BIDANG/URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD Penanggung Jawab
				TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					106.068.000		128.189.360		130.753.147		133.368.209		136.035.573	
Berkurangnya gangguan trantribum	Persentase Gangguan Ketentranman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	106.068.000	100	128.189.360	100	130.753.147	100	133.368.209	100	136.035.573	Kecamatan Culamega
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					22.500.000		22.950.000		23.409.000		23.877.180		24.354.724	
Terciptanya wilayah kecamatan yang aman tertib dan kondusif.	Persentase konflik sosial yang berhasil dimediasi	%	100	100	22.500.000	100	22.950.000	100	23.409.000	100	23.877.180	100	24.354.724	Kecamatan Culamega
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA					0		5.000.000		5.100.000		5.202.000		5.306.040	
Pelayanan Administratif Bidang PMDEP sesuai Standar dan tepat waktu	Presentase permohonan administratif Bidang PMDEP yang terlayani sesuai standar	%	100	100	0	100	5.000.000	100	5.100.000	100	5.202.000	100	5.306.040	Kecamatan Culamega
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					24.675.000		37.648.300		38.401.266		39.169.291		39.952.677	
Meningkatnya kapasitas dan kepatuhan pemerintahan desa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase desa tertib administrasi	%	100	100	24.675.000	100	37.648.300	100	38.401.266	100	39.169.291	100	39.952.677	Kecamatan Culamega
KECAMATAN SUKARESIK														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.691.407.053		1.725.235.194		1.759.739.897		1.794.934.696		1.830.833.390	
Meningkatnya Tata kelola administrasi Kecamatan yang efektif efisien dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	42.29	58	1.691.407.053	60	1.725.235.194	62	1.759.739.897	64	1.794.934.696	66	1.830.833.390	Kecamatan Sukaresik
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					27.150.000		27.693.000		28.246.860		28.811.798		29.388.034	
Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik sesuai standar dan tepat waktu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85,15	85,5	27.150.000	85,6	27.693.000	85,7	28.246.860	85,8	28.811.798	86	29.388.034	Kecamatan Sukaresik



BIDANG/URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD Penanggung Jawab
				TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					134.150.000		136.833.000		139.569.660		142.361.053		145.208.274	
Berkurangnya gangguan trantribum	Persentase Gangguan Ketentranman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	134.150.000	100	136.833.000	100	139.569.660	100	142.361.053	100	145.208.274	Kecamatan Sukaresik
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					22.061.800		22.503.036		22.953.097		23.412.159		23.880.402	
Terciptanya wilayah kecamatan yang aman tertib dan kondusif.	Persentase konflik sosial yang berhasil dimediasi	%	100	100	22.061.800	100	22.503.036	100	22.953.097	100	23.412.159	100	23.880.402	Kecamatan Sukaresik
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					16.938.500		17.277.270		17.622.815		17.975.272		18.334.777	
Meningkatnya kapasitas dan kepatuhan pemerintahan desa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase desa tertib administrasi	%	100	100	16.938.500	100	17.277.270	100	17.622.815	100	17.975.272	100	18.334.777	Kecamatan Sukaresik
KECAMATAN MANGUNREJA														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.824.945.465		2.001.444.374		2.041.473.262		2.082.302.727		2.123.948.782	
Meningkatnya Tata kelola administrasi Kecamatan yang efektif efisien dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	37.33	45	1.824.945.465	48	2.001.444.374	50	2.041.473.262	53	2.082.302.727	55	2.123.948.782	Kecamatan Mangunreja
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					28.840.000		34.416.800		35.105.136		35.807.239		36.523.383	
Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik sesuai standar dan tepat waktu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	81.2	81.95	28.840.000	82	34.416.800	83	35.105.136	84	35.807.239	85	36.523.383	Kecamatan Mangunreja
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					114.525.000		136.815.500		139.551.810		142.342.846		145.189.703	
Berkurangnya gangguan trantribum	Persentase Gangguan Ketentranman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	114.525.000	100	136.815.500	100	139.551.810	100	142.342.846	100	145.189.703	Kecamatan Mangunreja



BIDANG/URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD Penanggung Jawab
				TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					22.500.000		22.950.000		23.409.000		23.877.180		24.354.724	
Terciptanya wilayah kecamatan yang aman tertib dan kondusif.	Persentase konflik sosial yang berhasil dimediasi	%	100	100	22.500.000	100	22.950.000	100	23.409.000	100	23.877.180	100	24.354.724	Kecamatan Mangunreja
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA					-		5.000.000		5.100.000		5.202.000		5.306.040	
Pelayanan Administratif Bidang PMDEP sesuai Standar dan tepat waktu	Presentase permohonan administratif Bidang PMDEP yang terlayani sesuai standar	%	100	100	-	100	5.000.000	100	5.100.000	100	5.202.000	100	5.306.040	Kecamatan Mangunreja
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					20.395.000		35.802.900		21.218.958		26.643.337		22.076.204	
Meningkatnya kapasitas dan kepatuhan pemerintahan desa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase desa tertib administrasi	%	100	100	20.395.000	100	35.802.900	100	21.218.958	100	26.643.337	100	22.076.204	Kecamatan Mangunreja
KECAMATAN BOJONGASIH														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.863.560.550		1.900.831.761		1.938.848.396		1.977.625.364		2.017.177.871	
Meningkatnya Tata kelola administrasi Kecamatan yang efektif efisien dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	35.60	52.05	1.863.560.550	55.05	1.900.831.761	56	1.938.848.396	57	1.977.625.364	58	2.017.177.871	Kecamatan Bojongasih
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					35.857.500		36.574.650		37.306.143		38.052.265		38.813.311	
Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik sesuai standar dan tepat waktu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	81,18	81,75	35.857.500	82,5	36.574.650	82,6	37.306.143	82,7	38.052.265	82,8	38.813.311	Kecamatan Bojongasih
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					107.550.000		109.701.000		111.895.000		114.132.000		116.415.000	
Berkurangnya gangguan trantribum	Persentase Gangguan Ketentranman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	107.550.000	100	109.701.000	100	111.895.000	100	114.132.000	100	116.415.000	Kecamatan Bojongasih



BIDANG/URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD Penanggung Jawab
				TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					22.500.000		22.950.000		25.000.000		26.000.000		27.000.000	
Terciptanya wilayah kecamatan yang aman tertib dan kondusif.	Persentase konflik sosial yang berhasil dimediasi	%	100	100	22.500.000	100	22.950.000	100	25.000.000	100	26.000.000	100	27.000.000	Kecamatan Bojongasih
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA					21.415.000		21.843.300		22.280.000		22.725.000		23.180.000	
Pelayanan Administratif Bidang PMDEP sesuai Standar dan tepat waktu	Presentase permohonan administratif Bidang PMDEP yang terlayani sesuai standar	%	100	100	21.415.000	100	21.843.300	100	22.280.000	100	22.725.000	100	23.180.000	Kecamatan Bojongasih
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														
Meningkatnya kapasitas dan kepatuhan pemerintahan desa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase desa tertib administrasi	%	100	100		100		100		100		100		
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM														
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12.521.243.233		13.246.243.233		13.296.243.233		13.146.243.233		13.321.243.233	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Bakesbangpol	Indeks Reformasi Birokrasi Bakesbangpol	Poin	65,67	71,60	5.621.243.233	72,30	5.646.243.233	73,10	5.696.243.233	74,20	5.546.243.233	75,60	5.721.243.233	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					6.900.000.000		7.600.000.000		7.600.000.000		7.600.000.000		7.600.000.000	
Meningkatnya penerapan hasil Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase masyarakat yang menerapkan hasil Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	%	N/A	35	6.900.000.000	45	7.600.000.000	55	7.600.000.000	70	7.600.000.000	75	7.600.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN					8.475.120.000		8.475.120.000		13.118.400.000		93.891.430.143		50.632.113.729	



BIDANG/URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD Penanggung Jawab
				TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	TARGET (K)	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK														
Pemilu mendapatkan dukungan sumber daya	Persentase peningkatan bantuan untuk Pemilu	%	N/A	100	2.650.000.000	100	2.650.000.000	100	2.650.000.000	100	83.423.030.143	100	40.163.713.729	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Meningkatnya penerapan hasil pembinaan Pendidikan Politik bagi masyarakat	Meningkatnya penerapan hasil pembinaan Pendidikan Politik bagi masyarakat	%	N/A	6%	5.825.120.000	7%	5.825.120.000	8%	10.468.400.000	10%	10.468.400.000	12%	10.468.400.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					10.763.600.000		10.763.600.000		10.763.600.000		10.763.600.000		10.763.600.000	
Meningkatnya peran organisasi masyarakat dalam pembangunan daerah	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	%	N/A	13%	10.763.600.000	15%	10.763.600.000	18%	10.763.600.000	20%	10.763.600.000	22%	10.763.600.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.700.000.000		2.000.000.000	
Meningkatnya kerja sama antar umat beragama dalam menciptakan kerukunan umat beragama	Persentase masyarakat yang menerapkan hasil pembinaan kerja sama kerukunan umat beragama	%		25%	1.000.000.000	35%	1.000.000.000	45%	1.000.000.000	60%	1.500.000.000	65%	1.000.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Meningkatnya penerapan hasil Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Persentase masyarakat yang menerapkan hasil pembinaan ketahanan ekonomi sosial dan budaya	%		20%	1.000.000.000	30%	1.000.000.000	40%	1.000.000.000	55%	1.200.000.000	60%	1.000.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					11.800.000.000		11.800.000.000		11.800.000.000		22.800.000.000		11.800.000.000	
Meningkatnya kewaspadaan daerah	Persentase lokasi rawan konflik sosial yang terdeteksi dini	Persen	N/A	40	11.800.000.000	50	11.800.000.000	60	11.800.000.000	80	22.800.000.000	85	11.800.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber: Hasil Analisis, 2025



4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah merupakan acuan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Sejumlah indikator pencapaian diuraikan berdasarkan sasaran-sasaran makro (indikator makro) yang merupakan bentuk penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum yang disusun berdasarkan pertimbangan target penyelenggaraan pembangunan periode 2025-2029 sesuai proporsi terhadap target jangka panjang pembangunan daerah Tahun 2025-2045. Selain itu, terdapat pula indikator kinerja penyelenggaraan daerah yang merupakan acuan kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam RPJMD Tahun 2025-2029.

4.2.1 Indikator Kinerja Utama

Kinerja makro ditunjukkan dengan Indikator Makro, sedangkan kinerja utama ditunjukkan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama pemerintah daerah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban. IKU Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya merupakan ukuran keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Visi Misi Kepala Daerah dan diperoleh dari Indikator Tujuan/Sasaran yang terseleksi. IKU tersebut merupakan kinerja pemerintah daerah pada posisi paling tinggi dan merupakan kinerja dampak (*outcome*) atau *ultimate outcome*. Pencapaian IKU didukung oleh kinerja *outcome* atau *intermediate outcome* yang pada umumnya merupakan hasil *crosscutting* beberapa urusan atau program. Penetapan IKU Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya disajikan pada tabel sebagai berikut.





Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	69,98	70,27	70,93	71,51	72,12	72,76	73,43	
2	Angka Harapan Hidup	Tahun	74,06	74,37	74,42	74,98	75,29	75,29	75,90	
3	Prevalensi Stunting	%	17,10	15,41	13,96	12,71	11,64	10,71	9,91	
4	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,97	8,03	8,09	8,15	8,21	8,27	8,33	
5	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,64	12,66	12,7	12,73	12,76	12,79	12,82	
6	Indeks Kesalehan Umat Beragama*	Poin	N/A	85,54	85,896	86,252	86,608	86,964	87,32	
7	Indeks Pembangunan Keluarga	Poin	59,61	60,70	61,50	62,40	63,50	64,10	65,00	
8	Indeks Pembangunan Gender	Poin	87,61	87,81	87,98	88,20	88,30	88,50	88,70	
9	Indeks Pembangunan Pemuda	%	56,4	57,25	58,1	58,98	59,86	60,76	61,67	
10	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Poin	53,49	57,72	61,72	70,39	77,87	84,91	90,45	
11	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,64	4,66 - 5,16	4,63 - 5,72	4,71 - 6,90	4,74 - 7,04	4,89 - 7,34	4,94 - 5,45	
12	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	78,47	79,25	80,04	80,84	81,72	82,53	83,36	
13	Prevalence of Undernourishment (PoU)	Poin	5,95	5,85	5,75	5,66	5,56	5,46	5,36	
14	PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	Rp Miliar	18.326,32	19.747,78	21.138,37	22.626,89	24.220,22	25.925,75	27.751,39	
15	PDRB Sektor Perdagangan	Rp Miliar	8.959,53	9.697,99	10.426,24	11.209,17	12.050,89	12.955,81	13.928,69	
16	PDRB Sektor Industri Pengolahan	Rp Miliar	4.146,39	4.475,62	4.921,02	5.410,75	5.949,21	6.541,25	7.192,21	
17	Kontribusi Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0,70	0,70	0,75	0,80	0,85	0,90	0,95	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Rp Miliar	9.838,27	10.498,70	11.298,12	12.158,40	13.084,19	14.080,47	15.152,61	
19	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,74	3,67	3,56	3,29	3,14	2,99	2,84	
20	PDRB Sektor Akomodasi Makan dan Minum	Rp Miliar	749,65	817,92	895,37	980,17	1.072,99	1.174,61	1.285,85	
21	Tingkat Inflasi	%	1,94	1,51 - 3,49	1,51 - 3,49	1,51 - 3,49	1,51 - 3,49	1,51 - 3,49	1,51 - 3,49	
22	Indeks Kualitas Infrastruktur	%	44,73	47,75	48,91	50,14	51,38	52,63	53,87	
23	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	65,51	67,60	67,85	68,10	68,36	68,61	68,86	
24	Indeks Risiko Bencana	Poin	145,5	141,14	136,90	132,79	128,81	124,95	121,20	
25	Rasio Gini	Poin	0,363	0,360	0,357	0,354	0,351	0,348	0,345	
26	Tingkat Kemiskinan	%	10,23	10,17	10,10	9,97	9,84	9,71	9,58	
27	Indeks Desa	Poin	10,23	10,17	10,10	9,97	9,84	9,71	9,58	
28	Laju Peningkatan Desa Mandiri	%	50,91	10,84	9,78	8,91	8,18	7,56	7,03	
29	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	BB	BB	A	A	A	A	A	
30	Persentase Capaian Reformasi Birokrasi General	Poin	69,81	70	70,5	71	71,5	72	72,5	

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Keterangan : * merupakan indikator baru dan tidak memiliki *baseline* Tahun 2024





4.2.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, indikator kinerja merupakan alat yang digunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan, program, maupun pencapaian sasaran dan tujuan, yang dinyatakan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*). Adapun penjelesan dari masing-masing yaitu:

- *Output* adalah produk akhir berupa barang atau jasa yang dihasilkan dari rangkaian proses pemanfaatan sumber daya pembangunan, yang diperlukan untuk mewujudkan *outcome*.
- *Outcome* merupakan kondisi atau perubahan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada kelompok penerima manfaat dalam periode tertentu, mencerminkan efektivitas keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
- *Impact* atau dampak adalah perubahan jangka panjang yang diharapkan terjadi, sebagai hasil dari tercapainya *outcome* dari beberapa program pembangunan atau layanan.

Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang terdiri atas indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci (IKK). IKK mencerminkan capaian kinerja dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Indikator kinerja utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dianalisis berdasarkan tiga aspek penting, diantaranya, yaitu (a) aspek kesejahteraan rakyat; (b) aspek pelayanan umum; dan (c) aspek daya saing daerah. Indikator-indikator tersebut meliputi 45 Indikator Utama Pembangunan (IUP) sebagaimana tercantum dalam RPJMN, yang dijadikan sebagai pedoman arah pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya untuk lima tahun ke depan. Indikator ini akan digunakan sebagai alat ukur utama dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan jangka panjang. Adapun penetapan indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2030 disajikan dalam tabel berikut.



Tabel 4.3
Indikator Makro Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024-2030

NO	INDIKATOR MAKRO	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	69,98	70,27	70,93	71,51	72,12	72,76	73,43
2	Tingkat Kemiskinan	%	10,23	10,17	10,10	9,97	9,84	9,71	9,58
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,74	3,67	3,56	3,29	3,14	2,99	2,84
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,64	4,66 - 5,16	4,63 - 5,72	4,71 - 6,90	4,74 - 7,04	4,89 - 7,34	4,94 - 5,45
5	PDRB per kapita	Rp Juta	25,92	26,57	27,00	28,60	29,76	30,93	32,09
6	Rasio Gini	Poin	0,363	0,360	0,357	0,354	0,351	0,348	0,345
7	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	Ton CO ₂ eq/Miliar	N/A	5,570	6,14	6,770	7,630	8,390	9,010
8	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota (ADHB)	%	1,760	1,730	1,730	1,726	1,722	1,718	1,715
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	65,51	67,60	67,85	68,10	68,36	68,61	68,86

Sumber: Data diolah, 2025





Tabel 4.4
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						Perangkat Daerah	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI											
1	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	78,47	79,25	80,04	80,84	81,72	82,53	83,36	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Dan Perikanan	
2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	%	595	585	575	566	556	546	536	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Dan Perikanan	IUP
3	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	66,93	70,25	71,89	73,64	75,78	77,26	79,15	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	IUP
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	65,51	67,60	67,85	68,10	68,36	68,61	68,86	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
5	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	11,09	13,27	15,45	17,63	19,81	21,98	24,16	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan	IUP



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						Perangkat Daerah	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
										Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
6	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Kg / Orang	2,0	2,28	2,72	3,15	3,59	4,03	4,46	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	IUP
7	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	8	81,40	8,21	8,29	8,36	8,44	8,51	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	IUP
8	Kapasitas Air Baku	m3/detik		292,00	353,00	414,00	476,00	539,00	602,00	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	IUP





NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						Perangkat Daerah	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
9	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Ton CO2eq/Miliar	n/a	5,57	6,14	6,77	7,63	8,39	9,01	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	IUP
10	Indeks Risiko Bencana	Poin	145,50	141,14	136,90	132,79	128,81	124,95	121,20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	IUP
11	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	64,00	65,00	67,00	68,00	69,00	71,00	72,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
12	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	7,30	6,70	6,40	6,10	5,80	5,50	5,20	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
13	Rasio Penduduk (Rasio Jenis Kelamin Penduduk)	%	102,437	102,3017	102,1628	102,0189	101,8729	101,7243	101,5732	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
14	Kepadatan Penduduk	Orang / km2	710	714	719	723	728	732	735	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	PJPK
B. ASPEK KESEJAHTERAAN RAKYAT											



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						Perangkat Daerah	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,64	4,64 - 5,16	4,63	4,63	4,74 - 7,04	4,89 - 7,34	4,94 - 5,45	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
2	Tingkat Kemiskinan	%	10,23	10,17	10,10	9,97	9,84	9,71	9,58	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	IUP
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta	25,92	26,57	27,00	28,60	29,76	30,93	32,09	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,74	3,67	3,56	3,29	3,14	2,99	2,84	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	IUP
5	Rasio Gini	Poin	0,363	0,360	0,357	0,354	0,351	0,348	0,345	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
6	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	69,98	70,27	70,93	71,51	72,12	72,76	73,43	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						Perangkat Daerah	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
7	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	74,06	74,37	74,67	74,98	75,29	75,59	75,90	Dinas Kesehatan	IUP
8	Persentase jumlah penerima pemeriksaan kesehatan gratis pada semua kelompok usia	%	36,6	36,6	46,00	55,00	61,00	70,00	77,00	Dinas Kesehatan	
9	Prevalensi Stunting	%	17,1	16,5	15,89	15,29	14,68	14,08	13,47	Dinas Kesehatan	IUP
10	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	%	49,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	Dinas Kesehatan	IUP
11	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	%	89,82	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00	Dinas Kesehatan	IUP
12	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (treatment success rate)	%	84,08	98,6	98,6	98,8	98,8	99	99,5	Dinas Kesehatan	IUP
13	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,97	8,03	8,09	8,15	8,21	8,27	8,33	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IUP
14	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,64	12,67	12,7	12,73	12,76	12,79	12,82	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IUP
15	Skor Kemampuan Literasi Jenjang SD	%	65,06	67,56	70,06	72,56	75,06	77,56	80,06	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
16	Skor Kemampuan Literasi Jenjang SMP	%	69,90	71,00	72,10	73,20	74,30	75,40	76,50	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
17	Skor Kemampuan Numerasi Jenjang SD	%	60,04	62,94	65,84	68,74	71,64	74,54	77,44	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						Perangkat Daerah	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
18	Skor Kemampuan Numerasi Jenjang SMP	%	62,82	64,32	65,82	67,32	68,82	70,32	71,82	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
19	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	69,95	78,05*	78 08*	78 10*	78 12	78 15	78 20	Setda	Data di Dinas Perpustakaan
21	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	34,15	34,89	35,15	35,89	36,15	36,89	37,15	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	IUP
22	Indeks Kesalehan Umat Beragama	Poin	N/A	85,54	85,89	86,25	86,6	86,96	87,32	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Hasil konsultasi dengan Kemenag. Yang memiliki kewenangan melakukan pengukuran pengukuran IKUB adalah Litbang Kemenag. Dan tidak semua Kab/Kota diukur IKUB-nya. Kemungkinan untuk Kab. Tasik tidak tersedia datanya
23	Persentase Pelestarian Kebudayaan	Poin	41,42	42,42	43,42	44,42	45,42	46,42	47,42	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IUP



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						Perangkat Daerah	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
24	Indeks Perlindungan Anak	Poin	61,9	62,9	63,9	64,9	65,9	66,9	67,9	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
25	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Poin	59,61	60,70	61,50	62,40	63,50	64,10	65,00	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	IUP
26	Indeks Ketimpangan Gender	Poin	0,56	0,54	0,52	0,50	0,48	0,46	0,44	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	IUP
26	Indeks Pembangunan Gender	Poin	87,61	87,81	87,98	88,59	88,91	89,24	89,56	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	IUP



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						Perangkat Daerah	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
27	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	N/A	56,4	57,25	58,1	58,98	59,86	60,76	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
C. ASPEK DAYA SAING DAERAH											
1	Angka Ketergantungan	%	45,84	46,27	46,84	47,57	48,70	49,53	50,33	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	8,33	8,48	8,63	8,76	8,93	9,08	9,23	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan	IUP
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	1,51	1,53	1,56	1,58	1,61	1,64	1,66	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	IUP
4	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%								Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	IUP
5	Rasio Kewirausahaan pemuda	%	0,98	1,01	1,02	1,03	1,04	1,05	1,06	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan	IUP
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	68,76	69,02	69,78	70,15	70,88	80,05	80,98	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
7	Indeks Inovasi Daerah	Poin	47,59	50,62	51,02	51,42	51,82	52,22	52,62	Badan Perencanaan	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						Perangkat Daerah	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
										Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
8	Indeks Ekonomi Hijau	Poin	64,35	64,43	66,24	67,03	67,92	68,84	69,79	Bappelitbangda DPKPP Diskopukmindag DPMPTSPK	IUP
9	Indeks Ekonomi Biru	Poin	8,01	8,36	8,75	9,16	9,59	10,04	10,51	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	IUP
11	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Poin	N/A	5,50	5,60	5,70	5,80	5,90	5,94	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	IUP
12	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Rp Juta	983.827.296	1.049.870.193	1.129.811.513	1.215.839.885	1.308.418.803	1.408.047.049	1.515.261.389	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	IUP
13	Ekspor Barang dan Jasa	RpJuta	488.483.936	537.332.336	585.332.336	650.172.112	715.189.328	786.708.256	865.379.088	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan	IUP
14	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Poin	65,51	67,60	67,85	68,10	68,36	68,61	68,86	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						Perangkat Daerah	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
										dan Lingkungan Hidup	
15	Rumah tangga dengan Akses Hunian Layak Terjangkau dan Berkelanjutan	%	36,65	39,90	42,32	45,37	48,41	51,44	54,48	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
16	Persentase Desa Mandiri	%	23,64	26,21	29,06	31,92	34,47	37,32	39,87	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	IUP
17	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,24	0,26	0,28	0,30	0,32	0,34	0,36	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	IUP
18	Tingkat Inflasi	%	19,40	1,51 - 3,49	1,51 - 3,49	1,51 - 3,49	1,51 - 3,49	1,51 - 3,49	1,51 - 3,49	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Sekretariat Daerah	IUP
D. ASPEK PELAYANAN UMUM											
1	Indeks Reformasi Hukum	Poin	97,94	98	98,25	98,5	98,7	98,75	99	Sekretariat Daerah	IUP



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						Perangkat Daerah	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Poin	3,10	4,00	1,20	1,30	1,40	1,50	1,70	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	IUP 2026 Beralih ke Indeks Pemerintahan Digital
	Indeks Pemerintahan Digital	Poin	N/A	N/A	1,20	1,30	1,40	1,50	1,70	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	Indeks Pemerintahan Digital
3	Indeks Pelayanan Publik	Poin	4,38	4,40	4,40	4,45	4,50	4,55	4,60	Sekretariat Daerah	IUP
4	Indeks Integritas Nasional	Poin	69,33	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00	82,00	Inspektorat Daerah	
5	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100	100	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja	
6	Persentase Capaian Aksi HAM	%	55,30	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	Sekretariat Daerah	
8	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Poin	53.49	57.72	61.72	70.39	77.87	84.91	90.45	Satuan Polisi Pamong Praja	IUP
9	Indeks Daya Saing Daerah	Poin	3,44	3,56	3,74	3,82	3,90	3,98	4,06	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
E. INDIKATOR KINERJA KUNCI											
1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar											
1	Pendidikan										



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						Perangkat Daerah	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	APK PAUD	%	67,66	84,93	87,94	90,95	93,96	96,97	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2	APK SD	%	101,14	101,37	101,6	101,83	102,06	102,29	102,52	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
3	APM SD	%	95,76	96,94	97,55	98,16	98,77	99,38	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
4	APK SMP	%	101,35	102,88	103,88	104,88	105,88	106,88	107,88	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
5	APM SMP	%	84,27	89,54	91,55	93,56	95,57	97,58	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
6	Rasio Guru terhadap Siswa SD	Perbandingan	1:20	1:21	1:22	1:23	1:24	1:25	1:26	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
7	Rasio Guru terhadap Siswa SMP	Perbandingan	1:17	1:18	1:19	1:20	1:21	1:22	1:23	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
8	Persentase Pendidik berkualifikasi minimal S1	Persen	65,12	66,00	67,00	68,00	69,00	70,00	71,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
9	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 Jenjang PAUD	%	77,52	80,49	83,46	86,43	89,4	92,37	94,91	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SPM
10	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15 Jenjang SD/SMP	%	97,65	97,93	98,2	98,47	98,74	99,01	99,29	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SPM
11	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Kesetaraan	%	19,33	23,43	27,53	31,63	35,73	39,83	43,93	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SPM
12	Proporsi Jumlah Satuan PAUD	%	53,77	53,82	53,9	54	54,12	54,26	54,39	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SPM



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						Perangkat Daerah	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	Terakreditasi Minimal B										
13	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	%	80,32	77,76	78,26	78,76	79,26	79,76	80,26	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SPM
14	Iklim Inklusivitas Jenjang SD	%	64,50	67	69,5	72	74,5	77	79,5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SPM
15	Iklim Inklusivitas Jenjang SMP	%	58,02	60,42	62,82	65,22	67,62	70,02	72,42	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SPM
16	Iklim Keamanan Jenjang SD	%	8098	81,88	82,78	83,68	84,58	85,48	86,38	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SPM
17	Iklim Keamanan Jenjang SMP	%	70,97	72,47	73,97	75,47	76,97	78,47	79,97	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SPM
18	Iklim Kebinekaan Jenjang SD	%	75,14	76,14	77,14	78,14	79,14	80,14	81,14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SPM
19	Iklim Kebinakaan Jenjang SMP	%	69,6	70,6	71,6	72,6	73,6	74,6	75,6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SPM
2	Kesehatan										
1	Persentase Fasyankes yang Terpenuhi Kebutuhan Obat, Bahan Medis Habis Pakai dan Vaksin Tepat Waktu dan Tepat Jumlah	%	92	92	94	96	98	99	100	Dinas Kesehatan	
2	Persentase Fasyankes dengan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Sesuai Standar	%	N/A	50,68	55,51	60,34	65,17	70	74,83	Dinas Kesehatan	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						Perangkat Daerah	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
3	Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional	%	N/A	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
4	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pengawasan	%	N/A	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
5	Persentase Kecamatan dengan 30% Tempat Fasilitas Umum (TFU) Prioritas yang Memenuhi Syarat Inspeksi Kualitas Lingkungan dan Pemeriksaan/Uji Kualitas Kesehatan Lingkungan	%	N/A	25	30	35	50	45	50	Dinas Kesehatan	
6	Persentase Sinyal Peringatan Dini Penyakit Potensial KLB yang Ditindaklanjuti ≤ 24 Jam	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
8	Persentase Anak Berusia Dibawah Lima Tahun (Balita) Gizi Buruk Mendapatkan Tatalaksana Balita Gizi Buruk	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
9	Persentase Masyarakat yang	%	15	17	19	21	23	25	27	Dinas Kesehatan	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						Perangkat Daerah	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	Terbina Perilaku Hidup Sehat										
10	Universal Health Coverage (UHC)	%	84,08	98,6	98,6	98,8	98,8	99	99,5	Dinas Kesehatan	
11	Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH)	Poin	132	125	117	108	98	87	75	Dinas Kesehatan	
12	Angka Kematian Bayi (per 1000 KH)	Poin	9	8	7	7	6	6	5	Dinas Kesehatan	
13	Persentase Faskes yang Melayani Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
14	Persentase Faskes yang Melayani Kesehatan Tradisional Sesuai Standar	%	N/A	N/A	N/A	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
15	Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Skrining Kesehatan Jiwa pada Usia > 15 Tahun ≥ 50%	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
16	Persentase Jenis Layanan Kesehatan SPM yang Terpenuhi Sesuai Standar	%	100	N/A	N/A	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
17	Persentase Rujukan Pasien yang Dilakukan melalui Sistem Rujukan Terintegrasi	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
18	Persentase Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis yang Memiliki Legalitas	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						Perangkat Daerah	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	Praktik Sesuai Ketentuan										
19	Persentase Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan yang Sesuai dengan Kebutuhan Riil Fasilitas Kesehatan Berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	%	100	N/A	N/A	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
20	Persentase Usulan Distribusi SDM Berdasarkan Kompetensi dan Kualifikasi Kinerja	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
21	Persentase Tenaga Kesehatan yang Bersertifikat Kompetensi	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
22	Persentase Sarana Kefarmasian yang Memiliki Izin Usaha Sesuai Ketentuan	%	20	20	35	50	65	80	100	Dinas Kesehatan	
23	Persentase Pemohon Sarana Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas I Tertentu pada Perusahaan Rumah Tangga yang Memenuhi Persyaratan	%	100	N/A	N/A	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
24	Persentase Pelaku UMKM Pangan	%	35	35	40	45	50	55	60	Dinas Kesehatan	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						Perangkat Daerah	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	Rumahan yang Mendapatkan Legalitas dalam Memproduksi dan Memasarkan Produk Makanan/Minuman Tertentu										
25	Meningkatnya Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang Memenuhi Standar	%	81	81	84	85	90	92,5	95	Dinas Kesehatan	
26	Persentase Sentra Makanan Jajanan yang Memenuhi Persyaratan Kesehatan dan Keamanan Pangan	%	85	85	88	90	92,5	95	97,5	Dinas Kesehatan	
27	Persentase IRTP yang Memenuhi Persyaratan	%	20	20	30	40	52,5	65	75	Dinas Kesehatan	
28	Persentase Peningkatan Kemitraan Promkes	%	10	12	14	16	18	20	23	Dinas Kesehatan	
29	Persentase Tenaga Promosi Kesehatan dan Kader Kesehatan yang Dilatih dalam Upaya Promotif Preventif	%	90	91	92	93	94	97	98	Dinas Kesehatan	
30	Persentase Kader Kesehatan yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas dalam Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber	%	40	50	60	70	75	80	84	Dinas Kesehatan	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						Perangkat Daerah	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	Daya Masyarakat (UKBM)										
31	Persentase Fasyankes dengan Persyaratan Teknis Akreditasi yang Terpenuhi	%	N/A	N/A	N/A	N/A	95	95	100	Dinas Kesehatan	
32	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan	Poin	80,2	81,25	81,7	82,45	83,2	83,95	84,7	Dinas Kesehatan	
33	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang Sesuai Aturan	Poin	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
34	Persentase Laporan Barang Milik Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
35	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
36	Tingkat Pemenuhan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
37	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
38	Persentase Tingkat Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
39	Persentase Rumah Sakit Daerah dan Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Melaksanakan Tugas dan Kewenangannya sebagai Badan	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						Perangkat Daerah	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	Layanan Umum Daerah (BLUD)										
40	Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Tugas dan Kewenangannya sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
1	Tingkat Kemantapan Jalan	%	N/A	61,05	66,29	66,66	67,03	67,4	67,77	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
2	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	poin	70,45	70,56	55	56	57	58	59	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
3	Persentase Bangunan Gedung yang memenuhi Unsur Penyelenggaraan Bangunan Gedung	%	62,39	62,69	62,99	63,29	63,59	63,89	64,19	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						Perangkat Daerah	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
										dan Lingkungan Hidup	
4	Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang	%	26,62	22,00	22,02	22,02	22,03	22,03	22,04	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
5	Akses Air Minum Layak	%	66,93	67,45	67,95	68,45	68,95	69,45	69,95	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
6	Akses Sanitasi Layak	%	50,69	50,56	50,86	51,16	51,46	51,76	52,06	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman										
1	Persentase Kawasan Permukiman Yang Memenuhi Standar Layak	%	52,28	52,36	52,66	52,96	53,26	53,56	53,86	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						Perangkat Daerah	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
										Permukiman dan Lingkungan Hidup	
2	Penurunan Persentase Sisa Luasan Kawasan Kumuh Kewenangan Kabupaten di Bawah 10 Ha	%	N/A	17,19	17,14	17,09	17,04	16,99	16,94	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
3	Persentase Rumah Tangga Korban Bencana yang Menempati Rumah yang Memenuhi Syarat Ketahanan Bangunan	%	N/A	100	100	100	100	100	100	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat										
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja	Penambahan karena termasuk dalam IKK
2	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	%	100	100	100	100	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja	Penambahan karena termasuk dalam IKK
3	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Trantibum	%	100	100	100	100	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja	IKU
6	Sosial										



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						Perangkat Daerah	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SPM
2	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SPM
3	Persentase (%) Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SPM
4	Persentase (%) Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SPM



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						Perangkat Daerah	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
5	Persentase (%) Korban Bencana yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SPM
6	Persentase Wilayah yang Melakukan Pengelolaan Pendataan Fakir Miskin (DTSEN)	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
7	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Diberdayakan	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
8	Persentase Masyarakat yang Berada pada DTSEN Desil 1-5 yang Memperoleh Bantuan Sosial	%	N/A	60	61	62	63	64	65	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						Perangkat Daerah	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
9	Persentase PSKS Aktif	%	91,6	91,61	91,62	91,63	91,64	91,65	91,66	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
10	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Terstandar	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
11	Persentase (%) Daerah yang Aktif Melakukan Pemutakhiran Data Terpadu Penanggulangan Kemiskinan	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	IUP
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar											
1	Tenaga Kerja										
1	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	%	50,15	50,15	51,12	52,62	52,12	52,62	53,12	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						Perangkat Daerah	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
2	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	15,41	15,41	15,6	15,8	16	16,12	16,2	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
3	Tingkat pengangguran terbuka	%	3,74	3,59	3,44	3,29	3,14	2,99	2,84	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
4	Rasio penduduk yang bekerja	%	60,27	60,87	61,25	61,97	62,15	62,89	63,05	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
5	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
6	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	%	34,15	34,89	35,15	35,89	36,15	36,89	37,15	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
7	Persentase Pekerja Informal	%	73,78	72,15	71,8	70,2	69,85	68,15	67,7	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						Perangkat Daerah	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
8	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	%		2	2	2	2	2	2	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	IUP
9	Persentase Usia Kerja yang Bekerja	%		50,15	51,12	51,62	52,12	52,62	53,12		IKU
10	Persentase Perusahaan yang menerapkan upah minimum dan asuransi sesuai standar	%		15,41	15,6	15,8	16	16,12	16,2		IKU
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
1	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Poin	59,61	60,7	61,5	62,4	63,5	64,1	65	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	53,26	54	55	56	57	58	59	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PJPK
3	Persentase Pelaksanaan PUG	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						Perangkat Daerah	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	Termasuk PPRG pada Instansi Pemerintah									Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
4	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang Terfasilitasi	%	87	90	92	94	96	98	100	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
5	Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
6	Persentase Perempuan yang Memperoleh Akses dan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
7	Persentase Lembaga Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						Perangkat Daerah	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
										Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
8	Persentase Ketersediaan Data Gender dan Anak Tingkat Kabupaten	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
9	Persentase Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
10	Persentase Lembaga Layanan Pemenuhan Hak Anak yang Terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
11	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	60,82	62	63	64	65	66	67	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						Perangkat Daerah	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
										Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
12	Skor Capaian KLA	Skor	666,43	660	680	680	700	700	720	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
13	Skor Capaian Anugerah Parahita Ekapraya	Skor	N/A	-	601	601	620	620	640	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
14	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	%	7,25	7,37	7,5	7,62	7,74	7,87	7,99	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
15	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Tertangani oleh Instansi Terkait Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						Perangkat Daerah	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
										Perempuan dan Perlindungan Anak	
16	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	%	0,97	0,95	0,93	0,91	0,89	0,87	0,85	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
3	Pangan										
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Poin	88,45	88,66	88,88	89,11	89,35	89,60	89,86	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Dan Perikanan	
2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Poin	80,15	81,16	82,18	83,21	84,25	85,30	86,36	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Dan Perikanan	
3	Persentase Tingkat Konsumsi Energi	%	96,13	96,23	96,32	96,42	96,52	96,61	96,71	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Dan Perikanan	IKU
4	Presentase Tingkat Konsumsi Protein	%	102,84	102,94	103,05	103,15	103,25	103,36	103,46	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Dan Perikanan	IKU
4	Pertanahan										
1	Jumlah masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	Paket	4	2	2	2	2	2	2	Sekretariat Daerah	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						Perangkat Daerah	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
2	Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Poin	N/A	78,05	78,08	78,1	78,12	78,15	78,2	Sekretariat Daerah	IKU
5	Lingkungan Hidup										
2	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	%	1028	1030000000,00	1034	1040000000,00	1092	1114	1125	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Sudah Tidak Masuk kedalam IKU pada Penyusunan cascading
1	Indeks Kualitas Air	Poin	N/A	66,25	65,65	66,05	66,45	66,85	67,25	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
2	Indeks Kualitas Udara	Poin	N/A	72,39	72,59	72,79	72,99	73,19	73,39	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
3	Indeks Kualitas Lahan	Poin	N/A	63,72	63,79	63,86	63,93	64	64,07	Dinas Pekerjaan Umum Tata	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						Perangkat Daerah	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
										Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil										
1	Persentase Rata – Rata Kepemilikan Dokumen Kependudukan	%	95,41	97,12	98,27	98,62	98,97	99,33	99,68	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)	%	99,83	99,84	99,85	99,86	99,87	99,88	99,89	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
3	Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	86,4	90	95	96	97	98	99	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
4	Kepemilikan Akta Kelahiran	%	99	97,5	98	98,5	99	99,5	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
5	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama	%	45,76	50,85	55,93	61,02	66,1	71,19	76,27	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
6	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Balita	%	N/A	98,25	98,5	98,75	99	99,25	99,5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
7	Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kependudukan	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						Perangkat Daerah	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
										dan Pencatatan Sipil	
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
1	Persentase desa mandiri	%	23,64	26,21	29,06	31,92	34,47	37,32	39,87	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										
1	Angka Kelahiran Total (TFR) per Wanita Usia Subur (15-49 tahun)	Angka/Rate	2,11	2,11	2,1	2,1	2,09	2,09	2,09	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PJPk
2	Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara KB Modern (Demand Satisfied)	%	90,77	91,68	92,59	93,52	94,46	95,4	96,35	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PJPk
3	Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15 - 19 Tahun	Angka/Rate	29,7	29,6	29,4	29,3	29,1	29	28,8	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PJPk



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						Perangkat Daerah	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
4	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	Poin	79,8	81,3	82,6	83,9	85	86,1	87,1	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PJPK
5	Indeks Lansia Berdaya	Poin	55,4	55,8	56,2	56,6	57	57,3	57,7	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PJPK
6	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri	%	41,3	42,4	43,5	44,5	45,6	46,6	47,6	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PJPK
7	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Poin	59,9	65,1	68,6	70,8	72,3	73,2	73,8	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						Perangkat Daerah	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
8	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	%	14,7	13	11,8	10,8	10	9,4	9	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
9	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	Tahun	20,5	20,6	20,7	20,9	21	21,2	21,5	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
10	Persentase Kebutuhan ber KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeetneed)	%	7,2	7,1	7	6,9	6,8	6,7	6,6	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
11	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (CPR)	%	70,4	70,7	71,1	71,4	71,8	72,1	72,5	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						Perangkat Daerah	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
12	Persentase Pemenuhan BKB Kit/Stunting	%	19,72	24,36	29	33,64	38,28	42,92	47,56	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
13	Persentase Ketersediaan Data Keluarga	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
9	Perhubungan										
1	Rasio Konektivitas	%	40,25	44,05	44,84	45,63	46,43	47,22	48,02	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	Rata-Rata (Capaian Fasilitas Perlengkapan Jalan + V/C rasio di ruas jalan)
2	V/C Rasio di Jalan Kabupaten/Kota	Kriteria	Baik	N/A	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	
10	Komunikasi dan Informatika										
1	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet	%	N/A	17%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						Perangkat Daerah	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika										
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	85,71%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	
4	Indeks Domain Layanan SPBE	Poin	3,1	0	1,20	1,30	1,40	1,50	1,70	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	IKU
5	Indeks Kepuasan Informasi Publik	%	67,84	N/A	70	75	80	85	90	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	IKU
4	Indeks KAMI	Kategori	II	III	III	III	III	IV	IV	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	IKU
11	Koperasi Usaha kecil dan Menengah										
1	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0,69	0,7	0,71	0,72	0,73	0,74	0,75	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan	IUP



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						Perangkat Daerah	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
2	Persentase Koperasi Berkualitas	%	8	20	50	52,5	55	57,5	60	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan	
3	Laju Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	-4	2	2,6	2,78	2,91	3,28	3,43	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan	
4	Persentase Koperasi Sehat	%	78	79	80	80	81	83	85	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan	
5	Persentase Koperasi Aktif	%	60	60	62	64	66	68	70	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan	
6	Persentase Usaha Mikro	%	99,79	99,79	99,77	99,75	99,73	99,71	99,69	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan	
7	Persentase Usaha Mikro naik kelas	%	N/A	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan	
8	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirasusaha	%	N/A	10	11	12	13	14	15	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan	
12	Penanaman Modal										



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						Perangkat Daerah	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Nilai realisasi penanaman modal	Rp (juta)	51.700	56.870	62.040	67.210	72.380	77.550	82.720	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
2	IKM Pelayanan Perizinan	skor	86,2	86,3	86,4	86,5	86,6	86,7	86,8	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	IKU
3	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	135	142	149	156	163	170	177	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
4	Penerbitan perizinan dan non perizinan	NIB		5000	5500	6000	6500	7000	7500	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
5	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	%	3	2,8	2,9	3	3,1	3,2	3,3	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	IKU
6	Jumlah Pameran Penanaman Modal	Kegiatan		3	3	3	3	3	3	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						Perangkat Daerah	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
7	Jumlah SOP pelaksanaan pemberian insentif penanaman modal	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
13	Kepemudaan dan Olah Raga										
1	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	Poin	28,26	29,05	29,87	30,70	31,56	32,45	33,36	Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga	IKU
2	Rasio Kewirausahaan Pemuda	%	0,99	1	1,01	1,02	1,03	1,04	1,05	Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga	
3	Tingkat Prestasi Olahraga	Medali	52	20	70	35	40	45	80	Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga	IKU
4	Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga	%	59,5	59,5	60	60,5	61	61,5	62	Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga	IKU
5	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	%	21,2	21,35	21,5	21,65	21,8	21,95	22,1	Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga	
14	Statistik										
1	Indeks Pembangunan Statistik	Poin	N/A	2,69	2,76	2,83	2,90	2,95	3,02	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	IKU
15	Persandian										
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	36,28%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	Adanya Indeks KAMI



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						Perangkat Daerah	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
16	Kebudayaan										
1	Jumlah warisan budaya tak benda yang ditetapkan	Buah	2	2	3	3	3	3	4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2	Jumlah warisan budaya benda yang ditetapkan	Buah	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
3	Jumlah even kesenian tradisional yang dilenggarakan	Kegiatan	5	5	5	5	5	5	5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
4	Jumlah ritual adat istiadat yang dikelola	Kegiatan	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
5	Jumlah situs/cagar budaya	Cagar Budaya	43	43	44	44	44	44	45	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
17	Perpustakaan										
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Skor	72,15	72,20	72,22	72,23	72,24	72,25	72,26	Sekretariat Daerah	
2	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Poin	78,00	78,05	78,08	78,10	78,12	78,15	78,20	Sekretariat Daerah	IKU
3	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Skor	5	1	15	2	25	3	35	Sekretariat Daerah	
4	Presentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	%	1	1,05	1,1	1,15	1,2	1,25	1,3	Sekretariat Daerah	
5	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Skor	1	1,02	1,06	1,1	1,12	1,16	1,2	Sekretariat Daerah	
6	Jumlah pemasyarakatan	TMB	97	100	115	120	125	130	135	Sekretariat Daerah	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						Perangkat Daerah	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	gemar membaca di masyarakat										
7	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialihmedia (digitalisasi) / terdaftar yang ada di wilayahnya	Paket	4	5	6	7	8	9	10	Sekretariat Daerah	
8	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	Koleksi	50	51	52	53	54	55	56	Sekretariat Daerah	
18	Kearsipan										
1	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan pengelolaan arsip secara baku	Persen	3220 (19/59)	3389 (20/59)	4237 (25/59)	5084 (30/59)	5932 (35/59)	6779 (40/59)	7627 (45/59)	Sekretariat Daerah	
2	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	51,25	51,66	53,78	55,9	58,02	60,14	62,26	Sekretariat Daerah	
3	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek	%	39,16	40	42	45	47	50	52	Sekretariat Daerah	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						Perangkat Daerah	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara pemerintahan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat										
4	Indeks Hasil Pengawasan Arsip Internal	Poin	44,69	44,8	49,28	54,21	59,63	65,59	72,15	Sekretariat Daerah	IKU
3. Urusan Pemerintahan Pilihan											
1	Kelautan dan Perikanan										
1	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	%	2,9	1,50	1,50	1,65	1,82	2,00	2,20	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Dan Perikanan	IKU
2	Angka Konsumsi Ikan	kg/kapita	17,66	18,80	20,00	21,29	22,65	24,11	24,15	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Dan Perikanan	
3	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	kelompok	10,00	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Dan Perikanan	
2	Pariwisata										
1	Jumlah PAD Sektor Pariwisata	Rupiah	12.372.290.170	12.372.290.170	12.743.458.875	13.125.762.641	13.519.535.521	13.925.121.586	14.342.875.234	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
2	Pertumbuhan Investasi Industri Kreatif	Rupiah (Milyar)	211,46	211,46	215,69	219,92	224,15	228,38	232,61	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	IKU
3	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	1.031.163	1.031.163	1.036.000	1.046.000	1.066.000	1.096.000	1.200.000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	IUP



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						Perangkat Daerah	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
5	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	%	31,67	2	2,25	2,30	2,35	2,4	2,5	Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga	IKU
4	Persentase Peningkatan Pelaku Ekraf dibina yang memiliki HAKI	%	1,18	3,21	4,86	6,19	7,23	8,77	9,96	Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga	
5	Persentase Tenaga Kerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Tersertifikasi	%	1,2	1,5	1,8	1,9	2,1	2,5	3	Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga	
6	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Orang	1.686	1.700	1.800	1.850	1.900	1.950	2.000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
3 Pertanian											
1	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%	N/A	0,10	0,10	0,15	0,15	0,18	0,18	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Dan Perikanan	
2	Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura	%	N/A	0,10	0,10	0,15	0,15	0,18	0,18	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Dan Perikanan	IKU
3	Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan	%	N/A	0,10	0,10	0,15	0,15	0,18	0,18	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Dan Perikanan	IKU
4	Peningkatan produksi komoditas peternakan	ton	75.387	75.922	76.461	77.073	77.690	78.350	79.016	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Dan Perikanan	
5	PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	Rp	N/A	18.692,86	19.066,71	19.448,05	19.837,01	20.233,75	20.638,42	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Dan Perikanan	IKU



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						Perangkat Daerah	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
6	Persentase Peningkatan Produksi Peternakan yang Aman, Sehat, Utuh, Halal (ASUH)	%	N/A	0,71	0,71	0,80	0,80	0,85	0,85	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Dan Perikanan	IKU
7	Jumlah Prasarana dan Sarana Pertanian yang dibangun	Unit	N/A	583	589	595	601	607	613	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Dan Perikanan	IKU
8	Persentase Peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok Tani	%	N/A	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Dan Perikanan	IKU
4	Perdagangan										
1	PDRB Sektor Perdagangan	Milyar Rupiah	8.959,53	9.697,99	10.426,24	11.209,17	12.050,89	12.955,81	13.928,69	BPS	
2	Ekspor Bersih Perdagangan	\$	23.807.988	24.879.348	25.998.918	27.168.870	28.391.469	29.669.085	30.855.848	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan	
3	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	N/A	5,5	6	6,5	7	7,5	8	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan	
4	Persentase sarana prasarana perdagangan yang berfungsi	%	N/A	50	55	60	65	70	75	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan	
5	Indeks Stabilitas Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Penting	%	96,25	96,25	96,25	96,25	96,3	96,3	96,35	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						Perangkat Daerah	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
6	Persentase kenaikan nilai ekspor produk Kab. Tasikmalaya	%	1,11	5	5	5	5	5	5	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan	
7	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	55,33	60	64	68	74	76	80	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan	
8	Persentase alat-alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang Berlaku	%	56,23	56,24	61,24	66,24	71,24	76,24	81,24	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan	
5 Perindustrian											
1	Pertambahan jumlah Industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	%	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan	
2	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	%	N/A	10,5	11,5	12	12,5	13	13,5	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan	
3	Laju Pertumbuhan Industri Non Migas	%	N/A	10	10	10,5	11	11,5	12	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan	
4	Nilai Produksi Industri Pengolahan	Triliun Rupiah	5,58	5,58	6,73	7,43	8,25	9,2	10,3	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						Perangkat Daerah	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
5	Persentase Penduduk Bersertifikat Keahlian									Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan	
6 Transmigrasi											
1	Jumlah transmigran yang telah memiliki sertifikat pelatihan	KK	90	90	90	90	90	90	90	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Translok	Paket	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
4. Unsur Penunjang											
1 Sekretariat Daerah											
1	Nilai Reformasi Birokrasi General (RB General)	Nilai	69,81	70	70,5	71	71,5	72	72,5	Sekretariat Daerah	IKU
2 Sekretariat DPRD											
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) anggota DPRD	poin	80	N/A	80,40	80,40	80,45	80,75	81,25	Sekretariat DPRD	IKU
5. Unsur Pendukung											
1 Perencanaan											
1	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada	Poin	21,87	21,90	22	22,10	22,20	22,30	22,40	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan	IKU



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						Perangkat Daerah	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	Penilaian SAKIP Kabupaten									Pengembangan Daerah	
2	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Poin	17,74	17,95	18,25	18,55	18,85	19,15	19,50	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	IKU
2	Keuangan										
1	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	10,06	11,01	11,06	11,11	11,16	11,21	11,26	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	
2	Persentase SILPA terhadap APBD	%	1,04	4,90	4,85	4,80	4,75	4,70	4,65	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	
3	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	7,08	7,08	6,88	6,68	6,48	6,28	6,08	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	
4	Rasio PAD	%	10,06	11,01	11,06	11,11	11,16	11,21	11,26	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	63,66	64,23	64,8	65,37	65,94	66,51	67,08	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	
6	Deviasi realisasi Belanja terhadap	%	2,72	2,67	2,62	2,57	2,52	2,47	2,42	Badan Pengelolaan	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						Perangkat Daerah	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	Belanja Total dalam APBD									Keuangan Dan Pendapatan Daerah	
7	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	5,60	5,65	5,70	5,75	5,80	5,85	5,90	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	
8	Manajemen Aset	%	100	100	100	100	100	100	100	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	
9	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	1,04	4,90	4,85	4,80	4,75	4,70	4,65	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	
10	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya ==> pendapatan pemerintah/pdb	%	0,84	0,96	1,08	1,20	1,32	1,44	1,56	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	
11	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB > pajak daerah/pdb	%	0,24	0,26	0,28	0,30	0,32	0,34	0,36	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	
12	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	84,007	84,50	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	IKU



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						Perangkat Daerah	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
13	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel, Efisien dan Efektif	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	IKU
14	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya	%	3,02	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	IKU
3	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan										
1	Indeks Sistem Merit	Poin	313	313	328	335	345	351	359	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
4	Penelitian dan Pengembangan										
1	Persentase Hasil Kajian Penelitian Daerah Yang Dirujuk Dalam Dokumen Perencanaan	%	100	100	100	100	100	100	100	Badan Pencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan	IKU
6. Unsur Pengawasan											
1	Pengawasan										
1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level (Skor)	Level 3 Skor 3,013	Level 3 Skor 3,1	Level 2 Skor 2,9	Level 3 Skor 3,0	Level 3 Skor 3,1	Level 3 Skor 3,2	Level 3 Skor 3,3	Inspektorat Daerah	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						Perangkat Daerah	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
2	Persentase tindaklanjut rekomendasi APIP	%	90,29	92	92,5	93	93,5	94	95	Inspektorat Daerah	IKU
3	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level (Skor)	Level 3 Skor 3,230	Level 3 Skor 3,3	Level 2 Skor 2,9	Level 3 Skor 3,0	Level 3 Skor 3,1	Level 3 Skor 3,2	Level 3 Skor 3,3	Inspektorat Daerah	IKU

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Keterangan : - IUP merupakan Indikator Utama Pembangunan yang terdapat pada RPJPD Kab. Tasikmalaya Tahun 2025-2029



BAB V

PENUTUP





BAB V

PENUTUP

RPJMD merupakan dokumen rencana pembangunan daerah yang otentik sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang yang harus ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan, khususnya penyelenggara pemerintahan daerah. Untuk menjamin pelaksanaan RPJMD, maka diperlukan penjabaran secara teknis dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang berpedoman pada RPJMD. Sedangkan untuk penjabaran dalam pelaksanaan tahunan, RPJMD ini dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) secara sinergi dan berkesinambungan.

Dalam implementasi visi, misi, dan program prioritas RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 perlu mengantisipasi hal-hal yang dapat menghambat ketercapaiannya. Oleh karena itu, perlu manajemen risiko untuk mencegahnya. Manajemen risiko mendukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah dan mengidentifikasi, menganalisis dan mengendalikan risiko serta memantau aktivitas pengendalian risiko di lingkungan pemerintah daerah.

Dalam melakukan manajemen risiko, bukan hanya identifikasi risiko dan penilaian risiko. Namun setelah dilakukan identifikasi dan penilaian risiko dilakukan mitigasi risiko yaitu langkah untuk melakukan pencegahan terhadap risiko yang telah diidentifikasi, hal ini dilakukan untuk dapat mengurangi *impact* atau *probability* atau mungkin juga untuk mencegah agar risiko tidak terjadi. Dalam melakukan mitigasi risiko terdapat beberapa cara salah satunya adalah penentuan strategi penanganan yang terdiri dari 4 (empat) macam, yaitu menerima risiko, transfer risiko, mengurangi risiko, dan menghindari risiko.



5.1. Pedoman Transisi

Pedoman transisi diperlukan dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir. Dalam rangka keberlanjutan pembangunan Kabupaten Tasikmalaya, maka pedoman transisi ditetapkan sebagai berikut:

1. Perubahan RKPD Tahun 2025

Penyusunan RKPD Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 karena dokumen RPJMD 2025-2029 masih belum ditetapkan. Dikarenakan RKPD Tahun 2025 harus menjadi satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari kebijakan dan indikasi program prioritas dalam RPJMD Tahun 2025-2029, maka penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 perlu memperhatikan visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah terpilih dengan mempedomani RPJMN Tahun 2025-2029. Selanjutnya, Perubahan RKPD 2025 tersebut digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

2. RKPD Tahun 2026

Dikarenakan saat penyusunan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026 dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 belum ditetapkan, maka penyusunan RKPD Tahun 2026 berpedoman pada Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 yang harus memperhatikan visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah terpilih dengan mempedomani RPJMN Tahun 2025-2029.

3. RKPD Tahun 2030

Penyusunan RKPD Tahun 2030 disusun tetap dengan berpedoman pada dokumen RPJMD 2025-2029 dan RPJPD Tahun 2025-2045, serta memperhatikan rancangan RPJMN Tahun 2029-2034.



Pedoman transisi seperti diuraikan di atas bersifat dinamis menyesuaikan dengan perkembangan regulasi yang terkait dengan proses penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan Pilkada serentak pada Tahun 2029.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau patokan dalam pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029. Tujuan dibuatnya kaidah pelaksanaan yaitu menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kaidah pelaksanaan Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 diantaranya sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
2. Setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Subkegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD ini;
3. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Tahun 2025-2029 untuk setiap tahunnya disusun melalui RKPD yang dalam penyelenggaraannya disusun oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan Perencanaan;
4. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan RPJMD Tahun 2026-2029 menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja RPJMD Tahun 2025-2029, maka dokumen RPJMD ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
5. RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, dan selanjutnya RKPD merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).



6. Berdasarkan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 bahwa RPJMD Tahun 2025-2029 diinput dan diproses ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.



BUPATI TASIKMALAYA,

CECEP NURUL YAKIN



Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya
2025